PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 - 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2021



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021–2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SULAWESI UTARA

DAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
9. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
11. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi selanjutnya disingkat RTRWP adalah dokumen Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Utara untuk kurun waktu 20 (duapuluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 20 (duapuluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen rencana pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
(2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRWP dan RPJMN.
(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi:
    a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD;
    b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
    c. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

(1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.	bab I	: Pendahuluan;
b.	bab II	: Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c.	bab III	: Gambaran Keuangan Daerah;
d.	bab IV	: Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
e.	bab V	: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
f.	bab VI	: Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
g.	bab VII	: Rencana Pengembangan Wilayah Sulawesi Utara;
h.	bab VIII	: Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
i.	bab IX	: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
j.	bab X	: Penutup.

(2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah Kabupaten/Kota.
(2) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah.
(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

Pasal 5

(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup:
    a. pelaksanaan RPJMD; dan
    b. Pelaksanaan Renstra-PD.
(3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
    a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJMD;
    b. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD; dan
    c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.
(4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra-PD.
(5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra-PD.
(6) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra-PD telah dilaksanakan melalui Renja-PD.
(7) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD kepada Gubernur.
(8) Tata cara Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengendalian dan Evaluasi Renstra-PD

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.
(4) Tata cara pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Evaluasi Hasil RPJMD

Pasal 7

(1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi hasil RPJMD.
(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
(4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Gubernur.
(5) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dalam hal Peraturan Daerah tentang RPJMD belum diundangkan, maka penyusunan RKPD berpedoman pada

RPJPD dan mengacu pada RPJMN.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 26 September 2021
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 26 September 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

EDWIN HARMINTO SILANGEN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (4-136/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan nasional diakomodir dalam rencana pembangunan daerah. Untuk menjaga kesinambungan sistem perencanaan pembangunan, perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mempedomani dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Provinsi Sulawesi Utara baru saja melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 9 Desember 2020. Oleh karena itu, perlu menjabarkan visi, misi dan program prioritas gubernur dan wakil gubernur terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021–2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan kepala daerah yang akan

menjabarkan visi, misi, dan program prioritas ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026.

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi kedudukan RPJMD, sistematika RPJMD, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi:

a. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan;
c. Mengintegrasikan arahan pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW dengan RPJMD;
d. Disusun sesuai kondisi dan potensi yang dimiliki masing- masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

a. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah serta kebijakan dan strategi pembangunan daerah tahun 2021-2026;
b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) antara tahun 2022 sampai tahun 2026;
c. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah antara tahun 2022 sampai tahun 2026;
d. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis tahun 2022 sampai tahun 2026, termasuk dalam menentukan program-program prioritas;
e. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan;
f. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan; dan

g. sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan *(planning)*, pengorganisasian *(organizing)*, pelaksanaan *(actuating)*, pengendalian *(controlling)* dan evaluasi pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyusun dokumen RPJMD yang akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Utara untuk periode tahun 2021–2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR

Daftar Isi

BAB/HAL

Batang Tubuh Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026

Daftar Isi i
Daftar Gambar ix
Daftar Grafik xi
Daftar Tabel xii
Daftar Singkatan xxi
Daftar Lampiran xxv

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang..... I/1
1.2. Dasar Hukum I/3
1.3. Hubungan Antar Dokumen I/6
1.4. Maksud dan Tujuan..... I/6
1.5. Sistematika Penulisan..... I/7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI..... II/1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah II/1
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi II/1
2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografi II/2
2.1.1.3. Kondisi Topografi II/3
2.1.1.4. Kondisi Geologi II/3
2.1.1.5. Kondisi Hidrologi II/4
2.1.1.6. Kondisi Klimatologi II/5
2.1.1.7. Penggunaan Lahan II/9
A. Kawasan Lindung II/10
B. Kawasan Budidaya..... II/11
2.1.2. Aspek Demografi..... II/12
2.1.2.1. Jumlah dan Komposisi Penduduk menurut Umur II/12
2.1.2.2. Struktur Penduduk..... II/13
2.1.2.3. Dinamika Penduduk II/14
2.1.2.4. Distribusi/Persebaran Penduduk..... II/15
2.1.2.5. Komposisi Penduduk dan Populasi Masyarakat Ketenagakerjaan II/16
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT..... II/17
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II/17
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB II/17
2.2.1.2. Laju Inflasi..... II/22
2.2.1.3. Indeks Gini II/23
2.2.1.4. Distribusi Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia II/23
2.2.1.5. Persentase Penduduk Miskin II/24
2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II/29
2.2.1.7. Indeks Pembangunan Gender (IPG)... II/30

2.2.1.8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) II/31
2.2.1.9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) II/33
2.2.1.10. Indeks Kepuasan Masyarakat II/34
2.2.1.11. Indeks Reformasi Birokrasi II/35
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial II/42
2.2.2.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah II/38
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga II/40
2.2.3.1. Seni Budaya II/40
2.2.3.2. Olah Raga II/46
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM II/47
2.3.1. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB DENGAN PELAYANAN DASAR II/47
2.3.1.1. Pendidikan Menengah II/47
A. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar II/48
B. Angka Partisipasi Sekolah II/48
C. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah II/49
D. Angka Kelulusan Pendidikan Menengah II/50
E. Rasio Guru/Murid Pendidikan Menengah II/51
F. Rata-rata Angka Melek Huruf Penduduk Usia di atas 15 Tahun II/52
2.3.1.2. Kesehatan II/53
a) Angka Harapan Hidup II/53
b) Tenaga Kesehatan II/54
c) Fasilitas Kesehatan II/54
d) Angka Kematian Balita, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu ... II/55
e) Prevalensi Stunting II/56
f) Pandemi COVID-19 ..... II/57
g) Vaksinasi II/58
2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II/60
A. Air Minum II/60
B. Air Limbah Domestik II/64
C. Jalan II/69
D. Irigasi II/70
E. Penataan Ruang II/71
2.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman II/73
A. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat II/73
B. Rasio rumah layak huni II/74
C. Cakupan ketersediaan rumah layak huni II/74
D. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau II/75
E. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU II/75
F. Penanganan Kawasan Kumuh ... II/76

2.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat II/76
2.3.1.6. Sosial..... II/77
2.3.2. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR..... II/79
2.3.2.1. Tenaga Kerja II/79
2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II/79
2.3.2.3. Pangan..... II/80
A. Ketersediaan Pangan II/80
B. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) II/80
C. Produksi Padi dab Beras II/82
D. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) II/84
2.3.2.4. Pertanahan II/84
2.3.2.5. Perhubungan II/85
A. Perhubungan Darat..... II/85
B. Perhubungan Laut II/87
C. Perhubungan Udara II/90
D. Jasa Perhubungan Lainnya..... II/91
2.3.2.6. Lingkungan Hidup II/92
A. Indeks Kualitas Air..... II/92
B. Indeks Kualitas Udara..... II/93
C. Indeks Tutupan Lahan II/93
D. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) . II/94
E. Persampahan II/95
F. Limbah B3..... II/101
2.3.2.7. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk ber KTP II/102
2.3.2.8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II/103
2.3.2.9. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..... II/104
A. Laju Pertumbuhan Penduduk ... II/104
B. Cakupan KB Aktif II/105
2.3.2.10. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah II/105
2.3.2.11. Penanaman Modal II/109
2.3.2.12. Kepemudaan Dan Olahraga II/110
2.3.2.13. Statistik II/112
2.3.2.14. Persandian..... II/112
2.3.2.15. Komunikasi dan Informatika..... II/113
2.3.2.16. Kebudayaan II/115
2.3.2.17. Penanggulangan Bencana II/120
2.3.2.18. Perpustakaan..... II/121
2.3.2.19. Kearsipan..... II/122
2.3.3. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN..... II/123
2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan..... II/123
2.3.3.2. Pariwisata II/123
2.3.3.3. Pertanian II/124
A. Persentase Pertumbuhan Sub Kategori Tanaman Pangan Terhadap PDRB II/124

B. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB II/124
C. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB..... II/125
2.3.3.4. Kehutanan II/125
A. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB..... II/125
B. Indeks Tutupan Hutan II/126
2.3.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral ... II/126
A. Rasio Elektrifikasi II/126
B. Energi Baru Terbarukan..... II/127
C. Sumber Daya Mineral..... II/128
2.3.3.6. Perdagangan II/129
2.3.3.7. Perindustrian..... II/134
2.3.3.8. Transmigrasi..... II/135
2.3.4. FOKUS PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN..... II/139
2.3.4.1. Perencanaan II/139
2.3.4.2. Keuangan..... II/141
2.3.4.3. Kepegawaian..... II/144
2.3.4.4. Pendidikan dan Pelatihan II/146
2.3.4.5. Penelitian dan Pengembangan II/147
2.3.4.6. Pengawasan..... II/148
2.3.4.7. Kesekretariatan DPRD II/148
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH II/149
2.4.1. FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH II/149
A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita II/149
B. Nilai Tukar Petani II/150
2.4.2. FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR II/152
A. Ketaatan Terhadap RTRW II/152
B. Luas Wilayah Produktif..... II/152
2.4.3. FOKUS IKLIM BERINVESTASI II/153
A. Angka Kriminalitas II/153
B. Jumlah Demonstrasi..... II/154
2.5. EVALUASI PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL's* (TPB/SDG's) DI PROVINSI SULAWESI UTARA II/154
2.6. KAJIAN MUATAN KLHS: DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI UTARA ... II/155
A. Skenario Status Daya Dukung Air..... II/155
B. Skenario Status Daya Dukung Pangan..... II/158
C. Skenario terhadap perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup terhadap mitigasi bencana Longsor II/160
D. Skenario terhadap Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup terhadap Mitigasi Bencana Banjir..... II/161
E. Skenario terhadap Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup terhadap Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan II/162
F. Skenario terhadap kinerja layanan/ jasa ekosistem terhadap Jasa Ekosistem Penyedia Air..... II/164

G. Skenario terhadap Efisiensi pemanfataan sumber daya alam terhadap pemurnian air. II/165
H. Skenario terhadap Tingkat kerentanan dan kapasitas terhadap perubahan iklim terhadap jasa ekosistem Kualitas udara II/167
I. Skenario terhadap Tingkat kerentanan dan kapasitas terhadap perubahan iklim terhadap jasa ekosistem Pengatur Iklim..... II/168
J. Skenario terhadap Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati terhadap pendukung habitat dan keanekaragaman hayati II/170

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
3.1. KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONAL . III/1
3.2. KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH SULAWESI UTARA III/1
3.3. KINERJA KEUANGAN DAERAH III/3
3.3.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016-2020 ..... III/3
3.3.1.1 Perkembangan Pendapatan Daerah..... III/3
3.3.1.2 Perkembangan Belanja Daerah..... III/6
3.3.1.3 Perkembangan Pembiayaan Daerah III/7
3.3.2 Neraca Daerah III/13
3.3.2.1 Aset III/16
3.3.2.2 Kewajiban..... III/20
3.3.2.3 Ekuitas Dana III/21
A. Rasio Likuiditas III/21
1. Rasio Lancar III/22
2. Rasio *Quicks*..... III/22
B. Rasio Solvabilitas..... III/22
1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset..... III/22
2. Rasio Hutang Terhadap Modal III/23
3.3.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III/23
3.3.3.1 Proporsi Penggunaan Anggaran..... III/23
3.3.3.2 Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur..... III/24
3.3.3.3 Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama III/27
3.3.3.4 Analisis Pembiayaan..... III/29
3.4. KERANGKA PENDANAAN..... III/32
3.4.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja..... III/32
3.4.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan III/35

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN IV/1
4.1.1. Aspek Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat..... IV/1
4.1.2. Aspek Lingkungan Hidup IV/1
4.1.3. Aspek Bidang Ekonomi dan Ketahanan Pangan. IV/1
4.1.4. Aspek Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah IV/2
4.1.5. Aspek Tata Kelola Pemerintahan..... IV/2
4.2. ISU STRATEGIS IV/2
4.2.1. Isu Internasional IV/2
4.2.2. Isu Nasional..... IV/4

4.2.3. Isu Strategis Pembangunan Sulawesi Utara 2021-2026 ..... IV/4

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1. Visi V/1
5.2. Misi..... V/2
5.3. Prioritas Pembangunan Daerah V/4
5.4. Tujuan dan Sasaran V/5

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH VI/2
A. Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara. VI/2
B. Penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa. VI/2
C. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas..... VI/3
D. Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan. VI/4
E. Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah. VI/4
6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH..... VI/8
A. Arah Kebijakan Tahun 2022 ..... VI/8
B. Arah Kebijakan Tahun 2023 ..... VI/9
C. Arah Kebijakan Tahun 2024 ..... VI/9
D. Arah Kebijakan Tahun 2025 ..... VI/9
E. Arah Kebijakan Tahun 2026 ..... VI/10
6.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH..... VI/10

BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI UTARA
7.1. Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 ..... VII/1
7.2. Capaian Pembangunan Wilayah Tahun 2016 – 2020 . VII/5
7.2.1 Capaian Pembangunan Antar Wilayah Klaster 2016-2020..... VII/5
7.2.2 Perkembangan Wilayah Berdasarkan Klaster VII/6
A. Klaster Kabupaten Kepulauan VII/6
A.1. Kabupaten Kepulauan Sitaro VII/6
A.2. Kabupaten Kepulauan Sangihe..... VII/7
A.3. Kabupaten Kepulauan Talaud VII/8
B. Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya .. VII/9
C. Klaster Wilayah Minahasa Bagian Tengah (Selatan, Tenggara, Induk, dan Tomohon) VII/13
D. Klaster Wilayah Bagian Utara mencakup Kota Manado-Minahasa Utara-Kota Bitung—sebagai Wilayah Cepat Tumbuh di Sulawesi Utara ... VII/14
7.3. Lingkungan dan Isu Strategis VII/17
7.3.1. Ketimpangan wilayah berdasarkan indikator ekonomi dan sosial..... VII/20
1. Klaster Wilayah Kabupaten Kepulauan VII/19
2. Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya .. VII/19
3. Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian Tengah, Selatan/Tenggara dan Tomohon VII/20
4. Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian Utara-Manado-Bitung..... VII/21
7.3.2. Pemenuhan infrastruktur dasar 100 – 0 – 100 .. VII/24

A.1. Capaian Ketersediaan Air Minum Tahun 2019 ..... VII/24
A.2. Capaian akses sanitasi layak tahun 2019 .. VII/26
A.3. Capaian persentase pengurangan dan penanganan sampah tahun 2019..... VII/28
A.4. Permukiman Kumuh..... VII/28
7.3.3. Kondisi Provinsi Sulawesi Utara terhadap Pengarusutamaan dalam RPJMN 2020 – 2024 .. VII/33
7.4. Sasaran, Indikator dan Target..... VII/32
7.5. Arah Kebijakan dan Strategi VII/35
7.5.1. Strategi Pembangunan Wilayah Berdasarkan Klaster Wilayah VII/39
A. Klaster Wilayah Kepulauan..... VII/39
B. Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya ... VII/42
C. Klaster Wilayah Minahasa Raya (Selatan, Tenggara, Tengah/Induk, dan Tomohon) VII/47
D. Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian (Utara, Manado, dan Bitung), wilayah Cepat Tumbuh..... VII/52
E. Pembangunan Antar Klaster Wilayah Minahasa Raya dan Bolaang Mongondow Raya dalam Koridor Pantai Selatan VII/56
7.5.2. Kawasan Super Hub Sulawesi Utara VII/57
7.6. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah . VII/59
7.7. Strategi Pendanaan Pembangunan Daerah VII/63

BAB VIII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
8.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan VIII/1
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar..... VIII/4
1. Pendidikan..... VIII/4
2. Kesehatan..... VIII/7
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... VIII/5
4. Perumahan dan Kawasan permukiman VIII/6
5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat..... VIII/7
6. Sosial..... VIII/7
B. Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar..... VIII/8
1. Tenaga Kerja..... VIII/8
2. Pengarusutamaan Perempuan dan Perlindungan Anak..... VIII/9
3. Pangan VIII/10
4. Pertanahan..... VIII/11
5. Lingkungan Hidup..... VIII/11
6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil..... VIII/13
7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa..... VIII/13
8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana VIII/14
9. Perhubungan..... VIII/14
10. Komunikasi dan Informatika VIII/16
11. Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah VIII/16
12. Penanaman Modal..... VIII/17
13. Kepemudaan dan Olahraga..... VIII/18
14. Statistik..... VIII/18

15. Persandian..... VIII/18
16. Kebudayaan..... VIII/19
17. Perpustakaan VIII/19
18. Kearsipan VIII/19
C. Urusan Pilihan VIII/20
1. Kelautan dan Perikanan VIII/20
2. Pariwisata..... VIII/21
3. Pertanian..... VIII/22
4. Kehutanan VIII/23
5. Energi dan Sumberdaya Mineral VIII/24
6. Perdagangan..... VIII/25
7. Perindustrian VIII/26
8. Transmigrasi VIII/27
D. Unsur Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan ... VIII/27
1. Sekretariat Daerah VIII/27
2. Sekretariat DPRD VIII/28
E. Unsur Fungsi Penunjang urusan pemerintahan..... VIII/28
1. Perencanaan..... VIII/28
2. Keuangan VIII/29
3. Kepegawaian VIII/30
4. Pendidikan Dan Pelatihan VIII/30
5. Penelitian Dan Pengembangan VIII/30
6. Penghubung VIII/30
7. Pengelolaan Perbatasan..... VIII/30
F. Unsur Fungsi Pengawasan Urusan Pemerintahan.. VIII/31
1. Inspektorat Daerah..... VIII/31
G. Unsur Pemerintahan Umum VIII/31
1. Kesbangpol..... VIII/31
8.2. Kerangka Pendanaan Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah..... VIII/32

BAB IX KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
9.1. Indikator Kinerja Utama Daerah IX/1
9.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah IX/3

BAB X PENUTUP
10.1. Kaidah Pelaksanaan..... X/1
10.2. Pedoman Transisi..... X/2

Daftar Gambar

NOMOR	NAMA GAMBAR	BAB/HAL.
Gambar 1.1.	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I/6
Gambar 2.1.	Peta Provinsi Sulawesi Utara	II/1
Gambar 2.2.	Peta Posisi Provinsi Sulawesi Utara Sebagai Gerbang Utara Indonesia	II/2
Gambar 2.3.	Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	II/36
Gambar 2.4.	Peta Pesebaran COVID-19 di Sulawesi Utara.....	II/57
Gambar 2.5.	Update Vaksinasi COVID-19 (Per tanggal 31 Juli 2021).....	II/59
Gambar 2.6.	Pelayanan SPALD-S Kualitas Pelayanan Akses Aman	II/64
Gambar 2.7.	IPLT Di Kota Bitung Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.....	II/68
Gambar 2.8.	Selisih produksi padi 2019 terhadap produksi padi 2018 (Ton-GKG)	II/83
Gambar 2.9.	Mekanisme Penanganan dan Pengurangan Sampah Berkelanjutan	II/97
Gambar 2.10.	Status Daya Dukung Air dan Pola Ruang Provinsi Sulawesi Utara.....	II/155
Gambar 2.11.	Status Daya Dukung Air Provinsi Sulawesi Utara..	II/156
Gambar 2.12.	Status Daya Dukung Pangan Provinsi Sulawesi Utara.....	II/159
Gambar 2.13.	Skenario Muatan KLHS Status Daya Dukung Pangan terhadap Pola Ruang RTRW Provinsi Sulawesi Utara.....	II/159
Gambar 2.14.	Skenario Pengaturan Mitigasi Bencana Longsor Provinsi Sulawesi Utara	II/160
Gambar 2.15.	Skenario Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir Provinsi Sulawesi Utara	II/162
Gambar 2.16.	Skenario Pengaturan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sulawesi Utara.....	II/163
Gambar 2.17.	Skenario Penyedia Air di Provinsi Sulawesi Utara..	II/165
Gambar 2.18.	Skenario Pemurnian Air di Provinsi Sulawesi Utara.....	II/166
Gambar 2.19.	Skenario Kualitas Udara di Provinsi Sulawesi Utara.....	II/167
Gambar 2.20.	Skenario Kualitas Udara di Provinsi Sulawesi Utara.....	II/170
Gambar 2.21.	Skenario Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati di Provinsi Sulawesi Utara.....	II/171
Gambar 7.1.	Pemetaan wilayah berdasarkan perbandingan PDRB per Kapita Tahun 2019 (sumbu X) dan IPM Tahun 2020 (Sumbu Y).....	VII/21
Gambar 7.2.	Peta Kuadran perbandingan PDRB per Kapita Tahun 2019 (sumbu X) dan IPM Tahun 2020 (Sumbu Y)	VII/22

Gambar 7.3. Peta kuadran perbandingan PDRB per Kapita Tahun 2016 dan IPM Tahun 2017 dan PDRB per Kapita Tahun 2019 dan IPM Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Utara VII/22
Gambar 7.4. Pemetaan Wilayah berdasarkan IPM 2020..... VII/22
Gambar 7.5. Pemetaan Wilayah berdasarkan Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Tahun 2020 ..... VII/23
Gambar 7.6. Pemetaan Wilayah berdasarkan Stunting dan Kemiskinan Tahun 2020..... VII/23
Gambar 7.7. Target Infrastruktur Dasar 100 – 0 – 100 ..... VII/24
Gambar 7.8. Perbandingan RT yang memiliki akses air minum dari sumber air minum layak dan RT yang memiliki akses terhadap sumber air minum Tahun 2019..... VII/25
Gambar 7.9. Gap akses air minum dari sumber air minum Kabupaten dan Kota Sulawesi Utara, Tahun 2019 ..... VII/26
Gambar 7.10. Perbandingan Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses sanitasi layak dan RT yang memiliki fasilitas BAB Tahun 2019..... VII/26
Gambar 7.11. Gap Pencapaian Akses Sanitasi Layak Tahun 2019..... VII/27
Gambar 7.12. Tingkat resiko bencana kabupaten/kota berdasarkan IRBI 2018 ..... VII/29
Gambar 7.13. Perbandingan IDG dan IPG Kabupaten/Kota Tahun 2019 ..... VII/30
Gambar 7.14. Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Wilayah Kepulauan dan Perbatasan VII/41
Gambar 7.15. Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Bolaang Mongondow Raya VII/45
Gambar 7.16. Integrasi pembangunan wilayah pada Klaster Wilayah Minahasa Raya..... VII/49
Gambar 7.17. Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Wilayah Kawasan Cepat Tumbuh (Manado-Minut-Bitung).. VII/54
Gambar 7.18. Peta Desa – Desa pesisir di Kabupaten Minahasa Tenggara VII/56
Gambar 7.19. Peta desa – desa pesisir di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur VII/57
Gambar 7.20. Peta desa – desa pesisir di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan..... VII/57
Gambar 7.21. Integrasi Pembangunan Wilayah pada Kawasan Super-Hub Sulut..... VII/58
Gambar 7.22. Sebaran Kawasan Strategi Provinsi (KSP) Sulawesi Utara..... VII/66

Daftar Grafik

NOMOR	NAMA GRAFIK	BAB/HAL.
Grafik 2.1.	Jumlah Penduduk Sulawesi Utara, 2000-2020	II/13
Grafik 2.2.	Komposisi Penduduk menurut Umur di Provinsi Sulawesi Utara, 2000-2020	II/13
Grafik 2.3.	Komposisi Penduduk menurut Generasi di Sulawesi Utara Tahun 2020	II/14
Grafik 2.4.	Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara	II/22
Grafik 2.5.	Persentase Akses Air Libah Layak Provinsi Sulawesi Utara 2016-2020	II/69
Grafik 2.6.	Capaian Rumah Layak Huni Sulawesi Utara 2017-2020	II/74
Grafik 2.7.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	II/74
Grafik 2.8.	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Terjangkau	II/75
Grafik 2.9.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman	II/75
Grafik 2.10.	Presentase Jumlah Koperasi Menurut Jenisnya Tahun 2020	II/107
Grafik 2.11.	Persentase Jumlah Koperasi Menurut Jenis Usahanya Tahun 2020	II/107
Grafik 2.12.	Progres PPKD Nasional dan Sulawesi Utara	II/116
Grafik 2.13.	Diagram Progres Naskah PPKD Sulut Hingga Juni 2021	II/117
Grafik 2.14.	Indeks Pembangunan Kebudayaan Menurut Provinsi Tahun 2018	II/118
Grafik 2.15.	Lima Negara Tujuan Ekspor provinsi Sulawesi Utara Dengan Nilai Terbesar ($US)	II/130
Grafik 2.16.	Lima Negara Tujuan Impor Provinsi Sulawesi Utara Dengan Nilai Terbesar ($US)	II/130
Grafik 2.17.	Penjabaran RPJMD Dalam RKPD	II/140
Grafik 2.18.	Jumlah Inovasi Dan Teknologi Daerah Yang Publikkasi	II/147
Grafik 2.19.	Jumlah MOU Kerja sama Kelitbangan	II/147

Daftar Tabel

NOMOR	NAMA TABEL	BAB/HAL.
Tabel 2.1.	Luas Daerah Provinsi Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota	II/2
Tabel 2.2.	Luas SWP DAS Provinsi Sulawesi Utara	II/4
Tabel 2.3.	Keadaan Suhu berdasarkan Pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun 2020	II/6
Tabel 2.4.	Keadaan Kelembaban berdasarkan Pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun 2020	II/6
Tabel 2.5.	Keadaan Kecepatan Angin berdasarkan Pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun 2020.....	II/7
Tabel 2.6.	Keadaan Tekanan Udara Berdasarkan Pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun 2020.....	II/8
Tabel.2.7.	Keadaan Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari berdasarkan Pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun 2020	II/9
Tabel 2.8.	Penggunaan Lahan Di Provinsi Sulawesi Utara	II/9
Tabel 2.9.	Indikator Kependudukan Tahun 2016-2020 di Provinsi Sulawesi Utara.....	II/14
Tabel 2.10.	Perkembangan TFR Tahun 2016 s/d 2020 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.....	II/15
Tabel 2.11.	Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020	II/15
Tabel 2.12.	Perkembangan Persebaran Penduduk Sulawesi Utara Berdasarkan Jenis Kelamin	II/16
Tabel 2.13.	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Sulawesi Utara.....	II/21
Tabel 2.14.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah)	II/17
Tabel 2.15.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah	II/19
Tabel 2.16.	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)	II/20
Tabel 2.17.	Persentase Kontribusi PDRB Tahun 2016-2020 Seluruh Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020	II/20
Tabel 2.18.	Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota	II/21
Tabel 2.19.	Nilai Inflasi Rata-rata Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020.....	II/23
Tabel 2.20.	Perkembangan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020	II/28
Tabel 2.21.	Distribusi Pengeluaran Penduduk Sulawesi Utara Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (%)	II/24
Tabel 2.22.	Presentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara dan Nasional	II/25
Tabel 2.23.	Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara	II/25

Tabel 2.24. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Utara, Maret 2019- September 2020 ..... II/26
Tabel 2.25. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sulawesi Utara menurut Daerah Tempat Tinggal, Maret 2019- Maret 2020 ..... II/26
Tabel. 2.26. Garis Kemiskinan dan Perubahan Daerah Tempat Tinggal, Maret 2019 – Maret 2020 ..... II/27
Tabel 2.27. Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara dan Nasional..... II/29
Tabel 2.28. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara..... II/30
Tabel 2.29. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Sulawesi Utara..... II/31
Tabel 2.30. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara..... II/31
Tabel 2.31. Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Utara .. II/32
Tabel 2.32. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Se-Sulut..... II/32
Tabel 2.33. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLDH) II/33
Tabel 2.34. Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara..... II/34
Tabel 2.35. Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Publik..... II/35
Tabel 2.36. Indeks Reformasi Birokrasi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020 ..... II/37
Tabel 2.37. Kategori Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.. II/37
Tabel 2.38. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2016-2020 ..... II/38
Tabel 2.39. Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2016-2020 II/39
Tabel 2.40. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi di Pulau Sulawesi dan Indonesia Periode 2016-2020 ..... II/40
Tabel 2.41. Perkembangan Seni, Budaya Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan evaluasi RPJMD Perubahan 2017-2020..... II/41
Tabel 2.42. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas yang Menonton Pertunjukan/Pameran Seni baik secara Langsung maupun tidak Langsung selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenis Kesenian dan Tipe Daerah, tahun 2018 ..... II/42
Tabel 2.43. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Terlibat Langsung Pertunjukan/Pameran Seni Secara Langsung Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Jenis Kesenian dan Tipe Daerah, 2018..... II/42
Tabel 2.44. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah/Warisan Budaya selama setahun terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018..... II/43
Tabel 2.45. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengetahui Dongeng/Cerita Rakyat Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018 ..... II/44
Tabel 2.46. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Menonton Pertunjukan/Pameran Seni baik secara Langsung maupun tidak Langsung selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenis Kesenian dan Tipe Daerah, tahun 2018 ..... II/45
Tabel 2.47. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Terlibat Langsung Pertunjukan/Pameran Seni Secara

Langsung Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Jenis Kesenian dan Tipe Daerah, 2018..... II/45
Tabel 2.48. Target dan Capaian Fokus Bidang Seni Budaya dan Olahraga II/47
Tabel 2.49. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2016 s/d 2020 Provinsi Sulawesi Utara..... II/48
Tabel 2.50. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2016 s/d 2020 Provinsi Sulawesi Utara..... II/48
Tabel 2.51. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2016 s/d 2020 Provinsi Sulawesi Utara..... II/49
Tabel 2.52. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah SMA Sederajat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020..... II/49
Tabel 2.53. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah SMA Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020 ... II/49
Tabel 2.54. Angka Kelulusan SMA/SMK/SLB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020 ..... II/50
Tabel 2.55. Rasio Guru dan Murid SMA Sederajat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020 ..... II/51
Tabel 2.56. Rasio Guru/Murid SMA Sederajat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 ..... II/51
Tabel 2.57. Rata-rata Angka Melek Huruf Penduduk Usia di atas 15 Tahun Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020 .. II/52
Tabel 2.58. Angka Melek Huruf Tahun 2020 Menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara II/52
Tabel 2.59. Perkembangan AHH Tahun 2016 s/d 2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara II/53
Tabel 2.60. Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2016 s/d 2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara..... II/54
Tabel 2.61. Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara II/55
Tabel 2.62. Perkembangan AKB dan AKI Tahun 2016 s/d 2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara..... II/55
Tabel 2.63. Prevalensi Stunting Tahun 2016 s/d 2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara..... II/56
Tabel 2.64. Tantangan Indikator kinerja bidang kesehatan di Sulawesi Utara Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2016-2020 II/60
Tabel 2.65. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat..... II/60
Tabel 2.66. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Menurut Kabupaten-Kota di Provinsi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2019..... II/61
Tabel 2.67. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/ Kota 2016-2020 ..... II/63
Tabel 2.68. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Kepemilikan Terhadap Fasilitas BAB Menurut Kabupaten-Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018-2020..... II/65
Tabel. 2.69. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Kabupaten-Kota di Prov. Sulut Tahun 2016-2020 ..... II/67

Tabel. 2.70. Jumlah dan Status IPLT Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara II/67
Tabel 2.71. Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2020 ..... II/69
Tabel 2.72. Panjang Jalan Provinsi per Kabupaten/Kota II/70
Tabel 2.73. Luas Areal, Jumlah Bangunan dan Panjang Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 .. II/70
Tabel 2.74. Kondisi Kemantapan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2020 ..... II/71
Tabel 2.75. Target dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang II/72
Tabel 2.76. Status Revisi Peraturan Daerah RTRW Di Provinsi Sulawesi Utara..... II/72
Tabel 2.77. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020 ..... II/73
Tabel 2.78. Pengurangan Kawasan Kumuh Provinsi Sulawesi Utara..... II/76
Tabel 2.79. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2019..... II/76
Tabel 2.80. Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020 ..... II/78
Tabel 2.81. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sulawesi Utara..... II/79
Tabel 2.82. Indeks Pemberdayaan Gender di Sulawesi Utara..... II/80
Tabel 2.83. Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Strategis II/80
Tabel 2.84. LP2B di Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014..... II/81
Tabel 2.85. Luas Panen dan Produktivitas Padi di Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2020..... II/81
Tabel 2.86. Produksi Padi dan Beras per Kabupaten/Kota Tahun 2018-2019..... II/83
Tabel 2.87. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Provinsi Sulawesi Utara..... II/84
Tabel 2.88. Luas Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di Provinsi Sulawesi Utara II/85
Tabel 2.89. Peti Kemas Perdagangan Luar Negeri Tahun 2020 .. II/91
Tabel 2.90. Peti Kemas Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2020 II/91
Tabel 2.91. Angkutan Penumpang dan Barang Tahun 2020..... II/91
Tabel 2.92. Indeks Kualitas Air (IKA) di Provinsi Sulawesi Utara..... . II/92
Tabel 2.93. Indeks Kualitas Udara Provinsi Sulawesi Utara II/93
Tabel 2.94. Indeks Tutupan Lahan Provinsi Sulawesi Utara II/94
Tabel 2.95. Capaian dan Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Sulawesi Utara II/95
Tabel 2.96. Capaian dan Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Sulawesi Utara II/96
Tabel 2.97. Data TPA Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara II/98
Tabel 2.98. Timbulan Sampah di Kabupaten/Kota se-Prov.Sulut Tahun 2017-2018 dan Proyeksi Tahun 2019-2021..... II/99
Tabel 2.99. Data Timbulan Sampah Provinsi Sulawesi Utara..... II/100

Tabel 2.100. Keberadaan Peraturan Persampahan di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara II/100
Tabel 2.101. Data Limbah Medis covid-19 per Bulan Mei Tahun 2021 .... II/101
Tabel 2.102. Perkembangan Penduduk Ber-KTP Tahun 2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara..... II/103
Tabel 2.103. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2019 ..... II/104
Tabel 2.104. Perkembangan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 s/d 2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulut II/104
Tabel 2.105. Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara II/105
Tabel 2.106. Jumlah KB Aktif/ CPR di Sulawesi Utara II/105
Tabel 2.107. Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2020..... II/105
Tabel 2.108. Nilai Modal Sendiri, Modal Luar, dan Volume Usaha Koperasi Menurut Kabupaten Kota Tahun 2020..... II/106
Tabel 2.109. Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara..... II/107
Tabel 2.110. Capaian Kinerja Koperasi dan UKM 2016-2020 ..... II/108
Tabel 2.111. Realisasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020..... II/109
Tabel 2.112. Realisasi PMA Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020 ..... II/109
Tabel 2.113. Kinerja DPM-PTSP Provinsi Sulawesi Utara..... II/110
Tabel 2.114. Capaian Kinerja DPM-PTSP 2017-2020 ..... II/110
Tabel 2.115. Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2019..... II/110
Tabel 2.116. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kepemilikan Telepon Seluler/Nirkabel Tahun 2020. II/113
Tabel 2.117. Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.. II/114
Tabel 2.118. Capaian indikator kinerja pembangunan daerah tahun 2016 hingga tahun 2020..... II/115
Tabel 2.119. Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara II/116
Tabel 2.120. IPK Sulut berdasarkan dimensi penyusun tahun 2018..... II/119
Tabel 2.121. Indeks Risiko Bencana Sulawesi Utara II/121
Tabel 2.122. Jumlah Kunjungan, Jumlah anggota, Jumlah buku dan banyaknya eksemplar Perpustaan Daerah Sulawesi Utara Tahun 2016-2020 ..... II/122
Tabel 2.123. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB II/123
Tabel 2.124. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2016-2020 ..... II/123
Tabel 2.125. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB II/124
Tabel 2.126. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB II/125
Tabel 2.127. Kontribusi dan Pertumbuhan Sub Kategori Peternakan Terhadap PDRB II/125
Tabel 2.128. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB II/126
Tabel 2.129. Rasio Elektrifikasi di Sulawesi Utara II/127
Tabel 2.130. Bauran Energi Provinsi Sulawesi Utara II/128

Tabel 2.131. Neraca Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2020..... II/129
Tabel 2.132. Capaian Kinerja Perindustrian dan Perdagangan 2016-2020..... II/130
Tabel 2.133. Komodiri Ekspor Non Migas di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 ..... II/131
Tabel 2.134. Komoditi Ekspor Non Migas di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 ..... II/132
Tebel 2.135. Kredit Usaha Mikro, Kecil, Menengah Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara 2016-2020..... II/134
Tabel 2.136. Industri Kecil dan Menengah Menurut Cabang Industri di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020..... II/135
Tabel 2.137. Penempatan Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020..... II/137
Tabel 2.138. Perbandingan Indikator dalam Permendagri 86/2017 dengan RPJMD 2016-2021 ..... II/139
Tabel 2.139. Kinerja Keuangan Daerah II/141
Tabel 2.140. Capaian Keuangan Daerah II/142
Tabel 2.141. Persentase ASN dengan Disiplin Tinggi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020 ..... II/143
Tabel 2.142. Cakupan Pejabat Struktural dan Fungsional Menduduki Jabatan sesuai Anjab dan ABK II/145
Tabel 2.143. Cakupan Layanan Baku Mutu Kepegawaian Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020 ..... II/145
Tabel 2.144. Capaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020 ..... II/146
Tabel 2.145. Nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020..... II/148
Tabel 2.146. Jumlah Perda Dalam Penetapan Propemperda Tahun 2016-2020 di Provinsi Sulawesi Utara II/148
Tabel 2.147. Persentase Perda yang ditetapkan Tahun 2016-2020 DPRD Provinsi Sulawesi Utara II/148
Tabel 2.148. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan DPRD Tahun 2016-2020..... II/149
Tabel 2.149. Persentase Konsumsi RT Pangan Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Utara 2017-2020 ..... II/149
Tabel 2.150. Persentase Konsumsi RT Non Pangan Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Utara 2017-2020..... II/150
Tabel 2.151. Nilai Tukar Petani Prov. Sulawesi Utara 2015-2020 II/151
Tabel 2.152. Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang/RTRW Tahun 2016 s.d 2020 Provinsi Sulawesi Utara..... II/152
Tabel 2.153 Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2016 s.d 2020 Provinsi Sulawesi Utara II/152
Tabel 2.154. Rasio Luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara II/153
Tabel 2.155. Rasio Ketaatan terhadap Tata Ruang Provinsi Sulawesi Utara..... II/153
Tabel 2.156. Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020 ..... II/153
Tabel 2.157. Kinerja Iklim Berinvestasi II/154
Tabel 2.158. Skenario Muatan KLHS Terhadap Status Daya Dukung Air di Provinsi Sulawesi Utara II/156
Tabel 2.159. Skenario Muatan KLHS Terhadap Status Daya Dukung Air di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan lokasi di Kabupaten dan Kota II/157

Tabel 2.160. Skenario Muatan KLHS Status Daya Tampung Pangan terhadap Pola Ruang RTRW Provinsi Sulawesi Utara..... II/158
Tabel 2.161. Skenario Muatan KLHS Terhadap Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten/Kota..... II/159
Tabel 2.162. Skenario Muatan KLHS Terhadap Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir II/161
Tabel 2.163. Skenario Muatan KLHS Terhadap Pengaturan Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan II/163
Tabel 2.164. Skenario Muatan KLHS Terhadap Penyedia Air..... II/164
Tabel 2.165. Skenario Muatan KLHS Terhadap Pemurnian Air.... II/165
Tabel 2.166. Skenario Muatan KLHS Terhadap Kualitas Udara... II/167
Tabel 2.167. Skenario Muatan KLHS Terhadap Pengaturan Iklim II/169
Tabel 2.168. Skenario Muatan KLHS Terhadap Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati II/171

Tabel 3.1 Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2026..... III/3
Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020..... III/8
Tabel 3.3. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020 ..... III/9
Tabel 3.4. Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020 ..... III/11
Tabel 3.5 Neraca Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2020..... III/16
Tabel 3.6. Neraca Kewajiban Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2020 ..... III/20
Tabel 3.7. Analisis Rasio Keuangan Tahun 2016 - 2020 Provinsi Sulawesi Utara..... III/21
Tabel 3.8. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016 – 2020 Provinsi Sulawesi Utara III/23
Tabel 3.9. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016 – 2020 Provinsi Sulawesi Utara III/25
Tabel 3.10. Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas UtamaTahun 2016-2020 Provinsi Sulawesi Utara..... III/28
Tabel 3.11. Defisit Riil Anggaran Tahun 2017 – 2020 Provinsi Sulawesi Utara..... III/30
Tabel 3.12. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Prov. Sulut Tahun 2016 – 2020 ..... III/30
Tabel 3.13. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020..... III/31
Tabel 3.14. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Utara III/32
Tabel 3.15. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2026 ..... III/36
Tabel 3.16. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2026..... III/36

Tabel 5.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 ..... V/8

Tabel 6.1. (Modifikasi Tabel T.C.12) Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026..... VI/5
Tabel 6.2. (Tabel T.C.13) Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022 – 2026 ..... VI/8
Tabel. 6.3. Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026 (Tabel T.C.14) VI/11

Tabel 7.1 Arah Target Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara..... VII/2
Tabel 7.2 Arah Prioritas Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara VII/2
Tabel 7.3 Capaian Pembangunan Kawasan Periode Waktu 2016-2020..... VII/6
Tabel 7.4 Indikator Ekonomi dan IPM Klaster Wilayah Pengembangan Kabupaten Kepulauan dan Perbatasan VII/19
Tabel 7.5 Indikator Sosial Klaster Wilayah Kepulauan dan Perbatasan VII/19
Tabel 7.6 Indikator Ekonomi dan IPM Klaster Wilayah Pengembangan Bolaang Mongondow Raya..... VII/19
Tabel 7.7 Indikator Sosial: Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya..... VII/20
Tabel 7.8 Indikator Ekonomi dan IPM Klaster Wilayah Pengembangan Minahasa Raya Bagian Tengah, Selatan/Tenggara dan Tomohon VII/20
Tabel 7.9 Indikator Sosial: Klaster Wilayah Minahasa Raya bagian Tengah/Induk, Selatan/Tenggara, dan Tomohon VII/20
Tabel 7.10 Indikator Ekonomi dan IPM Kawasan Minahasa Raya Bagian Utara Cepat Tumbuh Manado-Minahasa Utara-Bitung..... VII/21
Tabel 7.11 Indikator Sosial : Klaster Wilayah Minahasa Raya bagian Utara Cepat Tumbuh Manado-Minahasa Utara-Bitung..... VII/21
Tabel 7.12. Nilai Indeks Risiko Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Dari Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2018..... VII/29
Tabel 7.13. Target Pembangunan Wilayah Klaster 2026 ..... VII/32
Tabel 7.14. Sasaran/Indikator/Target Prioritas Pembangunan Klaster Kewilayahan Sulawesi Utara VII/33
Tabel 7.15. Arahan untuk sektor yang masuk dalam perencanaan dan penerapan ekonomi hijau di Kota Bitung, Kotamobagu dan Tahuna VII/38
Tabel 7.16. Cakupan Klaster Wilayah Kepulauan dan Perbatasan, dan Strategi Pengembangan VII/42
Tabel 7.17. Cakupan Klaster Wilayah Bolmong Raya dan Strategi Pengembangan VII/46
Tabel 7.18. Cakupan Klaster Wilayah Minahasa Raya dan Strategi Pengembangan..... VII/49
Tabel 7.19. Cakupan Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian Utara dan Strategi Pengembangan..... VII/54
Tabel 7.20. Cakupan Kawasan Super-Hub Sulut dan Strategi Pengembangan..... VII/58

Tabel 8.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 – 2026 Provinsi Sulawesi Utara..... VIII/2
Tabel 8.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026..... VIII/33

Tabel 9.1. Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 ..... IX/2
Tabel 9.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026..... IX/4
Tabel 9.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara..... IX/10

Daftar Singkatan

AHH	=	Angka Harapan Hidup
AHLSH	=	Angka Harapan Lama Sekolah
AKAP	=	Angkutan Antar Provinsi
AKB	=	Angka Kematian Bayi
AKDP	=	Angkutan Dalam Provinsi
AKI	=	Angka Kematian Ibu
AL	=	Angka Kelulusan
ALKI	=	Alur Laut Kepulauan Indonesia
AMH	=	Angka Melek Huruf
APEC	=	*Asia Pacific Economy Community*
API	=	Angka Pengenal Importir
APIP	=	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
APK	=	Angka Partisipasi Kasar
APM	=	Angka Partisipasi Murni
APS	=	Angka Partisipasi Sekolah
ASEAN	=	*Association of Southheast Asian Nation*
ASN	=	Aparatur Sipil Negara
B2SH	=	Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman
BAB	=	Buang Air Besar
BAZDA	=	Badan Amil Zakad Daerah
BIMP-EAGA	=	*Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area*
BP	=	Badan Pengelola
BUMD	=	Badan Usah Milik Daerah
CBP	=	Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
CITES	=	*Convension On International Trade In Endangered Special*
CSR	=	*Corporate Social Responsibility*
DAS	=	Daerah Aliran Sungai
DLKP	=	Daerah Lingkungan Kepentingan
DLKR	=	Daerah Lingkungan Kerja
DP	=	*Dry Port*
DPP	=	Destinasi Pariwisata Prioritas
DPSP	=	Destinasi Pariwisata Super Prioritas
EPPD	=	Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah
ET	=	Energi Terbarukan
EWG	=	*Energy Working Group*
GK	=	Garis Kemiskinan
GKM	=	Garis Kemiskinan Makanan
GKNM	=	Garis Kemiskinan Non Makanan
GRK	=	Gas Rumah Kaca
HB	=	Harga Berlaku
HHBK	=	Hasil Hutan Bukan Kayu
HP	=	Hutan Produksi Tetap
HPL	=	Hak Pengelolaan
HPT	=	Hutan Produksi Terbatas
IDG	=	Indeks Pemberdayaan Gender
IHK	=	Indeks Harga Konsumen
IKA	=	Indeks Kualitas Air

IKLH	=	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKLHD	=	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
IKM	=	Industri Kecil dan Menengah
IKM	=	Indeks Kepuasan Masyarakat
IKM	=	Industri Kecil Menengah
IKTL	=	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
IKU	=	Indeks Kualita Udara
IKU	=	Indikator Kinerja Utama
IMT-GT	=	*Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle*
IPAL	=	Instalasi Pengelolaan Air Limbah
IPG	=	Indeks Pembangunan Gender
IPKI	=	Izin Perluasan Kawasan Industri
IPKP	=	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan
IPLT	=	Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinggi
IPM	=	Indeks Pembanguan Manusia
IPUI	=	Izin Perluasan Usaha Industri
IRB	=	Indeks Reformasi Birokrasi
IRBI	=	Indeks Resiko Bencana Indonesia
ITL	=	Indeks Tutupan Lahan
IUI	=	Izin Usaha Industri
IUKI	=	Izin Usaha Kawasan Industri
JPT	=	Jasa Pengurusan Transportasi
KAPET Manado-Bitung	=	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu-Manado-Bitung
KB	=	Keluarga Berencana
KEHATI	=	Keanekaragaman Hayati
KEK	=	Kawasan Ekonomi Khusus
KESR	=	Kerja Sama Ekonomi Sub-Regional
KG	=	Kesetaraan Gender
KIE	=	Komunikasi Informasi dan Edukasi
KIMONG	=	Kawasan Industri Mongondow
KLHS	=	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KPBU	=	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
KPH	=	Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPPN	=	Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
KSP	=	Kawasan Strategis Provinsi
LCDI	=	*Low Carbon Development Indonesia*
LCMT	=	*Low Carbon Model Town*
LLAJ	=	Lalulintas dan Angkutan Jalan
LP2B	=	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
LPPD	=	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
LPTKS	=	Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
MICE	=	*Meeting, Insentives, Confrence, and Exebition*
MORR	=	*Manado Outer Ring Road*
ODSK	=	Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan
OPD	=	Organisasi Perangkat Daerah
OSS	=	*Online Single Submission*

P1	=	Indeks Kedalaman Kemiskinan
P2	=	Indeks Keparahan Kemiskinan
PAD	=	Pendapatan Asli Daerah
PBM	=	Perusahaan Bongkar Muat
PD	=	Perangkat Daerah
PDRB	=	Produk Domistik Regional Bruto
PEN	=	Pemulihan Ekonomi Nasional
PERDA	=	Peraturan Daerah
PHA	=	Pemenuhan Hak Anak
PHBS	=	Perilaku Hidup Bersih Sehat
PIE	=	Pendidikan Informasi dan Edukasi
Pilkada	=	Pemilihan Kepala Daerah
PINA	=	Pembiayaan Investasi Non Anggaran
PKN	=	Pusat Kegiatan Nasional
PKSN	=	Pusat Kegiatan Strategis Nasional
PKW	=	Pusat Kegiatan Wilayah
PLTU	=	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMA	=	Penanaman Modal Asing
PMDN	=	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMKS	=	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PPH	=	Pola Pangan Harapan
PPLH	=	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PPNS	=	Pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PRK	=	Pembangunan Rendah Karbon
PSBB	=	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PSEL	=	Pengolah Sampah Energi Listrik
PSU	=	Prasarana dan Sarana Umum
PSU	=	Prasana, Sarana dan Utilitas Umum
PT	=	Perguruan Tinggi
PUD	=	Perairan Umum Daratan
PUG	=	Pengarusutamaan Gender
Ranja	=	Rencana Kerja
RDTR	=	Rencana Detail Tata Ruang
RE	=	Rasio Elektrifikasi
Renstra	=	Rencana Strategis
RENSTRA-PD	=	Rencana Strategi Perangkat Daerah
RKPD	=	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	=	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	=	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPPLH	=	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RT	=	Rumah Tangga
RTK	=	Rencana Tenaga Kerja
RTRW	=	Rencana Tata Ruang Wilayah
RUEN	=	Rencana Umum Energi Nasional
SAKIP	=	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SDA	=	Sumber Daya Alam
SDG	=	Sumber Daya Genetik
SDGs	=	*Sustainables Development Goals*

SIINAS	=	Sistem Informasi Industri Nasional
SiLPA	=	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SIPD	=	Sistem Informasi Pemerintah Daerah
SIPJAKI	=	Sistem Informasi Jasa Konstruksi
SIUP-MB	=	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
SKA	=	Surat Keterangan Asal
SKD	=	Survei Kebutuhan Data
SKPT	=	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
SPALD	=	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domistik
SPBE	=	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPIP	=	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPM	=	Standar Pelayanan Minimal
SPM	=	Standar Pelayanan Minimal
SPP	=	Standar Pelayanan Perkotaan
SSK	=	Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota
SSPPN	=	Sistem Perencanan Pembangunan Nasional
SWP DAS	=	Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
TAHURA	=	Taman Hutan Raya
TDPIK	=	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil
TJSLP	=	Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan
TN	=	Taman Nasional
TPA	=	Tempat Pemrosesan Akhir
TPA	=	Transmigran Penduduk Asal
TPAK	=	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPB	=	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPB	=	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPS	=	Transmigran Penduduk Setempat
TPT	=	Tingkat Pengangguran Terbuka
TUKS	=	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
TWA	=	Taman Wisata Alam
UMKM	=	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UMP	=	Upah Minimum Provinsi
UMSK	=	Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota
UMSP	=	Upah Minimum Sektoral Provinsi
UN	=	Ujian Nasional
UNFCCC	=	*United Nation Framework Convention on Climate Change*
UNPD	=	*United Nation Development Programe*
US	=	Ujian Sekolah
WM	=	Wilayah Metropolitan
WP	=	Wajib Pajak
WPP	=	Wilayah Pengelolaan Perikanan
ZEE	=	Zona Ekonomi Eksklusif

Daftar Lampiran

NOMOR	NAMA LAMPIRAN
Lampiran I	Rencana Pembangunan Jangka Menengeh Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026
Lampiran II	Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021
Lampiran III	Tabel Matriks Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021
Lampiran IV	Tabel Matriks Evaluasi Pencapaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2016-2021

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 – 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan berdasarkan prinsip – prinsip meliputi : (1) perencanaan yang disusun merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, (2) dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya masing – masing; (3) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; (4) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi wilayah yang dimiliki masing – masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dalam rencana pembangunan Daerah adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang didalamnya memuat penjabaran Visi, Misi, program-program Kepala Daerah terpilih. Berdasarkan hasil pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maka di tetapkan **Olly Dondokambey, SE sebagai Gubernur** dan **Drs. Steven O.E. Kandouw sebagai Wakil Gubernur Periode 2021-2026** yang dilantik pada tanggal 15 Februari 2021 oleh Presiden RI di Istana Negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah dilantik.

Dokumen RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program-program pembangunan daerah baik per Perangkat Daerah maupun lintas Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026 memiliki nilai strategis sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Terutama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan selama lima tahun. Pada tingkat daerah, RPJMD dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sedangkan pada tingkat Perangkat Daerah, Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana pembangunan tahunan inilah yang kemudian mengimplementasikan pembangunan jangka menengah ke dalam program dan kegiatan.

RPJMD disusun berdasarkan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan top-down serta bottom-up. Tahapan penyusunan dokumen RPJMD mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Tahapannya dimulai dengan persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan Rancangan Awal RPJMD, penyusunan Rancangan RPJMD, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RPJMD, penyusunan Rancangan Akhir RPJMD, dan penetapan RPJMD. Penyusunan Dokumen RPJMD ini merupakan penyempurnaan dari rancangan teknokratik RPJMD yang merupakan bagian dari tahapan persiapan penyusunan RPJMD, dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Dokumen RPJMD Tahun 2021 – 2026 ini disusun dengan memperhatikan:

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
2) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 – 2034;
3) Ekonomi Global dan Pandemi Covid – 19 yang mempengaruhi kinerja pembangunan ekonomi daerah;
4) Evaluasi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2021;
5) Kondisi politik dalam dan luar negeri;
6) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7) *Gap* dalam Pencapaian visi RPJPD Provinsi Sulawesi Utara 2005 – 2025.

Hal utama yang turut mendapat perhatian adalah RPJMD Tahun 2021 – 2026 sebagai tahapan terakhir perencanaan lima tahunan pada kerangka waktu perencanaan RPJPD Provinsi Sulawesi Utara 2005 – 2025 terdapat satu tahun selisih antara tahun 2025 – 2026 belum memiliki acuan perencanaan jangka panjang. Hal lain yang juga perlu digarisbawahi adalah dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 tanggal 4 Januari 2021 dimana dalam poin 3. disebutkan bahwa Periodisasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026.

Isu – isu strategis lainnya dalam perencanaan lima tahun ke depan, yaitu :

1. Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak pada tahun 2024;
2. Program prioritas, target, pengarusutamaan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024, termasuk didalamnya, pengembangan Manado – Likupang sebagai salah satu dari 5 (lima) destinasi pariwisata super prioritas. Empat pengarusutamaan *(mainstreaming)* dalam RPJMN 2020 – 2024 meliputi kesetaraan gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial dan budaya, serta transformasi digital.
3. Pencapaian visi RPJPD Provinsi Sulawesi Utara 2005 – 2025, yaitu Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing, Aman dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Kawasan Asia Timur dan Pasifik.

4. Pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM), urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: 1) pendidikan, 2) kesehatan, 3) pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dan sosial.
5. Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) sesuai Roadmap Pembangunan Perkotaan Nasional, melalui indikator kota layak huni.
6. Penanganan Isu Lingkungan Hidup.
7. Bonus demografi, adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk, dimana proporsi usia Kerja (15-65 tahun) lebih besar daripada proporsi bukan usia Kerja (0-14 tahun dan >65 tahun). Untuk itu, Penciptaan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang masuk dalam kategori "bonus" perlu difasilitasi, termasuk juga menciptakan lapangan kerja baru sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.
8. Pembangunan dalam *Era New Normal*, yaitu pembangunan dalam era perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.
9. Penegakan peraturan daerah dan keselarasan dengan RTRW.

Dokumen RPJMD ini juga memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 serta 7 (tujuh) agenda pembangunan. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045 dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020 – 2024 yang diterjemahkan dalam 7 agenda pembangunan :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPJMD Tahun 2021 – 2025 Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia

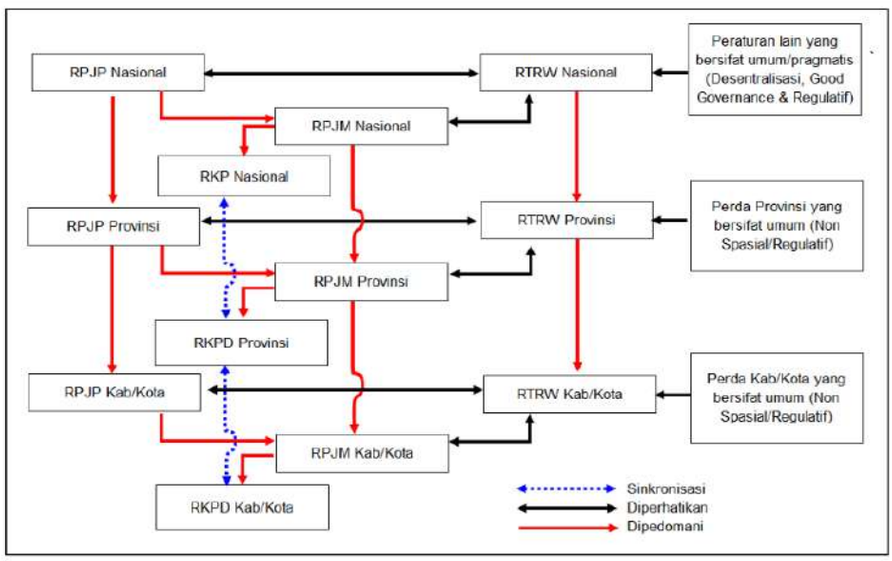
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara 2005 – 2025;
31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 – 2034; Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 1/2014);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034.
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tat Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Perumusan kebijakan pembangunan Daerah tersebut mengamanatkan bahwa salah satu kaidah dalam perumusan berpedoman pada RPJPD dan menjadi pedoman bagi RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta Renja Perangkat Daerah. Sehingga penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan Nasional. Hubungan antar dokumen perencanaan yang terkait dengan RPJMD ini dapat dilihat pada **Gambar 1.1** di bawah ini.



Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 adalah menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1) Menetapkan Visi, Misi dan program pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun;
2) Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) dan perencanaan penganggaran;
3) Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur;
4) Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Sulawesi Utara dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
5) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, konsisten dan terintegrasi baik antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Tahun 2021 – 2026 Provinsi Sulawesi Utara disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.5. Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/*SDG's*) Di Provinsi Sulawesi Utara
- 2.6. Kajian Muatan KLHS: Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara

BAB III Gambaran Keuangan Daerah
- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Daerah
- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 5.1. Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur
- 5.2. Tujuan dan Sasaran

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
- 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan
- 6.2. Program Pembangunan Daerah

BAB VII Rencana Pengembangan Wilayah Sulawesi Utara

BAB VIII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- 8.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan
- 8.2. Program Perangkat Daerah

BAB IX Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 9.1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 9.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

BAB X Penutup
- 10.1. Kaidah Pelaksanaan
- 10.2. Pedoman Transisi

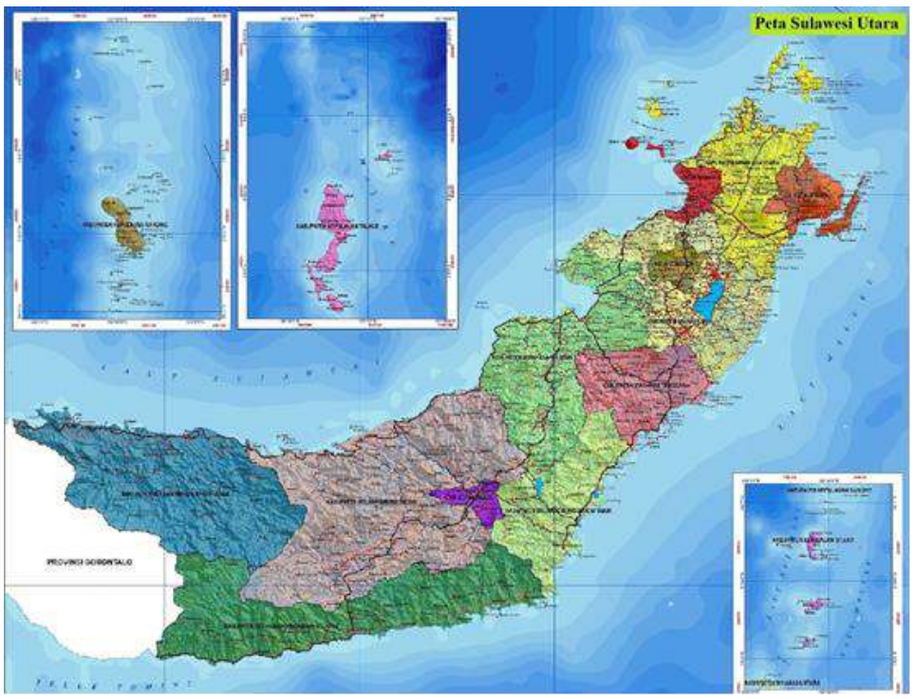
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Sulawesi Utara memiliki luas Wilayah sebesar 13.851,64 km². Secara administrasi, Provinsi Sulawesi Utara berada di ujung utara Pulau Sulawesi dengan ibukota adalah Kota Manado, terletak antara 0°LU - 3°LU dan 123°BT - 126°BT (BPS, 2020). Di sebelah utara, Provinsi ini berbatasan dengan Laut Sulawesi, Negara Filipina dan Samudera Pasifik. Di sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku, sebelah selatan dan barat masing-masing berbatasan dengan Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo.



Gambar 2.1. Peta Provinsi Sulawesi Utara
Sumber : RTRW Provinsi Sulawesi Utara 2014-2034

Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas 11 kabupaten dan 4 kota yaitu: Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa Utara dan 4 kota, yaitu Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado dan Kota Tomohon. Bolaang Mongondow merupakan kabupaten dengan wilayah terluas, yaitu 2.871,65 km² atau 20,73 persen dari wilayah Sulawesi Utara. Luas daerah Provinsi Sulawesi Utara menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1. Luas Daerah Provinsi Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota

No.	Kab/Kota	Luas (KM²)	Persentase
1	Kab. Minahasa	1.114,87	8,05%
2	Kab. Minahasa Selatan	1.409,97	10,18%
3	Kab. Minahasa Utara	918,49	6,63%
4	Kab. Minahasa Tenggara	710,83	5,13%
5	Kab. Bolmong	2.871,65	20,73%
6	Kab. Bolmong Utara	1.680,00	12,13%
7	Kab. Bolmong Selatan	1.615,86	11,67%
8	Kab. Bolmong Timur	910,18	6,57%
9	Kab. Kep. Sangihe	461,11	3,33%
10	Kab. Kep. Talaud	1.240,40	8,95%
11	Kab. Kep. Sitaro	275,86	1,99%
12	Kota Manado	157,27	1,14%
13	Kota Bitung	302,89	2,19%
14	Kota Tomohon	114,2	0,82%
15	Kota Kotamobagu	68,06	0,49%
Jumlah		**13.851,64**	**100,00%**

Sumber: Permendagri 137 Tahun 2017

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis letak Provinsi Sulawesi Utara sangat strategis karena berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur (Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, ASEAN) dan Pasifik yang menjadikan Provinsi Sulawesi Utara berpotensi sebagai pusat perdagangan dan pertumbuhan ekonomi regional. Kondisi ini menciptakan iklim yang menarik bagi para wisatawan, pelaku bisnis, dan para investor domestik dan internasional untuk berkunjung di Sulawesi Utara.

Posisi Provinsi Sulawesi Utara terletak di tepian Samudra Pasifik, diapit oleh 2 (dua) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yaitu ALKI II yang melewati Selat Makassar antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, dan ALKI III yang melewati Laut Maluku antara Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku Utara serta Maluku. Posisi strategis ini menciptakan keunikan dan keunggulan khusus bagi Sulawesi Utara karena sangat dekat dengan pasar Asia Timur dan Pasifik.



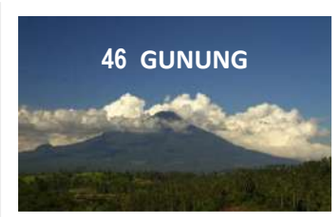
Gambar 2.2. Peta Posisi Provinsi Sulawesi Utara Sebagai Gerbang Utara Indonesia

Sumber: Bappeda Prov. Sulut, 2020.

2.1.1.3. Kondisi Topografi

Topografi Sulawesi Utara sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit diselingi oleh lembah yang membentuk dataran. Terdapat 46 gunung yang terletak di sembilan kabupaten/kota. Adapun jumlah danau tercatat ada sebanyak 17 danau dan jumlah sungai yang mengaliri wilayah Sulawesi Utara sebanyak 30 sungai.







2.1.1.4. Kondisi Geologi

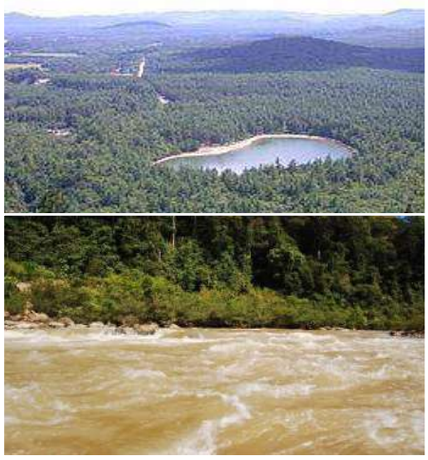
Kekayaan geologi yang sangat unik dimiliki Provinsi Sulawesi Utara terjadi akibat keberadaan tumbukan antara 2 (dua) *island arc* (Sangihe dan Halmahera) di atas lempeng Laut Maluku, sementara di tempat-tempat lain di bagian dunia ini, lempeng benua bertumbukan dengan lempeng samudera. Hal ini menjadikan Sulawesi Utara memiliki keunggulan geologi yang unik untuk dijadikan daya tarik wisata dan sebagai pusat studi keilmu-bumian. Berdasarkan Peta Geologi Bersistem Indonesia (1:250.000) struktur geologi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari formasi-formasi sebagai berikut:

1) **Q_{al} (Aluvium)** : terdapat di pesisir pantai seperti di Nanasi, Boyongpante, Sidate dan Tawaang. Di daerah sepanjang pantai utara Bolaang Mongondow seperti Boroko, Bolangitang, Biontong, Batulintik, Lolak dan Lolan. Di Kota Manado zona ini terdapat di Pantai Tumumpa dan di pantai bagian utara Manado;
2) **Q_s (Endapan Danau dan Sungai)** : terdapat di daerah sepanjang sungai (DAS) Tondano dari Kairagi sampai ke muara, daerah pesisir Likupang dan pesisir Tanawangko-Tumpaan;
3) **Q_l (Batu gamping Terumbu Koral)** : terdapat di antara daerah pasang naik dan pasang surut (di barat Amurang dan di Pulau Siladen);
4) **Q_v (Batuan Gunungapi Muda)**: membentuk gunungapi strato muda, antara lain, G. Soputan, G. Mahawu, G. Lokon, G. Klabat, G. Tangkoko;
5) **Q_{tv} (Tufa Tondano)**: tersebar di daerah Manado, sekitar jalur jalan Tanahwangko – Amurang, daerah sekitar G. Lolombulan di Kecamatan Tenga dan Sinonsayang;
6) **Q_{tvl} (Aliran lava berkomposisi andesit trakhit):** Terdapat di daerah G. Tanuwatik, Popontolen dan di S. Sinengkeian. Di daerah pantai antara Sondaken dan Paslaten;
7) **T_{ps} (Breksi dan Batupasir)**: terdapat di P. Nain Besar dan P. Nain Kecil, P. Talise, P. Bangka juga sekitar Likupang Barat dan Likupang Timur;
8) **T_{mv}/T_{mvl} (Batuan Gunungapi)**: terdapat di sungai dekat Paslaten, Pulau Lembeh, Papusungan, di daerah Bolaang Mongondow terletak di daerah G. Ulutalogon – G. Bumbungan;
9) **T_{ms} (Batuan Sedimen)**:terdapat di Kotamobagu;
10) **T_{tv} (Batuan Gunungapi)**: Satuan ini terdapat di daerah Bolaang Mongondow dan di daerah Bintauna;
11) **T_{ts} (Formasi Tinombo Ahlburg 1913)**: Satuan batuan ini terdapat di Bolangitang dan Kaidipang;
12) **Q_a (Aluvium)** : Dataran alluvium yang luas terdapat di Tabukan Utara**;**

13) **Q_{hav} (Batuan Gunungapi Awu)**: Batuan dihasilkan oleh gunungapi Awu di P. Sangihe. Endapan awan panas meliputi daerah sekitar kawah, lembah dan beberapa pantai seperti Mitung dan Bahu. Formasi geologi lainnya yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Sangihe-Sitaro dan Talaud adalah **Q_{hkv}** batuan Gunungapi Karangetang, **Q_{hrv}** batuan Gunungapi Ruang, **Q_{pp}** formasi Pintareng, **Q_{tsv}** batuan Gunungapi Sahendaruman, **Q_{tkv}** batuan Gunungapi Kalama, **Q_{Ttv}** batuan Gunungapi Tamata, **Q_{Tmv}** batuan Gunungapi Malingge, **Q_{ti}** batuan terobosan**,** **T_{pbv}** batuan Gunungapi Bukide, dan **T_{nbv}** batuan Gunungapi Biaro.

2.1.1.5. Kondisi Hidrologi

Adanya sejumlah Danau dan sungai di wilayah Sulawesi Utara menjadi perhatian dalam upaya mitigasi bencana banjir dan ta nah longsor. Di sisi lain, air danau dan sungai menjadi potensi penunjang tenaga listrik, irigasi dan air baku untuk kebutuhan masyarakat dan industri. Nama, luas danau dan panjang sungai antara lain:



DANAU:

Danau Tondano (4.278 Ha), Danau Mooat (617 Ha), Danau Linow (34 Ha), Danau Cinta Makalehi (8 Ha), Danau Tampusu (2,5 Ha), Danau Seper (2,5 Ha) di Desa Lembean, Danau Tondok (16,6 Ha), Danau Bulilin (21 Ha), Danau Iloloy (6 Ha) dan lainnya.

SUNGAI:

Sungai besar yaitu: Sungai Tondano (40 Km), Sungai Poigar (54,2 Km), Sungai Ranoyapo (51,9 Km), dan Sungai Talawaan (34,8 Km), Sungai Dumoga (87,2 Km), Sungai Sangkub (53,6 Km) dan Sungai Ongkaw (42,1 Km).

Berdasarkan kewenangan pengelolaan SDA yang diatur Permen PU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas 3 (tiga) Wilayah Sungai:

1. Wilayah Sungai Strategis Nasional (Wilayah Sungai Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas);
2. Wilayah Sungai Lintas Provinsi (Wilayah Sungai Dumoga Sangkub); dan
3. Wilayah Sungai Lintas Kabupaten (Wilayah Sungai Poigar-Ranoyapo).

Secara garis besar luas Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP DAS) adalah 1.423.047 Ha, terdiri dari 23 SWP DAS dan terbagi dalam 66 SWP SUBDAS. SWP DAS sangat berperan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Tabel 2.2. Luas SWP DAS Provinsi Sulawesi Utara

No.	Satuan Wilayah Pengelolaan DAS	Luas (Ha)	%
1.	Buyat	87.909	6,18
2.	Dumoga Mongondow	204.736	14,39
3.	Essang	79.737	5,60
4.	Kepulauan Nanusa	3.954	0,28
5.	Kepulauan Nusa Tabukan	1.205	0,08
6.	Kepulauan Tatoareng	2.200	0,15
7.	Likupang	97.951	6,88

No.	Satuan Wilayah Pengelolaan DAS	Luas (Ha)	%
8.	Mahena	50.852	3,57
9.	Molibagu	116.167	8,16
10.	Pulau Biaro dan sekitarnya	2.726	0,19
11.	Pulau Bunaken dan sekitarnya	4.891	0,34
12.	Pulau Kabaruan	10.940	0,77
13.	Pulau Lembeh	5.767	0,41
14.	Pulau Lirung	11.272	0,79
15.	Pulau Siau dan sekitarnya	13.905	0,98
16.	Pulau Tagulandang dan sekitarnya	7.897	0,55
17.	Pulau Talise dan sekitarnya	7.476	0,53
18.	Poigar	81.520	5,73
19.	Ranoyapo	87.154	6,12
20.	Ratahan Pantai	98.754	6,94
21.	Sangkup Langi	287.019	20,17
22.	Tondano	54.124	3,80
23.	Tumpaan	104.891	7,37
Jumlah		**1.423.047**	**100**

Sumber: RTRW Prov. SULUT Tahun 2014-2034.

Berdasarkan Peta Pembagian DAS Sulawesi Utara terdapat 16 (enam belas) DAS, yaitu DAS Tondano, DAS Kosibidan, DAS Sangkub, DAS Ranoyapo, DAS Pororosen, DAS Poigar, DAS Ongkak Mongondow, DAS Nuangan, DAS Ranowangko/Nimangan, DAS Likupang, DAS Buyat, DAS Bolangitang, DAS Ayong, DAS Andegile, DAS Dumoga dan DAS Bone.

Sebagai prasarana penunjang bagi kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah atau persawahan, maka pengembangan sistem irigasi pada dasarnya mengikuti potensi pengembangan/perluasan daerah persawahan. Proyek-proyek irigasi yang relatif besar ada di daerah irigasi Kasinggolan-Toraut, daerah irigasi Dumoga, daerah irigasi Sangkup, daerah irigasi Ayong-Bolangat dan daerah Irigasi Lolak.

2.1.1.6. Kondisi Klimatologi

Iklim daerah Sulawesi Utara termasuk tropis yang dipengaruhi oleh angin muzon. Pada bulan November sampai dengan April bertiup angin barat yang membawa hujan di pantai utara, pada bulan Mei sampai Oktober terjadi perubahan angin selatan yang kering. Pada umumnya, kondisi iklim di Sulawesi Utara sama dengan kondisi iklim wilayah Indonesia lainnya, yaitu memiliki dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Sebagai daerah yang beriklim hujan tropis, kelembaban udara terendah dialami di Minahasa Utara, yaitu 43%. Sedangkan, kelembaban tertinggi terjadi di Minahasa Utara dan Kota Manado, yaitu 98%. Secara keseluruhan, kelembaban rata-rata mencapai 80,25%.

Curah hujan tidak merata dengan angka tahun 2020 berkisar antara 1.511-3.822mm dan jumlah hari hujan antara 123-275 hari. Suhu udara berada pada setiap tingkat ketinggian makin ke atas makin sejuk seperti daerah Kota Tomohon, Langowan di Minahasa, Modoinding di Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Kotamobagu, Modayag dan Pasi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Daerah yang paling banyak menerima curah hujan adalah daerah Minahasa. Suhu atau temperatur dipengaruhi pula oleh ketinggian tempat di atas permukaan laut. Semakin tinggi letaknya, semakin rendah pula suhunya, dengan perhitungan setiap kenaikan 100 meter dapat menurunkan suhu sekitar 0,6 °C. Sedangkan curah hujan rata-

rata ialah 2.714,73mm. Kecepatan angin rata-rata adalah 2,92m/det. dengan sebaran 1,08-4,80m/det. Di bawah ini akan disajikan tabel yang menggambarkan kondisi suhu, kecepatan angin dan curah hujan, tekanan udara dan curah hujan, hari hujan, serta penyinaran matahari. Tabel tersebut merupakan hasil pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun 2020

Tabel 2.3. Keadaan Suhu berdasarkan Pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun 2020

Kabupaten/Kota ***Regency/Municipality***	**Stasiun BMKG** ***BMKG Station***	**Suhu/*Temperature* (^0C)**		
		Minimum ***Minimum***	**Rata-rata** ***Average***	**Maksimum** ***Maximum***
Kabupaten/*Regency*				
1. Bolaang Mongondow	Pos Hujan KC Motabang Lolak	...	...	...
2. Minahasa	Tondano	...	...	...
3. Kepulauan Sangihe	Stasiun Meteorologi Naha	21,4	27,6	34,6
4. Kepulauan Talaud	Pos Hujan BPP Beo	...	...	...
5. Minahasa Selatan	Pos Hujan UPP Tenga	...	...	...
6. Minahasa Utara	Stasiun Klimatologi Minahasa Utara	20,4	28,5	34,7
7. Bolaang Mongondow Utara	Pos Hujan BPP Pinogaluman	...	...	...
8. Siau Tagulandang Biaro	Pos Hujan BPP Siau Tengah	...	...	...
9. Minahasa Tenggara	Pos Hujan UPTD Ratahan	...	...	...
10. Bolaang Mongondow Selatan	Pos Hujan UPTD Pinolosian	...	...	...
11. Bolaang Mongondow Timur	Pos Hujan UPP Kotabunan	...	...	...
Kota/*Municipality*				
1. Kota Manado	Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi	20,1	27,0	35,1
2. Kota Bitung	Stasiun Meteorologi Maritim Bitung	21,2	28,0	35,8
3. Kota Tomohon	Pos Hujan BPP Tomohon	...	...	...
4. Kota Kotamobagu	Pos hujan BPP Mongkonai	...	...	...

Sumber: Sulawesi Utara dalam Angka 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata suhu tertinggi di Sulawesi Utara tahun 2020 terjadi di Minahasa Utara, yaitu 28,5℃. Sedangkan, rata-rata suhu terendah terjadi di Kota Manado, yaitu 27,0℃. Suhu maksimum tahun 2020 sempat terjadi di Kota Bitung, yaitu 35,8℃. Sedangkan, suhu minimum dialami di Kota Manado, yaitu 20,1℃.

Tabel 2.4. Keadaan Kelembaban berdasarkan Pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun 2020

Kabupaten/Kota ***Regency/Municipality***	**Stasiun BMKG** ***BMKG Station***	**Kelembaban/ *Humidity (%)***		
		Minimum ***Minimum***	**Rata-rata** ***Average***	**Maksimum** ***Maximum***
Kabupaten/*Regency*				
1. Bolaang Mongondow	Pos Hujan KC Motabang Lolak	...	...	...
2. Minahasa	Tondano	...	...	...
3. Kepulauan Sangihe	Stasiun Meteorologi Naha	74,0	85,0	96,0
4. Kepulauan Talaud	Pos Hujan BPP Beo	...	...	...

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Stasiun BMKG *BMKG Station*	Kelembaban/ *Humidity (%)*		
		Minimum *Minimum*	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*
5. Minahasa Selatan	Pos Hujan UPP Tenga	...	...	...
6. Minahasa Utara	Stasiun Klimatologi Minahasa Utara	43,0	77,0	98,0
7. Bolaang Mongondow Utara	Pos Hujan BPP Pinogaluman	...	...	...
8. Siau Tagulandang Biaro	Pos Hujan BPP Siau Tengah	...	...	...
9. Minahasa Tenggara	Pos Hujan UPTD Ratahan	...	...	...
10. Bolaang Mongondow Selatan	Pos Hujan UPTD Pinolosian	...	...	...
11. Bolaang Mongondow Timur	Pos Hujan UPP Kotabunan	...	...	...
Kota/*Municipality*				
1. Kota Manado	Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi	62,0	81,0	98,0
2. Kota Bitung	Stasiun Meteorologi Maritim Bitung	63,0	78,0	93,0
3. Kota Tomohon	Pos Hujan BPP Tomohon	...	...	...
4. Kota Kotamobagu	Pos hujan BPP Mongkonai	...	...	...

Sumber: Sulawesi Utara dalam Angka 2020.

Tabel di atas menggambarkan kondisi kelembaban daerah Sulawesi Utara berdasarkan pengamatan BMKG tahun 2020. Rata-rata kelembaban tertinggi terjadi di Kepulauan Sangihe, yaitu 85,0%. Rata-rata kelembaban terendah terjadi di Minahasa Utara, yaitu 77,0%. Kelembaban maksimum terjadi di Minahasa Utara dan Kota Manado, yaitu 98,0%. Sedangkan, kelembaban minimum terjadi di Minahasa Utara, yaitu 43,0%.

Tabel 2.5. Keadaan Kecepatan Angin berdasarkan Pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun 2020

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Stasiun BMKG *BMKG Station*	Kecepatan Angin (m/det) *Wind Velocity (m/sec)*		
		Minimum *Minimum*	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*
Kabupaten/*Regency*				
1. Bolaang Mongondow	Pos Hujan KC Motabang Lolak	...	...	...
2. Minahasa	Tondano	...	...	...
3. Kepulauan Sangihe	Stasiun Meteorologi Naha	3,00	4,80	9,10
4. Kepulauan Talaud	Pos Hujan BPP Beo	...	...	...
5. Minahasa Selatan	Pos Hujan UPP Tenga	...	...	...
6. Minahasa Utara	Stasiun Klimatologi Minahasa Utara	-	1,08	7,20
7. Bolaang Mongondow Utara	Pos Hujan BPP Pinogaluman	...	...	...
8. Siau Tagulandang Biaro	Pos Hujan BPP Siau Tengah	...	...	...
9. Minahasa Tenggara	Pos Hujan UPTD Ratahan	...	...	...
10. Bolaang Mongondow Selatan	Pos Hujan UPTD Pinolosian	...	...	...
11. Bolaang Mongondow Timur	Pos Hujan UPP Kotabunan	...	...	...
Kota/*Municipality*				

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Stasiun BMKG *BMKG Station*	Kecepatan Angin (m/det) *Wind Velocity (m/sec)*		
		Minimum *Minimum*	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*
1. Kota Manado	Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi	1,60	3,10	8,80
2. Kota Bitung	Stasiun Meteorologi Maritim Bitung	0,10	2,70	14,10
3. Kota Tomohon	Pos Hujan BPP Tomohon	...	...	...
4. Kota Kotamobagu	Pos hujan BPP Mongkonai	...	...	...

Sumber: Sulawesi Utara dalam Angka 2020.

Tabel di atas mengungkapkan bahwa kondisi kecepatan angin di daerah Sulawesi Utara hasil pengamatan BMKG tahun 2020. Rata-rata kecepatan angin tertinggi terjadi di Kepulauan Sangihe, yaitu 4,80m/det. Rata-rata terendah terjadi di Minahasa Utara, yaitu 1,08m/det. Kecepatan angin maksimum terjadi di Kota Bitung, yaitu 14,10m/det. Sedangkan, kecepatan angin minimum juga terjadi di Kota Bitung, yaitu 0,10m/det.

Tabel 2.6. Keadaan Tekanan Udara berdasarkan Pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun 2020

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Stasiun BMKG *BMKG Station*	*Tekanan Udara Atmospheric Pressure (mb)*		
		Minimum *Minimum*	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*
Kabupaten/*Regency*				
1. Bolaang Mongondow	Pos Hujan KC Motabang Lolak	...	...	...
2. Minahasa	Tondano	...	...	...
3. Kepulauan Sangihe	Stasiun Meteorologi Naha	1 004,3	1 009,2	1 013,6
4. Kepulauan Talaud	Pos Hujan BPP Beo	...	...	...
5. Minahasa Selatan	Pos Hujan UPP Tenga	...	...	...
6. Minahasa Utara	Stasiun Klimatologi Minahasa Utara	997,7	1 001,7	1 005,9
7. Bolaang Mongondow Utara	Pos Hujan BPP Pinogaluman	...	...	...
8. Siau Tagulandang Biaro	Pos Hujan BPP Siau Tengah	...	...	...
9. Minahasa Tenggara	Pos Hujan UPTD Ratahan	...	...	...
10. Bolaang Mongondow Selatan	Pos Hujan UPTD Pinolosian	...	...	...
11. Bolaang Mongondow Timur	Pos Hujan UPP Kotabunan	...	...	...
Kota/*Municipality*				
1. Kota Manado	Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi	1 006,9	1 011,0	1 015,1
2. Kota Bitung	Stasiun Meteorologi Maritim Bitung	1 005,7	1 010,6	1 014,5
3. Kota Tomohon	Pos Hujan BPP Tomohon	...	...	...
4. Kota Kotamobagu	Pos hujan BPP Mongkonai	...	...	...

Sumber: Sulawesi Utara dalam Angka 2020.

Tabel di atas mengungkapkan bahwa rata-rata tekanan udara tertinggi terjadi di Kota Manado, yaitu 1.011,1mb. Rata-rata tekanan udara terendah terjadi di Minahasa Utara, yaitu 1.001,7mb. Tekanan udara maksimum terjadi di Kota Manado, yaitu 1.015,1mb. Sedangkan, kecepatan angin minimum terjadi di Minahasa Utara, yaitu 997,7mb.

Tabel 2.7. Keadaan Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari berdasarkan Pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun 2020

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Stasiun BMKG *BMKG Station*	Jumlah Curah Hujan *Number of Precipitation (mm)*	Jumlah Hari Hujan (hari) *Number of Rainy Days (day)*	Penyinaran Matahari *Duration of Sunshine (%)*
Kabupaten/*Regency*				
1. Bolaang Mongondow	Pos Hujan KC Motabang Lolak	2 543	153	...
2. Minahasa	Tondano	2 136	232	...
3. Kepulauan Sangihe	Stasiun Meteorologi Naha	3 222	255	66
4. Kepulauan Talaud	Pos Hujan BPP Beo	2 989	191	...
5. Minahasa Selatan	Pos Hujan UPP Tenga	2 971	160	...
6. Minahasa Utara	Stasiun Klimatologi Minahasa Utara	3 429	275	70
7. Bolaang Mongondow Utara	Pos Hujan BPP Pinogaluman	2 512	123	...
8. Siau Tagulandang Biaro	Pos Hujan BPP Siau Tengah	3 822	183	...
9. Minahasa Tenggara	Pos Hujan UPTD Ratahan	2 456	192	...
10. Bolaang Mongondow Selatan	Pos Hujan UPTD Pinolosian	3 461	160	...
11. Bolaang Mongondow Timur	Pos Hujan UPP Kotabunan	1 511	223	...
Kota/*Municipality*				
1. Kota Manado	Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi	3 403	252	64
2. Kota Bitung	Stasiun Meteorologi Maritim Bitung	2 053	233	64
3. Kota Tomohon	Pos Hujan BPP Tomohon	2 265	208	...
4. Kota Kotamobagu	Pos hujan BPP Mongkonai	1 948	185	...

Sumber: Sulawesi Utara dalam Angka 2020.

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Adapun jenis penggunaan lahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8. Penggunaan Lahan Di Provinsi Sulawesi Utara

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	**Kawasan Lindung**	**406.949**	**29,38**
1.1	Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	245.165	17,70
1.2	Kawasan Hutan Lindung (HL)	161.784	11,68
2	**Kawasan Budidaya**	**978.215**	**70,62**
2.1	Pertanian Lahan Basah (Sawah)	107.361	7,75
2.2	Perkebunan	301.600	21,77
2.3	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	208.927	15,08
2.4	Kawasan Hutan Produksi (HP)	64.367	4,65

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
2.5	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)	14.696	1,06
2.6	Areal Penggunaan Lain (APL)	281.264	20,31
TOTAL		**1.385.164**	**100**

Sumber: Bappeda Prov. Sulut (diolah dari SK Menteri LHK Nomor 734/2014)

A. Kawasan Lindung

Kawasan lindung wilayah provinsi Sulawesi Utara seluas 406.949 Ha, meliputi:

A.1. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

Kawasan Suaka Alam (KSA) di Sulawesi Utara terdiri dari : a. Suaka Alam (SA) Laut, meliputi: 1. SA Laut Selat Lembeh di Bitung; 2. SA Laut Sidat di Minahasa dan Minahasa Selatan. b. Suaka Margasatwa (SM) dan Suaka Marga Satwa Laut, meliputi: 1. SM Gunung Manembo-nembo, di Minahasa dan Minahasa Selatan; 2. SM Karakelang Utara - Selatan di Kepulauan Talaud. c. Cagar Alam (CA) dan Cagar Alam Laut, meliputi: 1. CA Dua Saudara, di Bitung; 2. CA Tangkoko-Batuangus, di Bitung; 3. CA Gunung Ambang, terbagi antara Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow; 4. CA Gunung Lokon di Tomohon.

Kawasan Pantai Berhutan Bakau (HB) di Provinsi Sulawesi Utara seluas 12.036,29 Ha meliputi Kawasan Pantai HB Esang, HB Beo, HB Rainis, HB Karakelang Selatan di Kepulauan Talaud, HB Pulau Bangka, HB Likupang, HB Tg. Pisok di Minahasa Utara, HB Kuma, HB Manalu, HB Tamako di Kepulauan Sangihe, HB Siau, HB Tagulandang, HB Pasighe, HB Pulau Biaro di Kepulauan Siau Biaro Tagulandang, HB Tg. Kelapa, HB Tg. Walintau, HB Bentenan di Minahasa Selatan, HB Salimburung, HB Dumisil, HB Dumi, HB Kaidipang, HB Bohabak, HB Duminanga, HB Tg. Dodepo di Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongodow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan, HB Tg. Pulisan di Minahasa Utara.

Kawasan Taman Nasional (TN) dan Taman Nasional Laut, yang meliputi: 1. TN Bogani Nani Wartabone, berada di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, dengan rincian di Bolaang Mongondow, di Bolaang Mongondow Selatan dan di Bolaang Mongondow Utara; 2. TN Laut Bunaken, dengan rincian di Manado, di Minahasa, di Minahasa Selatan dan di Minahasa Utara. Kawasan Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut, meliputi: rencana pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih, di Bitung dan TWA Batu Angus, di Bitung; Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, meliputi: rencana pengembangan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (CBP) Bukit Kasih Kanonang dan Batu Pinabetengan di Minahasa; Kawasan Taman Hutan Rakyat meliputi kawasan hutan Gunung Tumpa di Kota Manado.

Kawasan Taman Nasional (TN) dan Taman Nasional Laut, yang meliputi: 1. TN Bogani Nani Wartabone, berada di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, dengan rincian di Bolaang Mongondow, di Bolaang Mongondow Selatan dan di Bolaang Mongondow Utara; 2. TN Laut Bunaken, dengan rincian di Manado, di Minahasa, di Minahasa Selatan dan di Minahasa Utara. Kawasan Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut, meliputi: rencana pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih, di Bitung dan TWA Batu Angus, di Bitung; Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, meliputi

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (CBP) Bukit Kasih Kanonang dan Batu Pinabetengan di Minahasa; Kawasan Taman Hutan Rakyat meliputi Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Tumpa di Kota Manado.

A.2. Kawasan hutan lindung seluas 161.784 Ha

Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Sulawesi Utara tersebar di: a. Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, dan Kotamobagu; b. Minahasa; c. Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara; d. Minahasa Utara; e. Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; f. Kepulauan Talaud; g. Bitung; h. Manado, meliputi bakau dan darat; i. Tomohon.

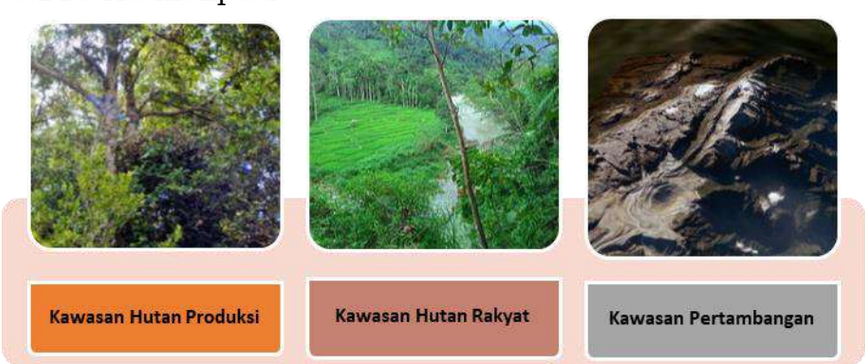
A.3. Kawasan Cagar Biosphere Bunaken, Tangkoko, dan Minahasa



Cagar Biosphere Bunaken, Tangkoko, dan Minahasa—Minahasa Selatan, Minahasa, Tomohon, Manado, Minahasa Utara, dan Bitung—dengan luas sebesar 746.412.54 Ha. Penetapannya dilaksanakan bersamaan dengan tiga Cagar Biosphere baru di Indonesia yang resmi diumumkan dalam sidang ke-32 *International Coordinating Council (ICC) Man and the Biosphere (MAB)* UNESCO Headquarter di Paris Prancis, 2020. Cagar Biosphere mencakup wilayah daratan, perairan, dan pantai yang dipergunakan untuk menemukan kompromi antara kelestarian alam, pemanfaatannya, dan penggunaannya bagi kehidupan umat manusia. Cagar Biosphere yaitu mengelola suatu kawasan yang ditujukan untuk mengharmonisasikan antara kebutuhan konservasi keanekaragaman hayati, sosial, dan ekonomi berkelanjutan yang didukung oleh logistic yang memadai. Cagar Biosphere wajib memiliki tiga zona yang masing-masing memiliki fungsi tertentu, yaitu: Zona Inti (Core Zone) untuk menjaga ekosistem yang yang ada, Zona Penyangga (Buffer Zone) untuk pendung zona utama, dan Zona Transisi (Transition Zone) untuk interasksi antara manusia yang wajib menjaga kelestarian Cagar Biosphere sesuai peraturan yang berlaku.

B. Kawasan Budidaya

Penetapan kawasan ini dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, kawasan Budidaya dengan luasan 978.215 Ha meliputi:



B.1. Kawasan Pertanian Lahan Basah (Sawah)
Kawasan Pertanian Lahan Basah di Provinsi Sulawesi Utara seluas 107.361 Ha dengan Persentase terbesar berada di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

B.2. Kawasan Perkebunan
Luas Kawasan Perkebunan di Sulawesi Utara adalah 301.600 Ha, yang didominasi oleh Perkebunan Kelapa, Cengkih dan Pala.

B.3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Provinsi Sulawesi Utara seluas 208.927 Ha meliputi: HPT Salibabu I & II, HPT Kabaruan di Pulau Salibabu, Kepulauan Talaud; HPT Pulau Bangka, HPT Pulau Talise, HPT Gunung Wiau, HPT Saoan di Minahasa Utara; HPT Gunung Tatawiran dan HPT Gunung Insarang di Minahasa dan Tomohon; HPT Kayuwatu di Minahasa; HPT Sungai Togop, HPT Gunung Surat , HPT Gunung Sinonsayang, HPT Gunung Simbalang, dan HPT Gunung Mintu di Minahasa Selatan; HPT Sungai Ayong-Lobong, HPT Sungai Andagile – Sungai Gambuta – Sungai Biau, HPT Molibagu-Pinolosian-Kombot, HPT Sungai Tanganga – Sungai Salongo – Sungai Molibagu, HPT Sungai Dumoga, HPT Mintu, dan HPT Gunung Bumbungon di Bolaang Mongondow.

B.4. Kawasan Hutan Produksi (HP), meliputi HP Tetap Sungai Ranoyapo I di Minahasa Selatan; dan HP Sungai Ilangan I & II, Sungai Pililahunga – Sungai Milangodaa, Mataindo, Matabulu, Inobonto-Poigar, Ongkak Mongondow di Bolaang Mongondow.

B.5. Kawasan Hutan yang dapat dikonversi, yaitu Kawasan Peruntukan Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK) Bintauna di Bolaang Mongondow luas kurang lebih 14.867 Ha dari luas wilayah Provinsi. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat direncanakan pada lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan dan menanaminya dengan tanaman-tanaman yang dapat berfungsi ganda, seperti sebagai penghasil buah, penghasil kayu dan lain-lain yang sekaligus juga berfungsi ekologis. Rencana pengembangan kawasan hutan rakyat dilaksanakan pada kebun Raya Minahasa di Minahasa dan Taman Hutan Rakyat Gunung Tumpa di Manado dan Minahasa Utara.

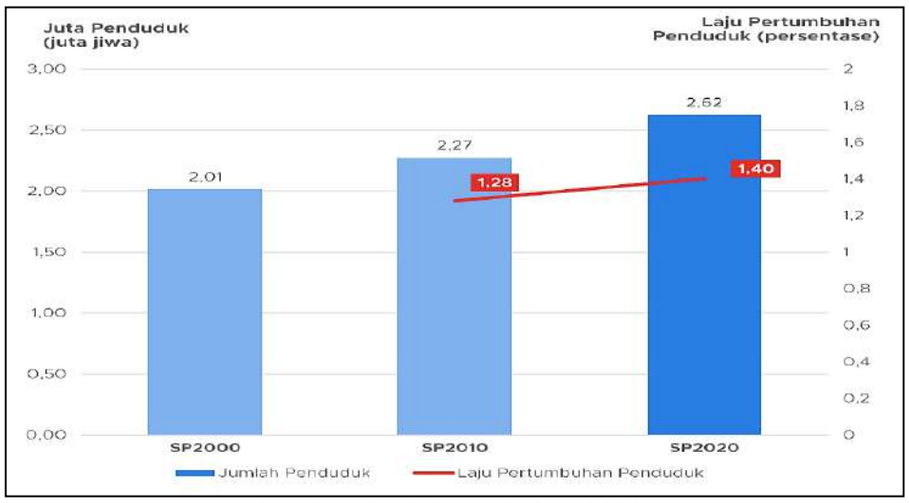
B.6. Areal Penggunaan Lain (APL)
Areal Penggunaan Lain di Provinsi Sulawesi Utara seluas 281.264 Ha terdiri atas: Kawasan Industri, Kawasan Permukiman, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pertambangan serta beberapa jenis kawasan lain yang ada.

2.1.2. Kondisi Demografi

2.1.2.1. Jumlah dan Komposisi Penduduk menurut Umur

Berdasarkan Sensus Penduduk Sulawesi Utara pada bulan September Tahun 2020 (SP2020) penduduk yang terdata sebanyak 2,62 Juta Jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya di tahun 2010, jumlah penduduk Sulawesi Utara terus mengalami peningkatan. Hasil SP2020 dibandingkan dengan SP2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk di sulawesi utara sebanyak 351 ribu jiwa.

Grafik 2.1. Jumlah Penduduk Sulawesi Utara, 2000-2020

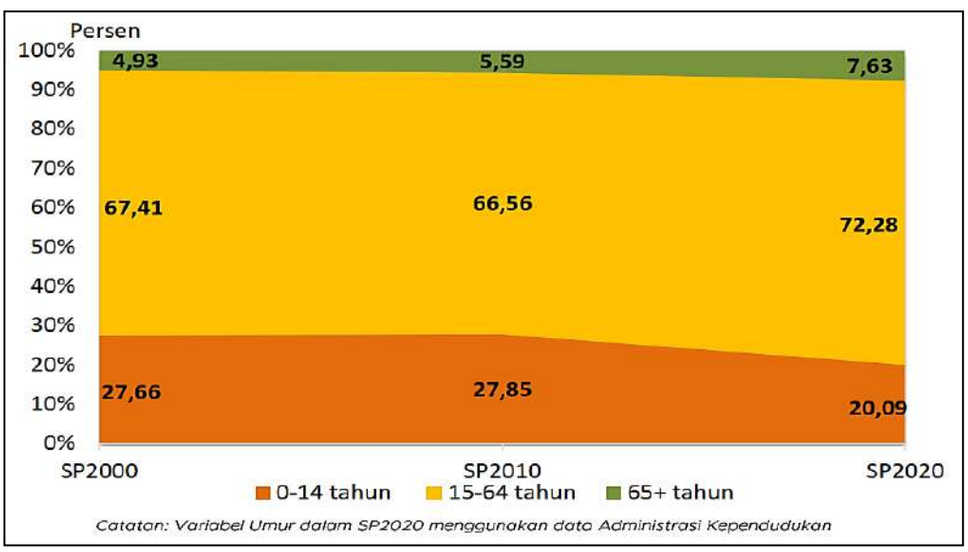


Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara sebesar 1,40 persen per tahun. Terdapat selisih penambahan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,12 poin jika dibandingkan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010 yang sebesar 1,28 persen.

Adapun persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat. Pada tahun 2000, proporsi penduduk usia produktif sebesar 67,41 persen dari total populasi meningkat menjadi 72,28 persen pada tahun 2020. Perbedaan yang signifikan antara persentase penduduk usia produktif dan nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih besar di tahun 2020. Penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif tersebut menunjukan bahwa Sulawesi Utara masih berada dalam masa bonus demografi.

Grafik 2.2 Komposisi Penduduk menurut Umur di Provinsi Sulawesi Utara, 2000-2020



Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

2.1.2.2. Struktur Penduduk

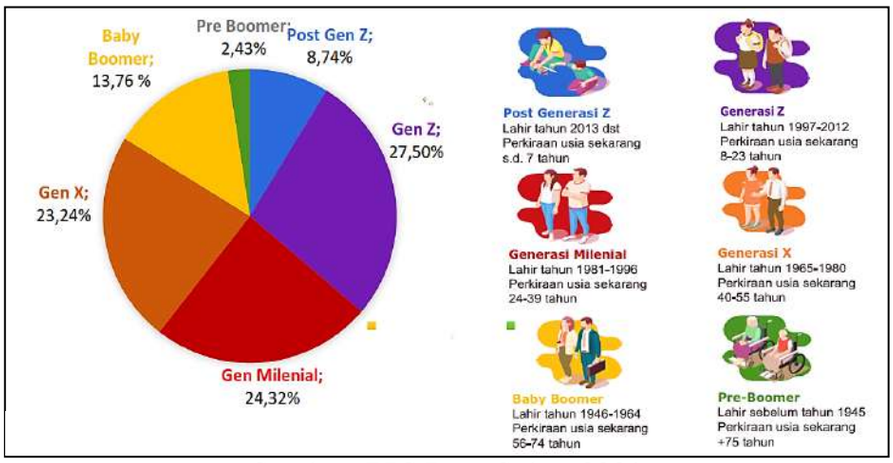
Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil SP2020 mencatat

mayoritas penduduk Sulawesi Utara didominasi oleh Generasi Z dan Generasi Milenial. Proporsi Generasi Z sebanyak 27,50 persen dari total populasi dan Generasi Milenial sebanyak 24,32 persen dari total populasi Sulawesi Utara. Generasi Milenial ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi demografi, seluruh Generasi X dan Generasi Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020. Sedangkan Generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif.

Sekitar 7 tahun lagi, seluruh Generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi Indonesia, baik di masa sekarang maupun masa depan, karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan Indonesia.

Grafik 2.3 Komposisi Penduduk menurut Generasi di Sulawesi Utara Tahun 2020



Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Tabel. 2.9. Indikator Kependudukan Tahun 2016-2020 di Provinsi Sulawesi Utara

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk (000 Jiwa)	2,436	2,461	2,484	2,507	2,621
2	Pertumbuhan penduduk (%)	1,03	1,11	1,09	0,01	1,40
3	Kepadatan penduduk (Jiwa/Km^2)	-	178	176	180	189
4	Sex ratio (L/P) (%)	104,19	104,17	104,15	104,12	105
	Menurut Kelompok Umur					
5	0-14 thn (%)	25,56	25,30	25,04	24,77	20,09
6	15-64 thn (%)	68,30	68,34	68,36	68,36	72,28
7	Di atas 65 thn (%)	6,14	6,36	6,64	6,87	7,63

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

2.1.2.3. Dinamika Penduduk

Dinamika Penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, yang salah satunya disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran. Perkembangan angka kelahiran suatu

daerah diukur dengan menggunakan indikator *Total Fertility Rate (TFR). Total Fertility Rate* adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. TFR digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antarwilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Perkembangan TFR Tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada table berikut.

Tabel 2.10. Perkembangan TFR Tahun 2016 s/d 2020 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	TFR				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	SULAWESI UTARA	2,36	2,3	2,31	2,3	2,28

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021

2.1.2.4. Distribusi/Persebaran Penduduk

Dengan luas daratan Sulawesi Utara sebesar 13.8 ribu kilometer persegi, kepadatan penduduk Sulawesi Utara sebesar 189 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil SP2000 yang mencatat kepadatan penduduk Sulawesi Utara sebanyak 144 jiwa per kilometer persegi dan hasil SP2010 yang mencapai 163 jiwa per kilometer persegi.

Sebaran penduduk Sulawesi Utara terkonsentrasi di daerah perkotaan. misalnya Kota Manado. Meskipun luas geografisnya hanya sebesar 1,13 persen dari wilayah Sulawesi Utara, namun Kota Manado dihuni oleh 451.916 penduduk atau 17,24 persen penduduk Sulawesi Utara. Sebaran Penduduk yang tinggal di daerah administratif kota (Manado, Bitung, Tomohon dan Kotamobagu) berjumlah 901.359 jiwa. Jumlah ini menempati 4,91 persen wilayah Sulawesi Utara. Sementara itu sebaran penduduk paling kecil berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yakni sebanyak 69.791 penduduk atau 2,66 persen dari total populasi Sulawesi Utara.

Tabel 2.11.
Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2020

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA (JIWA)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	236,893	240,505	244,185	247,811	248,751
Minahasa	332,190	335,321	338,364	341,176	347,290
Kepulauan Sangihe	130,024	130,493	130,833	131,163	139,262
Kepulauan Talaud	89,836	90,678	91,599	92,475	94,521
Minahasa Selatan	206,603	208,013	209,501	210,695	236,463
Minahasa Utara	199,498	200,985	202,317	203,624	224,993
Bolaang Mongondow Utara	77,383	78,437	79,366	80,313	83,112
Kepulauan Sitaro	65,827	65,976	66,225	66,403	71,817
Minahasa Tenggara	105,163	105,714	106,303	106,899	116,323
Bolaang Mongondow Selatan	63,207	64,171	65,127	66,071	69,791

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA (JIWA)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow Timur	69,716	70,610	71,477	72,408	88,241
Kota Manado	427,906	430,133	431,880	433,635	451,916
Kota Bitung	208,995	212,409	215,711	219,004	225,134
Kota Tomohon	101,981	103,711	105,306	106,917	100,587
Kota Kotamobagu	121,699	123,872	126,198	128,387	123,722
SULAWESI UTARA	**2,436,921**	**2,461,028**	**2,484,392**	**2,506,981**	**2,621,923**

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Tabel 2.12. Perkembangan Persebaran Penduduk Sulawesi Utara Berdasarkan Jenis Kelamin

Kabupaten/ Kota	Perempuan				Laki-laki			
	2016	2017	2018	2020	2016	2017	2018	2020
KABUPATEN								
Bolaang Mongondow	113.789	115.535	117.285	119 079	123.104	124.970	126.900	129 672
Minahasa	162.281	163.903	165.372	169 855	169.909	171.418	172.992	177 435
Kepulauan Sangihe	64.342	64.482	64.719	68 207	65.682	66.011	66.114	71 055
Kepulauan Talaud	43.936	44.367	44.906	45 783	45.900	46.311	46.693	48 738
Minahasa Selatan	99.975	100.685	101.414	114 365	106.628	107.328	108.087	122 098
Minahasa Utara	98.228	98.858	99.525	110 463	101.270	107.127	102.792	114 530
Bolaang Mongondow Utara	37.820	38.340	38.662	40 333	39.563	40.097	40.704	42 779
Kepulauan Sitaro	33.405	33.400	33.531	35 697	32.422	32.576	32.694	36 120
Minahasa Tenggara	50.673	50.994	51.302	56 074	54.490	54.720	55.001	60 249
Bolaang Mongondow Selatan	30.180	30.556	31.144	33 441	33.027	33.615	33.983	36 350
Bolaang Mongondow Timur	33.329	33.814	34.172	42 165	36.387	36.796	37.305	46 076
KOTA								
Kota Manado	213.172	214.301	215.058	224 938	214.734	215.832	216.822	226 978
Kota Bitung	102.164	103.928	105.622	109 603	106.831	108.481	110.089	115 531
Kota Tomohon	50.595	51.397	52.306	49 772	51.386	52.314	53.000	50 815
Kota Kotamobagu	59.589	60.797	61.907	60 230	62.110	63.075	64.291	63 492
SULAWESI UTARA	**1.193.478**	**1.205.357**	**1.216.925**	**11 280 005**	**1.243.443**	**1.255.671**	**1.267.467**	**1 341 918**

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

2.1.2.5. Komposisi Penduduk dan Populasi Masyarakat Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar kerja. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Sulawesi Utara pada Agustus 2020 meningkat menjadi 1,93 juta atau naik 19,9 ribu orang dibandingkan Agustus 2019. Dari sejumlah penduduk usia kerja tersebut, 63,42 persen atau 1,23 juta orang merupakan angkatan kerja, terdiri dari 1,13 juta orang penduduk bekerja dan 90,25 ribu orang pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka berada di angka 7,37 persen, naik 1,36 poin bila dibandingkan Agustus 2019. Hampir semua kab/kota mengalami kenaikan TPT selama setahun terakhir. Jika dilihat polanya kenaikan TPT tertinggi sebagian besar terjadi di wilayah administrasi perkotaan atau wilayah yg berbatasan dengan perkotaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2020, turun 0,52 poin dari Agustus 2019. Penurunan nilai TPAK ini terkait dengan pandemi

COVID-19 yang tengah berlangsung. Jumlah penduduk yang bekerja berkurang dan belum masuk kembali ke pasar kerja sehingga menambah jumlah kelompok bukan angkatan kerja. Hal tersebut mengindikasikan penurunan potensi ekonomi dari sisi suplai tenaga kerja. Pada Agustus 2020, TPAK di Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebesar 63,42 persen, artinya dari 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 63 orang yang aktif secara ekonomi.

Tabel.2.13. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Sulawesi Utara

NO	KEGIATAN UTAMA	TAHUN (JIWA)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk Usia Kerja	1,818,162	1,842,800	1,866,055	1,911,722	1,931,636
2	Angkatan Kerja	1,183,721	1,121,309	1,175,809	1,222,400	1,225,050
	Bekerja	1,110,564	1,040,826	1,095,145	1,148,987	1,134,802
	Pengangguran Terbuka	73,157	80,483	80,664	73,413	90,248
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,11	60,85	63,01	63,94	63,42
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,18	7,18	6,86	6,01	7,37

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Peningkatan pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Utara dalam 5 (lima) tahun terakhir diikuti oleh peningkatan pertumbuhan 17 sektor/lapangan usaha. Secara keseluruhan pertumbuhan PDRB ADHK dari tahun 2016 sampai 2020 mencapai 17,87%, kondisi ini dipengaruhi oleh dampak pandemic COVID 19. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu menjaga keberlanjutan pertumbuhan masing-masing sektor PDRB sehingga pertumbuhan ekonomi pada akhir periode RPJMD tidak negatif.

Tabel 2.14. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 *(dalam juta rupiah)*

Sektor/ Lapangan Usaha	Harga Konstan				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.141.887,40	15.817.344,00	16.378.542,00	17.339.482,00	17.695.949,00
Pertambangan dan Penggalian	3.659.302,60	3.991.183,00	4.343.225,00	4.714.004,00	4.650.508,00
Industri Pengolahan	7.417.069,50	8.010.190,00	8.368.986,00	8.395.329,00	8.752.856,00
Pengadaan Listrik dan Gas	94.609,60	99.137,00	102.620,00	112.041,00	119.828,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	100.024,90	100.831,00	104.147,00	108.748,00	113.292,00

Sektor/ Lapangan Usaha	Harga Konstan				
	2016	2017	2018	2019	2020
Konstruksi	9.862.173,50	10.593.031,00	11.351.939,00	12.011.695,00	11.503.346,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.587.905,40	10.117.866,00	10.700.477,00	11.645.210,00	11.452.658,00
Transportasi dan Pergudangan	6.552.877,00	6.922.865,00	7.467.829,00	7.878.269,00	6.797.629,00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.736.046,50	1.848.842,00	1.958.951,00	2.013.893,00	1.491.170,00
Informasi dan Komunikasi	3.505.986,10	3.753.807,00	4.046.717,00	4.369.734,00	4.846.156,00
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.986.972,80	3.187.945,00	3.203.612,00	3.323.865,00	3.520.451,00
Real Estate	2.790.024,80	2.991.486,00	3.218.628,00	3.363.395,00	3.328.413,00
Jasa Perusahaan	61.888,50	67.490,00	73.591,00	78.927,00	74.745,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.293.650,40	5.581.654,00	5.875.031,00	5.872.911,00	5.806.435,00
Jasa Pendidikan	1.876.573,80	1.982.364,00	2.161.349,00	2.422.244,00	2.456.117,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosialt	2.894.963,10	3.115.678,00	3.444.889,00	3.690.477,00	3.999.186,00
Jasa lainnya	1.202.704,70	1.303.761,00	1.458.158,00	1.687.826,00	1.517.636,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**74.764.660,50**	**79.485.474,00**	**84.258.691,00**	**89.028.051,00**	**88.126.374,00**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Data menunjukkan sektor Informasi dan Komunikasi bertumbuh sebesar 38,23%, hal ini dapat dimaklumi karena dengan adanya pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 sebagian besar rapat/pertemuan dilaksanakan secara daring. Selanjutnya sektor yang mengalami pertumbuhan kedua terbesar adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu 38,14% hal ini disebabkan anggaran difokuskan pada jasa kesehatan dan kegiatan sosial dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak pandemic COVID-19 maupun untuk mencegah penyebaran COVID-19 ditengah masyarakat. Penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki nilai pertumbuhan terendah yaitu -14,11% hal ini disebabkan karena adanya pembatasan sosial yang menyebabkan menurunnya jumlah orang yang melakukan perjalanan dan aktifitas makan minum diluar rumah.

Pertumbuhan PDRB atas harga berlaku juga terus meningkat selang tahun 2016 – 2020. Namun perlu diperhatikan bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dalam RPJMD adalah 6,4% dan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2020 hanya -0,99% hal ini disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19.

Tabel 2.15. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 *(dalam juta rupiah)*

Sektor/ Lapangan Usaha	Harga Berlaku				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21.828.441,00	23.710.193,00	25.043.800,00	27.118.985,00	28.459.883,00
Pertambangan dan Penggalian	4.846.605,00	5.329.459,00	5.932.142,00	6.602.929,00	7.178.794,00
Industri Pengolahan	9.044.182,00	10.310.606,00	10.952.336,00	11.361.121,00	12.646.946,00
Pengadaan Listrik dan Gas	87.897,00	104.622,00	109.704,00	120.651,00	133.570,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	130.618,00	135.448,00	140.733,00	148.153,00	157.479,00
Konstruksi	11.451.160,00	12.635.541,00	14.077.436,00	15.356.041,00	14.987.747,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.176.965,00	13.316.278,00	14.520.696,00	16.595.416,00	17.273.918,00
Transportasi & Pergudangan	11.073.506,00	11.985.903,00	13.390.110,00	14.545.675,00	12.401.865,00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.259.548,00	2.445.081,00	2.614.159,00	2.702.181,00	1.968.971,00
Informasi dan Komunikasi	3.879.202,00	4.321.366,00	4.718.303,00	5.194.582,00	5.747.231,00
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.980.668,00	4.415.378,00	4.566.458,00	4.860.314,00	5.194.337,00
Real Estate	3.483.293,00	3.803.297,00	4.185.937,00	4.471.957,00	4.472.904,00
Jasa Perusahaan	88.216,00	102.183,00	119.188,00	133.152,00	130.021,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.300.778,00	8.924.536,00	9.552.854,00	9.880.643,00	9.921.539,00
Jasa Pendidikan	2.828.451,00	3.014.931,00	3.335.687,00	3.840.816,00	4.024.969,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.511.344,00	3.845.772,00	4.275.024,00	4.785.680,00	5.308.716,00
Jasa lainnya	1.542.970,00	1.719.995,00	2.009.044,00	2.483.063,00	2.290.527,00
Produk Domestik Regional Bruto	**100.513.843**	**110.120.589**	**119.543.612**	**130.201.361**	**132.299.414**
PDRB Tanpa Migas	**100.359.552,00**	**109.840.402,00**	**119.285.474,00**	**-**	**-**

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021



Menurut harga berlaku tampak bahwa pertumbuhan PDRB mencapai 31,62 % dari tahun 2016 - 2020. Awal ahun 2020 sampai TW II sudah terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Perekonomian Sulawesi Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2020 hanya mencapai Rp132,29 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp 88,126 triliun.

Ekonomi Sulawesi Utara tahun 2020 tumbuh negatif 0,99 persen *(y-on-y)*. Dari sisi produksi, sebagian besar lapangan usaha mengalami kontraksi, dengan kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar - 25,96 persen.

Tabel 2.16. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)

SEKTOR	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (%)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,69	21,72	21,53	20,95	20,82	21,51
Pertambangan dan Penggalian	4,75	4,82	4,84	4,96	5,07	5,43
Industri Pengolahan	9,46	9,00	9,36	9,15	8,72	9,56
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,09	0,10	0,09	0,09	0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,12
Konstruksi	11,57	11,39	11,47	11,78	11,80	11,33
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,33	12,11	12,09	12,14	12,75	13,06
Transportasi & Pergudangan	10,62	11,02	10,88	11,20	11,19	9,37
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,15	2,25	2,22	2,19	2,08	1,49
Informasi dan Komunikasi	3,82	3,86	3,92	3,96	3,99	4,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,55	3,96	4,01	3,82	3,73	3,93
Real Estate	3,51	3,47	3,45	3,50	3,44	3,38
Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,41	8,26	8,10	7,99	7,59	7,50
Jasa Pendidikan	2,86	2,81	2,74	2,79	2,94	3,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,46	3,49	3,49	3,57	3,67	4,01
Jasa lainnya	1,50	1,54	1,56	1,68	1,91	1,73
PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020

Kontribusi Sektor pertanian masih dominan membentuk PDRB Provinsi Sulawesi Utara, walaupun sudah terjadi penurunan baik untuk PDRB atas harga berlaku maupun PDRB atas harga konstan.

Tabel 2.17. Persentase Kontribusi PDRB Tahun 2016-2020 Seluruh Kabupaten /Kota Tahun 2016 - 2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	5,95	5,95	6,02	6,13	6,32
Minahasa	13,34	13,21	13,16	13,11	13,12
Kepulauan Sangihe	3,37	3,34	3,28	3,25	3,31
Kepulauan Talaud	1,78	1,75	1,71	1,69	1,71
Minahasa Selatan	6,68	6,69	6,63	6,59	6,61
Minahasa Utara	10,42	10,43	10,54	10,58	10,70
Bolaang Mongondow Utara	1,93	1,92	1,90	1,90	1,94
Kepulauan Sitaro	1,77	1,78	1,80	1,81	1,84
Minahasa Tenggara	3,97	3,98	3,93	3,91	3,93
Bolaang Mongondow Selatan	1,58	1,57	1,59	1,60	1,62

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow Timur	2,21	2,21	2,19	2,20	2,32
Kota Manado	28,37	28,35	28,53	28,62	27,58
Kota Bitung	12,70	12,83	12,65	12,49	12,86
Kota Tomohon	3,23	3,27	3,27	3,29	3,29
Kota Kotamobagu	2,72	2,72	2,78	2,83	2,85
TOTAL	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Data menunjukkan bahwa sektor yang kontribusinya meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sektor pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum. Jika dilihat menurut kontribusi kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, tampak bahwa, Kota Manado memberi kontribusi terbesar sebagai ibu kota Provinsi, diikuti oleh Kabupaten Minahasa dan Kota Bitung. Dalam 2 (dua) tahun terakhir kontribusi terkecil adalah dari Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan di tahun 2017 dan 2018 ternyata kontribusi terkecil pun masih berasal dari Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Tabel 2.18. Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016 - 2020 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	6,62	6,67	7,49	7,59	0,80
Minahasa	6,06	6,07	6,10	5,77	-1,03
Kepulauan Sangihe	6,08	5,45	5,50	5,43	0,50
Kepulauan Talaud	5,28	5,10	5,02	4,69	0,43
Minahasa Selatan	5,09	6,53	6,09	5,97	-0,77
Minahasa Utara	7,05	6,51	6,41	6,18	-0,93
Bolaang Mongondow Utara	6,16	6,28	6,18	6,17	0,71
Kepulauan Sitaro	7,00	6,99	6,73	6,65	1,03
Minahasa Tenggara	6,32	6,36	6,00	5,98	-0,64
Bolaang Mongondow Selatan	6,13	6,24	6,56	6,39	0,63
Bolaang Mongondow Timur	5,57	5,71	5,06	4,80	0,18
Kota Manado	7,18	6,74	6,65	6,03	-3,13
Kota Bitung	5,21	6,18	6,01	4,06	1,37
Kota Tomohon	4,10	8,84	6,12	6,76	-0,41
Kota Kotamobagu	6,63	6,79	6,66	6,13	0,20
Sulawesi Utara	**6,16**	**6,31**	**6,00**	**5,65**	**-0,99**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020

Jika dilihat dari laju pertumbuhan PDRB sejak tahun 2018 telah terjadi perlambatan pertumbuhan PDRB ataupun pertumbuhan ekonomi. Tentunya menjadi tantangan bagi daerah untuk mempertahankan perlambatan pertumbuhan ekonomi agar tidak negatif di akhir tahun 2020.

2.2.1.2. Laju Inflasi



Rata- rata pertumbuhan inflasi dalam 5 tahun terakhir adalah 2,6%, jika dilihat dari target RPJMD untuk tahun 2019 adalah 5% dengan capaian yang ada menunjukkan bahwa status pencapaian inflasi di Provinsi Sulawesi Utara melampaui target.

Tabel 2.19. Nilai Inflasi Rata-rata Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020

Provinsi	Inflasi					Rata-rata pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	
Sulawesi Utara	0,35	2,44	3,83	3,52	-0,09	2,6

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020

Dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran di kota Manado, penurunan indeks terjadi pada kelompok transportasi sebesar -8,81 persen, kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan sebesar -1,12 persen dan kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar -0,4 persen. September 2020 Kota Manado mengalami Deflasi sebesar 0,36 persen karena adanya penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,26 pada Agustus 2020 menjadi 104,88 pada September 2020.



Kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks adalah kelompok pendidikan sebesar 10,68 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,31 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,16 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,06 persen dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen. Kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan adalah kelompok kesehatan, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan dan kelompok pendidikan.

Grafik 2.4. Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020

Jika dilihat dari kelompok pengeluaran ternyata laju pengeluaran terbesar yang menyumbang inflasi adalah kelompok sandang, diikuti kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

2.2.1.3. Indeks Gini



Indeks Gini sebagai salah satu indikator ketimpangan menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di perkotaan lebih tinggi dari di perdesaaan. Dalam 5 (lima) tahun terakhir terdapat penurunan ketimpangan pendapatan di perdesaan, sebaliknya terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan di perkotaan.

Hal ini yang menyebabkan kondisi ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara yang hanya 0,379 tahun 2016 meningkat menjadi 0,370 di tahun 2020. Dilihat dari pencapaian kinerja pembangunan daerah dengan target indeks gini 0.39 tahun 2020, berarti dari sisi ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Utara target tercapai.

Tabel 2.20. Perkembangan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020*
Perdesaan	0.350	0.346	0.368	0.346	0.340
Perkotaan	0.388	0.389	0.364	0.375	0.370
SULUT	**0.379**	**0.394**	**0.372**	**0.367**	**0.370**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Kondisi pandemi COVID-19 menjadi tantangan baru bagi daerah untuk mempertahankan kinerja pembangunan. Jika dampak pandemi memiliki *gap* yang besar bagi kelompok masyarakat pendapatan rendah dan tinggi, akan berdampak pada peningkatan kesenjangan di akhir tahun 2020.

2.2.1.4. Distribusi Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia



Perencanaan dalam pemerataan dampak pembangunan menurut versi Bank Dunia di bagi atas 3 (tiga) kelompok besar yaitu kelompok penduduk 40% terbawah, kelompok penduduk 40% menengah dan penduduk 20% teratas. Jika dilihat menurut perkotaan dan perdesaan menunjukkan distribusi pengeluaran penduduk perkotaan lebih tinggi di bandingkan di perdesaan.

Secara keseluruhan distribusi pengeluaran penduduk di Provinsi Sulawesi Utara dominan berada pada kelompok penduduk 20% teratas, namun jika dilihat pada tahun 2019 ke September 2020 kelompok penduduk 40% menengah mengalami penurunan.

Tabel 2.21. Distribusi Pengeluaran Penduduk Sulawesi Utara Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (%)

URAIAN	Penduduk 40% Terbawah	Penduduk 40% Menengah	Penduduk 20% Teratas
Perdesaan			
September 2019	18,75	39,37	41,88
Maret 2020	19,08	39,09	41,84
September 2020	**20,52**	**35,68**	**43,80**
Perkotaan			
September 2019	17,12	39,65	43,23
Maret 2020	17,25	39,45	43,30
September 2020	**19,28**	**35,50**	**45,22**
SULAWESI UTARA			
September 2019	17,38	38,30	44,32
Maret 2020	17,62	38,44	43,94
September 2020	**19,11**	**35,65**	**45,24**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020 **(data susenas Sept. 2019 – Sept 2020)**

2.2.1.5. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap Pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluative, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.





Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi dasar non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Tabel 2.22. Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara dan Nasional

Persentase Penduduk Miskin	Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Sulawesi Utara	8,34	8,20	8,10	7,90	7,80	7,59	7,66	7,51	7,62	7,78
Nasional	10,86	10,70	10,64	10,12	9,82	9,66	9,41	9,22	9,78	10,19

Ket:
I: Semester 1, Maret;
II: Semester 2, September
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Ukuran kemiskinan:

a. *Head Count Index* (HCI-P_0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK)
b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
c. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Indeks-P_2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Kondisi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara selang tahun 2016 – 2020 berada di bawah nasional. Persentase penduduk miskin Sulawesi Utara dan nasional memiliki pola yang sama pada September 2016 dan September 2019, dimana persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan namun pada tahun 2020 angka kemiskinan Sulawesi Utara dan nasional mengalami kenaikan.

Tabel 2.23. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	8,34	8,02	7,67	7,47	7,27
Minahasa	8,36	7,90	7,30	7,18	7,30
Kepulauan Sangihe	12,28	11,80	11,82	11,15	11,14
Kepulauan Talaud	10,29	9,77	9,50	9,86	9,49
Minahasa Selatan	9,92	9,78	9,34	9,26	9,14
Minahasa Utara	7,90	7,46	6,99	6,93	7,00
Bolaang Mongondow Utara	9,38	8,89	8,64	8,45	8,41
Kepulauan Sitaro	10,58	10,33	9,87	9,56	8,94
Minahasa Tenggara	14,71	14,08	13,29	12,78	12,30
Bolaang Mongondow Selatan	14,85	14,16	13,60	13,27	12,77
Bolaang Mongondow Timur	6,77	6,20	6,03	6,10	5,88
Kota Manado	5,24	5,46	5,38	5,51	5,86
Kota Bitung	6,57	6,62	6,67	6,49	6,41
Kota Tomohon	6,56	6,47	5,95	5,62	5,60
Kota Kotamobagu	6,01	5,90	5,96	5,71	5,42
SULAWESI UTARA	**8,20**	**7,90**	**7,59**	**7,51**	**7,62**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Secara umum, pada periode 2016-2020 angka kemiskinan di Sulawesi Utara cenderung berfluktuatif namun menunjukkan tren menurun dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Selama periode Maret 2019 - September 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 3,9 ribu orang (dari 64,90 ribu orang naik menjadi 68,80 ribu orang), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 0,13 ribu orang (dari 123,70 ribu orang turun menjadi 123,57 ribu orang).

Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Sulawesi Utara mencapai192,37 ribu orang (7,62 persen), naik 3,77 ribu orang dari kondisi September 2019 yang sebesar 188,60 ribu orang (7,51 persen). Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin naik sebanyak 0,67 ribu orang.

Tabel 2.24. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Utara, Maret 2019-September 2020

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase
Perkotaan		
Maret 2019	65,49	5,01
September 2019	64,90	4,95
Maret 2020	68,80	5,22
September 2020	71,66	5,31
Perdesaan		
Maret 2019	126,20	10,56
September 2019	123,70	10,30
Maret 2020	123,57	10,25
September 2020	124,19	10,64
Perkotaan + Perdesaan		
Maret 2019	191,70	7,66
September 2019	188,60	7,51
Maret 2020	192,37	7,62
September 2020	195,85	7,78

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Bila dibandingkan kondisi September 2019, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan naik 0,36 persen menjadi 5,31 persen, begitu juga persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik sebesar 0,34 persen poin menjadi 10,64 persen pada September 2020.

Tabel 2.25. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Sulawesi Utara menurut Daerah Tempat Tinggal, Maret 2019-Maret 2020

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)			
Maret 2019	0,769	1,619	1,175
September 2019	0,464	1,356	0,890
Maret 2020	0,782	1,538	1,143
September 2020	0,90	1,60	1,23
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)			
Maret 2019	0,158	0,351	0,250
September 2019	0,083	0,270	0,173
Maret 2020	0,152	0,352	0,248
September 2020	0,19	0,42	0,30

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Dimensi kemiskinan lainnya yang perlu diperhatikan adalah indeks kedalaman dan indeks keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan ketimpangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Selama periode September 2019 - September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sulawesi Utara mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2019 adalah 0,890 dan pada September 2020 naik menjadi 1,23. Kemudian, Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode yang sama juga mengalami peningkatan dari 0,173 menjadi 0,30 (Tabel 2.19). Sementara itu, untuk periode Maret 2019-Maret 2020, Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Kepararahan Kemiskinan (P2) sama-sama mengalami penurunan.

Selama periode September 2019 - September 2020, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di perdesaan maupun di perkotaan mengalami peningkatan. Hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan dan di perdesaan cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin makin besar. Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai P_1 dan P_2 di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2020, nilai P_1 untuk daerah perdesaan hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan P_1 daerah perkotaan.

Tabel 2.26. Garis Kemiskinan dan Perubahan Daerah Tempat Tinggal, Maret 2019 – Maret 2020

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Non Makanan	Total
Perkotaan			
Maret 2019	277 437	92 261	369 608
September 2019	283 576	94 021	377 597
Maret 2020	300 906	95 077	395 983
September 2020	306 074	96 428	402 502
Perubahan Sep'19-Sep'20 (%)	7,93	2,56	6,60
Perubahan Mar'19-Sep'20 (%)	1,72	1,42	1,65
Perdesaan			
Maret 2019	295 007	77 187	372 194
September 2019	297 736	84 147	381 883
Maret 2020	301 162	84 796	385 957
September 2020	307 159	85 659	392 818
Perubahan Sep'19-Sep'20 (%)	3,16	1,80	2,86
Perubahan Mar'19-Sep'20 (%)	1,99	1,02	1,78
Perkotaan + Perdesaan			
Maret 2019	286 215	85 067	371 283
September 2019	290 623	89 301	379 923
Maret 2020	301 032	90 165	391 197
September 2020	306 583	91 444	398 026
Perubahan Sep'19-Sep'20 (%)	5,49	2,40	4,76
Perubahan Mar'19-Sep'20 (%)	1,84	1,42	1,75

Sumber: BPS - Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2019, Maret 2020. Dan September 2020

Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2019-Maret 2020

Garis kemiskinan dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada Maret 2019 dengan Maret 2020.

Selama periode Maret 2020-September 2020, Garis Kemiskinan naik 1,75 persen, yaitu dari Rp391.197,- per kapita per bulan di maret 2020 menjadi Rp 398.026,- per kapita bulan pada September 2020. Sementara selama periode September 2019-September 2020, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,76 persen, yaitu dari Rp 379.923,- per kapita per bulan pada September 2019 menjadi Rp398.026,- per kapita per bulan pada September 2020.

Dalam upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan Amanat Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 53 Tahun 2020, tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Daerah, menegaskan bahwa Penanggulangan Kemiskinan harus dilakukan secara sistematis, terencana dan sinergis antar tingkatan pemerintah, mulai dari pusat hingga pemerintah daerah serta lintas sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi.

Gubernur dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dengan keputusan gubernur, sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di provinsi. Hal yang sama juga ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing dengan keputusan bupati/wali kota.

TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota menyelenggarakan tugas dan fungsi, diantaranya adalah melakukan penyusunan RPKD dan rencana aksi provinsi serta penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten/kota. Adapun Secara khusus TKPK provinsi melakukan harmonisasi penyusunan RPKD kabupaten/kota. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:

Strategi:

1. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro kecil; dan
4. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Program:

1. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
3. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Pembangunan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan yang hakiki tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok tetapi secara holistik dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan harus berimplikasi pada perubahan kualitas manusia. Pembangunan yang berpihak kepada kualitas manusia itu bercirikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah dalam jangka panjang. Berdasarkan ketentuan *United Nation Development Programe* (UNDP), penghitungan IPM untuk seluruh negara menggunakan metode baru. Hal ini dikarenakan IPM metode lama mempunyai kelemahan dan perlu diperbaharui. Pada metode baru ini, angka melek huruf sudah tidak dipakai lagi digantikan angka harapan sekolah dan penghitungan kompositnya menggunakan *geometric mean*. Dampak dari perubahan penghitungan ini, menyebabkan terjadi perubahan angka IPM menjadi lebih rendah dibanding metode lama.

Dalam melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu kecepatan dan status pencapaian IPM. Secara umum, pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2019 yaitu dari 67,83 pada tahun 2010 menjadi 72,99 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Sulawesi Utara rata-rata tumbuh sebesar 0,82 persen per tahun, dan meningkat dari level "sedang" menjadi "tinggi" mulai tahun 2015. Namun, pada tahun 2020 IPM Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan 0,06 poin dibandingkan tahun sebelumnya. IPM Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 sebesar 72,93 atau tumbuh sebesar minus 0,08 persen dibandingkan IPM tahun sebelumnya. Namun demikian Kondisi IPM Sulawesi Utara berada di atas rata-rata nasional.

Tabel 2.27. Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara dan Nasional

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sulawesi Utara	71,05	71,66	72,20	72,99	72,93
Nasional	71,12	71,46	72,07	73,16	71,94

Sumber: BPS Pusat dan BPS Provinsi Sulawesi Utara

Jika dilihat menurut capaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Jumlah kabupaten/kota yang berstatus pembangunan manusia "tinggi" ada sembilan yaitu Minahasa, Kepulauan Sangihe, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Manado, Bitung, Tomohon, dan Kotamobagu. Enam kabupaten/kota lainnya berstatus pembangunan manusia "sedang". Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus pembangunan manusia baik "sangat tinggi" maupun "rendah" di Sulawesi Utara.

Peningkatan IPM di Sulawesi Utara tercermin pada level kabupaten/kota. Meskipun selama periode 2019 hingga 2020 terjadi

pandemi COVID-19, tetapi komponen IPM di seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan kecuali Pengeluaran per Kapita.

Pada periode ini, tercatat tiga kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud (0,62 persen), Kabupaten Minahasa Selatan (0,60 persen), dan Kabupaten Kepulauan Sangihe (0,28 persen). Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe utamanya didorong oleh dimensi pendidikan.

Tabel 2.28. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	65,73	66,08	66,91	67,82	67,89
Minahasa	74,37	74,59	74,97	75,47	75,29
Kepulauan Sangihe	68,52	69,14	69,67	70,53	70,73
Kepulauan Talaud	67,58	67,74	68,32	68,97	69,40
Minahasa Selatan	69,97	70,05	70,86	71,68	72,11
Minahasa Utara	71,49	72,20	73,05	73,95	73,90
Bolaang Mongondow Utara	65,16	65,60	66,32	66,91	66,99
Kepulauan Sitaro	65,66	66,03	66,75	67,48	67,64
Minahasa Tenggara	68,42	68,91	69,66	70,47	70,51
Bolaang Mongondow Selatan	63,92	64,05	64,49	65,28	65,00
Bolaang Mongondow Timur	64,44	64,73	65,21	66,08	65,99
Kota Manado	77,59	78,05	78,41	79,12	78,93
Kota Bitung	72,43	72,94	73,27	74,20	74,10
Kota Tomohon	74,91	75,34	75,78	76,67	76,69
Kota Kotamobagu	71,68	72,00	72,55	73,22	72,97
SULAWESI UTARA	**71,05**	**71,66**	**72,20**	**72,99**	**72,93**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

2.2.1.7. Indeks Pembangunan Gender (IPG)



Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Peran perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Sayangnya, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial. Upah kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki. Selain itu, masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada urusan dapur rumah tangga. Sehingga kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat.

Evaluasi untuk meningkatkan pembangunan perempuan diperlukan agar posisi perempuan semakin sejajar setara dengan laki-laki. Sehingga peran perempuan dalam memberikan nilai tambah di masyarakat akan semakin nyata.

Penghitungan IPG ini juga memakai metodologi yang dipakai pada penghitungan IPM metode baru. Sehingga angka yang sekarang digunakan

menggantikan angka angka IPG yang pernah dipublikasikan. Dengan berlakunya IPG menggunakan metode baru, maka angka yang disajikan tidak bisa dibandingkan dengan angka-angka sebelumnya. Membandingkannya harus sesuai metode yang digunakan. Hasil penghitungan IPG metode baru, tercatat bahwa IPG Sulawesi Utara mengikuti tren naik.

Tabel 2.29. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Sulawesi Utara

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sulawesi Utara	95,04	94,78	94,79	94,53	94,42
Nasional	90,82	90,96	90,99	91,07	91,06

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara

IPG Provinsi Sulawesi Utara selang tahun 2017 – 2020 berada di atas nasional, walaupun terjadi penurunan yang signifikan di tahun 2020. Jika dilihat berdasarkan kabupaten kota IPG tertinggi terdapat di Kota Tomohon dan terendah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Tabel 2.30. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	-	87,72	88,03	88,36	88,29
Minahasa	-	96,22	96,48	96,76	96,53
Kepulauan Sangihe	-	96,10	96,10	95,35	95,23
Kepulauan Talaud	-	97,18	97,64	97,67	97,90
Minahasa Selatan	-	88,53	89,31	88,81	88,74
Minahasa Utara	-	96,26	96,80	96,42	96,40
Bolaang Mongondow Utara	-	85,46	86,19	86,92	86,77
Kepulauan Sitaro	-	87,64	88,28	88,43	88,40
Minahasa Tenggara	-	91,81	92,21	91,87	91,88
Bolaang Mongondow Selatan	-	78,34	79,39	79,87	79,70
Bolaang Mongondow Timur	-	90,50	90,51	90,75	90,84
Kota Manado	-	95,96	96,07	96,28	96,23
Kota Bitung	-	94,87	95,01	94,23	94,19
Kota Tomohon	-	99,89	99,20	98,98	98,94
Kota Kotamobagu	-	94,78	95,13	95,42	95,37
SULAWESI UTARA	**95,04**	**94,78**	**94,79**	**94,53**	**94,42**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

2.2.1.8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Masalah pengangguran merupakan salah satu prioritas nasional di Provinsi Sulawesi Utara, sampai tahun 2020 sebelum adanya shock COVID 19. Peran pasar kerja sangat besar dalam menjaring mereka yang mencari pekerjaan dan membutuhkan karyawan.

Tabel 2.31. Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Utara

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sulawesi Utara	6,18	7,18	6,86	6,25	7,37
Nasional (Agustus)	5,61	5,50	5,34	5,28	7,07

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Data menunjukkan bahwa sudah terjadi fluktuasi angka pengangguran dari 2016 sampai 2020 dimana pada tahun 2016 6,18% meningkat pada tahun 2017 menjadi 7,18 kemudian menurun di 2018 dan 2019 mencapai 6,25 %, pada tahun 2020 kembali meningkat 7,37 % karena dampak dari pandemic Covid-19. Tahun 2020 dengan adanya COVID 19 terjadi peningkatan pengangguran yang merupaka dampak kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Tabel. 2.32. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Se-Sulut

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	4,88	3,58	4,39	4,87
Minahasa	6,91	7,35	5,88	6,30
Kepulauan Sangihe	5,11	3,71	4,18	4,91
Kepulauan Talaud	3,50	2,23	2,81	2,64
Minahasa Selatan	7,38	5,93	4,23	5,01
Minahasa Utara	9,48	6,72	5,01	7,88
Bolaang Mongondow Utara	4,71	5,08	4,62	5,48
Kepulauan Sitaro	2,86	2,82	2,78	3,31
Minahasa Tenggara	5,72	4,82	3,18	3,31
Bolaang Mongondow Selatan	6,34	4,54	4,79	4,39
Bolaang Mongondow Timur	7,32	8,18	6,37	6,13
Kota Manado	9,35	10,38	10,46	13,88
Kota Bitung	9,85	11,21	9,80	10,23
Kota Tomohon	8,94	8,22	7,75	8,99
Kota Kotamobagu	5,71	5,73	5,82	7,44
SULAWESI UTARA	**7,18**	**6,86**	**6,25**	**7,37**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara – Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

Menurut kabupaten kota tahun 2020 pengangguran tertinggi terdapat di Kota Manado dan begitu juga setelah adanya pandemi COVID-19, yang terendah terjadi di daerah kabupaten kepulauan SITARO. Setelah adanya COVID-19 persentase tingkat pengangguran terbuka terendah ada di Kabupaten Kepulauan Talaud.

2.2.1.9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)



Kualitas Lingkungan Hidup saat ini dapat diukur secara kuantitatif dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH saat ini mencakup aspek udara (Indeks Kualitas Udara / IKU), air sungai (Indeks Kualitas Air / IKA) dan tutupan hutan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan / IKTL). Ketiga indikator tersebut (termasuk didalamnya Indeks Kualitas Air Laut/IKAL yang kini juga menjadi komponen penilaian IKLHD) akan diuraikan lebih lanjut pada sub bab 2.3.2.6 dalam laporan ini. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) merupakan suatu bentuk penilaian yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan.

Penetapan IKLHD sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan tentang kondisi lingkungan menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan. Juga sebagai bentuk pertanggungjawaban tentang pencapaian target program-program di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Detail capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) di Sulawesi Utara:

Tabel 2.33. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	64,10	68,67	67,63	65,14	70,51

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021



Klasifikasi IKLH adalah sebagai berikut:
1. Unggul : >90
2. Sangat baik : 82 – 90
3. Baik : 74 - 82
4. Cukup : 66 – 74
5. Kurang : 58 - 66
6. Sangat Kurang : 50 – 58
7. Waspada : <50

Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan bobot sebesar 40%. Perkembangan IKLH Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2016 menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, yaitu dari 64,10 (Kategori Kurang) menjadi Kategori Cukup dengan nilai 68,7 tahun 2017 dan 67,63 tahun 2018. Di tahun 2019, turun menjadi 65,14 (Kategori Kurang) dan meningkat menjadi 70,51 (Kategori Cukup) di tahun 2020. Kedepan, akan terus ditingkatkan kualitas dan pencapaian target program-program di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencapai target IKLHD Provinsi Tahun 2020 sebesar 67,00-68,52 atau dengan kategori baik.

Untuk perhitungan IKLH pada periode tahun 2021 – 2026 telah mengalami penambahan 1 (satu) aspek, yakni aspek Air Laut (Indeks

Kualitas Air Laut/IKAL). Perhitungan IKAL Sulawesi Utara sejatinya sudah dimulai pada tahun 2020, yang mana dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 25 titik sampling yang tersebar di Kabupaten Minahasa (6 titik), Kota Manado (8 titik), Kabupaten Minahasa Selatan (4 titik), Kabupaten Minahasa Utara (4 titik) dan Kota Bitung (3 titik). Sedangkan perhitungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan di 6 titik sampling masing-masing di Kabupaten Minahasa Utara (3 titik) dan Kota Bitung (3 titik). Hasil perhitungan IKAL Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 berada pada angka 69,34.

2.2.1.10. Indeks Kepuasan Masyarakat



Considerans huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menegaskan bahwa demi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut adalah survei kepuasan masyarakat yang hasilnya dalam wujud Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang mengukur secara komprehensif tentang persepsi dan penilaian masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterimanya dari penyelenggara layanan publik. Survei ini tunduk pada prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, berkesinambungan, keadilan dan netralitas.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, survei untuk mendapatkan IKM ini wajib dilakukan secara berkala minimal sekali setahun. Selanjutanya, Pasal 6 menegaskan bahwa penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap IKM unit pelayanan publik. Evaluasi ini dibutuhkan sebagai acuan dasar bagi pemerintah/ penyelenggara pelayanan publik untuk senantiasa memperbaiki dan mengembangkan pelayanannya demi memenuhi harapan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik. Berdasarkan pentingnya indikator ini bagi pengembangan kebijakan di ranah pelayan publik, IKM diintegrasikan dalam indikator-indikator dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.34. Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara

NO	URAIAN	NILAI IKM				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Provinsi Sulawesi Utara	n/a	n/a	n/a	89,739 (Sangat Baik)	-

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2021

Tabel 2.35. Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Publik

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2021

Capaian IKM Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 (89,739) melampaui target tahun 2019 yang menargetkan peningkatan sebesar 82. Capaian ini bahkan melampaui target indeks yang ditetapkan untuk dicapai di akhir periode RPJMD 2016-2021. Angka ini mencerminkan tren atau kecenderungan layanan publik yang telah diberikan oleh penyelenggara kepada masyarakat dan menggambarkan kinerja dari penyelenggara pelayanan publik yang bersangkutan. Selain itu, angka ini menggambarkan persepsi atau penilaian masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Artinya, masyarakat mengapresiasi kinerja penyelenggara layanan publik. Dengan kata lain, layanan yang diberikan penyelenggara dirasakan secara positif dan selaras dengan harapan, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat Sulawesi Utara.

Fungsi utama pemerintah tak lain adalah memberikan pelayanan prima terhadap masyarakatnya. Karena itu, pemerintah perlu untuk secara *regular* mengevaluasi IKM dan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan IKM untuk mengevaluasi layanan publiknya dalam kualitas pelaksanaan program kerja dan pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan. IKM ini menghadirkan *feedback* secara berkala kepada penyelenggara layanan publik atas capaian kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat, guna menetapkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik demi kesinambungan pembangunan daerah.

2.2.1.11. Indeks Reformasi Birokrasi

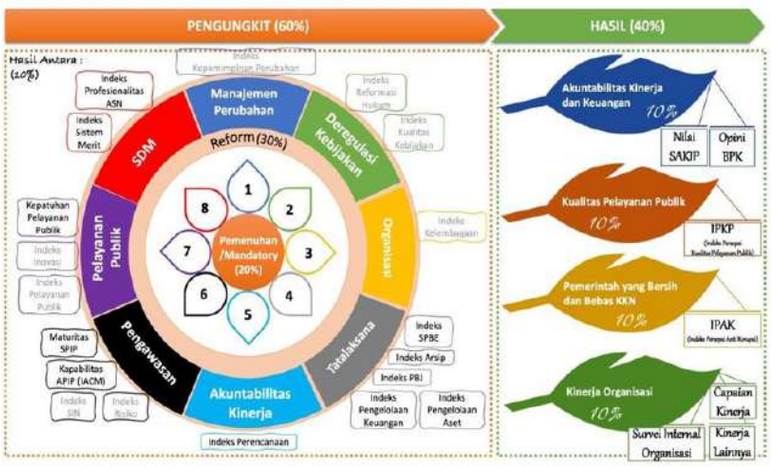


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjelaskan bahwa reformasi birokrasi di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah mendesak demi percepatan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan reformasi birokrasi tak lain untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur negara. Area perubahan yang dikejar dalam reformasi birokrasi adalah organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya

manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Perkembangan reformasi birokrasi sempat mengalami ketertinggalan dari reformasi politik, ekonomi, dan hukum. Pada tahun 2004, pemerintah menegaskan kembali pentingnya penerapan prinsip universal good and clean government demi menjamin pelayan prima bagi masyarakat. Pada tahun 2014, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan kebijakan PMPRB yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (self-assessment), yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Dari segi kebijakan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 telah dua kali diubah yaitu melalui Perauran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019. Penyempurnaan tersebut mencakup: (1) penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan, (2) tingkat kedalaman penilaian/evaluasi sampai dengan ke unit kerja, serta (3) perubahan terhadap sistem daring dan petunjuk teknisnya.

Pada tahun 2020, dengan pertimbangan bahwa peraturan di atas sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Model ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018

Komponen Pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan,

organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Sedangkan, Komponen Hasil merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi. Komponen Hasil mempunyai empat bagian, yaitu Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dan Kinerja Organisasi. Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Sedemikian penting dan mendesaknya proses reformasi birokrasi ini, IRB dirujuk sebagai indikator penyelenggaraan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. Di bawah ini, disajikan IRB Provinsi Sulawesi Utara:

Tabel 2.36. Indeks Reformasi Birokrasi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	58,56	54,97	55,09	56,51

Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Pada tahun 2016 belum mendapatkan hasil evaluasi. Tahun 2017 pelaksanaan evaluasi dan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi menggunakan Permenpan-RB 14 Tahun 2014 dan dilakukan secara langsung oleh Tim Kemenpan. Tahun 2018 mengalami transisi dari pedoman evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi yaitu Permenpan-RB 14 Tahun 2014 Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2018 yang dilakukan secara mandiri melalui aplikasi PMPRB. Pada tahun selanjutnya (2019) telah dilakukan upaya untuk peningkatan penyelenggaraan reformasi birokrasi melalui penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan melibatkan 10 (sepuluh) unit kerja menginput PMPRB. Tahun 2020 pelaksanaan evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi terjadi perubahan pedoman yaitu Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020, dengan melibatkan minimal 20 unit kerja dan hasilnya kemungkinan dalam waktu dekat ini.

Tabel 2.37. Kategori Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
		Angka	
1.	AA	>90 – 100	Istimewa
2.	A	>80 – 90	Memuaskan
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4.	B	>60 – 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50 – 60	Cukup (memadai), per banyak perbaikan yang tidak mendasar
6.	C	>30 – 50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
7.	D	>0 – 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018

Berdasarkan kategori di atas, IRB Provinsi Sulawesi Utara baik di tahun 2017 dan 2019 mendapat kategori CC dengan interpretasi "cukup (memadai), perlu banyak perubahan yang tidak mendasar". Sejak tahun 2020, kategori ini telah mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah



Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah (*mean years school*/MYS) menggabungkan partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana terpenuhinya kebutuhan penduduk akan akses pendidikan. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Angka ini dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat di Provinsis Sulawesi Utara.

Tabel 2.38. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2016-2020

Kabupaten/Kota	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2016-2019				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	7.30	7.38	7.59	7.77	7.93
Minahasa	9.54	9.55	9.56	9.58	9.59
Kepulauan Sangihe	7.70	7.89	7.90	8.04	8.29
Kepulauan Talaud	8.92	8.93	9	9.25	9.51
Minahasa Selatan	8.71	8.72	8.84	8.85	9.08
Minahasa Utara	9.24	9.32	9.61	9.93	9.99
Bolaang Mongondow Utara	7.67	7.86	8.11	8.12	8.40
Kepulauan Sitaro	8.45	8.56	8.57	8.75	8.97
Minahasa Tenggara	8.39	8.51	8.82	8.87	8.88
Bolaang Mongondow Selatan	7.71	7.72	7.73	7.80	7.90
Bolaang Mongondow Timur	7.52	7.53	7.57	7.59	7.83
Kota Manado	11.02	11.03	11.04	11.26	11.27
Kota Bitung	9.37	9.64	9.65	9.87	9.88
Kota Tomohon	10.23	10.24	10.25	10.48	10.73
Kota Kotamobagu	9.97	9.98	10.04	10.09	10.10
Sulawesi Utara	**8.96**	**9.14**	**9.24**	**9.43**	**9,49**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021 (diolah).

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Provinsi Sulawesi Utara dalam menjalani pendidikan formal

semakin meningkat dari tahun ke tahun, sejak tahun 2016. Pada tahun 2016, secara rata-rata penduduk daerah ini yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,96 tahun, setara kelas 2 SMP sederajat atau hampir menamatkan kelas 3 SMP sederajat. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah penduduk daerah ini yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan formal selama 9,49 tahun, setara kelas 3 SMP sederajat.

Dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan metode baru, BPS mengganti indikator angka melek huruf dengan angka harapan lama sekolah. Hal ini berarti dimensi pengetahuan dalam pengukuran IPM menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah.

Selanjutnya sebagai salah satu indikator untuk mengukur dimensi pengetahuan dalam pengukuran IPM, Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang.

Selama periode 2016-2020, indikator Harapan Lama Sekolah di Sulawesi Utara secara rata-rata tumbuh sebesar 1,3 persen per tahun. Meningkatnya HLS merupakan sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2020, HLS di Sulawesi Utara telah mencapai 12,85 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang bersekolah selama 13 tahun atau setara Diploma I.

Tabel 2.39. Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2016-2020

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2016-2019									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	HLS	RLS	HLS	RLS	HLS	RLS	HLS	RLS	HLS	RLS
Bolaang Mongondow	11.07	7.30	11.16	7.38	11.30	7.59	11.41	7.77	11.52	7.93
Minahasa	13.93	9.54	13.94	9.55	13.96	9.56	13.97	9.58	13.98	9.59
Kepulauan Sangihe	11.71	7.70	11.90	7.89	12.04	7.90	12.31	8.04	12.32	8.29
Kepulauan Talaud	12.13	8.92	12.14	8.93	12.20	9.00	12.27	9.25	12.51	9.51
Minahasa Selatan	11.75	8.71	11.76	8.72	12.08	8.84	12.43	8.85	12.74	9.08
Minahasa Utara	12.13	9.24	12.45	9.32	12.65	9.61	12.69	9.93	12.80	9.99
Bolaang Mongondow Utara	11.86	7.67	11.87	7.86	11.88	8.11	11.90	8.12	11.91	8.40
Kepulauan Sitaro	11.24	8.45	11.32	8.56	11.51	8.57	11.64	8.75	11.67	8.97
Minahasa Tenggara	11.51	8.39	11.71	8.51	11.74	8.82	12.04	8.87	12.27	8.88
Bolaang Mongondow Selatan	12.21	7.71	12.22	7.72	12.23	7.73	12.28	7.80	12.29	7.90
Bolaang Mongondow Timur	11.46	7.52	11.47	7.53	11.48	7.57	11.50	7.59	11.59	7.83
Kota Manado	13,83	11.02	14.11	11.03	14.12	11.14	14.14	11.26	14.15	11.27
Kota Bitung	12.24	9.37	12.25	9;64	12.26	9.63	12.60	9.87	12.61	9.88
Kota Tomohon	14.16	10,23	14.16	10.24	14.17	10,25	14.19	10.48	14.20	10.73
Kota Kotamobagu	12.67	9.97	12.68	9.98	12.75	10.04	12.78	10.09	12.79	10.10
Sulawesi Utara	12.55	8.96	12.66	9.14	12.68	9.24	12.73	9.43	12,85	9,49

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021 (diolah).

Jika dilihat berdasarkan kondisi angka rata-rata lama sekolah provinsi di wilayah pulau Sulawesi, Sulawesi Utara sejak 5 tahun terakhir terus

menjadi provinsi dengan angka rata-rata lama sekolah tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di wilayah pulau Sulawesi, serta berada diatas rata-rata angka nasional. Data tersebut tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.40. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi di Pulau Sulawesi dan Indonesia Periode 2016-2020

Provinsi di Pulau Sulawesi	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Tahun 2016-2020				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sulawesi Utara	**8.96**	**9.14**	**9.24**	**9.43**	**9,49**
Sulawesi Tengah	8.12	8.29	8.52	8.75	8,83
Sulawesi Selatan	7.75	7.95	8.02	8.26	8,38
Sulawesi Tenggara	8.32	8.46	8.69	8.91	9,04
Gorontalo	7.12	7.28	7.46	7.69	7,82
Sulawesi Barat	7.14	7.31	7.50	7.73	7,89
Indonesia	**7.95**	**8.10**	**8.17**	**8.34**	**8,48**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021 (diolah).

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

2.2.3.1. Seni Budaya

Considerantes Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa negara berkehendak memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional. Dalam pertimbangannya, keberagaman kebudayaan dipahami dan diterima sebagai kekayaan dan identitas bangsa dan merupakan bagian integral dari proses memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Karena itu, usaha dan langkah strategis melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.



Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dijelaskan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Berdasarkan Penjelasan atas Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Dalam kehidupan sosial, salah satu tujuan diciptakannya seni adalah untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Begitu pula dengan hasil karya dan cipta seni yang juga mengalami perkembangan, sesuai dengan kebudayaan yang ada di

masyarakat. Disini akan disajikan kegiatan kesenian yang mencakup berbagai jenis dan cabang seni tersebut. Aspek yang disajikan mencakup akses, partisipasi, apresiasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan seni dan budaya serta tradisi lisan. Budaya masyarakat Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat yang terdiri dari: Suku Minahasa, Suku Sangihe, Suku Talaud, Suku Bolaang, dan Suku Mongondow. Masing-masing kelompok etnis tersebut masih terbagi pula dalam subetnis yang memiliki bahasa daerah, tradisi, dan norma-norma kemasyarakatan yang khas serta diperkuat semangat Mapalus, Mapaluse, dan Moposad. Dilihat dari unsur budaya bahasa, maka Sulawesi Utara memiliki tiga kelompok bahasa daerah yaitu:

a. Bahasa Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Pasan, Ponosakan, dan Bantik.
b. Bahasa Sangir Besar, Siau, dan Talaud.
c. Bahasa Boroko, Bolangitang, Bolaang, Mongondow, Bintauna, Kaidipang, Bolango, dan Bantik Mongondow.

Namun demikian, Bahasa Indonesia adalah Bahasa Nasional yang digunakan dan dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk Sulawesi Utara. Seni Budaya di Sulawesi Utara cukup berkembang yang tersebar di masyarakat luas. Hal ini dikembangkan melalui program menggali, menginventarisasi keunggulan, dan keragaman seni budaya yang dikemas dalam pelaksanaan festival seni budaya berskala nasional dan internasional.

Tabel 2.41. Perkembangan Seni, Budaya Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan evaluasi RPJMD Perubahan 2017-2020

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Dan Capaian							
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Grup Seni Musik Aktif	40	50	50	60	60	70	70	70	70
2	Grup Seni Tari Aktif	20	20	20	20	20	30	30	30	30
3	Jumlah teater/sastra Aktif	25	25	25	30	30	35	35	35	35
4	Gedung Kesenian	2	2	2	3	3	3	3	3	3
5	Apresiasi terhadap maestro ditiap cabang seni	5	5	5	5	5	6	6	6	6
6	Seniman Lokal	3	3	3	5	5	7	7	7	7
7	Warisan Takbenda	2	3	3	3	3	5	9	9	9
8	Apreasiasi terhadap pelaku warisan takbenda	3	3	3	3	6	5	9	9	9
9	Pendataan koleksi museum sulut	20	20	20	20	20	30	30	30	30

Sumber: Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, 9 indikator kinerja pembangunan daerah menyangkut seni budaya tercapai sesuai target. Demikian juga pada tahun 2018, semua target dari setiap indikator tercapai, bahkan indikator “apresiasi terhadap warisan tak benda” melampaui target (target = 3; capaian = 6). Pada tahun 2019, 7 indikator mencapai target dan dua indikator melampaui target, yaitu “warisan tak benda” dan “apresiasi terhadap pelaku warisan tak benda”.

Sebagai salah satu bentuk kebudayaan manusia, kesenian berbeda dengan hasil budaya lainnya. Kesenian merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang mengandung nilai estetika tinggi dan sarat dengan pesan moral yang dikemas dalam bentuk simbol-simbol. Karya seni yang dihasilkan terdiri dari berbagai macam jenis pertunjukan, antara lain seni tari, seni tetater, seni musik dan lain-lain. Ketertarikan masyarakat terhadap jenis-jenis pertunjukan tersebut berbeda-beda dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti umur, jenis kelamin, tipe daerah dan latar belakang budaya.

Tabel 2.42. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas yang Menonton Pertunjukan/Pameran Seni baik secara Langsung maupun tidak Langsung selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenis Kesenian dan Tipe Daerah, tahun 2018

Jenis Kesenian	Perkotaan	Desa	Perkotaan + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Film	51,28	63,33	57,06
Seni Musik/Suara	37,01	49,72	43,11
Seni Rupa	4,08	6,03	5,01
Seni Sastra	4,12	6,97	5,49
Seni Tari Budaya Indonesia	15,81	15,91	15,86
Seni Teater/Pewayangan	5,01	3,63	4,35
Lainnya	9,89	6,29	8,16

Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Apresiasi terhadap pertunjukkan/pameran seni salah satunya dapat dilihat berdasarkan banyaknya penduduk menonton pertunjukkan/pameran seni. Diantara beberapa pertunjukan/pameran seni, seni film (57,06 persen) merupakan pertunjukan seni yang paling banyak ditonton baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh penduduk Sulawesi Utara berumur 10 tahun ke atas selama tiga bulan terakhir menurut data BPS, Susenas MSBP 2018. Minat masyarakat terhadap sinematografi didukung oleh fasilitas menonton film yang semakin mudah diakses membuat seni film lebih banyak ditonton dibandingkan seni musik/suara (43,11 persen). Pelestarian pertunjukan/pameran seni lainnya perlu ditingkatkan agar peminatnya tidak berkurang atau bahkan sampai punah.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa berdasarkan tipe daerah, persentase penduduk yang menonton film lebih banyak di perdesaan (63,33 persen banding 51,28 persen). Demikian juga untuk pertunjukan seni musik/suara, penduduk yang lebih banyak penonton ada di perdesaan (49,72 % banding 37,01 %).

Tabel 2.43. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Terlibat Langsung Pertunjukan/Pameran Seni Secara Langsung Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Jenis Kesenian Dan Tipe Daerah, 2018

Jenis Kesenian	Perkotaan	Desa	Perkotaan + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Film	0,15	0,08	0,12
Seni Musik/Suara	2,99	1,16	2,11
Seni Rupa	0,03	0,21	0,12
Seni Sastra	0,02	0,09	0,06
Seni Tari Budaya Indonesia	0,48	0,44	0,46
Seni Teater/Pewayangan	0,05	0,00	0,03
Lainnya	0,04	0,00	0,02

Sumber: BPS, Susenas MSBP, 2018.

Tabel ini memperlihatkan bahwa dalam tiga bulan terakhir persentase penduduk 10 tahun ke atas yang terlibat dalam pertunjukan seni secara langsung masih sangat rendah. Pertunjukan seni musik/suara menjadi pilihan pertama bagi penduduk untuk terlibat secara langsung yakni sebesar 2,11 persen. Kemudian disusul dengan seni tari budaya Indonesia yakni sebesar 0,46 persen. Di posisi ketiga ada seni film dan seni rupa dengan persentase yang sama sebesar 0,12 persen.





Selanjutnya pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjelaskan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Peninggalan sejarah dan warisan budaya merupakan cagar budaya yang bersifat kebendaan (*tangible*) yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan. Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah berkewajiban melaksanakan kebijakan pelestarian cagar budaya salah satunya dengan berasaskan kemanfaatan sehingga cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat baik dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Salah satu apresiasi masyarakat terhadap warisan sejarah dan budaya adalah dengan mengunjungi peninggalan sejarah atau warisan budaya.




Tabel 2.44. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah/Warisan Budaya selama setahun terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018

Tipe Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	13,43	14,24	13,84
Perdesaan	5,87	6,43	6,14
Perkotaan + Perdesaan	9,74	10,57	10,15

Sumber: BPS, Susenas MSBP, 2018.

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya hanya sekitar 10,15 persen. Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, persentase penduduk di perkotaan yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya (13,84 persen) lebih tinggi dari di perdesaan (6,14 persen). sementara dari sisi jenis kelamin penduduk perempuan (10,57 persen) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (9,74 persen). Kecilnya minat masyarakat untuk mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya salah satunya karena kurang memadainya fasilitas yang memberikan tempat khusus terhadap peninggalan bersejarah dan kurangnya sosialisasi mengenai tempat yang menyimpan peninggalan bersejarah di Sulawesi Utara.

Tabel 2.45. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas yang Mengetahui Dongeng/Cerita Rakyat Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018

Tipe Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	74,65	79,55	77,09
Perdesaan	62,34	63,30	62,80
Perkotaan + Perdesaan	68,63	71,91	70,23

Sumber: BPS, Susenas MSBP, 2018.

Pada Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “tradisi lisan” adalah tuturan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat. Dalam Susenas, pertanyaan mengenai tradisi lisan khusus hanya menanyakan mengenai dongeng/cerita rakyat. Dongeng adalah cerita dari zaman dahulu yang tidak benar-benar terjadi atau biasa disebut cerita khayal, biasanya berlatar kenyataan yang dikiaskan. Sedangkan cerita rakyat adalah cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan rakyat dan diwariskan secara lisan.

Tabel di atas menyajikan informasi bahwa secara keseluruhan 70,23 persen penduduk di atas 10 tahun mengetahui dongeng/cerita rakyat. Jika dilihat dari tipe daerah, penduduk di perkotaan (77,09 persen) lebih banyak mengetahui dongeng/cerita rakyat dibanding penduduk di perdesaan (62,80 persen). Sedangkan jika dilihat dari jenis kelamin, penduduk perempuan (71,91 persen) lebih banyak mengetahui dongeng atau cerita rakyat dibanding penduduk laki- laki (68,63 persen).

Sebagai salah satu bentuk kebudayaan manusia, kesenian berbeda dengan hasil budaya lainnya. Kesenian merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang mengandung nilai estetika tinggi dan sarat dengan pesan moral yang dikemas dalam bentuk simbol-simbol. Karya seni yang dihasilkan terdiri dari berbagai macam jenis pertunjukan, antara lain seni tari, seni teater, seni musik dan lain-lain. Ketertarikan masyarakat terhadap jenis-jenis pertunjukan tersebut berbeda-beda dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti umur, jenis kelamin, tipe daerah dan latar belakang budaya. Apresiasi terhadap pertunjukkan/pameran seni salah satunya dapat dilihat berdasarkan banyaknya penduduk menonton pertunjukkan/pameran seni. Di antara beberapa pertunjukan/ pameran seni, seni film (57,06 persen) merupakan pertunjukan seni yang paling banyak ditonton baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh penduduk Sulawesi Utara berumur 10 tahun ke atas selama tiga bulan terakhir menurut data BPS, Susenas

MSBP 2018. Minat masyarakat terhadap sinematografi didukung oleh fasilitas menonton film yang semakin mudah diakses membuat seni film lebih banyak ditonton dibandingkan seni musik/suara (43,11 persen). Pelestarian pertunjukan/pameran seni lainnya perlu ditingkatkan agar peminatnya tidak berkurang atau bahkan sampai punah.

Tabel 2.46. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas yang Menonton Pertunjukan/Pameran Seni baik secara Langsung maupun tidak Langsung selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenis Kesenian dan Tipe Daerah, tahun 2018

Jenis Kesenian	Perkotaan	Desa	Perkotaan + Desa
Film	51,28	63,33	57,06
Seni Musik/Suara	37,01	49,72	43,11
Seni Rupa	4,08	6,03	5,01
Seni Sastra	4,12	6,97	5,49
Seni Tari Budaya Indonesia	15,81	15,91	15,86
Seni Teater/Pewayangan	5,01	3,63	4,35
Lainnya	9,89	6,29	8,16

Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Tabel di atas memperlihatkan bahwa berdasarkan tipe daerah, persentase penduduk yang menonton film lebih banyak di perdesaan (63,33 persen banding 51,28 persen). Demikian juga untuk pertunjukan seni musik/suara, penduduk yang lebih banyak penonton ada di perdesaan (49,72 persen banding 37,01 persen). Di bawah ini, disajikan tabel yang memperlihatkan persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang terlibat langsung dalam pertunjukan/ pameran seni secara langsung selama tiga bulan terakhir tahun 2018.

Tabel 2.47. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Terlibat Langsung Pertunjukan/Pameran Seni Secara Langsung Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Jenis Kesenian Dan Tipe Daerah, 2018

Jenis Kesenian	Perkotaan	Desa	Perkotaan+Desa
Film	0,15	0,08	0,12
Seni Musik/Suara	2,99	1,16	2,11
Seni Rupa	0,03	0,21	0,12
Seni Sastra	0,02	0,09	0,06
Seni Tari Budaya Indonesia	0,48	0,44	0,46
Seni Teater/Pewayangan	0,05	0,00	0,03
Lainnya	0,04	0,00	0,02

Sumber: BPS, Susenas MSBP, 2018.

Tabel ini memperlihatkan bahwa dalam tiga bulan terakhir persentase penduduk 10 tahun ke atas yang terlibat dalam pertunjukan seni secara langsung masih sangat rendah. Pertunjukan seni musik/suara menjadi pilihan pertama bagi penduduk untuk terlibat secara langsung yakni sebesar 2,11 persen. Kemudian disusul dengan seni tari budaya Indonesia yakni sebesar 0,46 persen. Di posisi ketiga ada seni film dan seni rupa dengan persentase yang sama sebesar 0,12 persen.






2.2.3.2. Olah Raga

Considerans c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan pentingnya keolahragaan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Justru karena pertimbangan akan pentingnya keolahragaan tersebut dalam keseluruhan pembangunan nasional dan pengembangan manusia Indonesia, considerans d menegaskan penjaminan akses terhadap olah raga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestai, dan amanajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global. Hal tersebut perlu diatur dalam sebuah sistem keolahragaan nasional.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mendefinisikan "Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olah raga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan." Sedangkan, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa "Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa."

Mengingat pentingnya keolahragaan dalam pembangunan manusia Indonesia, Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk: a.melakukan kegiatan olah raga; b.memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga; c.memilih dan mengikuti jenis atau cabang olah raga yang sesuai dengan bakat dan minatnya; d.memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan; e.menjadi pelaku olahraga; dan f.mengembangkan industri olah raga."

Pemerintah daerah mempunyai tugas dalam melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Kebijakan nasional yang harus dilakukan pemerintah daerah di daerah ditetapkan di Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang meliputi: a. penyelenggaraan olah raga pendidikan, olah raga rekreasi, dan olah raga prestasi; b. pembinaan dan pengembangan olah raga; c. penyelenggaraan kejuaraan olah raga; d. pembinaan dan pengembangan pelaku olah raga; e. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olah raga profesional; f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olah raga; g. pendanaan keolahragaan; h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan; j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan; k. pembinaan dan pengembangan industri olah raga; l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi; m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping; n. pemberian

pemberian penghargaan; o. pelaksanaan pengawasan; dan p. evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

Berdasarkan signifikansi keolahragaan dalam pengembangan manusia Indonesia dan deskripsi tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijaksanaan keolaragaan nasional di daerah, pentinglah informasi tentang perkembangan olah raga di Provinsi Sulawesi Utara menjadi rujukan indikator penyelenggaraan penyelenggaraan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. Berikut ini, disajikan tabel perkembangan olah raga Provinsi Sulawesi Utara 2017-2019.

Tabel 2.48. Target dan Capaian Fokus Bidang Seni Budaya dan Olah Raga

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangu-nan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Dan Capaian					
			2017		2018		2019	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Klub Olah Raga (Standar 1/10.000)	5	8	-	8	-	9	13
2	Gedung Olah Raga (Standar 1/10.000)	12	15	100%	15-2	100%	15	22
3	Jumlah organisasi pemuda	30	30	0%	30-2	100%	30	11
4	Jumlah organisasi olah raga	30	30	100%	30-36	100%	30	53
5	Jumlah kegiatan kepemudaan	20	30	100%	40-12	100%	50	46
6	Jumlah kegiatan olahraga	20	30	100%	40-27	100%	50	55
7	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olah raga menjadi 35 persen pada tahun 2019;	20%	25%	-	30%	-	35%	40 %
8	Prestasi olah raga ditingkat nasional/tingkat internasional	7/2	7/5	-	8/7	-	8/8	13/8
9	Prestasi olah raga *paralympic* ditingkat nasional dan tingkat internasional	2 Nasional 1 internasional	-		-	-	-	-

Sumber: Bappeda Provinsi Sulut, 2020

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB DENGAN PELAYANAN DASAR

2.3.1.1. Pendidikan Menengah



Kinerja pembangunan daerah di bidang pendidikan, secara khusus pendidikan menengah saat ini diperhadapkan dengan berbagai kebijakan merdeka belajar. Hal ini mempengaruhi pencapaian dan penetapan indikator kinerja bidang pendidikan menengah yang berbasis kurikulum merdeka belajar.

A. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar



Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuain. Tujuan dan kegunaan dari pengukuran ini adalah untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.49. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2016 s/d 2020
Provinsi Sulawesi Utara

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	APM SMA/SMK/MA/Paket C	62,50	62,81	62,83	62,98	63,43

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Indikator APK berguna untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada tingkat pendidikan menengah. APK juga berguna untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK juga dapat digunakan sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2016 s/d 2020 Di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada table berikut.

Tabel 2.50. *Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)*
SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2016 s/d 2020
Provinsi Sulawesi Utara

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	APK SMA/SMK/MA/Paket C	86,32	91,73	82,25	86,60	86,83

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

B. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia

sekolah yang bersesuaian. Indikator ini digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Dalam hal ini, APS Provinsi menggambarkan peluang pada pendidikan menengah (kelompok umur 16-18 tahun).

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2016 s/d 2020 Provinsi Sulawesi Utara

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	APS SMA/SMK/MA/Paket C	72,57	73,04	73,67	74,04	74,12

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

C. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Dalam konteks ini, kelompok umur yang dirujuk adalah kelompok umur 16-18 tahun. Disamping itu juga mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah SMA Sederajat Tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah SMA Sederajat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	SMA Sederajat					
1,1,	Jumlah gedung sekolah	408	417	342	342	423
1,2,	Jumlah penduduk kelompok usia16-18 tahun	121,100	121,464	122,192	122,838	123,433
1,3,	**Rasio**	**1:297**	**1:291**	**1:357**	**1:359**	**1:292**

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Tabel 2.53. Kertersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah SMA Sederajat Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2020

No.	KABUPATEN/KOTA	SMA SEDERAJAT		
		Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah Penduduk Usia 16-18 Thn	RASIO
1	Bolaang Mongondow	29	12,344	1:426
2	Minahasa	60	15,729	1:262

No.	KABUPATEN/KOTA	SMA SEDERAJAT		
		Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah Penduduk Usia 16-18 Thn	RASIO
3	Kepulauan Sangihe	27	6,464	1:239
4	Kepulauan Talaud	29	4,254	1:147
5	Minahasa Selatan	37	8,630	1:233
6	Minahasa Utara	36	9,811	1:273
7	Bolaang Mongondow Utara	10	4,132	1:413
8	Kepulauan Sitaro	11	2,845	1:259
9	Minahasa Tenggara	17	4,604	1:271
10	Bolaang Mongondow Selatan	9	3,444	1:383
11	Bolaang Mongondow Timur	14	3,649	1:261
12	Kota Manado	83	23,210	1:280
13	Kota Bitung	27	11,124	1:412
14	Kota Tomohon	17	5,702	1:335
15	Kota Kotamobagu	17	7,491	1:441
	SULAWESI UTARA	**423**	**123,433**	**1:292**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara. 2021

D. Angka Kelulusan Pendidikan Menengah

Angka Kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan.

Pada Tahun 2020, masa pandemi menginterupsi semua ranah kehidupan manusia, termasuk aturan-aturan dalam pendidikan. Dalam rilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, secara resmi menyampaikan pembatalan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2019/2020.

Peniadaan UN berlaku untuk satuan pendidikan jenjang SMP/sederajat dan SMA/SMK/sederajat di Indonesia dengan mempertimbangkan keamanan dan kesehatan peserta didik di tengah pandemi Covid-19. Ketetapan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease*. Mendikbud menyebutkan, dalam masa darurat penyebaran Covid-19 syarat penentu kelulusan siswa bisa dengan mengadakan ujian sekolah (US), dengan syarat US tidak mengumpulkan siswa secara fisik atau US bisa dilakukan secara daring. Jika sekolah tidak siap mengadakan US daring, US dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.

Tabel 2.54. Angka Kelulusan SMA/ SMK /SLB
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kelulusan SMA/SMK/SLB (%)	99.95	99.96	99.97	99.98	99.99

Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

Tabel di atas menunjukan bahwa Angka kelulusan pendidikan menengah (SMA/ SMK /SLB) Provinsi Sulawesi Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. Di bandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 sebesar 99.56 di akhir periode, Angka kelulusan pendidikan menengah terus tercapai, bahkan melampaui target. Kebijakan merdeka belajar termasuk kebijakan belajar dari rumah diharapkan akan meningkatkan angka kelulusan dan mutu kelulusan Pendidikan menengah dimasa pasca pandemi COVID 19.

E. Rasio Guru/Murid Pendidikan Menengah

Rasio guru dan murid pendidikan menengah menunjuk pada perbandingan jumlah murid dan jumlah guru sekolah pada tingkat pendidikan menengah. Perbandingan ini menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar dan mengindikasikan mutu pengajaran di kelas. Interpretasi terhadap nilai rasio ini adalah semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Di bawah ini, disajikan tabel rasio guru dan murid SMA sederajat di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.55. Rasio Guru dan Murid SMA Sederajat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Guru	4,345	5,500	5,125	8.395
2.	Jumlah Murid	63,969	69,672	71,730	111.906
3.	Rasio	1:15	1:13	1:14	1:13

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Adapun rasio guru/murid SMA Sederajat menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020, yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.56. Rasio Guru/Murid SMA Sederajat Menurut Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	SMA SEDERAJAT		
		JUMLAH GURU	JUMLAH MURID	RASIO
1	Bolaang Mongondow	483	6.272	1:12,9
2	Minahasa	1082	12.893	1:11,9
3	Kepulauan Sangihe	485	4.659	1:9,6
4	Kepulauan Talaud	594	3.787	1:6,3
5	Minahasa Selatan	731	9.904	1:13
6	Minahasa Utara	569	8.700	1:15,2
7	Bolaang Mongondow Utara	231	3.168	1:13,7
8	Kepulauan Sitaro	233	2.945	1:12,6
9	Minahasa Tenggara	348	4.877	1:14,01
10	Bolaang Mongondow Selatan	166	2.176	1:13,10
11	Bolaang Mongondow Timur	237	2.467	1:10,4
12	Kota Manado	1624	24.790	1:15,2
13	Kota Bitung	587	9.301	1:15,8
14	Kota Tomohon	444	6.652	1:14,9
15	Kota Kotamobagu	581	9.315	1:16,03
	SULAWESI UTARA	**8395**	**111.906**	**1:13**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

F. Rata-rata Angka Melek Huruf Penduduk Usia di atas 15 Tahun

Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Kegunaan dari indikator ini adalah untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Interpretasi persentase AMH menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Perkembangan Angka Melek Huruf di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57. Rata-rata Angka Melek Huruf Penduduk Usia di atas 15 Tahun Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	1,814,344	1,834,007	1,859,853	1,882,298	1,907,852
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	1,818,162	1,838,419	1,862,274	1,886,070	1,909,863
3	Angka Melek Huruf	99,79	99,76	99,87	99,80	99,81

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Tabel di atas menggambarkan peningkatan AMH Provinsi Sulawesi Utara secara konsisten dari tahun 2016-2020. Tingkat capaian tahun 2019 (99,80%) menunjukkan peningkatan AMH sebesar 0,1% dari tahun sebelumnya (2018 = 99,87%). Jika dibandingkan dengan tahun 2017 (99,76%), capaian tahun 2019 meningkat sebesar 0,17%. Di bawah ini disajikan tabel rata-rata AMH Tahun 2020 menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.58. Angka Melek Huruf Tahun 2020 Menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	ANGKA MELEK HURUF LATIN
1	Bolaang Mongondow	99,79
2	Minahasa	100
3	Kepulauan Sangihe	99,19
4	Kepulauan Talaud	100
5	Minahasa Selatan	100
6	Minahasa Utara	99,85
7	Bolaang Mongondow Utara	99,08
8	Kepulauan Sitaro	99,70
9	Minahasa Tenggara	100
10	Bolaang Mongondow Selatan	99,32
11	Bolaang Mongondow Timur	99,50
12	Kota Manado	99,92

NO	KABUPATEN/KOTA	ANGKA MELEK HURUF LATIN
13	Kota Bitung	99,72
14	Kota Tomohon	99,85
15	Kota Kotamobagu	99,85
	SULAWESI UTARA	**99,81**

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara 2021

2.3.1.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan oleh semua komponen masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan handal dengan memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

Pembangunan kesehatan dilakukan dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan.

Kondisi dan capaian pembangunan kesehatan di Sulawesi Utara tahun 2016-2020 diantaranya disajikan sebagai berikut:

a) Angka Harapan Hidup

Sebagai salah satu komponen pembentuk Indeks pembangunan Manusia (IPM) terkait dimensi ukuran kualitas hidup, Angka Harapa Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka Harapan Hidup (AHH) Sulawesi Utara pada tahun 2020 sebesar 71,69 tahun. Artinya setiap bayi yang dilahirkan hidup pada tahun ini akan mempunyai peluang hidup hingga usia 71-72 tahun. AHH menggambarkan kemampuan bertahan hidup seseorang yang erat kaitannya dengan derajat kesehatannya. Semakin tinggi AHH berarti semakin berhasilnya pembangunan kesehatan di suatu wilayah. AHH Sulawesi Utara selalu menunjukkan tren meningkat, artinya kualitas kesehatan penduduk terus membaik.

Tabel 2.59. Perkembangan AHH Tahun 2016 s/d 2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	AHH				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bolaang Mongondow	68,51	68,61	68,86	69,22	69,36
2	Minahasa	70,40	70,46	70,67	70,98	71,08
3	Kepulauan Sangihe	69,26	69,35	69,60	69,96	70,10
4	Kepulauan Talaud	69,41	69,48	69,71	70,04	70,16
5	Minahasa Selatan	69,17	69,24	69,47	69,80	69,92
6	Minahasa Utara	70,82	70,86	71,03	71,31	71,38
7	Bolaang Mongondow Utara	66,91	66,98	67,21	67,54	67,66
8	Kepulauan Sitaro	69,72	69,85	70,14	70,54	70,73
9	Minahasa Tenggara	69,53	69,58	69,77	70,07	70,15
10	Bolaang Mongondow Selatan	64,00	64,03	64,19	64,45	64,49
11	Bolaang Mongondow Timur	67,27	67,32	67,51	67,81	67,89

NO	KABUPATEN/KOTA	AHH				
		2016	2017	2018	2019	2020
12	Kota Manado	71,31	71,34	71,52	71,80	71,87
13	Kota Bitung	70,50	70,54	70,72	71,00	71,07
14	Kota Tomohon	71,07	71,18	71,43	71,79	71,93
15	Kota Kotamobagu	69,69	69,72	69,97	70,33	70,47
	SULAWESI UTARA	**71,02**	**71,04**	**71,26**	**71,58**	**71,69**

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

b) Tenaga Kesehatan

Penyelenggaraan pembangunan di sektor kesehatan membutuhkan dukungan sumber daya yang berkompeten di bidangnya. Jumlah tenaga medis yang minim dan penempatan yang tidak merata di seluruh wilayah menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan kesehatan. Selain itu, kualitas dan kompetensi para tenaga kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk ditingkatkan.

Jumlah tenaga Kesehatan menurut Kabupaten/Kota tahun 2016 sampai 2020 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.60. Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2016 s/d 2020 menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	TENAGA KESEHATAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bolaang Mongondow	753	402	463	488	673
2	Minahasa	616	704	822	716	1270
3	Kepulauan Sangihe	579	505	780	762	846
4	Kepulauan Talaud	557	408	419	448	695
5	Minahasa Selatan	838	503	580	728	828
6	Minahasa Utara	700	481	493	642	1028
7	Bolaang Mongondow Utara	407	500	367	543	703
8	Kepulauan Sitaro	426	301	262	465	464
9	Minahasa Tenggara	334	331	260	342	546
10	Bolaang Mongondow Selatan	253	211	298	445	561
11	Bolaang Mongondow Timur	210	229	196	268	413
12	Kota Manado	3595	3449	2604	2241	3859
13	Kota Bitung	896	640	682	638	940
14	Kota Tomohon	878	694	692	696	950
15	Kota Kotamobagu	369	459	457	762	996
	SULAWESI UTARA	**11411**	**9817**	**9375**	**10184**	**14772**

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

c) Fasilitas Kesehatan

Pada hakikatnya, pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi seluruh rakyat agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Adalah relevan bila perbaikan derajat kesehatan masyarakat tersebut dibarengi pula dengan ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit umum (RSU) dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

Fasilitas kesehatan yang tersedia di Sulawesi Utara diantaranya rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, posyandu, klinik/balai kesehatan dan

polindes. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan Sulawesi Utara dibantu oleh 14 ribuan tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, ahli teknologi laboratorium medik.

Jumlah fasilitas Kesehatan tahun 2016 sampai 2020 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.61. Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	FASILITAS KESEHATAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Sakit	40	60	43	48	51
2	Rumah Bersalin	3	63	7	9	9
3	Puskesmas	192	192	193	195	195
4	Posyandu	2230	2231	2302	2302	2302
5	Klinik / Balai Kesehatan	45	15	58	58	58
6	Polindes	57	40	39	39	39
	SULAWESI UTARA	**2567**	**2601**	**2642**	**2410**	**2413**

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

d) Angka Kematian Balita, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Di sisi lain Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Sedangkan, yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll. Perkembangan AKBa, AKB dan AKI tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.62. Perkembangan AKB dan AKI Tahun 2016 s/d 2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian Balita/ 1000 Kelahiran Hidup	6	5	6	6	5
2	Angka Kematian bayi/ 1000 Kelahiran Hidup	6	5	5	5	5
3	Angka Kematian Ibu/ 100.000 Kelahiran Hidup	129	92	126	126	155

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Prov, Sulut Tahun 2021.

e) Prevalensi Stunting

Stunting dalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Berdasarkan hasil Riskesdas pada tahun 2018, proporsi balita *stunting* di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 25,46%, di mana terdapat 4 kabupaten yang menjadi perhatian di tahun 2019 dan tahun 2020, karena menunjukkan baik peningkatan maupun penurunan proporsi yang signifikan. Prevalensi *stunting* di Kabupaten Minahasa Utara terus meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2018 mencapai angka 35,44% atau menjadi yang tertinggi prevalensinya. Prevalensi *stunting* di Kabupaten Bolmong Selatan turun signifikan dari angka 51,30% di tahun 2017 menjadi 33,27% di tahun 2018 namun masih menjadi tertinggi ke-2. Kabupaten Bolaang Mongondow berhasil menurunkan prevalensi *stunting* dari tahun 2017 dengan proporsi 35,80% menjadi 28,60% di tahun 2018. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara konsisten terus menurunkan prevalensi stunting dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2016 (43,8%) hingga tahun 2018 pada angka 22,24%. Kondisi Prevalensi Stunting Tahun 2016 s/d 2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63. Prevalensi Stunting Tahun 2016 s/d 2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	PREVALENSI STUNTING				
		2016	2017	2018	2019	*2020
1	Bolaang Mongondow	21,7	35,8	28,6	16,71	5,03
2	Minahasa	24,0	37,5	20,12	-	3,11
3	Kepulauan Sangihe	17,3	22,1	22,99	-	13,31
4	Kepulauan Talaud	14,8	37,5	23,59	-	11,10
5	Minahasa Selatan	20,4	35,9	26,12	-	2,34
6	Minahasa Utara	8,0	29,7	35,44	16,6	4,50
7	Bolaang Mongondow Utara	43,8	36,8	22,24	13,68	5,02
8	Kepulauan Sitaro	24,6	30,4	19,45	-	3,03
9	Minahasa Tenggara	19,2	24,6	27,97	-	8,18
10	Bolaang Mongondow Selatan	33,4	51,4	33,27	6,34	14,78
11	Bolaang Mongondow Timur	20,5	22,3	26,28	-	6,51
12	Kota Manado	10,9	27,3	19,8	-	6,32
13	Kota Bitung	20,2	29,9	29,97	-	4,16
14	Kota Tomohon	6,9	13,4	19,22	-	1,28
15	Kota Kotamobagu	30,8	30,7	29,03	-	5,16
	SULAWESI UTARA	**21,2**	**31,4**	**25,46**	**21,18**	**4,99**

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Prov, Sulut Tahun 2021.

Data yang disajikan pada tahun 2019 hanya mencakup 4 kabupaten lokasi khusus di sulawesi utara dan data pada tahun 2020 masih berdasarkan hasil pelaporan E-PPGBM Per-Des 2020 dari masing2 kab/kota, dimana hasil pengukuran balita belum 100% terukur dari total jumlah balita yang terdata, sehingga angka prevalensi yang muncul masih belum menggambarkan kondisi senyatanya dilapangan.

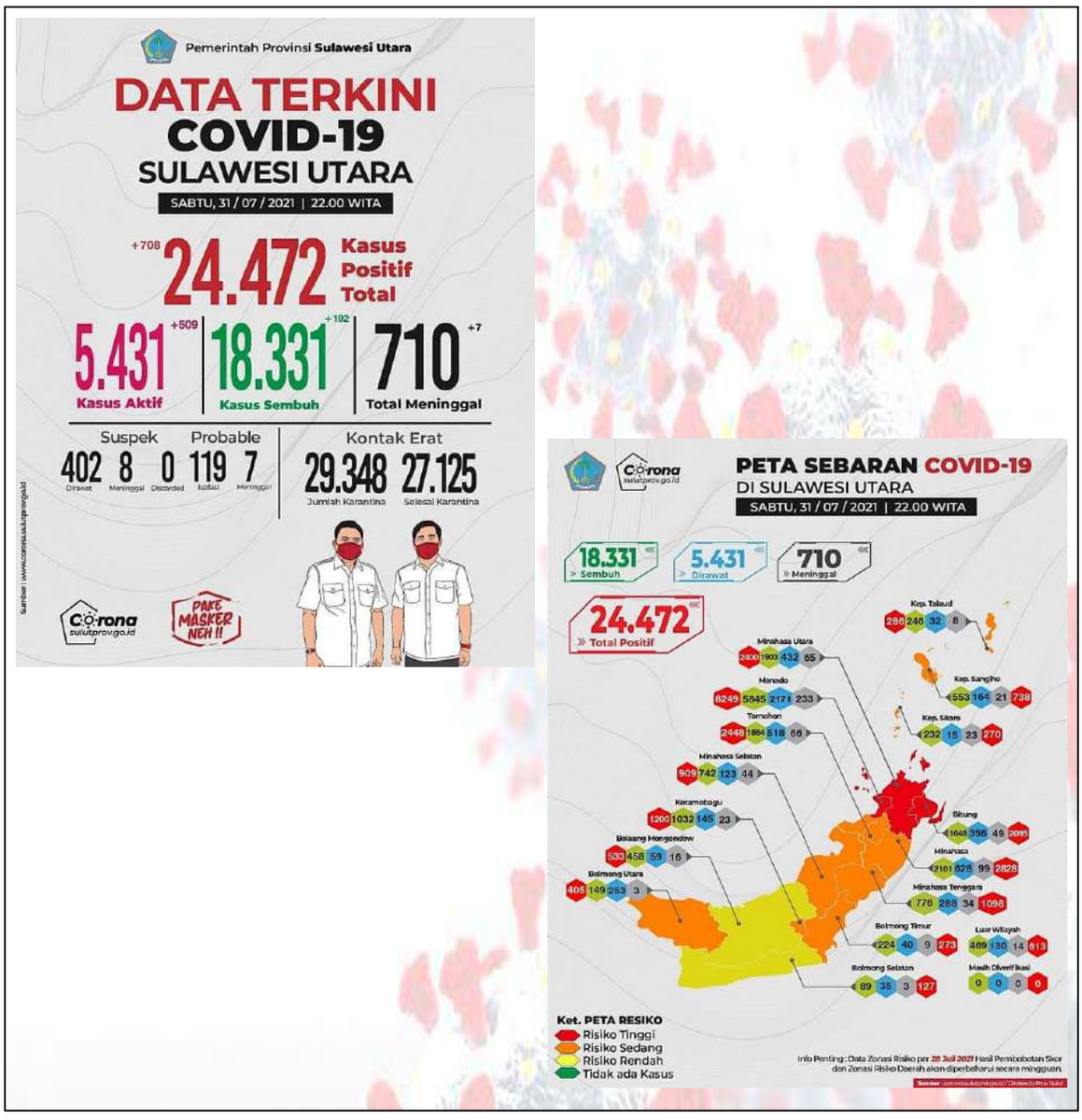
Penyajian data tersebut dikarenakan Provinsi Sulawesi Utara masih menunggu hasil rilis resmi dari Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) maupun Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) terhadap Prevalensi Stunting tahun 2019 dan 2020 untuk semua kab/kota yang ada di sulawesi utara.

f) Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia dikategorikan sebagai bencana non alam karena wabah penyakit sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kejadian pandemic *COVID-19* di Sulawesi Utara memiliki dampak sangat luas di berbagai sector (multi sektor) mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Data Kasus COVID-19 per 31 Juli 2021 di Sulawesi utara mencapai 24.472 total kasus positif, dengan rincian 5.431 jiwa kasus aktif, 18.331 jiwa kasus sembuh dan 710 jiwa kasus meninggal dunia. Peta Sebaran *COVID-19* per 31 Juli 2021 di Sulawesi Utara dapat dilihat pada gambar berikut dibawah.

Gambar 2.4 Peta Sebaran COVID-19 di Sulawesi Utara



Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut, 2021

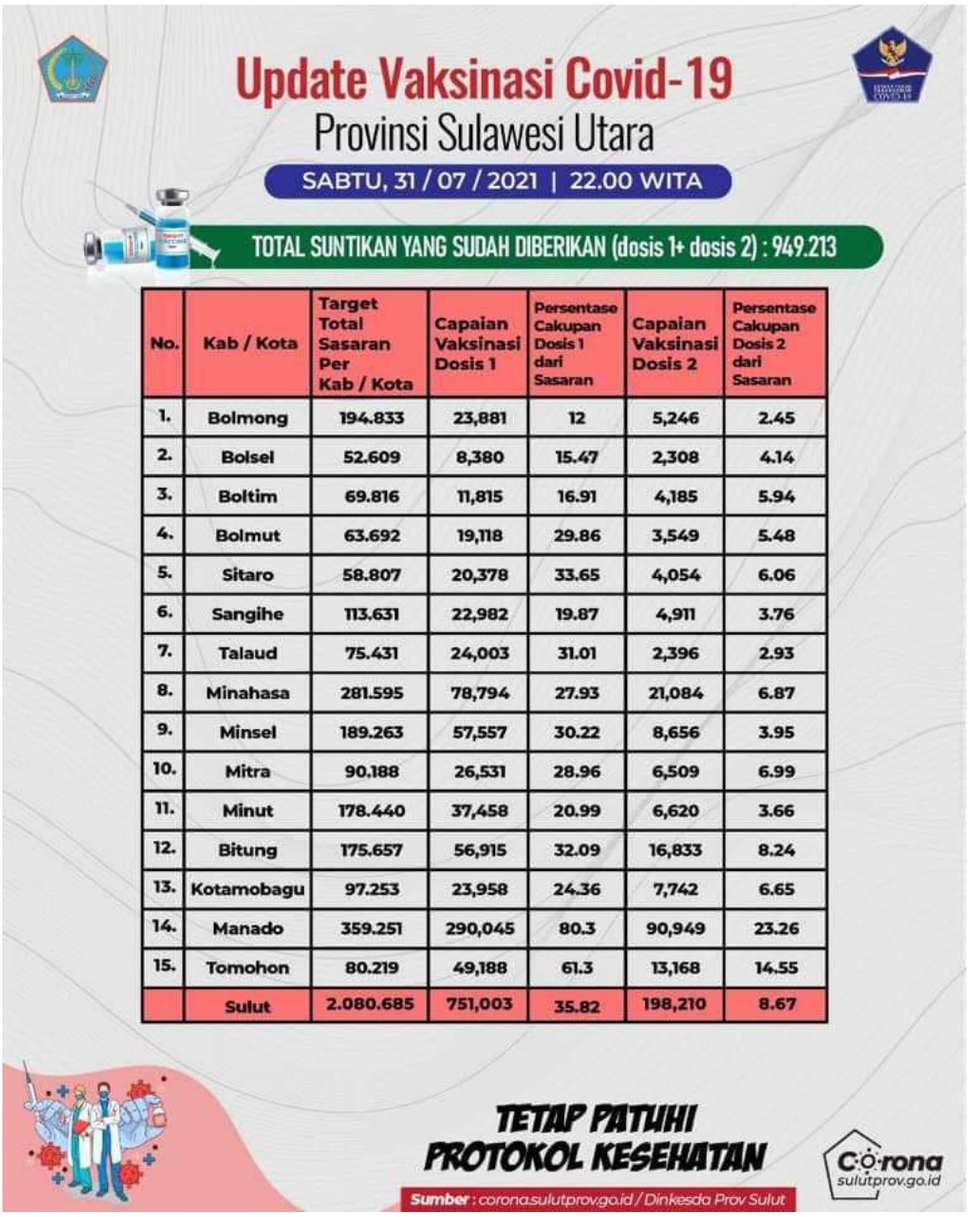
Adapun Status peta sebaran COVID-19 berdasarkan data rilis per 31 Juli 2021 menunjukan kondisi 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara dilihat berdasarkan zonasi resiko, yakni terdapat 2 kota yaitu kota manado dan kota bitung serta 1 kabupaten yaitu kabupaten minahasa utara berada pada zona resiko tinggi, selanjutnya terdapat 2 kabupaten yaitu kabupaten bolaang mongondow dan kabupaten bolaang mongondow selatan berada pada zona resiko rendah, sementara 10 kabupaten/kota lainnya berada pada zona resiko sedang.

g) Vaksinasi

Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Sejak pertengahan Januari 2021 silam, Satgas Covid-19 Provinsi Sulut terus menggenjot program vaksinasi dengan sasaran Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), pelayan publik serta warga lanjut usia atau lansia.

Kondisi Per-tanggal 31 juli 2021 total suntikan yang sudah diberikan dari dosis 1 sampai dengan dosis ke 2 di sulawesi utara telah mencapai 949.213 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah Vaksinasi dosis 1 telah mencapai 751.003 jiwa atau sebesar 35,82% dari jumlah total sasaran vaksinasi 2,080,685 jiwa; dan
- Jumlah Vaksinasi dosis 2 telah mencapai 198.210 jiwa atau sebesar 8.67% dari cakupan dosis 2 berdasarkan total sasaran.



No.	Kab / Kota	Target Total Sasaran Per Kab / Kota	Capaian Vaksinasi Dosis 1	Persentase Cakupan Dosis 1 dari Sasaran	Capaian Vaksinasi Dosis 2	Persentase Cakupan Dosis 2 dari Sasaran
1.	Bolmong	194.833	23,881	12	5,246	2.45
2.	Bolsel	52.609	8,380	15.47	2,308	4.14
3.	Boltim	69.816	11,815	16.91	4,185	5.94
4.	Bolmut	63.692	19,118	29.86	3,549	5.48
5.	Sitaro	58.807	20,378	33.65	4,054	6.06
6.	Sangihe	113.631	22,982	19.87	4,911	3.76
7.	Talaud	75.431	24,003	31.01	2,396	2.93
8.	Minahasa	281.595	78,794	27.93	21,084	6.87
9.	Minsel	189.263	57,557	30.22	8,656	3.95
10.	Mitra	90.188	26,531	28.96	6,509	6.99
11.	Minut	178.440	37,458	20.99	6,620	3.66
12.	Bitung	175.657	56,915	32.09	16,833	8.24
13.	Kotamobagu	97.253	23,958	24.36	7,742	6.65
14.	Manado	359.251	290,045	80.3	90,949	23.26
15.	Tomohon	80.219	49,188	61.3	13,168	14.55
	Sulut	2.080.685	751,003	35.82	198,210	8.67

Gambar 2.5. Update Vaksinasi COVID-19 (Per tanggal 31 Juli 2021)
Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut, 2021.

Adapun beberapa tantangan pembangunan di bidang kesehatan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD periode 2016-2021, yakni terdapat 9 indikator yang masih perlu kerja keras, yaitu: 1). rasio puskesmas /12.000 penduduk; 2). persentase rumah tangga berprilaku hidup bersih dan sehat; 3). jumlah Kabupaten/Kota yang mencampai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi; 4). persentase angka kasus HIV yang diobati; 5). pelayanan Kesehatan anak balita; 6). penjaringan Kesehatan siswa kelas I SD; 7). Jumlah Kasus TB tercatat per 100.000 penduduk yang diobati; 8). Puskesmas mampu laksana PKPR dan 9). persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga Kesehatan. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya tenaga promotif dan preventif dan sarpras kesehatan yang belum memadai serta kesadaran masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat). Tantangan Indikator kinerja pada bidang kesehatan di Sulawesi Utara berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64. Tantangan Indikator kinerja bidang kesehatan di Sulawesi Utara Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2016 – 2020

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Dan Capaian							
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Ratio Puskesmas/12.000 penduduk	1:12.933	1:12.900	-	1:12.800	-	1:12.600	1:12.600	1:12.300	1:12.600
2	Persentase Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	50	55	-	60	-	65	52,21 (80%)	70	52,21 (80%)
3	Jumlah kab/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	13 (85%)	13 (85%)	9 (60%)	11 (73,3%)	9 60%	12 (86.7%)	11 (80%)	13 (85%)	6 (40%)
4	Persentase angka kasus HIV yang diobati	95	100	-	100	46%	100%	56%	100%	59%
5	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	60,23%	80%	69,3%	81%	63,67%	83%	63,67 %	85%	24,8%
6	Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas I SD	59,95%	59,96%	80,1%	90%	68,25%	94%	68,25%	95%	78,50%
7	Jumlah Kasus Tuberkolosis (TB) tercatat per 100.000 penduduk yang diobati	282 /100.000	282 /100.000	381 /100.000	295 /100.000	273 /100.000	331 /100.000	384 /100.000	333 /100.000	84 /100.000
8	Puskesmas Mampu Laksana PKPR (%)	36%	59,96%	80.1%	90%	68,25%	94%	68,25%	95%	78,50%
9	Presentase Ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan	81,79%	79%	84,59%	82%	85%	85%	85,84%	88%	43,80%

Sumber : Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas 11 sub urusan meliputi Sumber Daya Air, Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang. Sedangkan Urusan Wajib merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 dan Permen PUPR 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu:

Tabel 2.65. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

SPM Provinsi	SPM Kabupaten/Kota
a) pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota; dan b) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota.	a) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan b) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Kondisi air minum dan air limbah domestik di Provinsi Sulawesi Utara pada rentang waktu 2015 – 2019 diuraikan sebagai berikut.

A. Air Minum

Evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, seperti yang diuraikan dalam Permen PUPR 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi:

1. Capaian kinerja pelayanan air minum kabupaten/kota, dalam laporan ini terdiri atas persentase rumah tangga berakses air minum dan persentase rumah tangga memiliki akses berkelanjutan untuk air minum.

2. Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota (SPAM Regional Provinsi) yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi dengan lingkup pengelolaan meliputi Unit Air Baku, Unit Produksi dan Unit Distribusi sampai ke *reservoir off take* (lokasi pembacaan pemakaian air curah).

Berikut ini capaian kinerja pelayanan air minum di Provinsi Sulawesi Utara dalam rentang waktu tahun 2016 – 2019.

1) Persentase rumah tangga berakses air minum

Indikator persentase rumah tangga berakses air minum dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 merupakan salah satu indikator dalam Aspek Pelayanan Umum pada Layanan Urusan Wajib Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



Berdasarkan data BPS tahun 2016 – 2019, seluruh kabupaten/kota menunjukkan kinerja baik dimana terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum. Berdasarkan evaluasi terhadap tahun n-1, peningkatan terbesar pada tahun 2018 - 2019 terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah selama 4 tahun berturut – turut memiliki persentase akses terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum sebesar 17,52% di Provinsi Sulawesi Utara menjadi 90,81%, dari persentase di tahun sebelumnya yaitu 73,29%. Secara rinci perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum menurut kabupaten/kota dalam setiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Menurut Kabupaten - Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2019

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Tahun 2016 - 2019				Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap	
	2016	2017	2018	2019*	n-1	n-4
Bolaang Mongondow	49.12	54.40	57.93	78.83	20.90	29.71
Minahasa	67.25	70.22	72.62	90.96	18.34	23.71
Kepulauan Sangihe	58.58	65.14	78.76	87.83	9.07	29.25
Kepulauan Talaud	55.03	57.43	71.27	83.39	12.12	28.36
Minahasa Selatan	56.30	66.61	66.92	94.38	27.46	38.08
Minahasa Utara	75.15	73.26	70.79	91.39	20.60	16.24
Bolaang Mongondow Utara	40.14	48.20	50.06	86.58	36.52	46.44
Kepulauan Sitaro	80.67	84.05	87.05	96.66	9.61	15.99
Minahasa Tenggara	69.12	64.51	79.34	87.10	7.76	17.98
Bolaang Mongondow Selatan	55.05	62.22	74.77	88.87	14.10	33.82
Bolaang Mongondow Timur	67.11	73.03	64.13	92.66	28.53	25.55
Kota Manado	86.84	90.43	89.50	94.35	4.85	7.51

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Tahun 2016 - 2019				Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap	
	2016	2017	2018	2019*	n-1	n-4
Kota Bitung	90.11	89.08	91.66	93.32	1.66	3.21
Kota Tomohon	72.58	80.42	83.15	96.54	13.39	23.96
Kota Kotamobagu	87.62	80.01	82.75	95.45	12.70	7.83
Sulawesi Utara	**71.53**	**70.22**	**73.29**	**90.81**	**17.52**	19.28
Keterangan warna cell :						
Peningkatan akses hasil evaluasi		Akses tertinggi di Sulut pada tahun data		Akses terendah di Sulut pada tahun data		

Sumber : Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2020, BPS, data diolah.

2) *Persentase rumah tangga memiliki akses berkelanjutan untuk air minum*
Akses berkelanjutan untuk air minum yang diuraikan dalam laporan ini adalah akses berkelanjutan untuk mendapatkan air minum layak.



BPS mendefinisikan air minum layak adalah air minum yang terlindungi meliputi air ledeng, keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa yang jarak minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah.
Mengacu pada definisi tersebut, persentase rumah tangga memiliki akses berkelanjutan untuk air minum layak di Provinsi Sulawesi Utara dalam selang tahun 2018 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah.
Melalui data di atas dapat dilihat, bahwa walaupun terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum di seluruh kabupaten/kota (Sulut = 90,81% di tahun 2019), namun jika melihat jenis sumber air minumnya, ternyata sebagian besar yaitu 54,18% dari persentase rumah tangga tersebut memiliki sumber air minum tidak layak, atau tidak berkelanjutan. Hanya sebesar 45,83% saja persentase rumah tangga di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki akses air minum berkelanjutan.
Persentase rumah tangga "memiliki akses berkelanjutan" dengan komposisi lebih besar dari pada persentase rumah tangga memiliki "akses air minum tidak layak" terdapat di 8 (delapan) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 80,26%, Kota Tomohon sebesar 64,12%, Kabupaten Minahasa sebesar 62,50%, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar 61,73%, Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 60,12%, Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 56,87%, Kabupaten Kepulauan Sitaro sebesar 55,72% dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 52,09%.

Sebaliknya, persentase rumah tangga "memiliki akses berkelanjutan" dengan komposisi lebih kecil dari pada persentase rumah tangga memiliki "akses air minum tidak layak" terdapat di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu Kota Manado sebesar 86,19%, Kota Bitung sebesar 72,27%, Kabupaten Minahasa Utara sebesar 62,92%, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 59,55%, Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar 53,96%, Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar 51,78% dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 52,09%.

3) *Pemenuhan kebutuhan air minum curah di lintas kabupaten/kota*

Definisi air minum curah dalam Permen PUPR No 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar ini adalah penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota. Kondisi Pelayanan SPAM lintas kabupaten/kota adalah seperti dalam Lampiran I Permen PUPR 29/PRT/M/2018, namun data belum tersedia saat penyusunan rancangan teknokratik ini.

Hasil evaluasi capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara untuk indikator Jumlah KK yang terlayani akses Sistem Penyediaan Air Minum di tahun 2020 adalah 7.5% dari target seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/ Kota 2016–2020

Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten					
Bolaang Mongondow	49,12	54,40	57,93	78,83	87,57
Minahasa	67,25	70,22	72,62	90,96	90,33
Kepulauan Sangihe	58,58	65,14	78,76	87,83	85,66
Kepulauan Talaud	55,03	57,43	71,27	83,39	71,53
Minahasa Selatan	56,30	66,61	66,92	94,38	90,50
Minahasa Utara	75,15	73,26	70,79	91,39	94,54
Bolaang Mongondow Utara	40,14	48,20	50,06	86,58	77,58
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	80,67	84,05	87,05	96,66	98,28
Minahasa Tenggara	69,12	64,51	79,34	87,10	88,21
Bolaang Mongondow Selatan	55,05	62,22	74,77	88,87	89,71
Bolaang Mongondow Timur	67,11	73,03	64,13	92,66	77,74
Kota					
Manado	84,84	90,43	89,50	94,35	92,48
Bitung	90,11	89,08	91,66	93,32	95,48
Tomohon	72,58	80,42	83,15	96,54	97,04
Kotamobagu	87,62	80,01	82,75	95,45	96,80
Sulawesi Utara	71,53	70,22	73,29	90,81	90,31

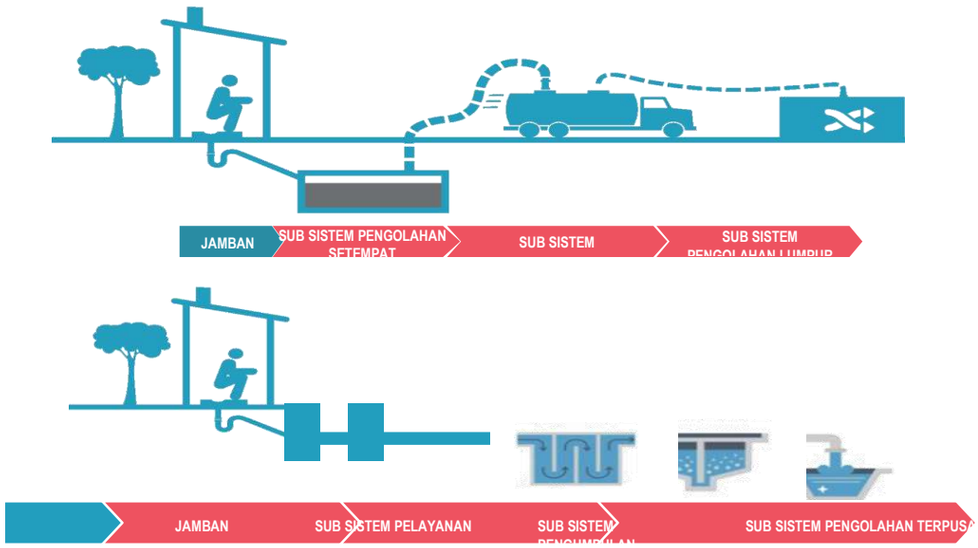
Sumber : Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2021, BPS.

B. Air Limbah Domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestic. Pelayanan pengolahan air limbah domestic adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestic yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan.

Evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan pelayanan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, seperti yang diuraikan dalam Permen PUPR 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi:

1. Capaian kinerja pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kabupaten/kota, dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016 – 2021 diukur dengan indikator persentase rumah tinggal bersanitasi. Namun, sesuai data yang tersedia, capaian kinerja pelayanan SPALD kabupaten/kota diukur dengan 2 indikator yaitu "persentase rumah tangga menurut penggunaan fasilitas tempat BAB" dan "persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak".



Gambar 2.6. Pelayanan SPALD-S Kualitas Pelayanan Akses Aman
Sumber : Lamp. 1 Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018

2. Penyelenggaraan SPALD lintas kabupaten/kota.
   Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah kabupaten/kota dan membutuhkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pengolahan air limbah domestik.

Berikut ini capaian kinerja pelayanan SPALD di Provinsi Sulawesi Utara dalam rentang waktu tahun 2016 – 2019:

1) Persentase rumah tangga menurut penggunaan fasilitas tempat BAB



Fasilitas buang air besar (BAB) individual adalah akses air limbah domestik, yang terkoneksi ke bangunan pengolahan setempat. Berdasarkan data BPS 2018 – 2019, persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 92.18%, jumlah ini meningkat sebesar 2.38% dari tahun sebelumnya. Terjadi peningkatan persentase di 14 (empat belas) kabupaten/kota dan peningkatan tertinggi dicapai Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang berhasil meningkatkan sebesar 10,52% RT yang memiliki fasilitas tempat BAB pada tahun 2019 dibandingkan dengan jumlah di tahun sebelumnya. Sedangkan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menunjukkan penurunan persentase RT yang memiliki fasilitas tempat BAB sebesar 3,3% di tahun 2019, dibandingkan dengan jumlah di tahun sebelumnya. Data mengenai persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat BAB dan yang tidak memiliki fasilitas tempat BAB menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2018 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Kepemilikan Terhadap Fasilitas BAB Menurut Kabupaten – Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 – 2020

Kabupaten/ Kota	Persentase RT yang memiliki fasilitas tempat BAB 2018-2020			Persentase RT yang tidak memiliki fasilitas tempat BAB Tahun 2018-2020		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	69.90	76.77	72.10	30.10	23.23	16.77
Minahasa	94.16	96.95	85.70	5.84	3.05	1.69
Kepulauan Sangihe	83.79	89.25	82.27	16.22	10.75	8.41
Kepulauan Talaud	91.84	96.75	83.92	8.16	3.25	3.67
Minahasa Selatan	93.29	95.10	83.23	6.71	4.90	2.23
Minahasa Utara	90.31	92.13	89.11	9.68	7.87	2.67
Bolaang Mongondow Utara	75.24	76.92	62.15	24.76	23.09	10.39
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	91.00	92.14	87.70	9.00	7.87	6.80
Minahasa Tenggara	91.89	93.92	84.03	8.10	6.09	6.17
Bolaang Mongondow Selatan	64.47	74.99	53.47	35.52	25.01	23.24
Bolaang Mongondow Timur	76.74	73.44	72.56	23.25	26.56	19.40
Manado	97.99	98.69	73.77	2.01	1.30	1.43
Bitung	96.76	97.51	88.74	3.24	2.49	3.05
Tomohon	98.86	100.00	85.98	1.13	-	0.67
Kotamobagu	89.01	89.43	79.84	11.00	10.57	11.55
Sulawesi Utara	**89.80**	**92.18**	**80.20**	**10.21**	**7.82**	**5.70**

Sumber : Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2020, BPS, data diolah.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa masih ada 7.82% rumah tangga di Provinsi Sulawesi Utara yang belum memiliki akses sanitasi atau belum memiliki fasilitas tempat BAB. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dimana masih ada 26.56%

rumah tangga belum memiliki fasilitas tempat BAB, dan persentase terendah terdapat di Kota Manado, dimana pada tahun 2019 hanya 1.3% rumah tangga yang belum memiliki fasilitas tempat BAB, dan Kota Tomohon yang berhasil mencapai 0% rumah tangga yang belum memiliki fasilitas tempat BAB sehingga 100% rumah tangga di Kota Tomohon telah terakses layanan sanitasi.

2) *Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak*


Sarana BAB di salah satu kelurahan Kota Bitung, Desember 2016

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%).

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut di gunakan oleh rumah tangga sendiri atau Bersama, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau tersambung dengan perpipaan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Sedangkan yang dimaksud dengan akses aman air limbah domestik adalah fasilitas buang air besar (BAB) individual yang terkoneksi ke sistem terpusat (perpipaan) atau tangki septik yang disedot secara berkala dengan lumpur yang dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Berikut ini adalah data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2019.

Tabel di bawah ini menjelaskan bahwa pada tahun 2019, persentase akses sanitasi layak di Provinsi Sulawesi Utara adalah 75.80% dan terjadi penurunan persentase sebesar 0,26% dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Namun jika dilihat capaian per kabupaten/kota, terdapat 7 kabupaten/kota yang berhasil meningkatkan akses sanitasi layak yaitu Kota Kotamobagu sebesar 6.32%, Kota Tomohon sebesar 6.09%, Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 5.32%, Kota Manado sebesar 4.56%, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 3.36% dan Kabupaten Minahasa Utara sebesar 0.83%. Persentase tertinggi untuk rumah tangga yang memiliki sanitasi layak di Provinsi Sulawesi Utara dicapai oleh Kota Tomohon dimana pada tahun 2019 memiliki akses layak sebesar 95.52%, dan persentase terendah dicapai Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar 48.12%.

Tabel 2.69. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Kabupaten - Kota di Prov. Sulut Tahun 2016 – 2020

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 - 2020				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	60.11	64.07	63.50	63.01	70.25
Minahasa	67.21	69.55	83.34	79.21	88.03
Kepulauan Sangihe	77.73	71.14	74.72	77.94	78.65
Kepulauan Talaud	80.47	62.00	83.04	88.36	86.99
Minahasa Selatan	77.64	67.78	71.55	64.39	82.58
Minahasa Utara	74.68	73.10	72.65	73.48	86.05
Bolaang Mongondow Utara	54.76	54.09	52.49	52.08	69.25
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	70.89	79.30	89.13	82.39	90.09
Minahasa Tenggara	80.45	74.02	75.09	73.52	83.64
Bolaang Mongondow Selatan	31.01	30.88	49.87	53.23	55.16
Bolaang Mongondow Timur	60.05	52.33	55.79	48.12	56.65
Manado	88.66	84.60	84.16	88.72	86.82
Bitung	90.89	85.07	89.75	86.33	89.05
Tomohon	97.31	92.01	89.43	95.52	95.19
Kotamobagu	64.33	57.43	54.66	60.98	71.37
Sulawesi Utara	**75.27**	**71.93**	**76.06**	**75.80**	**82.29**

Keterangan : Penjelasan Warna

Persentase tertinggi Persentase terendah

Sumber : Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2020, BPS, data diolah.

Sebanyak 8 (delapan) Kabupaten/Kota menunjukkan penurunan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, dengan persentase penurunan terbanyak terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu 7.67% dan Kabupaten Minahasa Selatan yaitu 7.16%.

Tabel 2.70. Jumlah dan Status IPLT Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota	Keberadaan IPLT	
	IPLT	Status
Bolaang Mongondow		
Minahasa	IPLT Minahasa	(Proses) serah terima pengelolaan
Kepulauan Sangihe		
Kepulauan Talaud	IPLT Talaud	(Proses) serah terima pengelolaan
Minahasa Selatan		
Minahasa Utara	IPLT Airmadidi	Belum beroperasi
Bolaang Mongondow Utara		
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		
Minahasa Tenggara		
Bolaang Mongondow Selatan	IPLT Transpatoa	Serah terima pengelolaan dan belum beroperasi
Bolaang Mongondow Timur		

Kabupaten/Kota	Keberadaan IPLT	
	IPLT	Status
Manado		
Bitung	IPLT Aertembaga	Serah terima pengelolaan dan beroperasi di 2 tahun pertama setelah serah terima
Tomohon	IPLT Tomohon	(Proses) serah terima pengelolaan
Kotamobagu	IPLT Tabang	Belum beroperasi
Sulawesi Utara	**7 IPLT**	**1 IPLT beroperasi**

Sumber : Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2020, BPS.

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub – sistem Pengolahan Setempat. IPLT merupakan bagian dari rantai layanan pengelolaan air limbah domestik, sehingga keberadaannya mutlak diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.



Gambar 2.7. IPLT di Kota Bitung, Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

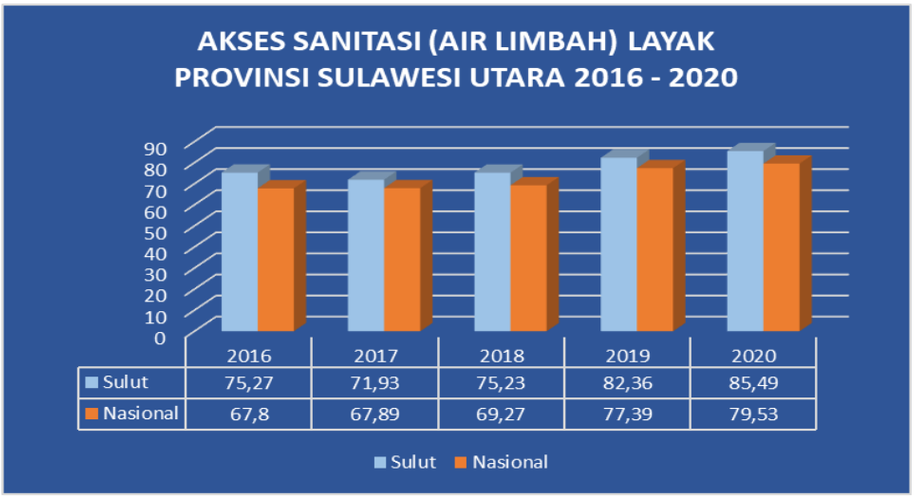
Sumber Foto : Monev Prosda PPSP, 2017 – 2018 dan Pemantauan Bappeda Prov. Sulut, Tahun 2020

3) *Jumlah KK yang terlayani dengan SPALD regional lintas kabupaten/kota.*
Sesuai Lampiran 1 Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang SPM PUPR, jenis pelayanan dasar air limbah domestik pada Pemerintah Daerah Provinsi adalah penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota. Penerima pelayanan dasar adalah rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air, yaitu area yang

termasuk dalam kategori resiko air limbah tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).

Pemetaan area yang membutuhkan pelayanan limbah domestik regional perlu dilakukan agar data ini dapat tersedia. Sejauh ini data yang terkumpul dari SSK Kabupaten/Kota terkait peta area beresiko tidak menyertakan nama desa pada zona – zona yang ada sehingga sulit untuk diidentifikasi lebih lanjut. Beberapa desa dengan resiko 3 dan 4 yang dapat diidentifikasi dari dokumen SSK dapat dilihat pada tabel berikut.
Hasil evaluasi capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara untuk indikator jumlah KK yang memperoleh akses air limbah di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Grafik 2.5. Persentase Akses Air Limbah Layak Provinsi Sulawesi Utara 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

C. Jalan

Jalan merupakan saranan transportasi darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian di suatu wilayah, Panjang jalan Provinsi di wilayah Sulawesi Utara Tahun 2020 mencapai 926,737 km dilihat dari kondisi permukaannya, jalan dengan kondisi mantap mencapai 89,40 persen atau 828,5 km.

Tabel 2.71. Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 - 2020

No.	Tahun	Jumlah Ruas Jalan	Total Panjang Jalan (KM)	Persentase Kemantapan
1	2015	41	940,88	60,23
2	2016	37	940,88	75,02
3	2017	64	998,61	65,38
4	2018	61	926,74	71,25
5	2019	61	926,74	79,48
6	2020	61	926,74	89,40

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Tabel 2.72. Panjang Jalan Provinsi per Kabupaten/Kota

No.	Kota/Kabupaten	Panjang Per Kab/Kota (KM)
1	Kota Manado	42.720
2	Kota Bitung	9.464
3	Kota Tomohon Sangihe	36.661
4	Kabupaten Minahasa	192.071
5	Kabupaten Minahasa Utara	134.600
6	Kabupaten Minahasa Tenggara	58.808
7	Kabupaten Minahasa Selatan	102.500
8	Kabupaten Bolaang Mongondow	103.883
9	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	16.000
10	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	7.600
11	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	55.300
12	Kota Kotamobagu	21.000
13	Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro	21.800
14	Kabupaten Kepl. Sangihe	58.280
15	Kabupaten Kepl. Talaud	66.050
	Sulawesi Utara	**926.740**

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Kabupaten Minahasa memiliki ruas jalan provinsi terpanjangyang menjapai 192.071 km, sedangkan ruas jalan provinsi terpendek ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang hanya mencapai 7,6 km.

D. Irigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Daerah irigasi (DI) kewenangan Provinsi sulawesi Utara dengan luas 18.302 Ha potensial dan 13.695 Ha fungsional. Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi dalam keadaan mantap tahun 2019 sebesar 75,61%.

Tabel 2.73. Luas Areal, Jumlah Bangunan dan Panjang Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019

No.	Nama daerah Irigasi	Luas areal		Tingkat Jaringan (Ha)			Ket
		Potensi (Ha)	Fungsi (Ha)	Teknis	Semi Teknis	Sederhana	
	PROVINSI	**18.302**	**13.695**	**11.987**	**6.315**	**-**	
1	DI. PUSIAN MOLONG	1.171	566	1.171	-	-	
2	DI. AYONG BOLANGATMAELANG	2.293	2.201	2.293	-	-	
3	DI. LOLAK, PINOGALUMAN, MONANOW	2.040	700	-	2.040	-	
4	DI. RANOYAPO	2.059	2.059	-	2.059	-	
5	MOAYAT - PAWAK	2.521	2.129	2.521			
6	DI. TOMBOLIKAT SITA	1.076	450	1.076			
7	DI. BUYAT	769	150	769			
8	DI.BUKO TUNTUNG	1.166	878	1.166			

No.	Nama daerah Irigasi	Luas areal		Tingkat Jaringan (Ha)			Ket
		Potensi (Ha)	Fungsi (Ha)	Teknis	Semi Teknis	Sederhana	
9	DI. NOONGAN	1.286	1.286	1.286			
10	DI. TALAWAAN MERAS	1.705	1.239	1.705			
11	DI. RANOMBOLAY	1.157	1.157	-	1.157		
12	DI. LAHENDONG	1.059	880	-	1.059		

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Utara, 2019

Potensi Daerah Irigasi terbesar adalah DI. Moayat – Pawak sebesar 2.521 Ha (13,77%) , namun dilihat dari fungsinya DI Ayong Bolangat Maelang yang paling besar mencapai 2.201 Ha (16,07%). Sebaliknya daerah irigasi terkecil adalah DI Buyat yang potensinya hanya 769 Ha (4,20%) dan yang berfungsi hanya 150 Ha (1,09%). Kondisi Jaringan irigasi Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2019 Kondisi Baik 1.406 M untuk saluran primer dan kondisi baik 35.480 M pada saluran sekunder.

Tabel 2.74. Kondisi Kemantapan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 - 2020

No.	Tahun	Luas Daerah Irigasi (Ha)	Persentase Kemantapan (%)
1	2015	18.302	59,15
2	2016	18.302	63,02
3	2017	18.302	67,88
4	2018	18.302	70,06
5	2019	18.302	75,61
6	2020	18.302	81,54

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Utara, 2021

E. Penataan Ruang



Berdasarkan data yang ada, dari 6 indikator kinerja pembangunan bidang penataan ruang, terdapat 4 indikator dalam Bidang Penataan Ruang RPJMD yang tidak mengukur kinerja Bidang Penataan Ruang tetapi Bidang Perumahan dan Permukiman, dan 2 indikator yang mengukur kinerja Bidang Penataan Ruang sesuai dengan Permendagri 86/2017. Hasil evaluasi capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara untuk kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.75. Target dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang

Indikator	Target Akhir RPJMD 2016 - 2021	Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Target Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan luas ber HPL/HGB	56%	56%	*Belum ada data*	56%	*Belum ada data*
Persentase Bangunan ber IMB per satuan bangunan	5,14%	4,67%	*Belum ada data*	4,90%	*Belum ada data*

Sumber : Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2020

Tabel 2.76. Status Revisi Peraturan Daerah RTRW Di Provinsi Sulawesi Utara

No.	Daerah	Progres/Status	Keterangan
1.	Provinsi Sulawesi Utara	Proses integrasi RTRW dan RZWP3K	1. Muatan pada bagian darat berada dalam finalisasi akhir; 2. Muatan pada bagian laut pada posisi updating data untuk 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota 3. Proses KLHS Integrasi RTRW pada posisi inventarisasi muatan KRP yang berpengaruh.
2.	Kabupaten Minahasa	Proses pendaftaran Loket Kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan Persetujuan Substansi.	
3.	Kabupaten Minahasa Utara	Proses revisi di tingkat Pemerintah Daerah.	Tidak ada alokasi anggaran untuk Tahun 2021.
4.	Kabupaten Minahasa Selatan	Telah selesai pembahasan di tingkat Provinsi dan dalam pelaksanaan perbaikan untuk di ajukan kepada DPRD.	
5.	Kabupaten Minahasa Tenggara	Proses revisi di tingkat Pemerintah Daerah.	
6.	Kabupaten Bolaang Mongondow	Pembahasan di Tingkat Provinsi	
7.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Proses revisi di tingkat Pemerintah Daerah.	
8.	Kabupaten Bolaang Mongondow	Proses revisi di tingkat Pemerintah Daerah.	
9.	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Proses revisi di tingkat Pemerintah Daerah.	
10.	Kabupaten Kepl. Sangihe	Proses Peninjauan Kembali (PK) sesuai UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2021	
11.	Kabupaten Kepl. Talaud	Proses Peninjauan Kembali (PK) sesuai UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2021	
12.	Kabupaten Kepl. Siau	Proses revisi di tingkat	

No.	Daerah	Progres/Status	Keterangan
	Tagulandang Biaro	Pemerintah Daerah.	
13.	Kota Manado	Proses pendaftaran Loket Kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan Persetujuan Substansi.	
14.	Kota Bitung	Proses revisi di tingkat Pemerintah Daerah.	
15.	Kota Tomohon	Proses revisi di tingkat Pemerintah Daerah.	
16.	Kota Kotamobagu	Proses revisi di tingkat Pemerintah Daerah.	

Sumber : Dinas PUPRD Prov. Sulut, Dinas KPD Prov. Sulut, dan BAPPEDA Prov. Sulut

2.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulwesi Utara dalam rangka pemerataan kebutuhan Perumahan dan penataan kawasan permukiman adalah vital bagi Pemerintah. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan peruntukan kawasan permukiman direncanakan dengan melihat perkembangan jumlah penduduk dan KK di Sulawesi Utara. Peningkatan jumlah penduduk akan memengaruhi kebutuhan lahan untuk perumahan dan permukiman. Karakteristik penduduk mulai dari strata rendah sampai strata atas juga menjadi faktor dalam menentukan kebutuhan perumahan.



Permukiman Perkotaan



Permukiman Perdesaan

A. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.77. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 - 2020

Jenis Pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	23,65% (44 KK)	61,82% (115 KK)	65% (121 KK)	69,89% (130 KK)
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni *)	0	0	0	0

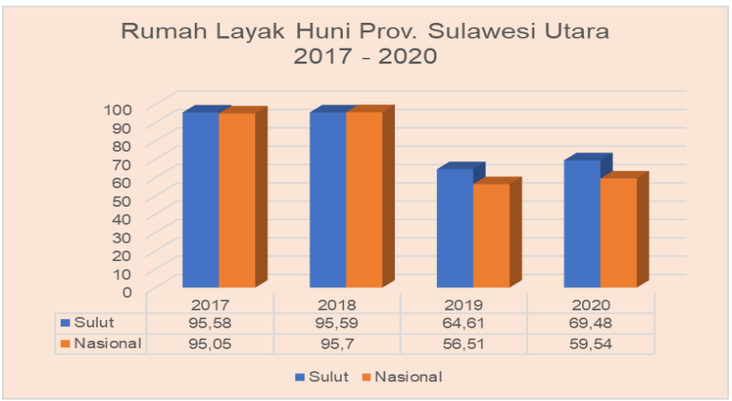
Ket: *) masih dalam tahap pendataan, karena belum ada kejadian bencana alam skala provinsi.
Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah, 2021 (diolah).

B. Rasio rumah layak huni

Rumah layak huni merupakan target Pemerintah Sulawesi Utara dalam pemenuhan kebutuhan primer masyarakat. Capaian dari aspek ketersediaan rumah layak huni secara umum telah mencapai target dimana dalam 5 tahun hingga 2020 menargetkan masyarakat dihampir semua daerah mendapatkan kesempatan untuk memiliki Rumah yang Layak huni.

Dalam RPJMD 2016-2021 ditahun 2016 tidak ada data persentasi kemudian di tahun 2017 ditargetkan sebesar 94,83 namun belum ada data pencapaiannya. Di tahun 2018 rasio ditargetkan sebesar 95,81% dan pencapaiannya adalah 95.58%. Di tahun 2019 target sebesar 96,38%dan pencapaian sebesar 95,6 %. Kenaikan rasio dijabarkan dalam persentase pertahun hingga target 2021 sebesar 97,92%. Di tahun 2020 (n-1) target persentasi adalah 97,15%. Secara keseluruhan rasio rumah layak huni di perlihatkan pada diagram sebagai berikut:

Grafik 2.6. Capaian Rumah Layak Huni Sulut 2017-2020



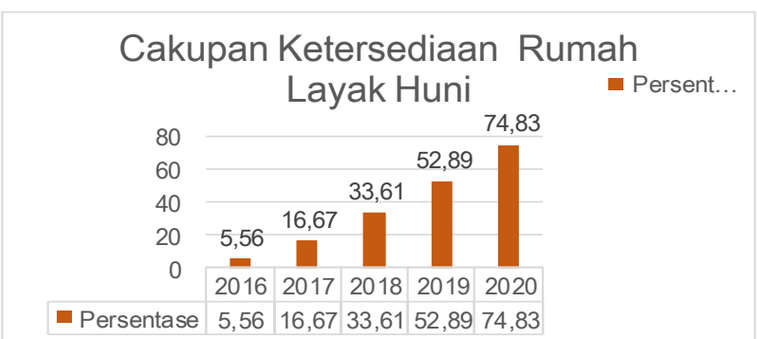
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Rasio rumah layak huni berdasarkan evaluasi kinerja belum tercapai sebagaimana yang diharapkan. Salah satu kendala dalam penataan kawasan perumahan dan permukiman adalah masih terdapat kawasan lingkungan permukiman kumuh baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan/kabupaten.

Agar dapat tercapai penataan kawasan permukiman yang sehat, ideal dan sesuai standar kesehatan maka pemerintah daerah telah melakukan pendataan kawasan dan lingkungan permukiman kumuh baik perkotaan maupun perdesaan yang penting dalam perencanaan secara terintegrasi dan komprehensif.

C. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Grafik 2.7. Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni

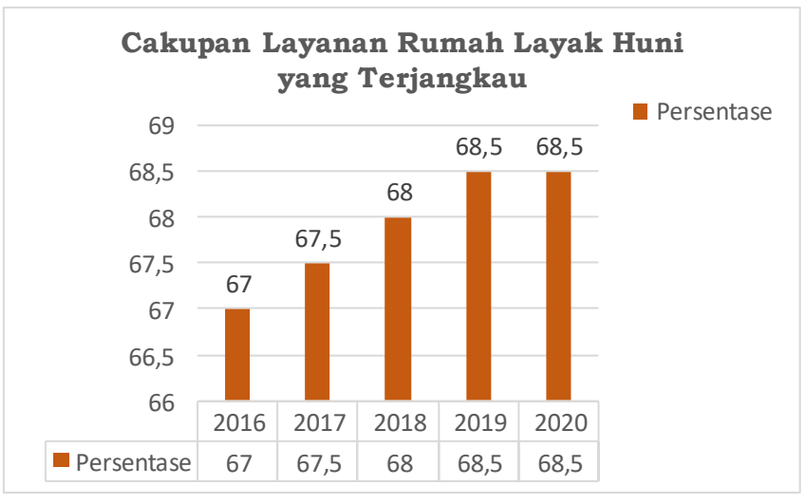


Sumber: Data Target Kinerja RPJMD 2016-2021

Dalam evaluasi kinerjanya menunjukkan bahwa target RPJMD hingga 2021 adalah 74,83%, target di tahun 2019 adalah 52,89% dan capaian di tahun 2019 adalah 95,58% (melampaui target).

D. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

Grafik 2.8. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Terjangkau



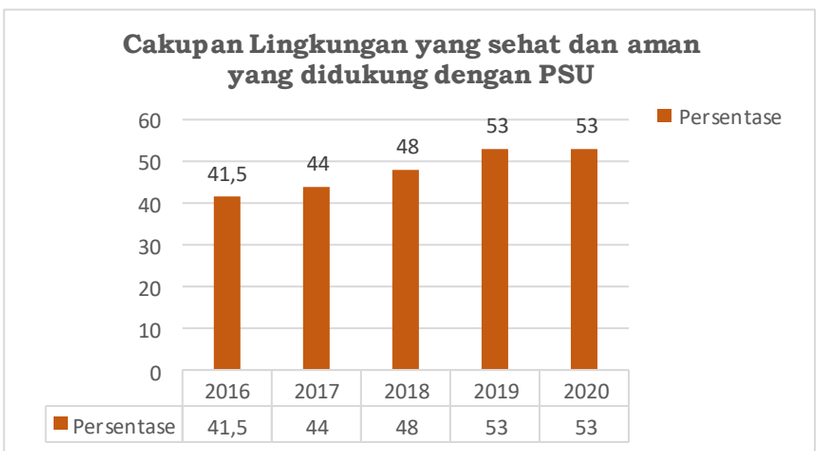
Sumber: Data Target Kinerja RPJMD 2016-2021

Evaluasi kinerja RPJMD menunjukkan target akhir cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau adalah 68,50%. Sementara target di tahun 2019 adalah 68,50% dan capaian di tahun yang sama adalah 95,58 atau melampaui target.

E. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

Evaluasi kinerja RPJMD menunjukkan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) tahun 2019 adalah 53%. Sementara cakupan di tahun 2020 masih menggunakan data tahun 2019.

Grafik 2.9. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman



Sumber: Data Target Kinerja RPJMD 2016-2021

F. Penanganan Kawasan Kumuh

Penanganan kawasan kumuh di Provinsi Sulawesi Utara selang periode 2016 – 2021 difokuskan pada penanganan kawasan kumuh sesuai pendataan tahun 2015, dimana kawasan kumuh yang terdata merupakan kawasan kumuh dengan luasan kurang dari 10 Ha dalam satu hamparan, yang mana hal ini merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kawasan kumuh ini kemudian masuk dalam program 100-0-100 pada RPJMN 2015 – 2019 yang menjadi prioritas penanganan pemerintah pusat melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

Tabel 2.78. Pengurangan Kawasan Kumuh Provinsi Sulawesi Utara

No.	Kota/Kab	Jlh. Kelurahan	Luas Kumuh Awal (Ha)	Pengurangan Kumuh (Ha)	% Pengurangan (31 Des. 2019)	Luas Kumuh Akhir (Ha)
1	Kotamobagu	10	56,29	56,29	100	-
2	Minahasa	19	99,24	99,24	100	-
3	Sangihe	11	34,10	30,72	90	3,38
4	Manado	25	155,86	148,06	95	7,80
5	Bitung	12	136,26	124,11	91	12,15
6	Tomohon	8	18,17	18,17	100	-
7	**Sulawesi Utara**	**85**	**499,92**	**476,56**	**95,3**	**23,33**

Sumber: Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, 2020

Total luasan kawasan kumuh Sulawesi Utara yang terverifikasi Direktorat PKP Kementerian PUPR seluas 499,92 Ha yang tersebar di 85 kawasan pada 6 (enam) Kabupaten/Kota. Sedangkan Pengurangan kawasan kumuh sampai akhir 2019 seluas 476,59 Ha atau 95,3 persen. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel diatas.

2.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia, Pasal 1, ayat (9) berbunyi "Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur." Sedangkan, pada Pasal 1, ayat (10), perlindungan masyarakat didefinisikan sebagai segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tabel 2.79. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2019

Indikator	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara		
	2017	2018	2019
Rasio kecukupan personil Satuan Polisi Pamong Praja se Provinsi Sulawesi Utara	4,56:1000 Pddk	4,52:1000 Pddk	4,52:1000 Pddk
Rasio pelayanan 1 orang anggota Satpol PP kepada masyarakat	228,27:50.000 Pddk	226,13:50.000 Pddk	226,13:50.000 Pddk

Indikator	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara		
	2017	2018	2019
Rasio peningkatan keamanan dan ketertiban	100%	100%	100%
Tingkat Penegakan Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya	100%	100%	100%
Persentase tingkat pelanggaran terhadap Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya	100%	100%	100%
Jumlah personil yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Satpol PP	100% (25 orang)	100% (90 orang)	100% (160 orang)
Penurunan *Crime Rate*		100%	100%
Persentase jumlah kebakaran yang tertangani		100%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tabel ini memperlihatkan bahwa fokus pengukuran ada pada personil satuan polisi pamong praja dan pelayanan satuan ini kepada masyarakat. Dalam Permendagri Nomor 87 Tahun 2017, tugas ini perlu diseimbangkan dengan satuan perlindungan masyarakat, yang selanjutnya disebut satlinmas, dengan cakupan yang terukur. Dalam permendagri Nomor 44 Tahun 2010, Satlinmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Walaupun rasio peningkatan keamanan dan ketertiban, tingkat penegakan Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya, persentase tingkat pelanggaran terhadap Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya, dan penurunan *Crime Rate* mempunyai capaian rata-rata 100%, perlu senantiasa dijaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pembangunan senantiasa membutuhkan stabilitas masyarakat dan seluruh hasil dan indikator pembangunan seharusnya menyejahterahkan dan membahagiakan masyarakat, termasuk melalui ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarkat.

2.3.1.6. Sosial

Kemiskinan sampai saat ini masih menjadi masalah yang harus dihadapi oleh banyak negara. Berbagai program pengentasan kemiskinan sudah dilakukan oleh pemerintah, namun faktanya masih ditemui banyak persoalan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Di Sulawesi Utara sendiri, jumlah penduduk miskin pada September 2020 mencapai 195,85 ribu orang (7,78 persen) dengan angka garis kemiskinan sebesar Rp. 392.818. Jumlah penduduk miskin bertambah sebesar 3,48 ribu orang jika dibandingkan dengan Maret 2020 yang tercatat sebesar 192,37 ribu orang (7,62 persen).

Di sisi lain, terdapat beberapa indikator lainnya pada bidang sosial sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 yang mengalami peningkatan dan menjadi hal yang harus diseriusi untuk ditangani oleh pemerintah provinsi Sulawesi utara saat ini. Beberapa indikator dimaksud diantaranya yakni, jumlah orang dengan HIV/AIDS yang mengalami peningkatan dari tahun

2016 berjumlah 441 orang menjadi 1.500 orang pada tahun 2020, jumlah korban penyalahgunaan napza dari tahun 2016 berjumlah 356 orang menjadi 1.378 orang pada tahun 2020, jumlah tuna sosial naik menjadi 422 orang di tahun 2019, dan jumlah waria (Kelompok Minoritas) naik dari tahun 2016 berjumlah 67 orang menjadi 475 orang pada tahun 2020.

Adapun beberapa indikator sosial yang menunjukan angka fluktuatif hingga tahun 2020, yakni jumlah anak terlantar berjumlah 344 anak di tahun 2017 naik signifikan menjadi 6.391 anak tahun 2019 dan kembali turun menjadi 1.903 anak di tahun 2020, jumlah lanjut usia terlantar 525 orang di tahun 2017, naik signifikan menjadi 20.979 orang pada tahun 2019 dan kembali turun menjadi 5.696 orang di tahun 2020, jumlah penyandang cacat yang berjumlah 945 orang di tahun 2016 naik menjadi 3.188 pada tahun 2019 yang kembali turun pada tahun 2020 menjadi 3.159 orang, jumlah Penyandang Disabilitas dalam Panti yang ditahun 2017 berjumlah 260 orang kembali turun menjadi 175 orang pada tahun 2020.

Namun demikian terdapat beberapa indikator yang menunjukan keberhasilan penurunan hingga tahun 2020, yakni jumlah keluarga miskin yang berjumlah 828,686 di tahun 2016 turun siginfikan menjadi 254.571 pada tahun 2020, dan jumlah eks napi yang pada tahun 2016 berjumlah 1.239 napi turun menjadi 600 napi di tahun 2020.

Tabel. 2.80. Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020

No.	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Panti Asuhan/LKS Anak	41	43	45	44	44
2	Jumlah Panti Jompo/Panti LU/LKS LU	22	19	19	13	14
3	Jumlah Panti Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	7	7	8	8	8
4	Jumlah LKS Napza	3	4	4	4	4
5	Jumlah Anak Terlantar		344	344	6,391	1,903
6	Jumlah LU Terlantar		525	525	20,979	5,696
7	Jumlah Penyandang Cacat	945	1,984	2,032	3,188	3,159
8	Jumlah Tuna Sosial	79	365	311	422	
9	Jumlah ODHA	411	1,439	2,790	1,450	1,500
10	Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza	356	366	478	1,378	1,378
11	Jumlah Waria (Klp Minoritas)	67	135	139	475	475
12	Jumlah Eks Napi/BWLP	1,239	1,058	1,058	504	600
13	Jumlah Eks Trauma (Eks Kusta)	21	20	20	20	20
15	Jumlah Anak Dalam Panti	1,875	865	865	1,054	1,134
16	Jumlah Anak dengan HIV/AIDS			37	30	30
17	Jumlah Anak dengan Kecacatan (ADK)	366	950	950	950	
18	Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)			427		
19	Jumlah Anak Korban Perdagangan Orang			10	12	15
20	Jumlah Lanjut Usia dalam Panti	580	344	344	504	286
22	Jumlah Penyandang Disabilitas dalam Panti		260	282	351	175
23	Jumlah Lanjut Usia dalam Panti Milik Pemerintah	90	55	55	55	55
24	Jumlah Korban Tindak Kekerasan		2	8	3	2

No.	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
	dan Pekerja Migran Bermasalah (KTKPM)					
25	Jumlah Keluarga Miskin	828.686	854.985	1.001964	254.026	254.571

Sumber: Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021

2.3.2. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Jika dibandingkan kondisi tahun 2016 dan 2020 terjadi penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini menyebabkan masalah ketenagakerjaan lebih khusus pengangguran menjadi salah satu prioritas nasional dan daerah.

Tabel. 2.81. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sulawesi Utara

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,11	60,85	63,01	63,87	63,42

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara – Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020



Tahun 2020 TPAK tertinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Talaud mencapai 80,97%, sedangkan yang terendah di Kota Manado hanya 58,63%. TPAK kabupaten kota yang berada di atas angka provinsi terdapat pada 9 kabupaten dan 1 (satu) kota.

Jumlah angkatan kerja Sulawesi Utara pada Agustus 2020 tercatat sebanyak 1,23 juta orang dan yang bekerja ada 1,13 juta orang. Sebanyak 686,14 ribu orang (60,46 persen) bekerja di kegiatan informal. Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur dan persentase pekerja paruh waktu naik masing-masing sebesar 4,67 persen dan 7,46 persen.

Terdapat 287,64 ribu orang yang terdampak pandemi Covid-19 atau 14,89 persen. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (24,92 ribu orang), BAK karena Covid-19 (10,61 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (17,28 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid19 (234,82 ribu orang).

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)



Terdapat 6 (enam) komponen pembentuk IPG yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga professional, Angka Harapan Hidup (AHH) baik untuk laki-laki dan perempuan, serta Angka Harapan lama Sekolah (AHLS) untuk laki-laki dan perempuan. Data menunjukkan bahwa komponen AHH perempuan adalah yang

paling dominan membentuk IPG di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.82. Indeks Pemberdayaan Gender di Sulawesi Utara

Indikator	Tahun		
	2017	2018	2019
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	94,78	94,79	94,53

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Provinsi Sulawesi Utara, 2020

2.3.2.3. Pangan

A. Ketersediaan Pangan

Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu Provinsi penyangga pangan Nasional. *Surplus* komoditi pangan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di provinsi lainnya di Indonesia, disamping untuk *stock*/cadangan pangan Nasional.



Sebagai provinsi lumbung pangan, Sulawesi Utara masih perlu melakukan pemantapan ketersediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan ditingkat wilayah dan rumah tangga.

Ketersediaan beras di Sulawesi Utara pada tahun 2016 sebesar 329.871 ton, selanjutnya terus meningkat hingga tahun 2017 menjadi 402.722 ton. Kemudian di tahun 2018 menurun menjadi 345.051 ton dan 2019 menjadi 339.930 ton. Di tahun 2020, berjumlah 298.376 ton (per Agustus 2020). Ketersediaan jagung di Sulawesi Utara berjumlah 135.471 ton di tahun 2016 kemudian turun menjadi 105.929 dan kemudian terus meningkat tiap tahunnya, di tahun 2020, menjadi 351.228 ton.

Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, dan mutu keanekaragaman pangan yang digambarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Situasi ketersediaan pangan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan penyediaan kebutuhan pangan dan gizi penduduk menuju kemandirian dan kestabilan pangan.

Tabel 2.83. Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Strategis

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Beras (Ton)	329.871	402.722	345.051	339.930	298.376
2	Jagung (Ton)	135.471	105.929	307.961	323.838	351.228
3	Kedelai (Ton)	15.697	11.543	13.687	2.969	3.000

Sumber : Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021

B. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Untuk mendukung keberadaan Sulawesi Utara sebagai penyangga lumbung pangan nasional dan terpenuhinya pangan bagi penduduk Sulawesi Utara, maka keberadaan lahan pangan berkelanjutan menjadi penting guna menghasilkan pangan

pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Secara keseluruhan, luas LP2B di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang RTRW Sulawesi Utara 2014 – 2034 adalah seluas 107.361 Ha yang terdiri atas 52.236 Ha sawah eksisting dan 55.125 Ha sawah cadangan. Sebaran keberadaan sawah di setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.84. LP2B di Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014

KABUPATEN/KOTA	SAWAH EKSISTING (HA)	LAHAN SAWAH CADANGAN (HA)
Bolaang Mongondow	22.099,0	18.818,3
Minahasa	7.576,9	2.569,6
Kepulauan Sangihe	9,1	-
Kepulauan Talaud	212,1	-
Minahasa Selatan	5.390,9	8.409,3
Minahasa Utara	3.146,1	4.358,0
Bolaang Mongondow Utara	5.730,6	5.090,3
Siau Tagulandang Biaro	-	-
Minahasa Tenggara	2.977,8	6.884,4
Bolaang Mongondow Selatan	1.331,6	8.594,2
Bolaang Mongondow Timur	1.655,8	400,7
Kota Manado	80,0	-
Kota Bitung	79,4	-
Kota Tomohon	675,7	-
Kota Kotamobagu	1.271,1	-
Sulawesi Utara	**52.236**	**55.125**
Total luas LP2B Sulut	**107.361**	

Sumber : Perda No. 1 Tahun 2014 tentang RTRW Sulut 2014 - 2034

Pada perkembangan selanjutnya, diketahui bahwa luas LP2B tersebut berkurang secara signifikan yaitu > 15 ribu Ha seperti yang teridentifikasi pada draft Raperda Revisi RTRW yang disusun pada tahun 2019 dan masih berproses untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. Jika mengacu ke data BPS 2021, hanya terdapat 62.020,39 Ha lahan sawah saja yang berproduksi dan dipanen pada tahun 2019 dan seluas 63,716,30 Ha lahan yang dipanen pada tahun 2020, dengan produktivitas rata – rata per Ha adalah 44,79 ku/ha atau 4,5 ton/ha di tahun 2019 dan 44,49 ku/ha atau 4,4 ton/ha di tahun 2020. Adapun luas panen padi dan produktivitas per kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.85. Luas Panen dan Produktivitas Padi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2020

Kabupaten/Kota	Luas Panen Padi (Ha)		Produktivitas Padi (ku/Ha)		Produktivitas Padi (ton/Ha)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Bolaang Mongondow	31.450,81	32.850,43	44,80	43,23	4,5	4,3
Minahasa	8.764,31	8.654,21	43,38	51,66	4,3	5,2

Kabupaten/Kota	Luas Panen Padi (Ha)		Produktivitas Padi (ku/Ha)		Produktivitas Padi (ton/Ha)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Kepulauan Sangihe	3,86	1,02	43,26	48,33	4,3	4,8
Kepulauan Talaud	60,23	52,93	43,74	43,57	4,4	4,4
Minahasa Selatan	4.157,87	4.034,13	43,33	39,95	4,3	4,0
Minahasa Utara	2.283,16	2.044,35	46,12	41,94	4,6	4,2
Bolaang Mongondow Utara	5.609,06	6.880,87	45,04	45,76	4,5	4,6
Siau Tagulandang Biaro	-	-	-	-	-	-
Minahasa Tenggara	1.918,01	1.869,80	44,66	41,27	4,5	4,1
Bolaang Mongondow Selatan	1.240,82	933,09	46,16	45,59	4,6	4,6
Bolaang Mongondow Timur	1.057,22	1.073,90	44,61	46,17	4,5	4,6
Kota Manado	1,26	-	37,94	-	3,8	-
Kota Bitung	91,34	97,89	43,52	43,89	4,4	4,4
Kota Tomohon	634,50	529,57	59,04	48,55	5,9	4,9
Kota Kotamobagu	4.747,94	4.694,11	45,49	43,47	4,5	4,3
Sulawesi Utara	**62.020,39**	**63.716,30**	**44,79**	**44,49**	**4,5**	**4,4**

Sumber : BPS 2021.

C. Produksi Padi dan Beras

Total produksi padi di Sulawesi Utara pada tahun 2019 tertinggi terjadi pada Bulan Agustsu sebesar 36,10 ribu ton dan produksi terendah terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 12,41 ribu ton. Kenaikan produksi padi tahun 2019 berdasarkan Berita Resmi Statistin tahun 2019 yang relative besar terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kota Tomohon dan Kota Kotamobagu. Sementara itu penurunan produksi padi tahun 2019 yang relative besar terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow, Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan dan Minahasa Utara.



Gambar 2.8. Selisih produksi padi 2019 terhadap produksi padi 2018 (Ton-GKG)

Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk (yang antara lain memperhitungkan proporsi gabah dan beras yang susut atau tercecer dan digunakan untuk penggunaan non pangan), produksi padi pada Tahun 2018 setara dengan 182,77 ribu ton beras. Sementara itu, produksi pada 2019 sebesar 155,29 ribu ton beras atau mengalami penurunan sebesar 27,48 ribu ton (15,03%) dibandingkan dengan produksi tahun 2018. Adapun produksi beras pada tahun 2018 – 2019 per kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.86. Produksi Padi dan Beras per Kabupaten/Kota Tahun 2018 – 2019

Kabupaten/Kota	2018		2019	
	Produksi Padi (Ton- GKG)	Produksi Beras (Ton-Beras)	Produksi Padi (Ton- GKG)	Produksi Beras (Ton-Beras)
Bolaang Mongondow	171.992,57	96.150,51	140.911,63	78.775,07
Minahasa	55.912,42	31.257,23	38.018,95	21.254,06
Kepulauan Sangihe	28,57	15,96	16,70	9,32
Kepulauan Talaud	334,87	187,21	263,44	147,26
Minahasa Selatan	19.068,14	10.659,85	18.017,60	10.072,56
Minahasa Utara	11.564,83	6.465,19	10.529,91	5.886,62
Bolaang Mongondow Utara	23.122,70	12.926,49	25.262,36	14.122,64
Siau Tagulandang Biaro	-	-	-	-
Minahasa Tenggara	11.116,16	6.214,37	8.565,06	4.788,20
Bolaang Mongondow Selatan	5.046,95	2.821,44	5.728,13	3.202,25
Bolaang Mongondow Timur	5.588,94	3.124,43	4.716,08	2.636,47

Kabupaten/Kota	2018		2019	
	Produksi Padi (Ton- GKG)	Produksi Beras (Ton-Beras)	Produksi Padi (Ton- GKG)	Produksi Beras (Ton-Beras)
Kota Manado	3,15	1,76	4,78	2,68
Kota Bitung	407,38	227,73	397,49	222,22
Kota Tomohon	2.390,05	1.336,14	3.746,36	2.094,36
Kota Kotamobagu	20.353,01	11.378,12	21.597,82	12.074,02
Sulawesi Utara	**326.929,74**	**182.766,43**	**277.776,31**	**155.287,73**

Sumber : Berita Resmi Statistik 2019.

D. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energi, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.



Pada tahun 2016 Pola Pangan Harapan (PPH) di Sulawesi Utara sebesar 83,6, selanjutanya mengalami peningkatan terus tiap tahun sampai 2018 hingga menjadi 94,1. Di tahun 2019, turun menjadi 93,1. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami dan mempunyai kesadaran akan pentingnya kualitas konsumsi pangan untuk hidup sehat, namun demikian perlu untuk lebih mengoptimalkan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui upaya meningkatkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), maka perlu didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk percepatan pencapaian Pola Pangan Harapan.

Tabel 2.87. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Provinsi Sulawesi Utara

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	83,6	94,1	94,1	93,1	86

Sumber : Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021

2.3.2.4. Pertanahan

Urusan Pertanahan merupakan salah satu urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pembangunan infrastruktur strategis

provinsi memerlukan ketersediaan lahan. Untuk itu, fokus utama Pemerintah Provinsi dalam menunjang pembangunan dimaksud ditinjau dari sisi pertanahan adalah dengan melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Hingga tahun 2020, luasan tanah untuk kepentingan umum yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi adalah 29,27 Ha yang dilakukan untuk mendukung pembangunan jalan Bandara – Likupang dan Manado Outer Ring Road (MORR) 3.

Tabel 2.88. Luas Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di Provinsi Sulawesi Utara

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum (Ha)	n/a	n/a	n/a	27,5	29,27

Sumber: Dinas Perkimtan Daerah Prov. Sulut, 2021

2.3.2.5. Perhubungan

A. Perhubungan Darat

Upaya dalam menyediakan layanan transportasi darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan, yang aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya-saing tinggi, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan dapat dipertanggungjawabkan, di Sulawesi Utara. Angkutan umum yang tersedia di Provinsi Sulawesi Utara sampai tahun 2020 sebagai berikut:

(1) Angkutan Antar Provinsi (AKAP):
   a) Bitung-Gorontalo : 19 unit
   b) Manado-Gorontalo : 14 unit
   c) Palu-Manado : 10 unit
   d) Makasar-Manado : 4 unit
   e) Kotamobagu-Gorontalo : 4 unit
   f) Tondano-Gorontalo : 3 Unit

(2) Angkutan Dalam Provinsi (AKDP) :
   ⇨ 115 trayek dengan jumlah armada 821 unit

(3) Angkutan Pemadu Moda :
   ⇨ Manado-Kotamobagu : 7 unit

(4) Taxi :
   a) Blue bird : 75 unit
   b) Dian taxi : 76 unit

(5) Angkutan antar jemput :
   a) PT. Paris Express 88 : 40 unit
   b) Kop Sinar Jaya : 1 unit
   c) CV. Nyiur Trans Kawanua : 4 unit

(6) Angkutan Pariwisata :
   d) CV. Star Express : 4 bus
   e) CV. Mapanget Indah : 34 bus
   f) CV. Limbers : 20 bus
   g) CV. Tasik Ria Resort : 4 bus
   h) CV. Tangkoko Resort : 1 bus
   i) MM. Travel : 15 bus

(7) Angkutan Perintis :
   a) Manado-Molobog : 2 unit
   b) Manado-Dumagin : 2 unit
   c) Manado-Labuan Uki : 2 unit

d) Manado-Bintauna-Pangkusa : 2 unit
e) Paal 2-Talawaan-Likupang-Bitung : 2 unit
f) Paal 2-Tondano-Bitung : 2 unit
g) Lolak-Passi-Atoga-Ratahan : 2 unit
h) Bitung-Jikoblanga : 2 unit
i) Melonguane-Essang-Gemeh : 2 unit
j) Melonguane-Dapalan-Gemeh : 2 unit

(8) Angkutan Online
a) Angkutan Sewa/Khusus : 80 unit
b) Ojek : 30.000 unit

(9) Jumlah perusahan angkutan umum
a) Milik Pemerintah : 1 perusahan
- Perum DAMRI Cab. Manado

b) Milik swasta : 22 perusahaan
- AKDP
  a. PT. Kinilem
  b. PT. Rajawali Indah
  c. PT. Paris Ekspress 88
  d. Koperasi Ikatan Pengusaha Angkutan (IPA)
  e. Koperasi Mitra Jaya Abadi
  f. Koperasi Astton
  g. Koperasi Sinar Jaya
  h. Koperasi Kota Jaya
  i. Koperasi Garuda
  j. CV. Wahana Bogani
  k. CV. Bintang Terang
- Pariwisata
  a. PT. Limbers Tour&Travel
  b. PT. Star Expres Rainbow Rental
  c. PT. Siladen Island Resort and Spa
  d. PT. Mapanget Wisata Indah
- AKAP
  a. PT. Trans Gorontalo Indah
  b. PT. Bintang Terang
  c. PT. Veronica
  d. PT. Jawa Indah
  e. PT. Harvest
  f. PT. Rajawali Indah
  g. PT. Misa Utara Bitung

(10) Jumlah tempat pengujian kendaraan angkutan umum
⇨ 1 unit di Bolaang Mongondow-Kotamobagu

(11) Terminal Penumpang di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:
⇨ Terminal penumpang Tipe A
  ➔ Terminal Bitung
  ➔ Terminal Liwas
  ➔ Terminal Malalayang
  ➔ Terminal Boroko
⇨ Terminal Penumpang Tipe B
  ➔ Terminal Karombasan
  ➔ Terminal Paal 2
  ➔ Terminal Tomohon
  ➔ Terminal Tondano
  ➔ Terminal Langowan
  ➔ Terminal Kawangkoan

- ➔ Terminal Amurang
- ➔ Terminal Bonawang (Kotamobagu)
- ➔ Terminal Airmadidi
- ➔ Terminal Likupang

⇨ Terminal Penumpang Tipe C

- ➔ Terminal Tomohon
- ➔ Terminal Tahuna
- ➔ Terminal Kauditan
- ➔ Terminal Serasi (Kotamobagu)

Tahun 2020 untuk kendaraan pribadi roda 2 berjumlah 793.727 unit, roda 4 berjumlah 258,283 unit total berjumlah 1.052.010 unit.

B. Perhubungan Laut

Melaksanakan urusan dibidang angkutan laut, kepelabuhanan dan perkapalan, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Sarana dan prasarana transportasi laut yaitu:

- 105 (seratus lima) pelabuhan terdiri dari:
  - ➲ 1 (satu) Pelabuhan Utama
    - ➔ Pelabuhan Bitung
  - ➲ 20 Pelabuhan Pengumpul Nasional
    1) Pelabuhan Manado
    2) Pelabuhan Labuan uki
    3) Pelabuhan Petta
    4) Pelabuhan Marore
    5) Pelabuhan Tamako
    6) Pelabuhan Kawaluso
    7) Pelabuhan Kawio
    8) Pelabuhan Tahuna
    9) Pelabuhan Lirung
    10) Pelabuhan Melonguane
    11) Pelabuhan Beo
    12) Pelabuhan Karatung
    13) Pelabuhan Marampit
    14) Pelabuhan Kakorotan
    15) Pelabuhan Miangas
    16) Pelabuhan Ulu Siau
    17) Pelabuhan Sawang
    18) Pelabuhan Pehe
    19) Pelabuhan Makalehi
    20) Pelabuhan Tagulandang
  - ➲ 25 (dua puluh lima) pelabuhan pengumpan regional :
    1) Pelabuhan Karatung
    2) Pelabuhan Essang
    3) Pelabuhan Mangaran
    4) Pelabuhan Rainis
    5) Pelabuhan Dapalan
    6) Pelabuhan Tamako
    7) Pelabuhan Para
    8) pelabuhan Bukide
    9) pelabuhan Matutuang
    10) pelabuhan Kahakitang
    11) pelabuhan Biaro
    12) pelabuhan Buhias
    13) pelabuhan Torosik

14) pelabuhan Amurang
15) pelabuhan Belang
16) pelabuhan Munte
17) pelabuhan Mantehage
18) pelabuhan Naen
19) pelabuhan Gangga
20) pelabuhan Bangka
21) pelabuhan Talise
22) pelabuhan Likupang
23) pelabuhan Kema
24) pelabuhan Tanjung Sidupa
25) pelabuhan Kotabunan

➲ 58 (lima puluh delapan) pelabuhan lokal :

1) Pelabuhan Aertembaga
2) Pelabuhan Bunaken
3) Pelabuhan Manado Tua
4) Pelabuhan Siladen
5) Pelabuhan Tumpa
6) Pelabuhan Kora-Kora
7) Pelabuhan Tanawangko
8) Pelabuhan Tumbak
9) Pelabuhan Ratatotok
10) Pelabuhan Bentenan
11) Pelabuhan Damau/Beo
12) Pelabuhan Gemeh/Dapalan
13) Pelabuhan Intata/Esang
14) Pelabuhan Dampulis/Marampit
15) Pelabuhan Mangarang
16) Pelabuhan Rainis
17) Pelabuhan Damau
18) Pelabuhan Gemeh
19) Pelabuhan Intata
20) Pelabuhan Mantehage
21) Pelabuhan Naen
22) Pelabuhan Talise
23) Pelabuhan Wori
24) Pelabuhan Likupang
25) Pelabuhan Kalama/Bukide
26) Pelabuhan Bentung/Kahakitang
27) Pelabuhan Beng Darat
28) Pelabuhan Kalama
29) Pelabuhan Beng Laut
30) Pelabuhan Kawaluso
31) Pelabuhan Bebalang
32) Pelabuhan Lipang
33) Pelabuhan Makalehi
34) Pelabuhan Matutuang
35) Pelabuhan Ngalipaeng
36) Pelabuhan Banelang
37) Pelabuhan Manalu
38) Pelabuhan P. Beng Darat
39) Pelabuhan P. Beng laut
40) Pelabuhan Mahagetang
41) Pelabuhan Tinakareng
42) Pelabuhan Pananaru

43) Pelabuhan Tamako
44) Pelabuhan Pahepa/Ulu Siau
45) Pelabuhan Salangka/Biaro
46) Pelabuhan Ruang/Buhias
47) Pelabuhan Pehe
48) Pelabuhan Sawang
49) Pelabuhan Para
50) Pelabuhan Pulau Ruang
51) Pelabuhan Salangka
52) Pelabuhan Inobonto
53) Pelabuhan Molibagu
54) Pelabuhan Boroko
55) Pelabuhan Tuntung
56) Pelabuhan Tanjung Sidupa
57) Pelabuhan Tutuyan
58) Pelabuhan Kotabunan

- 23 (dua puluh tiga) armada kapal terdiri dari :
  - 19 (sembilan belas) armada kapal penumpang
    1) KM. Metro Teratai (Mdo-Tahuna)
    2) KM. Mercy Teratai (Mdo-Tahuna)
    3) KM. Holly Mary (Mdo-Lirung)
    4) KM. Saint Mary (Mdo-Siau-Tahuna)
    5) KM. Venecian (Mdo-Tahuna)
    6) KM. Marina Bay 1 (Mdo-Tagu-Siau)
    7) KM. Barcelona 1 (Mdo-Tahuna)
    8) KM. Barcelona 2 (Mdo-Lirung)
    9) KM. Agil Pratama 4 (Mdo-Tarnate-Jailolo)
    10) KM. Aksar Saputra 9 (Mdo-Tarnate)
    11) KM. Karya Indah (Mdo- Tarnate)
    12) KM. Simba 1 (Mdo-Tagu-Siau)
    13) KM. Gloria 28 (Mdo-Tahuna)
    14) KM. Yubelium 2 (Mdo-Tahuna)
    15) KM. Majestic Kawanua I (Mdo-Biaro-Tagulandang-Siau-Tahuna)
    16) KM. Majestic Kawanua II (Mdo-Biaro- Tagulandang-Siau-Tahuna)
    17) KM. Express Bahari 2E (Mdo-Tagu- Siau-Tahuna)
    18) KM. Kelana (Mdo-Tagulandang-Siau
    19) KM. Permata Bunda (Manado-Tobelo)
  - 2 (dua) Armada Kapal Barang
    1) KM. Prima
    2) KM. Oasis
  - 2 (dua) Armada Pelayaran Rakyat
    1) KM. Geovani
    2) KM. Harapanku Mekar

- Terminal Khusus Pelabuhan, terdiri dari:
  - Kab. Minahasa Utara : 9 Tersus
    1) PT. Mimpi Indah Resort (Pariwisata)
    2) PT. Horiguchi Sinar Insani (Pembibitan dan Budidaya Mutiara)
    3) PT. Gangga Island Resort (Pariwisata)
    4) SIENKO B.P. TICOALU (Pariwisata)
    5) DANNY MOGI (Kepentingan Sendiri)
    6) Cocotinus Resort (Pariwisata)
    7) Kima Bajo Resort (Pariwisata)

8) Casabagio Paradise Resort (Parawisata)
9) Kinari Resort (Pariwisata)

➔ Kab. Minahasa : 11 Tersus
1) MM Beach Club (Kepentingan Sendiri)
2) La Rascase Resort (Kepentingan Sendiri)
3) Villa Dahlia Resort (Kepentingan Sendiri)
4) Murex Dive Resort (Kepentingan Sendiri)
5) Mapia Resort (Wisata Asing)
6) Lumba-Lumba Diving (Kepentingan Sendiri)
7) Janji Laut Resort (Kepentingan Sendiri)
8) Tasik Ria Indah Indonesia (Wisata Tirta)
9) Mercure Manado Tateli Beach (Parawisata)
10) City Extra (Restoran)
11) PT. Karya Mekar Jaya (Mineral Batuan)

➔ Kota Bitung : 16 Tersus
1) PT. Sari Malalugis (Perikanan)
2) PT. Bakri Cono (Kepentingan Sendiri)
3) PT. Froggies Indonesia (Kepentingan Sendiri)
4) PT. Thengo Karya (Kepentingan Sendiri)
5) PT. Lembeh Resort (Parawisata)
6) PT. Mentari (Kepentingan Sendiri)
7) PT. BMB (Kepentingan Sendiri)
8) PT. Nutrindo (Perikanan)
9) PT. Singa Raya (Kepentingan Sendiri)
10) PT. Indogonghai (Kepentingan Sendiri)
11) PT. Bitung Mina Utama (Perikanan)
12) PT. Aqua Sport Indonesia (Air Minum Kemasan)
13) PT. Diksa Bitung Makowidy (Resort)
14) PT. Sinar Pure Food Intern (Perikanan)
15) PT. Odyssea (Resort)
16) PT. Mitra Jaya Samudra (Perikanan)

➔ Kab. Kepl. Sangihe : 2 Tersus
1) PT. Pertamina (Niaga Migas/Energi)
2) PT. Cargil (Industri Minyak Nabati)

➔ Kab. Kepl. Talaud : 1 Tersus
1) PLTU Talaud (Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

➔ Kab. Bolaang Mongondow Timur : 1 Tersus
1) PT. J. Recources (Pertambangan)

➔ Kab. Bolmong 1 Tersus
1) PT. Conch (Semen)

➔ Kota Manado : 3 Tersus
1) PT. Pandu Harapan Nusa (Pariwisata)
2) Grand Luley (Pariwisata)
3) Nusantara Dian Centre (NDC) (Pariwisata)

C. Perhubungan Udara

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, di Provinsi Sulawesi Utara terdapat 6 (enam) Bandar Udara yang terdiri atas:

1) Bandar Udara Sam Ratulangi (Bandar Udara Pengumpul Skala Primer);
2) Bandar Udara Naha (Bandar Udara Pengumpan);
3) Bandar Udara Melonguane (Bandar Udara Pengumpul Skala Tersier);
4) Bandar Udara Miangas (Bandar Udara Pengumpan);
5) Bandar Udara Sitaro (Bandar Udara Pengumpan); dan

6) Bandar Udara Bolaang Mongondow (Bandar Udara Pengumpan).

Dari 6 Bandar Udara dimaksud, baru 4 (empat) bandar Udara yang beroperasi, sedangkan Bandar Udara Sitaro dan Bandar Udara Bolaang Mongondow masih dalam tahap rencana, meskipun Bandar Udara Sitaro sudah selesai pembangunan dan siap beroperasi. Sedangkan Bandar Udara Bolaang Mongondow masih dalam tahap pembangunan.

D. Jasa Perhubungan Lainnya

- **Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)** yang berada di Kota Bitung, Kota Manado dan Labuan Uki sebanyak 91 Jasa Pengurusan Transportasi yang terdiri dari 59 jasa aktif dan 29 tidak aktif.
- **Perusahan Bongkar Muat (PBM)** yang berada di Kota Bitung, Kota Manado, Tahuna, Labuan Uki dan Melonguane sebanyak 34 perusahan bongkar muat yang terdiri dari 19 perusahaan aktif, 15 perusahaan tidak aktif.
- **Angkutan Penyeberangan Perintis AKDP** Tahun 2020 sebanyak 6 Kapal.
- **Angkutan Penyeberangan Komersil AKDP** Tahun 2020 sebanyak 4 Kapal.
- **Angkutan Penyeberangan Komersil Antar Provinsi** Tahun 2020 sebanyak 2 Kapal.
- **Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi Sulawesi Utara** sebanyak 14 pelabuhan, yang tersebar di Bitung, Minut, Minsel, Sitaro, Sangihe dan Talaud.

Tabel 2.89. Peti Kemas Perdagangan Luar Negeri Tahun 2020

SATUAN	IMPORT	EKSPOR	JUMLAH
BOX	63.940	63.518	127.458
TEUS	67.615	67.141	134.756
TON	654.633	0	654.633

Sumber : Dinas Perhubungan Daerah Prov. Sulut

Tabel 2.90. Peti Kemas Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2020

SATUAN	BONGKAR	MUAT	JUMLAH
BOX	1.316	1.248	2.548
TEUS	1.317	1.248	2.565
TON	4.193	21.780	25.973

Sumber : Dinas Perhubungan Daerah Prov. Sulut

Tabel 2.91. Angkutan Penumpang Dan Barang Tahun 2020

PENUMPANG	BERANGKAT	TIBA	JUMLAH
ORANG	367.425	278.214	645.39
MUATAN	**MUAT**	**BONGKAR**	**JUMLAH**
T/M3	24.480.890	15.105.052	39.585.942

Sumber : Dinas Perhubungan Daerah Prov. Sulut

2.3.2.6. Lingkungan Hidup

A. Indeks Kualitas Air



Sungai memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, diantaranya sebagai air bersih untuk rumah tangga, air baku untuk industri, pertanian, pembangkit listrik, dan sebagainya. Penurunan kualitas air sungai akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya serta produktivitas dari sektor – sektor perekonomian.



Klasifikasi IKA adalah sebagai berikut:
90 - 100 sangat baik
80 - 90 baik
70 - 80 cukup baik
51 - 70 sedang
36 - 50 marginal
0 - 35 buruk

Oleh karena itu, kualitas air sungai merupakan salah satu indikator pembangunan Sulawesi Utara untuk menjaga kualitas lingkungan hidup. Penilaian terhadap kualitas air sungai dapat dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya yang terangkum dalam Indeks Kualitas Air (IKA). IKA Provinsi Sulawesi Utara didapatkan dari perhitungan 6 sungai yakni Sungai Sangkub, Sungai Dumoga, Sungai Talawaan, Sungai Tondano, Sungai Ranowangko dan Sungai Maruasey.

Tabel 2.92. Indeks Kualitas Air (IKA) di Provinsi Sulawesi Utara

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	49,52	54,62	54,1	45,48	47,98 (Mengikuti Target Nasional)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2020



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Sulawesi Utara cenderung meningkat dari tahun 2016 dari klasifikasi marginal menjadi sedang. Kemudian pada tahun 2019, turun ke klasifikasi marginal. Tahun 2019, walaupun mengalami peningkatan tetapi masih di klasifikasi marginal. Penurunan kualitas air sungai di Sulawesi Utara yang disebabkan karena adanya pencemaran air yang berasal dari aktivitas domestik dan terjadinya alih fungsi lahan, terutama di wilayah tangkapan air yang menyebabkan debit air yang masuk ke beberapa sungai berkurang.

B. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya.



Air Quality Index (AQI) Values	Levels of Health Concern	Colors
When the AQI is in this range:	...air quality conditions are:	...as symbolized by this color:
0 to 50	Good	Green
51 to 100	Moderate	Yellow
101 to 150	Unhealthy for Sensitive Groups	Orange
151 to 200	Unhealthy	Red
201 to 300	Very Unhealthy	Purple
301 to 500	Hazardous	Maroon

IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IKU dihitung berdasarkan emisi dari 2 (dua) polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia.

IKU Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019 didapat dari perhitungan 12 Kabupaten/Kota kecuali Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sitaro dan Talaud. Berdasarkan table dibawah ini dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Sulawesi Utara meningkat dari tahun 2016 sebesar 86,70 dan 2020 sebesar 90,979 (mengikuti target nasional). Nilai IKU Provinsi Sulawesi Utara masih termasuk dalam kategori sangat baik, yaitu 86,70 sampai 94,32.

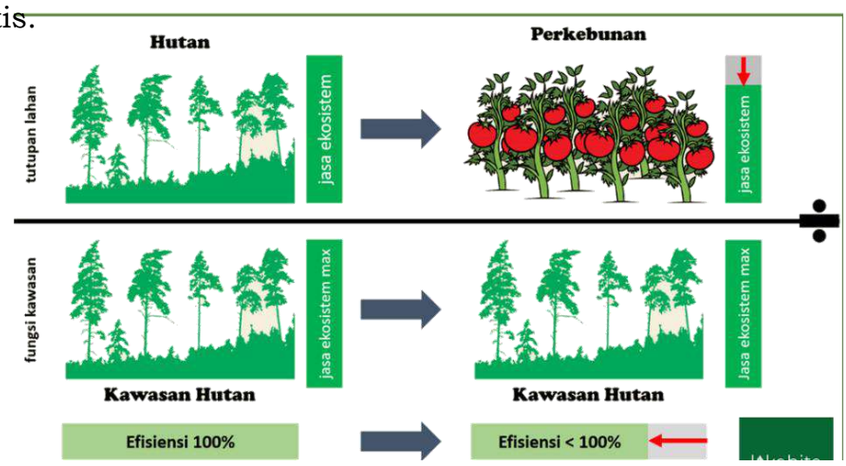
Tabel 2.93. Indeks Kualitas Udara Provinsi Sulawesi Utara

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,70	94,32	91,07	92,41	90,979 (Mengikuti Target Nasional)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2020

C. Indeks Tutupan Lahan

Hutan dan lahan merupakan salah satu media lingkungan yang juga tidak terlepas dari permasalahan lingkungan. Beberapa permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh hutan dan lahan mencakup deforestasi, kebakaran, dan lahan kritis.





Perhitungan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dilakukan melalui perbandingan jumlah luas tutupan ber-hutan dibagi dengan jumlah luas wilayah provinsi. IKTL Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019 didapatkan dari perhitungan 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara. Secara detail, nilai dari ITL Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2016 sampai 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.94. Indeks Tutupan Lahan Provinsi Sulawesi Utara

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Tutupan Lahan	58,08	59,96	60,19	59,45	**61,1 (Mengikuti Target Nasional)**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2020

Berdasarkan tabel di atas Indeks Tutupan Lahan (ITL) di Sulawesi Utara tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan peningkatan, yaitu dari 58,08 pada tahun 2016 menjadi 61,1 pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa laju penurunan luasan hutan di Sulawesi Utara cenderung berkurang dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah berhasil melakukan reforestasi dalam rentang waktu 2016 hingga 2020.

D. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Kualitas air pada suatu perairan sangat penting untuk dijaga karena akan berpengaruh pada daya dukung perairan tersebut untuk kehidupan organisme yang ada di dalamnya. Hasil penilaian kualitas air laut akan menunjukkan tingkat pencemaran air terhadap baku mutu air laut untuk biota laut berdasarkan Kepmen LH No. 51 tahun 2004. Kepmen tersebut menekankan bahwa kelestarian fungsi lingkungan laut dilakukan lewat upaya pengendalian terhadap kegiatan – kegiatan yang dapat mencemari dan atau merusak lingkungan laut. Adapun penetapan baku mutu air laut meliputi baku mutu air laut untuk perairan pelabuhan, wisata bahari dan biota laut. Pemantauan terhadap kualitas air laut tersebut perlu dilakukan sekurang – kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, yang kemudian ditindaklanjuti dengan program pengendalian pencemaran laut. Parameter yang diukur untuk perairan pelabuhan adalah parameter Fisika (16

parameter) dan Biologi (Coliform), parameter yang diukur untuk wisata bahari adalah parameter Fisika (8 parameter), Kimia (14 parameter), Logam terlarut (8 parameter), Biologi (2 parameter : E Coliform dan Coliform) serta parameter Radio Nuklida (1 parameter), dan parameter yang diukur untuk biota laut terdiri atas parameter Fisika (7 parameter), Kimia (16 parameter), Logam Terlarut (8 parameter), Biologi (3 parameter: Coliform, Patogen dan Plankton) serta Radio Nuklida (1 parameter).

Guna mengetahui kondisi IKAL di Provinsi Sulawesi Utara, Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan perhitungan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara dengan mengambil sampling di beberapa kabupaten/kota yaitu 6 titik di Kabupaten Minahasa, 4 titik di Kabupaten Minahasa Selatan, 3 titik di Kota Bitung oleh KLHK dan 3 titik oleh DLHD, 8 titik di Kota Manado serta 4 titik di Kabupaten Minahasa Utara oleh KLHK dan 3 titik oleh DLHD. Adapun hasil perhitungan IKAL Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 adalah 69,34. Nilai ini lebih tinggi dari IKAL Nasional Tahun 2020* yaitu 68,94 (berkategori baik) dan melampaui target RPJMN yang sebesar 58,5 (kategori cukup baik).

E. Persampahan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen untuk mendukung Kebijakan Nasional terkait pengelolaan sampah yang dituangkan dalam Perpres 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Sulawesi Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.



Tabel 2.95. Capaian dan Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Sulawesi Utara

INDIKATOR	TAHUN							
	CAPAIAN			TARGET				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	638.109	645.448	652.870	660.378	667.973	675.654	683.424	691.284
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%

INDIKATOR	TAHUN							
	CAPAIAN			TARGET				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tangga dalam Jakstranas								
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Ton/Tahun)	114.860	129.090	143.631	158.491	173.673	182.427	191.359	207.385

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut, 2021 (diolah)

Tabel 2.96. Capaian dan Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Sulawesi Utara

INDIKATOR	TAHUN							
	CAPAIAN			TARGET				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	638.109	645.448	652.870	660.378	667.973	675.654	683.424	691.284
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Ton/Tahun)	465.820	516.358	489.653	488.680	487.620	486.471	485.231	483.899

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut, 2021 (diolah)

Capaian persentase pengurangan sampah di Provinsi Sulawesi Utara sejauh ini belum terdata namun dapat dipastikan masih di bawah 5 persen. Capaian dipastikan masih jauh dari target karena masih sedikitnya tempat pengolahan sampah yang tersedia seperti TPS 3R dan masih sedikit juga kabupaten/kota yang menerapkan pemilahan sampah dari rumah dan menggerakan bank sampah. Tahun 2019 hasil capaian penanganan sampah adalah 57,23 persen melebihi target yang ditetapkan yaitu 55 persen.

Jumlah TPS 3R masih jauh dari kebutuhan daerah, sebagai contoh Kota Manado, untuk mewujudkan penanganan dan pengurangan sampah pada Pengelolaan Sampah yang Berbasis Kecamatan, Manado membutuhkan minimal 1 TPS 3R di setiap kelurahan (setiap TPS 3R melayani hingga 200 KK), capaian hingga tahun 2018, baru tersedia 2 TPS 3R di 2 kelurahan. Tantangan persentase pengurangan sampah semakin meningkat dengan diterbitkannya Jakstranas Persampahan yaitu 30% di tahun 2025, karena itu dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pengurangan sampah.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, capaian pengurangan sampah, pada tahun 2020 Provinsi Sulawesi Utara menghasilkan 478.827,84 Ton Sampah dimana 33.990,84 Ton sampah (7,1%) dikurangi dari sumbernya dan 279.484,88 ton sampah (58,37%) ditangani sehingga total 313.475,72 ton sampah terkelola sesuai ketentuan

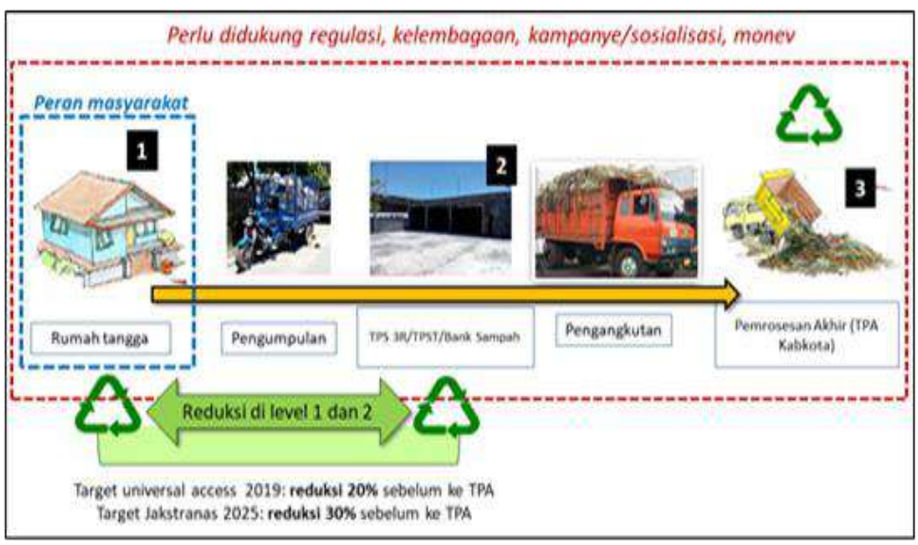
dan sisanya sebanyak 165.352,12 ton sampah tidak dikelola, dalam hal ini ditimbun, dibakar dan dibuang ke sungai/laut.



Masalah utama pengurangan sampah adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah dari sumbernya serta melakuan pemilahan sampah. Praktek 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) tidak optimal sehingga sampah yang dihasilkan hanya mampu dikurangi sebesar 7,1 % atau 33.990,84 Ton sampah dari sumbernya, jauh daripada target Jakstrada dimana tahun 2020, pengurangan sampah ditargetkan berada pada angka 22% atau sekitar 105.341,94 ton sampah per tahun.

Dengan kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang terbatas serta kurangnya anggaran operasional pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota, hanya 58,37% atau sekitar 279.484,88 ton sampah dapat ditangani lewat pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah di TPA. Keberadaan TPS 3R masih belum optimal dalam menangani persoalan sampah, khususnya pada masa pandemi semua TPS 3R tidak dioperasikan atas alasan protokol kesehatan.

Sebagian besar Kabupaten/Kota masih menerapkan mekanisme penanganan sampah yang langsung diangkut dan dibawa ke TPA, tanpa melalui proses pemilahan dan pengolahan di TPS 3R atau bank sampah. Kondisi ini menyebabkan umur TPA lebih pendek daripada yang direncanakan, karena TPA menjadi lebih cepat penuh. Secara nasional, untuk mencapai target *universal access*, timbunan sampah harus berkurang 20% sebelum sampai ke TPA, artinya hanya 80% sampah yang akan diproses di TPA. Dengan terbitnya Jakstranas, target penanganan sampah di TPA adalah 70% dari timbulan sampah yang ada, atau sampah harus sudah berkurang 30% sebelum sampai ke TPA. Untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan, perlu dilakukan penanganan dilakukan secara terpadu dari sumbernya hingga ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan pengurangan sampah terjadi sebelum sampai ke TPA.



Gambar 2.9. Mekanisme Penanganan dan Pengurangan Sampah Berkelanjutan

Sumber: Data diolah



Dukungan regulasi, kelembagaan hingga kampanye/sosialisasi dengan melibatkan berbagai stakeholder dibutuhkan untuk mensukseskan pengelolaan sampah berkelanjutan. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah perlu disediakan secara memadai. TPS 3R dan TPA perlu dibangun dan dikelola. Bank Sampah perlu digencarkan pembentukannya dan dibina, masyarakat perlu memulai budaya memilah sampah, serta menjadikan "upaya pengurangan sampah sejak dari diri sendiri" sebagai gaya hidup masa kini.

Catatan :

- timbulan sampah kabupaten menggunakan standar 2 liter/orang/hari, timbulan sampah kota menggunakan standar 2,5 liter/orang/hari;
- timbulan sampah Kota Manado menggunakan standar 2,9 liter/orang/hari (PTMP, 2017);
- Tahun 2020* = proyeksi penduduk BPS, Tahun 2020** = proyeksi timbulan sampah berdasarkan proyeksi penduduk BPS

Hingga saat ini, masih terdapat 1 kabupaten yang belum memiliki TPA yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Di tingkat provinsi, penyediaan TPA Regional Mamitarang masih dalam proses pembangunan. TPA Regional Mamitarang diharapkan dapat menjadi hilir dalam rantai pengelolaan sampah Kota Manado yang kondisi TPA-nya saat ini sudah dalam pengelolaan open dumping karena sudah jenuh (*over capacity*). Peluang Kota Manado bertambah besar terkait dalam pengelolaan sampah di TPA dengan terbitnya Peraturan Presiden RI No. 35 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PSEL).

Berikut ini data sebaran TPA di kabupaten/kota dan perencanaan TPA regional yang menjadi kewenangan provinsi.

Tabel 2.97. Data TPA Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota	TPA Kabupaten/Kota		
	Nama	Tahun Pembangunan	Luas (Ha)
Bolaang Mongondow	TPA Bolmong		
Minahasa	TPA Minahasa	2016	2
Kepulauan Sangihe	TPA Santiago	2014	6
Kepulauan Talaud	TPA Talaud	2016	3.5
Minahasa Selatan	TPA Mobongo	2008	8
Minahasa Utara	TPA Airmadidi	2016	5
Bolaang Mongondow Utara	TPA Kaidipang	2010	7
Kepulauan Sitaro	TPA Tanaki	2017	5
Minahasa Tenggara	TPA Wawali	2012	18
Bolaang Mongondow Selatan	TPA Pinolantungan	2013	7
Bolaang Mongondow Timur	*Belum dibangun*		
Kota Manado	TPA Sumompo	2009	5

Kabupaten/Kota	TPA Kabupaten/Kota		
	Nama	Tahun Pembangunan	Luas (Ha)
Bitung	TPA Aertembaga	2012	7
Kota Tomohon	TPA Tara - Tara	2010	5
Kota Kotamobagu	TPA Poyowa	2015	2.8
Provinsi Sulawesi Utara *(Sesuai Perda Sulut No. 1 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 – 2034)*	TPA Regional Mamitarang	*Dalam proses untuk dibangun*	
	TPA Regional Bolaang Mongondow	*Belum ditindaklanjut*	

Sumber: Perda Sulut dan Portal Persampahan, http://ciptakarya.pu.go.id/plp/simpersampahan

Dalam peraturan tersebut, Kota Manado menjadi salah satu dari 12 kota di Indonesia yang menjadi lokasi bagi percepatan pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang disebut PSEL. Dalam pelaksanannya, Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Hal ini telah disepakati oleh Pemerintah Kota Manado, Kab. Minahasa Utara, Kota Bitung, Kab. Minahasa dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.98. Timbulan Sampah di Kabupaten/Kota se – Prov. Sulut Tahun 2017-2018 dan Proyeksi Tahun 2019 – 2021

No	Kabupaten/ Kota	Timbulan Sampah/Tahun (TON)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Bolaang Mongondow	61.449,03	62.385,96	63.337,19	64.302,91	65.283,37
2	Minahasa	85.674,52	86.482,03	87.297,15	88.119,95	88.950,51
3	Kep. Sangihe	33.340,96	33.461,22	33.581,92	33.703,05	33.824,62
4	Kep. Talaud	23.168,23	23.385,38	23.604,56	23.825,80	24.049,11
5	Minahasa Selatan	53.147,32	53.510,04	53.875,22	54.242,91	54.613,10
6	Minahasa Utara	51.351,67	51.734,43	52.120,04	52.508,53	52.899,91
7	Bolmong Utara	20.040,65	20.313,62	20.590,30	20.870,75	21.155,02
8	Kep. Sitaro	16.856,87	16.895,02	16.933,27	16.971,59	17.010,01
9	Minahasa Tenggara	27.009,93	27.151,45	27.293,70	27.436,71	27.580,46
10	Bolmong Selatan	16.395,69	16.645,75	16.899,62	17.157,37	17.419,04
11	Bolmong Timur	18.040,86	18.272,20	18.506,51	18.743,83	18.984,19
12	Manado	109.898,98	110.470,94	111.045,88	111.623,81	112.204,74
13	Bitung	54.270,50	55.157,03	56.058,03	56.973,76	57.904,44
14	Tomohon	26.498,16	26.947,67	27.404,81	27.869,71	28.342,49
15	Kotamobagu	31.649,30	32.214,41	32.789,62	33.375,09	33.971,02
	Sulawesi Utara	**628.792,65**	**635.027**	**641.338**	**647.726**	**654.192**

Sumber : Dinas Provinsi Sulawesi Utara, 2019

Dari hasil perhitungan estimasi volume sampah 15 kabupaten/kota didapatkan total estimasi volume sampah pada tahun 2017 adalah 628.792,65 Ton dan Tahun 2018 adalah 635.057 Ton. Hal ini tentu membutuhkan upaya kerja keras dalam memberikan pelayanan persampahan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.99. Data Timbulan Sampah Provinsi Sulawesi Utara

No.	Daerah Administrasi	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah (Rumah)	Penduduk Perkotaan (Jiwa)	Penduduk Perdesaan (Jiwa)	Kepadatan Pddk (Jiwa/Ha)	Pertumbuhan Pddk (%)	Timbulan Sampah (L/Jiwa/Hari)
1	Kab. Bolmong	574,330	485,356	102,436	13,900	471,456	2	2.56	3.00
2	Kab. Minahasa	111,487	331,647	8,568	150,019	181,628	3	1.28	2.5
3	Kab. Kepl. Sangihe	46,111	140,420	3,383	35,103	105,317	3	1.28	0
4	Kab. Kepl. Talaud	124,040	98,508	20,436	10,752	87,756	1	1.28	3
5	Kab. Minahasa Selatan	140,997	230,436	52,937	33,647	196,789	2	1.28	3
6	Kab. Minahasa Utara	91,849	215,285	49,187	85,999	129,286	2	1.28	2.4
7	Kab. Bolmong Utara	168,000	83,706	17,361	1,605	82,101	1	1.28	0
8	Kab. Kepl. Sitaro	27,586	70,487	16,839	13,875	56,612	3	1.28	0
9	Kab. Minahasa Tenggara	71,083	115,834	25,598	810	115,024	2	1.28	2.75
10	Kab. Bolmong Timur	91,018	81,973	15,129	5,623	76,350	1	1.28	0
11	Kab. Bolmong Selatan	161,586	64,801	13,463	954	63,847	0	1.28	0
12	Kota Manado	15,727	461,636	106,361	394,683	66,953,	29	1.28	2.75
13	Kota Bitung	30,289	218,520	45,903	155,385	63,135	7	1.28	3
14	Kota Tomohon	11,420	96,411	22,352	34,481	34,920	8	1.28	3
15	Kota Kotamobagu	6,806	120,597	2,613	69,698	50,899	18	1.28	3
	Provinsi Sulawesi Utara	**1.672.329**	**2.815,617**	**503.566**	**1.033.534**	**1.782.033**	**82**	**0.79**	**1.09**

Sumber: Roadmap Sanitasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun, 2016-2021.

Terdapat 3 (tiga) Kabupaten/Kota (20% dari seluruh kabupaten/kota) yang telah memiliki dasar pengaturan persampahan yang kuat, yaitu diatur melalui Peraturan Daerah. Di sisi lain masih terdapat 4 kabupaten yang sama sekali belum membuat pengaturan tentang persampahan di daerahnya.





Tabel 2.100. Keberadaan Peraturan Persampahan di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara

No.	Kabupaten/Kota	Peraturan Terkait Persampahan			
		Peraturan Daerah		Peraturan Bupati/Walikota	
		Pengelolaan	Retribusi	Pengelolaan	Retribusi
1	Kabupaten Bolaang Mongondow	~	~	~	~
2	Kabupaten Minahasa	~	√	~	~
3	Kabupaten Kepulauan Sangihe	~	√	~	~
4	Kabupaten Kepulauan Talaud	~	√	√	~
5	Kabupaten Minahasa Selatan	~	√	~	~
6	Kabupaten Minahasa Utara	√	√	~	~
7	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	~	~	~	~
8	Kabupaten Kepulauan Siau	~	√	~	~

No.	Kabupaten/Kota	Peraturan Terkait Persampahan			
		Peraturan Daerah		Peraturan Bupati/Walikota	
		Pengelolaan	Retribusi	Pengelolaan	Retribusi
	Tagulandang Biaro				
9	Kabupaten Minahasa Tenggara	~	√	~	~
10	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	~	~	~	~
11	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	~	~	~	~
12	Kota Manado	√	√	~	~
13	Kota Bitung	√	√	~	~
14	Kota Tomohon	~	√	~	~
15	Kota Kotamobagu	~	√	~	~

Sumber: *Roadmap* Sanitasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun, 2016-2021.





F. Limbah B3

Provinsi Sulawesi Utara memiliki 50 Rumah Sakit dan 197 Puskesmas. Berdasarkan data Dinas kesehatan provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 dengan perkiraan timbulan total 1.840 kg/hari dan 195 puskesmas dengan perkiraan timbulan total 432 kg/hari.

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara sementara melaksanakan pembinaan secara bertahap terkait identifikasi dan pencatatan jumlah per jenis limbah melalui kegiatan pemantauan dan pendataan fasyankes, tahun 2019 telah dilakukan pada fasyankes (Puskesmas dan Rumah Sakit) di 14 kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, tahun 2020 telah dilaksanakan di beberapa fasyankes di Kota Manado namun belum dapat dilanjutkan karena adanya pandemi corona (covid-19);

Pengelolaan limbah medis masih menjadi kendala dikarenakan sebagian besar fasyankes belum memiliki alat pengolahan, atau memiliki alat pengolahan tetapi tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Permen LHK N0. 56 tahun 2015 dan/atau tidak memiliki izin;

Pemerintah Sulawesi Utara telah menyiapkan lahan untuk pengolahan limbah medis di Kawasan TPA Ilo-ilo, Kabupaten Minahasa Utara Lokasi.

Tabel 2.101. Data limbah medis covid-19 per Bulan Mei tahun 2021

NO.	NAMA RUMAH SAKIT	JUMLAH LIMBAH COVID 19 PER 28 MARET (KG)	JUMLAH LIMBAH COVID 19 PER 30 MEI (KG)	PENGELOLAAN INSINERATOR/ PIHAK KE 3/ TIDAK TERKELOLA
1	RSUD BOLAANG MONGONDOUW UTARA	4	42,1	INSENERATOR
2	RSUD MINAHASA TENGGARA	2.500	108	PT. MITRA HIJAU
3	RSUD BOLAANG MONGONDOUW	1.033	27,5	PT. TENANG JAYA SEJAHTERA
4	RSUD POPUNDAYAN KOTAMOBAGU	1.354	268	INSENERATOR
5	RSUD ANUGERAH TOMOHON	2.610	299	PT. MITRA HIJAU
6	RSUD MANEMBO NEMBO BITUNG	10.109	216	INSENERATOR
7	RS WOLTER MONGONSIDI TELING	15.574	205,5	STERILWAFE
8	RS BETHESDA TOMOHON	2.610	108,6	DISIMPAN DI TPS
9	RS SILOAM MANADO	918	0	PT. TENANG JAYA SEJAHTERA
10	RSUD PROF. KANDOUW	542.418	11,527	INSINERATOR
11	RSUD SAM RATULANGI TONDANO	1.138	90,69	PT. TENANG JAYA SEJAHTERA
12	RSUD LAPANGAN SAWANG SITARO	246,5	19,5	INSINERATOR
13	RSUD LIUNG KENDAGHE SANGIHE	1.212	55	INSINERATOR
14	RSUD MALAH TALAUD	507	15,9	INSINERATOR
15	RSUD NOONGAN PROV. SULUT	1220,4	383	INSINERATOR
16	RS TAGULANDANG	8	32	INSINERATOR
17	RS HERMINA MANADO	2003	-	PT. Mitra Hijau
18	RS SAM RATULANGI MANADO	647	-	PT. Mitra Hijau
19	RS SILOAM PAAL 2	97	-	PT. Mitra Hijau
20	RS BAYANGKARA MANADO	643	-	PT. Mitra Hijau

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021

2.3.2.7. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase penduduk ber KTP

Kepemilikan KTP adalah hak sipil warga negara Republik Indonesia. Berdasarkan data tahun 2019 sudah mencapai 93,54%, di mana jika dilihat menurut kabupaten/kota persentase kepemilikan KTP yang paling rendah adalah 87,76% di Kabupaten Minahasa Utara. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Perkembangan Penduduk Ber-KTP Tahun 2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.102. Perkembangan Penduduk Ber-KTP Tahun 2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	PENDUDUK Ber-NIK
		2020
1	Bolaang Mongondow	93,09
2	Minahasa	95,50
3	Kepulauan Sangihe	96,67
4	Kepulauan Talaud	98,82
5	Minahasa Selatan	93,69
6	Minahasa Utara	89,75
7	Bolaang Mongondow Utara	95,40
8	Kepulauan Sitaro	94,14
9	Minahasa Tenggara	96,31
10	Bolaang Mongondow Selatan	93,69
11	Bolaang Mongondow Timur	85,67
12	Kota Manado	94,77
13	Kota Bitung	94,41
14	Kota Tomohon	99,49
15	Kota Kotamobagu	95,88
	SULAWESI UTARA	**94,45**

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

2.3.2.8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 17 Tahun 2019, Pasal 1, ayat (2), pemberdayaan masyarakat desa dimengerti sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pasal 1, ayat (13) PermendesPDTT Nomor 17 Tahun 2019 menegaskan bahwa sistem pembangunan dan perberdayaan masyarakat desa merupakan Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan Kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.



Indikator pembangunan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang diukur dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.103. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2019

Indikator	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara		
	2017	2018	2019
Jumlah Kab/Kota dan Perangkat Daerah Prov. yang menerapkan SPM	40 PD dan 15 Kab/ Kota	41 PD dan 15 Kab/ Kota	40 PD dan 15 Kab/ Kota
Jumlah LSM	12	12	25
Jumlah Organisasi Masyarakat	21	22	38
Jumlah Organisasi Keagamaan	20	21	15

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pengukuran fokus pada kuantitas. Walaupun rata-rata LSM, ormas dan organisasi keagamaan terus berkembang dari tahun 2017 sampai 2019 secara kuantitatif, pengukuran keaktivan, partisipasi, bahkan prestasi yang berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan desa tidak tersentuh. Demikian, indikator kinerja pembangunan daerah perlu disesuaikan dan mengukur kontribusi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, LSM, posyandu, serta swadaya masyarakat dalam program-program pemberdayaan masyarakat.

2.3.2.9. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

A. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 s/d 2020 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara di sajikan pada table berikut:

Tabel 2.104. Perkembangan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 s/d 2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulut

NO	KABUPATEN/KOTA	PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN PENDUDUK				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bolaang Mongondow	236,893	240,505	244,185	247,811	248 751
2	Minahasa	332,190	335,321	338,364	341,176	347 290
3	Kepulauan Sangihe	130,024	130,493	130,833	131,163	139 262
4	Kepulauan Talaud	89,836	90,678	91,599	92,475	94 521
5	Minahasa Selatan	206,603	208,013	209,501	210,695	236 463
6	Minahasa Utara	199,498	200,985	202,317	203,624	224 993
7	Bolaang Mongondow Utara	77,383	78,437	79,366	80,313	83 112
8	Kepulauan Sitaro	65,827	65,976	66,225	66,403	71 817
9	Minahasa Tenggara	105,163	105,714	106,303	106,899	116 323
10	Bolaang Mongondow Selatan	63,207	64,171	65,127	66,071	69 791
11	Bolaang Mongondow Timur	69,716	70,610	71,477	72,408	88 241
12	Kota Manado	427,906	430,133	431,880	433,635	451 916
13	Kota Bitung	208,995	212,409	215,711	219,004	225 134
14	Kota Tomohon	101,981	103,711	105,306	106,917	100 587
15	Kota Kotamobagu	121,699	123,872	126,198	128,387	123 722
	SULAWESI UTARA	**2,436,921**	**2,461,028**	**2,484,392**	**2,506,981**	**2 621 923**

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Selang tahun 2016 – 2020 terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk dari 1,1% tahun 2017 menjadi 1,00% tahun 2020.

Tabel 2.105. Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Laju pertumbuhan penduduk	1,03	1,1	1,09	1,01	1,00

Sumber: Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Provinsi Sulawesi Utara, 2021

B. Cakupan KB Aktif/CPR (%)

Tabel 2.106. Jumlah KB Aktif/CPR di Sulawesi Utara

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumla KB Aktif/CPR (jiwa)	255.658	378.214	301.114	382.043	297.080

Sumber: Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Provinsi Sulawesi Utara, 2021



Berdasarkan jenis alat kontrasepsi (IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan, Pil) yang paling banyak di gunakan peserta KB aktif adalah Suntikan. Sedangkan jumlah peserta KB aktif yang menggunakan alat kontra-sepsi paling sedikit yaitu di Kab.Minahasa dan Kab.Minsel (data per April 2020).

2.3.2.10.Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tahun 2020 jumlah koperasi mencapai 6.381 namun hanya 58, 3% yang aktif. Jumlah anggota koperasi terbanyak berada di Kota Manado yaitu 14.003 anggota, namun jumlah terbanyak koperasi aktif terdapat di Kabupaten Minahasa.

Tabel 2.107. Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi			Jumlah Anggota
	Aktif	Tdk Aktif	Jumlah	
Bolaang Mongondow	112	240	352	82
Minahasa	1.051	315	1.366	3.525
Kepulauan Sangihe	95	99	194	1.503
Kepulauan Talaud	73	77	150	...
Minahasa Selatan	366	455	821	421
Minahasa Utara	216	277	493	170
Bolaang Mongondow Utara	23	60	84	417
Kepulauan Sitaro	22	37	59	379
Minahasa Tenggara	180	131	311	517
Bolaang Mongondow Selatan	78	9	87	97

Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi			Jumlah Anggota
	Aktif	Tdk Aktif	Jumlah	
Bolaang Mongondow Timur	25	10	35	23
Kota Manado	622	340	962	14.003
Kota Bitung	363	151	514	2.548
Kota Tomohon	147	136	283	706
Kota Kotamobagu	147	102	249	-
Binaan Provinsi	166	218	384	8.260
Binaan nasional	35	2	37	1.998
Sulawesi Utara	**3.722**	**2.859**	**6.381**	**34.849**

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Sebagai salah satu penggerak perekonomian koperasi di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 memiliki volume usaha mencapai Rp 255.215.000.000 dan modal sendiri mencapai 60,65%.

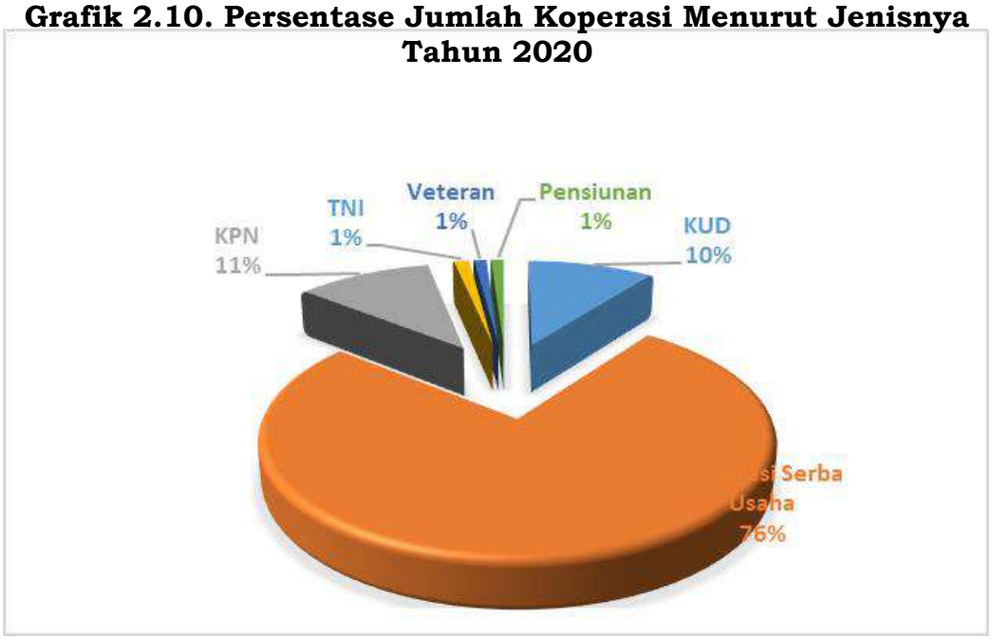
Tabel 2.108. Nilai Modal Sendiri, Modal Luar, dan Volume Usaha Koperasi Menurut kabupaten Kota Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Modal Sendiri	Modal Luar	Volume Usaha
	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)
Bolaang Mongondow	1318	-	875
Minahasa	8856	5632	39361
Kepulauan Sangihe	5018	84	5679
Kepulauan Talaud	4451	1517	3913
Minahasa Selatan	1572	867	3657
Minahasa Utara	18	9	26
Bolaang Mongondow Utara	1483	94	2202
Kepulauan Sitaro	2389	686	6956
Minahasa Tenggara	927	3122	3214
Bolaang Mongondow Selatan	827	2405	2330
Bolaang Mongondow Timur	120	5	253
Kota Manado	49336	53302	123545
Kota Bitung	4555	145	38346
Kota Tomohon	6492	65	5586
Kota Kotamobagu	4643	6109	4464
Binaan Provinsi	20909	26458	23600
Binaan nasional	49541	7609	8866
Sulawesi Utara	**150153**	**97397**	**255215**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Terdapat koperasi yang merupakan binaan provinsi dan binaan nasional yang volume usahanya mencapai 12.72% dari total volume usaha.

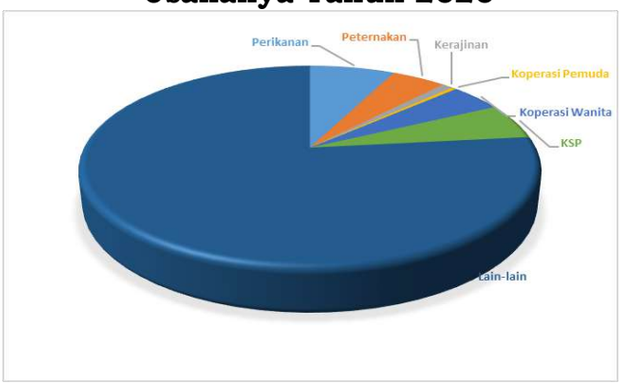
Grafik 2.10. Persentase Jumlah Koperasi Menurut Jenisnya Tahun 2020



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Data Tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah koperasi serba usaha yang paling dominan (76%), hanya 1% jumlah Koperasi ABRI, Koperasi Veteran dan Koperasi Pensiunan.

Grafik 2.11. Persentase Jumlah Koperasi Menurut Jenis Usahanya Tahun 2020



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Tabel 2.109. Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara

Indikator	Target Akhir RPJMD	Target Thn 2020	Capaian Thn 2020
Jumlah Koperasi Aktif	3.517	3.448	3.722
Jumlah usaha mikro	61.958 UMKM	57.738	222.727
Jumlah wirausaha baru	3.591	247	765
Sarjana wirausaha baru	12.428 Org	-	-
Wirausaha baru non sarjana	2.592 Org	-	-

Indikator	Target Akhir RPJMD	Target Thn 2020	Capaian Thn 2020
Sertifikasi hak atas tanah bagi usaha mikro, kecil	300	-	-

Sumber : Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2021



Data capaian kinerja bidang koperasi menunjukkan bahwa perlu upaya meningkatkan semangat berwirausaha terutama bagi angkatan kerja yang belum bekerja atau di masa pandemi COVID 19 sudah tidak bekerja lagi. Hal ini akan menjadi tantangan bagi Provinsi Sulawesi Utara di 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 2.110. Capaian Kinerja Koperasi dan UKM 2016 -2020

Indikator	2017	2018	2019	2020	Evaluasi Capaian	
					n-1	n-4
Jumlah Koperasi Aktif	2.853	2.783	3.617	3.722	105	430
Jumlah usaha mikro kecil menengah	76.154 UMKM	84.392 UMKM	94.153 UMKM	222.727	128.574	169.266
Jumlah wirausaha baru	1.110 Wirausaha Baru	1.110 Wirausaha Baru	1.680 Wirausaha Baru	765 Wirausaha Baru	5.060 Wirausaha Baru	4.665 Wirausaha Baru
Sarjana wirausaha baru	-		1.470 Org	-	-	-
Wirausaha baru non sarjana	-		-		-	-
Sertifikasi hak atas tanah bagi usaha mikro, kecil	2.853	2.783	3.617	3.722	105	430

Sumber : Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2021

Peran UKM dalam pemulihan dan percepatan ekonomi di daerah menjadi catatan penting para pengambil kebijakan. Provinsi Sulawesi Utara yang cenderung meningkat jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selang tahun 2016 – 2019. Untuk jumlah wirausaha baru, dari tahun 2016 s/d 2019 selalu melebihi target tahunan yaitu mencapai lebih dari 1000 wirausaha baru per tahun dimana tertinggi adalah pada tahun 2019 yang mencapai 1680 wirausaha baru, sedangkan di tahun 2020 jumlahnya lebih sedikit yaitu hanya mencapai 765 wirausaha baru.

Stimulus pemerintah dalam mendorong UMKM di Indonesia diharapkan akan meningkatkan kinerja bidang koperasi dan UMKM di masa yang akan datang. Hal ini menjawab tantangan dampak pandemi COVID 19 di Provinsi Sulawesi Utara.

2.3.2.11.Penanaman Modal



Peningkatan penanaman modal menjadi target prioritas pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat stabilitas perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.111. Realisasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)
Bolaang Mongondow	210.425,20	3.728.393	5.243
Minahasa	733.083,97	4.160	45.775
Kepulauan Sangihe	0	297	-
Kepulauan Talaud	0	4.150	-
Minahasa Selatan	780.216,60	5.366	109.549
Minahasa Utara	213.479,18	98.612	2.016.633
Bolaang Mongondow Utara	22.777,78	0	546
Kepulauan Sitaro	0	0	-
Minahasa Tenggara	0	0	1130
Bolaang Mongondow Selatan	2.950,00	650	-
Bolaang Mongondow Timur	36.492,64	1.401.655	-
Kota Manado	6.880.603,44	2.979.086	14.230
Kota Bitung	956.216,40	33.534	46.128
Kota Tomohon	154.444,44	0	-
Kota Kotamobagu	50.111,11	3.692	2.696
Sulawesi Utara	**10.040.800,77**	**11.566.700**	**2.241.929**

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Untuk tahun 2018 – 2019 total realisasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis. Sedangkan untuk Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) juga mengalami peningkatan dari Tahun 2018 ke 2019, namun mengalami sedikit penurunan dari Tahun 2019 ke 2020.

Tabel 2.112. Realisasi PMA Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)
Bolaang Mongondow	46.817,20	387.816	191.862
Minahasa	2.519,80	6.718	88.477
Kepulauan Sangihe	14,90	0	-
Kepulauan Talaud	30.070,50	0	-
Minahasa Selatan	1.098,60	171.933	20.404
Minahasa Utara	170.205,60	1.892.829	908.174
Bolaang Mongondow Utara	146,00	4.698	-
Kepulauan Sitaro	0	0	-
Minahasa Tenggara	1.254,10	2.014	-
Bolaang Mongondow Selatan	0,40	0	50.275
Bolaang Mongondow Timur	1.447,70	0	26.419
Kota Manado	16.116,60	444.757	1.565.607
Kota Bitung	27.520,90	394.419	149.681

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)
Kota Tomohon	0	0	4.347
Kota Kotamobagu	0	1.918	395
Sulawesi Utara	**297.214,40**	**3.307.104**	**3.005.640**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Melalui data terlihat bahwa realisasi PMA tahun 2020 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Realisasi PMA di Provinsi Sulawesi Utara terbesar ada di Kota Manado. Faktor yang paling mempengaruhi terjadinya penurunan PMDN dan PMA dari tahun 2019 ke 2020 adalah dampak pandemi COVID-19, yang diperkirakan pengaruhnya akan masih cukup besar untuk 2 (dua) hingga 3 (tiga) tahun ke depan.

Tabel 2.113. Kinerja DPM-PTSP Provinsi Sulawesi Utara

Indikator	Target Akhir RPJMD	Target RPJMD Thn 2020	Capaian Thn 2020
Total Investasi (Rupiah)	12.823.763.200.000	3.750.000.000.000	5.247.569.053.000
Izin Investasi	7.276	1.450	1.485

Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2021

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah terkait jumlah investasi di Provinsi Sulawesi Utara, total investasi yang dicapai adalah melampaui 39,95% dari target tahun 2020. Untuk capaian jumlah izin investasi di Provinsi Sulawesi Utara adalah 2,4% diatas target tahun 2020.

Tabel 2.114. Capaian Kinerja DPM-PTSP 2017-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020	Evaluasi Capaian	
					n-1	n-4
Realisasi investasi PMDN (Rupiah)	1.488.173.300.000	10.040.800.770.000	8,259,596,000,000	3.005.639.600.000	-5.253 miliar rupiah	1.517 miliar rupiah
Realisasi investasi PMA	6.447.766.840.000	3.964.359.960.000	3.307.000.000.000	2.241.929.453.000	- 1.065 miliar rupiah	-4.205 miliar rupiah
Realisasi Izin Investasi	1.467	1.530	1,581	1.485	- 96	18

Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2021

2.3.2.12.Kepemudaan dan Olah Raga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pelayanan kepemudaan mencakup usaha penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Dibawah ini disajikan Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2019.

Tabel 2.115. Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2019

No	Indikator	Capaian		
		2017	2018	2019
1	Klub Olahraga (Standar 1/10,000)	8	8	13
2	Gedung Olahraga (Standar 1/10,000)	15	15	22

No	Indikator	Capaian		
		2017	2018	2019
3	Jumlah organisasi pemuda	30	30	11
4	Jumlah organisasi olahraga	30	30	53
5	Jumlah kegiatan kepemudaan	30	40	46
6	Jumlah kegiatan olahraga	30	40	55
7	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019;	25%	30%	40%
8	Prestasi olahraga ditingkat nasional/tingkat internasional	5/8	7/8	13/8
9	Prestasi olahraga *paralympic* ditingkat nasional dan tingkat internasional	-	-	-

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

Considerans c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan pentingnya keolahragaan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Justru karena pertimbangan akan pentingnya keolahragaan tersebut dalam keseluruhan pembangunan nasional dan pengembangan manusia Indonesia, considerans d menegaskan penjaminan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestai, dan amanajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global. Hal tersebut perlu diatur dalam sebuah sistem keolahragaan nasional.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mendefinisikan "Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan." Sedangkan, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa "Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa."

a) Pembinaan Olahraga

Pembinaan Olahraga meupakan bagian dan upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia yang ditujukan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat, serta pengembangan prestasi olahraga yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan Nasional.

Pembinaan Olahraga di Provinsi Sulawesi Utara terbagi 2 (dua) Fungsi, yaitu:

1. Fungsi pendidikan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan adalah Sekolah Khusus Olahragawan (SKO Keberbakatan); dan
2. Fungsi Pendidikan dan Latihan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) dan Klub-klub Olahraga Junior yang ada di Kab/Kota se- Sulawesi Utara.

b) Pelatih Yang Bersertifikasi

Pelatih yang Bersertifikat yamg ada di Provinsi Sulawesi Utara berjumlah kurang lebih sekitar 60 orang.

c) Jumlah Atlet Berprestasi

Atlet berprestasi yang ada di Sulawesi Utara diukur dari keberhasilan dalam Multi *Event* maupun Single *Event* Tingkat Internasional Maupun Nasional berjumlah Kurang Lebih 150 orang.

d) Prestasi Olahraga

Prestasi Olahraga untuk atlet Sulut di tingkat Internasional adalah terpilih masuk dalam tim Asian Games seperti Alm, Hengki Lasut dan Eddi Manoppo dan Bill Mondigir serta Vita Lasut dari Cabang Tinju Farand Papendang, Silat Abdul Malik dan Untuk Sea Games dari Cabor Silat Hidayat Limonu, Anggar Hendra tarega, Muayhai Angel Runtukahu, Kick Boxing Brian Lawitan, Tinju Farand Papandang, Ana kawengian Soft Tenis sedangkan Atlet Sulut yang lolos dalam PON Papua berjumlah 160 orang.

2.3.2.13. Statistik



Indikator keberhasilan kinerja bidang Statistik ditentukan oleh tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi dan produk buku data di tiap kabupaten, juga tersedianya buku PDRB.

BPS sebagai badan pelayanan publik yang menyediakan data dan infomasi statistik telah melakukan survei kebutuhan data (SKD) tahun 2020. Berdasarkan hasil survey analisis kepuasan konsumen terhadap layanan mencapai 99%, kepuasan konsumen terhadap akses data 98,46%, kepuasan konsumen terhadap sarana dan prasarana 99,08%, indeks kepuasan konsumen 96,26% dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data mencapai 96,49%.

Katalog publikasi BPS Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 menunjukkan koleksi publikasi yang diterbitkan oleh BPS berdasarkan subyek utama terdiri atas publikasi kelompok umum, kelompok ekonomi, kelompok sosial dan pertanian baik level provinsi sampai ke sampai ke level kabupaten/kota. Bahkan tersedia profil daerah sampai ke level kecamatan.

2.3.2.14. Persandian



Capaian Indikator bidang Persandian diukur melalui persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. Pada Kinerja RPJMD 2016-2021 belum ada data tersaji dalam evaluasi capaian hingga 2020.

Selain Permendagri, evaluasi Kinerja mengacu pada aturan yang baru yaitu Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara no. 10 tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah

2.3.2.15.Komunikasi dan Informatika

Seiring kemajuan teknologi, penggunaan media komunikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Adanya migrasi pola baca masyarakat dari media cetak ke media online (internet) membuat penetrasi internet yang semakin dalam pada dikehidupan masyarakat menjadikan keberadaan surat kabar semakin banyak ditinggalkan. Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi melambat dikarenakan dunia usaha mengurangi biaya promosi atau iklan sehingga memperlambat pertumbuhan industri media cetak

Pada tahun 2020, sebanyak 67,13 persen penduduk sulawesi utara berumur 5 tahun ke atas menggunakan telepon seluler. Jika ditinjau menurut jenis kelamin, maka persentase penduduk perempuan yang menggunakan telepon seluler sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki, yakni sebesar 67,42 persen penduduk perempuan berumur 5 tahun ke atas dibandingkan dengan 66,86 persen penduduk laki-laki berumur 5 tahun ke atas. Penggunaan telepon seluler mampu membuka akses masyarakat ke dunia luar yang penuh pengetahuan baru, dan hal ini dapat mendorong kemajuan pemikiran dan inovasi pada tiap-tiap individu.

Tabel 2.116. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kepemilikan Telepon Seluler / Nirkabel Tahun 2020

Wilayah	Dalam 3 bulan terakhir, apakah memiliki/menguasai telepon seluler?					
	Laki-Laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Bolaang Mongondow	53,58	46,42	55,49	44,51	54,48	45,52
Minahasa	72,78	27,13	71,87	28,13	72,38	27,62
Kepl. Sangihe	59,53	40,47	60,70	39,30	60,11	39,89
Kepl. Talaud	55,80	44,20	53,38	46,62	54,60	45,40
Minahasa Selatan	59,98	40,02	66,89	33,11	63,32	36,68
Minahasa Utara	71,15	28,85	67,10	32,90	69,16	30,84
Bolaang Mongondow Utara	55,15	44,85	53,68	46,32	54,43	45,57
Siau Tagulandang Biaro	55,69	44,31	58,38	41,62	57,05	42,95
Minahasa Tenggara	53,99	46,01	58,95	41,05	56,39	43,61
Bolaang Mongondow Selatan	48,38	51,62	50,71	49,29	49,47	50,53
Bolaang Mongondow Timur	59,19	40,81	59,30	40,70	59,25	40,75
Manado	80,98	19,02	79,94	20,06	80,46	19,54
Bitung	75,27	24,73	73,68	26,32	74,51	25,49
Tomohon	71,95	28,05	74,76	25,24	73,35	26,65
Kotamobagu	69,70	30,30	69,09	30,91	69,40	30,60
Sulawesi Utara	66,86	33,14	67,42	32,58	67,13	32,87

Sumber : BPS Prov. Sulut, 2021.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Sebelum lahir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95

Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE dikenal dengan istilah E-government atau Electronic Government.

Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengikuti Evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan predikat Baik dengan nilai indeks 2.84 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.117. Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

Indeks SPBE	:	**2.84**
Predikat SPBE	:	**Baik**
Nilai Indeks		
Domain Kebijakan SPBE	:	1.8
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	:	1.8
Domain Tata Kelola SPBE	:	1.9
Perencanaan Strategis SPBE	:	1.75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	:	2.5
Penyelenggara SPBE	:	1
Domain Manajemen SPBE	:	1.82
Penerapan Manajemen SPBE	:	2.13
Audit TIK	:	1
Domain Layanan SPBE	:	4.03
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	:	4.7
Layanan Publik Berbasis Elektronik	:	3

Sumber: Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah Prov. Sulut, 2021

Evaluasi SPBE ini bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah dengan mengacu pada 3 (tiga) penerapan SPBE, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan daerah tahun 2016 hingga tahun 2020 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.118. Capain indikator kinerja pembangunan daerah tahun 2016 hingga tahun 2020

No.	Indikator	Capaian (Tahun)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah surat kabar nasional	3 buah	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah
2	Jumlah surat kabar local	5 buah	6 buah	6 buah	11 buah	11 buah
3	Jumlah stasiun penyiaran radio	20 stasiun	4 stasiun	4 stasiun	4 stasiun	46 stasiun
4	Jumlah stasiun penyiaran TV lokal	3 stasiun	2 stasiun	2 stasiun	2 stasiun	25 stasiun
5	Terbangunnya *Command Centre*	-	-	-	1 Unit	1 unit

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara

2.3.2.16.Kebudayaan



Sulawesi Utara terkenal dengan kaya akan sumber daya alamnya, begitu juga dengan seni dan kebudayaannya juga cukup terkenal yang telah di wariskan para leluhurnya. Berbagai jenis kebudayaan dari macam-macam suku di Sulawesi Utara menjadikan daerah nyiur melambai ini indah dan mempesona.



Budaya masyarakat Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat yang terdiri dari: Suku Minahasa, Suku Sangihe, Suku Talaud, Suku Bolaang, dan Suku Mongondow. Masing-masing kelompok etnis tersebut masih terbagi pula dalam subetnis yang memiliki bahasa daerah, tradisi, dan norma-norma kemasyarakatan yang khas serta diperkuat semangat Mapalus, Mapaluse, dan Moposad. Dilihat dari unsur budaya bahasa, maka Sulawesi Utara memiliki tiga kelompok bahasa daerah yaitu:

a. Bahasa Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Pasan, Ponosakan, dan Bantik.
b. Bahasa Sangir Besar, Siau, dan Talaud.
c. Bahasa Boroko, Bolangitang, Bolaang, Mongondow, Bintauna, Kaidipang, Bolango, dan Bantik Mongondow.



Namun demikian, Bahasa Indonesia adalah Bahasa Nasional yang digunakan dan dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk Sulawesi Utara. Seni Budaya di Sulawesi Utara cukup berkembang yang tersebar di masyarakat luas. Hal ini dikembangkan melalui program menggali, menginventarisasi keunggulan, dan keragaman seni budaya yang dikemas dalam pelaksanaan festival seni budaya berskala nasional dan internasional.

Di bawah ini, disajikan capaian kinerja pembangunan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021.

Tabel 2.119. Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara

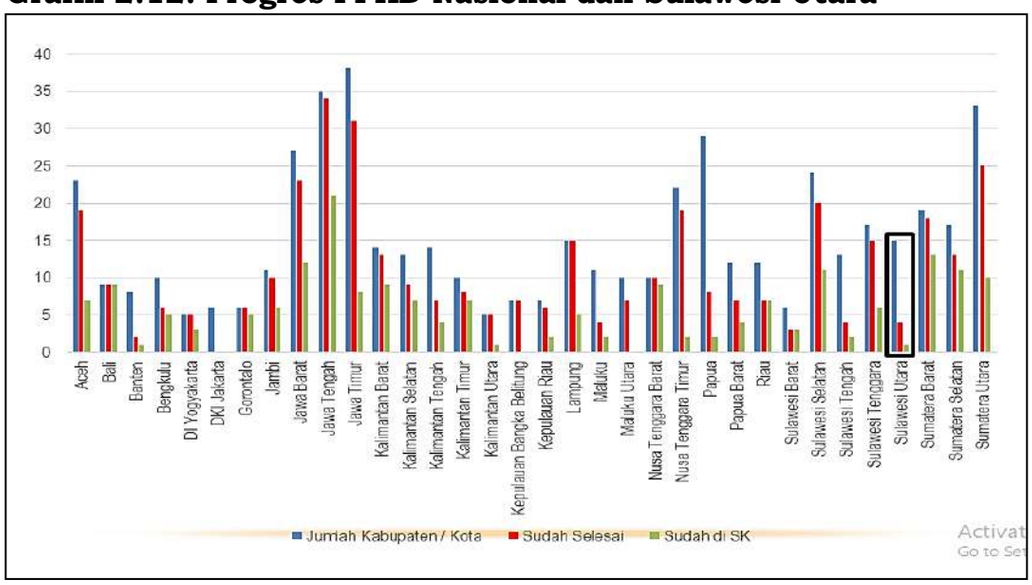
Indikator	Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara		
	2017	2018	2019
Grup Seni Musik Aktif	50	60	70
Grup Seni Tari Aktif	20	20	30
Jumlah teater/sastra Aktif	25	30	35
Gedung Kesenian	2	3	3
Apresiasi terhadap maestro di tiap cabang seni	5	5	6
Seniman lokal	3	5	7
Warisan tak benda	3	3	9
Apreasiasi terhadap pelaku warisan tak benda	3	6	9
Pendataan koleksi museum sulut	20	20	30

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Semua indikator yang diukur dalam tabel di atas menunjukkan peningkatan dalam pencapaiannya. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Salah satu arahan utama UU. No. 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan adalah disediakannya oleh tiap daerah kabupaten/kota dan provinsi suatu naskah road map kebijakan kebudayaan yang disebut Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).

Grafik 2.12. Progres PPKD Nasional dan Sulawesi Utara



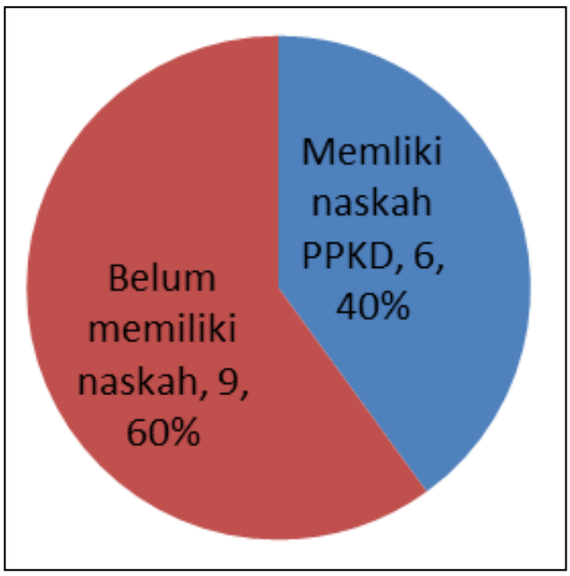
Jika melihat grafik yang disusun berdasarkan capaian tiap provinsi di atas, dapat diketahui bahwa dari 15 jumlah kabupaten/kota, baru 4 daerah (26%) yang membuat naskah PPKD dan baru 1 daerah (6,67%) yang meng-SK-kan naskah tersebut.

Pada tahun 2020, dilakukan berbagai usaha untuk memperbaiki capaian di atas melalui berbagai kegiatan dan sosialisasi. Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah yang telah menyelesaikan naskah tersebut dalam tahun 2020. Begitu pula halnya mengusahakan dibuatnya naskah PPKD tingkat provinsi. Namun, usaha tersebut belum dapat dilanjutkan karena adanya instruksi bahwa naskah PPKD tingkat provinsi hanya dapat dibuat jika sudah ada minimal 80% kabupaten/kota yang menyelesaikan naskahnya. Dengan kata lain untuk Sulawesi Utara membutuhkan setidaknya 12 kabupaten/kota yang telah menyelesaikan naskah PPKD, sebelum naskah tingkat provinsi dapat dilanjutkan pembuatannya dan di SK-kan.

Hingga pertengahan tahun 2021, capaian atas selesainya naskah PPKD sudah mencapai 6 kabupaten/kota atau 40%, yaitu: Bitung, Bolsel, Talaud, Bolmut, Tomohon, Kotamobagu, yang berarti meningkat 14% dari posisi semula. Dimana telah ada 2 kabupaten/kota (13,3%) yang telah meng-SK-kan naskah ini. Dari data tersebut, setidaknya diperlukan lagi 6 kabupaten/kota untuk menyelesaikan naskah dimaksud.

Pada proses ini, hingga pertengahan tahun 2021, Bolaang-Mongondow merupakan daerah yang sementara melaksanakan dan menargetkan naskah tersebut selesai dalam tahun 2021.

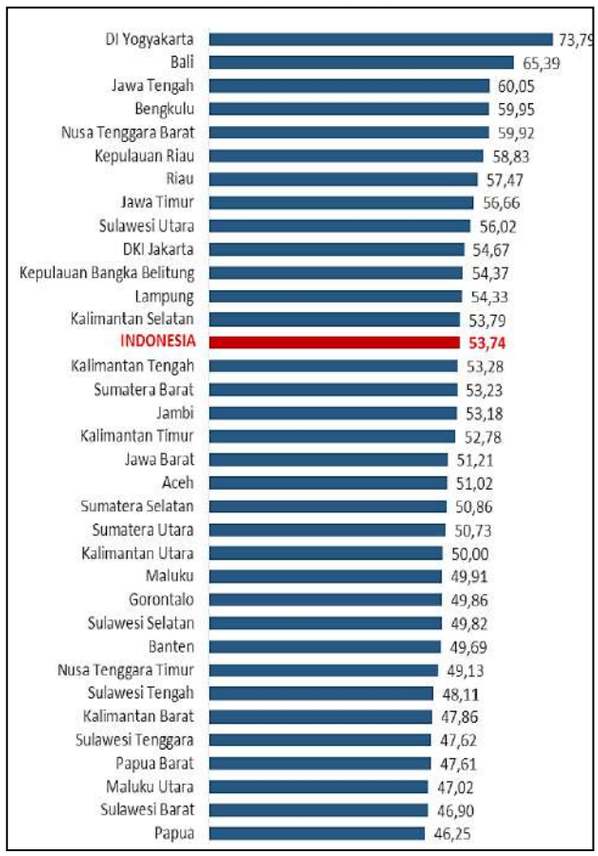
Grafik 2.13. Diagram Progres Naskah PPKD Sulut hingga Juni 2021



Kebudayaan Sulawesi Utara Berdasar Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sendiri secara umum merupakan indeks yang disusun untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan secara nasional maupun di tingkat provinsi. IPK bertujuan untuk memotret capaian pembangunan kebudayaan suatu wilayah, bukan memotret nilai budaya di daerah tersebut.

Grafik 2.14
Indeks Pembangunan Kebudayaan Menurut Provinsi
Tahun 2018



Sumber: Buku Indeks Pembangunan Kebudayaan 2018.

Secara umum IPK Sulawesi Utara berada di atas IPK Nasional (53,74), tepatnya ada di peringkat 9 dengan nilai 56,02. Artinya ada perbedaan kira-kira lebih dari 3 angka dengan IPK Nasional. Namun begitu, jika dibandingkan dengan IPK tertinggi yang dipegang provinsi DI Yogyakarta (73,76) ada disparitas sekitar 20 angka dan dengan Bali (65,39) sekitar 12 angka. Sehingga, secara umum, Sulawesi Utara memiliki kesenjangan yang cukup jauh ke arah tidak menguntungkan dibandingkan dua provinsi dimaksud. Secara bersamaan, terlihat pula bahwa angka disparitas tersebut jauh lebih banyak dibandingkan perbedaan dengan provinsi dengan IPK terendah Papua (46,25), yaitu hanya berjumlah 7 angka. Artinya, secara kuantitatif, nilai IPK Sulawesi Utara ke arah nilai terendah lebih dekat dibandingkan ke arah nilai tertinggi.

IPK sendiri disusun berdasarkan 7 dimensi, yaitu: (1) ekonomi budaya; (2) pendidikan, (3) ketahanan sosial-budaya; (4) warisan budaya; (5) ekspresi budaya; (6) budaya literasi; (7) gender. Dimensi-dimensi tersebut membuat perincian mengenai posisi IPK semakin detail dalam aspek-aspek yang lebih spesifik. Capaian Sulawesi Utara sendiri dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan dimensi-dimensi dimaksud, maka diketahui bahwa ada 3 dimensi yang masuk tiga besar secara nasional, yaitu: Gender (peringkat 1); Ketahanan Sosial Budaya (Peringkat 2); Ekspresi Budaya (peringkat 3).

Tabel 2.120. IPK Sulut berdasarkan dimensi penyusun tahun 2018

DIMENSI	NILAI INDEKS		RANGKING SULAWESI UTARA
	INDONESIA	SULAWESI UTARA	
EKONOMI BUDAYA	30,55	33,67	9
PENDIDIKAN	69,67	72,41	11
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA	72,84	81,12	2
WARISAN BUDAYA	41,11	33,06	26
EKSPRESI BUDAYA	36,57	51,00	3
BUDAYA LITERASI	55,03	49,94	23
GENDER	54,97	71,77	1
IPK TOTAL	**53,74**	**56,02**	**-**

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Terdapat dua dimensi yang lebih rendah dari capaian nasional, yaitu: Warisan Budaya (peringkat 26) dan Budaya Literasi (peringkat 23). Untuk warisan budaya sendiri, ada jarak kurang-lebih 8 angka antara indeks nasional (41,11) dengan Sulawesi Utara (33,06). Artinya, perlu kerja cukup keras untuk memperbaiki nilai ini ke arah sejajar dengan capaian nasional. Secara lebih spesifik, nilai tersebut hadir karena rendahnya indikator soal presentasi penetapan benda, bangunan, struktur dan situs cagar-budaya di Sulawesi Utara.

Capaian nasional berada pada posisi (3,17 %), sementara performa Sulawesi Utara hanya mencapai (2,92%), jika dibandingkan dengan target capaian indikator nasional yaitu 50%. Dengan kata lain, Sulawesi Utara hanya mampu mencapai sekitar 6% dari target nasional tersebut. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaiki nilai tersebut, adalah meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait (baik horizontal maupun vertikal), kemudian meningkatkan akselerasi secara revolutif melalui mekanisme hukum dalam menetapkan benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya sebagai warisan daerah maupun nasional.

Dimensi Budaya Literasi Sulawesi Utara menempati posisi lebih rendah dari capaian nasional, yaitu 49,94, dibandingkan 55,03. Secara lebih spesifik, nilai tersebut hadir karena kontribusi dari pengunjung perpustakaan dan Taman Baca Masyarakat yang di bawah capaian nasional. Sulawesi Utara mencapai 8,32% berbanding dengan 12,16% untuk capaian nasional). Target nasional untuk indikator ini sendiri adalah agar dapat mencapai 25%. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah daerah perlu mendorong inovasi terkait perpustakaan dan TBM agar dapat menarik pengunjung secara signifikan, termasuk menggandeng peran serta masyarakat untuk peningkatan kinerjanya.

Dimensi Ekonomi Budaya berada pada posisi lebih tinggi capaian nasional yaitu mencapai 33,67 dibandingkan 30,55 dan berada pada peringkat 9 secara nasional. Pada indikator penyusun dimensi ini, yaitu keterlibatan pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikannya sebagai sumber penghasilan di Sulawesi Utara yaitu mencapai (0,34%), sehingga berada pada posisi lebih tinggi 0,03% dibandingkan dengan capaian nasional (0,31%). Namun begitu hal ini perlu ditingkatkan dengan menciptakan suatu ekosistem ekonomi budaya yang kondusif dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi warganya, hal tersebut karena target capaian nasional berada pada rasio nilai 1% yang merupakan nilai

maksimal, berarti Sulawesi Utara baru mampu mencapai sekitar 1/3 dari target nasional tersebut.

Dimensi Pendidikan berada pada peringkat 11 dari 34 provinsi di Indonesia dan Sulawesi Utara (72,41) memiliki nilai yang lebih tinggi dari capaian nasional (69,67). Namun begitu, jika melihat lebih dalam, indikator penyusun dimensi ini yaitu ketersediaan guru muatan lokal yang mengajar bahasa dan kesenian daerah justru lebih rendah dari capaian nasional dengan jarak 0,12%, dimana Sulawesi Utara mencapai 25,25% dan nasional mencapai 25,37%. Sementara, target nasional berada pada angka maksimal 45%. Karena itu, perlu didorong penyediaan lebih banyak guru muatan lokal dan ekstrakurikuler bahasa dan kesenian daerah. Secara simultan, jika persentase ini naik maka akan pula menaikkan dimensi Ekonomi Budaya.

Dimensi Gender Sulawesi Utara merupakan yang tertinggi secara nasional (71,77 berbanding 54,97) yang merupakan indikasi baiknya pembangunan kebudayaan dalam bidang keterwakilan gender. Namun begitu, angkatan kerja perempuan hanya mencapai kira-kira 56,52% atau masih sekitar setengah dari angkatan kerja laki-laki. Dimana target capaian nasional untuk indikator ini mencapai 62,74%.

Indeks dimensi Ketahanan Sosial-Budaya Sulawesi Utara memiliki nilai 81,12, berada di peringkat 2 secara nasional dan lebih tinggi dari capaian nasional (72,84). Indikator penyusun dimensi inipun menempatkan Sulawesi Utara lebih tinggi dari nasional (24,89 berbanding 23.08), dimana capaian barusan merupakan indikator yang berhubungan dengan rumah tangga yang khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir. Karena itu, persoalan rasa aman ini perlu ditingkatkan karena target capaian indikator mencapai 50%. Dimana baik Sulawesi Utara maupun nasional bahkan tidak mencapai setengah nilai tersebut.

Dimensi Ekspresi Budaya Sulawesi Utara menduduki peringkat ke 3 secara nasional dan lebih tinggi dari capaian nasional. Nilai Sulawesi Utara mencapai 51,00, dibandingkan dengan capaian nasional 36,57. Indikator dimensi ini yang tergambar dari persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni lebih tinggi dari nasional (2,58% berbanding 1,91%). Namun begitu, indikator ini perlu ditingkatkan dengan memperhatikan kesejahteraan dan keberlangsungan pertunjukan seni. Hal mana karena target nasional mencapai 20%.

2.3.2.17.Penanggulangan Bencana



Penanggulangan bencana tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pembangunan nasional, dimana aspek pembangunan yang diselenggarakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan mengintegrasikan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Hal tersebut menggambarkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan multisektor.

Dalam komitmen global untuk mewujudkan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), penanggulangan bencana menjadi salah satu bidang yang memiliki andil agar tercapainya kesejahteraan masyarakat

secara berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana dalam komitmen global difokuskan pada upaya pelaksanaan pengurangan risiko bencana.

Data yang ada menunjukkan bahwa Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 berada pada risiko tinggi, demikian juga indeks risiko bencana di sebagian besar Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Sedangkan beberapa daerah lainnya berada pada risiko sedang. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.121. Indeks Risiko Bencana Sulawesi Utara Tahun 2020

No.	Daerah	Skor	Kelas Risiko
1	Bolaang Mongondow	150	Tinggi
2	Bolaang Mongondow Timur	158	Tinggi
3	Bolaang Mongondow Utara	144	Sedang
4	Kepl. Sangihe	154	Tinggi
5	Minahasa	212	Tinggi
6	Minahasa Selatan	174	Tinggi
7	Minahasa Tenggara	195	Tinggi
8	Minahasa Utara	158	Tinggi
9	Kepl. Sitaro	179	Tinggi
10	Tomohon	119	Sedang
11	Bitung	163	Tinggi
12	Kotamobagu	76	Sedang
13	Manado	130	Sedang
14	Bolaang Mongondow Selatan	150	Tinggi
15	Kepl. Talaud	103	Sedang
	Sulawesi Utara	**151**	**Tinggi**

Sumber: Ditjen BAK Kemendagri (2020)

2.3.2.18.Perpustakaan



Sebagai salah satu sarana penting dalam upaya belajar mandiri menuju masyarakat cerdas dan berkepribadian, penyediaan sarana Perpustakaan dipandang penting untuk dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki Perpustakaan daerah dengan jumlah buku koleksi per tahun bertambah dimana data awal berjumlah 64.007 dan data terakhir berjumlah 68.541 buku. Target hingga 2021 adalah 67.554 buku, banyaknya exemplar buku secara keseluruhan hingga tahun 2019 sebanyak 254.371.

Jumlah pengunjung pertahun dari tahun 2016 hingga 2019 sebanyak 7543 atau mengalami kenaikan secara eksponensial dengan target hingga 2021 adalah 7846. Sementara masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan mengalami peningkatan di tahun 2016 hingga 2018 sebanyak 161 anggota namun di tahun 2019 sedikit mengalami penurunan menjadi 115 orang, namun target capaian secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.122. Jumlah Kunjungan, Jumlah anggota, Jumlah buku dan banyaknya eksemplar Perpustakaan Daerah Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2020

Tahun	Judul Buku	Eksemplar	Pengunjung	Anggota	Buku yang Dipinjam
2016	66.914	246.453	5.826	161	1.320
2017	67.554	251.477	7.046	162	3.793
2018	67.554	251.477	7.346	167	1.359
2019	68.541	254.371	7.543	115	729
2020	68.541	254.371	1.450	253	203

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulut 2020

Hasil evaluasi kinerja perpustakaan khususnya pada pencapaian koleksi jumlah buku perpustakan melampaui target sementara jumlah pengunjung mengalami penurunan drastis dikarenakan adanya pandemi COVID-19, dimana terjadi pembatasan aktivitas masyarakat pada umumnya sehingga tidak mencapai target. Di bidang perpustakaan dari 2 indikator yang ditargetkan terdapat 1 indikator yang belum mencapai target yakni jumlah pengunjung perpustakaan pertahun, hal tersebut disebabkan oleh perkembangan teknologi semakin memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi. Sumber ilmu pengetahuan yang pada masa lalu berada di ruang-ruang perpustakaan, kini berada dalam genggaman gawai. Internet menjadi jalan pintas bagi publik untuk mengonsumsi informasi. Popularitas perpustakaan di tengah masyarakat akan semakin pudar. Minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan terus mengalami penurunan. Hal itu setidaknya tampak dari merosotnya jumlah kunjungan masyarakat ke Perpustakaan selama lima tahun terakhir. Adanya kondisi akses internet atau perkembangan *Internet of Things* yang begitu cepat saat ini dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan minimnya pengunjung Perpustakaan Daerah

2.3.2.19.Kearsipan



Dalam menunjang layanan dan operasional kearsipan di Propinsi Sulawesi Utara, ketersediaan SDM pengelola Arsip penting diupayakan untuk menyelamatkan dokumen dokumen penting milik daerah.
Kegiatan terkait peningkatan dan pembinaan dalam pengelolaan Kearsipan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara telah diupayakan pemerintah terutama penataan arsip dokumen-dokumen daerah yang penting. Pentingnya kegiatan terkait sosialisasi dan pembinaan yaitu untuk memperlengkapi pengetahuan SDM agar menjadi unggul dalam mengelola arsip di setiap perangkat daerah Sulawesi Utara. Selain itu perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kearsipan, Pembina SDM di setiap SKPD agar tertata sesuai klasifikasi arsip. Penataan arsip penting untuk menghindari permasalahan dalam penyalahgunaan dokumen dari pihak luar pemerintah daerah, sebagai contoh dokumen kepemilikan tanah, pembuktian sejarah atau tokoh sejarah.

2.3.3. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan



Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Sulawesi Utara. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB tahun 2016 sebesar 7,59 persen, kemudian meningkat menjadi 7,84 persen pada tahun 2019. Sementara itu, pada tahun 2020 Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB menjadi 7,23 persen. Diharapkan potensi Perikanan Povinsi Sulawesi Utara dapat meningkat karena juga akan didukung lewat pelaksanaan pembangunan Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020- 2024.

Tabel 2.123. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB (Atas dasar Harga berlaku)	7,59	7,60	7,64	7,84	7,23*

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Utara, 2021

2.3.3.2. Pariwisata

Jumlah Wisatawan Mancanegara



Seiring dengan semakin menipisnya cadangan sumber daya alam yang menjadi tumpuan industri ekstraktif, maka pemerintah dipandang perlu untuk segera mengembangkan sektor lain yang terbarukan untuk menstimulasi pertumbuan ekonomi.

Pariwisata dianggap menjadi sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan selain karena mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, juga cukup strategis bagi suatu negara atau daerah karena pariwisata dipandang sebagai penunjang sektor lainnya.

Tabel 2.124. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2016-2020

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kunjungan wisatawan mancanegara	40.624	79.377	122.100	129.588	23.031

Sumber: BPS-Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Utara mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2016. Tahun 2016, 40.624 wisatawan, dan di tahun 2019 meningkat sekitar 300 persen mencapai 129.588 wisatawan. Di tahun 2020 Wisman yang datang ke Provinsi Sulawesi Utara sampai pada bulan Desember hanya mencapai 23.031 orang atau menurun sebesar 82,23 persen dari periode di tahun sebelumnya dan paling besar wisman yang berkunjung di Sulawesi Utara berasal dari Tiongkok yaitu sebesar 20.634 orang atau 89,59 persen dari seluruh wisman yang berkunjung. Berkurangnya pengunjung wisman di tahun 2020 dikarenakan adaya pendemi COVID-19.

2.3.3.3. Pertanian

A. Persentase Pertumbuhan Sub Kategori Tanaman Pangan Terhadap PDRB



Sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pembantukan PDRB Sulawesi Utara. Sub Sektor Tanaman Pangan juga turut berkontribusi dalam pembantukan PDRB Sulawesi Utara. Sub kategori tanaman pangan meliputi komoditi: padi dan palawija (jagung, kacang hijau, kacang tanah, kedele, ubi kayu, ubi jalar, dan palawija lainnya).



Tabel 2.125. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (Atas dasar Harga berlaku)	5,74	6,11	2,46	-0,35	-5,12

Sumber: BPS-Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021

Pertumbuhan Sub sektor ini naik dari tahun 2016 (5,74) ke 2017 (6,11) tetapi di tahun 2018-2020 menunjukkan tren penurunan mencapai -5,12 di tahun 2020.

B. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB



Tanaman perkebunan yang diusahakan di Sulawesi Utara yaitu Kelapa, Cengkih, Pala, Kopi, Kakao, Vanili, Jambu Mete, Cassiavera, Lada, Kemiri, Aren, Jarak, Sagu dan Abaka.

Pada tahun 2016, Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB sebesar 2,34 persen, kemudian meningkat pada tahun 2017 sebesar 2,28 persen dan turun



kembali pada tahun 2018 menjadi 0,19 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 naik menjadi 5,39 persen. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 4,76 persen

Tabel 2.126. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB (ADHB)	2,34	2,28	0,19	5,39	4,76

Sumber: BPS-Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021

C. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB

Pertumbuhan Sub Kategori Peternakan cenderung mengalami peningkatan



dari tahun 2016 sebesar 7,42 persen menjadi 7,70 persen pada tahun 2017. Selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 6,49 persen dan terjadi akselerasi percepatan menjadi 9,71 persen di tahun 2019. Di tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga menjadi -1,59 persen.

Tabel 2.127. Kontribusi dan Pertumbuhan Sub Kategori Peternakan Terhadap PDRB

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB (ADHB)	7,42	7,70	6,49	9,71	-1,59

Sumber: BPS-Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021

2.3.3.4. Kehutanan

A. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB



Sub kategori kehutanan dan penebangan kayu meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun, getah, dan akar, termasuk jasa yang menunjang kegiatan kehutanan

berdasarkan sistem balas jasa/kontrak.

Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), Kayu Bakar, Rotan, Bambu dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Tabel 2.128. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB (Atas dasar Harga berlaku)	4,36	-1,93	0,15	-4,63	-1,11

Sumber: BPS-Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021

Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan Dan Penebangan Kayu terhadap PDRB menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu empat tahun (2016-2019). Pada tahun 2017, pertumbuhan 4,36 persen, turun menjadi -1,93 persen di tahun 2017. Di tahun 2018, naik sedikit menjadi 0,15 dan di tahun 2019, mengalami penurunan mencapai -4,63 persen. Tahun 2020 terjadi kenaikan menjadi -1,11 persen.

B. Indeks Tutupan Hutan



Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunya fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai Plasma Nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perhitungan Indeks Tutupan Hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Indeks Tutupan Hutan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Sulawesi Utara.

2.3.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Rasio Elektrifikasi



Ketersediaan pasokan listrik merupakan salah satu faktor utama yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada berbagai sektor perekonomian (industri, perdagangan, dan sebagainya). Pengukuran ketersediaan pasokan listrik salah satunya dapat diketahui melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE). Rasio Eletrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah teraliri listrik dengan total rumah tangga. Rasio elektrifikasi Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.129. Rasio Elektrifikasi di Sulawesi Utara

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Elektrifikasi	90,79%	92,47%	97%	90,98%	99%

Sumber: Dinas ESDMD Prov. Sulut, 2021

Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2017 hingga tahun 2020 cenderung meningkat, yaitu dari 94,47 persen pada tahun 2017 menjadi sebesar 99 persen pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pula jumlah pelanggan, yang dapat menikmati pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari yang secara tidak langsung berpengaruh pada capaian kinerja dari masing-masing pelanggan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.

B. Energi Baru Terbarukan



Indonesia kaya akan sumber energi terbarukan, seperti angin, matahari, air, panas bumi, arus laut dan lain-lain. Total potensi energi potensi bisa mencapai 442 GW. Sayangnya, kekayaan yang berlimpah ini seakan terabaikan. Kapasitas terpasang baru 9,32 GW atau hanya sekitar 2%. Komposisi pemenuhan energi Indonesia saat ini sebesar 92% dari energi fosil dan 8% dari energi terbarukan.

Salah satu dampak terbesar yang akan terasa dalam pemanfaatan energi terbarukan adalah dampak lingkungan. Beberapa energi terbarukan seperti Cahaya Matahari, Panasbumi, Angin, Biomassa dan Air adalah ramah lingkungan dan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang diketahui sebagai sumber polusi karbon dioksida pada area sekitar pembangkit.

Berbanding terbalik dengan Energi Fosil, dimana unsur-unsur kimia dalam bahan bakar fosil diubah menjadi energi panas, mekanik, atau listrik melalui pembakaran dan ini sebagai penghasil polutan terbesar. Hal yang sama dengan pembangkit listrik, kendaraan bermotor, dan kompor adalah penyebab utama terjadinya polusi udara. Polutan yang dikeluarkan biasanya dikelompokan menjadi hidrokarbon (HC), nitrogen oksida (NO_x), dan karbon monoksida (CO). Polutan yang dihasilkan pada pembakaran fosil merupakan faktor terbesar terjadinya asap, hujan asam, pemanasan global dan perubahan iklim.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) ditetapkan sebesar 23 % target bauran energi terbarukan pada tahun 2025, kebijakan ini dikombinasikan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi hingga 29 % pada tahun 2030. Namun sampai dengan akhir tahun 2020, Indonesia baru mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 11,51 %. Hal ini masih terdapat kesenjangan yang terlalu jauh untuk menuju target bauran energi terbarukan 23 % pada tahun 2025.

Sesuai dengan amanat RUEN, setiap Provinsi harus memiliki Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah (Perda RUED) yang diinernalisasikan dengan RPJMD untuk menunjang target bauran energi nasional, dan yang lebih penting adalah untuk kemandirian menuju ketahanan energi nasional, namun sampai saat ini masih ada 11 (sebelas) Provinsi yang belum memiliki Perda RUED, dan salah satunya adalah

Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini sangat disayangkan dikarenakan Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi energi terbarukan yang cukup melimpah dikarenakan posisi geografis Sulawesi Utara yang sangat menunjang seperti: dekat dengan khatulistiwa (potensi panas matahari), daerah kepulauan (potensi arus / gelombang laut), banyak pegunungan (potensi panas bumi), memiliki banyak Daerah Alisan Sungai (potensi tenaga air), pusat pengolahan sampah regional Ilo-ilo di Kabupaten Minahasa Utara dan lain sebaginya. Meskipun begitu, dari sektor pembangkit, bauran energi Provinsi Sulawesi Utara sudah berada diatas rata-rata nasional, yaitu sekitar 36 % bauran energi terbarukan.

Tabel 2.130. Bauran Energi Provinsi Sulawesi Utara

JENIS PEMBANGKIT		SINGKATAN	SUMBER ENERGI	DAYA (MW)	%	
					PER JENIS	NON EBT / EBT
NON EBT	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	P L T D	BBM (Solar)	239.47	43.74	64
	Pembangkit Listrik Tenaga Uap	P L T U	Batu Bara	110.00	20.09	
EBT	Pembangkit Listrik Tenaga Air	P L T A	Air	51.34	9.38	36
	Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro	P L T M	Air (skala kecil)	11.00	2.01	
	Pembangkit Listrik Tenaga Surya	P L T S	Panas Matahari	15.59	2.85	
	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu	P L T B	Angin	0.08	0.01	
	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	P L T P	Panas Bumi	120.00	21.92	
T OT A L				**547**	**100**	**100**

Sumber : Dinas ESDM Prov. Sulut Tahun 2021

C. Sumber Daya Mineral



Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, seluruh kewenangan terkait pertambangan mineral dan batubara ditarik ke pemerintah pusat. Dampak dari hal tersebut adalah terbengkalainya pengawasan dan pengelolaan terkait pertambangan mineral yang ada di Sulawesi Utara. Dengan adanya dampak tersebut pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mengeluarkan Surat terkait status dari Dinas ESDM Provinsi, yang dimana menjelaskan bahwa dalam Undang – Undang nomor 3 Tahun 2020, Dinas ESDM Provinsi masih memiliki kewenangan yang besar dalam penentuan Wilayah Pertambangan.

Penentuan Wilayah Pertambangan merupakan pekerjaan kompleks yang memerlukan pekerjaan lintas ilmu dan bidang keahlian. Dalam Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia juga menjelaskan bahwa pasca terbitnya undang – undang nomor 3 Tahun 2020

peraturan turunannya sedang digodok. Pada saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah sudah dalam tahap penyelesaian yang dimana Peraturan tersebut juga mengatur kewenangan Dinas ESDM Provinsi agar dapat melakukan tugas dan fungsinya secara optimal.

Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap pertambangan mineral yang tidak sebanding dengan instrumen pengawasan dan pengelolaan, membuat maraknya pertambangan tanpa izin. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah. Dengan instrumen pengelolaan dan perizinan yang lebih baik kegiatan pertambangan tanpa izin ini dapat diminimalisir.

Beriringan dengan kewenangan terkait penentuan wilayah pertambangan, Pemerintah Provinsi khususnya dapat mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat. Perizinan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat dikenal lebih sederhana daripada perizinan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan yang sangat memberatkan pemohon izin tersebut. Selanjutnya dalam Rancangan Peraturan Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengurus perizinan didalam Wilayah Pertambangan Rakyat dalam hal ini Izin Pertambangan Rakyat.

Dengan kewenangan yang akan ada nantinya, Pemerintah Provinsi perlu memberikan perhatian terkait Pertambangan Mineral khususnya instrumen pengelola dan pengawasannya.

2.3.3.6. Perdagangan



Kondisi perkembangan perdagangan di Provinsi Sulawesi Utara selang tahun 2015 – 2019 sebelum adanya pandemi COVID-19 dan di tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19 tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 2.131. Neraca Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2020

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ekspor (Juta $US)	1.021,96	1.021,5	972,709	974,8	842,02	776,31
Impor (Juta $US)	72,11	161,99	214,96	163,66	288,12	148,21
Neraca Perdagangan	949,85	859,51	757,749	811,14	553,9	628,08

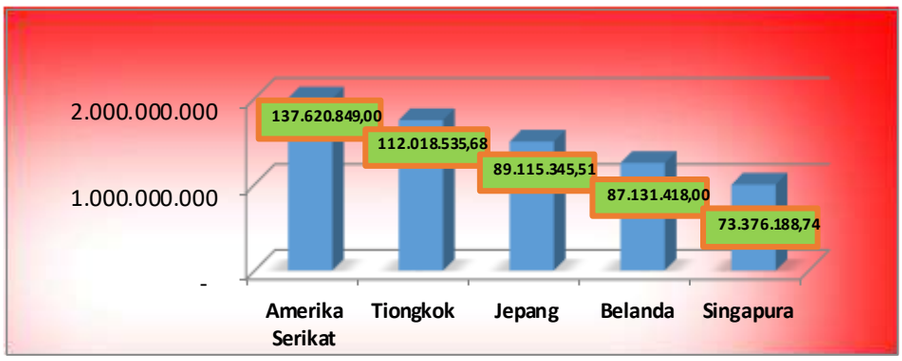
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020

Data menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara masih memiliki net ekspor (surplus neraca perdagangan), namun semakin berkurang. Tahun 2015 mencapai 949,85 juta US$ dan pada tahun 2019 hanya 553,9 juta US$ atau turun sebesar 41,69 persen. Di tahun 2020 meskipun dalam pandemi COVID- 19 mengalami peningkatan di sisi ekspor sebesar 17,61 persen dan sebaliknya terjadi peningkatan impor lebih dari 200 persen.

Dilihat dari Tabel di atas, lima negara tujuan yang menyumbang nilai ekspor cukup besar ke Sulawesi Utara tahun 2020 yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Belanda dan Singapura. Dari kelima tujuan utama,

negara yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah Jepang, yang naik sebesar 32,23 persen dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019.

Grafik 2.15. Lima Negara Tujuan Ekspor Provinsi Sulawesi Utara dengan Nilai Terbesar (US $)
EKSPOR



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020

Grafik 2.16. Lima Negara Tujuan Impor Provinsi Sulawesi Utara dengan Nilai Terbesar (US$)
IMPOR



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020

Dari lima negara asal yang menyumbang nilai impor yang cukup besar ke Sulawesi Utara tahun 2020 yaitu Malaysia, Cina, Singapura, Australia dan Thailand namun negara yang mengalami pertumbuhan impor terbesar adalah negara Thailand, yang naik sebesar 112,55 persen dari tahun 2019.

Tabel 2.132. Capaian Kinerja Perindustrian dan Perdagangan 2016 -2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Ekspor Produk Industri	6	-4,74	0,14	-21,22	1,18%
Pertumbuhan Industri	1,1	8	4,48	5	4,41
Jumlah IKM (unit usaha) Aktif	95	115	1.864	871	0

Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2021

Tabel 2.133. Komoditi Ekspor Non Migas di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021

No	BARANG EKSPOR	EKSPOR MENURUT BARANG				
		NILAI FOB(US $)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ikan dan Udang	59 450 658,00	20 904 842,77	6 554 369,91	4 012 926,66	2 599 818,64
2	Susu, Mentega, Telur	1 000,00	-	-	-	-
3	Produk Hewani	2 625,00	-	-	-	-
4	Buah-Buahan	21 424 679,00	3 185 180,44	875 034,40	-	-
5	Kopi, Teh, Rempah-rempah	28 497 213,00	6 402 719,12	643 276,66	-	-
6	Hasil Penggilingan	21 500,00	-	-	-	-
7	Biji-Bijian Berminyak	5 000 285,00	5 086 050,00	2 932 754,63	2 779 256,00	-
8	Lak, Getah, dan Damar	20 500,00	-	-	-	-
9	Lemak & Minyak Hewan/Nabati	663 441 874,00	681 285 409,48	568 059 485 270,00	335 334 235,84	386 088 148,37
10	Daging dan Ikan Olahan	45 257 303,00	15 940 511,63	3 494 316,81	-	-
11	Gula dan Kembang Gula	524 406,00	69 172,40	-	-	-
12	Olahan dari Tepung	-	-	-	-	-
13	Olahan dari Buah-Buahan/Sayuran	30 536,00	-	-	-	-
14	Berbagai Makanan Olahan	150,00	-	-	-	-
15	Ampas/Sisa Industri Makanan	36 271 994,00	31 429 500,00	41 075 731,95	37 902 592,77	31 576 750,00
16	Tembakau	133 363,00	1 107 897,55	3 032 955,90	136 279,02	22 585,46
17	Garam, Belerang, Kapur	67 600,00	-	-	8 613 291,97	26 453 608,50
18	Bahan Kimia Anorganik	50,00	-	-	-	-
19	Bahan Kimia Organik	6 783 746,00	3 128 681,67	6 209 181,13	4 520 011,43	6 750 221,64
20	Produk Industri Farmasi	-	-	-	-	-
21	Sari bahan samak & celup	10,00	-	-	-	-
22	Minyak Atsiri, Kosmetik Wangi-Wangian	1 584,00	-	-	-	-
23	Sabun dan Preparat Pembersih	8 879,00	4 261,82	5 146,70	3 591,13	1 779,62
24	Berbagai Produk Kimia	22 178 599,00	15 342 012,15	22 332 938,30	8 745 368,10	10 862 090,98
25	Plastik dan Barang dari Plastik	-	-	-	-	-
26	Karet dan Barang dari Karet	3,00	-	-	-	-
27	Barang-Barang dari Kulit	4 695,00	-	-	-	-
28	Kayu, Barang dari Kayu	1 719 298,00	1 092 275,96	60 994,50	-	-
29	Kertas/Karton	4 727,00	-	-	-	-
30	Buku dan Barang Cetakan	8,00	-	-	-	-
31	Kapas	-	-	-	-	-
32	Serat Tekstil dan Benang Kertas	71 317,00	8 772,00	-	-	-
33	Serat Stapel Buatan	125,00	-	-	-	-
34	Kapas Gumpalan, Tali	102 920,00	53 272,20	21 744,00	-	-
35	Kain ditenun berlapis	49,00	-	-	-	-
36	Barang dan Perlengkapan Pakaian Rajutan	-	-	-	-	-
37	Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya	132,00	-	-	-	-
38	Alas Kaki	-	-	-	-	-
39	Tutup Kepala	-	-	-	-	-

No	BARANG EKSPOR	EKSPOR MENURUT BARANG				
		NILAI FOB(US $)				
		2016	2017	2018	2019	2020
40	Produk Keramik	64,00	-	-	-	-
41	Kaca dan Barang dari Kaca	-	-	-	-	-
42	Perhiasan/Permata	129 661 969, 00	167 406,00	-	-	-
43	Besi dan Baja	-	-	-	-	-
44	Benda-Benda dari Besi dan Baja	20 722,00	57 618,10	-	-	-
45	Perkakas, Perangkat Potong	-	-	-	-	-
46	Berbagai Barang Logam Dasar	-	-	-	-	-
47	Mesin-Mesin/Pesawat Mekanik	609 584,00	210 129,15	135 661,52	-	-
48	Mesin/Peralatan Listrik	2 725,00	61 791,62	-	-	-
49	Kendaraan dan Bagiannya	3,00	-	-	-	-
50	Perangkat Optik	27 351,00	9 890,87	45 500,00	-	-
51	Perabot, Penerangan Rumah	66 086,00	93,32	-	-	-
52	Mainan	-	-	-	-	-
53	Berbagai Barang Buatan Pabrik	-	-	-	-	-
54	Barang Kirimin	91 476,00	-	-	-	-

Sumber: Url https://sulut.bps.go.id/indicator/8/236/1/ekspor-menurut-barang.html Access Time: June 15, 2021, 9:45 am

Komoditi ekpor non migas terbesar Tahun 2020 pada peringkat pertama dididuduki oleh komoditas Lemak dan Minyak Hewan/Nabati sebesar 386 088 148,37, kemudian peringkat kedua dididuduki oleh komoditas Ampas/Sisa Industri Makanan sebesar 31 576 750,00, dan peringkat ketiga dididuduki oleh Komoditas Garam, Belerang, Kapur, sebesar 26 453 608,50.

Tabel 2.134. Komoditi Ekspor Non Migas di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021

No	IMPOR MENURUT BARANG	IMPOR MENURUT JENIS BARANG				
		NILAI FOB(US $)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ikan dan Udang	201 829,00	500780	160564	308 242,00	338 371,00
2	Kopi, Teh, Rempah-rempah	36 800,00	96658	184053	-	83 013,00
3	Gandum-ganduman	7 347 000,00	-	5638220	-	-
4	Lak,Getah, dan Damar	86 009,00	-	165918	-	-
5	Lemak & minyak hewan/nabati	2 144 561,00	1693352	1718579	-	2 260 777,00
6	Daging dan Ikan Olahan	132 857,00	97067	-	-	-
7	Olahan dari Buah-Buahan/Sayuran	-	-	-	19 321,00	-
8	Berbagai Makanan Olahan	51 714,00	555	28268	1 202,00	2 021,00
9	Minuman	-	400	-	9 096,00	-
10	Garam, Belerang, Kapur	28 190,00	1648743	278716	-	4 421 127,00
11	Bijih, Kerak dan Abu Logam	-	-	-	-	-
12	Bahan bakar mineral	40 870 392,00	33351625	67269385	-	75 114 579,00
13	Bahan kimia anorganik	1 515 182,00	2041864	3389897	-	1 842 750,00
14	Bahan Kimia Organik	740 789,00	2138660	4540266	-	6 184 018,00
15	Produk Industri Farmasi	4,00	-	1260	-	315,00

No	IMPOR MENURUT BARANG	IMPOR MENURUT JENIS BARANG				
		NILAI FOB(US $)				
		2016	2017	2018	2019	2020
16	Pupuk	498 857,00	165218	-	-	-
17	Sari bahan samak & celup	-	22207	274351	-	-
18	Sabun dan Preparat Pembersih	259 501,00	22329	19403	-	-
19	Perekat, Enzim	-	58014	-	-	-
20	Bahan peledak	2 552 917,00	2616736	5041909	-	-
21	Berbagai produk kimia	1 231 127,00	3702555	152458	-	-
22	Plastik dan Barang dari Plastik	1 354 091,00	2210071	1770413	-	-
23	Karet dan Barang dari Karet	273 621,00	1127883	314915	-	-
24	Barang-barang dari kulit	35 063,00	25305	154187	-	-
25	Kayu, Barang dari Kayu	43 697,00	348127	4924926	-	-
26	Gabus dan barang-Barang Gabus	12 767,00	-	-	-	-
27	Kertas/Karton	6 087,00	321	16885	-	-
28	Buku dan Barang Cetakan	2 404,00	4134	11145	-	-
29	Filamen Buatan	-	-	-	-	-
30	Kapas gumpalan. Tali	2 200,00	76418	417972	-	-
31	Kain tekstil	5 907,00	6332	32473	-	-
32	Pakaian Jadi Bukan Rajutan	258,00	-	139118	-	-
33	Alas Kaki	155,00	1884	5385	-	-
34	Tutup Kepala	4 941,00	-	13907	-	-
35	Payung	-	158	1079	-	-
36	Bulu Unggas	-	1863	102	-	-
37	Benda-benda dari Batu. Gips. dan Semen	1 247 261,00	574007	108666	-	-
38	Produk keramik	708 467,00	2085507	1552165	-	-
39	Kaca dan Barang dari Kaca	9 739,00	6630	3769	-	-
40	Perhiasan/Permata	-	-	12104	-	-
41	Besi dan Baja	2 229 884,00	3332150	2539488	-	-
42	Benda-benda dari Besi dan Baja	6 752 189,00	12328876	9690739	-	-
43	Tembaga	149 165,00	269888	46453	-	-
44	Nikel	-	-	-	-	-
45	Aluminium	130 500,00	198622	17757	-	-
46	Timah Hitam	30 157,00	-	-	-	-
47	Seng	-	-	114	-	-
48	Timah	-	-	-	-	-
49	Logam Dasar Lainnya	356,00	-	-	-	-
50	Perkakas. Perangkat Potong	329 965,00	115716	74029	-	-
51	Berbagai barang logam dasar	2 318 422,00	1336468	1544837	-	-
52	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	78 842 402,00	62896713	32691992	-	-
53	Mesin/peralatan listrik	7 710 734,00	56622117	23023289	-	-
54	Lokomotif dan Peralatan Kereta Api	1 308,00	-	1078	-	-
55	Kendaraan dan Bagiannya	790 097,00	6084658	191909	-	-
56	Kapal laut	-	23185291	498299	-	-
57	Perangkat optik	1 091 349,00	1929691	1505009	-	-
58	Lonceng, Arloji dan Bagiannya	678,00	3195	13239	-	-
59	Perangkat Musik	-	-	6843	-	-

No	IMPOR MENURUT BARANG	IMPOR MENURUT JENIS BARANG				
		NILAI FOB(US $)				
		2016	2017	2018	2019	2020
60	Perabot, penerangan rumah	201 879,00	567491	315765	-	-
61	Mainan	2 192,00	7713	70821	-	-
62	Berbagai barang buatan pabrik	144,00	-	18918	-	-

Sumber: Url https://sulut.bps.go.id/indicator/8/238/1/impor-menurut-jenis-barang.html
Access Time: June 15, 2021, 10:40 pm

Komoditas Impor non migas pada tahun 2020 pada peringkat pertama diduduki oleh Komoditas Bahan Bakar Mineral dengan kontribusi sebesar 75.114.579,00, peringkat kedua diduduki oleh komoditas Bahan Kimia Organik sebesar 6.184.018,00 dan pada peringkat ketiga diduduki oleh Komoditas Garam, Belerang, Kapur dengan kontribusi sebesar 4.421.127,00.

2.3.3.7. Perindustrian



Perkembangan perindustrian Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal. Pertama adalah perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi negara-negara tujuan ekspor Sulawesi Utara sehingga menyebabkan penurunan permintaan atas komoditas industri. Kedua, perang dagang Tiongkok-AS yang berkepanjangan juga turut mempengaruhi permintaan produk-produk hasil Industri Indonesia, apalagi kedua negara tersebut merupakan dua negara besar tujuan ekspor Indonesia.

Pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak industri, baik besar maupun IKM, yang tidak berproduksi atau bahkan gulung tikar. Industri Kecil dan Menengah di Sulawesi Utara masih membutuhkan revitalisasi teknologi agar produktivitas lebih meningkat dan efisien. Revitalisasi teknologi ini diperlukan terutama dalam implementasi industri 4.0. Peningkatan kompetensi pelaku IKM dan penguatan pemberdayaan IKM juga perlu mendapat perhatian lebih, serta pembangunan sentra-sentra IKM di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara perlu segera dipercepat pembangunannya.

Tabel 2.135. Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara 2016-2020

KATEGORI	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	563.182	714.179	856.134	915.377	945.034
Pertambangan dan Penggalian	22.238	12.074	12.986	206.560	62.580
Industri Pengolahan	443.630	450.144	464.798	587.831	548.724
Pengadaan Listrik dan Gas	35.441	77.511	76.249	76.068	67.470
Konstruksi	452.560	593.159	641.423	931.245	848.875
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	5.380.022	5.559.589	5.989.361	6.913.747	6.644.111
Transportasi dan Pergudangan	330.235	330.423	389.378	399.473	353.119

Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	223.847	188.617	213.858	520.098	574.883
Jasa-jasa	356.043	591.399	686.999	710.753	674.537
Bukan Lapangan Usaha	2.262	8.554	5.382	7.842	8.595
TOTAL	**7.809.460**	**8.525.649**	**9.336.568**	**11.268.994**	**10.727.926**

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020

Data menunjukkan bahwa 4 (empat) tahun terakhir kredit UMKM terus meningkat. Jika di lihat menurut sektor tampak bahwa kredit UMKM terbesar di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Di tahun 2020 terbesar di berikan pada sektor perdagangan, Hotel dan Restoran sebanyak 6.644.111 dan untuk jumlah total tahun 2020 sebesar 10.727.926. Adanya pandemi COVID-19, sebagian besar dari UMKM di sektor ini terkena dampak dalam keberlanjutan usahanya.

Selanjutnya, untuk tahun 2020 peningkatan hanya terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan dan Bukan Lapangan Usaha.

Tabel 2.136. Industri Kecil dan Menengah Menurut Cabang Industri di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

No.	Cabang Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja		Nilai Investasi (Rp. 000)	Nilai Produksi (Rp. 000)	Nilai bb/bp (Rp. 000)
			L	P			
1	Pangan	416	298	629	3.426.943	28.055.469	14.144.658
2	Sandang	87	80	83	719.355	1.674.620	1.539.023
3	Kimia dan bahan bangunan (kbb)	259	590	138	4.511.370	26.400.100	12.584.737
4	Logam dan elektronika	143	163	0	972.562	7.234.339	3.465.680
5	Kerajinan	26	25	25	82.435	561.550	177.160
JUMLAH		**913**	**1.156**	**875**	**9.712.665**	**63.926.078**	**31.911.258**

Sumber: Disperindag Provinsi Sulawesi Utara, 2020



Di sisi lain Industri Kecil dan Menengah (IKM) juga perlu mendapat perhatian di masa pemulihan ini. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa nilai produksi terbesar dari IKM adalah untuk cabang industri pangan, industri kimia dan bahan bangunan. Jumlah tenaga kerja masih lebih banyak laki-laki, namun untuk cabang industri sandang dan pangan di dominasi oleh tenaga kerja perempuan.

2.3.3.8. Transmigrasi

Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Transmigrasi pada Sektor Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah merupakan salah satu bagian Pembangunan Daerah. Tujuan Pembangunan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang RI Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian tertulis ”Penyelenggaraan Transmigrasi bertujuan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Transmigran dan Masyarakat Sekitarnya, Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah, serta Memperkokoh

Persatuan dan Kesatuan Bangsa, sedangkan sasaran Penyelenggaraan Transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan memwujudkan integrasi dipermukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya Penyelenggara Transmigrasi diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perwujudan integrasi masyarakat".

Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa Penyelenggaraan Transmigrasi sekarang ini tidak lagi diarahkan pada faktor demografi saja melainkan lebih ditekankan pada upaya mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Di Provinsi Sulawesi Utara Jumlah areal lokasi permukiman transmigrasi di Daerah Provinsi Sulawesi Utara seluas : 15.720,53 Ha yang tersebar di Kabupaten Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.137. Penempatan Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

No.	Kabupaten/ Lokasi	Nomor SK.Pencadangan Areal Gub./Bupati/Walikota	LUAS AREAL (Ha)	TAHUN PENEMPATAN	JUMLAH PENEMPATAN		PENEMPATAN TRANSMIGRASI		POLA TRANSMIGRASI	KETERANGAN
					KK	JIWA	TPA/TRANS. ASAL (KK)	TPS / TRANS. LOKAL (KK)		
Bolaang Mongondow										
1	Werdhi Agung	227/Kpts/1972		1963	349	1,459	349	-	TRANS. UMUM	
2	Kembang Mertha	seluas 3.000 Ha		1964	243	988	243	-	TRANS. UMUM	
3	Tumokang	188 Tahun 1975	3,600	1971 / 1972	60	287	60	-	TRANS. UMUM	
4	Mopuya	seluas 600 Ha		1972 - 1975	500	2,475	500	-	TRANS. UMUM	
5	Mopugat			1973 - 1975	400	1,754	400	-	TRANS. UMUM	
6	Sangkub	101 Tahun 1981 tgl. 27-07-1981	1,100	1981 / 1982	500	2,023	450	50	TRANS. UMUM	
7	Torosik	179 Tahun 1986 tgl. 06-09-1986	3,000	1983 / 1984	300	1,559	-	300	TRANS. LOKAL	
8	Onggunoi	179 Tahun 1986 tgl. 06-09-1986	2,000	1983 / 1984	200	1,049	-	200	TRANS. LOKAL	
9	Pusian	128 Tahun 1992 tgl. 11-05-1992	1,250	1992 / 1993	390	1,745	-	390	TRANS. LOKAL	Bencana Alam Gn. Lokon Meletus
Bolaang Mongondow Timur										
10	Kakenturan	131 Tahun 2000 tgl. 18-08-2000	500	2000	390	1,507	195	195	TRANS. LOKAL	Kerusuhan Malut
11	Motongkad/Balukud	*250 Tahun 2015 tgl. 18-08-2000*	*490.53*	*2016*	*56*	*189*	*5*	*51*	*TRANS. UMUM*	
Minahasa Utara										
12	Serey/Sangkilang	337 Tahun 2001 tgl. 03-11-2001	12	2001	252	978	252	-	TSM	Kerusuhan Malut
Minahasa Tenggara										
13	Betelen	332 Tahun 2002 tgl. 18-11-2002	180	2002 / 2003	100	448	50	50	TRANS. LOKAL	Kerusuhan Malut
14	Pisa	332 Tahun 2002 tgl. 18-11-2002	110	2002 / 2003	75	306	38	37	TRANS. LOKAL	Kerusuhan Malut
15	Lowatag	332 Tahun 2002 tgl. 18-11-2002	75	2002 / 2003	50	297	25	25	TRANS. LOKAL	Kerusuhan Malut
16	Suhuyon	332 Tahun 2002 tgl. 18-11-2002	110	2002 / 2003	75	208	38	37	TRANS. LOKAL	Kerusuhan Malut
17	Wioi / Nasaret	17a Tahun 2007 tgl. 01-08-2007	800	2009/2010/2015	200	654	45	155	TRANS. UMUM	

No.	Kabupaten/ Lokasi	Nomor SK.Pencadangan Areal Gub./Bupati/Walikota	LUAS AREAL (Ha)	TAHUN PENEMPATAN	JUMLAH PENEMPATAN		PENEMPATAN TRANSMIGRASI		POLA TRANSMIGRASI	KETERANGAN
					KK	JIWA	TPA/TRANS. ASAL (KK)	TPS / TRANS. LOKAL (KK)		
Minahasa										
18	Warembungan	155/BM/IX - 2003 tgl. 10-9-2003	3	2003	50	214	-	50	TSM	
Bitung										
19	Danowudu	503/Linmas/1247 tgl. 01-10-2002	5	2004	200	797	200	-	TSM	Kerusuhan Malut
20	Wangurer	503/Linmas/1412 tgl. 03-12-2002	5	2004	150	721	150	-	TSM	Kerusuhan Malut
Bolaang Mongondow										
Utara										
21	Ollot / Goyo	446 Tahun 2015 tgl. 23-11-2015	586	2005/2006/2008	200	860	60	140	TRANS. UMUM	
Minahasa Selatan										
22	Liandok SP3	70 Tahun 2011 tgl. 07-02-2011	887	2013 / 2014	110	439	32	78	TRANS. UMUM	
Bolaang Mongondow										
Selatan										
23	Calon LPT. Mataindo	*47 Tahun 2011 tgl. 23-03-2011*	*1,007*	-	-	-	-	-	*TRANS. UMUM*	***PTB***
J U M L A H			***15,720.53***	**-**	***4,850***	***20,957***	***3,092***	***1,758***	-	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut

Jumlah Transmigran yang masuk di Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 4.850 KK dengan jumlah 20.957 Jiwa yang terbagi atas; Transmigran Penduduk Setempat (TPS) 1.758 KK, dan Transmigran Penduduk Asal (TPA) 3.092 KK. Sedangkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang belum terrealisir sebanyak 3.352.buku/persil. Hak Pengelolaan (HPL) Daerah Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Utara, jumlah areal yang belum di HPL sebanyak 4.745.53 Ha. Untuk Lokasi Permukiman Transmigrasi yang masih dalam tahapan pembinaan sebanyak 3 Lokasi Permukiman Transmigrasi yakni:

1. Lokasi Permukiman Transmigrasi Motongkad/Balukud Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebanyak 56 KK.
2. Lokasi Permukiman Transmigrasi Liandok SP3 Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 110 KK.
3. Lokasi Permukiman Transmigrasi Wioi Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak 200 KK.

2.3.4. FOKUS FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

2.3.4.1. Perencanaan





Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjadi acuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Peran Bappeda dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah untuk memastikan konsistensi dan sinkronisasi antara kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tertuang pada RPJPN, RPJPD, RPJMN, RPJMD, RKP dan RKPD. Untuk itu, penjabaran program khususnya dalam RPJMD ke dalam RKPD merupakan tolok ukur kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.138. Perbandingan Indikator dalam Permendagri 86/2017 dengan RPJMD 2016-2021

Indikator Kinerja Aspek Perencanaan	
Permendagri 86/2017	**RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021**
1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	(1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tepat waktu
2. Tersedianya DokumenPerencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	(2) Kab/Kota yang menyelesaikan dokumen RAD
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah dtetapkan dengan	(3) Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

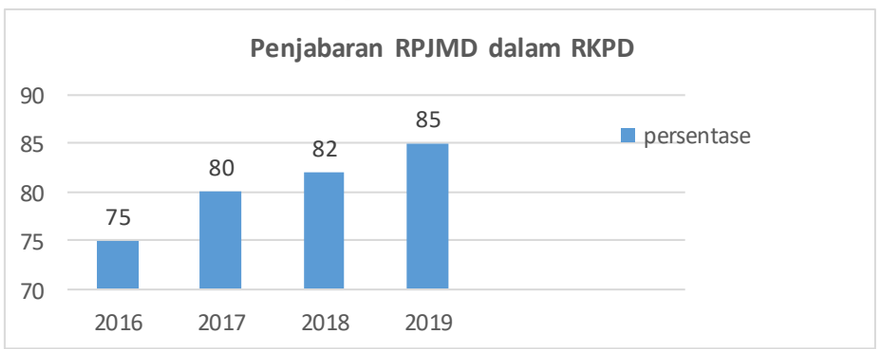
Indikator Kinerja Aspek Perencanaan	
Permendagri 86/2017	**RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021**
PERKADA	
4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	(4) Konsistensi kinerja perencanaan pembangunan dalam RPJMD-RKPD_KUA/PPAS
5. Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	(5) Cakupan hasil Evaluasi pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah
6. Penjabaran Konsistensi program RKPD kedalam APBD	
7. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	

Sumber: Hasil Olahan, 2020

Pemerintah Provinsi telah mengupayakan agar dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tersedia tepat waktu dengan menargetkan per tahun sebanyak 5 (lima) dokumen. Capaian hingga akhir tahun 2021 ditargetkan sebanyak 5 (lima) dokumen perencanaan, yakni dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Dengan demikian kinerja RPJMD tercapai pada bidang perencanaan pembangunan, yaitu pada poin tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu. Sementara penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD, konsistensi kinerja perencanaan pembangunan dalam RPJMD, RKPD, KUA/PPAS, Cakupan hasil evaluasi pencapaian target kinerja perangkat daerah dapat mencapai target.

Evaluasi Kinerja dan pencapaian Pemerintah Provinsi dalam Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD pertahun memperlihatkan persentase yang meningkat dari tahun 2016 (75 persen) hingga tahun 2020 (90 persen). Capaian hingga 2021 ditargetkan hingga 90 persen. Sedangkan konsistensi kinerja perencanaan pembangunan dalam RPJMD – RKPD menunjukkan persentase yang konstan yaitu 90 persen setiap tahun dan khususnya ditahun 2019 melampaui target yaitu 95 persen. Target di akhir tahun periode RPJMD adalah 95 persen. Kenaikan persentase Kinerja penjabaran RPJMD dalm RKPD dapat dilihat pada grafik

Grafik 2.17. Penjabaran RPJMD dalam RKPD



Sumber : Hasil Olahan, 2020

Pemerintah Provinsi juga telah menyusun dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Tahun 2016-2021. Sejak awal, proses perencanaan

pembangunan daerah telah melibatkan masyarakat dalam kapasitas memberikan masukan, saran serta ide pemecahan masalah.

2.3.4.2. Keuangan



Terkait dengan Administrasi Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2016 diawal periode RPJMD 2016-202, sampai diakhir periode RPJMD yaitu Tahun 2021 terus mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini WTP tersebut menunjukkan kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara mampu mempertahankan kinerja yang baik.

Di samping itu kinerja administrasi keuangan didukung dengan optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. Optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui evaluasi manajemen pengelolaan aset yang dilakukan secara periodik sehingga keberadaan aset Provinsi Sulawesi Utara dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD secara signifikan. Upaya-upaya yang ditempuh antara lain melalui pemberdayaan aset dalam bentuk kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga termasuk pendayagunaan aset-aset yang idle; pengamanan aset, melalui sertifikasi, pemasangan label dan patok batas tanah; inventarisasi dan identifikasi nilai aset serta validasi neraca aset; serta penyelesaian kasus/sengketa.

Secara detail kinerja dan capaian administrasi keuangan Provinsi Sulawesi Utara tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.139. Kinerja Keuangan Daerah

Indikator	Target Akhir RPJMD	Target Thn 2019	Capaian Thn 2019	Target Thn 2020	Capaian Thn 2020
Opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah Prov. Sulut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Cakupan jumlah dokumen RAPBD yang disusun tepat waktu	3	3	3	3	3
Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah Antar Tahun Anggaran	Minimal 5%	Minimal 5%	4,16%	5%	(-2,27%)
Persentase Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	34 %	32 %	44,56%	33%	42,98%
Jumlah Potensi Wajib Pajak PKB	823.135,4	732.587	871.766	776.542	697.563
Jumlah Potensi Wajib Pajak PBBKB	10 WAPU	8 WAPU	5 WAPU	9 WAPU	8 WAPU
Jumlah Potensi Wajib Pajak PAP	24 WP	20 WP	871.766 WP	38 WP	43 WP
Jumlah Objek Penerimaan Pendapatan Di Luar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	15 Objek	15 Objek	21 Objek	15 Objek	2 Objek
Jumlah Potensi Wajib	39 WR	39 WR	48 WR	39 WR	30 WP

Indikator	Target Akhir RPJMD	Target Thn 2019	Capaian Thn 2019	Target Thn 2020	Capaian Thn 2020
Retribusi					
Persentase Potensi Wajib Pajak Yang Terpungut	70%	65%	65%	67%	45%
Persentase Potensi Wajib Retribusi Yang Terpungut	100%	100%	100%	100%	90%
Persentase Potensi Objek Penerimaan di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82%	80%	118,75%	82%	97,14%
Rasio Cakupan Sentra Layanan Perpajakan Daerah Terhadap Wajib Pajak Per Hari Yang Dilayani Antar Tahun Anggaran	1:57 (per hari)	1:59 (perhari)	1:59 (perhari)	1:36 (per hari)	1:35 (per hari)
Persentase Tingkat Gangguan dan Sistem	1.0 %	1.6 %	-	1,5%	1,3%
Persentase Tingkat Gangguan Perangkat Keras Teknologi Informasi	1.0 %	1.6 %	-	1,5%	1,3%
Persentase Tingkat Pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Persentase Perangkat Daerah Penghasil Kab./Kota/Provinsi Yang Melaksanakan Hasil Kesepakatan	100 %	100 %	100 %	100%	84,61%

Sumber : Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2021

Tabel 2.140. Capaian Keuangan Daerah 2016 -2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Evaluasi Capaian	
						n-1	n-5
Opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah prov. Sulut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Cakupan jumlah dokumen RAPBD yang disusun tepat waktu	3	3	3	3	3	3	3
Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah Antar Tahun Anggaran	5%	29,34%	1,53%	3,96%	(-2,27%)	(-6,23%)	(-7.27%)
Persentase Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	30%	42,09%	44,43%	44.56 %	42,98%	(-1.58%)	12.98%

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Evaluasi Capaian	
						n-1	n-5
Jumlah Potensi Wajib Pajak PKB	601.573	657. 555	628.358	720.223	697.563	-22.66	95.99
Jumlah Potensi Wajib Pajak PBBKB	4 WAPU	7 WAPU	6 WAPU	5 WAPU	8 WAPU	3	4
Jumlah Potensi Wajib Pajak PAP	15 WP	16 WP	20 WP	38 WP	43 WP	5	28
Jumlah Objek Penerimaan Pendapatan Di Luar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	14 objek	15 Objek	15 Objek	21 objek	24 objek	3	10
Jumlah Potensi Wajib Retribusi	24 WR	31 WR	41 WR	48 WR	30 WR	-18	6
Persentase Potensi Wajib Pajak Yang Terpungut	55%	63%	60.20%	65%	45%	-20%	-10%
Persentase Potensi Wajib Retribusi Yang Terpungut	100%	100%	100%	100 %	90%	-10%	-10%
Persentase Potensi Objek Penerimaan Di Luar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	0	0
Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	80,82%	95%	89,39 %	97,14%	7.75%	17.14%
Rasio Cakupan Sentra Layanan Perpajakan Daerah Terhadap Wajib Pajak Per Hari Yang Dilayani Antar Tahun Anggaran	1:66 (per hari)	1:60 (per hari)	1:41 (per hari)	1:36 (per hari)	1:35 (per hari)	1:1	1:31
Persentase Tingkat Gangguan Dan Sistem	2%	2,48%	1,9%	1,6%	1,3%	-0,3%	-0,7%
Persentase Tingkat Gangguan Perangkat Keras Teknologi Informasi	2%	2,12%	2,4%	1,6%	1,5%	0,1%	-0,5%
Persentase Tingkat Pelaksanaan SOP Dan Standar Pelayanan	90%	100%	100%	100 %	100%	0%	10%
Persentase	90%	100%	100%	100 %	100%	0%	10%

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Evaluasi Capaian	
						n-1	n-5
Perangkat Daerah Penghasil Kab./Kota/Prov. Yang Melaksanakan Hasil Kesepakatan							

Sumber : Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2021

2.3.4.3. Kepegawaian

Berdisiplin merupakan karakter ASN yang diharap tumbuh dan dipraktikkan oleh birokrasi. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjelaskan bahwa reformasi birokrasi di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah mendesak demi percepatan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan reformasi birokrasi tak lain untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur negara.

Tabel 2.141. Persentase ASN dengan Disiplin Tinggi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020

Indikator	Persentase ASN dengan Disiplin Tinggi Provinsi Sulawesi Utara				Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap	
	2017	2018	2019	2020	n-1	n-4
ASN dengan Disiplin Tinggi	95%	95%	93.31%	93,94%	0.63%	-1.06%

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah

Inilah konteks besar pengukuran persentase ASN dengan disiplin kerja tinggi. Persentase ini dapat dilihat dalam tabel 2.99. Tabel di atas memperlihatkan persentase ASN dengan disiplin tinggi. Capaian tahun 2019 (93,31 persen) mengalami penurunan dari baik capaian tahun 2017 (95 persen) maupun tahun 2018 (95 persen), yakni sebesar -1,69 persen. Namun, penurunan ini tetap melampaui target yang ditetapkan oleh RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021. Target 2017 (82 persen), 2018 (85 persen), dan 2019 (90 persen) dilewati oleh capaian setiap tahun data, yang capaiannya terpampang dalam tabel di atas.



Berikut ini akan disajikan tabel yang memperlihatkan cakupan pejabat struktural dan fungsional menduduki jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tentunya, penempatan pejabat berdasarkan ANJAB dan ABK, bahkan evaluasi jabatan akan menjamin kinerja bermutu pejabat yang bersangkutan. Kualitas pejabat yang demikian akan

mempercepat pencapaian reformasi birokrasi.

Tabel 2.142. Cakupan Pejabat Struktural dan Fungsional Menduduki Jabatan sesuai Anjab dan ABK

Indikator	Cakupan Pejabat Struktural dan Fungsional Menduduki Jabatan sesuai Anjab dan ABK				Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap	
	2017	2018	2019	2020	n-1	n-4
Pejabat Struktural dan Fungsional Menduduki Jabatan sesuai Anjab dan ABK	80,27%	83,89%	91,66%	92%	0,34%	11,73%

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah, 2021

Tabel di atas menunjukkan progres yang konsisten dalam cakupan pejabat struktural dan fungsional menduduki jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja sejak tahun 2017-2020. Jika capaian tahun 2020 (92 persen) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019 = 92 persen), maka ada kenaikan sebesar 0,34 persen. Sedangkan, kenaikan sebesar 11,71 persen, terungkap dengan membandingkan capaian tahun 2020 dengan capaian tahun 2017.

Tabel berikutnya akan menunjukkan cakupan layanan baku mutu kepegawaian. Dalam pelayanan prima kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan baku. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan. Di bawah ini, cakupan layanan baku mutu kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi Utara dideskripsikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.143. Cakupan Layanan Baku Mutu Kepegawaian Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020

Indikator	Cakupan Layanan Baku Mutu Kepegawaian				Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap	
	2017	2018	2019	2020	n-1	n-4
Layanan Baku Mutu Kepegawaian	86,74%	90%	95%	96%	1%	9.26%

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah, 2021

Capaian cakupan layanan baku mutu kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam tabel ini memperlihatkan peningkatan. Capaian tahun 2020 (96 persen) mengalami kenaikan sebesar 1 persen ketika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 = 95 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (86,74 persen), capaian tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 9,26 persen.

2.3.4.4. Pendidikan dan Pelatihan



Tujuan diklat menyasar pengembangan kompetensi ASN baik yang mencakup sikap/karakter dan pengetahuan maupun keterampilan dan kepemimpinan. *Outcome* yang diharapkan tak lain adalah tercapainya reformasi birokrasi dan pelayanan prima terhadap masyarakat. Di bawah ini, tabel yang berisi indikator dan capaian kinerja pembangunan daerah bidang pendidikan dan latihan akan disajikan.

Tabel 2.144. Capaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020

Indikator	Cakupan Layanan Baku Mutu Kepegawaian				Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap	
	2017	2018	2019	2020	n-1	n-4
Persentase alumni diklat kepemimpinan yang menerapkan Inovasi/ proyek perubahan	85%	90%	90%	0%	-90%	-85%
Persentase peserta diklat kompetensi manajerial lulus dengan kategori sangat memuaskan	80%	85%	80 %	36,69%	-43.31%	-43.31%
Persentase ASN menduduki jabatan struktural telah mengikuti diklat manajerial sesuai jabatan yang diampu	80%	85%	90%	90%	0%	10%
Persentase instansi/kab-kota pengirim puas terhadap pelaksanaan diklat kepemimpinan	85%	85%	85 %	0%	-85%	-85%
Persentase peserta diklat kompetensi teknis inti lulus dengan kategori sangat memuaskan	75%	75%	90%	0%	-90%	-75%
Persentase peserta diklat kompetensi teknis umum dan fungsional lulus dengan kategori sangat memuaskan	25%	75%	90 %	0%	-90%	-25%
Jumlah karya tulis di bidang Administrasi dan pengelolaan kelembagaan yang Terpublikasi di media ilmiah/ Publikasi nasional	-	-	22	0	-22	-

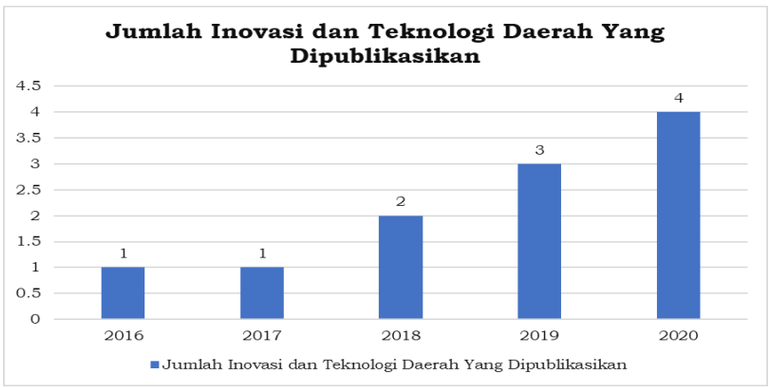
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah, 2021

Tampilan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata indikator mengalami kenaikan dari tahun 2017-2019, kecuali indikator persentase peserta diklat kompetensi manajerial lulus dengan kategori sangat memuaskan. Capaian indikator ini pada tahun 2019 (80 persen) mengalami penurunan sebesar -5 persen dari tahun sebelumnya 2018 (85 persen).

Perbandingan capaian untuk indikator jumlah karya tulis di bidang administrasi dan pengelolaan kelembagaan yang terpublikasi di media ilmiah/publikasi nasional tidak bisa dilakukan karena capaian tahun 2017-2018 tidak teridentifikasi.

2.3.4.5. Penelitian dan Pengembangan

Grafik 2.18. Jumlah Inovasi dan Teknologi Daerah yang Dipublikasi

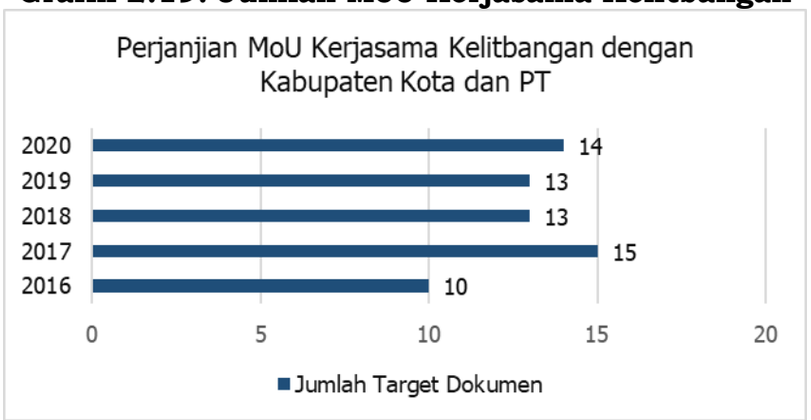


Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021



Kinerja terkait rekomendasi hasil kajian dan penelitian dokumen perencanaan daerah yang kemudian ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah sebanyak 23 dokumen rekomendasi pertahun mulai tahun 2017, dan khususnya di tahun 2019 melampaui target yaitu 42 dokumen. Sementara untuk dokumen terkait pengembangan inovasi dan teknologi daerah yang dipublikasikan meningkat secara eksponensial hingga mencapai target di tahun 2021 sebanyak 16 dokumen.

Grafik 2.19. Jumlah MoU Kerjasama Kelitbangan



Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Pemerintah Daerah juga dalam Penelitian dan Pengembangan melakukan sejumlah perjanjian MoU kerjasama kelitbangan dengan Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi (PT) yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan terkait pembangunan daerah Sulawesi Utara.

2.3.4.6. Pengawasan

Output dari sistem pengawasan yang baik tercermin dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Berikut adalah nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2019

Tabel 2.145. Nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B

Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Utara konsisten “B”. Rentang nilai yang diperoleh berarti 60-70 poin.

2.3.4.7. Kesekretariatan DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD diukur dari dukungan penyelenggaraan administrasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang meliputi: Perda yang ditetapkan, pelaksaan reses, kunjungan kerja dan peninjauan lapangan, bimtek yang diikuti oleh anggota DPRD serta Rapat Paripurna DPRD dan Rapat Dengar Pendapat Komisi DPRD. Data terkait pencapaian indikator kinerja Sekretariat DPRD tahun 2016 – 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.146. Jumlah Perda Dalam Penetapan Propemperda
Tahun 2016 – 2020 di Provinsi Sulawesi Utara

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Perda yang dibahas	18	23	24	22	16

Sumber : Sekretariat DPRD Prov. Sulawesi Utara, 2021

Tabel 2.147. Persentase Perda yang ditetapkan
Tahun 2016 – 2020 DPRD Provinsi Sulawesi Utara

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Capaian Perda Yang Ditetapkan	9 (50%)	13 (56%)	10 (41%)	8 (36%)	3

Sumber : Sekretariat DPRD Prov. Sulawesi Utara, 2021

Tabel 2.148. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan DPRD Tahun 2016 – 2020

NO.	URAIAN	JUMLAH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DPRD									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Jumlah Reses	3	3 (100%)	3	3 (100%)	3	3 (100%)	3	2 (100%)	3	3 (100%)
2.	Jumlah Kunjungan Kerja Dan Peninjauan Lapangan DPRD	96	72 (75%)	96	85 (88%)	96	92 (95%)	96	98 (97%)	96	70 (72)
3.	Jumlah Pendalaman Tugas DPRD	2	2 (100%)	2	2 (100%)	2	2 (100%)	2	2 (100%)	2	1 (50%)
4.	Rapat Paripurna DPRD	24	24 (100%)	24	28 (116%)	24	28 (104%)	24	21 (87%)	24	19 (79%)
5.	Rapat Dengar Pendapat Komisi	96	85 (100%)	96	92 (95%)	96	87 (90%)	96	90 (93%)	96	72 (75%)

Sumber : Sekretariat DPRD Prov. Sulawesi Utara, 2021

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga perkapita menjadi salah satu indikator utama kemampuan masyarakat untuk pangan dan non pangan. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat provinsi Sulawesi Utara, pada tahun 2017 lebih besar persentase pengeluaran untuk pangan setiap bulannya, namun sejak tahun 2018 - 2020 pola konsumsi non pangan menjadi lebih tinggi dari konsumsi pangan.

Selanjutnya secara detail pola pengeluaran konsumsi per kapita menurut kabupaten kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.149. Persentase Konsumsi RT Pangan Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Utara 2017-2020

Kabupaten/Kota	Persentase Pengeluaran Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Daerah Perdesaan dan Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Persen)			
	Pangan			
	2017	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	58,81	53,88	52,62	53,66
Minahasa	56,14	46,24	50,67	50,26
Kepulauan Sangihe	59,41	54,67	56,67	52,64
Kepulauan Talaud	60,20	53,69	52,98	49,07
Minahasa Selatan	56,31	53,23	52,37	56,18
Minahasa Utara	51,27	52,19	50,74	50,39
Bolaang Mongondow Utara	56,82	55,11	59,36	55,00
Kepulauan Sitaro	58,57	53,45	54,83	54,15
Minahasa Tenggara	60,02	57,20	52,30	53,05
Bolaang Mongondow Selatan	61,93	55,20	51,87	55,02
Bolaang Mongondow Timur	56,14	53,01	50,57	50,90
Kota Manado	49,24	39,98	43,14	42,68

Kabupaten/Kota	Persentase Pengeluaran Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Daerah Perdesaan dan Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Persen)			
	Pangan			
	2017	2018	2019	2020
Kota Bitung	53,31	53,27	51,73	49,92
Kota Tomohon	47,97	43,67	44,51	40,97
Kota Kotamobagu	48,67	45,81	45,30	44,96
Sulawesi Utara	**53,75**	**48,26**	**49,36**	**48,69**

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Data menunjukkan bahwa pola konsumsi per bulan di beberapa Kabupaten/Kota sejak 2017 sampai 2020 tetap didominasi untuk pangan seperti kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan SITARO, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kota Bitung. Konsumsi pangan tertinggi tahun 2020 terdapat di Kabupaten Minahasa Selatan dan terendah di Kota Tomohon.

Tabel 2.150. Persentase Konsumsi RT Non Pangan Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Utara 2017-2020

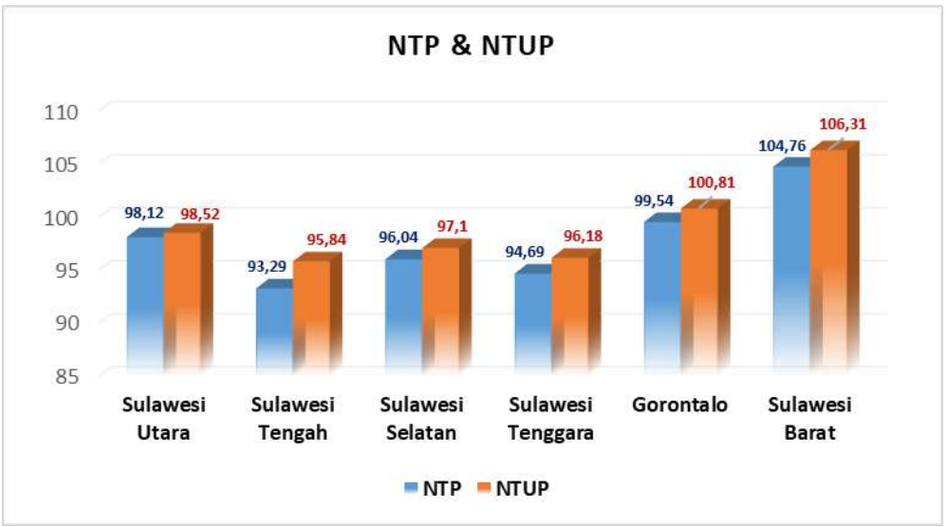
Kabupaten/Kota	Persentase Pengeluaran Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Daerah Perdesaan dan Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Persen)			
	Non Pangan			
	2017	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	41,19	46,11	47,38	46,34
Minahasa	43,86	43,76	49,33	49,74
Kepulauan Sangihe	40,59	45,33	43,33	47,36
Kepulauan Talaud	39,80	46,31	47,02	50,93
Minahasa Selatan	43,69	46,77	47,63	43,82
Minahasa Utara	48,73	47,81	49,26	49,61
Bolaang Mongondow Utara	43,18	44,89	40,64	45,00
Kepulauan Sitaro	41,43	46,55	45,17	45,85
Minahasa Tenggara	39,98	42,80	47,70	46,95
Bolaang Mongondow Selatan	38,07	44,80	48,13	44,98
Bolaang Mongondow Timur	43,86	46,99	49,43	49,10
Kota Manado	50,76	60,02	56,86	57,32
Kota Bitung	46,69	46,73	48,27	50,08
Kota Tomohon	52,03	56,33	55,49	59,03
Kota Kotamobagu	51,33	54,19	54,71	55,04
Sulawesi Utara	**46,25**	**51,74**	**50,64**	**51,31**

Sumber: BPS Sulut, 2021

B. Nilai Tukar Petani

Untuk hasil penghitungan terhadap nilai tukar petani (NTP) Provinsi Sulawesi Utara, dapat disajikan ke dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 2.20. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Juli 2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020

Jika dilihat perbandingannya dengan provinsi lain yang ada di Sulawesi menunjukkan bahwa NTP dan NTUP di Provinsi Sulawesi Utara masih berada di bawah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Barat. Dengan besaran NTUP (98,12) lebih besar dari NTP (98,12).

Tabel 2.151. Nilai Tukar Petani Prov. Sulawesi Utara 2015-2020

Bulanan tanpa Tahunan	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	97,76	99,79	92,89	93,50	96,38	103,11
Februari	98,17	99,02	91,41	91,15	95,85	103,87
Maret	98,92	97,39	89,93	91,92	95,64	104,59
April	96,66	97,02	90,28	91,37	96,35	104,20
Mei	94,60	97,02	90,84	92,14	94,49	105,04
Juni	92,81	95,89	91,32	92,90	95,09	104,76
Juli	93,22	95,10	89,55	92,86	94,49	105,50
Agustus	94,64	95,69	90,30	93,55	95,74	105,32
September	95,95	94,84	90,82	94,32	96,15	104,41
Oktober	97,15	93,41	92,20	96,01	95,57	105,72
November	97,70	93,32	92,21	95,98	94,86	105,59
Desember	97,81	93,34	93,25	96,52	103,33	105,72

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021





2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Ketaatan Terhadap RTRW

Pembangunan terkait aspek keruangan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Utara. RTRW dipandang sangat penting dalam penyusunan RPJMD Provinsi. Adanya perubahan RPJMD didasarkan pada Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2018 menjadi 2016-2021. Proses penilaian ketaaan terhadap RTRW direalisasikan dengan sikronisasi indikasi program RTRW dalam RPJMD yang dilakukan dengan menghitung realisasi RTRW terhadap rencana peruntukan RTRW.

Tabel 2.152. Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang/RTRW Tahun 2016 s.d 2020 Provinsi Sulawesi Utara

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi RTRW	n/a	0,866	0,938	0,948	0,948
2	Rencana Peruntukan RTRW	1	1	1	1	1
3	Rasio (1/2)	n/a	0,866	0,938	0,948	0,948

Keterangan**:** Nilai 0 = belum terealisasi atau program belum terakomodir dalam RPJMD-P. Nilai 1 = Terealisasi dan tahun pelaksanaan sesuai, program terakomodir dalam RPJMD-P
Sumber: RKPD Provinsi Sulut 2021

Ketaatan terhadap RTRW selama 4 tahun terakhir menunjukkan kestabilan, dimana ada 1 pelanggaran RTRW di tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap tata ruang yang ada dan adanya transparansi dalam informasi mengenai tata ruang dalam proses perijinan. Pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi telah terakomodir dalam usulan diskresi tata ruang.

B. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah yang produktif seperti wilayah perkotaan dan perdesaan di provinsi Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan, perkembangan yang pesat yaitu semua wilayah perkotaan (Manado, Bitung, Tomohon dan Kotamobagu). Juga ibukota kabupaten seperti Airmadidi, Amurang dan Melonguane.

Selama kurun waktu 15 tahun perkembangan wilayah mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya pemanfaatan ruang. Perubahan struktur tata ruang baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan infrastruktur baik di tingkat lokal, regional maupun lintas provinsi.

Tabel 2.153. Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2016 s.d 2020 Provinsi Sulawesi Utara

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Wilayah Produktif	-	-	-	65,551,00	65,551,00
2	Luas seluruh wilayah budidaya	-	-	-	620,399,37	620,399,37
3	Rasio (1/2)				0,11	0,11

Sumber: Bappeda Provinsi Sulut, 2020

Tabel 2.154. Rasio Luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budaya	(Rasio)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kabupaten			
1	Bolaang Mongondow	24,399.00	43,136,12	0,57
2	Minahasa	7,534,00	91,514,39	0,08
3	Kepulauan Sangihe	131,00	36,299,06	0,00
4	Kepulauan Talaud	585,00	81,966,98	0,01
5	Minahasa Selatan	5,749,00	84,678,78	0,07
6	Minahasa Utara	3,638	28,992,67	0,13
7	Bolaang Mongondow Utara	5,635,00	46,490,98	0,12
8	Siau Tagulandang Sitaro	8,380,00	27,441,83	0,31
9	Minahasa Tenggara	3,235,00	47,628,90	0,07
10	Bolaang Mongondow Selatan	2,069,00	62,874,72	0,03
11	Bolaang Mongondow Timur	1,657,00	43,870,23	0,04
	Kota			
1	Kota Manado	0,00	15,565,00	0,00
2	Kota Bitung	79,00	16,202,00	0,00
3	Kota Tomohon	831,00	11,387,60	0,07
4	Kota Kotamobagu	1,629,00	6,081,00	0,27
	Sulawesi Utara	65,551,00	620,399,37	0,11

Sumber: Bappeda Provinsi Sulut, 2020

Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang / RTRW Provinsi Sulawesi Utara terdapat dalam dokumen RPJMD Perubahan 2016-2021 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.155. Rasio Ketaatan terhadap Tata Ruang Provinsi Sulawesi Utara

No.	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi s/d 2020	Ket.
1	Kesesuaian RTRW terhadap dokumen Perencanaan	100%	86,6 %	Dokumen RPJMD

Sumber: Bappeda Provinsi Sulut, 2021 (diolah)

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

A. Angka Kriminalitas

Penanganan angka kriminalitas berhubungan erat dengan penciptaan stabilitas ditengah masyarakat dan menjamin ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Tabel di bawah ini akan memperlihatkan jumlah kriminalitas yang tertangani Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2020.

Tabel 2.156. Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020

Indikator	Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi Utara				Evaluasi Capaian Tahun 2020 (n) terhadap	
	2017	2018	2019	2020	n-1	n-3
Jumlah Kriminalitas yang Tertangani	7534	7037	4180	7140	2960	-394

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021

B. Jumlah Demonstrasi

Suasana iklim berinvestasi di topang oleh kemudahan perijinan yang ditawarkan pemerintah daerah, namun keamanan dan kenyamanan masih perlu diperhatikan di masa yang akan datang (sesuai dengan hasil indikator kinerja yang diperoleh).

Tabel 2.157. Kinerja Iklim Berinvestasi

Indikator	Target Akhir RPJMD	Target Thn 2019	Capaian Thn 2019	Target Thn 2020	Capaian Thn 2020
Jumlah Demo	15	15	91	15	70
Kemudahan Perijinan (Lama Proses perijinan)	4 hari	4 hari	4 hari	3-4 hari	3-5 hari

Sumber: Bappeda Provinsi Sulut, 2021

Lama proses perijinan di Provinsi Sulawesi Utara adalah 4 hari tentunya dengan adanya sistem *online* dalam perijinan akan lebih memudahkan proses perijinan sesuai kewenangan daerah. Ternyata indikator kinerja lainnya yang harus tersedia sebagai penopang iklim berinvestasi di Provinsi Sulawesi Utara adalah jumlah dan macam pajak daerah serta jumlah Perda yang mendukung investasi daerah.

Untuk melihat gambaran Pencapaian Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah, dapat di lihat pada **Lampiran II** dan **Lampiran III** buku RPJMD ini.

2.5. EVALUASI PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (TPB/*SDG's*) DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda internasional yang merupakan kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs), dimana MDGs dicetuskan pada tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2015. SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Pada mulanya, konsep SDGs diusulkan oleh Kolombia dalam *government retreat* yang diadakan oleh Indonesia pada Juli 2011 di Solo sebagai persiapan konferensi Rio+20. Usulan ini kemudian dibawa oleh Departemen Informasi Publik PBB pada *64th NGOs Conference* pada September 2011 dan menghasilkan 17 usulan tujuan berkelanjutan serta target-target terkait. Usulan ini juga banyak didiskusikan pada konferensi Rio+20, hingga menghasilkan suatu resolusi yang dikenal dengan nama *"The Future We Want"*. Disepakati pula dalam konferensi bahwa pembentukan SDGs harus berorientasi pada tindakan, ringkas dan mudah dikomunikasikan, serta dapat diaplikasikan secara universal oleh

berbagai negara dengan mempertimbangkan kapasitas, tingkat pembangunan, serta menghormati kebijakan dan prioritas setiap negara.

TPB/SDG's terdiri atas 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet Bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

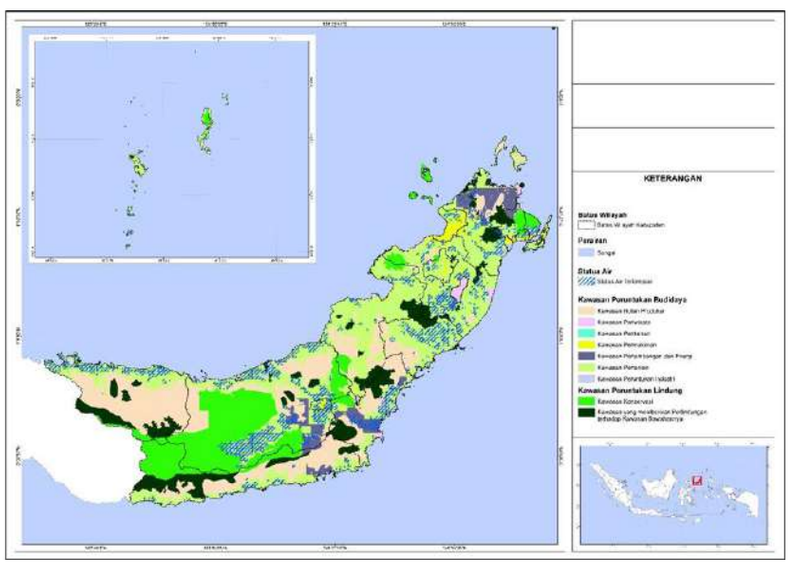
Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB) yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencan Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 – 2021. Adapun capaian pelaksanaan TPB di Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat dalam **Lampiran IV** buku RPJMD ini.

2.6. KAJIAN MUATAN KLHS: DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI UTARA

A. Skenario Status Daya Dukung Air

Berdasarkan hasil analisis daya dukung air dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Provinsi Sulawesi Utara berada pada 88% belum melampaui untuk air dan 12% Sudah melampaui
2. Pada rencana pola ruang Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Utara penurunan kebutuhan air pada lahan pertanian karena pada 134.465,11 Ha status air terlampaui berada pada lahan pertanian (Kawasan tanaman pangan, Kawasan hutan produksi, dan Kawasan Perkebunan)
3. Pertambahan penduduk dengan mengikuti tren pertumbuhan saat ini yang akan meningkatkan kebutuhan air untuk kebutuhan rumah tangga.
4. Berdasarkan data status air di Provinsi Sulawesi Utara saat ini kondisi kebutuhan air masih surplus.



Gambar 2.10. Status Daya Dukung Air dan Pola Ruang Provinsi Sulawesi Utara

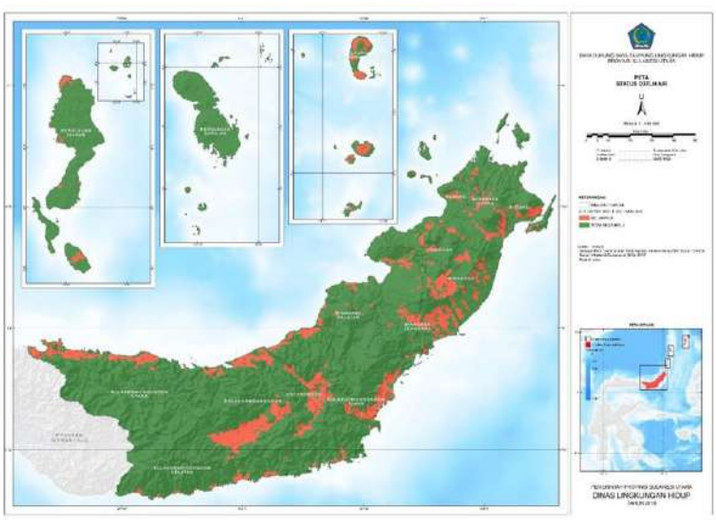
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Hasil Analisis 2021

Berikut adalah hasil perhitungan KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dengan pertimbangan Pola ruang Draft revisi RTRW Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.158. Skenario Muatan KLHS Terhadap Status Daya Dukung Air di Provinsi Sulawesi Utara

KABUPATEN/KOTA	MELAMPAUI	TIDAK MELAMPAUI	TOTAL LUAS LAHAN
BTUNG	5,780,34	27,208,96	32,989.30
BOLAANG MONGONDOW SELATAN	6,552.64	168,240,59	174,793.23
BOLAANG MONGONDOW TIMUR	14,853.47	71,654.90	86,508.37
BOLAANG MONGONDOW UTARA	16,798.04	147,280.59	164,078.63
BOLAANG MONGONDOW	51,596.66	279,750.51	331,347.17
KEPULAUAN SANGIHE	-	60,824.96	60,824.96
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO	8,018.27	13,839.97	21,858.24
KEPULAUAN TALAUD	4,019.15	97,529.39	101,548.54
KOTAMOBAGU	5,726.01	5,160.39	10,886.40
MANADO	2,138.21	14,097.89	16,236.10
MINAHASA	23,247.01	89,640.95	112,887.96
MINAHASA SELATAN	6,780.27	138,845.56	145,625.83
MINAHASA TENGGARA	16,768.03	58,543.63	75,311.66
MINAHASA UTARA	10,163.44	90,155.34	100,318.78
TOMOHON	1,533.78	15,376.22	16,910.00
TOTAL LUAS LAHAN	**173,975.32**	**1,278,149.85**	**1,452,125.17**
PERSENTASE	**12%**	**88%**	**100%**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Hasil Analisis 2021



Gambar 2.11. Status Daya Dukung Air Provinsi Sulawesi Utara
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Hasil Analisis 2021

Tabel 2.159. Skenario Muatan KLHS Terhadap Status Daya Dukung Air di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan lokasi di Kabupaten dan Kota

KABUPAEN/KOTA	MELAMPAUI	TIDAK MELAMPAUI	TOTAL LUAS LAHA (ha)
Kawasan Peruntukan Budidaya	**165,905.76**	**878,296.06**	**1,044,202.82**
Kabupaten Bolaang Mongondow	48,727.15	135,770.08	184,497.23
Kabupaten Bolaang Mongondow selatan	6,497.99	89,958.20	96,456.19
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	14,811.44	50,209.56	65,021.01
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	16,316.37	113,273,39	129,589.76
Kabupaten Sangihe	-	50,849.86	50,849.86
Kabupaten Siau Tagulandang Biaro	6,059.31	11,974.61	18,033.92
Kabupaten Kepulauan Talaud	4,019.15	57,535.53	61,554.68
Kabupaten Minahasa	22,864.35	80,268.93	103,133.28
Kabupaten Minahasa Selatan	6,507.91	116,390.54	122,898.46
Kabupaten Minahasa Tenggara	16,695.64	51,985.07	68,680.72
Kabupaten Minahasa Utara	9,658.25	74,409.80	84,068.05
Kota Bitung	4,689.56	14,258.19	18,947.75
Kota Kotamobagu	5,627.26	4,777.07	10,408.32
Kota Manado	1,898.61	12,314.47	14,213.08
Kota Tomohon	1,533.78	14,320/75	15,854.52
Kawasan Peruntukan Lindung	**8,068.56**	**399,853.79**	**407,922.34**
Kabupaten Bolaang Mongondow	2,869.51	143,980.44	146,849.95
Kabupaten Bolaang Mongondow selatan	54.65	78,282.39	78,337.04
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	42.02	21,445.34	231,487.36
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	481.67	34,007.20	34,488.87
Kabupaten Sangihe	-	9,975.11	9,975.11
Kabupaten Siau Tagulandang Biaro	1,958.96	1,865.36	3,824.32
Kabupaten Kepulauan Talaud	-	39,993.85	39,993.85
Kabupaten Minahasa	382.66	9,372.02	9,754.68
Kabupaten Minahasa Selatan	272.36	22,455.02	22,727.38
Kabupaten Minahasa Tenggara	72.38	6,558.56	6,630.94
Kabupaten Minahasa Utara	505.19	15,745.53	16,250.73
Kota Bitung	1,090.78	12,950.77	14,041.55
Kota Kotamobagu	98.76	383.32	482.08
Kota Manado	239.60	1,783.42	2,023.02
Kota Tomohon	-	1,055.47	1,055.47
Total Luas Lahan	**173,975.32**	**1,278,149.85**	**1,452,125.17**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Hasil Analisis 2021

Dengan demikian daya dukung lingkungan hidup dalam menyediakan air bagi kebutuhan hidup layak penduduk Provinsi Sulawesi Utara:

- ❖ Perhitungan daya dukung air sampai dengan menggunakan asumsi ketersediaan air permukaan tetap dan terjadi peningkatan kebutuhan karena jumlah penduduk. Dengan asumsi di atas maka pada tahun 2021 Hal ini menjadi disimpulkan bahwa untuk daya dukung air permukaan masih dalam posisi surplus.
- ❖ Jika dibandingkan dengan kebutuhan air dirinci menurut kebutuhan sosial, maka surplus pada kondisi tidak melampaui 88%.
- ❖ Kecamatan yang berada pada status data dukung melampaui perhatikan area yang di arsir pada gambar 5.2 berada pada 14 Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara Kecuali Kabupaten Kepulauan Sangihe

B. Skenario Status Daya Dukung Pangan

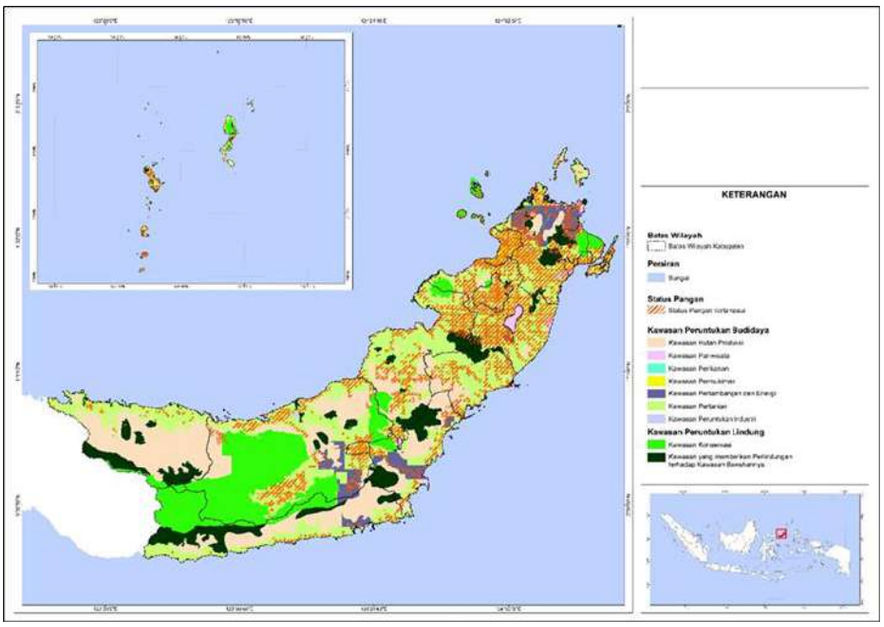
KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Utara di overlay dengan Pola ruang Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Utara memperkirakan pangan beras akan surplus sampai dengan tahun 2021 status daya dukung pangan Provinsi Sulawesi Utara tersisa 69% belum terlampaui dan 31% sudah terlampaui.

1. Skenario yang dibangun dalam daya dukung pangan harus adanya peningkatan teknologi dalam mengelola beras menjadi lebih efisien dan
2. Adanya tren penurunan konsumsi beras per orang per tahun akibat meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan.

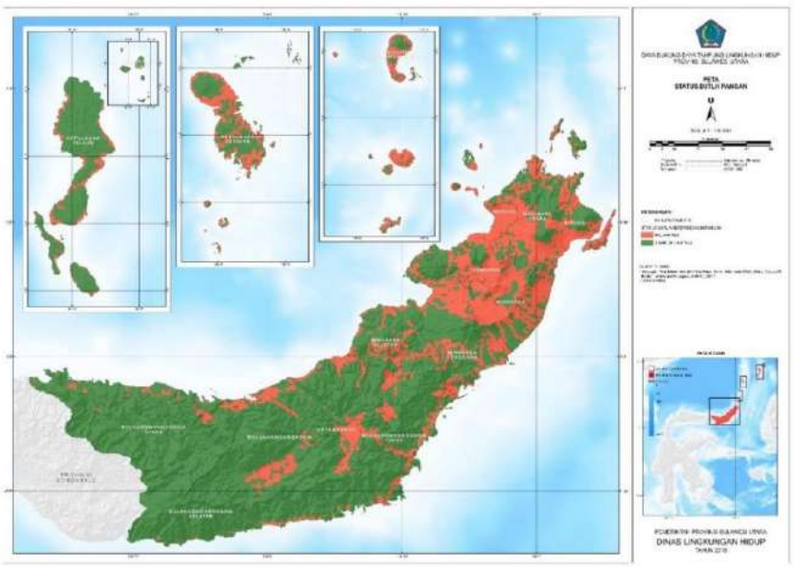
Tabel 2.160. Skenario Muatan KLHS Status Daya Tampung Pangan terhadap Pola Ruang RTRW Provinsi Sulawesi Utara

POLA RUANG PROVINSI SULAWESI UTARA	MELAMPAUI	TIDAK MEAMPAUI	TOTAL LUAS LAHAN (HA)
Kawasan Peruntukan Budaya	**750,945.36**	**1.193,188,70**	**1.944,134,07**
Hutan Produksi	9,257.57	108.506,46	117.764,04
Hutan Produksi Konversi	85.61	19.946,72	20.032,33
Hutan Produksi Terbatas	25,996.23	309.739,49	335.735,72
Kawasan Energi	11.476,58	599.75	12.076,33
Kawasan Pariwisata	18.076,69	19.895,79	37.972,48
Kawasan perikanan	5.675,02	1.378,01	7.053,04
Kawasan Pemukiman	226.354,99	79.410,10	305.765,09
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	6.139,19	342.59	6.481,77
Kawasan Pertambangan	30.627,53	66.756,09	97.383,61
Kawasan Pertanian	410.173,86	583.388,05	993.561,91
Kawasan Peruntukan Industri	7.082,10	3.225,65	10.307,75
Kawasan Peruntukan Lindung Provinsi	**71.260,06**	**613.105,05**	**684.365,11**
Cagar Alam Darat	3.407,53	36.491,78	39.899,31
Hutan Lindung	49.985,28	271.426,63	321.411,91
Kawasan Ekosistem Mangrove	10.390,51	15.240,00	25.630,51
Suaka Margasatwa Darat	310.04	54.822,89	55.132,92
Taman Hutan Raya	677.51	456.34	1.133,86
Taman Nasional Darat	4.619.09	226.173,78	230.792,86
Taman Nasonal Laut	1.014,80	868.24	1.883,05
Taman Wisata Alam/Hutan Wisata Darat	855.30	7.625,39	8.480,69
Total Luas Lahan (Ha)	**822.205,43**	**1.806,293,75**	**2.628,499.18**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Hasil Analisis 2021



Gambar 2.12. Status Daya Dukung Pangan Provinsi Sulawesi Utara
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Hasil Analisis 2021



Gambar 2.13. Skenario Muatan KLHS Status Daya Dukung Pangan terhadap Pola Ruang RTRW Provinsi Sulawesi Utara
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Hasil Analisis 2021

Tabel 2.161. Skenario Muatan KLHS Terhadap Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten/Kota

KABUPAEN/KOTA	MELAMPAUI	TIDAK MELAMPAUI	TOTAL LUAS LAHAN
BTUNG	48.576,75	22.996,13	71.572,88
BOLAANG MONGONDOW SELATAN	12.093,59	247.402,86	259.496,44
BOLAANG MONGONDOW TIMUR	29.847,72	126.239,54	156.087,26
BOLAANG MONGONDOW UTARA	6.496,17	251.614,58	258.110,74
BOLAANG MONGONDOW	84.586,43	451.417,76	536.004,19
KEPULAUAN SANGIHE	56.960,20	68.866,96	125.827,16
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO	39.022,03	15.098,96	54.120,99

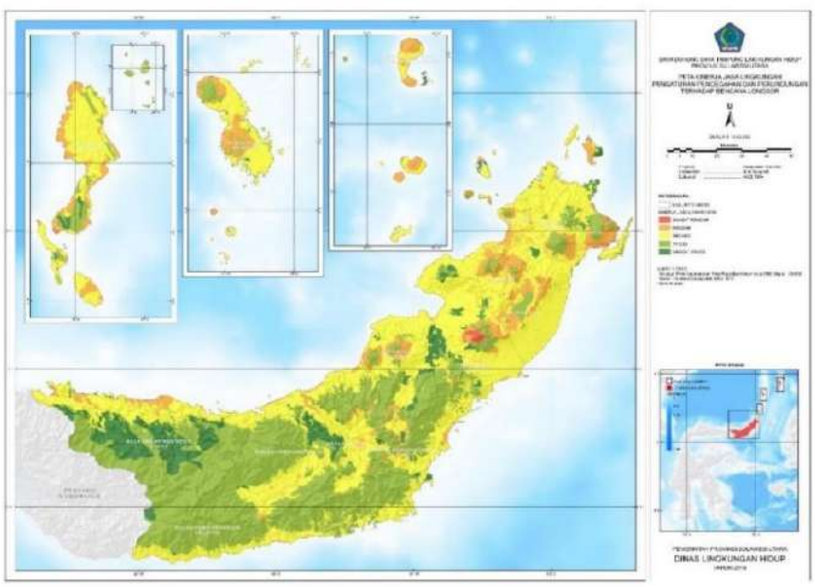
KABUPAEN/KOTA	MELAMPAUI	TIDAK MELAMPAUI	TOTAL LUAS LAHAN
KEPULAUAN TALAUD	26.813,59	153.873,06	180.686.66
KOTAMOBAGU	17.851,90	7.987,79	25.839,69
MANADO	41.507,17	2.340,22	43.847.39
MINAHASA	163.643,11	84.460,58	248.103.68
MINAHASA SELATAN	96.012,16	176.401,97	272.414,12
MINAHASA TENGGARA	44.998,71	85.768,71	130.767,42
MINAHASA UTARA	121.030,43	102.942,19	223.972.63
TOMOHON	32.765,47	8.882,45	41.647.92
TOTAL LUAS LAHAN	**822.205,43**	**1.806,293,75**	**2.628,499,18**
PRESENTASI	**31%**	**69%**	**100%**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Hasil Analisis 2021

C. Skenario terhadap perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup terhadap mitigasi bencana Longsor

KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Utara di overlay dengan Pola ruang Draft Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Utara terhadap mitigasi bencana longsor terdapat ancaman beberapa lokasi berdampak bencana Banjir.

1. Pada tingkat dampak mitigasi longsor rendah yakni 11% berdampak dominan berada pada kawasan permukiman dan kawasan pertanian.
2. Pada tingkat dampak mitigasi longsor sangat rendah rendah yakni 0.47% berdampak paling dominan berada pada kawasan permukiman
3. Pada tingkat dampak mitigasi longsor sangat tinggi yakni 8% berdampak paling dominan berada pada kawasan permukiman.
4. Pada tingkat dampak mitigasi longsor sedang yakni 45% berdampak yang dominan pada kawasan permukiman dan kawasan pertanian.
5. Pada tingkat dampak mitigasi longsor tinggi yakni 37% berdampak yang paling dominan terdapat pada kawasan produksi terbatas.



Gambar 2.14. Skenario Pengaturan Mitigasi Bencana Longsor Provinsi Sulawesi Utara

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Hasil Analisis 2021

D. Skenario terhadap Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup terhadap Mitigasi Bencana Banjir

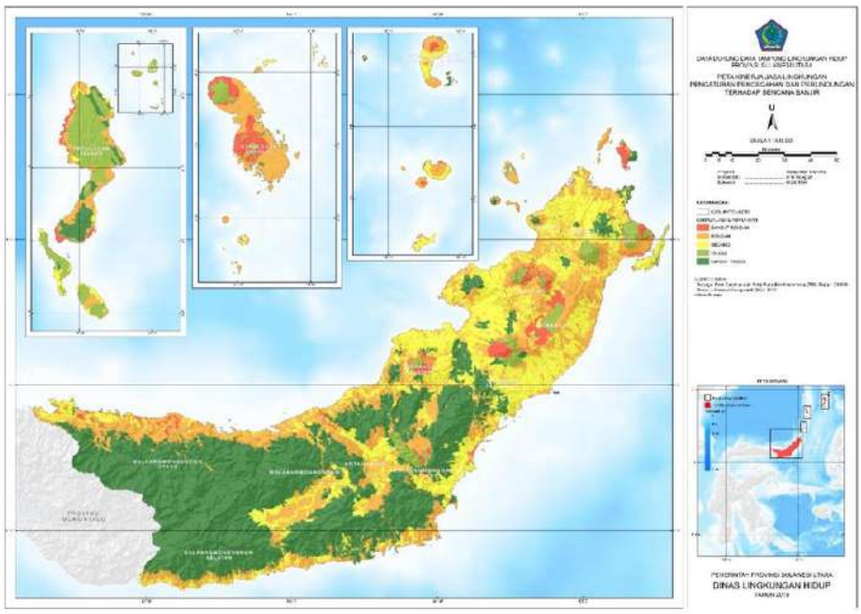
KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Utara di overlay dengan Pola ruang Draft Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Utara terhadap mitigasi bencana banjir terdapat ancaman beberapa lokasi berdampak bencana Banjir.

1. Pada tingkat dampak mitigasi Banjir rendah yakni 53% berdampak dominan berada pada kawasan Permukiman.
2. Pada tingkat dampak mitigasi Banjir sangat rendah rendah yakni 0.44% berdampak dominan berada pada kawasan pertanian.
3. Pada tingkat dampak mitigasi banjir sangat tinggi yakni 7% berdampak paling dominan berada pada kawasan pertanian.
4. Pada tingkat dampak mitigasi Banjir sedang yakni 39% berdampak yang dominan pada kawasan permukiman dan kawasan pertanian.
5. Pada tingkat dampak mitigasi Banjir tinggi yakni 1% berdampak yang paling dominan terdapat pada kawasan konservasi.

Tabel 2.162. Skenario Muatan KLHS Terhadap Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir

POLA RUANG RTRW PROVINSI SULAWESI UTARA	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	LUAS LAHAN (HA)
Kawasan Peruntukan Budidaya	**353.55353.97**	**42.239,21**	**306.021,51**	**301.685,38**	**40.703,11**	**1.044,203,17**
Hutan Produksi	14.684,92	76.86	42,732,98	6.864,	7.48	64.366,76
Hutan Produksi Konversi	1.673,54	-	12.963,49	40.34	18.01	14.695,37
Hutan Produksi Terbatas	25.630,54	1.055,69	164.791,99	16.037,43	3.009,70	210.525,36
Kawasan Energi	314.15	1.152,,51	1.96	103.38	1.04	1.573,04
Kawasan Pariwisata	4.966,27	811.06	1.963,61	3.012.44	5.322,67	16.076,05
Kawasan perikanan	607.04	15.71	-	233.26	5.51	761.53
Kawasan Pemukiman	31.421,55	4.891,92	275.16	10.194,94	319.48	47.103,06
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	252.70	14.18	0.07	62.69	0.01	329.65
Kawasan Pertambangan	16.098,59	54.51	14.164,14	28.751,53	118.63	59.187,40
Kawasan Pertanian	256.444,68	34.075,53	68.665,82	234.908,24	31.899.60	635.993,87
Kawasan Peruntukan Industri	1.559,99	91.23	462.28	1.476,60	0.96	3.591,07
Kawasan Peruntukan Lindung Provinsi	**33.008,29**	**12.1919,16**	**289.110,14**	**16.020.56**	**57.664,21**	**407.922,36**
Cagar Alam Darat	2.004,19	1.725.73	10.297,74	443.70	8.579,57	23.050,95
Hutan Lindung	21.741,59	9.691.18	98.223,77	10.059,36	20.914,83	160.630,73
Kawasan Ekosistem Mangrove	1.352,70	58.92	400.93	152.55	293.30	2.258,40
Suaka Margasatwa Darat	1.793,12	-	8.833,56	1.294,10	23.062.43	24.983,21
Taman Hutan Raya	10.78	-	198.03	-	-	208.81
Taman Nasional Darat	4.528,37	280.03	170.966,87	4.056,91	1.299,45	181.131,64
Taman Nasonal Laut	1.440,41	-	-	-	307.27	1.747,69
Taman Wisata Alam/Hutan Wisata Darat	137.12	363.29	189.24	13.93	3.207,36	3.910,94
Total Luas Lahan (Ha)	**386.562,26**	**54.358,37**	**595.131,64**	**317.705,93**	**98.367.32**	**1.452,125,53**
Persentase (%)	**27%**	**4 %**	**41%**	**22%**	**7%**	**100%**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Hasil Analisis 2021



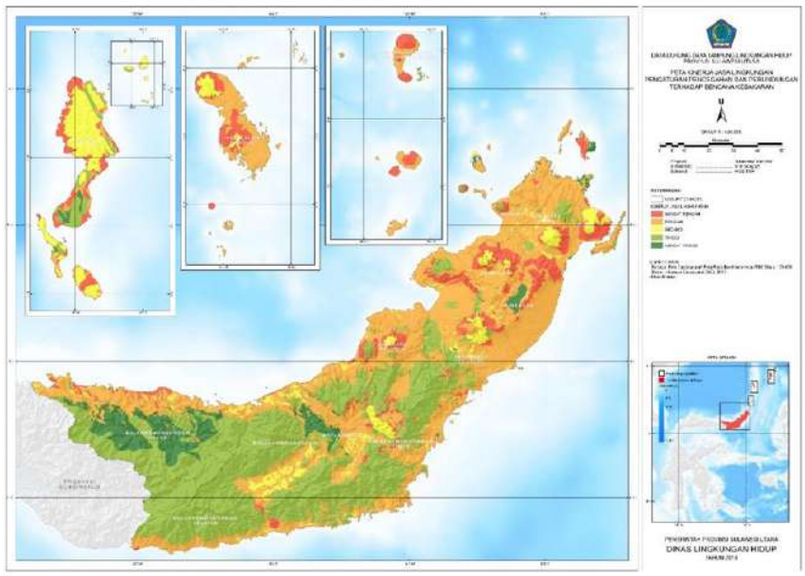
Gambar 2.15. Skenario Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir Provinsi Sulawesi Utara

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Hasil Analisis 2021

E. Skenario terhadap Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup terhadap Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Utara di overlay dengan Pola ruang Draft Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Utara terhadap mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan terdapat ancaman beberapa lokasi berdampak bencana Kebaharan hutan dan lahan .

1. Pada tingkat dampak mitigasi Kebakaran hutan dan lahan rendah yakni 40% berdampak paling dominan berada pada kawasan pertanian.
2. Pada tingkat dampak mitigasi Kebaharan hutan dan lahan sangat rendah rendah yakni 9% berdampak paling dominan berada pada kawasan permukiman.
3. Pada tingkat dampak mitigasi Kebakaran hutan dan lahan sangat tinggi yakni 6% berdampak dominan berada pada kawasan hutan produksi terbatas.
4. Pada tingkat dampak mitigasi Kebakaran hutan dan lahan sedang yakni 9% berdampak yang dominan pada kawasan pertanian.
5. Pada tingkat dampak mitigasi Kebakaran hutan dan lahan tinggi yakni 36% berdampak yang paling dominan terdapat pada kawasan hutan hutan produksi terbatas.



Gambar 2.16. Skenario Pengaturan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sulawesi Utara

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Hasil Analisis 2021

Tabel 2.163. Skenario Muatan KLHS Terhadap Pengaturan Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

POLA RUANG RTRW PROVINSI SULAWESI UTARA	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	Luas Lahan (Ha)
Kawasan Peruntukan Budidaya	**545.578,78**	**113.543,25**	**73.295,26**	**67.718.,14**	**244.067,73**	**1.044,203,17**
Hutan Produksi	20.143,90	1.399,04	6.677,37	83.37	36.062,09	64.366,76
Hutan Produksi Konversi	1.712,51		7.875,47	1.36	5.106,03	14.695,37
Hutan Produksi Terbatas	37.520,21	5.166,25	42.275,42	2.771,63	122.791,85	210.525,36
Kawasan Energi	1.292,88	171.49	1.12	105.66	1.88	1.573,04
Kawasan Pariwisata	7.143,09	1.419,11	5.760,80	352.99	1.400,05	16.076,05
Kawasan perikanan	288.41	34.03	0.92	303.15	135.01	761.53
Kawasan Pemukiman	36.637,19	7.376,74	137.98	2.648,60	302.55	47.103,06
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	194.59	41.18	0.09	93.24	0.55	329.65
Kawasan Pertambangan	41.177,70	1.097,13	1.822,67	2.654,10	12.435,80	59.187,40
Kawasan Pertanian	397.149,94	96.485,87	8.742,48	58.262,53	65.353,05	625.993,87
Kawasan Peruntukan Industri	2.318,35	352.42	0.95	441.50	477.86	3.591,07
Kawasan Peruntukan Lindung Provinsi	**38.142,86**	**22.003,82**	**12.550,24**	**56.284,57**	**278.940,86**	**407.922,36**
Cagar Alam Darat	1.165,35	3.008,28	5.96	8.536,35	10.335,00	23.050,95
Hutan Lindung	24.659,56	16.384,91	9.952,24	20.541,40	89.092,63	160.630,73
Kawasan Ekosistem Mangrove	1.426,36	71.50	113.60	220.63	426.33	2.258.40
Suaka Margasatwa Darat	1.680,96	1.406,26	791.62	23.062,43	8.041,94	34.983.21
Taman Hutan Raya		10.78			198.03	208.81
Taman Nasional Darat	7.437,83	942.61	1.379,55	738.51	170.633,14	181.131,64
Taman Nasonal Laut	1.439,02		307.27	1.39	0.00	1.747,69
Taman Wisata Alam/Hutan Wisata Darat	333.79	179.49		3.183,87	213.79	3.910,94
Total Luas Lahan (Ha)	**683.721,64**	**135.547,08**	**85.845,50**	**124.002,71**	**523.008,59**	**1.452,125,53**
Persentase (%)	**40%**	**9%**	**6%**	**9%**	**36%**	**100%**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Hasil Analisis 2021

F. Skenario terhadap kinerja layanan/ jasa ekosistem terhadap Jasa Ekosistem Penyedia Air

KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Utara di overlay dengan Pola ruang Draft Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Utara terhadap jasa ekosistem penyedia air terdapat ancaman beberapa lokasi berdampak jasa ekosistem penyedia air.

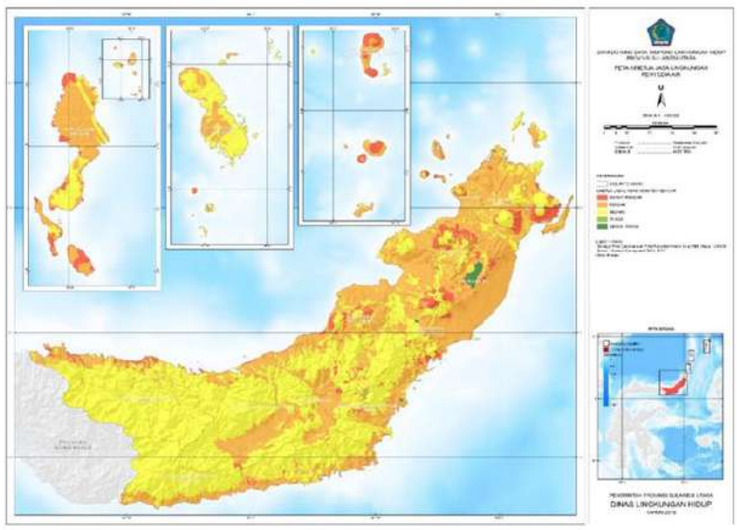
1. Pada tingkat dampak jasa ekosistem penyedia air rendah yakni 2% berdampak paling dominan berada pada Kawasan permukiman.
2. Pada tingkat dampak jasa ekosistem penyedia air sangat rendah rendah yakni 0.21% berdampak paling dominan berada pada kawasan permukiman.
3. Pada tingkat dampak jasa ekosistem penyedia air sangat tinggi 3% berdampak paling dominan berada pada kawasan pertanian.
4. Pada tingkat dampak jasa ekosistem penyedia air sedang yakni 28% berdampak yang dominan pada kawasan hutan produksi terbatas.
5. Pada tingkat dampak jasa ekosistem penyedia air tinggi yakni 66% berdampak yang paling dominan terdapat pada kawasan hutan produksi terbatas.

Tabel 2.164. Skenario Muatan KLHS Terhadap Penyedia Air

POLA RUANG RTRW PROVINSI SULAWESI UTARA	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	LUAS LAHAN (HA)
Kawasan Peruntukan Budidaya	**28.672,51**	**2.861.84**	**38.031.01**	**346.458,23**	**628.179,57**	**1.044,203,17**
Hutan Produksi	81.16	-	108.91	14.872,44	49.304,25	64.366,76
Hutan Produksi Konversi	1.36	-	26.91	9.909,96	4.757,14	14.695,37
Hutan Produksi Terbatas	136.21	2.67	55.97	69.850,90	140.479,62	210.525,36
Kawasan Energi	4.16	10.99	102.74	244.14	1.211,02	1.573,04
Kawasan Pariwisata	120.17	19.50	144.78	5.920,44	9.871,15	16.076,05
Kawasan perikanan	73.66	1.22	392.12	31.22	263.30	761.53
Kawasan Pemukiman	24.939,11	2.474,73	1.303.83	6.563,09	11.822,30	47.103,06
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	97.45	1.66	79.31	70.43	80.81	329.65
Kawasan Pertambangan	407.55	1.16	2.322.00	15.264,59	41.192,10	59.187,40
Kawasan Pertanian	2.381,13	349.91	33.207.04	223.456,06	366.599,74	625.993,87
Kawasan Peruntukan Industri	430.56	-	287.40	274.98	2.598,14	3.591,07
Kawasan Peruntukan Lindung Provinsi	**5.156.12**	**128.59**	**3.174.77**	**63.163,67**	**336.299,20**	**407.922,36**
Cagar Alam Darat	423.68		5.96	331.10	22.290,20	23.050,95
Hutan Lindung	2.935,55	115.34	1.706.97	25.689,21	130.183,66	160.630.73
Kawasan Ekosistem Mangrove	31.47	-	632.34	644.60	949.99	2.258.40
Suaka Margasatwa Darat	-	-		31.677,03	3.306,18	34983,21
Taman Hutan Raya	-	-		208.81		208.81
Taman Nasional Darat	1.520,25	10.78	522.07	3.992,86	175.085.69	181.131,64
Taman Nasonal Laut	3.01	2.47	306.36	427.90	1.007,94	1.747.69
Taman Wisata Alam/Hutan Wisata Darat	242.16	-	1.06	192.17	3.475,54	3.910,94

POLA RUANG RTRW PROVINSI SULAWESI UTARA	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	LUAS LAHAN (HA)
Total Luas Lahan (Ha)	**33.828,64**	**2.990,44**	**41.205.78**	**409.621,90**	**964.478,78**	**1.452,125,53**
Presentase (%)	**2%**	**0.21%**	**3%**	**28%**	**66%**	**100%**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Hasil Analisis 2021



Gambar 2.17. Skenario Penyedia Air di Provinsi Sulawesi Utara
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Hasil Analisis 2021

G. Skenario terhadap Efisiensi pemanfataan sumber daya alam terhadap pemurnian air.

KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Utara di overlay dengan Pola ruang Draft Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Utara terhadap pemurnian air.

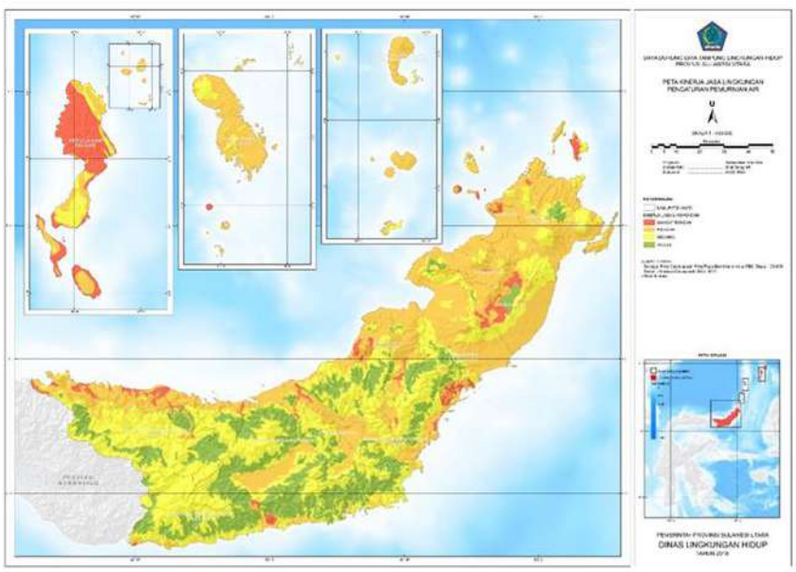
1. Pada tingkat dampak terhadap jasa ekosistem pemurnian air yakni 39% berdampak paling dominan berada pada kawasan permukiman.
2. Pada tingkat dampak terhadap jasa ekosistem pemurnian air sangat rendah rendah yakni 7% berdampak paling dominan berada pada kawasan pertanian.
3. Pada tingkat dampak terhadap jasa ekosistem pemurnian air sedang yakni 35% berdampak paling dominan berada pada kawasan pertanian.
4. Pada tingkat dampak terhadap jasa ekosistem pemurnian air sedang yakni 19% berdampak yang dominan pada kawasan hutan produksi terbatas.

Tabel 2.165.
Skenario Muatan KLHS Terhadap Pemurnian Air

POLA RUANG RTRW PROVINSI SULAWESI UTARA	RENDAH	SANGAT RENDAH	SEDANG	TINGGI	LUAS LAHAN (HA)
Kawasan Peruntukan Budidaya	**527.226,79**	**66.186,71**	**291.304,90**	**159.484,76**	**1.044.203,17**
Hutan Produksi	11.574.90	782.95	26.298,36	25.710,56	64.366,76
Hutan Produksi Konversi	1.128,72	270.33	9.860,20	3.436,13	14.695,37
Hutan Produksi Terbatas	24.616,06	2.884,70	95.955,95	87.068,66	210.525,36
Kawasan Energi	309.51	1.216,33	46.24	0.95	1.573,04

POLA RUANG RTRW PROVINSI SULAWESI UTARA	RENDAH	SANGAT RENDAH	SEDANG	TINGGI	LUAS LAHAN (HA)
Kawasan Pariwisata	7.636,16	1.247,56	2.712,07	4.480,25	16.076,05
Kawasan Perikanan	732.07	12.75	15.22	1.49	761.53
Kawasan Permukiman	39.866,37	4.850,69	2.332,32	53.68	47.103,06
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	320.13	9.44	0.01	0.07	329.65
Kawasan Pertambangan	31.133,17	1.043,47	19.901,02	1.109,74	59.187,40
Kawasan Pertanian	409.903,44	53.853,43	134.010,02	31.226,97	625.993,87
Kawasan Peruntukan Industri	3.006,26	15.07	173.49	395.26	3.591,07
Kawasan Peruntukan Lindung Provinsi	**45.311,45**	**30.562,43**	**220.206,81**	**111.841,67**	**407.922,36**
Cagar Alam Darat	3.856,24	-	14.779,20	4.415,51	23.050,95
Hutan Lindung	31.358,85	6.730,70	84.281,07	38.260,12	160.630,73
Kawasan Ekosistem Mangrove	1.372,82	53.66	812.33	19.59	2.258,40
Suaka Margasatwa Darat	2.839.77	22.535,76	7.472,23	2.135,45	34.983,21
Taman Hutan Raya	198,03	10.78	-	-	208.81
Taman Nasional Darat	3.730,99	1.231,53	109.158,12	67.011,00	181.131,64
Taman Nasional LAat	1.440,41	-	307.27	-	1.747,69
Taman Wisata Alam/Hutan Wisata Darat	514.34	-	3.396,60	-	3.910,94
Luas Lahan (Ha)	**572.538,24**	**96.749,14**	**511.511,71**	**271.326,43**	**1.452.125,53**
Presentase (%)	**39%**	**7%**	**35%**	**19%**	**100%**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Hasil Analisis 2021



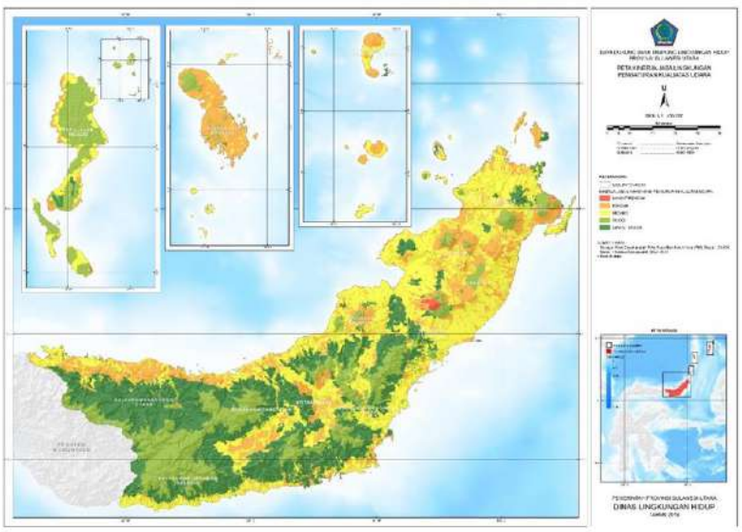
Gambar 2.18. Skenario Pemurnian Air di Provinsi Sulawesi Utara

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Hasil Analisis 2021

H. Skenario terhadap Tingkat kerentanan dan kapasitas terhadap perubahan iklim terhadap jasa ekosistem Kualitas udara

KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Utara di overlay dengan Pola ruang Draft Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Utara terhadap jasa ekosistem pengaturan kualitas udara beberapa lokasi berdampak terhadap jasa ekosistem pengaturan Iklim.

1. Pada tingkat dampak jasa ekosistem pengaturan kualitas udara rendah yakni 20% berdampak paling dominan berada pada kawasan pertanian.
2. Pada tingkat dampak terhadap jasa ekosistem pengaturan kualitas udara sangat rendah rendah yakni 0.31% berdampak paling dominan berada pada kawasan pertanian.
3. Pada tingkat dampak terhadap jasa ekosistem pengaturan kualitas udara sangat tinggi yakni 27% berdampak paling dominan berada pada kawasan produksi terbatas dan kawasan pertanian.
4. Pada tingkat dampak terhadap jasa ekosistem pengaturan kualitas udara sedang yakni 32% berdampak yang dominan pada kawasan pertanian.
5. Pada tingkat dampak terhadap jasa ekosistem pengaturan kualitas udara yakni 21% berdampak yang paling dominan terdapat pada kawasan pertanian dan kawasan hutan produksi terbatas.



Gambar 2.19. Skenario Kualitas Udara di Provinsi Sulawesi Utara

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Hasil Analisis 2021

Tabel 2.166. Skenario Muatan KLHS terhadap Kualitas Udara

POLA RUANG RTRW PROVINSI SULAWESI UTARA	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	LUAS LAHAN (HA)
Kawasan Peruntukan Budidaya	**263.759,61**	**972,36**	**254.627,48**	**433.689,67**	**91.154,04**	**1.044.203,17**
Hutan Produksi	7.360,92	12,22	36.990,17	14.253,17	5.750,29	64.366,76
Hutan Produksi Konversi	660,70	0,10	12.596,79	1.053,07	384,70	14.695,37
Hutan Produksi Terbatas	15.995,45	15,93	137.026,88	26.729,92	30.757,18	210.525,36
Kawasan Energi	1.353,58	1,56	1,80	214,90	1,20	1.573,04
Kawasan Pariwisata	3.786,05	14,69	1.828,92	4.992,60	5.453,78	16.076,05
Kawasan Perikanan	478,79	3,46	-	276,85	2,42	761,53

POLA RUANG RTRW PROVINSI SULAWESI UTARA	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	LUAS LAHAN (HA)
Kawasan Permukiman	32.023,23	165,93	181,24	14.338,05	394,60	47.103,06
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	212,89	1,05	-	115,62	0,09	329,65
Kawasan Pertambangan	9.179,39	8,70	10.793,60	35.718,41	3.487,30	59.187,40
Kawasan Pertanian	191.397,16	745,54	54.745,80	334.183,84	44.921,53	625.993,87
Kawasan Peruntukan Industri	1.311,44	3,18	462,28	1.813,23	0,95	3.591,07
Kawasan Peruntukan Lindung Provinsi	**30.282,65**	**3.485,48**	**132.957,34**	**27.681,15**	**213.515,74**	**407.922,36**
Cagar Alam Darat	2.698,80	422,42	4.937,30	1.057,88	13.934,54	23.050,95
Hutan Lindung	22.654,88	2.805,02	51.234,81	16.048,00	67.888,02	160.630,73
Kawasan Ekosistem Mangrove	1.366,00	-	524,56	198,17	169,66	2.258,40
Suaka Margasatwa Darat	854,26	-	4.663,81	2.232,96	27.232,18	34.983,21
Taman Hutan Raya	-	-	-	10,78	198,03	208,81
Taman Nasional Darat	1.809,83	14,81	71.176,70	7.296,15	100.834,15	181.131,64
Taman Nasional Laut	747,36	-	296,73	693,06	10,54	1.747,69
Taman Wisata Alam/Hutan Wisata Darat	151,52	253,22	123,42	144,15	3.248,62	3.910,94
Luas Lahan (Ha)	**294.042,26**	**4.457,84**	**387.584,82**	**461.370,82**	**304.669,78**	**1.452.125,53**
Presentase (%)	**20%**	**0,31%**	**27%**	**32%**	**21%**	**100%**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Hasil Analisis 2021

I. Skenario terhadap Tingkat kerentanan dan kapasitas terhadap perubahan iklim terhadap jasa ekosistem Pengatur Iklim

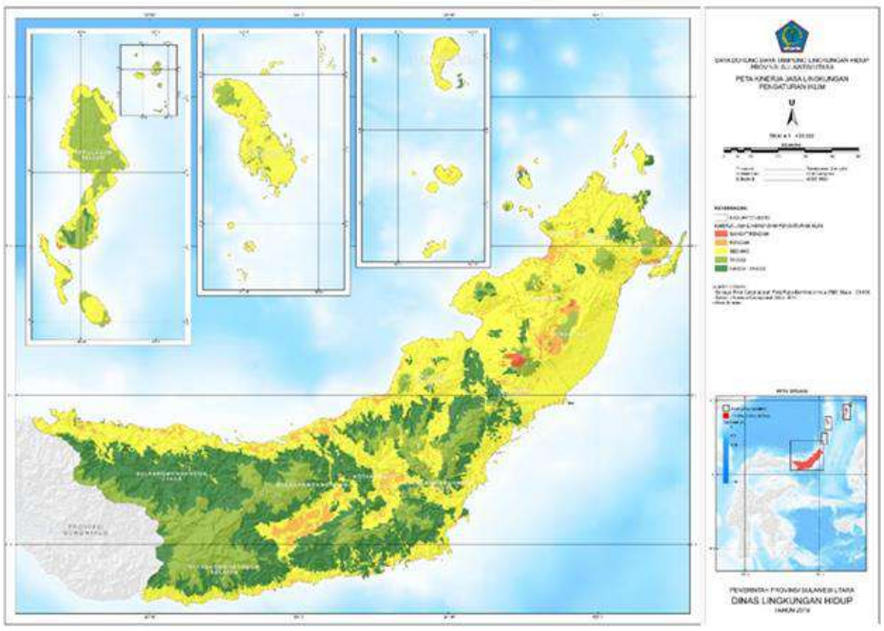
KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Utara di overlay dengan Pola ruang Draft Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Utara terhadap jasa ekosistem pengaturan Iklim terdapat ancaman beberapa lokasi berdampak terhadap jasa ekosistem pengaturan Iklim.

1. Pada tingkat dampak jasa ekosistem pengaturan Iklim rendah yakni 4% berdampak paling dominan berada pada kawasan permukiman dan kawasan pertanian.
2. Pada tingkat dampak terhadap jasa ekosistem pengaturan Iklim sangat rendah rendah yakni 1% berdampak paling dominan berada pada kawasan permukiman.
3. Pada tingkat dampak terhadap jasa ekosistem pengaturan Iklim sangat tinggi yakni 27% berdampak paling dominan berada pada kawasan Pertanian.
4. Pada tingkat dampak terhadap jasa ekosistem pengaturan Iklim sedang yakni 48% berdampak yang dominan pada kawasan hutan produksi terbatas.
5. Pada tingkat dampak terhadap jasa ekosistem pengaturan Iklim tinggi yakni 20% berdampak yang paling dominan terdapat pada kawasan

konsevasi dan kawasan pertanian.

Tabel 2.167. Skenario Muatan KLHS terhadap Pengaturan Iklim

POLA RUANG RTRW PROVINSI SULAWESI UTARA	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	LUAS LAHAN (HA)
Kawasan Peruntukan Budidaya	**60.501,29**	**5.318,27**	**259.851,72**	**643.313,34**	**75.218,55**	**1.044.203,17**
Hutan Produksi	98,43	0,09	37.878,58	21.527,78	4.861,88	64.366,76
Hutan Produksi Konversi	1,36	-	12.909,72	1.712,51	71,78	14.695,37
Hutan Produksi Terbatas	49,38	10,79	139.802,98	43.980,43	26.681,78	210.525,36
Kawasan Energi	1.231,50	12,55	1,80	326,08	1,12	1.573,04
Kawasan Pariwisata	462,43	34,44	1.828,92	9.003,60	4.746,66	16.076,05
Kawasan Perikanan	206,89	15,71	-	537,32	1,60	761,53
Kawasan Permukiman	24.204,40	4.534,77	187,31	17.835,06	341,53	47.103,06
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	163,03	11,38	-	155,15	0,09	329,65
Kawasan Pertambangan	1.820,29	9,85	10.878,75	43.072,58	3.405,93	59.187,40
Kawasan Pertanian	31.716,61	658,17	55.901,38	502.619,19	35.098,52	625.993,87
Kawasan Peruntukan Industri	546,96	30,52	462,28	2.543,63	7,68	3.591,07
Kawasan Peruntukan Lindung Provinsi	**1.029,18**	**3.533,00**	**130.821,89**	**58.289,78**	**214.248,51**	**407.922,36**
Cagar Alam Darat	0,55	423,13	4.937,30	3.793,17	13.896,79	23.050,95
Hutan Lindung	495,55	2.842,34	51.234,81	38.802,46	67.255,58	160.630,73
Kawasan Ekosistem Mangrove	31,47	-	524,56	1.532,90	169,47	2.258,40
Suaka Margasatwa Darat	-	-	2.528,36	3.808,79	28.646,06	34.983,21
Taman Hutan Raya	-	-	-	10,78	198,03	208,81
Taman Nasional Darat	496,11	24,31	71.176,70	8.611,10	100.823,42	181.131,64
Taman Nasional Laut	5,49	-	296,73	1.434,93	10,54	1.747,69
Taman Wisata Alam/Hutan Wisata Darat	0,01	243,22	123,42	295,67	3.248,62	3.910,94
Luas Lahan (Ha)	**61.530,47**	**8.851,26**	**390.673,61**	**701.603,12**	**289.467,07**	**1.452.125,53**
Presentase (%)	**4%**	**1%**	**27%**	**48%**	**20%**	**100%**

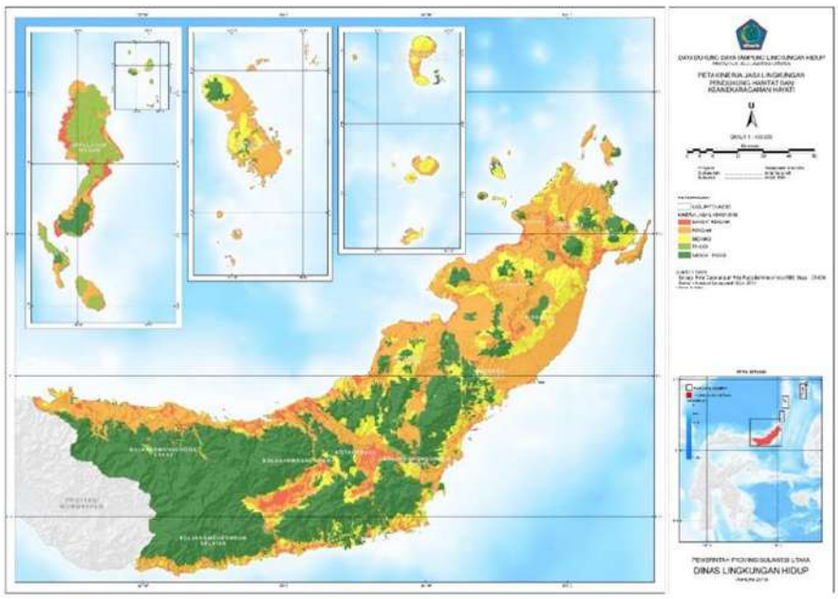


Gambar 2.20. Skenario Kualitas Udara di Provinsi Sulawesi Utara
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Hasil Analisis 2021

J. Skenario terhadap Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati terhadap pendukung habitat dan keanekaragaman hayati

KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Utara di *overlay* dengan Pola ruang Draft Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Utara terhadap jasa ekosistem pendukung habitat dan keanekaragaman hayati terdapat ancaman beberapa lokasi berdampak terhadap jasa ekosistem ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

1. Pada tingkat dampak jasa ekosistem pendukung habitat dan keanekaragaman hayati yakni 36% berdampak paling dominan berada pada kawasan pertanian.
2. Pada tingkat dampak jasa ekosistem pendukung habitat dan keanekaragaman hayati sangat rendah rendah yakni 4% berdampak paling dominan berada pada kawasan pertanian.
3. Pada tingkat dampak jasa ekosistem pendukung habitat dan keanekaragaman hayati sangat tinggi yakni 43% berdampak paling dominan berada pada kawasan hutan produksi terbatas.
4. Pada tingkat dampak jasa ekosistem pendukung habitat dan keanekaragaman hayati sedang yakni 13% berdampak yang dominan pada kawasan pertanian.
5. Pada tingkat dampak jasa ekosistem pendukung habitat dan keanekaragaman hayati tinggi yakni 5% berdampak yang paling dominan terdapat pada kawasan pertanian.



Gambar 2.21. Skenario Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati di Provinsi Sulawesi Utara

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Hasil Analisis 2021

Tabel 2.168. Skenario Muatan KLHS Terhadap Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati

POLA RUANG RTRW PROVINSI SULAWESI UTARA	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	LUAS LAHAN (HA)
Kawasan Peruntukan Budidaya	**489.154,70**	**58.895,83**	**312.135,25**	**149.849,62**	**34.167,77**	**1.044,203,17**
Hutan Produksi	14.627,22	319.49	42.161,53	6.679,60	578.93	64.366,76
Hutan Produksi Konversi	1.238,12	269.42	12.280,21	206.33	701.29	14.695,37
Hutan Produksi Terbatas	25.885,68	154.81	165.683,73	16.683.17	2.117,97	210.525,36
Kawasan Energi	1.461,56	58.50	2.83	49.98	0.17	1.573,04
Kawasan Pariwisata	7.027,77	459.77	7.059,33	1.302,23	226.95	16.076,05
Kawasan perikanan	320.63	408.10	4.59	27.28	0.92	761.53
Kawasan Pemukiman	31.866,87	12.802,64	229.49	1.838,91	365.16	47.103,06
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	136.91	161.77	0.09	30.89	0.00	329,65
Kawasan Pertambangan	30.446,94	3.184,21	13.140,05	11.273,48	1.142,72	59.187,40
Kawasan Pertanian	374.217.72	40.267,64	71.129,04	111.364,69	29.014,78	625.993,87
Kawasan Peruntukan Industri	1.925,28	809.47	444.38	393.07	18.87	3.591,07
Kawasan Peruntukan Lindung Provinsi	**27.805,70**	**1.874,03**	**313.436,85**	**31.679,13**	**33.126,65**	**407.922,36**
Cagar Alam Darat	1.132,28	0.55	18.571,08	3.040,80	306.23	23.050,95
Hutan Lindung	18.738,50	1.327,35	111.725,41	21.424,73	7.414,74	160.630,73
Kawasan Ekosistem Mangrove	840.96	-	111.725,41	680.14	61.04	2.258,40
Suaka Margasatwa Darat	2.277,54	217.71	7.608.81	591.98	24.287,18	34.983,21
Taman Hutan Raya	10.78	-	198.03	-	-	208.81
Taman Nasional Darat	4.348,54	326.80	171.052,54	4.445,45	958.31	181.131,64
Taman Nasonal Laut	105.25	-	307.27	1.335,17	-	1.747,69

POLA RUANG RTRW PROVINSI SULAWESI UTARA	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	LUAS LAHAN (HA)
Taman Wisata Alam/Hutan Wisata Darat	351.85	1.63	**3.297,45**	160.85	99.15	3.910,94
Total Luas Lahan (Ha)	**516.960,40**	**60.769,86**	**625.572,10**	**181.528,75**	**67.294,42**	**1.452,125,53**
Presentase (%)	**36%**	**4%**	**43%**	**13%**	**5%**	**100%**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Hasil Analisis 2021

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONAL

Kondisi perekonomian global terus membaik yang ditunjukkan oleh kontraksi ekonomi di berbagai negara yang semakin kecil. Meskipun kasus COVID-19 secara global masih terus meningkat dan dibayangi oleh varian baru, ketersediaan vaksin menjadi harapan pemulihan ekonomi global. Diakhir tahun 2020, kontraksi ekonomi Amerika Serikat melunak, begitu juga dengan Jepang dan Korea Selatan. Sementara itu, Tiongkok dan Vietnam mempertahankan pertumbuhan positif. Seiring membaiknya kondisi global, harga komodtas internasional mengalami peningkatan.

Perekonomian Indonesia pada akhir tahun 2020 terkontraksi 2,2 persen *(Year on Year-YoY)*, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Melunaknya kontraksi ekonomi ditopang oleh tujuh sektor yang mampu tumbuh positif, terutama sektor-sektor esensial di tengah pandemi seperti jasa kesehatan serta informasi dan komunikasi. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah yang tumbuh 1,8 persen (YoY), menjadi bantalan di tengah kontraksi yang terjadi pada komponen lainnya. Wilayah Maluku dan Papua menjadi satu-satunya wilayah yang tumbuh positif sementara wilayah lain masih terkontraksi. Kontraksi tertinggi terjadi di Bali Nusa dan yang terendah di wilayah Sulawesi.

Memperhatikan kondisi saat ini, Perekonomian global pada tahun 2021 diproyeksi tumbuh 5,5 persen, terutama pada semester kedua sejalan dengan ketersediaan vaksin yang kian besar terutama di negara maju. Kondisi yang membaik ini diharapkan akan terus terjadi pada 5 (lima) tahun kedepan. Sejalan dengan pemulihan ekonomi, harga komoditas internasional diproyeksi turut mengalami perbaikan.

Ekonomi Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh 5,0 persen, lebih tinggi dari konsensus pasar maupun lembaga internasional. Dari sisi pengeluaran, investasi berperan penting dalam pemulihan ekonomi karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Sementara dari sisi lapangan usaha, pemulihan diperkitrakan terjadi di hampir semua sector. Kondisi ini diproyeksikan akan dipertahankan bahkan ditingkatkan pada 5 (lima) tahun kedepan.

3.2. KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH SULAWESI UTARA

Ekonomi Sulawesi Utara tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -0,99 persen (*consumer to consumer – c to c*). Pertumbuhan ekonomi ini merupakan efek pertumbuhan sebagan besar lapangan usaha yang juga terkontraksi. Kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -25,96 persen, diikuti oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar -13,78 persen dan Jasa Lainnya sebesar -10,06 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut merupakan lapangan usaha yang berkaitan erat dengan aktivitas pariwisata yang mengalami pukulan paling kuat akibat adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara Tahun 2020 masih di bawah target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020. Apabila kita menengok tingkat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara untuk tiga tahun terakhir, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi

Sulawesi Utara Tahun 2020 ini merupakan pertumbuhan yang terendah bila dibanding pertumbuhan ekonomi Tahun 2018 yang tumbuh sebesar 6,01 persen dan mengalami penurunan pertumbuhan 0,35 persen di tahun 2019. Hal ini sangat dipengaruhi adanya kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat sebagai upaya mengurangi penyebaran COVID-19.

Dari sisi produksi, sebagian besar lapangan usaha masih terkontraksi, dengan kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yakni sebesar -25,96 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mengalami kontraksi sebesar -2,34 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi yakni Informasi dan Komunikasi sebesar 10,90 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,28 persen, dan Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es sebesar 6,95 persen. Aktivitas masyarakat yang masih cukup banyak dilakukan di rumah seperti *work from home, school from home*, beribadah dari rumah, serta kegiatan sosial lainnya menyebabkan konsumsi pulsa dan paket data terus meningkat. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2020, Informasi dan Komunikasi memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 0,54 persen. Capaian ini disebabkan banyak aktifitas masyarakat masih dilakukan di rumah baik untuk bekerja dan belajar sedangkan Transportasi dan Pergudangan menjadi sumber kontraksi terdalam, yaitu sebesar -1,22 persen karena adanya pembatasan aktifitas masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19. Sebagian besar lapangan usaha masih mencatat pertumbuhan negatif. Kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -8,74 persen, sementara untuk pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 17,76 persen.

Prospek perekonomian daerah di tahun 2022 sampai tahun 2026 memiliki potensi untuk mengalami peningkatan dengan memperhatikan beberapa faktor yang akan mendorong perekonomian antara lain dari permintaan domestik, peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat Sulawesi Utara diperkirakan akan mendorong realisasi konsumsi masyarakat. Peningkatan aktivitas sosial akan berlangsung secara gradual dan terutama bersumber dari konsumsi rumah tangga dan koknsumsi pemerintah pusat. Disisi investasi, diperkirakan akan didukung oleh kenaikan belanja modal pemerintah terutama yang bersumber dari APBN. Kenaikan belanja modal APBN terutama dianggarkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Utara seperti bendungan Lolak dan Kuwil Kawangkoan.

Sementera itu, dari sisi swasta, prospek berbaikan investasi terutama berasal dari percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Likupang yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2022 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Percepatan ini juga didukung oleh pembentukan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan KEK Likupang setelah ditandatanginya *joint venture* antara PT. Minahasa Property and Resort Development (PT. MPRD) dan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor diperkirakan membaik didukung oleh perbaikan kinerja perekonomian negara-negara mitra dagang utama. Hal ini juga didukung oleh

tren positif harga *Coconut Natural Oil* (CNO) yang diperkirakan menjadi insentif bagi perusahaan, terutama yang bergerak di sektor industri untuk meningkatkan produksi.

Memperhatikan semua aspek dinamika pembangunan selama selang 5 (lima) tahun yang lalu serta prospek 5 (lima) tahun kedepan, maka Sulawesi Utara menetapkan target Indikator Makro Pembangunan tahun 2022-2026 sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1. Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2026

NO.	INDIKATOR MAKRO	TAHUN				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.5-5.5	5-5.7	5.7-6.0	6.0-6.5	6.5-7.0
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.47-7.18	6.0-6.5	5.5-6.0	5.0-5.5	4.5-5.0
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	7.5-6.9	5.93	5.65	5.37	5.09
4.	Inflasi (%)	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1
5.	Indeks Pembangunan Manusia	73	74	75	76	77
6.	PDRB Perkapita (Rp. Juta)	56	60	65	70	76
7.	PDRB ADHK (Rp. Trilyun)	95.1	103.1	112.2	122.6	134.5
8.	PDRB ADHB (Rp. Trilyun)	142.8	154.8	168.5	184.1	202.1
9.	Gini Ratio	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37

3.3. KINERJA KEUANGAN DAERAH

3.3.1.Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016-2020

3.3.1.1. Perkembangan Pendapatan Daerah

Pentingnya peranan perencanaan daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Konsep perencanaan dioperasionalkan dalam dokumen APBD untuk dilaksanakan sebagai upaya mencapai visi dan misi pemerintah daerah. Pendapatan daerah menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah Provinsi Sulawesi Utara.



Arah pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Utara selang tahun 2016–2020 yaitu mobilisasi sumber-sumber PAD, dana perimbangan dan penerimaan daerah lainnya. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat dan menimbulkan keengganan berinvestasi.

Secara umum pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

a) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD terdiri dari :
   - Pajak daerah
   - Retribusi daerah
   - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
   - Lain-lain PAD yang sah

b) Pendapatan Transfer, terdiri dari :
   - Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari :
     1. Dana Perimbangan
     2. Dana Insentif Daerah
     3. Dana Otonomi Khusus
     4. Dana Keistimewaan dan
     5. Dana Desa
   - Transfer Antar Daerah, terdiri dari :
     1. Pendapatan Bagi Hasil
     2. Bantuan Keuangan

c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari :
   - Hibah
   - Dana darurat dan/ atau
   - Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi PAD, dana perimbangan dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan pendapatan daerah diperkirakan akan mengalami penurunan yang disebabkan oleh berkurangnya kewenangan urusan pemerintah daerah, serta adanya dampak Pandemi COVID-19 yang masih akan terus mempengaruhi perekonomian daerah.

Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD. Untuk Dana Perimbangan, komponen Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak adalah unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, komponen bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya yang menunjang pendapatan daerah.

Kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah tersebut diarahkan untuk:

1. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah;
2. Peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan publik dan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan retribusi daerah;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan Retribusi Daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan Provinsi;
5. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah;

6. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota ~~dan~~ dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada bagi hasil Pajak Daerah;
7. Sosialisasi dan *public relationship* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Peningkatan sarana dan prasarana/fasilitas dan pelayanan umum yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat membayar pajak daerah dan retribusi daerah; dan
9. Mengembangkan sistim evaluasi pelayanan prima dengan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan.

Disamping kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, diperlukan juga upaya-upaya untuk mendukung target-target pendapatan sebagai berikut :

a) Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga ke pelosok wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
b) Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah, untuk membenahi mekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang;
c) Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap sistem dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang dapat mempertahankan/ meningkatkan kepercayaan masyarakat Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel;
d) Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah, melalui pendekatan persuasif dalam bentuk sosialisasi, inventarisasi dan pemungutan langsung yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta pendekatan represif dalam bentuk razia/penertiban yang didukung oleh pihak Kepolisian Daerah;
e) Sosialisasi dan *Public Relationship*, melalui kegiatan pertemuan umum maupun melalui media cetak dan elektronik ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Daerah sekaligus manfaat pengelolaan Pajak Daerah, selain itu upaya sosialisasi ditujukan untuk aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang manfaat dari kerja sama pemungutan Pajak Provinsi yang berimplikasi terhadap Bagi Hasil yang juga turut berkontribusi bagi Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota;
f) Peningkatan Fungsi Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, melalui optimalisasi fungsi Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai forum komunikasi upaya pencapaian target Pendapatan Daerah sesuai peran dan tupoksi masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja yang berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
g) Penyesuaian tarif retribusi, melalui inventarisasi dan analisis tarif jenis retribusi tertentu yang sudah layak disesuaikan dengan memperhitungkan daya bayar masyarakat wajib retribusi serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat termasuk investasi;
h) Optimalisasi sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah, melalui optimalisasi penerimaan dari pengelolaan sumber daya milik daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam struktur APBD; dan
i) Meningkatkan koordinasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, untuk kelancaran penerimaan dana dimaksud

yang berkontribusi terhadap APBD, lebih khusus untuk Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Cukai Hasil Tembakau.



KPK mendorong inovasi peningkatan PAD di Sulawesi Utara, salah satunya dengan implementasi alat rekam pajak *online*.

Pada Tabel 3.2. realisasi pendapatan memperlihatkan peningkatan tajam pada 2017 yakni sebesar 29,34% dan seterusnya meningkat agak landai sampai 2019 kemudian turun pada 2020 yakni sebesar -6,32%. Peningkatan tajam 2017 karena peralihan kewenangan SMU/SMK sederajat dari Kabupaten Kota ke Provinsi, di mana otomatis ada penyesuaian DAU. Penurunan pada 2020 disebabkan karena dampak dari pendemi COVID-19. Dari struktur pendapatan menunjukkan PAD meningkat dari 2016 sampai 2019 dan menurun pada 2020.

Untuk pendapatan transfer sepanjang 2016 sampai 2020 terjadi dua kali penurunan yakni pada tahun 2018 dan tahun 2020. Perlambatan yang terjadi sebelum 2020 berkaitan dengan kondisi ekonomi baik global maupun nasional. Kondisi perkembangan PAD dan Dana Transfer yang berkorelasi dengan pertumbuhan Pendapatan Daerah secara menyeluruh. Besaran dari Pendapatan total didominasi oleh pendapatan trasnfer dibandingkan PAD daripada pendapatan lainnya. Pada 2016 besaran PAD 34,00% terhadap total pendapatan dan 2020 menurun sebesar 30,48%.

3.3.1.2. Perkembangan Belanja Daerah

Sinergitas program pembangunan nasional dan daerah dilaksanakan melalui arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana terdapat 6 (enam) urusan pemeritahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya yaitu 18 urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan pemerintahan pilihan. Dasar ini mempengaruhi penjabaran kebijakan belanja daerah -untuk berbagai bidang.

Klasifikasi Belanja Daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 menjadi 1) Belanja Operasi; 2) Belanja Modal: 3) Belanja Tidak terduga dan 4) Belanja Transfer. Pada Tabel 3.3, realisasi belanja memperlihatkan peningkatan tajam pada 2017 yakni sebesar 27,82 % dan seterusnya meningkat agak landai pada 2018 kemudian 2019 meningkat tajam sampai 2020 yakni sebesar 8,31%. Peningkatan tajam 2017 karena peralihan kewenangan SMU/SMK sederajat dari Kabupaten Kota ke Provinsi, di mana otomatis ada penyesuaian DAU. Peningkatan 2019 dan 2020 karena

pinjaman SMI dan PEN. Pinjaman SMI digunakan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umum dan Mata. Untuk Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah digunakan untuk penanggulangan COVID-19 dan infrastruktur untuk menggerakkan ekonomi lokal.

Struktur belanja 2016 sampai 2021 terjadi kecenderungan meningkat pada belanja hibah dan belanja sosial serta belanja modal secara menyeluruh.

3.3.1.3. Perkembangan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA).

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 2 (dua) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan pada Tabel 3.2 s/d Tabel 3.4.

Penyerapan dana untuk menunjang kegiatan pembangunan, terutama program dan kegiatan prioritas, akan lebih efisien, sehingga diharapkan SiLPA cenderung menurun. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah provinsi semakin baik, dan bisa mempertahankan status opini BPK. Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib seperti pembayaran hutang pokok. Setelah itu diarahkan untuk penyertaan modal kepada Bank SULUTGO yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Perkembangan Pembiayaan 2016 sampai 2020 terus mengalami peningkatan dimana setiap tahun bersumber SILPA dan khususnya 2019 dan 2020 bertambah dari Pinjaman Dalam Negeri.

Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**PENDAPATAN – LRA**	**2.885.186.120.406,00**	**3.731.901.683.007,00**	**3.779.781.721.312,74**	**3.940.225.396.820,67**	**3.690.999.513.207,59**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA**	**981.044.559.607,00**	**1.146.674.827.814,00**	**1.253.804.977.826,74**	**1.286.069.364.575,67**	**1.125.317.788.015,59**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	838.345.526.536,00	983.887.128.197,00	1.052.296.154.782,00	1.050.096.230.016,00	930.415.146.643,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	65.162.587.463,00	75.742.955.085,00	85.580.012.593,00	102.667.120.362,00	114.784.249.029,63
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	21.330.625.136,00	31.361.351.498,00	52.876.760.308,00	64.886.988.418,00	42.255.754.286,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	56.205.820.472,00	55.683.393.034,00	63.052.050.143,74	68.419.025.779,67	37.862.638.056,96
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER – LRA**	**1.888.891.560.799,00**	**2.573.881.355.193,0**	**2.525.976.743.486,00**	**2.653.411.428.045,00**	**2.545.378.834.519,00**
1.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA**	**1.880.906.286.799,00**	**2.508.041.622.193,00**	**2.505.226.773.486,00**	**2.605.769.430.045,00**	**2.519.010.935.519,00**
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	91.228.189.756,00	78.413.110.390,00	78.154.251.915,00	54.248.229.552,00	79.481.090.193,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) - LRA	11.493.267.864,00	31.147.506.444,00	42.604.269.019,00	43.868.261.285,00	33.043.104.039,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum - LRA	1.065.545.204.000,00	1.390.272.639.000,00	1.427.544.997.000,00	1.463.436.158.000,00	1.335.813.209.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus – LRA	712.639.625.179,00	1.008.208.366.359,00	956.923.255.552,00	1.044.216.781.208,00	1.070.673.532.287,00
1.2.2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LRA**	**7.985.274.000,00**	**50.839.733.000,00**	**8.750.000.000,00**	**35.641.998.000,00**	**26.367.899.000,00**
1.2.2.2	Dana Penyesuaian – LRA	7.985.274.000,00	50.839.733.000,00	8.750.000.000,00	35.641.998.000,00	26.367.899.000,00

NO.	URAIAN	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.2.4	**Bantuan Keuangan-LRA**	**0,00**	**15.000.000.000,00**	**11.999.970.000,00**	**12.000.000.000,00**	**0,00**
1.2.4.2	Bantuan Keuangan dari Pemda Kabupaten-LRA	0,00	11.000.000.000,00	8.999.970.000,00	9.000.000.000,00	0,00
1.2.4.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota-LRA	0,00	4.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA**	**15.250.000.000,00**	**11.345.500.000,00**	**0,00**	**744.604.200,00**	**20.302.890.673,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah-LRA	0,00	11.345.500.000,00	0,00	744.604.200,00	16.898.462.084,00
1.3.2	Dana Darurat – LRA	15.250.000.000,00	0,00			
1.3.3	Pendapatan Lainnya-LRA					3.404.428.589,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2021

Tabel 3.3. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.	**BELANJA**	**2.801.145.395.510,00**	**3.580.571.793.429,00**	**3.656.101.961.037,95**	**4.156.494.291.530,00**	**4.501.905.708.338,00**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**1.652.297.771.698,00**	**2.344.089.708.829,00**	**2.403.408.272.253,95**	**2.776.034.327.996,00**	**2.904.429.743.652,00**
2.1.1	Belanja Pegawai	546.479.831.962,00	1.123.281.099.595,00	1.194.916.477.789,95	1.245.256.344.930,00	1.190.369.817.805,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	602.772.819.736,00	827.040.367.234,00	803.989.506.064,00	1.064.671.171.066,00	896.791.043.512,00
2.1.3	Belanja Bunga			0,00	4.000.000.000,00	5.786.177.935,00

NO.	URAIAN	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.1.4	Belanja Subsidi	1.196.820.000,00	1.297.582.000,00	1.986.500.000,00	3.045.000.000,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	501.568.300.000,00	392.020.660.000,00	400.065.788.400,00	455.361.812.000,00	808.012.704.400,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	280.000.000,00	450.000.000,00	2.450.000.000,00	3.700.000.000,00	3.470.000.000,00
2.2	**BELANJA MODAL**	**745.899.590.321,00**	**757.829.987.565,00**	**721.402.643.237,00**	**898.366.937.288,00**	**1.090.984.905.420,00**
2.2.1	Belanja Tanah	11.425.737.000,00	77.805.685.530,00	119.837.878.039,00	12.748.170.917,00	15.583.396.192,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	144.272.404.589,00	151.474.989.390,00	161.731.879.645,00	229.221.248.283,00	207.816.277.959,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	142.224.966.616,00	171.151.055.660,00	134.024.789.214,00	238.727.014.138,00	405.621.209.966,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	446.687.747.686,00	343.265.857.515,00	272.246.232.612,00	390.239.092.950,00	461.889.771.303,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.288.734.430,00	14.132.399.470,00	33.561.863.727,00	27.431.411.000,00	74.250.000,00
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**500.200.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**400.000.000,00**	**216.942.675.596,00**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	500.200.000,00	1.000.000.000,00	0,00	400.000.000,00	216.942.675.596,00
2.4	**TRANSFER**	**402.447.833.491,00**	**477.652.097.035,00**	**531.291.045.547,00**	**481.693.026.246,00**	**289.548.383.670,00**
2.4.1	**Transfer Bagi Hasil Pendapatan**	**388.066.552.643,00**	**436.813.490.592,00**	**487.280.042.375,00**	**479.462.760.646,00**	**289.548.383.670,00**
2.4.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	388,066,552,643.00	436,813,490,592.00	487,280,042,375.00	479,462,760,646.00	289,548,383,670.00

NO.	URAIAN	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.4.2	**Transfer Bantuan Keuangan**	**14.381.280.848,00**	**40.838.606.443,00**	**44.011.003.172,00**	**2.230.265.600,00**	**0,00**
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	13.000.000.000,00	39.800.000.000,00	42.575.566.772,00	1.000.000.000,00	0,00
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.381.280.848,00	1.038.606.443,00	1.435.436.400,00	1.230.265.600,00	0,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2021

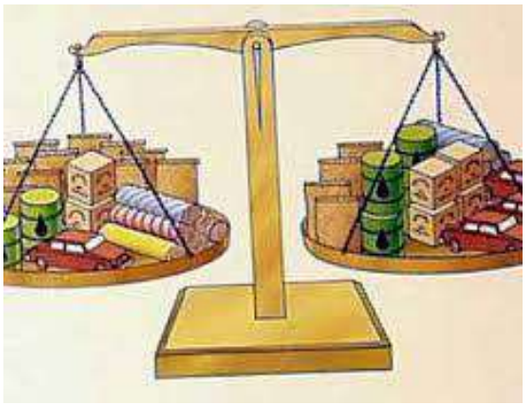
Tabel 3.4. Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	**PEMBIAYAAN**					
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**100.583.941.952,00**	**159.624.666.848,00**	**300.954.556.426,00**	**432.266.594.686,71**	**949.155.952.296,38**
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	100.583.941.952,00	159.624.666.848,00	300.954.556.426,00	374.596.153.723,71	195.997.699.977,38
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			0,00	0,00	0,00
3.1.4	Pinjaman Dalam Negeri			0,00	57.670.440.963,00	753.158.252.319,00
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**25.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**50.120.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**50.000.000,00**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO.	URAIAN	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.000.000.000,00	10.000.000.000,00	50.120.000.000,00	20.000.000.000,00	50.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**75.583.941.952,00**	**149.624.666.848,00**	**250.834.556.426,00**	**412.266.594.686,71**	**949.105.952.296,38**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**300.954.556.426,00**	**374.514.316.700,79**	**195.997.699.977,38**	**138.199.757.165,97**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2021

3.3.2. Neraca Daerah



Neraca Daerah merupakan potret kondisi keuangan Provinsi Sulawesi Utara serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah, serta analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Beberapa aset pemerintah daerah dapat digunakan sebagai sumber pendapatan lain yang sah. Terutama di masa pandemi COVID-19 dimana terjadi stagnasi pada pendapatan daerah. Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara harus mampu berinovasi untuk bisa mengoptimalkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ataupun pendapatan lain yang sah.

Hal ini sudah diawali dengan kebijakan penertiban aset daerah bersama KPK melakukan MoU dengan kabupaten kota. Selain itu dalam upaya penataan manajemen aset daerah, kabupaten kota harus memiliki peraturan daerah terkait pengelolaan Barang Milik Daerah. Optimalisasi aset daerah dan kerjasama antar daerah akan memberi *multiplier effect* pada penciptaan investasi baru.

3.3.2.1. Aset

Tabel 3.5
Neraca Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 - 2020

URAIAN	31 Desember 2016	31 Desember 2017	31 Desember 2018	31 Desember 2019	31 Desember 2020
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	163.348.773.188,00	307.640.495.537,00	375.142.273.812,66	181.420.540.532,38	138.371.202.794,97
Kas di Bendahara Penerimaan	988.000,00	4.093.000,00	4.707.128.153,00	63.284.173,00	26.089.035,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.253.936.332,00	82.658.000,00	1.967.599.234,05	1.179.385,00	0,00
Kas di BLUD	0,00			0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	663.899.511,00	1.550.307.406,00	22.971.498.288,00	243.610.544,53
Kas di Bendahara Pengeluaran Lainnya			0,00	1.261.400,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	96.719.066.523,04	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	197.547.222.1110,90
Piutang Pajak	104.787.545.156,00	108.427.251.139,00	117.102.934.269,00	148.631.998.741,00	0,00
Penyisihan Piutang Pajak	(27.683.573.648,91)	(37.821.767.756,06)	(45.197.127.698,46)	(17.037.211.100,64)	(33.302.896.316,21)
Piutang Pajak Netto	77.103.971.507,09	70.605.483.382,94	71.905.806.570,54	131.594.787.640,36	0,00
Piutang Retribusi	12.115.619.311,00	12.744.650.028,00	17.726.230.262,00	42.797.599.852,00	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(232.538.886,74)	(498.597.827,50)	(890.710.646,23)	(16.535.850.413,56)	0,00
Piutang Retribusi Netto	11.883.080.424,26	12.246.052.200,50	16.835.519.615,77	26.261.749.438,44	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	42.201.580.825,00	
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Netto	0,00	0,00	0,00	42.201.580.825,00	
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	3.514.621.389,33	15.074.817.191,33	14.003.538.085,33	12.194.435.090,33	

URAIAN	31 Desember 2016	31 Desember 2017	31 Desember 2018	31 Desember 2019	31 Desember 2020
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	(123.267.198,93)	(1.207.286.251,73)	(7.638.918.241,49)	(5.852.601.511,39)	
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto	3.391.354.190,40	13.867.530.939,60	6.364.619.843,84	6.341.833.578,94	
Piutang Lainnya	196.502.149,00	196.502.149,00	433.607.149,00	196.502.149,00	196.502.149,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(98.251.074,50)	(98.251.074,50)	(99.436.599,50)	(196.502.149,00)	
Piutang Lainnya Netto	98.251.074,50	98.251.074,50	334.170.549,50	0,00	
Beban Dibayar Dimuka	50.265.591,00	50.265.591,00	50.265.591,00	0,00	0,00
Persediaan	7.952.439.471,69	10.745.863.676,49	13.893.236.761,76	46.180.173.698,76	51.867.659.751,56
JUMLAH ASET LANCAR	**265.083.059.778,94**	**416.004.592.913,03**	**492.750.927.538,13**	**457.037.888.959,88**	**354.949.390.069,75**
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			0,00	0,00	
Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investasi dalam proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investasi Non Permanen Lainnya	944.147.700,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN	**944.147.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	449.805.175.986,31	537.542.947.796,99	600.284.572.713,67	609.677.439.291,28	575.689.296.645,54
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	**449.805.175.986,31**	**537.542.947.796,99**	**600.284.572.713,67**	**609.677.439.291,28**	**575.689.296.645,54**
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**450.749.323.686,31**	**537.542.947.796,99**	**600.284.572.713,67**	**609.677.439.291,28**	**575.689.296.645,54**
ASET TETAP					
Tanah	2.491.329.805.941,00	2.735.128.901.334,63	2.825.375.652.739,75	3.784.038.356.324,75	3.820.057.479.626,75
Peralatan dan Mesin	639.367.303.352,69	857.044.409.881,44	1.026.984.094.605,81	1.245.843.674.054,81	1.451.037.547.129,81
Gedung dan Bangunan	830.095.135.040,76	1.540.973.492.708,64	1.664.009.814.225,30	1.772.621.449.525,76	2.175.827.568.367,68
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.787.110.347.301,70	2.082.462.731.597,18	2.331.166.277.366,12	2.699.777.043.363,12	3.027.703.160.522,13

URAIAN	31 Desember 2016	31 Desember 2017	31 Desember 2018	31 Desember 2019	31 Desember 2020
Aset Tetap Lainnya	44.614.046.327,00	69.763.493.970,30	93.267.220.213,23	118.246.152.048,23	138.986.413.671,23
Konstruksi dalam Pengerjaan	192.088.461.124,00	77.890.598.157,00	115.848.736.545,00	253.206.416.681,11	512.505.319.941,35
Akumulasi Penyusutan	(1.166.188.712.241,01)	(1.885.982.690.184,82)	(2.098.807.073.897,37)	(2.435.564.765.157,00)	(2.828.426.834.289,28)
JUMLAH ASET TETAP	**4.818.416.386.846,15**	**5.477.280.937.464,37**	**5.957.844.721.797,84**	**5.002.603.561.684,00**	**8.297.690.654.969,67**
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ASET LAINNYA					
Tagihan Jangka Panjang	18.255.282.651,09	18.249.297.106,06	18.207.380.028,00	18.199.460.043,00	18.199.460.042,91
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	45.613.550.000,00	45.613.550.000,00	157.583.278.000,00	157.583.278.000,00	157.583.278.000,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	10.514.821.000,00	16.713.580.877,00	7.891.427.170,00
Aset Lain-lain	552.840.660.796,25	552.184.582.987,25	536.940.298.410,25	528.485.229.055,30	523.208.496.912,25
JUMLAH ASET LAINNYA	**616.709.493.447,34**	**616.047.430.093,31**	**723.245.777.438,16**	**720.981.547.975,20**	**706.882.662.125,16**
JUMLAH ASET	**6.150.958.263.758,74**	**7.046.875.908.267,70**	**7.774.125.999.487,80**	**6.790.300.437.909,80**	**9.935.212.003.810,12**

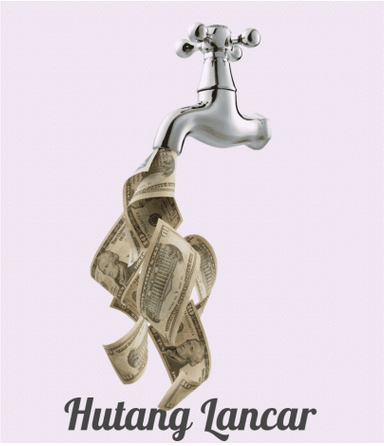
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2021



Beberapa aset pemerintah daerah dapat digunakan sebagai sumber pendapatan lain yang sah. Terutama di masa COVID-19 dimana terjadi stagnasi pada pendapatan daerah. Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara harus mampu berinovasi untuk bisa mengoptimalkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ataupun pendapatan lain yang sah. Hal ini sudah diawali dengan kebijakan penertiban aset daerah bersama KPK melakukan MoU dengan kabupaten kota. Selain itu dalam upaya penataan manajemen aset daerah, kabupaten kota harus memiliki peraturan daerah terkait pengelolaan Barang Milik Daerah. Optimalisasi aset daerah dan kerjasama antar daerah akan memberi multipler efek pada penciptaan investasi baru.

Posisi aset lancar secara menyeluruh terjadi peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada 2019, dimana pada 2016 sebesar Rp. 265.083.059.778,94, 2017 sebesar Rp. 416,004,592,913.03, 2018 sebesar Rp. 492,750,927,538.13 dan 2019 sebesar Rp. 457,037,888,959.88. Keadaan aset lancar ini dipengaruhi oleh kondisi SILPA tahun yang berjalan.

3.3.2.2. Kewajiban



Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara selama periode tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi dimana tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan namun meningkat lagi pada tahun 2019 (masih di bawah kewajiban jangka pendek tahun 2016)

Selanjutnya mengenai gambaran neraca Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun waktu tahun 2016-2019 secara rinci disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.6. Neraca Kewajiban Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2020

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2017	31 Desember 2018	31 Desember 2019	31 Desember 2020
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	4.980.132.672,00	6.772.690.111,00	7.246.676.904,00	8.458.802.401,00	441.145.208,53
Utang Bunga	0	0	0	0	0
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	381.749.994,00	371.249.987,00
Utang Beban	126.865.519.527,00	130.440.672.050,00	120.268.392.394,00	161.390.577.092,19	274.693.678.336,22
Utang Jangka Pendek Lainnya	53.993.158.494,15	15.113.428.719,15	29.698.746.988,00	13.486.689.891,26	149.013.990.572,34
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	185.838.810.693,15	152.326.790.880,15	157.213.816.285,69	183.717.819.378,45	424.520.064.104,09
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri	0	0	0	57.670.440.963,00	810.828.693.282,00
Utang Jangka Panjang Lainnya.	0	0	0	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0	57.670.440.963,00	810.828.693.282,00
EKUITAS					
EKUITAS	5.965.119.453.065,59	6.894.549.117.387,55	7.616.912.183.202,11	8.984.476.942.725,51	8.693.863.246.424,03
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	6.150.958.263.758,74	7.046.875.908.267,70	7.774.125.999.487,80	9.225.865.203.066,96	9.929.212.003.810,12

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2021

Dalam jangka menengah ke depan pemerintah daerah memiliki tambahan kewajiban yang harus dibayarkan. Diakhir periode RPJMD 2016-2021, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mempunyai kewajiban hutang yang harus dibayarkan lewat pinjaman dari PT. SMI untuk pembangunan Rumah Sakit daerah dan Percepatan Pemulihan Ekonomi (PEN).

3.3.2.3. Ekuitas Dana

Perkembangan ekuitas dana Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2016-2019 tumbuh rata- rata sebesar 14,67% per-tahun, dimana pada tahun 2016 sebesar Rp 5.965.119.453.065,59 terus meningkat sampai tahun 2019 menjadi Rp 8.984.476.942.725.51. Berdasarkan neraca keuangan Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya akan dilihat dari rasio keuangan daerah yang menunjang berbagai kegiatan pembangunan daerah dalam mencapai visi dan misi pemerintah daerah.

Tabel 3.7. Analisis Rasio Keuangan Tahun 2016 -2020
Provinsi Sulawesi Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	**Rasio Likuiditas**					
1.	Rasio lancar *(current ratio)*	1,43	2,73	3,13	2,49	0,84
2.	Rasio quick *(quick ratio)*	1,38	2,66	3,07	2,44	0,71
B	**Rasio Solvabilitas**					
1.	Rasio total hutang terhadap total aset	0,03021	0,02162	0,02022	0,02706	0,04273
2.	Rasio hutang terhadap modal	0,03115	0,02209	0,02064	0,02045	0,04883

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2021



Data menunjukkan bahwa rasio keuangan baik rasio likuiditas maupun rasio solvabilitas adalah positif artinya keuangan Provinsi Sulawesi Utara dalam kondisi baik. Sampai tahun 2018 terjadi peningkatan pada rasio likuiditas dan sebaliknya terjadi penurunan pada rasio solvabilitas. Di tahun 2019 dan 2020 yang terjadi adalah sebaliknya yaitu penurunan pada rasio likuiditas dan peningkatan pada rasio solvabilitas.

Pada tahun 2019 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan tekanan yang di hadapi Indonesia berasal dari arus modal asing yang keluar, perlemahan kurs dan penurunan cadangan devisa. Ini juga berdampak pada kinerja keuangan nasional sampai ke daerah. Potensi resiko ketidakpastian meningkat seiring dengan likuiditas yang mengetat.

A. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Sampai tahun 2018 rasio likuiditas terus meningkat namun di tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan. Ini harus menjadi perhatian karena penurunan rasio

likuiditas menunjukkan adanya peningkatan resiko keuangan terutama untuk memenuhi kewajiban daerah. Namun, keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara masih mampu membayar kewajiban jangka pendek dalam waktu dekat dengan potensi resiko ketidakpastian yang meningkat.

1. Rasio Lancar

Rasio Lancar merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek, karena memberi gambaran tentang kemampuan aktiva menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya.

Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada tahun 2016 sebesar 1,43 yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah 1,43 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo. Tahun berikutnya terjadi peningkatan rasio lancar 2,73 tahun 2017 dan 3,07 tahun 2018, namun mengalami penurunan menjadi 2,49 pada tahun 2019. Dalam 4 (empat) tahun terakhir rata-rata rasio lancar Provinsi Sulawesi Utara adalah 2,44. Dampak COVID 19 menurunkan rasio lancar cukup drastis menjadi 0,84 tahun 2020.

2. Rasio *Quicks*

Rasio ini juga digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Penghitungan *quick ratio* dengan mengurangkan aktiva lancar dengan persediaan. Hal ini dikarenakan persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang likuiditasnya rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian jika terjadi likuiditas. Jadi rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. *Quick Ratio* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid.

Berdasarkan tabel diatas, *Quick Ratio* pada Tahun 2016 adalah sebesar 1,38 dan meningkat tahun 2017 menjadi 2,66 dan tahun 2018 menjadi 3,07 dan menurun menjadi 2,44 tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara masih mampu membayar kewajiban jangka pendek dalam waktu dekat. Dampak COVID 19 menurunkan quick ratio menjadi 0,71.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansial baik jangka pendek maupun jangka panjang. Terjadi penurunan rasio solvabilitas yang cukup drastis di tahun 2020 karena adanya hutang jangka panjang yang digunakan untuk kebijakan PEN (pemulihan ekonomi nasional) akibat COVID 19. Namun karena nilai rasio solvabilitas masih positif berarti Provinsi Sulawesi Utara mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang. Ditunjukkan oleh adanya peningkatan disisi aset pada tahun 2020 disisi total aset sebesar 46,3 %. Rasio Solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilai diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada Tahun 2016 sebesar 0,03021 (3,02%) dan terus menurun sampai tahun 2018. Tahun 2019 naik menjadi 0,03555 (3,55%), namun masih bernilai positif. Dampak COVID 19 meningkatkan rasio total hutang terhadap aset cukup drastis menjadi

0,04273 (4,27%) tahun 2020. Artinya dalam 5 (lima) tahun terakhir terdapat penurunan pengaruh hutang terhada aktiva yang dimiliki daerah.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilai~~nya~~ berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2016 Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 0,03115 (3,11%) terus menurun sampai 0,02687 (2,68%) pada tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa dalam periode 2016-2019 nilai total hutang tidak mempengaruhi nilai modal yang dimiliki Provinsi Sulawesi Utara. Dampak COVID 19 meningkatkan rasio total hutang terhadap modal cukup drastis menjadi 0,04883 (4,88%) tahun 2020.

3.3.3.Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.3.3.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Suatu kinerja pemerintah yang baik, dapat dilihat juga melalui proporsi penggunaan anggaran. Proporsi penggunaan anggaran yang memenuhi aturan adalah persentase untuk layanan publik harus lebih besar daripada belanja aparatur ataupun kebutuhan pemerintah itu sendiri. Dengan kata lain kebutuhan belanja aparatur harus dibawah 50% dari total belanja yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara setiap tahun~~nya~~ berupaya untuk menekan pengeluaran tersebut.

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Peningkatan tersebut lebih disebabkan karena jumlah aparatur yang terus bertambah, juga berkenaan dengan peningkatan keahlian aparatur yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan. Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur sebagai berikut :

Tabel 3.8. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016 – 2020 Provinsi Sulawesi Utara

No	Uraian	Total Belanja Untuk pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	(%)
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2016	762.768.885.326,00	2.606.496.630.799,00	0,29
2	Tahun Anggaran 2017	2.213.405.876.435,00	3.396.528.187.391,00	0,65
3	Tahun Anggaran 2018	2.381.749.694.652,95	3.632.556.822.268,00	0,66
4	Tahun Anggaran 2019	1.486.765.626.696,00	4.297.911.929.750,00	0,35
5	Tahun Anggaran 2020	927.669.942.523,00	4.802.792.938.060,00	0,19

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2021

Dalam 5 (lima) tahun terakhir penggunaan anggaran untuk belanja kebutuhan aparatur meningkat persentasenya, karena adanya pelimpahan kewenangan kabupaten kota ke provinsi. Sehingga tetap perlu menjadi perhatian karena proporsi pengeluaran untuk non aparatur masih perlu di efisiensikan sehingga anggaran untuk pembangunan proporsinya menjadi lebih meningkat.

Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur sempat meningkat pada 2017 dan 2018 yakni sebesar 0,65 dan 0,66 dari sebelumnya hanya sebesar 0,29

pada 2016, namun pada 2019 dan 2020 mengalami penurunan yang berarti yakni sebesar 0,35 dan 0,19. Proporsi terakhir memperlihatkan bahwa kapasitas belanja pemerintah daerah provinsi meningkat untuk pelayanan publik.

3.3.3.2. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Dalam 5 (lima) tahun terakhir realisasi belanja kebutuhan aparatur untuk belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selang tahun 2016- 2019:

Tabel 3.9. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016 – 2020
Provinsi Sulawesi Utara

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	**Belanja Tidak Langsung**	**540.496.059.584,00**	**1.989.246.543.057,00**	**2.126.867.230.777,95**	**1.225.532.558.432,00**	**870.915.344.429,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	346.085.345.970,00	1.116.826.204.022,00	738.894.315.982,95	743.785.543.192,00	574.777.441.318,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan	170.810.971.758,00	369.695.968.128,00	413.985.892.847,00	441.607.512.018,00	265.249.989.693,00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	6.638.400.000,00	8.003.500.000,00	9.972.224.000,00	9.852.636.000,00	7.401.483.000,00
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah	16.961.341.856,00	19.703.477.944,00	28.221.464.001,00	30.286.867.222,00	23.486.428.398,00
B	**Belanja Langsung**	**222.272.825.742,00**	**224.159.333.378,00**	**254.882.463.875,00**	**261.233.068.264,00**	**56.754.600.114,00**
1	Belanja Honorarium PNS	16.150.261.000,00	15.875.034.000,00	13.471.218.000,00	21.394.178.224,00	9.801.048.900,00
2	Belanja Uang Lembur	5.983.772.378,00	6.094.095.573,00	3.842.580.959,00	102.458.000,00	114.360.000,00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	39.000.000,00	0,00	240.000.000,00	3.750.000.000,00	3.350.000,00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.327.536.300,00	402.491.000,00	851.960.000,00	5.045.633.070,00	274.050.000,00
5	Belanja premi asuransi kesehatan	0,00	0,00	0,00	24.172.140,00	36.808.120,00
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	43.935.000,00	0,00	0,00	5.332.500,00	20.434.461,00
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	5.328.605.530,00	7.085.084.833,00	5.059.761.620,00	6.378.024.113,00	2.440.235.750,00
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	5.770.605.465,00	3.471.469.556,00	11.198.112.646,00	10.227.672.116,00	1.176.925.250,00
9	Belanja perjalanan dinas	94.959.396.156,00	104.805.672.940,00	120.108.328.348,00	150.753.258.627,00	32.305.212.676,00
10	Belanja perjalanan pindah tugas	0,00	0,00	10.000.000,00	19.881.000,00	0,00
11	Belanja Pemulangan Pegawai	0,00	38.653.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
12	Belanja Modal Tanah (kantor)	0,00	3.461.679.000,00	4.171.469.000,00	0,00	0,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan darat bermotor	32.971.738.700,00	16.769.165.062,00	24.863.278.050,00	18.741.814.622,00	1.553.000.000,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.988.786.865,00	11.208.118.945,00	8.740.605.742,00	6.384.091.308,00	400.015.500,00
15	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	973.156.780,00	710.182.967,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.929.977.971,00	22.526.869.647,00	32.315.869.617,00	19.717.095.702,00	1.876.613.240,00
17	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	18.215.178.232,00	8.633.534.005,00	10.763.510.882,00	9.245.135.145,00	843.733.600,00
18	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.331.648.421,00	0,00	1.036.215.590,00	72.905.545,00	19.950.000,00
19	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.925.909.284,00	21.494.481.523,00	15.624.307.168,00	4.890.871.142,00	1.709.869.650,00
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi kerja/Rapat Pejabat	4.306.474.440,00	2.292.984.294,00	2.585.246.253,00	3.487.388.230,00	122.160.000,00
	TOTAL	**762.768.885.326,00**	**2.213.405.876.435,00**	**2.381.749.694.652,95**	**1.486.765.626.696,00**	**927.669.942.523,00**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2021

Tampak selang tahun 2016 – 2019 terdapat peningkatan belanja kebutuhan aparatur yang sangat tinggi sebesar 95% dimana untuk belanja langsung meningkat hanya 17,57% sedangkan belanja tidak langsung meningkat tajam sebesar 126%. Kontribusi terbesar peningkatan belanja kebutuhan aparatur dari pos belanja tidak langsung adalah dari belanja gaji dan tunjangan serta belanja tambahan penghasilan. Sedangkan kontribusi terbesar peningkatan kebutuhan aparatur dari pos belanja langsung adalah belanja perjalanan dinas dan belanja modal pengadaan peralatan dan mesin serta alat angkutan darat bermotor.

3.3.3.3. Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Terdapat pengeluaran wajib dan mengikat serta merupakan prioritas utama untuk belanja pemerintah daerah setiap tahunnya. Untuk belanja tidak langsung terdapat 5 (lima) pos belanja, dimana yang paling besar proporsinya setelah belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Khusus belanja gaji dan tunjangan tahun 2016 mencapai 77,71% menjadi 62,07% tahun 2019.

Belanja langsung terdapat 9 (sembilan) pos pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, dimana yang paling besar proporsinya setelah belanja jasa kantor yang mencapai 71,24% tahun 2016 dan meningkat menjadi 86,05% tahun 2019.

Tabel 3.10. Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Tahun 2016-2020 Provinsi Sulawesi Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
I.	**BELANJA**	**691.233.505.016,00**	**2.218.288.152.246,00**	**2.394.376.076.690,95**	**1.552.699.133.247,00**	**1.387.417.976.580,00**
A.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**537.915.998.576,00**	**1.989.246.543.057,00**	**2.126.867.230.777,95**	**1.197.475.956.810,00**	**1.171.428.914.011,00**
1	Gaji Dan Tunjangan	346.085.345.970,00	1.116.826.204.022,00	738.894.315.982,95	743.785.543.192,00	574.777.441.318,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	170.810.971.758.00	369.695.968.128,00	413.985.892.847,00	441.607.512.018,00	265.249.989.693,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	6.638.400.000,00	8.003.500.000,00	9.972.224.000,00	9.852.636.000,00	7.401.483.000,00
4	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.381.280.848,00	1.038.606.443,00	1.435.436.400,00	1.230.265.600,00	0,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	13.000.000.000,00	40.838.606.443,00	44.011.003.172,00	1.000.000.000,00	324.000.000.000,00
B.	**BELANJA LANGSUNG**	**153.317.506.440,00**	**229.041.609.189,00**	**267.508.845.912,00**	**355.223.176.437,00**	**215.989.062.569,00**
1	Honorarium PNS	16.150.261.000,00	15.875.034.000,00	13.471.218.000,00	21.394.178.224,00	9.801.048.900,00
2	Honorarium Non PNS	2.026.872.000,00	2.279.200.000,00	2.053.000.000,00	2.613.530.098,00	1.856.000.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	109.174.753.768,00	178.223.336.907,00	210.739.441.539,00	282.055.129.478,00	185.392.174.408,00
4	Belanja telepon	824.830.950,00	547.552.527,00	462.216.641,00	432.485.340,00	190.642.723,00
5	Belanja air	1.529.725.845,00	1.438.614.724,00	1.575.842.626,00	1.575.283.756,00	1.088.894.259,00
6	Belanja listrik	9.516.862.816,00	10.913.477.766,00	11.027.409.301,00	12.917.583.758,00	7.074.611.080,00
7	Belanja kawat/faksimili/internet	4.526.731.389,00	5.505.109.144,00	8.235.041.223,00	10.252.945.775,00	6.334.232.699,00
8	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	9.528.468.672,00	14.259.284.121,00	19.704.676.582,00	20.232.040.008,00	901.458.500,00
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	39.000.000,00	0,00	240.000.000,00	3.750.000.000,00	3.350.000.000,00
II.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**25.000.000.000.00**	**10.000.000.000,00**	**50.120.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**0,00**
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	25.000.000.000,00	10.000.000.000,00	50.120.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
2	Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pembayaran Hutang Pokok yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH (I + II)	**716.233.505.016,00**	**2.228.288.152.246,00**	**2.444.496.076.690,00**	**1.572.699.133.247,00**	**1.387.417.976.580,00**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2021

3.3.3.4. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan dearah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal dan transfer ke dana cadangan.

Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Gambaran Defisit Riil Anggaran selang tahun 2016 – 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.11. Defisit Riil Anggaran Tahun 2017 - 2020
Provinsi Sulawesi Utara

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	3.731.901.683.007,00	3.779.781.721.312,74	3.940.225.396.820,67	3.690.999.238.207,59
	Dikurangi Realiasi:				
2	Belanja Daerah	3.580.571.793.429,00	3.656.101.961.037,95	3.674.801.265.284,00	5.092.291.321.730,38
3	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	50.120.000.000,00	20.000.000.000,00	50.000.000.000,00
	Defisit Riil	**141.329.889.578,00**	**73.559.760.275,00**	**(216.268.894.709,33)**	**(810.906.470.130,41)**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2021

Komposisi penutup defisit riil di Provinsi Sulawesi Utara berasal dari SiLPA tahun angggaran sebelumnya dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan.



Tahun 2019 terdapat penerimaan pinjaman daerah sebesar 57,6 milliar rupiah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 1,75 milliar rupiah.

Tabel 3.12. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Prov. Sulut Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya	100.552.350.752,00	159.624.666.848,00	300.954.556.426,00	374.514.316.700,79	195.997.699.977,38
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	709.713.779,00	0	0	1.750.000.000,00	0
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	57.670.440.963,00	1.062.867.694.189,00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0				
7.	Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	159.624.657.827,00	300.954.556.426,00	374.514.316.707,79	195.997.699.977,38	138.199.482.165,97

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2021

Jumlah SiLPA dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung berkurang dari 159,6 miliar Rupiah tahun 2016 menjadi 138,20 miliar Rupiah tahun 2020.

Tabel 3.13. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp.)
1	Jumlah SiLPA	159.624.657.827,00	300.954.556.426,00	374.514.316.707,79	195.997.699.977,38	138.199.482.165,97
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2021

3.4. KERANGKA PENDANAAN
3.4.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Tabel 3.14. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2026
Provinsi Sulawesi Utara

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I.	**PENDAPATAN DAERAH**	**0,03**	**4.072.305.545.344,00**	**4.072.073.317.072,00**	**4.094.407.075.591,00**	**4.119.289.559.636,00**	**4.147.876.703.057,00**	**4.177.397.388.639,00**
I.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,09	1.413.292.261.344,00	1.433.060.033.072,00	1.455.393.791.591,00	1.480.276.275.636,00	1.508.863.419.057,00	1.538.384.104.639,00
I.1.1	Pajak daerah	0,07	1.123.928.911.759,00	1.135.943.855.914,00	1.149.962.344.088,00	1.166.051.304.247,00	1.185.509.000.477,00	1.205.551.132.829,00
I.1.2	Retribusi daerah	12,78	16.850.495.000,00	199.100.042.850,00	206.896.697.401,00	215.003.375.713,00	223.432.473.169,00	232.196.882.748,00
I.1.3	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	50.838.250.000,00	50.838.250.000,00	50.838.250.000,00	50.838.250.000,00	50.838.250.000,00	50.838.250.000,00
I.1.4	Lain-lain PAD yang sah	-0,78	221.674.604.585,00	47.177.884.308,00	47.696.500.102,00	48.383.345.677,00	49.083.695.411,00	49.797.839.062,00
I.2	PENDAPATAN TRANSFER	0	2.639.013.284.000,00	2.639.013.284.000,00	2.639.013.284.000,00	2.639.013.284.000,00	2.639.013.284.000,00	2.639.013.284.000,00
I.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0	2.639.013.284.000,00	2.639.013.284.000,00	2.639.013.284.000,00	2.639.013.284.000,00	2.639.013.284.000,00	2.639.013.284.000,00
I.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah		-	-	-	-	-	-
I.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		20.000.000.000,00	-	-	-	-	-
I.3.1	Pendapatan Hibah		20.000.000.000,00	-	-	-	-	-
I.3.2	Dana Darurat		-	-	-	-	-	-
I.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		-	-	-	-	-	-
II.	**BELANJA**	**-0,04**	**4.087.615.938.923,00**	**4.087.615.938.923,00**	**3.607.651.559.723,33**	**3.757.534.043.768,33**	**3.867.787.853.856,00**	**3.917.308.539.438,00**
II.1.	BELANJA OPERASI	-0,05	3.061.443.855.553,00	3.061.443.855.553,00	2.766.735.146.619,30	2.933.727.018.560,07	2.861.430.486.781,07	2.908.422.946.334,78

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II.1.1	Belanja Pegawai	0,13	1.366.234.187.402,00	1.366.234.187.402,00	1.407.221.213.024,06	1.449.437.849.414,78	1.492.920.984.897,23	1.537.708.614.444,14
II.1.2	Belanja Barang dan Jasa	-0,20	887.200.609.693,00	887.200.609.693,00	536.566.309.349,95	542.279.511.257,02	696.693.335.954,77	706.693.335.954,77
II.1.3	Belanja Bunga	-0,22	36.106.503.797,00	36.106.503.797,00	68.610.305.514,50	51.669.510.491,91	37.102.235.282,60	28.243.164.358,10
II.1.4	Belanja Subsidi	0,13	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	4.532.000.000,00	4.667.960.000,00	4.807.998.800,00	4.952.238.764,00
II.1.5	Belanja Hibah	-0,19	739.448.552.539,00	739.448.552.539,00	720.909.696.545,13	855.909.696.545,13	599.250.566.269,70	599.250.566.269,70
II.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,13	28.054.002.122,00	28.054.002.122,00	28.895.622.185,66	29.762.490.851,23	30.655.365.576,77	31.575.026.544,07
II.2	**BELANJA MODAL**	-0,18	**562.085.671.563,00**	**562.085.671.563,00**	**299.406.089.981,70**	**279.299.392.392,27**	**458.762.505.274,45**	**458.110.885.448,73**
II.2.1	Belanja Modal Tanah	0,13	39.735.594.774,00	39.735.594.774,00	25.375.150.822,68	24.450.185.647.53	43.420.157.270,61	44.722.761.988,73
II.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-0,26	131.827.300.593,00	131.827.300.593,00	64.184.914.158,69	71.116.238.255.48	97.234.917.667,38	97.234.917.667,38
II.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-0,35	168.307.562.294,00	168.307.562.294,00	97.481.209.280,95	76.404.987.315,92	111.434.677.262,20	109.436.746.042,32
II.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-0,07	220.881.953.901,00	220.881.953.901,00	110.991.557.918,36	105.913.525.638,27	205.215.863.873,15	205.215.863.873,15
II.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,13	1.333.260.001,00	1.333.260.001,00	1.373.257.801,03	1.414.455.535,06	1.456.889.201,11	1.500.595.877,15
II.2.6	Belanja Modal Aset tidak berwujud							
II.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	0,13	**7.000.313.711,00**	**7.000.313.711,00**	**7.210.323.122,33**	**7.426.632.816,00**	**7.649.431.800,48**	**7.878.914.754,49**
II.3.1	Belanja Tidak Terduga	0.13	7.000.313.711,00	7.000.313.711,00	7.210.323.122,33	7.426.632.816,00	7.649.431.800,48	7.878.914.754,49
II.4	**BELANJA TRANSFER**	0,19	**457.086.098.096,00**	**457.086.098.096,00**	**534.300.000.000,00**	**537.081.000.000,00**	**539.945.430.000,00**	**542.895.792.900,00**
II.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,20	367.086.098.096,00	367.086.098.096,00	441.600.000.000,00	441.600.000.000,00	441.600.000.000,00	441.600.000.000,00
II.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,13	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	92.700.000.000,00	95.481.000.000,00	98.345.430.000,00	101.295.792.900,00
III.	**PEMBIAYAAN DAERAH**							
III.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-0,69	95.470.393.579,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
III.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggran Rahn Sebelumnya (SILPA)	-0,63	80.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
III.1.2	Pencairan Dana Cadangan							
III.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dpisahkan							
III.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		15.470.393.579,00					
III.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah							
III.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan perundangan							
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan							
III.2	Pengeluaran Pembiayaan	2,62	80.160.000.000,00	325.227.648.713,66	516.755.515.867,67	391.755.515.867,67	310.088.849.201,00	290.088.849.201,00
III.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			-	-	-	-	-
III.2.2	Penyertaan Modal Daerah	342,75	160.000.000,00	150.000.000.000,00	175.000.000.000,00	50.000.000.000,00	75.000.000.000,00	55.000.000.000,00
III.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	1,94	80.000.000.000,00	175.227.648.713,66	341.755.515.867,67	341.755.515.867,67	235.088.849.201,00	235.088.849.201,00
III.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah							
III.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan							
	Pembiayaan Neto	-17,99	15.310.393.579,00	(295.227.648.713,66)	(486.755.515.867,67)	(361.755.515.867,67)	(280.088.849.201,00)	(260.088.849.201,00)
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		-	(310.770.270.564,66)	-	-	-	-

Proyeksi pendapatan daerah 2021-2026 didasari pada perkembangan yang terjadi pada lima tahun sebelumnya dan sangat diwarnai pada kondisi yang terjadi pada 2020 dimana pendapatan daerah umumnya baik PAD maupun Pendapatan Transfer dan lainnya mengalami penurunan. Kemudian diperkirakan mulai 2021 akan terus meningkat dengan harapan bahwa khususnya PAD akan meningkat tajam karena beroperasinya Rumah Sakit Umum Daerah yang memberikan kontribusi retribusi. Khususnya Pajak Daerah diperkirakan akan meningkat sesuai dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Daerah, disamping itu optimalisasi dari Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Oleh sebab itu rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah 2021-2026 diharapkan sebesar 0,03 % sehingga pendapatan daerah bisa mencapai sebesar Rp. 4.177.397.388.639,00 pada tahun 2026.

Proyeksi belanja daerah 2021-2026 tetap diarahkan pada pencapaian Visi dan Misi Pemimpin Daerah sebagaimana memenuhi target indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terjabar pada indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci. Secara umum pada tahun 2021 dan 2022 tetap menjaga pagu anggaran tetap memadai untuk menyanggah kesehatan dan pemulihan ekonomi. Menyangga kesehatan sudah termasuk stunting dan sanitasi disamping infrastruktur yang terarah dalam rangka superhub.

Peningkatan belanja daerah harus seiring dengan efisiensi dan efektifitas dengan mengandalkan teknologi digital. Oleh sebab itu, maka proporsi masing-masing pos belanja seperti belanja sosial dan belanja hibah harus diperhitungkan untuk kecukupan dan mengarah kepada prioritas penerima.

Peningkatan belanja akan dikembangkan dengan sumber pembiayaan kemitraan seperti KPBU dan lainnya, sambil mengoptimalkan DAK dengan pendalaman kebutuhan daerah yang bersinergi dengan Pemerintah Pusat serta peningkatan belanja aparatur dengan mempertimbangkan prinsip keseimbangan dan motivasi melayani sebagaimana tujuan Reformasi Birokrasi. Belanja juga diarahkan untuk belanja tidak terduga untuk penanganan pandemi juga secara preventif penanggulangan bencana mengingat Provinsi Sulawesi Utara adalah daerah rawan bencana.

3.4.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Guna menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun kedepan dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai

pembangunan daerah, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.15 berikut ini.

Tabel 3.15. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2026

No.	Uraian	Proyeksi (Rp.)				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pendapatan	4.072.073.317.072,00	4.094.407.075.591,00	4.119.289.559.636,00	4.147.876.703.057,00	4.177.397.388.639,00
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Penerimaan	4.072.073.317.072,00	4.094.407.075.591,00	4.119.289.559.636,00	4.147.876.703.057,00	4.177.397.388.639,00
	Dikurangi:					
4.	Belanja Pegawai	1.366.234.187.402,00	1.407.221.213.024,06	1.449.437.849.414,78	1.492.920.984.897,23	1.537.708.614.444,14
5.	Pengeluaran Pembiayaan	325.227.648.713,66	516.755.515.867,67	391.755.515.867,67	310.088.849.201,00	290.088.849.201,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Daerah	**2.380.611.480.956,34**	**2.170.430.346.699,27**	**2.278.096.194.353,55**	**2.344.866.868.958,77**	**2.349.599.924.993,86**

Berdasarkan tabel 3.15 diatas, diperoleh proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Belanja Daerah dengan proyeksi seperti pada Tabel 3.16, berikut ini.

Tabel 3.16. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2026

No.	Uraian	Proyeksi (Rp.)				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	**Kapasitas riil kemampuan keuangan**	**2.380.611.480.956,34**	**2.170.430.346.699,27**	**2.278.096.194.353,55**	**2.344.866.868.958,77**	**2.349.599.924.993,86**
2.	**Rencana alokasi pengeluaran prioritas I**	**1.174.222.337.396,00**	**912.594.385.289,69**	**1.193.570.866.059,50**	**1.074.149.652.651,70**	**1.074.647.176.747,29**
	Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi-Misi Kepala Daerah dan	562.085.671.563,00	299.406.089.981,70	279.299.392.392,27	458.762.505.274,45	458.110.885.448,73

No.	Uraian	Proyeksi (Rp.)				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Prioritas Pembangunan Daerah					
	Bantuan Hibah					
	- Hibah BOS	577.082.350.000,00	577.082.350.000,00	577.082.350.000,00	577.082.350.000,00	577.082.350.000,00
	- Hibah KPU dan Bawaslu (Pilkada)			300.000.000.000,00		
	Bantuan Sosial	28.054.002.122,00	28.895.622.185,66	29.762.490.851,23	30.655.365.576,77	31.575.026.544,07
	Belanja Tidak Terduga	7.000.313.711,00	7.210.323.122,33	7.426.632.816,00	7.649.431.800,48	7.878.914.754,49
3.	**Rencana alokasi pengeluaran prioritas II**	**739.113.325.700,00**	**735.443.147.785,13**	**885.697.042.816,13**	**644.687.059.947,70**	**660.741.758.189,70**
	Tambahan Penghasilan	486.747.123.161,00	498.915.801.240,00	511.388.696.271,00	524.173.413.678,00	537.277.749.020,00
	Bantuan Hibah :					
	Hibah Lainnya	162.366.202.539,00	143.827.346.545,13	278.827.346.545,13	22.168.216.269,70	22.168.216.269,70
	Bantuan kepada Kabupaten/Kota	90.000.000.000,00	92.700.000.000,00	95.481.000.000,00	98.345.430.000,00	101.295.792.900,00
4.	**Surplus Anggaran Riil/Berimbang**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Pembangunan daerah bagian dari upaya mewujudkan pelaksanaan visi dan misi kepala daerah untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat. Eksistensi kondisi Provinsi Sulawesi Utara telah diuraikan pada Bab sebelumnya, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah pada 5 tahun sebelumnya menunjukkan adanya gap antara capaian indikator pembangunan dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, capaian beberapa indikator pembangunan juga menunjukkan ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara yang dipetakan lebih lanjut di Bab 7. Kenyataan ini menjadi dasar dalam penentuan berbagai permasalahan yang perlu ditindak lanjuti pada perencanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan. Berikut ini adalah uraian permasalahan yang menunjukkan adanya gap antara capaian indikator pembangunan dengan target yang telah ditetapkan.

4.1.1. Aspek Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar. Pada aspek ini masyarakat berhak mendapatkan kebutuhan dasar dilayani dan difasilitasi Pemda agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Beberapa permasalahan pembangunan terindentifikasi dari aspek pelayanan dasar dan kesejahteraan:

a) Rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
b) Masih adanya kasus Stunting, rendahnya kasus HIV yang diobati dan masih tingginya Angka Kesakitan Malaria Per 1.000 penduduk;
c) Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, lansia, anak dan perempuan;
d) Jumlah penduduk miskin yang tinggi di beberapa daerah;
e) Tingginya gap capaian akses air minum layak, sanitasi layak, serta permukiman layak huni dan berkelanjutan.
f) Rendahnya dimensi ekonomi budaya, dimensi warisan budaya, dimensi literasi dan eksprsi budaya.

4.1.2. Aspek Lingkungan Hidup

Perencanaan pembangunan jangka menengah harus menjamin keberlangsungan lingkungan hidup daerah atau menjamin pembangunan berkelanjutan. Beberapa masalah yang diangkat dalam aspek ini :

a) Rendahnya tutupan lahan, khususnya di kawasan perkotaan;
b) Tingginya perambahan hutan;
c) Meningkatnya intensitas kejadian banjir dan longsor;
d) Tingginya pencemaran air permukaan;
e) Belum optimalnya Pengelolaan sampah;
f) Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 dan Medis;
g) Belum optimalnya pengelolaan drainase.

4.1.3. Aspek Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Kebijakan pemulihan dimasa Pandemi "*Corona Virus Disease (COVID-19)*" diantaranya menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi melalui ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan. Beberapa masalah yang harus diperhatikan diantaranya :

a) Perlambatan pertumbuhan ekonomi;
b) Tingginya angka pengangguran;
c) Tingkat inflasi yang sangat fluktuatif;
d) Belum optimalnya pengelolaan industri pariwisata;
e) Rendahnya daya saing UMKM dan IKM;
f) Rendahnya produktifitas beberapa komoditi unggulan daerah (Kelapa, Cengkih, Pala dan produk Perikanan);
g) Rendahnya Sumber Pangan Hewani;
h) rendahnya produktifitas tanaman pangan, terbatasnya diversifikasi pangan, berkurangnya lahan pertanian pangan berkelanjutan akibat alih fungsi lahan, belum adanya database sumber pangan dan belum stabilnya harga pangan

4.1.4. Aspek Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pengembangan infrastruktur yang merata menjadi salah satu pendorong percepatan perekonomian daerah, beberapa permasalahan dari aspek infrastruktur:

a) Ketersediaan infrastruktur wilayah (Jalan, Listrik, Air Baku dan Telekomunikasi) belum merata;
b) Transformasi energi belum terpadu dan berkelanjutan;
c) Infrastruktur konektivitas antar daerah, kepulauan dan daratan belum terintegrasi;
d) Belum terwujudnya kebijakan satu peta di Provinsi Sulawesi Utara;

4.1.5. Aspek Tata Kelola Pemerintahan

Aspek tata kelola terutama berhubungan dengan pencapaian 8 (delapan) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan yang terdiri atas:

a) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah;
b) Kurangnya inovasi pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
c) Lemahnya Pelaksanaan Penegakan Perda;

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mencapai tujuan yang diinginkan daerah. Upaya mencapai visi dan misi RPJPD Provinsi Sulawesi Utara melalui pelaksanaan RPJMD 2021-2026 tidak terlepas dari berbagai isu eksternal dan internal yang ikut mempengaruhi perekonomian daerah.

4.2.1. Isu Internasional

a) Menangani Pandemi *COVID-19* dan mengembangkan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*);
   Ketika COVID-19 mendapatkan status sebagai pandemic, secara langsung telah merubah wajah dunia dan pola hidup global dari keadaan "normal" ke *"new normal"*. Penciptaan pra kondisi ini menyasar enam kriteria yang relevan dengan kesehatan publik, yaitu transmisi penyebaran terkontrol, kapasitas fasilitas kesehatan memadai, risiko perluasan pandemi minimal, standar pencegahan terpenuhi di ruang-ruang publik, risiko penyebaran terkendali, serta publik teredukasi, terlibat, dan diberdayakan optimal. Dengan demikian, lapisan infrastruktur dasar sebagai prakondisi menuju kenormalan baru dibangun untuk pemenuhan syarat-syarat tersebut.
   Perkembangan terkini tentang pandemi ini adalah pengembangan/pengadaan vaksin. Poin penting adalah bahwa

keterdesakan yang mendorong pengembangan vaksin harus sama dengan keterdesakan distribusi vaksin dan vaksinasi secara adil dan merata untuk "herd immunity" atau "kekebalan kelompok", namun tetap menerapkan Protokol Kesehatan berkelanjutan.

b) Tujuan Pembanguan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*;
Pencanangan TPB dilaksanakan oleh Sidang Umum PBB yang dicetuskan tanggal 21 Oktober 2015 yang secara umum dikenal dengan "Agenda 2030". TPB mencakup 1) Tanpa kemiskinan; 2) Tanpa kelaparan; 3) Kehidupan sehat dan sejahtera; 4) Pendidikan berkualitas; 5) Kesetaraan gender; 6) Air bersih dan sanitasi layak; 8) Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi; 9) Industri, inovasi dan infrastruktur; 10) Berkurangnya kesenjangan; 11) Kota dan komunitas berkelanjutan; 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; 13) Penanganan perubahan iklim; 14) melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, daya perikanan dan kemaritiman serta pemanfaatan yang berkelanjutan; 15) Ekosistem daratan; 16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh; 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

c) Konvensi Global Perubahan Iklim;
United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) merupakan sebuah perjanjian internasional tentang lingkungan, secara khusus menyangkut perubahan iklim. Tujuannya menyasar usaha stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sampai pada level yang akan mencegah intervensi manusia yang membahayakan dengan sistem iklim bumi. Level tersebut haruslah dicapai dalam rentang waktu yang cukup untuk membiarkan ekosistem beradaptasi secara natural terhadap perubahan iklim, untuk menjamin bahwa produksi pangan tidak terancam, dan untuk memberdayakan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka mengusung keseimbangan pilar-pilar keberlanjutan (*sustainability pilars)*: ekonomi, lingkungan dan sosial, maka Pemerintah Indonesia telah menunjukan komitmen nyata pembangunan berkelanjutan melalui pembangunan rendah karbon (PRK) - *Low Carbon Development Indonesia (LCDI)*. *LCDI* merupakan *platform* baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan beremisi gas rumah kaca (GRK) rendah dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam (SDA). dan untuk itu Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan PRK-*LCDI* ke dalam RPJMN 2020-2024. Sulawesi Utara sejak tahun 2016 telah menjadi percontohan pembangunan rendah karbon di Kawasan Masyarakat Ekonomi Asia Pasifik - *Asia Pacific Economy Community* (APEC) *Energy Working Group (EWG)* dikenal dengan *Low Carbon Model Town (LCMT)* yaitu Kota Model Rendah Karbon di Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.

d) Perang Dagang
Perang dagang antara Amerika Serikat dan China merupakan perselisihan dagang antara dua negara dengan ekonomi terbesar. Perselisihan ini telah menyaksikan bagaimana AS dan China saling membebankan tarif sebesar ratusan miliar dolar terhadap barang yang diperdagangkan kedua negara tersebut. Secara khusus, kondisi ini mempengaruhi pelaku ekonomi di kedua negara dan tentunya perkembangan ekonomi keduanya. Secara global, kemandekan ekonomi akibat perang dagang ini mempengaruhi kondisi perdagangan negara-negara yang berhubungan dengan dinamika ekonomi kedua negara tersebut.

e) Industri 4.0

Term Industrie 4.0. mencakup seluruh mata rantai dari produsen ke pengguna dan semua fungsi dan jasa suatu bisnis. Tujuannya adalah menghasilkan produk cerdas yang melampaui proses manufaktur dan menjangkau semua data sepanjang masa berlakunya. Industri 4.0 adalah spesialisasi *internet of things* yang diaplikasikan dalam lingkungan industri manufaktur. Industri ini akan mengarah ke proses koleksi data yang masif dan keamanan digital. Sembilan pilar *Industrie* 4.0 mencakup *big data* dan analisis data, utilisasi robot, simulasi, sistem terintegrasi, *internet of things*, keamanan digital dan sistem siber-fisik, *cloud*, proses manufaktur aditif, realitas berimbuh.

Industrie 4.0 ini secara global kemudian diseimbangkan dengan society 5.0 yang menjamin peran yang berkelanjutan dari manusia dalam perkembangan industri global. *Society 5.0* juga menjamin tujuan akhir pengembangan industri terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan global.

4.2.2. Isu Nasional

Proses perencanaan dari atas ke bawah (*top down*) mengharuskan daerah untuk mengangkat isu strategis nasional terutama yang berkaitan dengan Provinsi Sulawesi Utara ke dalam perencanaan lima tahun kedepan, diantaranya:

a) Implementasi *Online Single Submission (OSS)*;
b) Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja;
c) Transformasi Ekonomi dalam rangka mengubah struktur perekonomian daerah;
d) Konvergensi Penanganan Stunting;
e) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
f) Penguatan Struktur Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
g) Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim;
h) Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
i) Kota Layak Huni;
j) Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM) Manado;
k) Pengembangan Super Hub di Sulut sebagai pintu gerbang untuk kawasan Asia Pasifik;
l) Kebijakan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Likupang;
m) Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan;
n) Pengarusutamaan Gender;
o) Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya;
p) Pengarusutamaan Transformasi Digital.
q) Peningkatan Pengelolaan Pangan dan Pembangunan Pertanian.

4.2.3. Isu Strategis Pembangunan Sulawesi Utara 2021-2026

Berdasarkan hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, juga isu-isu global dan nasional, maka telah diidentifikasi isu isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah Sulawesi Utara untuk lima tahun mendatang, yaitu:

a) Perwujudan Sulut sebagai *Super Hub* di Indonesia Timur;
b) Pengembangan kawasan perbatasan dan kepulauan;
c) Penurunan kemiskinan dan pengangguran;
d) Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
e) Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja;

f) Peningkatan daya saing dan kemudahan berinvestasi;
g) Perwujudan kedaulatan pangan, pembangunan *Food Estate*, dan penguatan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
h) Optimalisasi sumberdaya perikanan dan kemaritiman serta pemanfaatan yang berkelanjutan;
i) Optimalisasi pendapatan daerah;
j) Pemerataan infrastruktur, sanitasi dan air minum layak;
k) Peningkatan moda transportasi dari pusat-pusat produksi;
l) Penguatan kepariwisataan terutama Manado – Likupang yang menjadi bagian dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas dan penetapan KEK Pariwisata Likupang;
m) Peningkatan industri dan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi;
n) Perencanaan pembangunan berdasarkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
o) Optimalisasi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
p) Transformasi energi terpadu dan berkelanjutan;
q) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
r) Perencanaan pembangunan rendah karbon/*Low Carbon Development Indonesia (LCDI);*
s) Transformasi Digital;
t) Peningkatan pemajuan kebudayaan dan pelestarian nilai budaya.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Gerakan pembangunan daerah di Sulawesi Utara pada Tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara lima tahun kedepan. Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2021-2026 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program prioritas daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta basional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

5.1. Visi

Visi pembangunan Sulawesi Utara tahun 2021-2026 adalah implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara periode 2021-2016 yaitu:

========== ⁂ ==========

"Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera
sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik"

========== ⁂ ==========

Visi ini terdiri dari 3 (tiga) kata dan/atau kalimat kunci yaitu:

1. Maju
2. Sejahtera
3. Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik

Visi 2021-2026 ini mengacu pada Visi Nasional dalam RPJMN (tegak lurus) dan arahan tahapan pelaksanaan untuk pencapaian Visi Pembangunan Sulawesi Utara dalam RPJPD 2005-2025. Dalam konteks pembangunan Sulawesi Utara, Visi ini menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang akan dicapai 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah. Aktualisasi pokok-pokok visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

Maju

Ukuran "**Maju**" ditunjukkan oleh:

1. Kemampuan untuk menjamin Pemberdayaan Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata dan jasa Sebagai Sumber Ketahanan Ekonomi daerah.
2. Kemampuan untuk meningkatkan kapasitas penerimaan dan pembiayaan pembangunan dan mengoptimalkan belanja daerah bersumber dari sumber daya lokal sehingga mengurangi ketergantungan sumber daya dari luar daerah.
3. Kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan kemajuan IPTEK/Digitalisasi dalam berbagai bidang.
4. Memiliki Litbang yang handal.
5. Terbentuknya Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental.

Sejahtera

Ukuran "**Sejahtera**" ditunjukkan oleh:

1. Kemampuan menanggulangi kemiskinan, pengangguran serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Kemampuan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, cerdas dan sehat serta mampu memiliki daya saing.
3. Kemampuan beradaptasi dengan kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19.

Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik

Ukuran "**Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik**" ditunjukkan oleh:

1. Kesiapan untuk membangun sarana, prasarana, infrastruktur dan konektivitas yang merata dan berkeadilan dalam koridor ketahanan lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan.
2. Pelabuhan Hub Internasional Bitung sebagai pintu ekspor/impor ke Asia dan Pasifik.
3. Kesiapan kebijakan, sumberdaya manusia sebagai tujuan wisata dunia, tujuan MICE (*Meeting, Insentives, Conference and Exebition*), tujuan studi, pengembangan ilmu dan teknologi.
4. Kemampuan pemerintah membangun jaringan kerjasama regional, bilateral dan internasional untuk mendukung peningkatan kemampuan daerah.
5. Implementasi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

5.2. Misi

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, telah dirumuskan Misi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan Sulawesi Utara. Misi Pembangunan Sulawesi Utara 2021-2026 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

MISI 1	**Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara**
MISI 2	**Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa**
MISI 3	**Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas**
MISI 4	**Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan**
MISI 5	**Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah**

Masing-masing Misi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara**

   Misi ini mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, semakin berkepribadian, berdaya saing dan berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin, sekaligus meningkatnya rata-rata lama sekolah dan manajemen pendidikan yang memperhatikan kompetensi dan profesionalitas guru

agar sesuai dengan SPM pendidikan. Selain itu, diupayakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia, meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, peningkatan efektivitas pencegahan dan pengendalian (*promotif* dan *preventif*) penyakit dan penyehatan lingkungan yang membentuk sistim kesehatan yang optimal, serta berkembangnya jaminan kesehatan. Didukung dengan kualitas manusia yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi didukung dengan kelitbangan yang handal.

Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu berdaya saing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi.

2. **Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa**

   Misi kedua ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program Perekonomian daerah Sulawesi Utara dengan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam pendekatan kewilayahan (perdesaan / perbatasan / daerah tertinggal), sektor unggulan (pertanian, Perikanan, Pariwisata dan jasa), pelaku (usaha mikro dan kecil), atau karakter aktivitas ekonomi (tradisional). Didukung dengan keberadaan KEK Industri dan KEK Pariwisata.

   Melalui misi ini Sulawesi Utara akan menuju pada transformasi ekonomi yang bertumpu pada sektor unggulan daerah dengan peningkatan produksi, akumulasi nilai tambah melalui industri pengolahan yang didukung dengan Distribusi, logistik dan transportasi sampai pada pasar yang baik dan memadai. Hal ini akan memberikan daya ungkit untuk menyiapkan destinasi Pariwisata di Sulawesi Utara yang berlebih menarik. Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) tetap dilanjutkan untuk percepatan penurunan Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran, serta mendorong PDRB perkapita yang tinggi.

3. **Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas**

   Misi ketiga ini dikembangkan untuk memperkuat posisi geografis (geoposisi) Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina dan berada pada ALKI II dan ALKI III ditunjang dengan penetapan pelabuhan Bitung sebagai hub internasional serta Bandara Internasional Sam Ratulangi sebagai Hub. Kondisi ini mengokohkan Sulawesi Utara sebagai wilayah prioritas dalam pengembangan pembangunan yang berorientasi global khususnya ke Asia Timur dan pasifik sebagai Super Hub.

   Hal ini akan menentukan untuk mewujudkan Pintu Gerbang yang didukung dengan ketersediaan Infrastruktur yang memadai untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan Industri, mempercepat akses ke kawasan pariwisata, mendongrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat.

   Pembangunan Infrasrtuktur dan Pengembangan Kawasan Pariwisata mengacu pada Dokumen Perencanaan yang dihasilkan melalui Integrated Planning Infrastruktur dan Pariwisata.

4. **Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan**

   Misi keempat ini mengarahkan kebijakan pembangunan daerah Sulawesi Utara agar dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah tertuang dalam komitmen SDGs.

   Semua urusan pembangunan harus mengakomodir asas pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi hari sejalan dengan juga menjaga kelestarian bumi.

Kondisi ini akan ditunjukkan dengan peningkatan indeks kesesuaian pemanfaatan ruang dan indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

5. **Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah**

   Misi kelima ini untuk mendukung percepatan implementasi reformasi birokrasi secara optimal dan sinergitas antar daerah (Pusat-Provinsi-Kabupaten/Kota). Pada peiode sebelumnya telah terwujud tata kelola pemerintahan Sulawesi Utara yang membaik, dalam periode kedepan ini reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas bersama-sama Provinsi dn Kabupaten/Kota.

   Reformasi birokrasi kedepan diharapkan bertumpu pada 3 (tiga) dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumberdaya manusia aparatur yang semakin baik.

   Hal ini akan didukung dengan proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel.

   Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik didukung dengan reformasi Birokrasi, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan sinergitas antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara bahkan mengoptimalkan kerjasama antar daerah.

5.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pembanguna Daerah yang diuraikan diatas, maka ditetapkan prioritas Pembangunan Daerah pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi dan Reformasi sosial dampak Pandemi COVID-19.
2. Pembangunan konektivitas (menunjang pariwisata, perdagangan dan jasa, serta dukungan fasilitas pertunjukan untuk seni, budaya dan olahraga).
3. Meningkatkan sarana pendidikan yang layak dan adaptif teknologi, serta dukungan bagi generasi milenial agar memiliki karakter budaya dan intelektualitas yang mumpuni.
4. Meningkatkan soliditas dan peran tokoh agama untuk menjaga harmonisasi kerukunan yang telah terbina sangat baik.
5. Melanjutkan dan meningkatkan program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan yang terbukti efektif dan berhasil.
6. Melanjutkan dan meningkatkan kualitas sektor pariwisata yang terbukti berhasil dan jadi role model nasional, serta dukungan bagi UMKM, ekonomi kreatif, pelaku usaha dan sektor riil.
7. Percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan menciptakan multiplyer effect dan lapangan kerja yang luas. (KEK Industri Bitung, KEK Pariwisata Likupang, dan Kawasan Industri Bolaang Mongondow (KIMONG)).
8. Memperbanyak fasilitas pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah di tiap Kabupaten Kota, serta peningkatan kapasitas tenaga medis.
9. Iklim investasi dan usaha yang makin kondusif dengan kemudahan regulasi dan sistem perizinan yang tetap berpihak pada lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
10. Percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik, regulasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital serta dukungan pembiayaan ekosistem digital agar Sulut lebih maju sebagai *smart province*.

5.4 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah Sulawesi Utara lebih terarah dalam implementasinya kedepan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Utara tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. **Misi 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara**
   Misi ini memiliki tujuan Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, dengan sasaran Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia. Tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender (IDG).
2. **Misi 2 : Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa**
   Misi kedua bertujuan untuk Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, dengan sasaran Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat. Dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, semakin kecilnya Indeks Gini (Gini Ratio), dan penurunan Persentasi Angka Kemiskinan, serta peningkatan PDRB Sub Sektor Pariwisata.
3. **Misi 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas**
   Misi Ketiga memiliki tujuan Terbangunnya Infrastruktur dan konektivitas yang memadai dengan sasaran Meningkatnya Infrastruktur Dan Konektivitas. Tujuan dan sasaran ini diukur dengan Indikator kinerja peningkatan Indeks Infrastruktur.
4. **Misi 4 : Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan**
   Misi keempat memiliki tujuan Terwujudnya Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan sasaran Meningkatnya Pembanginan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. Dimana Tujuan dan Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja peningkatan Indeks Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
5. **Misi 5 : Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah**
   Misi Kelima bertujuan Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi serta sinergitas antar daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan. Tujuan dan sasaran ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu Opini BPK, Nilai Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP), Indeks Reformasi Birokrasi dan Kualifikasi Penilaian Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Menuju Kategori IV.

Penjabaran tujuan, sasaran, dan indikator kinerjanya pada setiap misi disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara	Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter	Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,93	72,93	73	74	75	76	77	77
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94,53	94,53	94,6	94,65	94,7	94,75	94,8	94,8
			Prevalensi Stunting	%	21,2	21,2	16,2	15	14	13	12	12
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	56,02	56,32	57,28	58,06	59,28	59,52	60,10	60,10
Penguatan Ekonomi yang bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	%	(0,99)	(0,99)*	4,5–5,5	5,0–5,7	5,7–6,0	6,0–6,5	6,5–7,0	6,5–7,0
			Indeks Gini (Gini Ratio)	Angka	0,367	0,367	0,360	0,355	0,350	0,345	0,340	0,340
			Persentasi Angka Kemiskinan	%	7,62	7,78	7,5–6,9	5,93	5,65	5,37	5,09	5,09
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,37	7,28 (Maret)	6,47–7,18	6,00–6,50	5,50–6,00	5,00–5,50	4,50–5,00	4,50– 5,00
Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	Terbangunnya Infrastruktur dan konektivitas yang memadai	Meningkatnya Infrastruktur Dan Konektivitas	Indeks infrastruktur	Angka	0,880	0,880	0,885	0,89	0,895	0,90	0,90	0,90
Pembangunan Daerah yang berkelanjutan	Terwujudnya Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan	Meningkatnya Pembanginan Yang Berkelanjutan	Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang.	Angka	0,53	0,53	0,60	0,68	0,77	0,86	0,95	0,95

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	berwawasan lingkungan	Dan Berwawasan Lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup.	Angka	70,51	70,51	70,81	71,11	71,41	71,71	72,01	72,01
			Akses Air Minum Layak	%	90	90	92	94	96	98	100	100
			Akses Sanitasi Layak	%	82	83	85	87	89	91	93	93
Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh Sinergitas Antar Daerah	Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK Kualifikasi Penilaian	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	56,51	57,48	59,95	61,00	62,50	64,00	65,00	65,00
			Indeks SPBE	Angka	n/a	2,8	3,0	3,3	3,6	4,0	4,5	4,5

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan hasil analisa isu-isu strategis yang dikemukakan pada Bab IV yang kemudian dikaitkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang dijabarkan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026.Strategi merupakan serangkaian cara yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Rumusan Strategi merupakan penjabaran langkah-langkah pelaksanaan Sasaran yang akan diambil untuk mencapai Tujuan Pembangunan Daerah. Dalam proses perencanaan pembangunan, penentuan strategi menjadi hal yang krusial mengingat penetapan strategi yang tepat akan membuat pencapaian tujuan pembangunan menjadi lebih mudah, efektif dan efisien. Arah Kebijakan merupakan langkah-langkah penjabaran terhadap strategi terpilih yang berisikan serangkaian kerangka pikir untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis yang disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan daerah. Pada akhirnya, arah kebijakan akan menjadi pedoman bagi setiap pemangku kepentingan dalam menyusun program prioritas yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam perumusan strategi dan arah kebijakan, digunakan 3 (tiga) pendekatan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan komprehensif. Ketiga pendekatan itu adalah: Pendekatan Holistik-Tematik, Pendekatan Integratif dan Pendekatan Spasial. Pendekatan holistik-tematik merupakan sebuah pendekatan yang mengedepankan pemenuhan penyelesaian permasalahan terhadap suatu isu strategis dan permasalahan pembangunan dengan memadukan berbagai sektor yang terkait. Pendekatan ini menekankan pada identifikasi tentang isu yang akan ditangani yang diikuti dengan penyusunan strategi dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain, Pendekatan Holistik-Tematik merupakan pendekatan yang menekankan pada penyelesaian secara meyeluruh terhadap sebuah permasalahan yang timbul.

Sedangkan pendekatan integratif adalah sebuah pendekatan perencanaan yang menekankan pada keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyelesaian terhadap permasalahan yang mengemuka. Pendekatan integratif menekankan tentang pentingnya menggabungkan berbagai aspek ke dalam suatu proses penyelesaian permasalahan. Dalam hal ini, pendekatan integratif akan lebih menyasar pada kesesuaian *output* dengan prioritas pembangunan daerah.

Terakhir, adalah pendekatan Spasial. Pendekatan Spasial merupakan pendekatan yang berbasis ruang. Dalam konteks perencanaan pembangunan, pendekatan spatial digunakan untuk mengidentifikasi lokasi atau tempat pelaksanaan kegiatan. Selain itu, dengan pendekatan spasial, *outcome* atau hasil pelaksanaan program dan kegiatan akan lebih nampak. Pada akhirnya, dengan pendekatan ini akan lebih mudah untuk mengukur capaian pembangunan daerah karena ketepatan sasaran dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat dan diukur.

Pelaksanaan Pembangunan di Sulawesi Utara Periode 2021 – 2026 tidak terlepas dari RPJPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2025, dimana telah masuk dalam Tahap keempat RPJPD Provinsi Sulawesi Utara. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah 2021 – 2026 disajikan dalam tabel berikut:

6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

A. Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara.

Misi ini mengandung pengertian bahwa kualitas dan daya saing masyarakat Sulawesi Utara diharapkan akan semakin meningkat. Tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan. Termasuk menjamin seluruh anak usia sekolah untuk dapat bersekolah hingga tamat SMA, serta mendorong perkembangan pendidikan vokasi. Di Sektor Kesehatan, percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat akan terus digalakkan, termasuk penanganan penyakit menular serta mendorong terus pelaksanaan Aksi Konvergensi Penanganan Stunting di Sulawesi Utara. Untuk itu, diperlukan beberapa strategi agar kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Sulawesi Utara dapat semakin meningkat. Strategi yang ditempuh antara lain:

a. Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan;
b. Menyediakan pendidikan yang inklusif, terjangkau dan berkualitas, termasuk Pelaksanaan Program Paket C;
c. Mendorong peran serta pemuda serta memajukan keolahragaan;
d. Mendorong kemajuan pelaksanaan pendidikan vokasi;
e. Mendorong peningkatan peran keluarga serta kesetaraan gender;
f. Mendorong pelestarian budaya dan kearifan lokal;
g. Meningkatkan cakupan terhadap perlindungan bagi tenaga kerja formal dan non formal;
h. Pemberian Jaminan Sosial bagi masyarakat miskin.
i. Meningkatkan efektifitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta penyehatan lingkungan;

B. Penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa.

Perekonomian Sulawesi Utara pada tahun 2020 mengalami kontraksi akibat Pandemi COVID-19. Sektor Akomodasi dan Makan Minum mengalami kontraksi terbesar. Hal ini menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran mengalami sedikit kenaikan. Jika dilihat dari komponen pembentuk PDRB, sektor informasi dan komunikasi, pertanian dan industry masih mencatat pertumbuhan positif, sedangkan sector transportasi, perdagangan dan konstruksi mengalami pertumbuhan negative.

Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Sulawesi Utara. Hal ini mengingat kontribusinya terhadap pembentukan PDRB masih yang terbesar. Demikian juga dengan sector perikanan. Sebagai Provinsi Kepulauan, sector perikanan menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Sulawesi Utara. Sementara itu, sector pariwisata sedang giat-giatnya dibidik oleh Pemerintah Provinsi sebagai primadona baru Sulawesi Utara. Dengan ditetapkannya Kawasan Pariwisata Likupang sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas dan KEK Pariwisata Likupang sebagai salah satu KEK Pariwisata di Indonesia, maka kesempatan untuk mengembangkan sector pariwisata semakin besar.

Untuk itu, diperlukan beberapa terobosan yang perlu dilakukan demi meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Untuk itu, beberapa strategi yang diperlukan antara lain:

a. Menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
b. Mendorong pengembangan pertanian organik;
c. Mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat;

d. Meningkatkan daya saing sektor industri pengolahan, pertanian, perkebunan dan perikanan, termasuk pengembangan komoditi Kelapa dan turunannya serta peningkatan produktivitas Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
e. Pengembangan kawasan pariwisata di sepanjang Koridor Pantai Utara (Pantura) dan Koridor Pantai Selatan (Pansela) Sulawesi Utara;
f. Meningkatkan produktifitas sektor UMKM;
g. Mendorong kinerja ekspor daerah;
h. Diversifikasi komoditas ekspor, termasuk pengembangan komoditi Sarang Burung Walet dan Tanaman Porang;
i. Meningkatkan inovasi daerah untuk menarik investasi;

C. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas.

Infrastruktur dan konektifitas merupakan 2 (dua) hal mendasar dalam menilai kesuksesan sebuah pembangunan. Tanpa infrastruktur dan konektifitas yang memadai, maka pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah akan mengalami hambatan yang signifikan. Pada periode 2021 – 2026, sektor infrastruktur dan konektifitas kembali menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, mengingat masih terdapat beberapa permasalahan di daerah yang membutuhkan penanganan infrastruktur dan konektifitas yang komprehensif.

Saat ini, Rasio Kemantapan Jalan Provinsi berada di angka 0,89. Sementara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menargetkan bahwa sampai tahun 2026 Rasio Kemantapan Jalan berada di atas 0,90. Demikian juga dengan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air seperti Jaringan Irigasi, Bangunan Pengaman Pantai serta Pengaman Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi akan terus dipacu. Demikian juga dengan infrastruktur keciptakaryaan, dimana ditargetkan TPA Regional akan beroperasi tahun 2023 dan SPAM Regional akan segera dibangun segera setelah selesainya pembangunan Bendungan Kuwil sebagai sumber air baku.

Di sektor perhubungan, pengembangan transportasi massal, optimalisasi pemanfaatan jalan Tol Manado – Bitung, Perencanaan Pembangunan Jalur Kereta Api Perkotaan Manado – Bitung, fasilitasi pembangunan bandar udara baru serta pengelolaan pelabuhan pengumpan regional untuk menunjang terciptanya konektifitas antar daerah, termasuk untuk menunjang pengembangan sektor pariwisata di berbagai daerah di Sulawesi Utara.

Untuk menunjang hal tersebut, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

a. Mengembangkan sistem konektifitas antar daerah yang berkualitas;
b. Mendorong pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif, adil dan merata;
c. Mendorong terwujudnya Sulut sebagai *Super Hub* di kawasan Indonesia Timur;
d. Mendorong transformasi digital di seluruh wilayah Sulawesi Utara;
e. Mendorong pembangunan kawasan Perbatasan, daerah terluar, terpencil dan tertinggal;
f. Meningkatkan tingkat kemantapan infrastruktur penunjang ekonomi wilayah;
g. Pengembangan Infrastruktur Kawasan sekitar Danau Tondano;
h. Membangun infrastruktur perdesaan;
i. Peningkatan Kapasitas *Bandwidth Data Center*, mendorong intergrasi Jaringan *Fiber Optic* Laut Pasifik dengan Palapa Ring Agar Sulawesi Utara menjadi *Backbone Data Center* di Indonesia.

D. Pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pengarusutamaan Pembangunan berkelanjutan merupakan amanat dalam RPJMN 2020 – 2024. Pembangunan Berkelanjutan dimaksudkan agar setiap aspek pembangunan yang dilaksanakan agar selalu berwawasan lingkungan. Dengan kata lain, pembangunan daerah yang dilaksanakan agar dapat menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, strategi yang akan ditempuh antara lain:

a. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
b. Mendorong pencapaian pemenuhan target akses air minum dan sanitasi layak;
c. Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan;
d. Mendorong upaya mitigasi terhadap perubahan iklim;
e. Meningkatkan pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam, keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya, termasuk pengelolaan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan.

E. Pemerintahan yang baik dan Bersih didukung oleh sinergitas antar daerah.

Reformasi birokrasi yang mencakup tata kelola pemerintahan sangat berkaitan erat dengan aspek pelayanan kepada masyarakat. Efektifitas dan efisiensi birokrasi dalam pelayanan kepada masyakarat harus bisa diterapkan di setiap sendi pelayanan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan ASN yang professional, penerapan Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik *(e-government),* Pelaksanaan Pelayanan Terpadu kepada masyarakat, peningkatan inovasi pelayanan public serta peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah.

Selain itu, perlu mendorong tercapainya sinergitas antar daerah, yakni antara Pemerintah Provinsi dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta antarpemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. Sinergitas antar daerah yang terjalin dengan baik akan memudahkan pencapaian target pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Beberapa strategi yang diperlukan untuk pencapaian pembangunan misi ini antara lain:

a. Percepatan penerapan reformasi birokrasi;
b. Mendorong inovasi pelayanan publik pada setiap Perangkat Daerah dan tata kelola perencanaan dan keuangan daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
c. Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan dan sinergitas antar daerah serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
d. Mendorong sinergitas program antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada **Tabel 6.1** berikut:

Tabel 6.1. (Modifikasi Tabel t.c.12)
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
VISI: "Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik"			
Misi 1: ***Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara***	Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter	Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia	- Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan; - Menyediakan pendidikan yang inklusif, terjangkau dan berkualitas, termasuk Pelaksanaan Program Paket C; - Mendorong peran serta pemuda serta memajukan keolahragaan; - Mendorong kemajuan pelaksanaan pendidikan vokasi; - Mendorong peningkatan peran keluarga serta kesetaraan gender; - Mendorong pelestarian budaya dan kearifan lokal; - Meningkatkan cakupan terhadap perlindungan bagi tenaga kerja formal dan non formal; - Pemberian Jaminan Sosial bagi masyarakat miskin. - Meningkatkan efektifitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta penyehatan lingkungan;
Misi 2: ***Penguatan Ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa***	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	- Menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat; - Mendorong pengembangan pertanian organik; - Mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat; - Meningkatkan daya saing sektor industri

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			pengolahan, pertanian, perkebunan dan perikanan, termasuk pengembangan komoditi Kelapa dan turunannya serta peningkatan produktivitas Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya; - Pengembangan kawasan pariwisata di sepanjang Koridor Pantai Utara (Pantura) dan Koridor Pantai Selatan (Pansela) Sulawesi Utara; - Meningkatkan produktifitas sektor UMKM; - Mendorong kinerja ekspor daerah; - Diversifikasi komoditas ekspor, termasuk pengembangan komoditi Sarang Burung Walet dan Tanaman Porang; - Meningkatkan inovasi daerah untuk menarik investasi;
Misi 3: ***Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas***	Terbangunnya Infrastruktur dan konektivitas yang memadai	Meningkatnya Infrastruktur Dan Konektivitas	- Mengembangkan sistem konektifitas antar daerah yang berkualitas; - Mendorong pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif, adil dan merata; - Mendorong terwujudnya Sulut sebagai *Super Hub* di kawasan Indonesia Timur; - Mendorong transformasi digital di seluruh wilayah Sulawesi Utara; - Mendorong pembangunan kawasan Perbatasan, daerah terluar, terpencil dan tertinggal; - Meningkatkan tingkat kemantapan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			infrastruktur penunjang ekonomi wilayah; - Pengembangan Infrastruktur Kawasan sekitar Danau Tondano; - Membangun infrastruktur perdesaan; - Peningkatan Kapasitas *Bandwidth Data Center*, mendorong intergrasi Jaringan *Fiber Optic* Laut Pasifik dengan Palapa Ring Agar Sulawesi Utara menjadi *Backbone Data Center* di Indonesia.
Misi 4: ***Pembangunan Daerah yang berkelanjutan***	Terwujudnya Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan	- Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; - Mendorong pencapaian pemenuhan target akses air minum dan sanitasi layak; - Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan; - Mendorong upaya mitigasi terhadap perubahan iklim; - Meningkatkan pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam, keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya, termasuk pengelolaan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan.
Misi 5: ***Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah***	Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	- Percepatan penerapan reformasi birokrasi; - Mendorong inovasi pelayanan publik pada setiap Perangkat Daerah dan tata kelola perencanaan dan keuangan daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); - Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan dan sinergitas antar daerah serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); - Mendorong sinergitas program antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah agar tetap sesuai dengan visi dan misi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026 maka perlu ditetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang nantinya akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah lima tahun yang akan berikutnya. Arah Kebijakan ini nantinya akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan fokus dan tema pelaksanaan pembangunan tahunan. Adapun arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2. (Tabel T.C.13) Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022 - 2026

ARAH KEBIJAKAN				
TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
Mempercepat Pemulihan ekonomi daerah melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan SDM dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata dan berwawasan lingkungan serta suksesnya pelaksanaan Pemilu	Sulawesi Utara sebagai *Super Hub* di Kawasan Timur Indonesia	Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik

A. Arah Kebijakan Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun pertama periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2022 – 2026. Dengan asumsi bahwa pandemic COVID-19 telah mulai dapat dikendalikan, maka Arah Kebijakan untuk Tahun 2022 difokuskan pada **"Mempercepat Pemulihan ekonomi daerah melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur".** Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 diarahkan pada:

a. Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dampak Pandemi Covid-19;
b. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;

c. Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran;
d. Adaptasi Lingkungan dan Mitigasi Bencana;
e. Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
f. Penguatan UMKM dan Industri Pengolahan;
g. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Sosial; dan
h. Memperkuat stabilitas Trantibmas dan Transformasi Pelayanan Publik.

B. Arah Kebijakan Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dalam periode 2021 – 2026. Arah Kebijakan di Tahun 2023 ini diarahkan pada **"Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan SDM dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan"**. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 adalah:

a. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
b. Peningkatan Kualitas SDM;
c. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah;
d. Pembangunan Infrastruktur dan konektifitas yang berkualitas;
e. Pembangunan Kepariwisataan;
f. Penanggulangan Bencana dan Mitigasi Perubahan Iklim;
g. Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

C. Arah Kebijakan Tahun 2024

Arah Kebijakan Pada Tahun 2024 difokuskan pada **"Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata dan berwawasan lingkungan serta suksesnya pelaksanaan Pemilu".** Pada tahun ini akan dilaksanakan salah satu agenda nasional, yakni Pemilihan Umum (Pemilihan Presiden dan Legislatif serta Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak), sehingga diperlukan stabilitas daerah yang baik untuk melaksanakan agenda nasional dimaksud. Adapun prioritas pembangunan daerah tahun 2024 adalah:

a. Pembangunan yang berwawasan lingkungan;
b. Pemerataan Pembangunan;
c. Penanggulangan Kemiskinan;
d. Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata;
e. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
f. Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah; dan
g. Stabilitas Daerah yang terjamin.

D. Arah Kebijakan Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun ke empat dari periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2021 – 2026. Tahun ini juga sekaligus sebagai akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Periode 2005 – 2025. Oleh karena itu maka Arah kebijakan Pembangunan Daerah pada tahun 2025 ini difokuskan pada **"Sulawesi Utara sebagai *Super Hub* di Kawasan Timur Indonesia".** Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 diarahkan pada:

a. Pemerataan Pembangunan yang berkualitas dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan;
b. Penguatan kapasitas SDM Sulawesi Utara;
c. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
d. Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah;
e. Penanggulangan Kemiskinan;
f. Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata;

g. Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

E. Arah Kebijakan Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun terakhir periode 2021 – 2026. Pada tahun ini diharapkan semua target capaian yang telah ditetapkan dapat dipenuhi. Untuk itu, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2026 berfokus pada **"Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik".** Diharapkan bahwa di tahun ini Sulawesi Utara benar-benar telah layak disebut sebagai Pintu Gerbang NKRI di Kawasan Asia Pasifik. Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 meliputi:

a. Pemerataan Pembangunan yang berkualitas dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan;
b. Penguatan kapasitas SDM Sulawesi Utara;
c. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
d. Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah;
e. Penanggulangan Kemiskinan;
f. Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata;
g. Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

6.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan dasar penetapan Program Pembangunan Daerah. Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program Pembangunan Daerah merupakan instrument pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang telah dijabarkan ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Daerah.

Program Pembangunan Daerah menempati posisi strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini karena melalui Program pembangunan Daerah, pemenuhan target sasaran serta Indikator Kinerja Utama akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya. Oleh karena itu maka tidak semua program yang ada dimasukkan dalam Program pembangunan Daerah, tapi hanya program prioritas yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian target kinerja yang berkenaan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran.

Rincian Program Pembangunan Daerah dijelaskan dalam **Tabel 6.1** berikut:

Tabel. 6.1. Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif
RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026
(Tabel T.C.14)

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
MISI 1 : PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA SULAWESI UTARA																	
TUJUAN : MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA YAITU SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT DAN CERDAS, ADAPTIF, INOVATIF, TERAMPIL, DAN BERKARAKTER																	
SASARAN : Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia																	
Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia		***Indeks Pembangunan Manusia (IPM)***	**4,07**	**72,93**	**73**	**1.221.994.045.991,00**	**74**	**1.078.551.390.488,55**	**75**	**1.123.360.585.306,96**	**76**	**1.156.322.305.198,18**	**77**	**1.171.127.117.527,82**	**77**	**5.751.355.444.512,51**	
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	**0,27**	**94,53**	**94,6**		**94,65**		**94,7**		**94,75**		**94,8**		**94,8**		
		Prevalensi Stunting (%)	**9,2**	**21,2**	**16,2**		**15**		**14**		**13**		**12**		**12**		
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	**3,78**	**56,32**	**57,28**		**58,06**		**59,28**		**59,52**		**60,1**		**60,1**		
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100%	100%	100%	832.937.252.303,00	100%	735.134.470.146,51	100%	765.676.161.512,38	100%	788.142.681.606,87	100%	798.233.557.167,87	100%	3.920.124.122.736,61	Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL	100%	100%	100%	400.000.000,00	100%	353.032.340,97	100%	367.699.324,00	100%	378.488.381,65	100%	383.334.305,18	100%	1.882.554.351,79	Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	1:12	1:14	1:14	1.000.000.000,00	1:14	882.580.852,42	1:13	919.248.310,00	1:13	946.220.954,13	1:12	958.335.762,94	1:12	4.706.385.879,49	Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	100%	0	100%	1.500.000.000,00	100%	1.323.871.278,62	100%	1.378.872.464,99	100%	1.419.331.431,20	100%	1.437.503.644,41	100%	7.059.578.819,23	Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut
5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	100%	0	100%	1.000.000.000,00	100%	882.580.852,42	100%	919.248.310,00	100%	946.220.954,13	100%	958.335.762,94	100%	4.706.385.879,49	Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut
6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG	19,61%	(80,39%)	100%	291.510.729.726,00	100%	257.281.788.329,94	100%	267.970.745.646,37	100%	275.833.560.821,27	100%	279.365.157.577,49	100%	1.371.961.982.101,07	Dinas Kesehatan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)															Daerah Prov. Sulut
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	50/100.000 penduduk	45/100.000 penduduk	45/100.000 penduduk	21.000.000.000,00	45/100.000 penduduk	18.534.197.900,73	45/100.000 penduduk	19.304.214.509,92	50/100.000 penduduk	19.870.640.036,79	50/100.000 penduduk	20.125.051.021,76	50/100.000 penduduk	98.834.103.469,20	Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut
8	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100%	100%	100%	2.000.000.000,00	100%	1.765.161.704,83	100%	1.838.496.619,99	100%	1.892.441.908,27	100%	1.916.671.525,88	100%	9.412.771.758,97	Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT	100%	100%	100%	8.000.000.000,00	100%	7.060.646.819,33	100%	7.353.986.479,97	100%	7.569.767.633,06	100%	7.666.686.103,53	100%	37.651.087.035,89	Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE POTENSI SUMBER (PSKS) KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG TERLATIH DAN PRODUKTIF	31,30%	5%	10%	403.734.159,00	15,20%	356.328.038,20	20,40%	371.131.943,35	25,80%	382.021.721,14	31,30%	386.912.883,29	31,30%	1.900.128.744,98	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
11	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG TERTANGANI	100%	0%	0%	-	100%	8.568.746,14	100%	8.924.740,87	100%	9.186.611,21	100%	9.304.230,71	100%	35.984.328,93	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
12	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100%	100%	100%	4.831.416.371,00	100%	4.264.115.579,09	100%	4.441.271.333,93	100%	4.571.587.408,38	100%	4.630.119.093,99	100%	22.738.509.786,39	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
13	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG DILAKSANAKAN	100%	100%	100%	425.000.000,00	100%	375.096.862,28	100%	390.680.531,75	100%	402.143.905,51	100%	407.292.699,25	100%	2.000.213.998,78	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
14	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG APBD	60%	25%	69%	960.000.000,00	70%	847.277.618,32	75%	882.478.377,60	80%	908.372.115,97	85%	920.002.332,42	85%	4.518.130.444,31	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut
15	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN)	9	31	29	955.000.000,00	28	842.864.714,06	26	877.882.136,05	24	903.641.011,20	22	915.210.653,61	22	4.494.598.514,91	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	RASIO KELUARGA YANG MEMAHAMI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (PER 10.000 KK)	15	10	12,5	700.000.000,00	15	617.806.596,69	17,5	643.473.817,00	20	662.354.667,89	25	670.835.034,06	25	3.294.470.115,64	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut
17	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA PENYEDIA DATA GENDER DAN ANAK YANG DIPERBAHARUI SECARA BERKALA	20%	75%	80%	300.000.000,00	85%	264.774.255,72	89%	275.774.493,00	93%	283.866.286,24	95%	287.500.728,88	95%	1.411.915.763,85	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut
18	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG DIFASILITASI UNTUK MENDAPATKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK	100%	100%	100%	505.000.000,00	100%	445.703.330,47	100%	464.220.396,55	100%	477.841.581,84	100%	483.959.560,29	100%	2.376.724.869,14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut
19	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	44	51	52	500.000.000,00	65	441.290.426,21	75	459.624.155,00	85	473.110.477,07	95	479.167.881,47	95	2.353.192.939,74	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut
20	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	CAKUPAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)	4%	95%	97,5%	357.580.118,00	98,0%	315.593.365,35	98,5%	328.704.919,16	98,5%	338.349.800,43	99%	342.681.815,20	99%	1.682.910.018,14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
21	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	CAKUPAN PENERBITAN AKTA PENCATATAN SIPIL (LAHIR, MATI, KAWIN, CERAI)	12%	68%	70%	523.954.570,00	72,5%	462.432.271,02	75%	481.644.352,99	77,5%	495.776.793,15	80%	502.124.402,59	80%	2.465.932.389,74	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
22	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	80%	80%	80%	447.436.312,00	80%	394.898.721,65	80%	411.305.073,64	80%	423.373.614,05	80%	428.794.219,43	80%	2.105.807.940,77	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
23	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN SKALA PROVINSI DALAM SATU TAHUN	100%	100%	100%	80.243.272,00	100%	70.821.175,40	100%	73.763.492,17	100%	75.927.865,39	100%	76.899.997,29	100%	377.655.802,26	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
24	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY	2,21	2,25	2,25	102.617.636,00	2,24	90.568.360,65	2,23	94.331.088,47	2,22	97.098.957,45	2,21	98.342.150,49	2,21	482.958.193,06	Dinas Kependudukan dan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN															Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
25	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN (MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE (MCPR))	9%	62,5%	62,5%	76.292.803,00	65%	67.334.567,10	67%	70.132.030,22	69%	72.189.848,85	71%	73.114.121,57	71%	359.063.370,75	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
26	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	ANGKA KELAHIRAN REMAJA UMUR 15-19 TAHUN (AGE SPECIFIC FERTILITY RATE / ASFR 15-19)	0,04%	30%	30%	153.475.058,00	30%	135.454.147,51	29,80%	141.081.687,69	29,80%	145.221.315,82	29,60%	147.080.636,80	29,60%	722.312.845,82	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
27	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	5%	95%	95%	9.942.320.183,00	100%	8.774.901.422,10	100%	9.139.461.025,66	100%	9.407.631.689,85	100%	9.528.080.997,98	100%	46.792.395.318,60	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Prov. Sulut
28	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	100%	100%	100%	5.956.794.338,00	100%	5.257.352.624,50	100%	5.475.773.128,20	100%	5.636.443.622,07	100%	5.708.609.046,59	100%	28.034.972.759,36	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Prov. Sulut
29	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI	100%	0,55%	0,55%	1.300.000.000,00	0,65%	1.147.355.108,14	0,75%	1.195.022.803,00	0,85%	1.230.087.240,37	0,95%	1.245.836.491,82	0,95%	6.118.301.643,33	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Prov. Sulut
30	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	7 Prestasi	6 Prestasi	6 Prestasi	20.650.000.000,00	6 Prestasi	18.225.294.602,39	6 Prestasi	18.982.477.601,42	7 Prestasi	19.539.462.702,84	7 Preatasi	19.789.633.504,73	32 Prestasi	97.186.868.411,38	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Prov. Sulut
31	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN	0,32%	6,69%	6,69%	400.000.000,00	6,79%	353.032.340,97	6,89%	367.699.324,00	6,99%	378.488.381,65	7,01%	383.334.305,18	7,01%	1.882.554.351,79	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
32	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100%	100%	100%	43.319.574,00	100%	38.233.026,55	100%	39.821.445,19	100%	40.989.888,64	100%	41.514.697,00	100%	203.878.631,38	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Prov. Sulut
33	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	TINGKAT KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH	10%	90%	95%	191.167.770,00	95%	168.721.013,40	100%	175.730.649,50	100%	180.886.949,73	100%	183.202.910,71	100%	899.709.293,34	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Prov. Sulut
34	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	TERLESETARIKANNYA CAGAR BUDAYA	100%	100%	100%	490.000.000,00	100%	432.464.617,68	100%	450.431.671,90	100%	463.648.267,53	100%	469.584.523,84	100%	2.306.129.080,95	Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut
35	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	PERSENTASE PENDUDUK YANG PERNAH TERLIBAT SEBAGAI PELAKU/PENDUKUNG PERTUNJUKAN SENI YANG MENJADIKAN KETERLIBATAN SEBAGAI SUMBER PENGHASILAN (TERHADAP PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS).	0,02%	0,016%	0,019%	135.000.000,00	0,020%	119.148.415,08	0,021%	124.098.521,85	0,022%	127.739.828,81	0,023%	129.375.328,00	0,023%	635.362.093,73	Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut
36	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG MENGUNJUNGI PENINGGALAN SEJARAH	6%	5%	9%	337.000.000,00	9,5%	297.429.747,26	10%	309.786.680,47	10,5%	318.876.461,54	11%	322.959.152,11	11%	1.586.052.041,39	Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut
37	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	JUMLAH CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA YANG DITETAPKAN	24 Unit	15 Unit	19 Unit	326.000.000,00	24 Unit	287.721.357,89	29 Unit	299.674.949,06	34 Unit	308.468.031,05	39 Unit	312.417.458,72	39 Unit	1.534.281.796,71	Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut
38	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	STANDAR PENGELOLAAN MUSEUM NEGERI	A	C	B	1.428.000.000,00	B	1.260.325.457,25	A	1.312.686.586,67	A	1.351.203.522,50	A	1.368.503.469,48	A	6.720.719.035,91	Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut
39	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT	3	59	61	255.000.000,00	61,5	225.058.117,37	61,7	234.408.319,05	61,9	241.286.343,30	62	244.375.619,55	62	1.200.128.399,27	Dinas Perpustakaan dan Arsip

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																	Daerah Prov. Sulut
40	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT	5,39	4,66	8,13	45.000.000,00	8,80	39.716.138,36	9,00	41.366.173,95	10,02	42.579.942,94	10,05	43.125.109,33	10,05	211.787.364,58	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulut
41	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL	15,59	6,73	17,86	250.000.000,00	18,91	220.645.213,10	19,81	229.812.077,50	21,09	236.555.238,53	22,32	239.583.940,74	22,32	1.176.596.469,87	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulut
42	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN	273	0	215	50.000.000,00	230	44.129.042,62	247	45.962.415,50	259	47.311.047,71	273	47.916.788,15	273	235.319.293,97	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulut
43	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP YANG DISIMPAN DILEMBAGA KEARSIPAN DAERAH PROVINSI YANG SESUAI NSPK	30 izin	0 izin	0 izin	-	15 izin	34.274.984,56	20 izin	35.698.963,49	25 izin	36.746.444,82	30 izin	37.216.922,83	30 izin	143.937.315,71	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulut
44	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	100%	100%	100%	607.370.395,00	100%	536.053.480,95	100%	558.324.209,15	100%	574.706.594,67	100%	582.064.770,88	100%	2.858.519.450,65	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut
45	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100%	100%	100%	2.275.320.000,00	100%	2.008.153.865,12	100%	2.091.584.064,70	100%	2.152.955.461,36	100%	2.180.520.528,14	100%	10.708.533.919,31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut
46	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	100%	100%	100%	607.103.675,00	100%	535.818.078,99	100%	558.079.027,24	100%	574.454.218,62	100%	581.809.163,57	100%	2.857.264.163,40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	KEMASYARAKATAN	KEMASYARAKATAN															
47	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE ORMAS, LSM, FKUB YANG MENDAPAT PEMBINAAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	100%	100%	100%	399.917.728,00	100%	352.959.729,27	100%	367.623.695,60	100%	378.410.534,16	100%	383.255.460,98	100%	1.882.167.148,02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut
48	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE KASUS TRANTIBUM YANG TERSELESAIKAN (JUMLAH KASUS TRANTIBUM YANG TERDATA / JUMLAH KASUS YANG TERSELESAIKAN X 100%)	100%	100%	100%	5.635.000.000,00	100%	4.973.343.103,36	100%	5.179.964.226,83	100%	5.331.955.076,54	100%	5.400.222.024,17	100%	26.520.484.430,90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut
MISI 2: PENGUATAN EKONOMI YANG BERTUMPU PADA INDUSTRI PERTANIAN, PERIKANAN, PARIWISATA DAN JASA																	
TUJUAN : MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS																	
SASARAN: Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat																	
Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat		***Pertumbuhan Ekonomi (%)***	**6,5 – 7,0**	**-0,99**	**4,5 – 5,5**	**120.453.619.282,00**	**5,0 – 5,7**	**106.301.489.236,34**	**5,7 – 6,0**	**110.717.861.217,03**	**6,0 – 6,5**	**113.966.551.954,55**	**6,5 – 7,0**	**115.425.706.902,93**	**6,5 – 7,0**	**566.865.228.592,85**	
		Gini Ratio	**0,027**	**0,367**	**0,360**		**0,355**		**0,350**		**0,345**		**0,340**		**0,340**		
		Persentasi Angka Kemiskinan (%)	**2,69**	**7,78**	**7,50 – 6,90**		**5,93**		**5,65**		**5,37**		**5,09**		**5,09**		
		Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	**2,5**	**7,28 (Maret)**	**6,47 – 7,18**		**6,00 – 6,50**		**5,50 – 6,00**		**5,00 – 5,50**		**4,50 – 5,00**		**4,50 – 5,00**		
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	100%	100%	100%	20.242.914.804,00	100%	17.866.009.003,10	100%	18.608.265.222,97	100%	19.154.270.160,27	100%	19.399.509.202,84	100%	95.270.968.393,18	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulut
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DI PROVINSI KABUPATEN/KOTA	100%	100%	100%	1.193.365.000,00	100%	1.053.241.098,94	100%	1.096.998.759,46	100%	1.129.186.968,93	100%	1.143.644.357,74	100%	5.616.436.185,07	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulut
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100%	0%	100%	2.965.000.000,00	100%	2.616.852.227,41	100%	2.725.571.239,14	100%	2.805.545.129,00	100%	2.841.465.537,12	100%	13.954.434.132,68	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM	100%	100%	100%	475.000.000,00	100%	410.657.158,76	100%	427.718.206,37	100%	440.268.342,01	100%	445.905.256,69	100%	2.199.548.963,83	Dinas Sosial

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI															Daerah Prov. Sulut
5	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENYUSUN RENCANA TENAGA KERJA	53,40%	26,6%	33%	75.000.000,00	46%	66.193.563,93	53%	68.943.623,25	66%	70.966.571,56	80%	71.875.182,22	80%	352.978.940,96	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
6	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	30%	60%	65%	485.939.505,00	70%	428.880.902,55	75%	446.699.068,73	80%	459.806.142,07	85%	465.693.206,27	85%	2.287.018.824,62	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
7	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN (DALAM DAN LUAR NEGERI) MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA LINTAS DAERAH KABUPATEN KOTA DALAM SATU DAERAH PROVINSI	9%	55,5%	60%	104.539.058,00	61%	92.264.170,92	62%	96.097.352,40	63%	98.917.047,20	64%	100.183.517,91	64%	492.001.146,43	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
8	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN	50%	30%	40%	12.375.001.774,00	50%	10.921.939.614,34	60%	11.375.699.466,95	70%	11.709.485.985,99	80%	11.859.406.766,48	80%	58.241.533.607,77	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
9	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN	100%	75%	80%	707.022.085,00	85%	624.004.154,46	90%	649.928.856,77	95%	668.999.111,86	100%	677.564.549,24	100%	3.327.518.757,33	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
10	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN	PERSENTASE CADANGAN PANGAN	7%	93% (275 Ton)	100% (275 Ton)	90.000.000,00	100% (275 Ton)	79.432.276,72	100% (275 Ton)	82.732.347,90	100% (275 Ton)	85.159.885,87	100% (275 Ton)	86.250.218,66	100% (275 Ton)	423.574.729,15	Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	KEMANDIRIAN PANGAN																
11	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	SKOR POLA PANGAN HARAPAN	0,9	94,1	94,5	1.460.000.000,00	94,5	1.288.568.044,53	94,7	1.342.102.532,59	95	1.381.482.593,03	95	1.399.170.213,89	95	6.871.323.384,05	Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
12	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN	10%	14,03%	12,03%	280.000.000,00	10,03%	247.122.638,68	8,03%	257.389.526,80	6,03%	264.941.867,16	4,03%	268.334.013,62	4,03%	1.317.788.046,26	Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
13	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG SESUAI PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	40%	60%	85%	560.000.000,00	89%	494.245.277,35	92%	514.779.053,60	96%	529.883.734,31	100%	536.668.027,25	100%	2.635.576.092,51	Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
14	PROGRAM PENATAAN DESA	PRESENTASI DESA YANG DIFASILITASI DALAM PENATAAN DESA	33,17%	6,64%	13,27%	205.000.000,00	19,90%	180.929.074,75	26,54%	188.445.903,55	33,80%	193.975.295,60	39,81%	196.458.831,40	39,81%	964.809.105,29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Prov. Sulut
15	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	100%	100%	100%	150.000.000,00	100%	132.387.127,86	100%	137.887.246,50	100%	141.933.143,12	100%	143.750.364,44	100%	705.957.881,92	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Prov. Sulut
16	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	77,30%	22,7 %	100%	685.000.000,00	100%	604.567.883,90	100%	629.685.092,35	100%	648.161.353,58	100%	656.459.997,61	100%	3.223.874.327,45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Prov. Sulut
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	33%	66,6 %	100%	5.110.000.000,00	100%	4.509.988.155,85	100%	4.697.358.864,08	100%	4.835.189.075,62	100%	4.897.095.748,63	100%	24.049.631.844,17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Prov. Sulut
18	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	JUMLAH KSP / USP YANG TERFASILITASI DALAM PELAYANAN IZIN	150	30	60	181.300.000,00	90	160.011.908,54	120	166.659.718,60	150	171.549.858,98	180	173.746.273,82	180	853.267.759,95	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
19	PROGRAM PENGAWASAN DAN	MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS	191 unit	3.766 unit	3.803 unit	266.600.000,00	3.841 unit	235.296.055,25	3.879 unit	245.071.599,44	3.918 unit	252.262.506,37	3.957 unit	255.492.314,40	3.957 unit	1.254.722.475,47	Dinas Koperasi dan Usaha

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PEMERIKSAAN KOPERASI																Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
20	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	0%	1%	1%	104.489.325,00	1%	92.220.277,53	1%	96.051.635,42	1%	98.869.988,80	1%	100.135.856,99	1%	491.767.083,74	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
21	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	JUMLAH SDM PENGELOLA KOPERASI DAN UMKM YANG DILATIH	225 Orang Pengelola; 225 Orang Wirausaha	525 Orang Pengelola; 525 Orang Wirausaha	555 Orang Pengelola; 555 Orang Wirausaha	3.031.669.734,00	615 Orang Pengelola; 615 Orang Wirausaha	2.675.693.658,08	660 Orang Pengelola; 660 Orang Wirausaha	2.786.857.279,45	705 Orang Pengelola; 705 Orang Wirausaha	2.868.629.428,32	750 Orang Pengelola; 750 Orang Wirausaha	2.905.357.527,52	750 Orang Pengelola; 750 Orang Wirausaha	14.268.207.627,36	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	JUMLAH KUMKM YANG TERFASILITASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KEMUDAHAN DAN PERLINDUNGAN KUMKM	300	60	120	379.326.212,00	180	334.786.051,53	240	348.694.979,32	300	358.926.410,25	360	363.521.874,78	360	1.785.255.527,88	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
23	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE UMKM NAIK KELAS	0%	2%	2%	111.480.045,00	2%	98.390.153,14	2%	102.477.842,96	2%	105.484.754,55	2%	106.835.313,98	12%	524.668.109,63	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
24	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	JUMLAH UMKM YANG MENINGKAT AKSES PROMOSI DAN PEMASARANNYA	55%	200	210	579.505.786,00	220	511.460.710,59	231	532.709.714,41	243	548.340.517,75	255	555.361.119,56	255	2.727.377.848,31	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
25	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASI PENINGKATAN INVESTASI DI PROVINSI	15%	0	10%	500.647.000,00	10%	441.861.456,02	12%	460.218.908,65	12%	473.722.682,02	15%	479.787.924,71	15%	2.356.237.971,41	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut
26	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PENINGKATAN JUMLAH KERJASAMA PENANAMAN MODAL/MOU	20 MOU/KERJA SAMA	2 MOU/KERJA SAMA	2 MOU/KERJA SAMA	75.495.000,00	3 MOU/KERJA SAMA	66.630.441,45	4 MOU/KERJA SAMA	69.398.651,16	5 MOU/KERJA SAMA	71.434.950,93	6 MOU/KERJA SAMA	72.349.558,42	22 MOU/ Kerja sama	355.308.601,97	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
27	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL SESUAI NSPK TEPAT WAKTU	10%	85%	85%	610.506.369,00	87%	538.821.231,56	90%	561.206.947,95	92%	577.673.918,98	95%	585.070.086,92	95%	2.873.278.554,40	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut
28	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASI PENINGKATAN PENYAMPAIAN LKPM	20%	70%	70%	457.133.626,00	75%	403.457.385,30	80%	420.219.313,14	85%	432.549.415,76	90%	438.087.502,24	90%	2.151.447.242,44	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut
29	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	JUMLAH LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL TEPAT WAKTU	5 LAPORAN	1 LAPORAN	1 LAPORAN	181.122.102,00	1 LAPORAN	159.854.899,17	1 LAPORAN	166.496.186,17	1 LAPORAN	171.381.528,17	1 LAPORAN	173.575.787,81	6 LAPORAN	852.430.503,32	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut
30	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSENTASE LUAS WILAYAH LAUT DAN PESISIR YANG DIKELOLA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	60%	40%	45%	1.718.212.544,00	55%	1.516.461.491,72	75%	1.579.463.977,29	92%	1.625.808.712,79	100%	1.646.624.529,25	100%	8.086.571.255,04	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut
31	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT DAN PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROV SULUT	11.575	405.500 Ton	410.000 Ton	14.047.291.248,00	410.380 ton	12.397.870.283,79	412.431 ton	12.912.948.739,75	415.000 ton	13.291.841.327,66	417.075 Ton	13.462.021.575,41	417.075 Ton	66.111.973.174,61	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut
32	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI	111.546	544.839 Ton	561.185	4.075.907.978,00	578.020	3.597.318.337,59	595.361	3.746.771.520,48	625.129	3.856.709.535,90	656.385	3.906.088.381,77	656.385	19.182.795.753,74	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut
33	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	5%	95%	96%	1.837.003.312,00	97%	1.621.303.949,00	98%	1.688.662.190,01	99%	1.738.211.026,63	100%	1.760.465.970,53	100%	8.645.646.448,17	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
34	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	KONSUMSI IKAN (Kg/Kapita/Tahun)	7	65	67	693.238.163,00	67,5	611.838.728,83	68	637.258.009,76	70	655.956.476,04	72	664.354.923,84	72	3.262.646.301,46	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut
35	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	0%	100%	166%	5.053.232.537,00	100%	4.459.886.279,96	100%	4.645.175.469,65	100%	4.781.474.512,61	100%	4.842.693.458,66	100%	23.782.462.257,90	Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut
36	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA DAN WISATAWAN NUSANTARA	5.000.000 Wisnus dan 125.000 Wisman	150.000 Wisnus dan 15.000 Wisman	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman	1.984.938.978,00	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman	1.751.869.135,20	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman	1.824.651.800,97	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman	1.878.190.853,66	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman	1.902.238.009,87	5.150.000 Wisnus dan 140.000 Wisman	9.341.888.777,70	Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut
37	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU	2,70%	1,30%	2%	929.453.407,00	3%	820.317.780,23	3,30%	854.398.473,60	3,50%	879.468.289,59	4%	890.728.439,92	4%	4.374.366.390,34	Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut
38	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF (Rp.)	193.634.737.874	16.425.000.000	19.710.000.000	1.140.574.659,00	20.104.200.000	1.006.649.354,78	20.506.284.000	1.048.471.327,71	20.916.409.680	1.079.235.642,10	21.334.737.874	1.093.053.486,02	21.334.737.874	5.367.984.469,62	Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut
39	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	0,86%	8,24%	8,41%	3.342.449.198,00	8,57%	2.907.137.931,63	8,75%	2.985.892.806,86	8,92%	3.032.806.537,16	9,10%	3.032.894.819,67	9,10%	15.301.181.293,32	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut
			0,86%	8,24%	8,41%	5.022.365.383,00	8,57%	4.432.643.520,87	8,75%	4.616.800.890,51	8,92%	4.752.267.364,71	9,10%	4.813.112.361,09	9,10%	23.637.189.520,17	Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulut
40	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	2%	1%	1-2%	1.072.542.046,00	1-2%	946.605.073,21	1-2%	985.932.463,19	1-2%	1.014.861.758,11	1-2%	1.027.855.399,94	1-2%	5.047.796.740,45	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut
			2%	1%	1-2%	4.128.656.963,00	1-2%	3.643.873.581,74	1-2%	3.795.260.935,79	1-2%	3.906.621.730,82	1-2%	3.956.639.620,56	1-2%	19.431.052.831,90	Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulut
41	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR	10%	2%	2%	327.746.506,00	18%	289.262.790,64	16%	301.280.421,75	14%	310.120.611,62	12%	314.091.197,88	2%	1.542.501.527,89	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
42	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)	0,05-1	0,05-1	0,05-1	332.441.056,00	0,05-1	293.406.110,58	0,05-1	305.595.878,90	0,05-1	314.562.693,20	0,05-1	318.590.153,03	0,05-1	1.564.595.891,72	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut
			0,05-1	0,05-1	0,05-1	866.935.000,00	0,05-1	765.140.231,29	0,05-1	796.928.533,63	0,05-1	820.312.062,87	0,05-1	830.814.814,65	0,05-1	4.080.130.642,43	Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulut
43	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DOKUMEN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	4 DOKUMEN	0 DOKUMEN	0 DOKUMEN	-	1 DOKUMEN	42.843.730,70	1 DOKUMEN	86.647.969,65	1 DOKUMEN	129.888.932,11	1 DOKUMEN	170.293.782,59	4 DOKUMEN	429.674.415,05	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut
44	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN	0,50%	0,50%	0,50%	718.846.827,00	0,50%	634.440.445,33	1%	660.798.730,87	1%	680.187.930,52	1%	688.896.622,39	1%	3.383.170.556,11	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut
			0,50%	0,50%	0,50%	645.243.747,00	0,50%	569.479.776,24	1%	593.139.223,97	1%	610.543.153,93	1%	618.360.158,56	1%	3.036.766.059,71	Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulut
45	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	4,20%	1,39%	0,84%	13.096.899.024,00	0,84%	11.559.072.304,61	0,84%	12.039.302.294,00	0,84%	12.392.560.290,67	0,84%	12.551.226.718,33	5,59%	61.639.060.631,61	Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut
46	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL	29%	19,77%	25,58%	845.000.000,00	31,40%	745.780.820,29	37,21%	776.764.821,95	43,02%	799.556.706,24	48,84%	809.793.719,69	48,84%	3.976.896.068,17	Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut
47	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PERTIMBANGAN TEKNIS YANG DITERBITKAN IJIN	0%	80%	0%	-	80%	31.704.360,72	80%	33.021.541,23	80%	33.990.461,46	80%	34.425.653,62	80%	133.142.017,03	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
48	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK	100%	100%	100%	30.000.000,00	100%	26.477.425,57	100%	27.577.449,30	100%	28.386.628,62	100%	28.750.072,89	100%	141.191.576,38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
49	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	LAJU INFLASI TERKENDALI (%)	3±1	3±1	3±1	1.070.000.000,00	3±1	944.361.512,08	3±1	983.595.691,70	3±1	1.012.456.420,92	3±1	1.025.419.266,35	3±1	5.035.832.891,05	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
50	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERTUMBUHAN NILAI EKSPOR NON MIGAS	5,55%	1,20%	5-6%	483.000.000,00	6%	426.286.551,72	6,25%	443.996.933,73	6,50%	457.024.720,85	6,75%	462.876.173,50	6,75%	2.273.184.379,79	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
51	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN	0%	90%	90%	188.584.112,00	90%	166.440.726,32	90%	173.355.626,25	90%	178.442.238,39	90%	180.726.898,85	90%	887.549.601,81	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
52	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	0%	75%	0%	-	75%	42.843.730,70	75%	44.623.704,37	75%	45.933.056,03	75%	46.521.153,54	75%	179.921.644,64	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
53	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIP	0%	100%	100%	2.900.000.000,00	100%	2.484.936.380,59	100%	2.588.174.853,39	100%	2.664.117.249,50	100%	2.698.226.905,37	100%	13.335.455.388,84	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
54	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE REKOMENDASI YANG DITERBITKAN IJIN	0%	100%	100%	40.000.000,00	100%	35.303.234,10	100%	36.769.932,40	100%	37.848.838,17	100%	38.333.430,52	100%	188.255.435,18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
55	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	TERSEDIANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI	100%	100%	100%	100.000.000,00	100%	88.258.085,24	100%	91.924.831,00	100%	94.622.095,41	100%	95.833.576,29	100%	470.638.587,95	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
56	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE KAWASAN TRANSMIGRASI YANG DIFASILITASI PENETAPANNYA	75%	20%	20%	49.999.254,00	40%	44.128.384,22	60%	45.961.729,74	80%	47.310.341,83	100%	47.916.073,23	100%	235.315.783,01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
57	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	REKAPITULASI WARGA TRANSMIGRASI YANG DITEMPATKAN	200 KK	0 KK	0 KK	59.999.915,00	50 KK	52.954.776,13	100 KK	55.154.820,46	150 KK	56.773.176,82	200 KK	57.500.064,32	200 KK	282.382.752,73	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
58	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PRESENTASE SATUAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI YANG DIFASILITASI PEMBINAANNYA	75%	60%	60%	10.000.000,00	70%	8.825.808,52	80%	9.192.483,10	90%	9.462.209,54	100%	9.583.357,63	100%	47.063.858,79	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
MISI 3: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS																	
TUJUAN: TERBANGUNNYA INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS YANG MEMADAI																	
SASARAN: Meningkatnya Infrastruktur Dan Konektivitas																	
Meningkatnya Infrastruktur Dan Konektivitas		***Indeks Infrastruktur***	**0,02**	**0,88**	**0,885**	**335.077.913.880,00**	**0,89**	**295.733.350.857,94**	**0,895**	**308.019.806.051,23**	**0,90**	**317.057.743.380,35**	**0,90**	**321.117.148.242,90**	**0,90**	**1.577.005.962.412,42**	
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	RASIO LUAS DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI YANG DILAYANI OLEH JARINGAN IRIGASI	0,087	0,84	0,857	61.487.000.000,00	0,874	54.267.248.872,49	0,891	56.521.820.836,73	0,909	58.180.287.806,76	0,927	58.925.191.055,96	0,927	289.381.548.571,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	JUMLAH SISTEM DRAINASE YANG TERBANGUN DAN TERHUBUNG DENGAN SUNGAI LINTAS KAB/KOTA DAN YANG BERADA DI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI	5	3	1	3.300.000.000,00	1	2.912.516.812,97	1	3.033.519.422,99	1	3.122.529.148,64	1	3.162.508.017,71	1	15.531.073.402,30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	JUMLAH KAWASAN STRATEGIS PROVINSI YANG MEMPEROLEH PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	10	1	2	8.250.000.000,00	2	7.281.292.032,43	2	7.583.798.557,47	2	7.806.322.871,60	2	7.906.270.044,26	11	38.827.683.505,76	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS PROVINSI YANG DIBANGUN / DIREHAB / DIRENOVASI / UBAHSUAI / DIPELIHARA DAN DIRAWAT	100%	100%	100%	51.650.000.000,00	100%	45.585.301.027,28	100%	47.479.175.211,30	100%	48.872.312.280,96	100%	49.498.042.155,91	100%	243.084.830.675,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTASE KAWASAN YANG DITATA BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	100%	100%	100%	4.789.356.000,00	100%	4.226.993.901,00	100%	4.402.607.408,97	100%	4.531.789.004,00	100%	4.589.811.136,26	100%	22.540.557.450,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	RASIO KEMANTAPAN JALAN PROVINSI	0,022	0,89	0,894	115.636.000.000,00	0,899	102.058.119.449,96	0,903	106.298.197.574,72	0,908	109.417.206.252,10	0,912	110.818.114.283,46	0,912	544.227.637.560,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
7	PROGRAM PENGEMBANGAN	RASIO TENAGA KERJA KONSTRUKSI	0,012	0,05	0,051	260.000.000,00	0,054	229.471.021,63	0,056	239.004.560,60	0,059	246.017.448,07	0,062	249.167.298,36	0,062	1.223.660.328,67	Dinas Pekerjaan Umum dan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	JASA KONSTRUKSI	YANG TERLATIH DI WILAYAH PROVINSI YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI															Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	RASIO KESESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN DENGAN RTRW	0,42	0,53	0,6	11.743.738.000,00	0,68	10.364.798.294,59	0,77	10.795.411.309,54	0,86	11.112.170.975,45	0,95	11.254.444.116,01	0,95	55.270.562.695,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
9	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH 10 - 15 HEKTAR YANG DITANGANI	100%	0	100%	1.250.000.000,00	100%	1.103.226.065,52	100%	1.149.060.387,50	100%	1.182.776.192,67	100%	1.197.919.703,68	100%	5.882.982.349,36	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
10	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE SATUAN PERUMAHAN YANG DILENGKAPI DENGAN PSU	35%	47%	54%	29.219.458.728,00	61%	25.788.534.791,29	68%	26.859.938.054,72	75%	27.648.064.116,85	82%	28.002.052.272,82	82%	137.518.047.963,68	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
11	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	88.258.085,24	1 Kegiatan	91.924.831,00	1 Kegiatan	94.622.095,41	1 Kegiatan	95.833.576,29	5 Kegiatan	370.638.587,95	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
12	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	PERSENTASE PEMANFAATAN TANAH YANG SESUAI DENGAN PERUNTUKAN TANAHNYA DI ATAS IZIN LOKASI DIBANDINGKAN DENGAN LUAS IZIN LOKASI YANG DITERTIBKAN	100%	100%	100%	50.000.000,00	100%	44.129.042,62	100%	45.962.415,50	100%	47.311.047,71	100%	47.916.788,15	100%	235.319.293,97	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
13	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	PERSENTASE PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG SELESAI TEPAT WAKTU	21,72%	33,28%	35%	1.000.000.000,00	40%	882.580.852,42	45%	919.248.310,00	50%	946.220.954,13	55%	958.335.762,94	55%	4.706.385.879,49	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
14	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	100%	-	100%	500.000.000,00	100%	441.290.426,21	100%	459.624.155,00	100%	473.110.477,07	100%	479.167.881,47	100%	2.353.192.939,74	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
15	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	PERSENTASE GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TEPAT WAKTU	21,72%	33,28%	35%	38.152.696.680,00	40%	33.584.581.472,56	45%	34.979.877.113,89	50%	36.006.258.959,87	55%	36.467.260.104,79	55%	179.190.674.331,11	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
16	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	100%	0%	100%	2.000.000.000,00	100%	1.765.161.704,83	100%	1.838.496.619,99	100%	1.892.441.908,27	100%	1.916.671.525,88	100%	9.412.771.758,97	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
17	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	TERSEDIANYA LOKASI PEMBANGUNAN LINTAS KABUPATEN/KOTA	100%	100%	100%	1.000.000.000,00	100%	882.580.852,42	100%	919.248.310,00	100%	946.220.954,13	100%	958.335.762,94	100%	4.706.385.879,49	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
18	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	TERLAKSANANYA PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	100%	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	RASIO KONEKTIVITAS PROVINSI	0,11	0,41	0,42	2.389.599.570,00	0,45	2.109.014.825,42	0,47	2.196.635.366,29	0,49	2.261.089.185,12	0,52	2.290.038.727,04	0,52	11.246.377.673,87	Dinas Perhubungan
20	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	JUMLAH ARUS PENUMPANG ANGKUTAN UMUM NAIK TURUN (ORANG)	74.400	12.100	13.100	536.000.000,00	13.500	473.063.336,89	13.500	492.717.094,16	16.500	507.174.431,42	17.800	513.667.968,94	17.800	2.522.622.831,40	Dinas Perhubungan
21	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	JUMLAH KEGIATAN SOSIALISASI RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN PROVINSI DI KAB/KOTA	15	0	3	80.000.000,00	3	70.606.468,19	3	73.539.864,80	3	75.697.676,33	3	76.666.861,04	15	376.510.870,36	Dinas Perhubungan
22	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT	12%	88%	100%	1.784.064.902,00	100%	1.574.581.521,97	100%	1.639.998.646,09	100%	1.688.119.593,81	100%	1.709.733.198,99	100%	8.396.497.862,86	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI															
MISI 4: PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN																	
TUJUAN: TERWUJUDNYA PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN																	
SASARAN: Meningkatnya Pembangunan Berkelanjutan																	
		Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang	**0,42**	**0,53**	**0,6**	**30.972.110.739,00**	**0,68**	**27.335.391.897,15**	**0,77**	**28.471.060.453,84**	**0,86**	**29.306.460.174,96**	**0,95**	**29.681.681.374,96**	**0,95**	**145.766.704.639,90**	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**1,5**	**70,51**	**70,81**		**71,11**		**71,41**		**71,71**		**72,01**		**72,01**		
		Akses Air Minum Layak (%)	**10**	**90**	**92**		**94**		**96**		**98**		**100**		**100**		
		Akses Sanitasi Layak (%)	**10**	**83**	**85**		**87**		**89**		**91**		**93**		**93**		
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE KAPASITAS YANG DAPAT TERLAYANI MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA TERHADAP KEBUTUHAN PEMENUHAN KAPASITAS YANG MEMERLUKAN PEMENUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA	13%	2%	9%	11.800.000.000,00	10%	10.414.454.058,51	11%	10.847.130.057,95	13%	11.165.407.258,77	15%	11.308.362.002,71	15%	55.535.353.377,93	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	JUMLAH TPA REGIONAL YANG DIOPERASIKAN DENGAN SISTEM SANITARY LANDFILL	1	0	1	2.750.000.000,00	1	2.427.097.344,14	1	2.527.932.852,49	1	2.602.107.623,87	1	2.635.423.348,09	1	12.942.561.168,59	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	RASIO PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK OLEH SPAL REGIONAL	0,06	0,02	0,06	3.558.388.000,00	0,06	3.140.565.114,27	0,07	3.271.042.155,31	0,08	3.367.021.288,53	0,08	3.410.130.478,82	0,08	16.747.147.036,93	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG MEMPEROLEH FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI	10%	0%	2%	1.338.546.741,00	4%	1.181.375.723,67	6%	1.230.456.829,52	8%	1.266.560.974,42	10%	1.282.777.212,27	10%	6.299.717.480,87	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA TANGGUH BENCANA	100%	100%	100%	978.692.000,00	100%	863.774.819,61	100%	899.660.967,01	100%	926.058.878,04	100%	937.915.544,50	100%	4.606.102.209,17	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulut
			100%	100%	100%	4.251.653.394,00	100%	3.752.427.876,65	100%	3.908.325.197,12	100%	4.023.003.531,11	100%	4.074.511.499,10	100%	20.009.921.497,99	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	TERSUSUNNYA RPPLH DAN KLHS PROVINSI	RPPLH DAN KLHS	KLHS	RPPLH DAN KLHS	420.000.000,00	KLHS	370.683.958,01	KLHS	386.084.290,20	KLHS	397.412.800,74	KLHS	402.501.020,44	KLHS	1.976.682.069,38	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI	1,5	70,51	70,81	527.261.825,00	71,11	465.351.190,95	71,41	484.684.541,56	71,71	498.906.187,13	72,01	505.293.863,33	72,01	2.481.497.607,97	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
8	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	TERLAKSANANYA PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN TAMAN KEHATI OLEH PEMERINTAH PROVINSI	1 Taman Kehati	0	1 Taman Kehati	75.000.000,00	1 Taman Kehati	66.193.563,93	1 Taman Kehati	68.943.623,25	1 Taman Kehati	70.966.571,56	1 Taman Kehati	71.875.182,22	1 Taman Kehati	352.978.940,96	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
9	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	JUMLAH USAHA/KEGIATAN YANG MELAKUKAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 LINTAS KAB/KOTA	1 Pelaku Usaha/Kegiatan	2 Pelaku Usaha/Kegiatan	2 Pelaku Usaha/Kegiatan	87.500.000,00	2 Pelaku Usaha/Kegiatan	77.225.824,59	3 Pelaku Usaha/Kegiatan	80.434.227,12	3 Pelaku Usaha/Kegiatan	82.794.333,49	3 Pelaku Usaha/Kegiatan	83.854.379,26	3 Pelaku Usaha/Kegiatan	411.808.764,46	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
10	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI	20%	50%	50%	323.071.656,00	55%	285.136.857,54	60%	296.983.073,79	65%	305.697.170,59	70%	309.611.121,94	70%	1.520.499.879,86	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
11	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG	JUMLAH MHA DAN/ATAU KEARIFAN LOKAL YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR	1 Kelompok	-	1 Kelompok	70.000.000,00	1 Kelompok	61.780.659,67	1 Kelompok	64.347.381,70	1 Kelompok	66.235.466,79	1 Kelompok	67.083.503,41	1 Kelompok	329.447.011,56	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	TERKAIT DENGAN PPLH																
12	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PENINGKATAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MAYARAKAT	100%	-	100%	45.000.000,00	100%	39.716.138,36	100%	41.366.173,95	100%	42.579.942,94	100%	43.125.109,33	100%	211.787.364,58	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
13	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	JUMLAH PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	5 Penghargaan	1 Penghargaan	1 Penghargaan	75.000.000,00	1 Penghargaan	66.193.563,93	1 Penghargaan	68.943.623,25	1 Penghargaan	70.966.571,56	1 Penghargaan	71.875.182,22	6 Penghargaan	352.978.940,96	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
14	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITANGANI	100%	100%	100%	101.535.828,00	100%	89.613.577,63	100%	93.336.638,29	100%	96.075.328,05	100%	97.305.415,19	100%	477.866.787,16	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
15	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI	30%	40%	45%	534.607.484,00	50%	471.834.328,94	60%	491.437.026,18	70%	505.856.803,60	70%	512.333.471,05	70%	2.516.069.113,77	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
			30%	40%	45%	-	50%	-	60%	-	70%	-	70%	-	70%	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
16	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	PERSENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI)	5%	30%	29%	800.000.000,00	28%	706.064.681,93	27%	735.398.648,00	26%	756.976.763,31	25%	766.668.610,35	25%	3.765.108.703,59	Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut
17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	PENINGKATAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI ANTAR BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAS	60%	0%	20%	180.000.000,00	30%	158.864.553,43	40%	165.464.695,80	50%	170.319.771,74	60%	172.500.437,33	60%	847.149.458,31	Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut
18	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	PERSENTASE PENGELOLAAN AIR TANAH, SUMBER DAYA GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI	100%	100%	100%	516.153.811,00	100%	455.547.470,49	100%	474.473.518,46	100%	488.395.551,52	100%	494.648.656,26	100%	2.429.219.007,73	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Prov. Sulut
19	PROGRAM PENGELOLAAN	PERSENTASE USAHA TAMBANG SESUAI	100%	100%	100%	522.200.000,00	100%	460.883.721,13	100%	480.031.467,48	100%	494.116.582,25	100%	500.442.935,41	100%	2.457.674.706,27	Dinas Energi dan Sumber

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	MINERAL DAN BATUBARA	KEWENANGAN PROVINSI YANG TIDAK MELANGGAR PERDA															Daya Mineral Daerah Prov. Sulut
20	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	PENINGKATAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN	2%	35%	36%	1.045.000.000,00	36%	922.296.990,77	37%	960.614.483,95	37,5%	988.800.897,07	38%	1.001.460.872,27	38%	4.918.173.244,06	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Prov. Sulut
21	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	RASIO ELEKTRIFIKASI	0%	99,99%	100%	972.500.000,00	100%	858.309.878,97	100%	893.968.981,47	100%	920.199.877,89	100%	931.981.529,46	100%	4.576.960.267,80	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Prov. Sulut
MISI 5: PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DIDUKUNG OLEH SINERGITAS ANTAR DAERAH																	
TUJUAN: MENINGKATKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN																	
SASARAN: Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan																	
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan		***Opini BPK***	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**642.405.961.445,00**	**WTP**	**566.975.201.049,16**	**WTP**	**590.530.594.389,77**	**WTP**	**607.857.981.779,06**	**WTP**	**615.640.607.179,31**	**WTP**	**3.023.410.345.842,30**	
		Indeks Reformasi Birokrasi	***7,52***	**57,48**	**59,95**		**61**		**62,5**		**64**		**65**		**65**		
		Indeks SPBE	***Nilai***	**2,8**	**3,0**		**3,3**		**3,6**		**4,0**		**4,5**		**4,5**		
1	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	7,52	57,48	59,95	2.066.144.870,00	61,00	1.823.539.900,58	62,50	1.899.300.179,95	64	1.955.029.570,27	65	1.980.060.520,34	65	9.724.075.041,14	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sulut
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	NILAI LPPD	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	836.940.471,00	Tinggi	738.667.634,32	Sangat Tinggi	769.356.113,53	Sangat Tinggi	791.930.611,02	Sangat Tinggi	802.069.984,81	Sangat Tinggi	3.938.964.814,68	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Prov. Sulut
3	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE REKOMENDASI PELAKSANAAN PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG DITINDAKLANJUTI	100%	100%	100%	27.962.817.300,00	100%	24.679.447.128,58	100%	25.704.772.545,76	100%	26.459.003.665,85	100%	26.797.767.851,18	100%	131.603.808.491,36	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov. Sulut
4	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	PERSENTASE PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100%	100%	100%	2.252.197.104,00	100%	1.987.746.039,86	100%	2.070.328.381,63	100%	2.131.076.092,64	100%	2.158.361.029,96	100%	10.599.708.648,08	Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI	100%	100%	100%	994.532.422,00	100%	877.755.272,76	100%	914.222.248,16	100%	941.047.417,26	100%	953.095.987,41	100%	4.680.653.347,59	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Sulut
6	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	RASIO NILAI BELANJA YANG DILAKUKAN MELALUI PENGADAAN	100%	100%	100%	4.370.000.000,00	100%	3.856.878.325,06	100%	4.017.115.114,68	100%	4.134.985.569,56	100%	4.187.927.284,05	100%	20.566.906.293,35	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Prov. Sulut
7	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	95%	95%	95%	865.724.394,00	95%	764.071.773,61	95%	795.815.686,11	95%	819.166.562,11	95%	829.654.647,62	95%	4.074.433.063,45	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Sulut
8	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%	100%	100%	29.956.982.183,00	100%	26.439.458.870,88	100%	27.537.905.244,31	100%	28.345.924.264,14	100%	28.708.847.375,76	100%	140.989.117.938,08	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sulut
9	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KETERUKURAN DAN AKURASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	75%	75%	75%	2.497.232.225,00	75%	2.204.009.345,82	75%	2.295.576.502,50	75%	2.362.933.458,63	75%	2.393.186.949,59	75%	11.752.938.481,54	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sulut
10	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100%	100%	100%	5.504.005.587,00	100%	4.857.729.942,68	100%	5.059.547.834,06	100%	5.208.005.418,08	100%	5.274.685.393,45	100%	25.903.974.175,27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sulut
11	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP	WTP	WTP	519.334.957.088,00	WTP	458.355.089.116,08	WTP	477.397.781.625,07	WTP	491.405.618.610,30	WTP	497.697.262.322,92	WTP	2.444.190.708.762,37	Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut
12	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	20	4	4	2.864.542.052,00	4	2.528.189.966,04	4	2.633.225.440,21	4	2.710.489.713,60	4	2.745.193.092,88	24	13.481.640.264,73	Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut
13	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	RASIO PAD (ADHK)	0,01	0,01	0,015	14.414.558.743,00	0.014	12.722.013.542,60	0.013	13.250.558.763,84	0.012	13.639.357.527,20	0.011	13.813.987.150,43	0.011	67.840.475.727,08	Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulut
14	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PERSENTASE PENERAPAN MERIT SISTEM YANG MENJADI	25%	75%	75%	12.114.616.804,00	80%	10.692.128.825,57	85%	11.136.341.023,33	90%	11.463.104.271,23	100%	11.609.870.537,60	100%	57.016.061.461,73	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		KEWENANGAN BKD															
15	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PERSENTASE ASN YANG BERKOMPETENSI	65%	25%	30%	7.579.400.947,00	40%	6.689.434.148,60	60%	6.967.351.511,31	70%	7.171.787.995,83	90%	7.263.610.989,18	90%	35.671.585.591,92	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Prov. Sulut
16	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN	55%	20%	40%	567.000.000,00	45%	500.423.343,32	50%	521.213.791,77	65%	536.507.280,99	75%	543.376.377,59	75%	2.668.520.793,67	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulut
17	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	PRESENTASE PELAYANAN PENGHUBUNG	100%	100%	100%	705.801.091,00	100%	622.926.528,53	100%	648.806.460,10	100%	667.843.781,75	100%	676.394.427,03	100%	3.321.772.288,41	Badan Penghubung Daerah Prov. Sulut
18	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP	WTP	WTP	6.549.499.170,00	WTP	5.780.462.560,36	WTP	6.020.616.043,34	WTP	6.197.273.353,73	WTP	6.276.619.283,96	WTP	30.824.470.411,39	Inspektorat Daerah Prov. Sulut
19	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN PKPT	100%	100%	100%	969.008.994,00	100%	855.228.783,92	100%	890.759.880,11	100%	916.896.614,87	100%	928.635.973,56	100%	4.560.530.246,46	Inspektorat Daerah Prov. Sulut

BAB VII
RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI UTARA

Materi bahasan/kajian dalam bab ini adalah tentang rencana Pengembangan Wilayah yang mencakup kawasan strategi provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional yang terintegrasi dalam beberapa klaster prioritas provinsi, seperti: Klaster Kawasan Kabupaten Kepulauan dan Perbatasan, Klaster Kawasan Kabupaten Bolaang Mongondow Raya berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, Klaster Kawasan Kabupaten Minahasa Raya mencakup kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan Klaster Kawasan Cepat Tumbuh.

Dalam dokumen perencanaan RPJPD 2001-2025 Provinsi Sulawesi Utara telah dikemukakan tentang pengembangan dan pembangunan wilayah sebagai strategi prioritas untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah yang didukung setiap daerah yang memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas, sumber daya sosial serta budaya yang beragam. Pembangunan wilayah adalah bagian dari prioritas pemerintah provinsi yang tercantum dalam dokumen RPJMD 2021-2026 provinsi yang difokuskan untuk menyelesaikan ketimpangan antar daerah, selaras dengan perencanaan dalam RPJMN 2020 – 2024 dengan beberapa sasaran sebagai berikut: a. meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah daratan dan kepulauan, b. wilayah daratan pesisir pantai utara dan pesisir pantai selatan, c. terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru serta peningkatan keunggulan kompetitif pusat pertumbuhan yang telah berkembang, d. meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian antar daerah, e. meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kota.

Kajian tentang pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai selama 20 tahun sampai tahun 2020—telah melewati 4 tahap pelaksanaan RPJMD dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi (RPJPD)—dievaluasi berdasarkan indikator pembangunan daerah yang telah dicapai sampai tahun 2020 di saat terjadinya Pandemic COVID-19. Hasil evaluasi diuraikan pada sub-bagian capaian pembangunan tahun 2015-2019, sebagai akumulasi pelaksanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan dalam RPJPD tahun 2001 - 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah, pada sub-bab berikutnya dijelaskan tentang Lingkungan dan Isu Strategis Provinsi yang diuraikan berdasarkan klaster wilayah yang memiliki karakteristik dan keunikan daerah yang bervariasi antar klaster. Karakter klaster yang kuat dipengaruhi oleh lokasi strategis setiap klaster wilayah.

Bagian selanjutnya adalah sub bab Sasaran, Indikator, dan Target, menguraikan sasaran pembangunan dalam 5 tahun ke depan berdasarkan indikator pembangunan daerah serta target yang direncanakan dicapai setiap tahun yang dilakukan bersama dan terintegrasi antar pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa.

Berdasarkan hasil evaluasi serta memperhatikan isu strategis dan target atau sasaran yang direncanakan dicapai, selanjutnya diuraikan Arah Kebijakan dan Strategi berdasarkan Arah Pembangunan setiap Klaster Wilayah. Pembahasan pada bab ini diakhiri dengan penjelasan umum strategi pendanaan pembangunan untuk setiap klaster wilayah daerah.

7.1. Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024

Pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Utara diarahkan untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 untuk Wilayah Sulawesi, dan melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut. Adapun terkait 3 indikator pembangunan yang telah ditetapkan bagi Provinsi Sulawesi Utara, dilakukan penyesuaian target yaitu pada indicator laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Ringkasan target dan prioritas pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang diarahkan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1 Arah Target Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara

Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	Baseline 2019	Target Pembangunan (target nasional)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Laju pertumbuhan ekonomi (%)	6,01	5,80	6,20*	6,60*	6,70*	7,30*	7,60*
			-0,99 (capaian Sulut)	4,0 – 5,0 **	4,5 – 5,5 ***	5,0 – 5,7 ***	5,7 – 6,0 ***
Tingkat kemiskinan (%)	7,80	7,66	7,00*	6,68*	6,45*	5,93*	5,65*
				7,5**	7,5 – 6,9 ***	5,93 ***	5,65 ***
TPT (%)	6,86	6,25	6,70	6,50*	6,30*	5,90*	5,60
			7,37 (capaian Sulut)	7,28**	6,6***	6,47 – 7,18 ***	6,0 – 6,5 ***
Kebutuhan Investasi (Rp Triliun)	41,24	44,10	50,03*	55,15*	61,74*	69,99*	78,85*

Catatan :
* Penetapan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 untuk Provinsi Sulawesi Utara
** Target Perubahan dalam RKPD 2021
*** Target dalam RPJMD 2021 – 2026

Tabel 7.2 Arah Prioritas Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara

Arah Prioritas Pembangunan	
Koridor Pertumbuhan	Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Koridor Pemerataan	Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sitaro
Pengembangan komoditas unggulan	Kelapa, lada, cengkeh, pala, kopi, kakao dan perikanan tangkap dan budidaya
Pengembangan sentra produksi	Sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang tersebar di KPPN, kawasan transmigrasi dan PKSN
Pengembangan sentra produksi perikanan	SKPT Talaud
Pengembangan kawasan strategis	a) Berbasis komoditas unggulan dan industri pengolahan: KEK Bitung b) Berbasis pariwisata: DPP Manado – Likupang/ KEK Likupang c) Pengembangan dan penguatan konektivitas: Jalan tol Manado – Bitung, Jalan Akses Wisata Likupang, Pengembangan Pelabuhan Bitung, Bandara Bolaang

Arah Prioritas Pembangunan	
	Mongondow d) Pengembangan pusat perdagangan pelabuhan hub Bitung e) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi f) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan Pendidikan dan kesehatan, Pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata dan revitalisasi Balai Latihan kerja meliputi: 1. Pengembangan SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, energi dan pertambangan 2. Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di perguruan tinggi yang mendukung sektor industri manufaktur, konstruksi, pariwisata dan pertanian. 3. Pengembangan BLK yang mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi Gedung, manajer umum perdagangan dan pelayan, pramuwisata, koki. 4. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh wilayah provinsi
Pengembangan kawasan perkotaan	a) pengembangan kawasan perkotaan di WM Manado b) Penguatan keterkaitan desa – kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah
Pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal dan kawasan perbatasan	a) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di Kecamatan perbatasan pada 14 kecamatan lokpri b) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane c) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar Pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar (air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi) serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, keuangan dan tata kelola aset desa, pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal, penataan ruang dan penetapan batas desa, serta peningkatan peran BUMDes d) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antar desa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan BUMDes Bersama di KPPN Minahasa Utara e) Penanganan stunting dengan lokasi focus prioritas pada tahun 2020 mencakup 4 kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dan selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh kabupaten/kota pada tahun 2023 f) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 5,65% di Provinsi Sulut g) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim
Penataan kelembagaan dan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah	a) Percepatan penerapan SPM di daerah secara penuh dan konsisten b) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi. c) Penataan Lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif. d) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis

Arah Prioritas Pembangunan	
	Elektronik (SPBE) e) Peningkatan riset dan inovasi daerah f) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata lainnya. g) Peningkatan kualitas belanja daerah h) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten i) Pengembangan Kerjasama antardaerah, dan j) penguatan Kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak k) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas Kabupaten Minahasa Utara l) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas Kabupaten Bolaang Mongondow m) Penataan ruang dan lahan yang meliputi: 1. Peningkatan efektivitas instrument pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR 2. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional 3. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional 4. Penerapan insentif dan disinsentif serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang 5. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya 6. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral 7. Penetapan delineasi batas wilayah adat 8. Pembentukan bank tanah 9. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital 10. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan n) Pemenuhan SPM kebencanaan melalui: 1. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistic kebencanaan 2. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat 3. Peningkatan investasi mitigasi structural dan non structural untuk pengurangan resiko bencana o) Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon meliputi: 1. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan 2. Optimalisasi potensi sumber energi terbarukan 3. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat – pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam 4. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci serta perlindungan kawasan hutan 5. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang 6. Penerapan kaidah – kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata 7. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup 8. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu

Arah Prioritas Pembangunan	
	9. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal 10. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air
Proyek prioritas strategis	a) Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado – Likupang b) Integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional c) Pembangunan jaringan pelabuhan utama terpadu di Bitung d) Pembangunan waduk multiguna di Kuwil Kawangkoan dan Lolak

Sumber : Lampiran IV Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024.

7.2. Capaian Pembangunan Wilayah Tahun 2016 – 2020

7.2.1. Capaian Pembangunan Antar Wilayah Klaster 2016-2020

Sampai memasuki awal tahun 2020-an wilayah bagian utara Tanah Minahasa mencakup wilayah Kota Manado, Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara mendominasi capaian pembangunan di wilayah Sulawesi Utara. Ditunjukan dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi serta pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi ini disebabkan karena sejak awal tahun 2000-an—ketika pelaksanaan otonomi daerah dimulai, wilayah Manado-Bitung dan sekitarnya termasuk sebagian wilayah Kabupaten Minahasa – yang pada saat sekarang dikembangkan menjadi Kabupaten Minahasa Utara—adalah bagian dari wilayah yang dibangun dengan konsep pengembangan kawasan cepat tumbuh di Sulawesi Utara dan KTI.

Kawasan ini dikenal dengan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung (KAPET-Manado-Bitung). Badan Pengelola (BP) KAPET inilah yang menyusun dan menetapkan Kota Manado dan Kota Bitung menjadi *Growth Poles* yang menjadi pusat penggerak utama Manado-Minut-Bitung sebagi *Growth Center* di Sulut dan KTI. Prioritas utama KAPET adalah merencanakan dan menetapkan pembangunan infrastruktur dasar utama seperti; Pelabuhan Hub International Bitung, Bandara Internasional Sam Ratulangi, Kawasan Industri yang kemudian berubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Toll-Road Manado-Bitung, dan Bendungan Kuwil di Kawangkoan, Airmadidi. Konsep pengembangan Kawasan Manado-Bitung ini dilakukan BP.KAPET Manado-Bitung bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Bappenas hingga tahun 2015.

Pembangunan pusat-pusat pengembangan seperti ibukota setiap kabupaten menjadi fokus utama dikembangkan oleh setiap pemerintah kabupaten, provinsi dan nasional. Pembangunan pusat pelayanan pemerintahan daerah dilakukan bersamaan dengan dikembangkannya pusat-pusat pengembangan ekonomi lokal seperti pembangunan dan peningkatan pasar tradisional, pusat perdagangan dengan pembangunan wilayah pertokoan, pembangunan terminal kendaraan umum antar kota dan dalam kota, serta pengembangan kawasan-kawasan fasilitas umum seperti lapangan terbuka, objek wisata alam, serta tempat untuk kegiatan sosial bagi masyarakat sebagai *open public space* di setiap wilayah ibukota.

Tabel 7.1 Capaian Pembangunan Kawasan Periode Waktu 2016-2020

Kegiatan Pembangunan	Capaian Pembangunan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang	1 KEK
Kawasan Industri Mongondow (KIMONG)	1 KI
Penguatan dan Pengembangan Kota Baru	3 kota (Tomohon, Kotamobagu, Langowan)
Penguatan Pusat Pertumbuhan PKL/PKW ibukota	Ibukota Kabupaten (Melonguane, Tahuna, Ondong, Buroko, Molibagu, Lolak, Tutuyan, Ratahan, Amurang, Tondano, dan Airmadidi).
Kabupaten Tertinggal	Tidak ada Kabupaten Tertinggal
Pengembangan Kota Kecil/Sedang Cakupan Regional Sulawesi Utara	Kota (Likupang, Kema, Langowan, Kawangkoan, Tumpaan, Modoinding, Tompaso Baru, Tanawangko, Belang, Tombatu, Ratatotok, Dumoga, Doloduo, Mopuya-Mopugat-Tapadaka (Kawasan Transmigran yang berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi Kota Baru), Bintauna, Beo, Lirung, Peta, Tamako, Ulu Siau, Tagulandang)
Peningkatan Pelabuhan Lokal/Regional	• Pelabuhan Pengumpan Regional: Pelabuhan Amurang, Torosik, Melonguane, Tagulandang, Lirung • Pelabuhan Pengumpan Lokal: Pelabuhan Beo, Ulu Siau, Pehe
Pembangunan dan Peningkatan Bandar Udara Lokal/Regional	Bandara Lalow, Miangas, Melonguane, Naha/Tahuna, Sawang/Ulu Siau
Peningkatan Desa Swadaya menjadi Desa Mandiri	33 Desa Mandiri, 347 Desa Maju;
Perencanaan Wilayah Metropolitan	1 WM Manado (sebelumnya Bimindo)

7.2.2. Perkembangan Wilayah Berdasarkan Klaster

A. Klaster Kabupaten Kepulauan

Klaster wilayah kepulauan memiliki keunikan tertentu sehingga setiap pemerintah kabupaten kepulauan menggunakan strategi pengembangan yang sesuai dengan karakter wilayah kepulauan. Dinamika pembangunan kawasan kepulauan lebih komprehensif berdasarkan visi pembangunan daerah, yang menggunakan sumberdaya terbatas, namun memberikan warna semakin dinamis dalam konsep pengembangan wilayah kepulauan dan perbatasan. Inisiatif dan inovasi setiap pimpinan dan perangkat daerah sangat mewarnai dinamika pembangunan wilayah perdesaan dan perkotaan, didukung dengan pelaksanaan pembangunan daerah oleh pemerintah provinsi dan Pemerintah berdasarkan kewenangan. Kapasitas dan kemampuan daerah aktif berkoordinasi membuka komunikasi dengan pemerintah diatasnya, mempercepat akselerasi pembangunan daerah searah dengan prioritas nasional dan provinsi.

A.1. Kabupaten Kepulauan Sitaro

Konsep pengembangan kawasan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terfokus pada pengembangan Kecamatan Siau Tengah. Kawasan ini menjadi objek wisata berbasis sumber daya alam lingkungan yang memiliki suasana pegunungan dengan temperature moderat—pada siang hari musim panas bervariasi antara 24-28 derajat Celcius—yang relatif dingin dibandingkan dengan lokasi kecamatan lain di pulau Siau.

Pada beberapa desa di wilayah Kecamatan Siau Tengah, dikembangkan budidaya sayur organik dengan memanfaatkan lingkungan alam yang memungkinkan untuk dikembangkan tanaman hortikultura. Selain itu juga

dikembangkan beberapa desa yang memiliki lokasi atau *spots* dengan keunikan pemandangan laut bagian barat yang indah dengan kombinasi panorama pegunungan dan laut, serta dapat menikmati keindahan unik sinar matahari yang memantul dari permukaan laut luas menyongsong tenggelam di permukaan horizon laut atau matahari terbenam (*sunset*).

Lokasi-lokasi pengembangan objek wisata baru di wilayah pegunungan serta wilayah pantai pada beberapa lokasi unik pulau-pulau kecil seperti Pulau Makalehi, Pulau Bahorok, dan Pulau lainnya yang memiliki *spot diving,* objek wisata pinggir pantai dipadukan dengan objek wisata menyaksikan Gunungapi aktif (vulcano), serta lintasan/*track* untuk memanjat gunungapi sampai pada lokasi-lokasi tertentu yang dapat diizinkan dan dijangkau manusia serta dinilai aman bagi pengunjung (*volcano tracking*).

Lokasi-lokasi unik dan menarik yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro dikembangkan untuk mengantisipasi dibukanya Bandara Sawang—bandara baru yang terletak di Pulau Siau—dan menghubungkan penerbangan ke Kota Manado dan ke bandara lain di kabupaten kepulauan. Bertambahnya kunjungan wisatawan domestic dan internasional diprediksi akan terjadi dengan dibukanya penerbangan dari Manado ke Ulu-Siau serta semakin lancar hubungan laut menggunakan kapal cepat di siang hari dan kapal malam dari Manado menuju ke Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Industri Pariwisata, sub sektor perikanan, dan sub sektor perkebunan Pala, menjadi tumpuan utama basis ekonomi lokal melalui peran aktif Usaha/Industri Mikro Kecil sebagai penggerak utama ekonomi Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk bergerak dan terus berkembang. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro menyiapkan kebijakan khusus melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dengan memberikan izin usaha dan juga pemberian izin produksi makanan dan minuman oleh Dinas Kesehatan kepada pelaku U/IMK.

Kebutuhan penunjang pengembangan Kawasan di Kabupaten Kepulauan Sitaro yaitu peningkatan jalan akses ke objek wisata dan permukiman penduduk di desa-desa, serta peningkatan akses pelayaran kapal siang dan malam ke Manado dan ke Tahuna-Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro melakukan peningkatan pelayaran regular akses ke pulau-pulau sekitar Pulau Siau, desa sekitar pulau Siau, dan ke Pulau Tagulandang dan Pulau Biaro. Umumnya, kapal motor sebagai alat transportasi ke pulau-pulau dikelola dan dioperasikan langsung oleh masyarakat atau sektor swasta. Kapal Ferry milik Pemerintah Kabupaten hanya melakukan pelayaran rutin ke Pelabuhan Bitung. Implikasinya bagi Pemerintah Kabupaten yaitu meningkatkan fasilitas keselamatan pelayaran di Pelabuhan Utama dan Pelabuhan di pulau-pulau, serta meningkatkan akses jalan ke desa dan objek-objek wisata.

A.2. Kabupaten Kepulauan Sangihe

Konsep pengembangan Kawasan Perkotaan Wilayah Kota Tahuna adalah dengan melakukan konservasi kawasan mangrove (bakau) di beberapa lokasi yaitu di Kecamatan Tahuna berdekatan dengan lokasi Pasar Tradisional Towo dan terminal angkutan dalam dan luar kota; dan lokasi hutan mangrove di Kecamatan Tahuna Timur terletak di sekitar permukiman penduduk dan Pelabuhan Regional Tahuna. Kedua lokasi konservasi hutan mangrove dalam wilayah Kota Tahuna berdampingan dengan fasilitas umum publik (Pasar Tradisional, Terminal Angkutan Umum dalam kota dan Pelabuhan Regional) serta permukiman penduduk. Kawasan konservasi hutan mangrove tengah kota dikembangkan menjadi

hutan lindung dan disekitar hutan dikembangkan lokasi kegiatan ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengembangkan revitalisasi dan meningkatkan lingkungan permukiman wilayah pesisir yang terarah pada desa-desa dengan mayoritas penduduknya adalah nelayan, mengembangkan usaha mikro dan kecil dengan mengoptimalkan sumber daya laut, meningkatkan kapasitas peran BUMDes sebagai pusat penggerak ekonomi desa, serta meningkatkan aksesibilitas transportasi darat dan laut yang menghubungkan antar desa. Pemerintah Kabupaten juga melakukan pengembangan permukiman penduduk perdesaan serta mendorong pusat pertumbuhan melalui pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana penunjang yang berwawasan lingkungan, peningkatan prasarana dan sarana dasar kebutuhan penduduk desa guna mendukung pengembangan ekonomi, pengembangan potensi bahari sebagai kawasan andalan laut daerah dan nasional, serta pengembangan kawasan budidaya lainnya.

Arah kebijakan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama dengan Pemerintah Provinsi mendorong dan mengoptimalkan peran Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Dhago sebagai pusat pengembangan perikanan tangkap dan budidaya tersebar di sepanjang pesisir wilayah potensial yang dilakukan oleh penduduk setempat. Kegiatan perikanan tersebut didukung dengan fasilitas penunjang untuk pengembangan kegiatan pengolahan dan pengepakan agar dapat dipasarkan ke daerah lain dan ke pasar internasional melalui Pelabuhan Bitung dan Bandara Sam Ratulangi Manado.

Potensi wisata bahari, ditempatkan menjadi objek peningkatan kegiatan ekonomi desa pesisir dengan mengembangkan kawasan Taman Laut Pulau Bukide Kecamatan Nusa Tabukan, Taman Laut Pulau Beeng Kecamatan Tabukan Selatan Tengah serta Taman Laut Pulau Dakupang dan Pulau Para Kecamatan Tatoareng. Peningkatan jaringan perhubungan darat dan laut didorong oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan untuk mengembangkan potensi bahari dan wilayah pesisir.

A.3. Kabupaten Kepulauan Talaud

Pengembangan wilayah kepulauan perbatasan dengan Filipina Selatan sebagai kawasan pengembangan ekonomi wilayah perbatasan, mengedepankan sub-sektor perikanan terintegrasi yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan memanfaatkan kedekatan jarak pelayaran laut menuju General Santos—kota pusat kegiatan pengolahan ikan di wilayah negara tetangga Filipina. Pemanfaatan sumberdaya alam laut di kabupaten ini didukung dengan ketersediaan pusat kegiatan perikanan Salibabu—yang memiliki SKPT Desa Dalum Salibabu. Peran SKPT dapat ditingkatkan untuk melakukan pengolahan tahap awal hasil tangkapan perikanan di wilayah sekitar Kabupaten Kepulauan Talaud, sebelum hasil produk perikanan dikirim atau diekpor ke General Santos (Filipina), atau dikirim ke Kota Bitung sebagai bahan baku pengolahan ikan kaleng.

Wilayah daratan Pulau Karakelang, diarahkan pada pengembangan pusat kegiatan koridor ekonomi Lirung-Melonguane dan sekitarnya. Kedua kota ini terletak di pulau yang berbeda dan dipisahkan oleh selat Lirung-Melong dengan jarak tempuh penyeberangan laut sekitar 15 menit. Wilayah koridor Lirung-Melonguane didukung dengan beberapa desa terletak di daratan kedua pulau tersebut. Pelabuhan Lirung digunakan sebagai Pelabuhan Utama (nusantara dan regional) yang digunakan oleh perusahan pelayaran yang melayani pelayaran regular penumpang dan barang dengan

daerah tujuan Manado, Bitung, Tahuna, dan pelabuhan kecil lainnya di wilayah Kabupaten Talaud.

Di sekitar wilayah daratan Pulau Karakelang dikembangkan pusat kegiatan yaitu pada bagian tengah dan utara pulau tersebut, dimana kegiatannya terkonsentrasi di Kota Beo (kota kecil), yang berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi bagi wilayah disekitarnya yang menjangkau sampai ke wilayah bagian utara desa-desa yang terletak di Pulau Karakelang dan beberapa desa yang tersebar di wilayah bagian utara. Kota Beo dikenal dengan Pelabuhan Lokal yang melayani pelayaran regular Beo-Melonguane-Lirung-Manado (pulang-pergi/pp) dengan kapal penumpang lokal. Pada wilayah pesisir sebelah timur Pulau Karakelang dikembangkan Desa Rainis sebagai pusat kegiatan kecamatan dan ekonomi. Desa Rainis menjadi pusat pertumbuhan ekonomi melayani desa–desa yang berlokasi di sepanjang pantai timur. Di wilayah pulau besar Salibabu, pusat kegiatan terkosentrasi di sekitar kota Lirung dan di Desa Dalum sebagai lokasi pusat pendaratan dan pengolahan ikan SKPT Salibabu. Selain di lokasi antara kedua Pulau Salibabu dan Pulau Karakelang, dikembangkan objek wisata pantai Pulau Sara Besar dan Pulau Sara Kecil dengan pantai pasir putih yang menjadi ikon dari wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Wilayah Kepulauan Talaud yang memiliki banyak objek wisata pantai dan laut, taman laut, serta pulau-pulau yang memiliki pantai indah untuk lokasi *snorkeling*, serta lokasi untuk penangkapan ikan secara alami dengan konsep yang disebut “Manee”, yaitu kearifan lokal yang rutin dilaksanakan masyarakat setempat untuk menangkap ikan tanpa menggunakan alat tangkap. Manee merupakan warisan leluhur yang menjadi budaya local dengan konsep ramah lingkungan yang dilestarikan dan secara regular dilakukan masyarakat setempat. Kegiatan ramah lingkungan yang dilaksanakan masyarakat menjadi potensi objek wisata menarik bagi para pelancong yang berkunjung dan ingin menyaksikan objek wisata budaya dan alam bahari. Kegiatan masyarakat seperti melakukan Manee, memungkinkan untuk dikembangkan Pemerintah Daerah berkerjasama dengan pihak swasta, dan masyarakat, seperti *community base eco-tourism*, memiliki potensi untuk dikembangkan di beberapa pulau kecil di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Kecenderungan setiap daerah adalah untuk menyiapkan objek wisata berbasis sumber daya alam yang memiliki keunikan dan daya tarik khusus yang dikembangkan dan menjadi ikon daerah, sehingga wisatawan yang datang dapat mengunjungi objek wisata unik yang disiapkan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat setempat.

Wilayah kepulauan dan perbatasan melaksanakan konsep pengembangan wilayah melalui pengembangan potensi alam lokal bidang industri pariwisata berbasis keunikan sumberdaya alam, pengembangan komoditi lokal hortikultura dan perkebunan, serta peningkatan usaha penangkapan dan budidaya ikan untuk diekspor ke luar daerah dan mancanegara. Usaha pengembangan daerah mengoptimalkan potensi lokal membutuhkan dukungan konektivitas laut, darat, dan udara sebagai akses antar kabupaten dan ke Pelabuhan Manado dan Bitung yang merupakan pintu utama menuju pasar domestik dan internasional.

B. Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya

Pada Klaster wilayah Bolaang Mongondow Raya terdapat 2 kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang langsung berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, dimana Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berbatasan dengan

Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango.

Wilayah di antara 2 kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tidak dihubungkan dengan jalan secara langsung dari bagian utara menuju ke bagian selatan dan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena di kedua kabupaten tersebut terdapat hutan lindung "Dumoga Bone Nani Wartabone" yang terletak memanjang punggung peninsula pulau Sulawesi. Sebelah timur lokasi hutan lindung berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow, pada bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan di bagian barat dengan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, keduanya merupakan bagian dari wilayah Provinsi Gorontalo. Dengan kata lain Taman Nasional "Dumoga Bone Nani Warta Bone" dikelilingi oleh 5 kabupaten, 3 kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan 2 kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Gorontalo.

Adapun akses yang memungkinkan sebagai penghubung bagian pantai utara (Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) dengan bagian pantai selatan (Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) adalah melalui jalan akses diagonal dari Kota Lolak—Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow—memotong ke bagian tengah daratan Bolaang Mongondow Raya sebagai pusat pengembangan lumbung pangan padi—ke daratan Dumoga-Doloduo—menuju ke bagian selatan sampai ke Molibagu—ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Akses ini dikenal dengan sebutan jalan diagonal Lolak-Pindol-Dumoga-Molibagu, sebagai akses utama jaringan perhubungan untuk mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam wilayah tersebut. Akses jalan diagonal utara-selatan Lolak-Pindol-Dumoga-Molibagu melalui daerah dengan potensi pertanian lahan kering untuk budidaya jagung dan kelapa, serta lahan basah—sawah dengan irigasi teknis—daratan Dumoga dan Doloduo dan wilayah permukiman penduduk transmigrant. Mereka yang berperan sebagai penggerak pengembangan lumbung pangan padi wilayah Bolaang Mongondow.

Selain itu, pantai utara memiliki Pelabuhan regional/lokal Labuhan Uki, yang memungkinkan dan memudahkan peran sebagai pusat distribusi bahan impor dari luar daerah, seperti barang -barang dari Pulau Jawa yang dibongkar dan muat di pelabuhan tersebut, untuk kemudian didistribusikan menuju wilayah pantai timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur. Sebaliknya juga dapat terjadi, produksi bahan baku dari perkebunan seperti kelapa, kakao, dan jagung serta bahan pangan lainnya dari Bolaang Mongondow, dikirim keluar daerah melalui Pelabuhan Labuhan Uki. Adapun jalan diagonal kewenangan pemerintah provinsi ini diperkirakan akan menjadi jalur utama (*back bone*) wilayah pantai timur/selatan ke wilayah pantai utara. Kedua sisi pantai timur/selatan dan pesisir pantai bagian utara dapat diakses langsung lewat Trans Sulawesi Highway (Utara dan Timur/Selatan) menuju ke Provinsi Gorontalo. Sepanjang Kawasan sepanjang jalan diagonal diperkirakan akan cepat berkembang menjadi poros diagonal klaster cepat tumbuh Lolak-Dumoga/Doloduo-Molibagu. Poros koridor utara-timur/selatan Lolak-Dumoga dan Dumoga-Molibagu, telah menjadi koridor diagonal yang berkembang pesat di wilayah Sulawesi Utara pada masa jangka menengah dan panjang atau RPJP ke II Provinsi Sulawesi Utara.

Potensi jalan diagonal berikutnya yaitu poros diagonal Inobonto-Kotamobagu-Tutuyan [Boltim] (I-K-T) dan Inobonto-Kotamobagu-Molibagu [Bolsel] (I-K-M) ke pantai timur/selatan melewati Trans Sulawesi bagian tengah yang dikenal dengan jalan Amurang-Kotamobagu-Doloduo. Akses

jalan jalur cepat yang dibangun dengan biaya APBN (bersumber dari pinjaman Bank Dunia) yang dibangun oleh Kontraktor Korea Selatan dan Perusahaan Pembangunan Jalan Jepang (JBIC) pada tahun 1970-an. Jalur trans bagian tengah ini dibuka untuk mendorong percepatan pembangunan Kawasan Lumbung Pangan (Dumoga sekitarnya)—yang didukung dengan 2 bendungan Torout dan Kasinggolan terletak di tepi Kawasan Hutan Lindung Nani Wartabone.

Pembukaan akses diagonal Inobonto-Kotamobagu-Tutuyan (I-K-T) adalah bagian dari pembukaan akses jalur cepat tumbuh di wilayah Bolaang Mongondow Raya. Wilayah Kota Kotamobagu dan sekitarnya akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah bagian tengah, yang didukung dengan pusat logistik "Dry Port" Kotamobagu dan Kawasan Industri Mongondow (KIMONG) di bagian sebelah Timur-Utara Kabupaten Bolaang Mongondow, yang terletak di bagian sebelah utara wilayah Kota Kotamobagu. Selain itu akan ditunjang dengan berkembangnya wilayah pantai timur/selatan yang semakin berkembang yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan ibukotanya Tutuyan dan wilayah pertambangan emas di bagian barat Bolaang Mongondow Timur dan bagian sebelah timur Kota Kotamobagu. Demikian juga di bagian sebelah barat kota didukung dengan wilayah lumbung pangan daratan Dumoga.

Analisa potensi kawasan yang berkembang dan mengelilingi Kota Kotamobagu, mempercepat kota tersebut berfungsi sebagai pusat pelayanan jasa pemerintahan, perdagangan, perbankan, dan jasa keuangan regional. Akses jalan yang telah terbangun serta pembukaan jalan lingkar Kota Kotamobagu dan rencana pembangunan "Dry Port" di wilayah Kotamobagu di sepanjang *ringroad* akses ke Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow bagian utara. Bersamaan dilakukan pengembangan objek wisata budaya dan wisata alam di dalam kota Kotamobagu, semakin mempercepat pengembangan Kota Kotamobagu sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan dan Hub Transit di antara 3 kabupaten (Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan).

Wilayah Kota Kotamobagu sedang berbenah menyiapkan fasilitas-fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh kabupaten tetangga seperti *Dry Port*—sebagai pusat logistik dan penyimpanan barang dalam ruangan atau gudang tertutup, *cold storage* bahan pangan hortikultura, dan ruang terbuka *"open space"* untuk terminal *container yard* dengan ukuran kontainer berkapasitas 20" feet dan 40" feet, yaitu kontainer yang transit dari Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Labuhan Uki dan Pelabuhan Anggrek, Gorontalo. Semua barang dalam kontainer yang akan didistribusikan di wilayah Kotamobagu, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow terbuka untuk menggunakan fasilitas tersebut. Adanya fasilitas *Dry Port* akan memberi kemudahan yaitu: 1) Semua jenis barang yang dibutuhkan di beberapa kabupaten dan kota dapat menggunakan fasilitas dalam wilayah *Dry Port* untuk penyimpanan dalam gudang atau di gudang terbuka *container yard*; 2) Lokasi *Dry Port* menyediakan container kosong (*empty container*) yang dapat digunakan oleh pedagang (ekportir dan importir) untuk pengiriman barang dan komoditi yang akan diekspor (ke dalam dan luar negeri); 3) Menjadi titik simpul ekspor komoditi lokal (dari wilayah Kotamobagu dan kabupaten terdekat) atau pintu masuk dan keluar barang dari luar negeri dan dalam negeri dimana dapat dilakukan pemeriksaan Bea Cukai (Custom), Karantina (Quarantine) sebelum kontainer di kirim ke Pelabuhan laut dan udara untuk di ekspor.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lokasinya berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo khususnya dengan Kabupaten Gorontalo Utara. Wilayah perbatasan menjadi perhatian pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam mengembangkan pusat kegiatan ekonomi, antara lain dengan menarik sebagian warga dari kabupaten tetangga menggunakan fasilitas kegiatan ekonomi untuk berbelanja kebutuhan pokok. Dalam kenyataannya, sebagian masyarakat di perbatasan dari kedua kabupaten berinteraksi dalam kegiatan ekonomi dan sosial—yang telah berlangsung lama tanpa mengenal batas wilayah berbeda provinsi dan kabupaten.

Potensi perikanan, perkebunan, pertanian tanaman pangan, serta industri pariwisata, memungkinkan sebagian kegiatan ekonomi terintegrasi dengan wilayah kabupaten Bolaang Mongondow yang juga telah terintegrasi dengan akses Trans Sulawesi *Highway* lintas utara menghubungkan kota Manado dan Kota Gorontalo. Poros jalan Trans Sulawesi Highway menjadi jalur penting menggerakan ekonomi di kedua kabupaten tersebut untuk akses ke pelabuhan untuk pengiriman dan penerimaan barang dari dan ke luar daerah serta akses ke pusat kegiatan ekonomi provinsi.

Aksesibilitas jaringan jalan nasional dan jaringan perhubungan laut—yang dikelola oleh perusahaan pelayaran lokal menghubungkan antar desa dengan kota Manado dan kota Kwandang di Gorontalo, sampai akses ke kota Toli-toli di wilayah Sulawesi Tengah. Jalur pelayaran Manado-Bintauna-Boroko-Kuandang-Toli-toli, sudah terbangun sejak masa penjajahan untuk jalur pengangkutan hasil bumi seperti cengkeh, kopra, dan tanaman perkebunan lainnya menuju pasar internasional.

Wilayah koridor pantai Timur/Selatan menghubungkan beberapa kabupaten yang menghadap Teluk Tomini seperti Kabupaten Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan bahkan menjadi akses sampai ke Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Jalur pantai Timur/Selatan dihubungkan dengan Trans Sulawesi *Highway* Pantai Timur/Selatan yang telah dibangun sejak awal tahun 90-an secara bertahap, hingga menghubungkan Pelabuhan Bitung dengan Pelabuhan Gorontalo melalui darat serta melalui transportasi laut.

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur memiliki pontensi perikanan, pariwisata dan perkebunan. Kedua daerah ini relatif berkembang cepat, menyusul daerah sekitar yang telah berkembang lebih awal, disebabkan dengan dibukanya akses jalan nasional dan pelayaran lokal di pantai timur yang memungkinkan akses ke Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Belang dan Pelabuhan Kota Gorontalo. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terfokus pada pengembangan pesisir pantai selatan dengan pengembangan pelabuhan lokal untuk akses ke Bitung dan ke Kota Gorontalo. Berbeda dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang terarah pada pengembangan pusat kegiatan pemerintahan dan perdagangan di Kota Tutuyan—kota kecil yang dikembangkan sejak terbentuknya kabupaten tersebut. Pengembangan koridor pantai timur/selatan membutuhkan dukungan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di pantai timur dengan akses ke Belang/Ratahan dan Bitung serta akses ke Kota Kotamobagu sebagai magnet utama kegiatan ekonomi dan sosial, karena kedekatan jarak dan sejarah kewilayahan yang dulunya menyatu dalam satu kabupaten induk.

Ekonomi lokal Kabupaten Bolaang Mongondow Timur didukung dengan potensi perikanan dan kelautan, pertambangan, perkebunan, serta pariwisata dengan dikembangkannya objek wisata baru berbasis alam pegunungan dan pantai yang menjadi primadona wisata, berperan sebagai

mesin utama yang menggerakan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Sepanjang pantai timur berhadapan dengan Teluk Tomini memiliki potensi sumberdaya alam (perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata) dengan prospek besar untuk dikembangkan menjadi potensi ekonomi daerah beberapa kabupaten yang dilalui Trans Sulawesi Highway Pantai Timur/Selatan. Di masa mendatang, jalur ini akan semakin berkembang dengan dibukanya jalur kereta cepat (*railway*) Bitung-Gorontalo.

C. Klaster Wilayah Minahasa Bagian Tengah (Selatan, Tenggara, Induk, dan Tomohon)

Klaster Wilayah Minahasa bagian tengah meliputi beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan Kota Tomohon. Klaster ini memiliki beberapa pusat pertumbuhan ekonomi dan koridor pengembangan cepat tumbuh,seperti wilayah Koridor Tumpaan-Amurang, Motoling-Tompaso Baru, Modoinding-sekitar Danau Moat, Koridor Ratahan-Belang-Ratatotok, Tombatu-Silian-Amurang (yang merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa Selatan), Koridor Langowan-Kakas, Kawangkoan-Tompaso, Tondano-Tomohon (mencakup dua wilayah administrasi yaitu Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon) danTanawangko-Kalasey.

Koridor Kawasan Minahasa memiliki potensi pengembangan kawasan cepat tumbuh pada wilayah-wilayah kabupaten dan kota. Tantangan pengembangan koridor antara lain adanya kebutuhan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan penertiban alih fungsi lahan, pemenuhan fasilitas kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi yang relatif terbatas, serta kebutuhan infrastruktur dasar seperti tambahan kebutuhan energi listrik, dan jaringan telekomunikasi. Dimana kedua bidang tersebut bukan kewenangan daerah namun kewenangan pemerintah nasional melalui BUMN. Selain juga adanya kebutuhan peningkatan kualitas akses jaringan jalan dan sarana transportasi publik yang menghubungkan wilayah koridor cepat tumbuh. Pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut dapat mendorong percepatan perkembangan kawasan dan memberikan manfaat pada wilayah sekitar, sehingga perlu didukung pemerintah daerah.

Sebagian wilayah koridor yang telah berkembang, jika dilakukan tanpa perencanaan kawasan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang, pada pengembangan Kawasan di masa mendatang akan berdampak pada kebutuhan untuk penyesuaian dan pengawasan serta penertiban tindakan masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan. Konsep pengembangan klaster ditujukan untuk memacu akselerasi pembangunan wilayah melalui pengembangan pantai timur/selatan melalui sub-sektor perikanan dan sub-sektor perkebunan, sektor transportasi laut dan darat di wilayah pesisir sepanjang wilayah pantai timur/selatan di Kabupaten Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan, yang diharapkan dapat menjadi magnet baru penggerak ekonomi kawasan koridor pantai timur/selatan Sulawesi Utara.

Daerah Aliras Sungai (DAS) Tondano

DAS Tondano mencakup beberapa wilayah kabupaten (Minahasa, Minahasa Utara) dan beberapa wilayah kota (Tomohon, Manado, dan Bitung) dan yang memiliki peran besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Minahasa Raya termasuk Kota Manado dan Bitung. DAS Tondano menjadi sumber utama air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, industri, pertanian dan perkebunan. Menjadi sektor utama dalam memberikan

kontribusi terhadap bahan pangan kebutuhan dasar dan pemberi sumber pekerjaan bagi sebagian masyarakat di wilayah tersebut.

Alternatif memelihara sumber air baku utama di wilayah perdesaan dan perkotaan adalah dengan menciptakan kerjasama antar pemerintah daerah dan masyarakat (*collaborative governance*) untuk melanjutkan pemeliharaan sumber air DAS dengan menghutankan kembali wilayah sekitar DAS yang dapat dilaksanakan oleh penduduk lokal masing-masing desa/kelurahan dengan didukung oleh pihak LSM dan swasta, serta pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Selain secara ketat pemerintah daerah membatasi terjadinya alih fungsi lahan perkebunan menjadi wilayah permukiman dan pertokoan yang ramai berkembang di setiap daerah, serta pemeliharaan kawasan kawasan sumber mata air untuk dilanjutkan dengan upaya penghutanan kembali kawasan sekitar sumber air.

D. Klaster Wilayah Bagian Utara mencakup Kota Manado-Minahasa Utara-Kota Bitung—sebagai Wilayah Cepat Tumbuh di Sulawesi Utara

Klaster wilayah (Manado-Minut-Bitung) disiapkan sejak awal tahun 2000an bersamaan dengan dibentuknya Badan Kawasan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung (KAPET) sebagai *growth centre* di bagian utara Kawasan Timur Indonesia. Pusat pertumbuhan (*growth centre*) ini didukung oleh 2 *growth poles* (Kota Manado dan Kota Bitung)—yang memiliki bandara internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Hub Internasional Bitung menjadi pusat *transhipment* penumpang dan barang dari provinsi sekitar Kawasan Timur bagian utara.

Sejak awal berlangsungnya otonomi daerah, wilayah cepat tumbuh (Manado-Minut-Bitung) telah berkembang lebih awal sebelum daerah-daerah lain dipacu pembangunannya. Klaster wilayah cepat tumbuh di Sulawesi Utara dipersiapkan sejak awal kebutuhan infrastruktur dasar dan sosial serta fasilitas penunjang sebagai syarat untuk penggerak utama suatu kawasan dapat bergerak lebih cepat serta dapat mempengaruhi berkembang pada daerah sekitar sebagai wilayah penyangga yang menyediakan bahan baku dan tenaga kerja.

Beberapa indikator pembangunan daerah di wilayah cepat tumbuh, dipengaruhi oleh sejarah masa lalu seperti pusat pelayanan Pendidikan dan Kesehatan terdapat diwilayah ini, yang telah berkembang relatif baik. Menyebabkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif memiliki angka yang tinggi dibandingkan dengan klaster wilayah yang lain. Demikian juga terjadi pada indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita relatif tertinggi di Sulawesi Utara, selain memiliki lokasi strategis di Kawasan Timur bagian utara berhadapan langsung dengan wilayah Asia Timur dan Pacific. Beberapa hal inilah yang membuat klaster wilayah cepat tumbuh memiliki kontribusi terhadap ekonomi Sulawesi Utara sebesar 51% pada total PDRB harga konstan.

Peran Kawasan cepat tumbuh Manado-Minahasa Utara-Bitung memiliki peran strategis dalam upaya percepatan berfungsinya Super Hub Sulut. Sebab lokasi 2 infrastruktur dasar utama (Bandara Internasional dan Pelabuhan Hub Internasional), serta 2 lokasi KEK (Bitung dan Likupang), serta infrastruktur dasar lainnya seperti pusat beberapa lokasi pembangkit listrik gunakan geothermal, air, dan sinar matahari, sebagai syarat utama pengembangan industri pengolahan *yang ramah lingkungan, towards a green industry*

Super Hub Sulawesi Utara

Kawasan ini mencakup wilayah Kota Manado, Kota Bitung, dan Kabupaten Minahasa Utara, serta Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu. Masing-masing daerah tercakup dalam konsep Super Hub Sulawesi Utara yang memiliki infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung untuk terwujudnya *inter-connectivity* pusat kegiatan ekonomi dan pusat pengolahan produk lokal serta objek wisata berbasis sumberdaya alam seperti pesisir pantai, laut, pegunungan dan kawasan hutan lindung.

Integrasi kawasan potensial ekonomi yang didukung dengan infrastruktur dasar dan sosial yang memadai melalui jaringan perhubungan (*connectivity*) darat, laut dan udara yaitu akses ke provinsi sekitar dan ke mancanegara. Ditunjang dengan tenaga kerja berkualitas di bidang logistik, jasa, dan industri pengolahan, menjadi syarat utama bagi Kawasan Sulawesi Utara dapat berperan sebagai Super Hub di Kawasan Timur Indonesia bagian Utara. Kawasan ini dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru *growth centre* di KTI yang dapat diwujudkan melalui Kerjasama Pemerintah dan Pemda (*collaborative governance*).

Kawasan Kerjasama Regional dengan Negara Tetangga

Lokasi Sulawesi Utara berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Negara Philippines—yang merupakan negara kepulauan seperti Indonesia—memposisikan Sulawesi Utara sebagai provinsi kepulauan yang memiliki hubungan transportasi dan perdagangan yang berkembang sejak masa nenek moyang penduduk Sulawesi Utara. Dikenal pada saat itu dengan *"Ancient Trade"* antara Filipinos (orang Mindanau Selatan) dengan penduduk kepulauan yang bermukim di wilayah Talaud dan Sangihe dan telah memiliki hubungan dalam waktu yang relatif panjang.

Kerja Sama Regional

Indonesia adalah anggota Kerja Sama Regional ASEAN *(Association of Southeast Asian Nation*) bersama-sama dengan 9 (sembilan) negara anggota lainnya yaitu: Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja. Tujuannya adalah:

- Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di Kawasan ASEAN
- Untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara
- Meningkatkan kerjasama aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan administrasi.

Kerja Sama Sub-Regional (BIMP-EAGA) yang dimulai sejak tahun 1994, sejak itulah Provinsi Sulawesi Utara dilibatkan langsung secara aktif oleh Pemerintah, dalam forum kerja internasional. Kerja Sama Ekonomi Sub-Regional (KESR) merupakan forum kerjasama ekonomi antar wilayah lintas negara yang berdekatan secara geografis, diantaranya IMT-GT (*Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle* dan BIMP-EAGA (*Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area*). Cakupan wilayah Indonesia untuk IMT-GT adalah seluruh pulau Sumatera, sedangkan cakupan wilayah Indonesia untuk BIMP-EAGA adalah seluruh pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. BIMP-EAGA disebut juga "*Building Block of ASEAN*". Tujuannya adalah:

- Mendorong terjadinya peningkatan kerja sama ekonomi antara daerah-daerah di Indonesia dengan daerah-daerah di wilayah negara lain yang secara geografis saling berdekatan.

- Memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta membantu program pengentasan kemiskinan daerah.
- Meningkatan kualitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia di daerah (baik sumber daya alam maupun manusia).
- KESR diharapkan dapat menjadi salah satu modalitas untuk mendorong prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat daerah dalam meningkatkan pemberdayaan potensi ekonomi di wilayah masing-masing.
- Menunjang kesiapan daerah dalam menghadapi era liberalisasi ekonomi dan perdagangan dunia, baik dalam rangka ASEAN, RCEP, TPP maupun perdagangan dunia dalam lingkup yang lebih luas.

Sasaran utama dari kerja sama sub regional ini adalah percepatan peningkatan perdagangan, pariwisata dan investasi (*TTI/Trade, Tourism and Investment*). BIMP-EAGA terhubung dengan beberapa *Development Partner*, antara lain: ADB, JICA, China dan Northern Territory dalam memberikan *Technical Assistance* dan bantuan Dana – Soft Loan.

Sulawesi Utara dan KESR-BIMP EAGA

Sejak berdirinya kerja sama ini, pemerintah provinsi selaku perwakilan pemerintah di daerah telah memfasilitasi beberapa program/kegiatan yang sudah dilakukan antara lain:

- *Launching* pelayaran kargo langsung dari Bitung ke Davao pada tahun 2017
- Pembukaan kembali penerbangan langsung Manado-Davao di tahun 2019 namun ditutup pada saat pandemi Covid-19, tepatnya pada awal Maret 2020.
- Promosi potensi komoditi pertanian/perkebunan, pariwisata dan perdagangan ekspor/impor pada acara *Trade Expo* (sebelum pandemi-Covid-19).
- Penyusunan proposal "*BIMP-EAGA BUSINESS CENTER"* di Sulawesi Utara yang menjadi ***pilot project*****,** *Business Center* akan dimanfaatkan oleh UMKM untuk meningkatkn kualitas/kuantitas produk sehingga dapat diekspor, berkelanjutan sesuai dengan permintaan pasar internasional dengan sistim *off/on-line business.* Melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulut mendapat bantuan/asistensi dari Kementerian Koperasi/UMKM-RI dan Kementerian Perdagangan – RI.

Program/Kegiatan yang akan dilanjutkan adalah :

- Pemanfaatan konektifitas laut Bitung-Davao dengan mengajak para *exporter/importer*, *trader*, s*hips-owner*, konsolidator dan pelaku usaha lainnya
- *Roadshow* ke provinsi tetangga untuk mempromosikan jalur yang sudah ada
- Pembukaan kembali penerbangan langsung Manado-Davao
- Merintis kerja sama dengan Mindanau Selatan-Filipina di bidang Pendidikan, Pariwisata, UMKM dan Perikanan/Pertanian/Perkebunan
- Menghidupkan kembali "Sister City" antara Manado, Bitung dengan Davao City-Filipina dan peluang untuk kabupaten/kota lain antara dua wilayah

Program dan kegiatan yang dijelaskan diatas telah diakomodasi melalui dokumen perencanaan provinsi yaitu RPJMD dan RKPD sejak Pemerintah menetapkan kewajiban bagi setiap pemerintah daerah untuk menyusun

rencana pembangunan daerah, setelah berlakunya otonomi daerah pada tahun 2000/2001 di seluruh Indonesia.

7.3. Lingkungan dan Isu Strategis

Ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah dan kabupaten/kota menjadi issue strategis pada pengembangan wilayah antar kabupaten dalam satu kawasan, dimana terjadi perbedaan pembangunan dan pengembangan antar kabupaten dalam satu kawasan. Masalah kemiskinan tercatat pada tahun 2020, dimana pada klaster wilayah Bolaang Mongondow khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) tercatat tingkat kemiskinan relatif tinggi sebesar 12,77 persen dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) memiliki tingkat kemiskinan sebesar 8,41 persen. Kedua kabupaten (Bolmut dan Bolsel) lokasinya berbatasan langsung dengan provinsi tetangga Gorontalo. Sedangkan Kabupaten Bolaang Mongodow Timur tercatat memiliki penduduk miskin relatif rendah 5,88 persen.

Pada Wilayah Klaster Kabupaten Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat tingkat kemiskinan sebesar 11,14 persen, di Kabupaten Kepulauan Talaud tercatat tingkat kemiskinan sebesar 9,49 persen dan di Kabupaten Kepulauan Sitaro tercatat tingkat kemiskinan sebesar 8,94 persen. Di Wilayah Klaster Minahasa-Manado-Bitung, tingkat kemiskinan tahun 2020 tercatat di Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar 12,30 persen dan Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 9,14 persen. Di antara Kota-Kota di Sulawesi Utara, Kota Bitung mencatat kemiskinan sebesar 6,41% dan kota yang memiliki tingkat kemiskinan terendah yaitu Kota Kotamobagu 5,42 persen.

Terjadi ketimpangan pendapatan di antara kelompok masyarakat dan antar wilayah klaster dengan masih relatif tinggi Gini Ratio Sulawesi Utara 2020 terindikasi sebesar 0,36. Konsentrasi kegiatan ekonomi produktif terfokus pada wilayah Kota Bitung, Manado, dan Kabupaten Minahasa Utara, serta sebagian kegiatan industri pengolahan yang tersebar di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan kondisi terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas masih terjadi di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan perbatasan. Demikian juga, pengembangan ekonomi lokal belum optimal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan perbatasan.

Faktor lainnya penyebab ketimpangan antar wilayah antara lain belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Hal ini ditandai dengan:

a) Rendahnya kemajuan operasional Pusat Pertumbuhan Wilayah (seperti 2 KEK, 1 Kawasan Industri, dan 2 SKPT di wilayah kepulauan), serta peran kota menengah kecil di setiap wilayah klaster yang belum berperan optimal;
b) Lemahnya konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan; dan
c) Belum berkembangnya kawasan strategis kabupaten; dan
d) Pengelolaan urbanisasi juga belum optimal;

Peningkatan jumlah penduduk di wilayah perkotaan berkontribusi memberikan tekanan pada kawasan perkotaan, menurunkan kesejahteraan, dan menyebabkan sebagian wilayah perkotaan tidak layak huni. Hal ini ditunjukan pada beberapa kawasan permukiman di Kota Manado dan Bitung yang sering mengalami peningkatan angka kejadian banjir, penurunan permukaan tanah, kenaikan muka air laut, dan penurunan kualitas air sungai. Padahal wilayah Manado masih harus menampung populasi hampir 0,5 juta jiwa (Kota Manado Dalam Angka 2021, BPS), jumlah penduduk tertinggi di wilayah perkotaan yang ada di Sulawesi Utara. Pada sisi lain, kontribusi Kota Manado relatif besar terhadap

terhadap PDRB Provinsi (BPS, 2018), menunjukkan dominasi Kota Manado dalam perekonomian Sulawesi Utara dan tingginya kesenjangan dengan wilayah lain yang ditunjukkan oleh indikator IPM.

Penurunan kesenjangan antar wilayah dan kondisi perkotaan dapat diatasi melalui pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Namun, kondisi saat ini belum tercapai, karena:

1. Baru sebatas beberapa kecamatan dalam kabupaten/kota mencapai target mewujudkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) walaupun masih menunggu untuk ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. Belum tersedianya peta dasar skala 1:5.000 sebagai dasar penyusunan RDTR;
3. Belum berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten; dan
4. Terdapatnya tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang yang akan diselesaikan melalui pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang diintegrasikan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia.

Berkaitan dengan penyelenggaraan desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, penetapan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah memunculkan berbagai isu antara lain masih banyaknya peraturan perundang-undangan turunan UU No. 23/2014 yang belum ditetapkan;

1. Belum harmonisnya peraturan pelaksana dengan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya;
2. Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer daerah dalam pembiayaan pembangunan;
3. Terbatasnya kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mendukung prioritas nasional; serta
4. Tingginya dinamika politik lokal yang menyebabkan hambatan dalam pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan Wilayah Sulawesi Utara menghadapi berbagai permasalahan, seperti:

a. Belum optimalnya hilirisasi potensi unggulan berbasis sumberdaya alam;
b. Belum terwujudnya pengembangan dan peran Pelabuhan Hub Internasional untuk Kawasan Timur Indonesia;
c. Belum terwujudnya kelembagaan dan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung;
d. Masih lemahnya upaya kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi bencana;
e. Masih terbatasnya akses dan mutu layanan dasar;
f. Belum optimalnya peningkatan produktivitas sektor tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan untuk mendukung peran Sulawesi Utara sebagai lumbung pangan nasional;
g. Belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan pengelola Kawasan Regional untuk fasilitas dasar bagi masyarakat seperti: air bersih, sanitasi, dan pengolahan sampah; dan
h. Masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai, serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan dan perdesaan.

7.3.1. Ketimpangan wilayah berdasarkan indikator ekonomi dan sosial

Berikut ini adalah kondisi ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota dalam tiap klaster yang ditunjukkan oleh beberapa indikator.

1. Klaster Wilayah Kabupaten Kepulauan

Tabel 7.2 Indikator Ekonomi dan IPM Klaster Wilayah Pengembangan Kabupaten Kepulauan dan Perbatasan

Kabupaten	Pertumbuhan Ekonomi		Pengangguran		Kemiskinan		IPM	
	2015	2020	2017	2020	2015	2020	2015	2020
Kab. Kepulauan Sangihe	6,07	0,50	5,11	4,91	12,27	11,14	67,56	70,73
Kab. Kepulauan Talaud	5,23	0,43	3,50	2,64	10,09	9,49	66,92	67,64
Kab. Kepulauan Sitaro	7,01	1,03	2,86	3,31	10,93	8,94	65,00	67,64

Sumber Url: https://sulut.bps.go.id/indicators/52/297/1/laju-pertumbuhan-pdrb-kabupaten-kota.html; Access Time: March 4, 2021, 4,51 pm; https://sulut.bps.go.id/indicators/23/8/2/persentase-kemiskinan-kabupaten-kota.html; Access Time: March 4, 2021, 5:05 pm; https://sulut.bps.go.id/indicators/6/648/2/ tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-utara.html; Access Time: March 4, 2021, 5:00 pm; https://sulut.bps.go.id/indicators/26/58/2/indeks-pembangunan-manusia.html; Access Time: March 4, 2021, 5.02 pm.

Tabel 7.3. Indikator Sosial Klaster Wilayah Kepulauan dan Perbatasan

KABUPATEN/KOTA	HLS		RLS		AHH	
	2016	2020	2016	2020	2016	2020
Kepulauan Kepl. Sangihe	11,71	12,32	7,7	8,29	69,26	70,10
Kepulauan Kepl. Talaud	12,13	12,51	8,92	9,51	69,41	70,16
Kepulauan Kepl. Sitaro	11,24	11,67	8,45	8,97	69,72	70,73

Sumber: BPS Sulut 2021

2. Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya

Tabel 7.4. Indikator Ekonomi dan IPM Klaster Wilayah Pengembangan Bolaang Mongondow Raya

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi		Pengangguran		Kemiskinan		IPM	
	2015	2020	2017	2020	2015	2020	2015	2020
Kab. Bolaang Mongondow	5,89	0,71	4,88	4,87	8,63	7,27	64,46	66,99
Kab. Bolaang Mongondow Timur	6,48	0,18	7,32	6,13	6,90	5,88	63,81	65,99
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	5,96	0,63	6,34	4,39	15,17	12,77	63,72	65,00
Kab. Bolaang Mongondow Utara	5,80	0,71	4,71	5,48	9,72	8,41	64,46	66,99
Kota Kotamobagu	6,52	0,20	5,71	7,44	5,85	5,42	70,70	72,97

Sumber Url: https://sulut.bps.go.id/indicators/52/297/1/laju-pertumbuhan-pdrb-kabupaten-kota.html; Access Time: March 4, 2021, 4,51 pm; https://sulut.bps.go.id/indicators/23/8/2/persentase-kemiskinan-kabupaten-kota.html; Access Time: March 4, 2021, 5:05 pm; : https://sulut.bps.go.id/indicators/6/648/2/ tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-

utara.html; Access Time: March 4, 2021, 5:00 pm; https://sulut.bps.go.id/indicators/26/58/2/indeks-pembangunan-manusia.html; Access Time: March 4, 2021, 5.02 pm;

Tabel 7.5. Indikator Sosial Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya

KABUPATEN/KOTA	HLS		RLS		AHH	
	2016	2020	2016	2020	2016	2020
Bolaang Mongondow	11,07	11,52	7,3	7,93	68,51	69,36
Bolaang Mongondow Utara	11,86	11,91	7,67	8,4	66,91	67,66
Bolaang Mongondow Selatan	12,21	12,29	7,71	7,9	64,00	64,49
Bolaang Mongondow Timur	11,46	11,59	7,52	7,83	67,27	67,89
Kota Kotamobagu	12,67	12,79	9,97	10,1	69,69	70,47

Sumber: BPS Sulut 2021

3. Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian Tengah, Selatan/Tenggara dan Tomohon

Tabel 7.6. Indikator Ekonomi dan IPM Klaster Wilayah Pengembangan Minahasa Raya Bagian Tengah, Selatan/Tenggara dan Tomohon

Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi		Pengangguran		Kemiskinan		IPM	
	2015	2020	2017	2020	2015	2020	2015	2020
Kab. Minahasa Selatan	6,30	-0,77	7,38	5,01	10,22	9,14	69,18	72,11
Kab. Minahasa Tenggara	6,29	-0,64	5,72	3,31	15,88	12,30	68,05	70,51
Kab. Minahasa	6,17	-1,03	6,91	6,30	8,80	7,30	73,59	75,29
Kota Tomohon	6,03	-0,41	8,94	8,99	6,78	5,60	74,36	76,69

Sumber Url: https://sulut.bps.go.id/indicators/52/297/1/laju-pertumbuhan-pdrb-kabupaten-kota.html; Access Time: March 4, 2021, 4,51 pm; https://sulut.bps.go.id/indicators/23/8/2/persentase-kemiskinan-kabupaten-kota.html; Access Time: March 4, 2021, 5:05 pm; : https://sulut.bps.go.id/indicators/6/648/2/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-utara.html; Access Time: March 4, 2021, 5:00 pm; https://sulut.bps.go.id/indicators/26/58/2/indeks-pembangunan-manusia.html; Access Time: March 4, 2021, 5.02 pm;

Tabel 7.7. Indikator Sosial: Klaster Wilayah Minahasa Raya bagian Tengah/Induk, Selatan/Tenggara, dan Tomohon

KABUPATEN/KOTA	HLS		RLS		AHH	
	2016	2020	2016	2020	2016	2020
Minahasa	13,93	13,98	9,54	9,59	70,40	71,08
Minahasa Selatan	11,75	12,74	8,71	9,08	69,17	69,92
Minahasa Tenggara	11,51	12,27	8,39	8,88	69,53	70,15
Kota Tomohon	14,16	14,20	10,23	10,73	71,07	71,93

Sumber: BPS Sulut 2021

Tabel 7.8 Indikator Ekonomi dan IPM Kawasan Minahasa Raya Bagian Utara Cepat Tumbuh Manado-Minahasa Utara-Bitung

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi		Pengangguran		Kemiskinan		IPM	
	2015	2020	2017	2020	2015	2020	2015	2020
Manado	6,39	-3,13	9,35	13,88	5,63	5,86	77,32	78,93
Minahasa Utara	7,03	-0,93	9,48	7,88	8,12	7,00	71,09	73,90
Bitung	3,54	1,37	9,85	10,23	6,87	6,41	71,64	74,10

Sumber Url: https://sulut.bps.go.id/indicators/52/297/1/laju-pertumbuhan-pdrb-kabupaten-kota.html; Access Time: March 4, 2021, 4,51 pm; https://sulut.bps.go.id/indicators/23/8/2/persentase-kemiskinan-kabupaten-kota.html; Access Time: March 4, 2021, 5:05 pm; : https://sulut.bps.go.id/indicators/6/648/2/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-utara.html; Access Time: March 4, 2021, 5:00 pm; https://sulut.bps.go.id/indicators/26/58/2/indeks-pembangunan-manusia.html; Access Time: March 4, 2021, 5.02 pm.

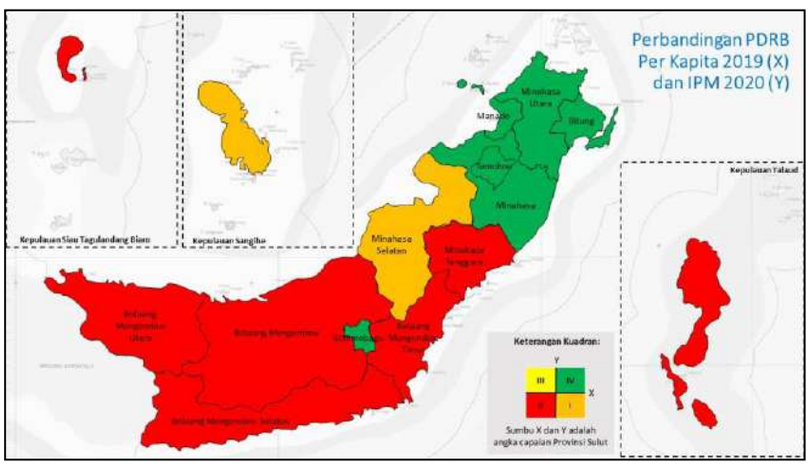
4. Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian Utara-Manado-Bitung

Tabel 7.9. Indikator Sosial: Klaster Wilayah Minahasa Raya bagian Utara Cepat Tumbuh Manado-Minahasa Utara-Bitung

KABUPATEN/KOTA	HLS		RLS		AHH	
	2016	2020	2016	2020	2016	2020
Minahasa Utara	12,13	12,80	9,24	9,99	70,82	71,38
Kota Manado	13,83	14,15	11,02	11,27	71,31	71,87
Kota Bitung	12,24	12,61	9,37	9,88	70,50	71,07

Sumber: BPS Sulut 2021

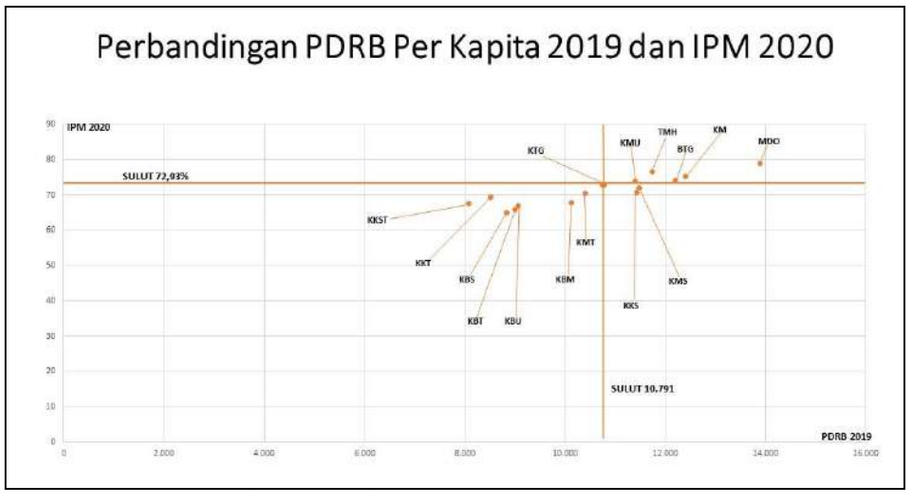
Adapun ketimpangan wilayah pada beberapa indicator dapat dipetakan sebagai berikut.



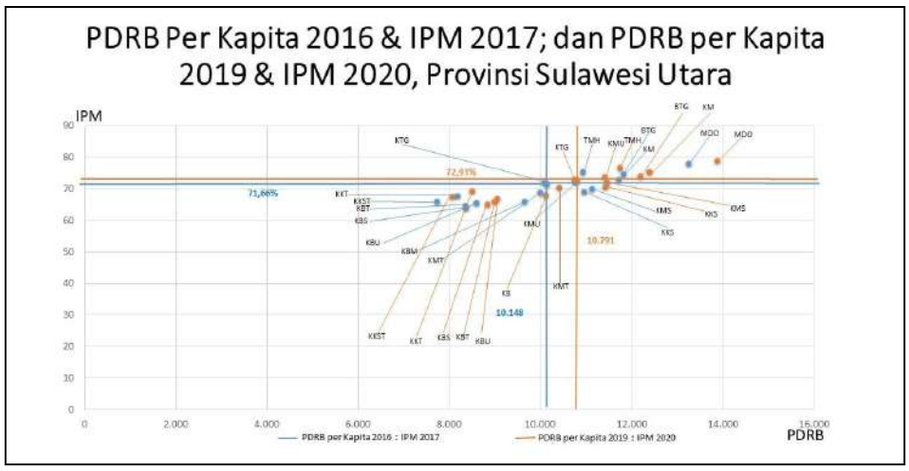
Gambar: 7.1 Pemetaan wilayah berdasarkan perbandingan PDRB per Kapita Tahun 2019 (sumbu X) dan IPM Tahun 2020 (Sumbu Y)

Pemetaan ketimpangan wilayah berdasarkan perbandingan PDRB per kapita tahun 2019 dan IPM tahun 2020 seperti digambarkan pada Gambar 7.1 dan 7.2 menunjukkan bahwa terdapat 2 kabupaten/kota berada di kuadran I yaitu Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Kepulauan Sangihe, 7 kabupaten/kota berada di kuadran II yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow

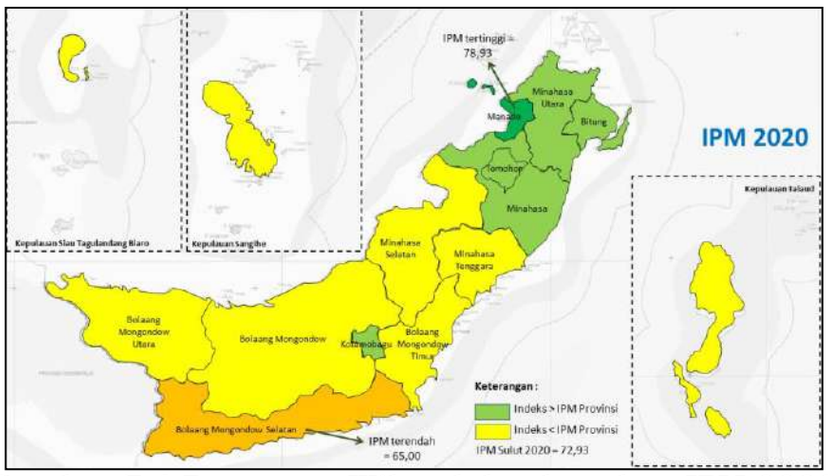
Selatan, Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Tidak ada kabupaten/kota yang berada pada kuadran III dan terdapat 6 kabupaten/kota yang berada di kuadran IV yaitu Kota Manado, Bitung, Tomohon, Kotamobagu dan Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara.



Gambar 7.2 Peta Kuadran perbandingan PDRB per Kapita Tahun 2019 (sumbu X) dan IPM Tahun 2020 (Sumbu Y)

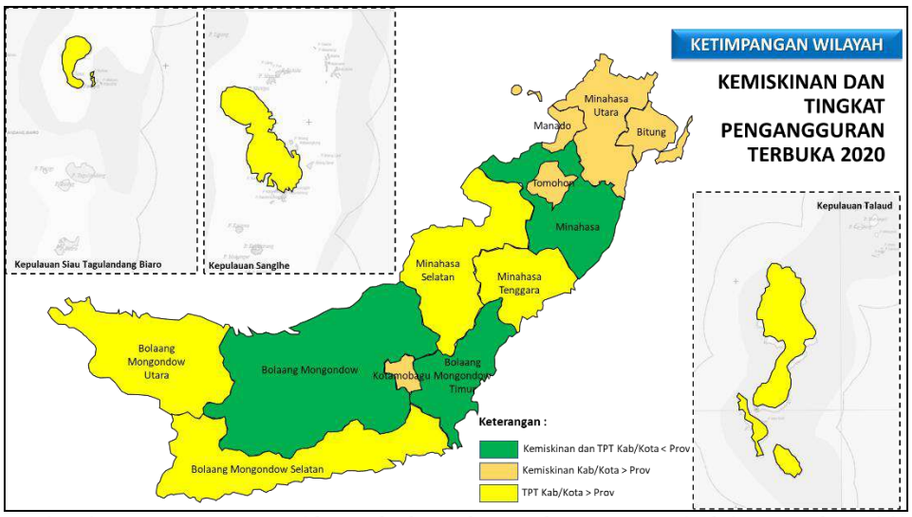


Gambar 7.3 Peta kuadran perbandingan PDRB per Kapita Tahun 2016 dan IPM Tahun 2017 dan PDRB per Kapita Tahun 2019 dan IPM Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Utara



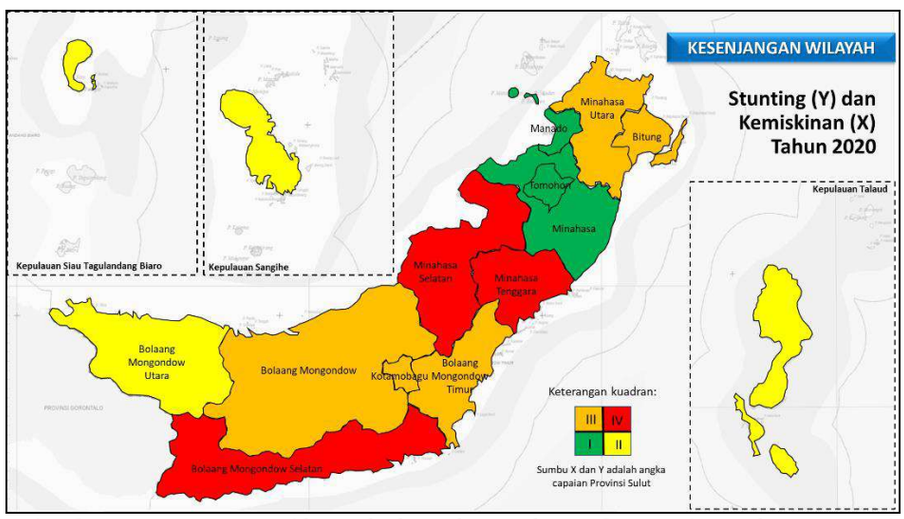
Gambar 7.4 Pemetaan Wilayah berdasarkan IPM 2020

Pemetaan ketimpangan wilayah berdasarkan IPM tahun 2020 seperti digambarkan pada Gambar 7.4 menunjukkan bahwa terdapat 6 kabupaten/kota dengan angka IPM di atas angka rata – rata IPM provinsi dan 9 kabupaten/kota berada di bawah angka rata – rata IPM provinsi. kuadran IV yaitu Kota Manado, Bitung, Tomohon, Kotamobagu dan Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara.



Gambar 7.5 Pemetaan Wilayah berdasarkan Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Tahun 2020

Pemetaan ketimpangan wilayah berdasarkan kemiskinan dan tingkat pengangguran tahun 2020 seperti digambarkan pada Gambar 7.5 menunjukkan bahwa terdapat 3 kabupaten dengan angka kemiskinan dan TPT dibawah angka rata – rata provinsi, 5 kabupaten/kota dengan angka kemiskinan yang lebih besar dari angka rata – rata kemiskinan provinsi dan 7 kabupaten/kota dengan angka TPT yang lebih besar dari angka rata – rata TPT provinsi.



Gambar 7.6 Pemetaan Wilayah berdasarkan Stunting dan Kemiskinan Tahun 2020

Pemetaan ketimpangan wilayah berdasarkan stunting dan kemiskinan tahun 2020 seperti digambarkan pada Gambar 7.6 menunjukkan bahwa terdapat 3 kabupaten/kota berada pada kuadran I yaitu angka stunting dan kemiskinan berada di bawah angka provinsi, 4 kabupaten berada di

kuadran II dimana angka stunting di kabupaten tersebut berada di bawah angka provinsi namun angka kemiskinan berada di atas angka provinsi, selanjutnya 5 kabupaten/kota berada pada kuadran III dimana angka stuntingnya lebih tinggi dari angka stunting provinsi dan angka kemiskinan berada di bawah angka kemiskinan provinsi, serta 3 kabupaten berada pada kuadran IV dimana baik angka stunting maupun angka kemiskinan di kabupaten tersebut berada di atas angka provinsi.

7.3.2. Pemenuhan infrastruktur dasar 100 – 0 – 100

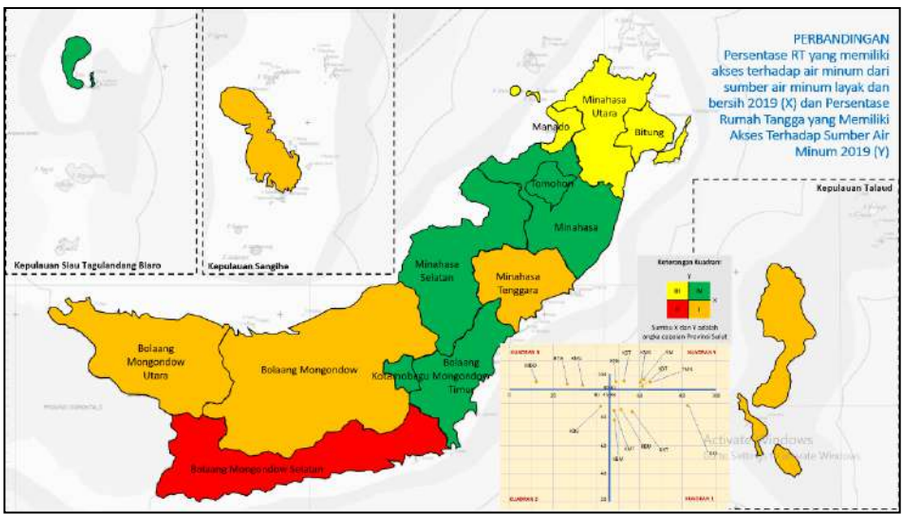
Program **100-0-100** merupakan program ketersediaan **100** persen air minum, **0** persen kawasan kumuh, dan **100** persen fasilitas sanitasi serta drainase di seluruh wilayah Indonesia. Program prioritas nasional adalah salah satu dari program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) selama 3 tahun 2014-2019. Adapun ruang lingkup sanitasi dalam program ini meliputi air limbah domestik, persampahan dan drainase lingkungan, dengan target di tahun 2019 seperti yang terdapat pada gambar berikut.



Gambar 7.7 Target Infrastruktur Dasar 100 – 0 – 100

A.1. Capaian Ketersediaan Air Minum Tahun 2019

Data BPS tahun 2020, seperti dicantumkan pada Bab II memperlihatkan bahwa pada tahun 2019, sebanyak 90,81% Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Utara telah memiliki akses terhadap sumber air minum, dan 45,83% Rumah Tangga telah memiliki akses terhadap air minum dari sumber air minum layak dan bersih. Dengan demikian, gap persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum terhadap target 100% adalah sebesar 9,19%. Kondisi capaian akses di kabupaten/kota terhadap capaian akses di tingkat provinsi tersebut digambarkan pada peta kuadran, dimana sumbu X adalah angka capaian Persentase Rumah tangga (RT) yang memiliki akses terhadap air minum dari sumber air minum layak dan bersih di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019, dan sumbu Y adalah persentase RT yang memiliki akses terhadap sumber air minum di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019, yang hasilnya dipetakan pada gambar di bawah ini.



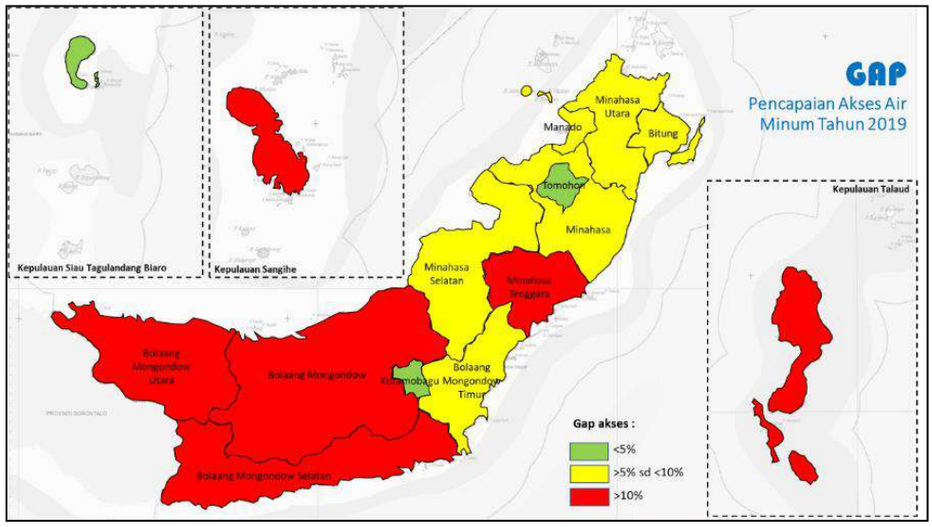
Gambar: 7.8 Perbandingan RT yang memiliki akses air minum dari sumber air minum layak dan RT yang memiliki akses terhadap sumber air minum Tahun 2019

Melalui peta di atas, tergambarkan kondisi bahwa sebanyak 1 kabupaten berada pada kuadran I, sebanyak 1 kabupaten berada pada kuadran II, sebanyak 3 kabupaten/kota berada pada kuadran III, 6 kabupaten berada pada kuadran IV, dengan rincian per klaster sebagai berikut:

1. **Pada Klaster Kepulauan**, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud berada pada kuadran I yang menunjukkan capaiannya terhadap sumbu Y berada di bawah angka capaian provinsi tetapi capaiannya terhadap sumbu X lebih baik dari pada angka capaian provinsi. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merupakan satu-satunya kabupaten kepulauan yang berada di kuadran IV menunjukkan capaiannya terhadap sumbu X dan Y lebih baik dibandingkan angka capaian provinsi.
2. **Pada Klaster Bolaang Mongondow Raya,** terdapat 2 kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berada di kuadran I, menunjukkan bahwa capaian akses pada sumbu X dan Y berada di bawah angka capaian akses provinsi, dan terdapat 1 kota yaitu Kota Kotamobagu yang posisinya berada di kuadran IV menunujukkan capaian akses pada sumbu X dan Y lebih baik daripada capaian akses provinsi.
3. **Pada Klaster Minahasa Raya,** terdapat 3 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon yang posisinya berada di kuadran IV menunjukkan capaian akses pada sumbu X dan Y lebih baik daripada angka capaian akses provinsi, serta terdapat 1 kabupaten yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara yang posisinya berada di kuadran I menunjukkan capaian akses pada sumbu X lebih baik daripada angka capaian akses provinsi, tetapi capaian akses pada sumbu Y berada di bawah capaian provinsi.
4. **Pada Klaster Manado – Minahasa Utara – Bitung,** 2 kota dan 1 kabupaten seluruhnya berada di kuadran III menunjukkan capaian akses kabupaten/kota tersebut pada sumbu X di bawah capaian provinsi tetapi capaian akses terhadap sumbu Y lebih baik dari pada angka capaian akses provinsi.

Jika dilakukan pemetaan gap capaian akses air minum, terdapat 6 kabupaten memiliki gap >10%, 6 kabupaten/kota memiliki gap di antara 5 –

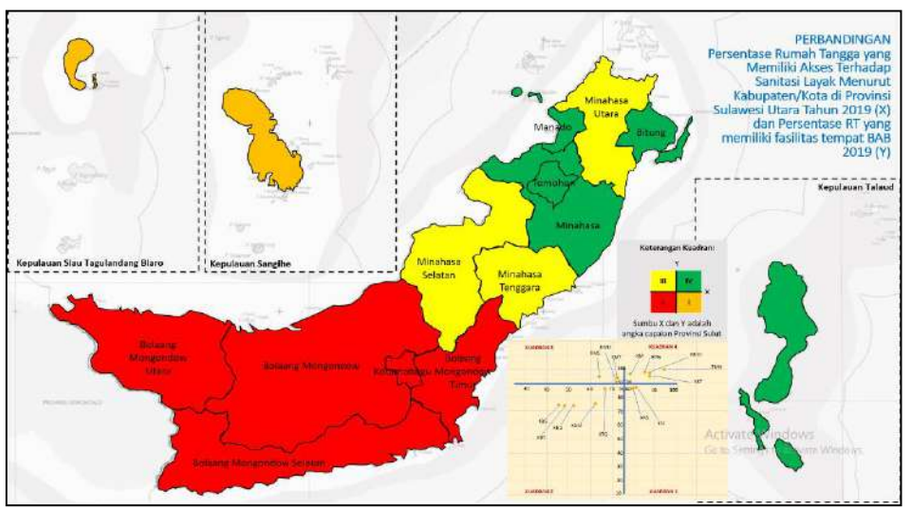
10% dan 3 kabupaten/kota memiliki gap <5%, seperti dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar: 7.9. Gap akses air minum dari sumber air minum Kabupaten dan Kota Sulawesi Utara, Tahun 2019

A.2. Capaian akses sanitasi layak tahun 2019

Data BPS tahun 2020, seperti dicantumkan pada Bab II memperlihatkan bahwa pada tahun 2019, sebanyak 92,18% Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Utara telah memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB), dan 75,80% Rumah Tangga telah memiliki akses terhadap sanitasi layak. Dengan demikian, gap terhadap akses sanitasi layak adalah sebesar 24,20%. Kondisi capaian akses di kabupaten/kota terhadap capaian akses di tingkat provinsi tersebut digambarkan pada peta kuadran, dimana sumbu x adalah angka capaian Persentase Rumah tangga (RT) yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019, dan sumbu Y adalah persentase RT yang memiliki fasilitas BAB di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019, yang hasilnya dipetakan pada gambar di bawah ini.



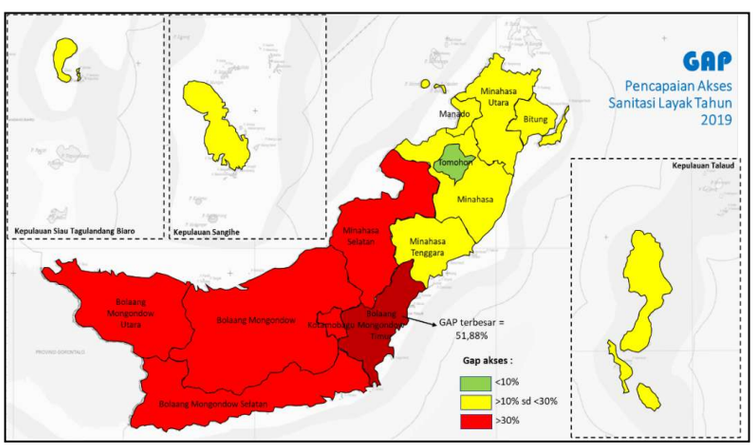
Gambar: 7.10. Perbandingan Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses sanitasi layak dan RT yang memiliki fasilitas BAB Tahun 2019

Melalui peta di atas, tergambarkan kondisi bahwa sebanyak 2 kabupaten berada pada kuadran I, sebanyak 5 kabupaten/kota berada pada

kuadran II, 3 kabupaten berada pada kuadran III dan sebanyak 4 kabupaten/kota berada pada kuadran I, dengan rincian per klaster sebagai berikut:

1. **Pada Klaster Kepulauan**, terdapat 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang posisinya berada di kuadran I menunjukkan capaian akses pada sumbu X berada lebih baik dari capaian akses provinsi tetapi capaian akses pada sumbu Y berada di bawah angka capaian provinsi, dan terdapat 1 kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud yang posisinya berada di kuadran IV menunjukkan capaian akses pada sumbu X dan Y lebih baik daripada capaian akses provinsi.
2. **Pada Klaster Bolaang Mongondow Raya,** seluruh kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu posisinya berada di kuadran II menunjukkan capaian akses pada sumbu X dan Y berada di bawah angka capaian akses provinsi.
3. **Pada Klaster Minahasa Raya,** terdapat 2 kabupaten yaitu Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara yang posisinya berada pada kuadran III menunjukkan capaian akses pada sumbu X berada di bawah capaian akses provinsi tetapi capaian akses pada sumbu Y berada di atas capaian akses provinsi. Sedangkan 2 kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon berada di kuadran IV menunjukkan bahwa capaian akses di kabupaten/kota tersebut pada sumbu X dan Y lebih baik daripada angka capaian akses provinsi.
4. **Pada Klaster Manado – Minahasa Utara – Bitung,** terdapat 1 kabupaten yang berada pada kuadran III yaitu Kabupaten Minahasa Utara, menunjukkan bahwa capaian akses kabupaten tersebut pada sumbu X di bawah capaian akses provinsi tetapi capaian akses kabupaten pada sumbu Y berada di atas capaian akses provinsi. Sedangkan 2 kota pada klaster ini, yaitu Kota Manado dan Kota Bitung, keduanya berada pada kuadran IV yang menunjukkan bahwa capaian akses kedua kota pada sumbu X dan Y lebih baik dari pada capaian akses provinsi.

Jika dilakukan pemetaan gap capaian akses sanitasi layak 100%, terdapat 6 kabupaten memiliki gap >30% dengan gap terbesar terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu 51,88%, 8 kabupaten/kota memiliki gap di antara 10 – <30% dan 1 kota memiliki gap <10%, seperti dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 7.11. Gap Pencapaian Akses Sanitasi Layak Tahun 2019

A.3. Capaian persentase pengurangan dan penanganan sampah tahun 2019

Terkait capaian persentase pengurangan dan penanganan sampah hingga tahun 2019 belum tersedia datanya baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

A.4. Permukiman Kumuh

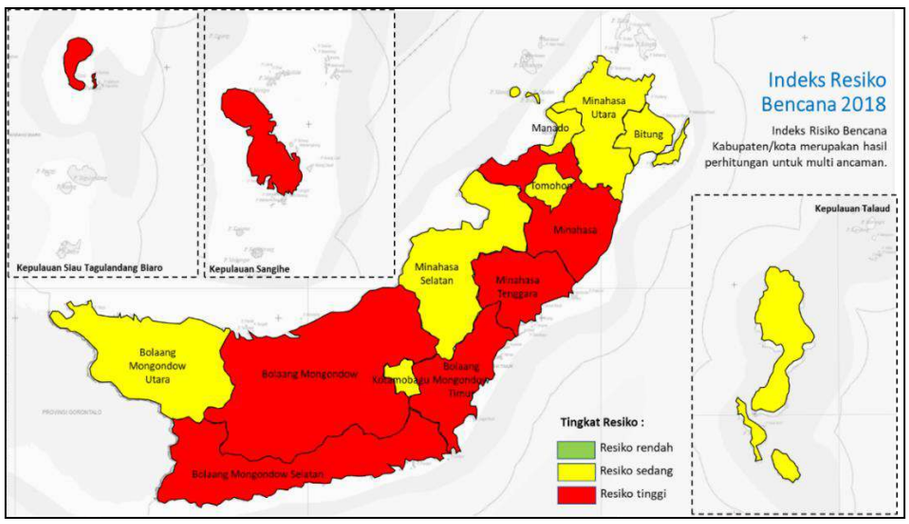
Data bps.go.id tentang banyaknya desa/kelurahan menurut keberadaan permukiman kumuh (desa) pada tahun 2014 dan 2018 menunjukan bahwa pada tahun 2014 terdapat 69 desa/kelurahan yang memiliki kawasan permukiman kumuh dan di tahun 2018 jumlahnya bertambah menjadi 80 desa/kelurahan.

7.3.3. Kondisi Provinsi Sulawesi Utara terhadap Pengarusutamaan dalam RPJMN 2020 – 2024

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keempat pengarusutamaan tersebut mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif.

Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (social, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintah yang baik.

Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) 2018, Provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan kelas resiko sedang untuk resiko bencana dan berada di perangkat ke 25 dari 34 provinsi. Ancaman bencana yang dihadapi beragam yaitu gempa bumi, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim/abrasi, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim dan tsunami. Adapun pemetaan indeks resiko bencana tiap kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 7.12 Tingkat resiko bencana kabupaten/kota berdasarkan IRBI 2018

Gambar di atas menjelaskan sebaran tingkat resiko bencana di 15 kabupaten/kota dimana terdapat 8 kabupaten/kota berada pada tingkat resiko sedang dan 7 kabupaten berada pada tingkat resiko tinggi. 3 klaster didominasi oleh kabupaten dengan resiko bencana tingkat tinggi, sedangkan 1 klaster yaitu Klaster Manado – Minahasa Utara – Bitung merupakan klaster dengan resiko bencana tingkat sedang. Kondisi tingkat resiko bencana kabupaten/kota tahun 2015 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut, yang juga memperlihatkan tingkat resiko di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara berubah dari “tinggi” menjadi “sedang” (skor <144).

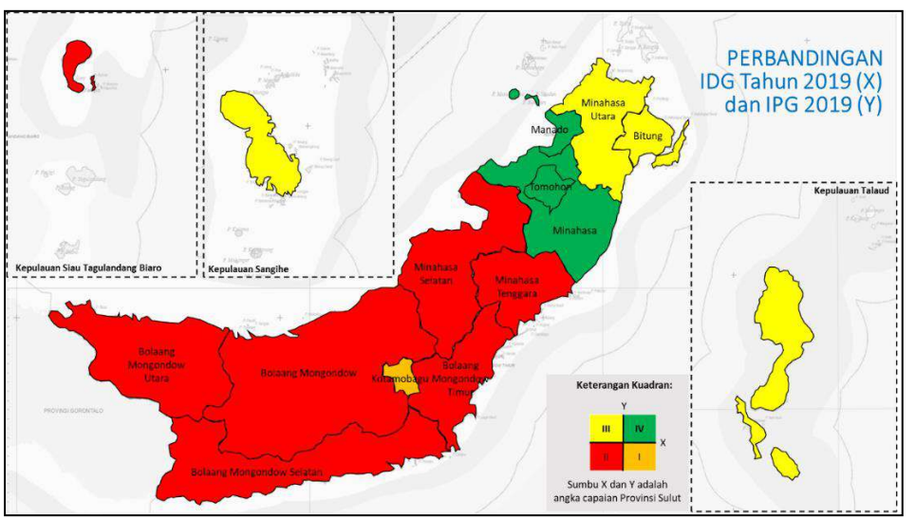
Tabel 7.10. Nilai Indeks Risiko Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara Dari Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2018

NO.	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	KELAS RESIKO 2018
1	KAB. MINAHASA	212,40	212,40	212,40	205,50	TINGGI
2	KAB. MINAHASA TENGGARA	195,20	195,20	195,20	198,20	TINGGI
3	KAB. KEPL. SIAU TAGULANDANG BIARO	179,20	179,20	179,20	179,20	TINGGI
4	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	157,60	157,60	157,60	157,60	TINGGI
5	KAB. BOLAANG MONGONDOW	149,60	149,60	149,60	149,60	TINGGI
6	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	149,60	149,60	149,60	149,60	TINGGI
7	KAB. KEPL. SANGIHE	154,40	154,40	145,78	146,47	TINGGI
8	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	144,00	144,00	144,00	144,00	SEDANG
9	KAB. MINAHASA SELATAN	173,60	173,60	164,47	143,59	SEDANG
10	KOTA BITUNG	163,20	163,20	144,37	125,28	SEDANG
11	KAB. MINAHASA UTARA	158,40	158,40	138,99	119,84	SEDANG
12	KOTA TOMOHON	119,20	119,20	119,20	119,20	SEDANG

NO.	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	KELAS RESIKO 2018
13	KOTA MANADO	130,40	130,40	113,67	107,89	SEDANG
14	KAB. KEPL. TALAUD	102,80	102,80	102,80	102,80	SEDANG
15	KOTA KOTAMOBAGU	76,00	76,00	76,00	76,00	SEDANG

Pengarusutamaan Gender (PUG), merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki – laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

Data BPS tahun 2020 memperlihatkan bahwa pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Utara mencapai 94,53 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mencapai angka 79,10. Pada tahun 2024, RPJMN menargetkan IPG mencapai 92,75 dan IDG mencapai 75,59. Dengan demikian, capaian provinsi pada tahun 2019 sudah lebih baik dari target nasional di tahun 2024. Namun, bila ditinjau berdasarkan capaian per kabupaten/kota pada 2 indikator tersebut, didapati bahwa terdapat 7 kabupaten dengan angka capaian kedua indeks di bawah angka capaian provinsi. Kondisi capaian akses di kabupaten/kota terhadap capaian akses di tingkat provinsi dapat digambarkan pada peta kuadran, dimana sumbu x adalah angka IDG Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019, dan sumbu Y adalah angka IPG Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019, yang hasilnya dipetakan pada gambar di bawah ini.



Gambar 7.13 Perbandingan IDG dan IPG Kabupaten/Kota Tahun 2019

Melalui peta di atas, tergambarkan kondisi bahwa sebanyak 1 kota berada pada kuadran I, sebanyak 7 kabupaten/kota berada pada kuadran II, 4 kabupaten berada pada kuadran III dan sebanyak 3 kabupaten/kota berada pada kuadran IV, dengan rincian per klaster sebagai berikut:

(1) **Pada Klaster Kepulauan**, terdapat 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud yang posisinya berada di kuadran III menunjukkan capaian indeks pada sumbu X

berada di bawah angka capaian provinsi, tetapi capaian indeks pada sumbu Y berada di atas angka capaian provinsi, dan terdapat 1 kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang posisinya berada di kuadran I dimana capaian indeks pada sumbu X dan Y di bawah capaian indeks provinsi.

(2) **Pada Klaster Bolaang Mongondow Raya,** keempat kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berada di kuadran II yang menunjukkan capaian indeks pada sumbu X dan Y berada di bawah angka capaian indeks provinsi, dan terdapat 1 kota yaitu Kota Kotamobagu yang posisinya berada di kuadran I yang menunjukkan capaian indeks pada sumbu X lebih baik daripada capaian indeks provinsi, tetapi capaian indeks pada sumbu Y di bawah capaian indeks provinsi.

(3) **Pada Klaster Minahasa Raya,** terdapat 2 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon yang posisinya berada di kuadran IV yang menunjukkan capaian indeks pada sumbu X dan Y lebih baik daripada angka capaian indeks provinsi, terdapat 2 kabupaten yaitu Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara yang posisinya berada di kuadran II dimana capaian indeks pada sumbu X dan Y berada di bawah capaian indeks provinsi.

(4) **Pada Klaster Manado – Minahasa Utara – Bitung,** 2 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Minahasa Utaraq dan Kota Bitung berada pada kuadran III yang menunjukkan capaian indeks pada sumbu X di bawah capaian indeks provinsi tetapi capaian indeks kabupaten/kota tersebut pada sumbu Y berada di atas capaian indeks provinsi. Sedangkan 1 kota lainnya yaitu Kota Manado, berada pada kuadran IV yang menunjukkan capaian indeks kota tersebut pada sumbu X dan Y lebih baik dari capaian indeks provinsi.

Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya, merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata social di masyarakat sebagai penjelmaan nilai – nilai social budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan social – budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pengarusutamaan Transformasi Digital merupakan upaya mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data.

Adapun nilai ICT development Index atau IP-TIK Provinsi Sulawesi Utara, yang mengukur gap digital atau kesenjangan digital antar wilayah, di tahun 2017 – 2018 berada pada kategori sedang (range nilai 5,01 – 7,25) dengan nilai indeks di tahun 2017 adalah 5,29, berada di urutan ke-9 dari 34 provinsi dan pada tahun 2018, nilai indeks IP-TIK Provinsi Sulawesi Utara naik menjadi 5,33.

7.4. Sasaran, Indikator dan Target

Selama masa waktu 5 tahun ke depan (2021-2026)—pelaksanaan RPJMD tahap terakhir di masa waktu penyelesaian Tahapan RPJPD Sulawesi Utara 2000-2025—sasaran pembangunan kewilayahan Sulawesi Utara—memiliki 5 klaster wilayah fokus pembangunan, dengan target capaian, yaitu: penurunan kesenjangan antar klaster wilayah melalui percepatan pelaksanaan transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kepulauan dan Perbatasan (Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud, dan Sitaro) serta Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur yang terletak di sepanjang pantai pesisir Timur/Selatan, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang lokasinya di pantai utara berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo—dimana kedua kabupaten ini dihubungkan dengan Trans Sulawesi. Pada waktu bersamaaan melanjutkan dan mendorong pembangunan di klaster wilayah Minahasa Raya bagian utara dikembangkan wilayah cepat tumbuh klaster Manado-Minahasa Utara-Bitung, sebagai *growth center* di Kawasan Timur Bagian Utara Indonesia.

Sehubungan dengan fokus pembangunan berdasarkan klaster wilayah dan memperhatikan sasaran pembangunan kewilayahan cepat tumbuh, sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Utara 2021-2026 yaitu rata-rata berada pada range antara 6,0-7,0 persen per tahun, maka target pertumbuhan ekonomi, perkiraan kebutuhan nilai investasi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran pada tahun 2026 diperkirakan sebagai berikut.

Tabel 7.11. Target Pembangunan Wilayah Klaster 2026

Wilayah Koridor/Klaster Pembangunan	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (%) 2021-2026	Kontribusi Ekonomi Regional Klaster	Kebutuhan Investasi (Rp. Tri) 2026	Tingkat Kemiskinan (%) 2026	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2026
Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud, dan Sitaro	5,0-7,5	10	7,22	7-9	2-5
Kabupaten Klaster Bolaang Mongondow Raya	6,0-8,5	15	10,26	4-9	3-5
Kabupate/Kota Klaster Minahasa Induk, Selatan/Tenggara, dan Tomohon	6,0-7,5	20	4,96	5-9	3-6
Kabupaten/Kota MInahasa Raya bagian Utara (Manado-Minahasa Utara-Bitung)	6,5-8,	55	7,81	3,6	4-7

Sasaran pembangunan klaster kewilayahan Sulawesi Utara tahun 2022-2026, direncanakan dapat dicapai melalui lima (5) prioritas kebijakan kawasan, yaitu:

1. Pengembangan kawasan strategis pada setiap klaster wilayah;
2. Pengembangan sektor unggulan berdasarkan komoditas lokal;
3. Pengembangan kawasan perkotaan (Kota Kecil dan Kota Sedang, selain ibukota kabupaten);

4. Pembangunan daerah tertinggal wilayah daratan dan kepulauan, kawasan perbatasan kepulauan dan daratan, dan wilayah perdesaan; serta
5. Pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah

Tabel: 7.12. Sasaran/Indikator/Target Prioritas Pembangunan Klaster Kewilayahan Sulawesi Utara

No	Indikator Pembangunan	*Baseline* 2021	2026
Menurunnya celah/gap kesenjangan antar klaster wilayah dan antar koridor wilayah daratan dan kepulauan, dengan memacu transformasi struktur ekonomi, revitalisasi dan peningkatan konektivitas laut dan darat, dan akselerasi pembangunan wilayah kepulauan serta pesisir pantai Timur berhadapan dengan Teluk Tomini.			
A. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota			
1.	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/ KI/ KSPN) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (per klaster/kabupaten kota)	≥1	N/A
2.	Jumlah Kawasan Pusat Pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan		
	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	2 kawasan	2 kawasan
	Kawasan Pengembangan wilayah Kepulauan dan Perbatasan	1 kawasan	3 kawasan
	Kawasan Industri	1 kawasan	2 kawasan
	Dry Port (DP)	1 kawasan	1 kawasan
	Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Provinsi	15 kawasan	20 kawasan
	Kawasan Ekonomi, Industri, Logistic Hub (Pergudangan, Container Yard), dan kawasan permukuman, perkantoran, pertokoan menggunakan energi terbarukan (Low Carbon Model)	N/A)	5 kawasan
B. Pengembangan Sektor Unggulan			
a.	Kelapa	271.684 Ton	278.476 Ton
b.	Pala	11.725 Ton	12.018 Ton
c.	Cengkeh	23.851 Ton	24.447 Ton
d.	Kopi	3.767 Ton	3.861 Ton
e.	Cacao	5.819 Ton	5.964 Ton
f.	Vanilla	18 Ton	18 Ton
g.	Kayu Manis	43 Ton	44 Ton
h.	Padi	786.987 Ton	790.484 Ton
i.	Jagung	1.535.987 Ton	1.543.683 Ton
j.	Hortikultura		
	- Bawang Merah	2.915 Ton	8.858 Ton
	- Cabe Besar	3.942 Ton	4.409 Ton
	- Cabe Rawit	14.113 Ton	28.275 Ton
	- Tomat	26.783 Ton	31.894 Ton
k.	Perikanan Budidaya (Ikan dan Rumput Laut)	544.839 Ton	619.413,58 Ton

No	Indikator Pembangunan	*Baseline* 2021	2026
1.	Perikanan Tangkap	405.422 Ton	415.659,39 Ton
C. Pengembangan Kawasan Perkotaan			
1.	Jumlah Wilayah Metropolitan (WM) dikembangkan	1WM	1WM
2.	Jumlah Kota Kecil dikembangkan		
3.	Jumlah Kota Sedang dikembangkan		
D. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan (Laut dan Darat), Perdesaan, dan Transmigrasi			
1.	Perkembangan Status Pembangunan Desa		
a.	Desa Mandiri/Swadaya	15	33
b.	Desa Maju		
c.	Desa Berkembang		
d.	Desa Tertinggal		
2.	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	10,64 (2020)	6
3.	Jumlah Revitalisasi Bumdes berdasarkan status		
a.	Bumdes Berkembang		
b.	Bumdes Maju		
4.	Jumlah Revitalisasi “Bumdes Bersama” berdasarkan status		
a.	Bumdes Bersama Berkembang		
b.	Bumdes Bersama Maju		
5.	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan)		
6.	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di PKSN (Kab Kepulauan Perbatasan	0,42	0,52 (standar nasional)
7.	Jumlah daerah tertinggal (kabupaten)	0	0
8.	Rata-rata IPM di kabupaten relatif tertinggal	65-68 (2020)	68-70
9.	Rata-rata nilai indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaaan Prioritas Nasional (KPPN)	51,10	58,70 (standar nasional)
E. Kelembagaan dan Keuangan Daerah			
1.	Jumlah daerah dengan penerimaan meningkat	15	15
2.	Jumlah daerah dengan realisasi belanja meningkat (Kab/Kota)		
3.	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola berkualitas (Kab/Kota)	14	15
4.	Persentase jumlah daerah yang memiliki keuangan yang efektif dan efisien Kab/Kota)	NA	10
5.	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (Kab/Kota)		15
6.	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (Kab/Kota)	NA	15
7.	Persentase capaian penerapan SPM di daerah	NA	100
8.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	2,8	3,2 (standar nasional)
9.	Jumlah lembar Peta Dasar skala 1: 5.000		Seluruh wilayah

No	Indikator Pembangunan	*Baseline* 2021	2026
			Sulawesi Utara
10.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/Provinsi		
11.	RDTR Perbatasan Negara/Perbatasan Daerah	-	
12.	Daerah yang Memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (kab/kota)	-	15
13.	Luas bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan berkualitas baik (ribu Ha)		
14.	Pembentukan dan operasionalisasi Bank Tanah	0	1 Bank Tanah
F. Pemenuhan Target Layanan Infrastruktur Dasar dan Pengelolaan Persampahan			
1.	Rumah Tangga menempati Hunian Layak	69,48%	70%
2.	Hunian dengan akses air minum layak	90%	100%
3.	Hunian dengan akses air minum aman	NA	15%
4.	Hunian dengan akses sanitasi layak	82%	90%
5.	Hunian dengan akses sanitasi aman	5,28%	15%
6.	Hunian dengan akses air minum perpipaan	11,35% (2020)	30%
7.	Hunian dengan akses sampah terkelola dengan baik terdiri atas:		
a.	Penanganan sampah	74%	80% (RPJMN) 70% (Jakstrada Sulut)
b.	Pengurangan sampah	24 %	20% (RPJMN) 30% (Jakstrada Sulut)

7.5. Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan pembangunan wilayah Sulawesi Utara 2021-2026 diarahkan untuk memperkuat dan mewujudkan peran Provinsi Sulawesi Utara menjadi pintu gerbang Indonesia—dengan memanfaatkan peluang pasar global/internasional di Asia Timur (China, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Philippines), dan wilayah Pasifik, sebagai pintu gerbang Indonesia Timur bagian utara; mengembangkan industri logistik, industri berbasis perikanan dan kelapa dan sawit; mewujudkan peran Provinsi Sulawesi Utara sebagai lumbung pangan padi, jagung, kelapa, dan ikan; serta akselerasi dan penguatan ekonomi mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan, kelapa, berbasis industri pengolahan perikanan, produk turunan kelapa, dan industri pariwisata bahari.

Transformasi ekonomi di wilayah Sulawesi Utara diarahkan untuk hilirisasi produk turunan perikanan, kelapa dan sawit. Industri berbasis perikanan, kelapa dan sawit, untuk menciptakan dan meningkatkan nilai tambah, dilakukan melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi yang siap di-eksport keluar dari wilayah Sulawesi Utara.

Kondisi wilayah Sulawesi Utara yang memiliki potensi bencana alam relatif beragam dan tinggi, juga menjadi perhatian dalam pembangunan wilayah Sulawesi Utara,dimana kebijakan pembangunan daerah wajib memperhatikan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana. Strategi

pembangunan wilayah Sulawesi Utara diprioritaskan pada pemerataan, pertumbuhan, penguatan konektivitas (laut, darat, dan udara), mitigasi dan pengurangan resiko bencana, pelaksanaan otonomi daerah serta penerapan *green economy*, sebagai berikut;

(1) Peningkatan dan penguatan pelaksanaan pelayanan dasar publik, antara lain; (a) peningkatan kualitas SDM, khususnya peningkatan akses layanan Kesehatan, Pendidikan, Pendidikan Vocational Perikanan, Pertanian, dan Pariwisata, termasuk peningkatan Politeknik Nusa Utara; (b) percepatan pembangunan daerah kepulauan dan perbatasan, dan daerah relatif lambat akselerasi pembangunan daerah, dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal (PEL) berbasis komoditi unggulan daerah yang memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan kebutuhan dasar dengan memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapan terhadap resiko bencana alam; (c) pemenuhan pelayanan dasar publik dan tata kelola di kecamatan perbatasan dan kecamatan kepulauan; (d) penguatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi ekonomi desa, sosial, budaya; dan (e) pembangunan afirmasi pada daerah lambat perkembangan pembangunan dan daerah kepulauan dan perbatasan.

(2) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur, dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; (c) percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama daerah; dan (d) peningkatan kerja sama antar daerah otonom, termasuk wilayah pengembangan industri pengolahan, industri pariwisata, dan pengembangan wilayah kepulauan;

(3) Penguatan konektivitas dilakukan melalui: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, darat, dan udara, yang terintegrasi; dan (b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;

(4) Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;

(5) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui: (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat, (b) peningkatan ketahanan kawasan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan kabupaten kepulauan; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan;

(6) Pembangunan desa terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa; penguatan pendamping desa yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa, pengembangan desa wisata, desa digital, produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; serta pemanfaatan dana desa untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendamping lokal desa. Pembangunan desa terpadu juga mencakup

peningkatan peran desa pada aspek ketahanan pangan, meliputi peningkatan produktivitas pangan dan diversifikasi pangan serta perlindungan lahan pertanian pangan dari alih fungsi lahan. Pengembangan database desa perlu dilakukan, sehingga tersedia data luas lahan pangan eksisting dan yang berproduksi, produktivitas sumber pangan lokal dan distribusinya serta informasi terkait teknologi/pola tanam yang digunakan. Selanjutnya, perlu dilakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengupayakan stabilisasi harga pangan dan perlindungan pada LP2B mulai dari tahapan perencanaan dan penetapan, pengembangan secara komprehensif, penelitian, pemanfaatan (optimalisasi dan pembinaan pada petani mengenai total management: mulai dari persiapan masa tanam, selama masa tanam-panen, pasca panen, penanaman kembali sampai distribusi dengan memperhatikan prinsip pertanian berkelanjutan), pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan (dari berbagai sumber) serta peran serta masyarakat (petani dan non petani).

(7) Penerapan ekonomi hijau pada beberapa sector ekonomi. Ekonomi hijau adalah ekonomi yang terus tumbuh dan memberikan lapangan kerja serta mengurangi kemiskinan, tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan, khususnya fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati serta mengutamakan keadilan sosial. Penerapan ekonomi hijau mencakup:
   a. Sektor pertanian: memelihara dan meningkatkan produktivitas usaha tani, sekaligus menjamin ketersediaan pangan dan jasa lingkungan secara berkelanjutan, mengurangi eksternalitas negative dan secara bertahap meningkatkan eksternalitas positif yang dapat menularkan kesejahteraan pada masyarakat, membangun dan memulihkan kekayaan (sumberdaya ekologis) dengan cara mengurangi polusi dan efisiensi penggunaan sumberdaya, merestorasi dan meningkatkan kesuburan lahan melalui peningkatan penggunaan input alami, perubahan pola tanah dan terpadu dengan ternak, mengurangi erosi lahan, meningkatkan efisiensi penggunaan air dengan cara menerapkan teknologi minimum tillage dan Teknik budidaya tanaman penutup, pengurangan penggunaan pestisida dan herbisida kimia melalui penerapan pengendalian hama penyakit secara terpadu serta mengurangi kehilangan hasil produksi dengan cara perbaikan teknologi pengelolaan pasca panen.
   b. Sektor kehutanan: mempertahankan peran hutan dalam penyerapan karbon, sebagai penyedia bioenergy, sebagai bahan bangunan ramah lingkungan, pengelolaan Hutan Lestari (PHL), reforestasi kawasan hutan, pemulihan hutan terdegradasi serta perluasan hutan masyarakat, pembangunan hutan tanaman (tanaman industry, tanaman karbon dan hutan konservasi), sebagai penyedia jasa lingkungan
   c. Sektor perikanan dan kelautan: pengelolaan dan konservasi terumbu karang, manajemen sumber daya perikanan yang lebih baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan, penerapan prinsip dan praktek budidaya dan cara penanganan ikan yang baik, menyelamatkan lingkungan ekosistem laut yang terdapat di sekitar wilayah CTI yang ada di wilayah laut Provinsi Sulawesi Utara.
   d. Sektor energi: konservasi dan efisiensi energi, pemanfaatan energi baru dan terbarukan lewat pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air (Hidro), pengembangan PLT skala kecil

berbasis energi baru terbarukan (berbasis tenaga air, sinar matahari dan angin), pengembangan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai pengganti BBM, pengembangan dan pemanfaatan limbah yang diolah menjadi sumber energi (waste to energy, zero waste), pengembangan desa mandiri energi.

e. Sektor pertambangan: penggunaan teknologi bersih di pertambangan, keberhasilan revegetasi, integrasi perencanaan reklamasi, termasuk revegetasi dengan seluruh tahapan kegiatan penambangan, reklamasi pada lahan bekas tambang yang akan berperan dalam mengurangi pemanasan global dan mekanisme dalam mengurangi pemanasan global, serta pemberdayaan masyarakat yang mendorong peningkatan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat di pertambangan yang berkelanjutan.
f. Lapangan kerja ramah lingkungan/hijau (green jobs): perubahan dari perekonomian ke perekonomian hijau akan mengurangi pekerjaan pada sector/kegiatan yang tidak ramah lingkungan berkelanjutan tetapi juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru, tergantikannya Sebagian pekerjaan dengan pekerjaan baru, transformasi profesi karena kriteria/kompetensi baru sudah menggunakan metode kerja "hijau/ramah lingkungan". Green jobs dapat berkembang di 8 sektor kunci ekonomi hijau yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, energi, manufaktur, daur ulang, property dan transportasi.
g. Sector industri: Menyusun rencana induk pengembangan industry hijau, konservasi energi dan pengurangan emisi CO2 di sector industry, penggunaan mesin ramah lingkungan, menyiapkan standar industri hijau, menyiapkan Lembaga sertifikasi industry hijau, menyiapkan insentif bagi industry hijau, penerapan produksi bersih, penyusunan katalog material input ramah lingkungan, pengembangan sector industry unggulan berbasis teknologi tinggi
h. Perkotaan hijau/berkelanjutan: penerapan 8 atribut kota hijau yaitu perencanaan dan rancangan kota hijau (green planning), ruang terbuka (green space), pembuangan limbah (green waste), alat transportasi (green transportation), air bersih (green water), sumber energi (green energy), bangunan (green building) dan masyarakat peduli lingkungan (green community).

Pada jangka menengah, perencanaan dan penerapan ekonomi hijau di Provinsi Sulawesi Utara diarahkan untuk dimulai di Kota Bitung yang mewakili kota dengan karakteristik kota pesisir, Kota Kotamobagu yang mewakili kota yang berada di *mainland*, dan Kota Tahuna sebagai Ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mewakili daerah kepulauan. Perencanaan dan penerapan ekonomi hijau diterapkan secara bertahap (1 sektor hingga beberapa sektor) dan pada skala kawasan tertentu di setiap kota dengan arahan pada sektor – sektor di tabel berikut.

Tabel 7.13. Arahan untuk sektor yang masuk dalam perencanaan dan penerapan ekonomi hijau di Kota Bitung, Kotamobagu dan Tahuna

Kota Bitung	Kota Kotamobagu	Kota Tahuna
1. Sektor Kehutanan 2. Sektor Perikanan dan Kelautan 3. Sektor Energi 4. Lapangan kerja ramah	1. Sektor Pertanian 2. Sektor Energi 3. Lapangan kerja ramah lingkungan 4. Sektor Industri	1. Sektor Pertanian 2. Sektor Kehutanan 3. Sektor Perikanan dan Kelautan 4. Sektor Energi

Kota Bitung	Kota Kotamobagu	Kota Tahuna
lingkungan 5. Sektor Industri 6. Kota Hijau (mulai dari 1 hingga 8 elemen hijau)	5. Kota Hijau (mulai dari 1 hingga 8 elemen hijau)	5. Lapangan kerja ramah lingkungan 6. Kota Hijau (mulai dari 1 hingga 8 elemen hijau)

7.4.1. Strategi Pembangunan Wilayah Berdasarkan Klaster Wilayah dan Antar Klaster

A. Klaster Wilayah Kepulauan

Klaster Wilayah Kepulauan meliputi wilayah 3 kabupaten kepulauan di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro. Strategi pembangunan wilayah kepulauan dan perbatasan diarahkan terutama pemerataan pembangunan, memacu pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah wilayah kepulauan, penguatan konektivitas laut dan udara, dan pengurangan resiko bencana alam, yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dasar publik melalui:
   a. peningkatkan kualitas SDM khususnya pada akses layanan kesehatan dan pendidikan, pendidikan vokasional/pelatihan terkait dengan perikanan, perkebunan, pertanian, dan pariwisata;
   b. percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pelayanan dasar publik, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
   c. keberpihakan dari K/L dan Dinas/Badan provinsi, serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah tertinggal klaster wilayah kepulauan dan perbatasan;
   d. pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan;
   e. percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan
   f. pelaksanaan pembangunan afirmatif.
2. Penguatan pusat-pusat pertumbuhan dilakukan melalui antara lain:
   a. pengembangan komoditas unggulan wilayah kepulauan dan perbatasan yaitu, kelapa, cengkeh, pala, kakao, kopi, perikanan tangkap dan budidaya;
   b. pengembangan sentra produksi perikanan di SKPT/WPP;
   c. pengembangan sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa pulau besar;
   d. pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan;
   e. pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (perkebunan dan kemaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur di SKPT, sub-SKPT, dan lokasi-lokasi yang telah memiliki fasilitas TPI, PPI, BJBI serta *food estate* Pala di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
   f. pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata bahari;
   g. pengembangan kawasan perkotaan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya;

h. penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan kluster kawasan kepulauan dan perbatasan.

3. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain:
   a. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
   b. pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;
   c. percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antar daerah.

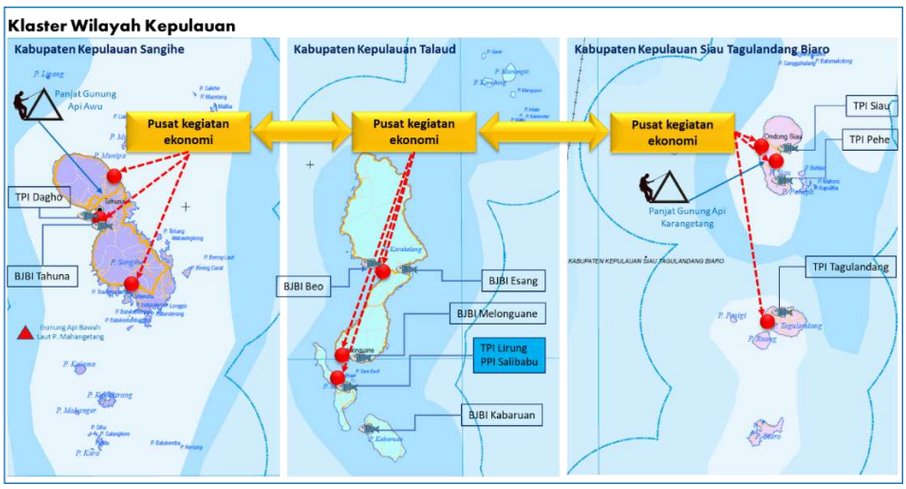
4. Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;

5. Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain:
   a. pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, darat, dan udara yang terintegrasi;
   b. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.

6. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain:
   a. peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
   b. peningkatan ketahanan kawasan utara dan barat wilayah Kepulauan dan Perbatasan;
   c. adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
   d. peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan
   e. peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan dan hutan bakau (*mangrove*).

7. Pembangunan desa terpadu yang mencakup;
   a. peningkatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa;
   b. penguatan pendamping desa yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif;
   c. penetapan batas desa, pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan;
   d. transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
   e. perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi, dan listrik desa;
   f. pemanfaatan dana desa untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendamping lokal desa.

Gambaran integrasi pembangunan Klaster Wilayah Kepulauan dan Perbatasan dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.



Gambar: 7.14 Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Wilayah Kepulauan dan Perbatasan

Tabel 7.14. Cakupan Klaster Wilayah Kepulauan dan Perbatasan, dan Strategi Pengembangan

Klaster Wilayah	Kabupaten Kepulauan	Strategi Pengembangan
Wilayah Kepulauan dan Kawasan Perbatasan Antar Negara	Sangihe, Talaud, Sitaro (Ibukota Tahuna, Melonguane, Ondong)	1. Pusat kegiatan ekonomi di Tahuna, Peta, Tamako; Lirung, Melonguane, Beo; Ulu Siau, Ondong, Tagulandang; Major Proyek pengembangan Pusat-Pusat Ekonomi Lokal; 2. Hilirisasi industri perikanan, industri pengolahan ikan, Hilirisasi industri sagu, Hilirisasi industri Pala (Food estate), Hilirisasi industri Kelapa; 3. Pengembangan dan penguatan kelembagaan pengelolaan SKPT Salibabu dan Dhago, dan Sub-SKPT pendukung utama SKPT sebagai pusat industri perikanan penangkapan dan pengolahan Kawasan Kepulauan; Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Kawasan Perbatasan; 4. Pengembangan Kawasan perbatasan berbasis industri perikanan tangkap dan pengolahan; serta pengembangan Sub-SKPT tersebar pada wilayah potensial penangkapan dan budidaya; 5. Pengembangan industri Pariwisata Budaya, Alam (Panjat Gunung Api Karangetang, Awu, dan Bahari serta Gunung Api Bawah Laut); 6. Pembangunan system pengelolaan air limbah domestic (SPALD) dan system penyediaan air minum (SPAM) di KSP (zona inti dan/atau zona penyangga) Kompleks Istana Manganitu dan Kawasan sekitar Suaka Margasatwa Karekelang 7. Pembangunan Konektivitas Daerah Kawasan Kepulauan 8. Pembangunan Cold Storage dan pabrik es tersebar di wilayah kepulauan 9. Pembangunan PLTS di wilayah kepulauan 10. Pengembangan Kawasan Peternakan (Sapi, Unggas dan Babi) dengan lokasi tersebar.

B. Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya

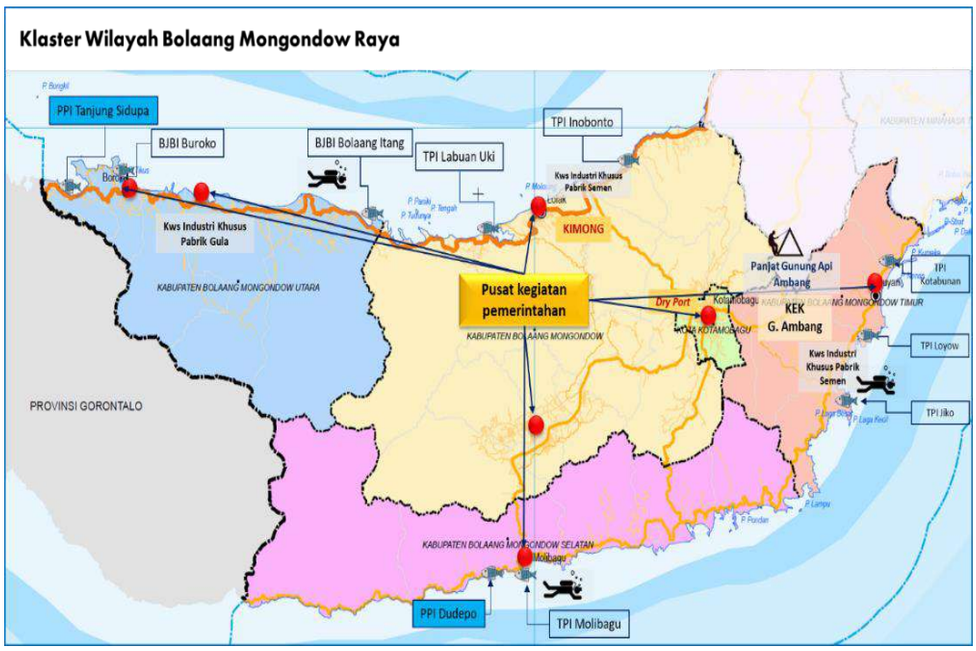
Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya meliputi wilayah 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Wilayah Kabupaten Bolaang

Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu. Strategi pembangunan klaster wilayah Bolaang Mongondow Raya mengutamakan pemerataan, pertumbuhan berkualitas dan enklusif, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dasar antara lain:
   a. peningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, pendidikan pelatihan/vokasional pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata; dan peningkatan serta revitalisasi Balai Latihan Kerja;
   b. percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
   c. pembinaan dan keberpihakan dari Dinas/Badan, K/L serta mitra pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah relatif tertinggal;
   d. pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan;
   e. percepatan pembangunan desa terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa;
   f. pelaksanaan pembangunan afirmatif.
2. Penguatan dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dilakukan melalui antara lain:
   a. pengembangan komoditas unggulan klaster kawasan Bolaang Mongondow Raya yaitu: kelapa, cengkeh, kakao, kopi, emas, geothermal, perikanan tangkap dan budidaya;
   b. pengembangan sentra produksi perikanan lokasi pesisir yang telah memiliki PPI, TPI, dan BJBI;
   c. pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang tersebar di beberapa kawasan potensial;
   d. revitalisasi kawasan transmigrasi;
   e. pengembangan ekonomi kawasan berbasis komoditas unggulan antara lain lewat pembangunan *food estate* jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow;
   f. pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, peternakan, kemaritiman, dan logam dasar) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur pada KI dan *Dry Port (DP)*;
   g. pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP);
   h. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi kluster kawasan Bolaang Mongondow Raya dan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya;
   i. penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan klaster kawasan.
3. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain:
   a. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
   b. pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat

pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;
   c. percepatan penerapan SPM pelayanan dasar, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama daerah;
   d. peningkatan kerja sama antar daerah otonom di wilayah, termasuk wilayah pengembangan pariwisata, industri dan pesisir
4. Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain:
   a. pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, darat, dan udara yang terintegrasi;
   b. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
5. Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;
6. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain:
   a. peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
   b. peningkatan ketahanan kawasan Bolaang Mongondow Selatan, Utara dan pemantapan pemulihan pasca bencana di Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara dan sekitarnya;
   c. adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
   d. peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;
   e. peningkatan penanganan abrasi pantai wilayah pesisir dan daerah pulau, serta konservasi hutan dan hutan bakau (*mangrove*);
7. Pembangunan desa terpadu yang mencakup:
   a. peningkatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa;
   b. penguatan pendamping desa yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa,
   c. pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan;
   d. transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
   e. perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; dan
   f. pemanfaatan dana desa untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendamping lokal desa.

Gambaran integrasi pembangunan Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.



Gambar: 7.15. Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Bolaang Mongondow Raya

Tabel 7.15. Cakupan Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya dan Strategi Pengembangan

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Raya	Strategi Pengembangan
Wilayah Daratan dan Pesisir, dan Perbatasan Darat dengan Provinsi Gorontalo di Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, dan Kota Kotamobagu (Ibukota Lolak, Buroko, Molibagu, Tutuyan)	1. Pusat Kegiatan Pemerintahan dan Ekonomi Lolak dan Dumoga/Doloduo; Buroko dan Bintauna; Molibagu; dan Tutuyan; 2. Hilirisasi Industri Perikanan, Industri Pengolahan Perikanan; Hilirisasi Industri Pengolahan bahan pangan berbahan baku Beras, Jagung (food estate) di Kab. Bolaang Mongondow, Kentang, Wortel, dan pengolahan buah Nenas dan Pisang; Hilirisasi industri pengolahan Gula Aren dan Gula Semut; Hilirisasi Industri pengolahan Kopi dan Cacao; Pengembangan industry kopi organik di Kawasan Kotamobagu dan sekitanya; Hilirisasi dan pengembangan Industri Mikro dan Kecil produk Makanan Lokal dan Minuman; 3. Pengembangan Kawasan Industri Bolaang Mongondow (Kimong), Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Kimong; Pengembangan Kawasan *Dry Port* Kotamobagu dan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan *Dry Port*; 4. Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional: Pelabuhan Torosik dan Pelabuhan Lokal: Pelabuhan Boroko; 5. Peningkatan TPI Inobonto dan TPI Labuan Uki (Bolmong), PPI Dodepo dan TPI Molibagu (Bolsel), PPI Tanjung Sidupa, BJBI Boroko, BJBI Bolangitang (Bolmut), TPI Jiko, TPI Loyouw dan TPI Kotabunan (Boltim) dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Fasilitas Perikanan; 6. Pengembangan Kota Kecil/Sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Bolaang Mongondow Raya (Buroko, Bintauna Pante; Lolak-Inobonto, Dumoga-Doloduo, Mopuya-Mopugat-Tapadaka) 7. Pengembangan Industri Pariwisata Alam (Taman Nasional, Panjat Gunung Berapi Ambang, Agro Wisata);

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Raya	Strategi Pengembangan
		Bahari (Pantai, Spots Diving, Snorkeling), dan Budaya. 8. Pembangunan system pengelolaan air limbah domestic (SPALD) Regional dan system penyediaan air minum (SPAM) di KSP (zona inti dan/atau zona penyangga) meliputi KSP PANSELA, PANTURA, Kompleks Keraton Boroko yang berada di Bolaang Mongondow Utara, Kawasan Area Panas Bumi Gunung Ambang, Kompleks Keraton Boroko, Kawasan sekitar Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Kawasan sekitar Cagar Alam Gunung Ambang 9. Pembangunan Gudang pendingin di Pasar tradisional di Kota Kotamobagu. 10. Pengembangan industri peternak sapi di kab. Bolaang Mongondow Utara. 11. Pengembangan Kawasan Peternakan (Sapi, Unggas dan Babi) dengan lokasi tersebar.

C. Klaster Wilayah Minahasa Raya (Selatan, Tenggara, Tengah/Induk, dan Tomohon):

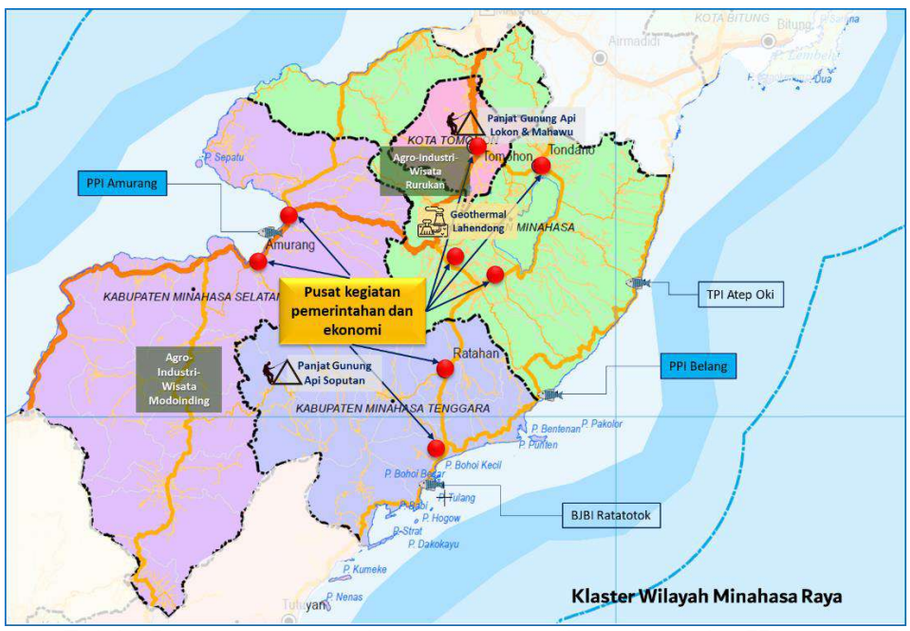
Klaster Wilayah Minahasa Raya meliputi wilayah 3 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Wilayah Kabupaten Minahasa Induk, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kota Tomohon. Strategi pembangunan klaster wilayah Minahasa Raya bagian (Selatan, Tenggara, Induk, dan Tomohon) mengutamakan pemerataan, pertumbuhan berkualitas dan inklusif, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dasar publik antara lain melalui:
   a. peningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, pendidikan pelatihan/vokasional pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata; dan peningkatan serta revitalisasi Balai Latihan Kerja;
   b. percepatan pembangunan daerah kecamatan yang tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
   c. pembinaan dan keberpihakan dari Dinas/Badan, K/L, serta mitra pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah kecamatan relatif tertinggal;
   d. pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola pelayanan pemerintahan di kecamatan;
   e. percepatan pembangunan desa/kelurahan terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa/kelurahan;

2. Penguatan dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dilakukan melalui:
   a. pengembangan komoditas unggulan klaster kawasan Minahasa Raya yaitu: kelapa, cengkeh, pala, kakao, kopi, emas, geothermal, perikanan tangkap dan budidaya;
   b. pengembangan sentra produksi perikanan lokasi pesisir yang telah memiliki PPI, TPI, dan BJBI;
   c. pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang tersebar di beberapa kawasan potensial;
   d. pengembangan ekonomi kawasan berbasis komoditas unggulan antara lain lewat pembangunan *food estate* kelapa di Kabupaten Minahasa Selatan;
   e. pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, peternakan, kemaritiman, dan logam dasar) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur pada pusat pusat pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten dan kota;
   f. pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP);
   g. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi kluster kawasan Minahasa Raya (Bagian Tengah dan Selatan/Tenggara) dan pengembangan kota kecil/sedang baru serta pengembangan kota lainnya;
   h. penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan klaster kawasan.
3. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain:
   a. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
   b. pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;
   c. percepatan penerapan SPM pelayanan dasar, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama daerah;
   d. peningkatan kerja sama antar daerah otonom di wilayah, termasuk wilayah pengembangan pariwisata, industri, dan pesisir.
4. Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain:
   a. pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut dan darat yang terintegrasi;
   b. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
5. Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;
6. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain:
   a. peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
   b. peningkatan ketahanan kawasan Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa, dan Tomohon dan pemantapan pemulihan pasca bencana di Tomohon, dan Minahasa Selatan dan sekitarnya;
   c. adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
   d. peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;
   e. peningkatan penanganan abrasi pantai wilayah pesisir dan daerah pulau, serta konservasi hutan dan hutan bakau (mangrove);
7. Pembangunan desa/kelurahan terpadu yang mencakup:

a. peningkatan kapasitas aparatur desa/kelurahan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa/kelurahan dan tata kelola aset desa/kelurahan;
b. penguatan pendamping desa/kelurahan yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa/kelurahan;
c. pengembangan desa/kelurahan wisata, desa/kelurahan digital dan produk unggulan desa/kelurahan dan kawasan perdesaan/kelurahan;
d. transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
e. perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi, dan listrik desa; dan
f. pemanfaatan dana desa/kelurahan untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pendamping lokal desa/kelurahan.

Gambaran integrasi pembangunan Klaster Wilayah Minahasa Raya (Selatan, Tenggara, Induk/Tengah, dan Tomohon) dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini.



Gambar: 7.16. Integrasi pembangunan wilayah pada Klaster Wilayah Minahasa Raya

Tabel 7.16. Cakupan Klaster Wilayah Minahasa Raya dan Strategi Pengembangan

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota Minahasa Raya	Strategi Pengembangan
Wilayah Daratan, Pegunungan, dan Pesisir di Klaster Wilayah Minahasa Raya (Selatan, Tenggara, Tengah/Induk, dan Tomohon)	Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa, dan Kota Tomohon	a. Pusat Kegiatan Pemerintahan dan Ekonomi Amurang-Tumpaan, Ratahan-Belang, Tondano, Langowan-Kawangkoan, Kota Tomohon; b. Hilirisasi Industri Kelapa, Hilirisasi Industri Perikanan, Industri Pengolahan Perikanan, Hilirisasi Industri Pengolahan bahan pangan berbahan baku Beras, Jagung, Kentang, Wortel,

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota Minahasa Raya	Strategi Pengembangan
		dan Pengolahan buah Pisang; Hilirisasi industri pengolahan Gula Aren dan Gula Semut di Kab. Minahasa Tenggara; Hilirisasi Industri Pengolahan Kopi dan Cacao; Hilirisasi dan pengembangan Industri Mikro dan Kecil produk Makanan Lokal dan Minuman; *food estate* kelapa di Kab. Minahasa Selatan c. Pengembangan Kawasan Agro industri Modoinding, Pengembangan Agroindustri Rurukan; Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Agroindustri Modoinding dan Rurukan, Pengembangan agrowisata Modoinding serta Pengembangan Kawasan Peternakan (Sapi, Unggas dan Babi) dengan lokasi tersebar. d. Perencanaan Penyiapan Pengembangan Waduk Pengolahan Air Danau Tondano untuk memenuhi kebutuhan air bersih Kota Bitung dan Kota Manado di Wilayah Tondano Utara memanfaatkan posisi ketinggian lokasi dengan tekanan gravitasi untuk distribusi dan Energi Terbarukan (ET) Solar System, Pembangunan instalasi pengolahan air baku dan jaringan perpipaan e. Pengembangan Pelabuhan Regional: Pelabuhan Amurang dan Belang; Jalan alternative Manado-Tomohon, serta Pembangunan Tol Manado-Amurang f. Pengembangan Fasilitas Pelabuhan/Pendaratan Ikan Belang, PPI Amurang, TPI Atep Oki, BJBI Ratatotok serta Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Pelabuhan/Fasilitas Perikanan; g. Pengembangan Kota Kecil/Sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Minahasa Raya (Modoinding, Tompaso Baru, Motoling, Belang-Ratatotok, Tombatu; Langowan, Kakas dan sekitar, Tompaso-Kawangkoan, Tandengan-Eris, Remboken-Tondano, Tanawangko, Kalasey,

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota Minahasa Raya	Strategi Pengembangan
		Pineleng); h. Pengembangan Industri Pariwisata, Bahari, Budaya, Agro, dan Alam seperti Danau Tondano, Danau Linau, Agrowisata Rurukan, Agrowisata Modoinding, Taman Geothermal Lahendong-Tampusu-Tompasa, Panjat/Hiking Gunung Berapi Soputan, Lokon, dan Mahawu; Pantai Tenga, Pantai Kora-Kora, Pantai Rerer-Kombi, Pantai Kalasey, Pantai Air Panas Moinit, Pantai Bukit Tinggi, Rumah Batu Penaesaan, Taman Budaya Moraya, Taman Budaya Kampung Jawa dan Kompleks Kuburan Pahlawan, Objek Wisata Watu Pinabetengan; Objek Wisata Kanonang, Objek Wisata Danau di Remboken; serta penguatan kelembagaan pengelolaan Objek Wisata; Pengembangan wisata tirta Danau Tondano i. Pengembangan Kelembagaan Daerah Pengelolaan Potensi Danau Tondano dan sekitarnya; j. Pengembangan industri pengolahan pupuk organic dan produk turunan berbahan baku eceng gondok di Danau Tondano, pada 6 desa pengolahan di sekitar Danau Tondano k. Pembangunan system pengelolaan air limbah domestic (SPALD) Regional dan system penyediaan air minum (SPAM) di KSP (zona inti dan/atau zona penyangga) meliputi KSP Kawasan Waruga Tonsewer Tompaso Lama, Kawasan Benteng Amurang, Kompleks Lodji Tondano, Kawasan Kampung Jawa, Kawasan Area Panas Bumi Lahendong, Kawasan sekitar Cagar Alam Lokon l. Pembangunan Gudang pendingin di Pasar tradisional di Tondano, Amurang.

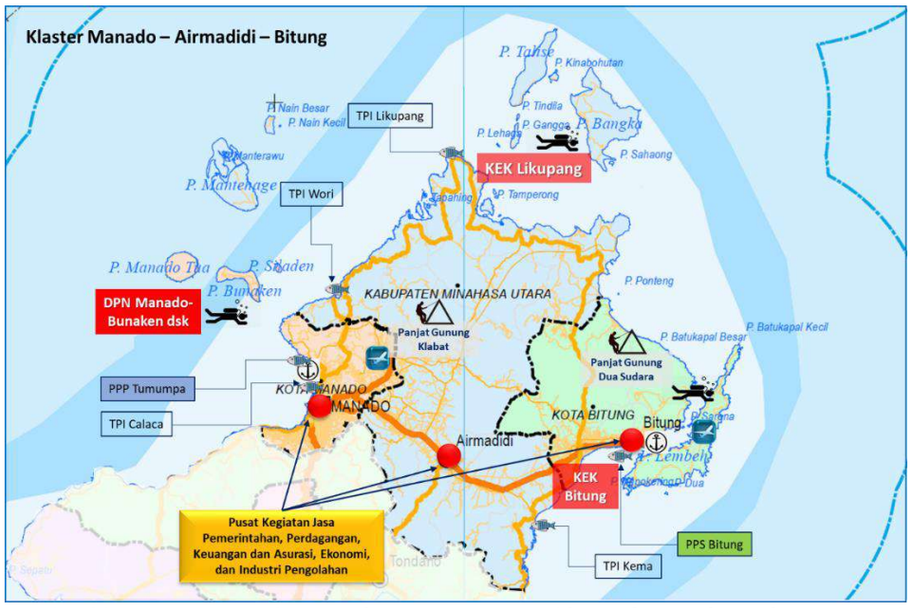
D. Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian (Utara, Manado, dan Bitung) sebagai wilayah Cepat Tumbuh

Strategi pembangunan klaster wilayah Minahasa Raya bagian (Utara, Manado, dan Bitung)—sebagai lokasi wilayah cepat tumbuh--mengutamakan pemerataan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas antar wilayah dan akses ke wilayah provinsi tetangga, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dasar publik antara lain melalui:
   a. peningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, pendidikan pelatihan/vokasional bidang pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, dan konektivitas/logistic; dan peningkatan serta revitalisasi Balai Latihan Kerja di Kota Bitung;
   b. percepatan pembangunan daerah kecamatan yang tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
   c. pembinaan dan keberpihakan dari K/L dan Dinas/Badan Provinsi, serta mitra pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah kecamatan relatif tertinggal;
   d. pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola pelayanan pemerintahan di kecamatan;
   e. percepatan pembangunan desa/kelurahan terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa/kelurahan;
2. Penguatan dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru dilakukan melalui:
   a. pengembangan komoditas unggulan seluruh kluster Kawasan di Sulawesi Utara dan wilayah provinsi lain yaitu: kelapa dalam, kelapa sawit, cengkeh, pala, kakao, kopi, emas, geothermal, perikanan tangkap dan budidaya;
   b. pengembangan sentra produksi perikanan lokasi pesisir yang telah memiliki fasilitas pendukung utama seperti: PPS, PPP, PPI, TPI, dan BJBI;
   c. pengembangan sentra produksi perkebunan dan peternakan yang tersebar di beberapa kawasan potensial;
   d. pengembangan ekonomi kawasan berbasis komoditas unggulan antara lain lewat pembangunan *food estate* jagung di Kabupaten Minahasa Utara;
   e. pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (perkebunan, peternakan, kemaritiman, dan logam dasar) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
   f. pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP);
   g. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi kluster kawasan Minahasa Raya (Bagian Utara dan Manado-Bitung) dan pengembangan kota kecil/sedang baru lainnya;
   h. penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan klaster kawasan.
3. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui:
   a. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
   b. pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat

pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kawasan;
   c. percepatan penerapan SPM pelayanan dasar, peningkatan dan revitalisasi pelayanan perizinan investasi berbasis e-gov, dan perluasan kerjasama daerah dalam klaster dan di luar klaster;
   d. peningkatan kerja sama antar daerah otonom di wilayah, termasuk wilayah pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, pengolahan sampah, air limbah, air bersih.
4. Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain:
   a. pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, darat, dan udara yang terintegrasi dengan daerah dan wilayah lain di luar Sulawesi Utara;
   b. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
5. Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;
6. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain:
   a. peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
   b. peningkatan ketahanan kawasan Minahasa Utara, Manado, dan Bitung, dan pemantapan pemulihan pascabencana di Manado, Bitung, dan sekitarnya;
   c. adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
   d. peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;
   e. peningkatan penanganan abrasi pantai wilayah pesisir dan daerah pulau, serta konservasi hutan dan hutan bakau (mangrove);
7. Pembangunan desa/kelurahan terpadu yang mencakup:
   a. peningkatan kapasitas aparatur desa/kelurahan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa/kelurahan dan tata kelola aset desa/kelurahan;
   b. penguatan pendamping desa/kelurahan yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa/kelurahan;
   c. pengembangan desa/kelurahan wisata, desa/kelurahan digital, dan produk unggulan desa/kelurahan dan kawasan perdesaan/kelurahan;
   d. transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
   e. perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan sampah desa/kelurahan; dan
   f. pemanfaatan dana desa/kelurahan untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pendamping lokal desa/kelurahan.

Gambaran integrasi pembangunan Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian Utara dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini.



Gambar 7.17. Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Wilayah Kawasan Cepat Tumbuh (Manado-Minut-Bitung)

Tabel 7.17. Cakupan Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian Utara dan Strategi Pengembangan

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota Minahasa Raya bagian Utara	Strategi Pengembangan
Wilayah Daratan, Pesisir dan Pulau di Klaster Wilayah Minahasa Raya bagian Utara, Kota Manado, Kota Bitung	Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Bitung	1. Pusat Kegiatan Jasa Pemerintahan, Perdagangan, Keuangan dan Asurasi, Ekonomi, dan Industri Pengolahan; 2. Hilirisasi Industri Perikanan, Industri Pengolahan Perikanan; Hilirisasi Industri Pengolahan bahan pangan berbahan baku Beras, Jagung, Ikan, Kentang, Wortel, dan Pengolahan buah Pisang; termasuk pembangunan *food estate* jagung di Kab. Minahasa Utara; Hilirisasi industri Pengolahan Gula Aren dan Gula Semut; Hilirisasi Industri Pengolahan Kopi dan Cacao; Hilirisasi dan pengembangan Industri Mikro dan Kecil produk Makanan Lokal dan Minuman; 3. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengelola KEK Bitung dan KEK Likupang; 4. Pengembangan Pelabuhan Regional/Lokal Likupang, Pelabuhan Penyeberangan Pateten-Lembeh; 5. Pengelolaan Pelabuhan dan Fasilitas Perikanan yaitu: PPS Bitung,PPP Tumumpa, TPI Calaca, TPI Likupang, TPI Kema, TPI Wori; dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Pelabuhan dan Fasilitas Perikanan yang tersebar di seluruh kab/kota, Pelabuhan

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota Minahasa Raya bagian Utara	Strategi Pengembangan
		Perikanan terintegrasi dengan Fish Market taraf internasional di Likupang; 6. Pengembangan Kota Kecil/Sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Minahasa Minahasa Utara (Airmadidi, Likupang, Kauditan, Sawangan dan Kema); 7. Pengembangan Industri Pariwisata, Bahari/Diving (TNL. Bunaken, Pulau Bangka dan sekitarnya, Selat Lembeh) beberapa lokasi objek wisata pantai tersebar di Likupang sekitarnya, dan Kema; Wisata Budaya (Taman Purbakala Sawangan), Wisata Alam (cagar Alam Tangkoko) Panjat/Hiking Gunung Klabat; serta beberapa spots objek wisata kota Manado dan Bitung. 8. Pembangunan system pengelolaan air limbah domestic (SPALD) Regional dan system penyediaan air minum (SPAM) Regional Bimatara di KSP (zona inti dan/atau zona penyangga) meliputi KSP Kawasan sekitar KEK Bitung, Kawasan sekitar KEK Pariwisata Likupang, Kawasan Pengembangan Bandar Udara Sam Ratulangi dan Kawasan Aerotropolis Pulau Lembeh, Kawasan Waruga di Sawangan Minahasa Utara, Kawasan Pecinan dan Kampung Arah di Manado, Kawasan sekitar Suaka Margasatwa Gunung Manembo – nembo, Kawasan sekitar Cagar Alam Dua Sodara, Kawasan sekitar Cagar Alam Tangkoko, Kawasan sekitar Taman Wisata Alam Batu Putih dan Batu Angus, dan Kawasan sekitar TPA regional Ilo – ilo. Pembangunan TPA Regional Mamitarang dan tempat pengolahan limbah B3 medis. 9. Pengembangan Kawasan Aerotopolis Pulau Lembeh, Pembangunan Jembatan Bitung-Lembeh, Pembangunan jalur Kereta api Manado-Bitung 10. Pembangunan Integrated Coastal Road dan Water Transportation Teluk Manado untuk mendukung konektivitas 11. Pembangunan Pasar Induk di Kota Manado, Pembangunan Gudang pendingin di Pasar tradisional di Kota Manado, Kota Bitung, Airmadidi

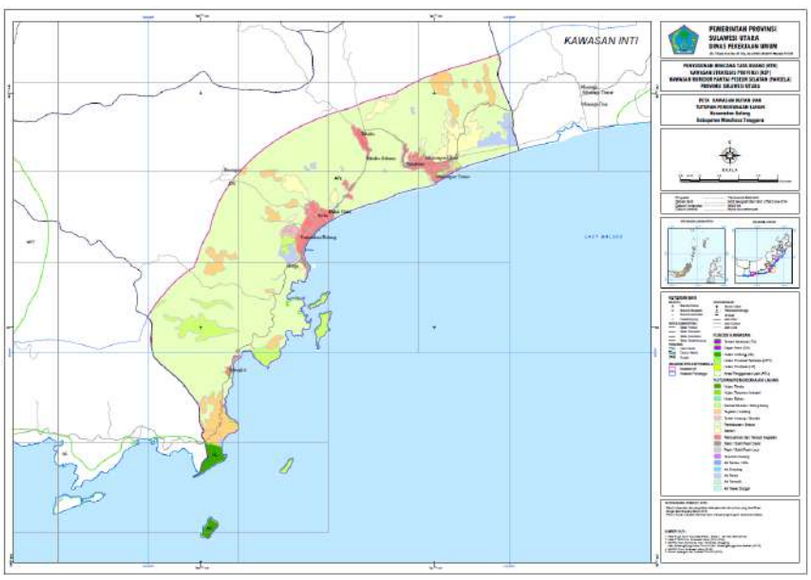
Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota Minahasa Raya bagian Utara	Strategi Pengembangan
		12. Pengembangan Kawasan Peternakan (Sapi, Unggas dan Babi) dengan lokasi tersebar.

E. Pembangunan Antar Klaster Wilayah Minahasa Raya dan Bolaang Mongondow Raya dalam Koridor Pantai Selatan

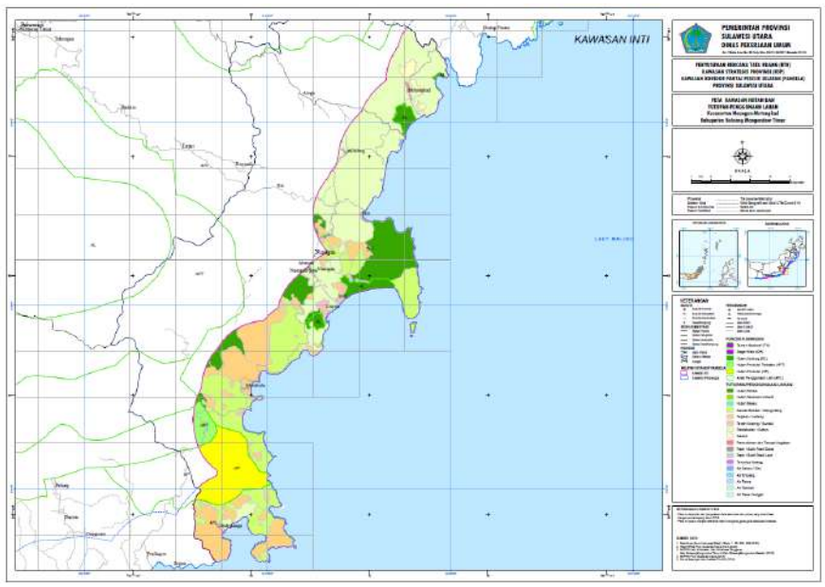
Pembangunan antar klaster wilayah pada koridor pantai selatan yang merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dilakukan sebagai bagian dari kebijakan provinsi untuk menanggulangi kemiskinan. Pemetaan ketimpangan wilayah menunjukkan bahwa kabupaten pada daerah pantai selatan meliputi Kabupaten Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan memiliki progress yang rendah pada capaian beberapa indicator pembangunan dibandingkan pada daerah pantai utara.

Pembangunan yang akan dilakukan mengarah pada pemenuhan pelayanan dasar air minum dan sanitasi pada permukiman pesisir sepanjang koridor pantai selatan oleh Pemerintah Provinsi dengan mempertimbangkan capaian pembangunan pada beberapa indikator seperti tingkat kematian ibu dan bayi, prevalensi stunting, angka putus sekolah dasar, angka Buang Air Besar Sembarangan (BAB) dan jumlah rumah tidak layak huni, dengan scenario pendanaan bantuan keuangan provinsi.

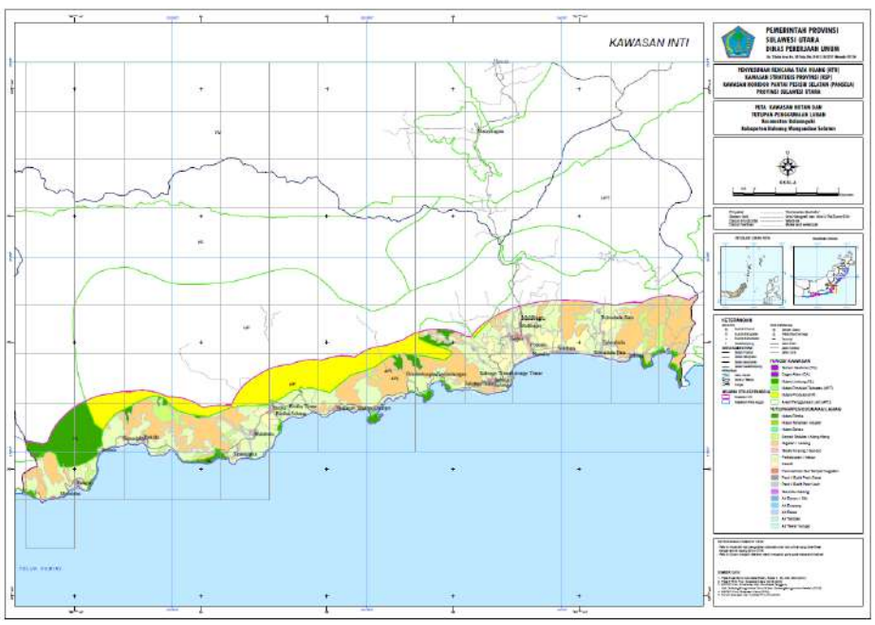
Data kawasan koridor pantai selatan di ketiga kabupaten dapat dilihat pada peta – peta berikut.



Gambar 7.18. Peta Desa – Desa pesisir di Kabupaten Minahasa Tenggara



Gambar 19. Peta desa – desa pesisir di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur



Gambar 7.20. Peta desa – desa pesisir di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

7.4.2. Kawasan Super Hub Sulawesi Utara

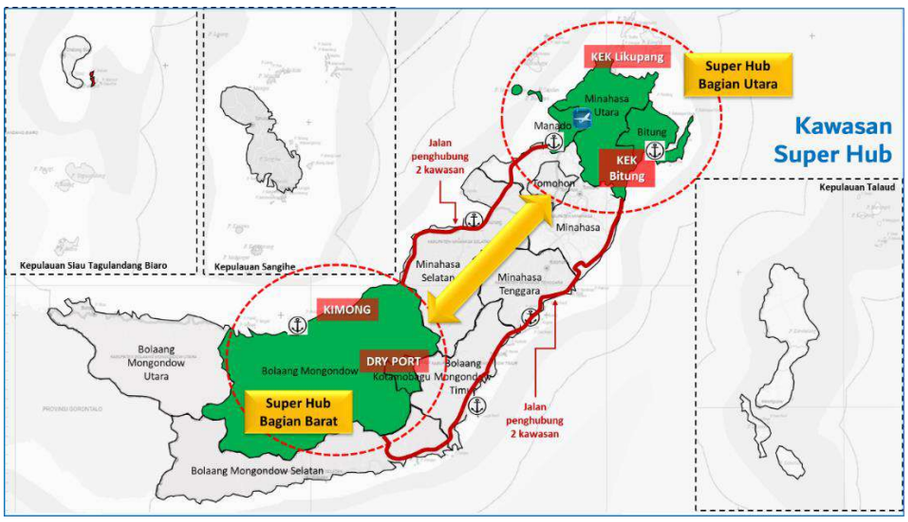
Super Hub Sulawesi Utara mencakup beberapa wilayah kabupaten dan kota yang telah memiliki infrastruktur dasar, sosial, dan Kawasan Ekonomi/Industri menunjang percepatan gerak akselerasi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Timur Indonesia. Melalui transformasi struktur ekonomi daerah dari sektor primer bertahap bergeser ke Sektor Industri pengolahan komoditi lokal dan Sektor Jasa, serta akselerasi peran Industri Pariwisata yang didukung dengan jaringan jasa penerbangan internasional dan nasional, menggunakan fasilitas Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Hub Internasional Bitung.

Wilayah Super Hub mencakup Kota Manado dimana terletak lokasi Bandar Udara Internasional; Kota Bitung memiliki Pelabuhan Hub Internasional dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); Kabupaten Minahasa Utara terletak di antara 2 kota (Manado dan Bitung) memiliki lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata; Kabupaten Bolaang

Mongondow memiliki Kawasan Industri (KI) Kimong; dan Kota Kotamobagu akan memiliki *Dry Port* (dalam tahap persiapan).

Arah pengembangan Super Hub dilaksanakan bersama pemerintah nasional dan provinsi, serta seluruh kabupaten dan kota yang memiliki fasilitas penunjang percepatan berkembangnya pusat pertumbuhan (*growth centre)* di Sulawesi Utara sebagai Super Hub di KTI bagian Utara. Melakukan integrasi terpadu antar pusat-pusat kegiatan ekonomi di beberapa kabupaten dan kota melalui jaringan konektivitas akses langsung ke Pelabuhan Hub Internasional Bitung dan Bandar Udara Internasional. Integrasi konektivitas antar kawasan kegiatan ekonomi yang didukung dengan jaringan transportasi antar daerah dan antar provinsi melalui hubungan darat, laut, dan udara, menjadi syarat prioritas Super Hub dapat berperan sebagai penggerak ekonomi Kawasan Timur dan pintu utama di KTI akses langsung ke pasar internasional.

Gambaran integrasi pengembangan Kawasan Super Hub dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini.



Gambar 7.21 Integrasi Pembangunan Wilayah pada Kawasan Super-Hub Sulut

Tabel 7.18. Cakupan Kawasan Super-Hub Sulut dan Strategi Pengembangan

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota	Strategi Pengembangan
Wilayah daratan bagian utara Peninsula (Manado, Minahasa Utara, dan Bitung) dan bagian barat (Bolaang Mongondow dan Kotamobagu)	Manado, Bitung, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow, dan Kotamobagu	1. Integrasi kawasan ekonomi dan infrastruktur dasar perhubungan melalui konektivitas jaringan perhubungan darat; termasuk termasuk Perencanaan Pembangunan Manado Elevated Coastal Road di Kota Manado,terdiri atas ruas Bahu Mall - Ring Road 3 (yang menggantikan fungsi jalan arteri primer ruas Bahu Mall – Batas Kota Manado) dan ruas Bahu Mall – Pantai Manado – Ring Road 4. 2. Penguatan Kelembagaan Pengelola 2 KEK, 1 KI, dan 1

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota	Strategi Pengembangan
		Dry Port (DP); 3. Kemudahan akses dari provinsi tetangga menggunakan fasilitas Pelabuhan dan Bandara di wilayah Sulawesi Utara; 4. Pembukaan kembali jalur pelayaran dan penerbangan Manado-Davao secara regular yang dilayani perusahan Penerbangan dan Pelayaran Indonesia dan Filipina; 5. Pembukaan jalur penerbangan (penumpang dan cargo) akses ke Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Singapore, dan Hong Kong. 6. Optimalisasi peran Pelabuhan Hub Bitung menjadi pintu ekspor dan import Kawasan Timur Indonesia. 7. Pembangunan Jaringan Transportasi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP)

7.6. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kewilayahan di Sulawesi Utara tahun 2021—2026 mengutamakan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan pada bukti data, informasi, dan pengetahuan yang baik, akurat, lengkap, skenario pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi, serta lokasi yang jelas sesuai rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. Selain itu, pembangunan kewilayahan juga mengutamakan pendekatan holistik dan tematik yang didasarkan penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada prioritas pembangunan dan lokasi yang paling relevan sesuai dengan pendekatan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan kewilayahan dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengutamakan kerjasama dan keterpaduan program dan kegiatan antar-kementerian/lembaga, antara-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, antar pemerintah daerah, serta antara Pemerintah/Pemda dan Badan Usaha dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Untuk mencapai sasaran dan target pembangunan, pembangunan wilayah ke depan akan diterjemahkan melalui dua pendekatan utama yaitu pendekatan koridor pertumbuhan daerah melalui pusat-pusat pengembangan, dan koridor pemerataan berbasiskan klaster wilayah. Pendekatan koridor disusun dengan mempertimbangkan hasil perhitungan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah berdasarkan beberapa indikator makro kabupaten/kota tahun 2019, serta mempertimbangkan jalur perhubungan dan pertumbuhan masing-masing daerah, jalur pariwisata nusantara, dan mempertimbangkan pola persebaran pusat kegiatan seperti Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Pendekatan melalui koridor pertumbuhan mengutamakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat mendorong peningkatan nilai tambah, peningkatan penerimaan devisa, dan perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi

berkualitas dan inklusif kedepan. Pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain adalah kawasan perikanan dan kelautan, pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai pusat produksi; kawasan strategis prioritas seperti kawasan industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) dan destinasi pariwisata prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata; serta kawasan perkotaan termasuk metropolitan, kota-kota baru dan kota-kota sedang dan kecil sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Pendekatan melalui koridor pemerataan mengutamakan pengembangan wilayah penyangga (hinterland) yang berada di sekitar pusat pertumbuhan, serta daerah dan kawasan tertinggal untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai dengan kaidah tujuan pembangunan berkelanjutan. Wilayah penyangga tersebut antara lain adalah desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil, terluar dan terdepan, serta daerah tertinggal.

Kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. **Meningkatkan pemerataan antar wilayah daratan dan kepulauan, maupun daerah pesisir dan pegunungan, melalui strategi pembangunan, yaitu:**
   a. Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, melalui:
      i. perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;
      ii. penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan, air bersih dan sanitasi, dan listrik;
      iii. peningkatan konektivitas transportasi darat, laut, dan udara;
      iv. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital;
      v. perluasan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan;
      vi. meningkatkan pengawasan dan penjagaan pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); serta
      vii. pemenuhan hak-hak masyarakat perbatasan dan kepulauan sesuai mandat regulasi yang berlaku.
   b. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang didukung dengan:
      i. tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif;
      ii. penetapan batas desa;
      iii. pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/BUMDes Bersama;
      iv. peningkatan pelayanan dasar desa;
      v. optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping lokal desa;
      vi. penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa.
   c. Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan berbasis keunggulan wilayah desa, Kawasan Perdesaan Prioritas

Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) perbatasan negara melalui:

i. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas termasuk jaringan logistik dari desa ke pusat-pusat perdagangan baik pasar lokal, regional maupun internasional;
ii. pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan dengan multipihak.

2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, melalui strategi pembangunan, yaitu:

a. Optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah yaitu KEK, KI, Destinasi Pariwisata Prioritas, Super Hub, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor, khususnya hasil-hasil perkebunan dan perikanan antara lain melalui:
   i. penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi perkebunan dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
   ii. penyediaan jaringan infrastruktur secara terpadu yang meliputi jaringan transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lainnya), sistem energi (listrik, gas, surya, batu bara, dan lainnya), fasilitas air baku dan air bersih, dan sistem pengolahan limbah;
   iii. pelayanan perijinan dan investasi yang cepat;
   iv. penguatan konektivitas dengan pusat-pusat produksi bahan baku di kawasan perdesaan dan transmigrasi, kota-kota kecil, dan kota-kota menengah dalam pengadaan bahan baku dan pendukung;
   v. pengembangan kerjasama dan kemitraan pembiayaan pemerintah dan badan usaha;
   vi. penguatan kerjasama Pemerintah Daerah, badan pengelola, masyarakat, perguruan tinggi dan media dalam promosi dan pengembangan kawasan strategis;
   vii. perluasan kerjasama dan kemitraan dalam kerjasama mata rantai produksi domestic dan global.
   viii. Penyediaan infrastruktur kelautan dan perikanan untuk pulau-pulau kecil/terluar.

3. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, melalui strategi pembangunan:

a. Pelaksanaan desentralisasi melalui peningkatkan kapasitas daerah otonom untuk pemenuhan standar pelayanan minimum, pengelolaan keuangan daerah dan pemenuhan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien;
b. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerah antara lain melalui:
   i. penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten termasuk perbaikan mekanisme pengaduan yang terintegrasi dengan manajemen kinerja;
   ii. penataan lembaga dan organisasi Pemerintah Daerah yang lebih efisien dan efektif;

iii. optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna menciptakan pelayanan yang lebih cepat, murah dan efisien;
iv. peningkatan riset dan inovasi daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan;
v. peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keahlian khusus lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah termasuk perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah;
vi. Optimalisasi peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melalui sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk percepatan pencapaian target prioritas pemerintah, pemprov, dan pemkab/pemkot, melalui APBD setiap daerah;
vii. optimalisasi dana transfer daerah yang lebih produktif dan afirmatif bagi kemajuan daerah;
viii. peningkatan penerimaan dan pendapatan daerah baik pajak dan retribusi daerah maupun sumber-sumber penerimaan dan pendapatan lainnya melalui penataan dan pengembangan data dan informasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan;
ix. pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, melalui; peningkatan kualitas belanja daerah yang berdampak bagi percepatan pencapaian SPM, dan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah;
x. peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja;

c. Pengembangan kerja sama antar daerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru, melalui;
i. Penguatan peran PTSP sebagai percepatan pelayanan dan perijinan kepada masyarakat dan dunia usaha;
ii. Penataan regulasi daerah dalam mendukung kemudahan berusaha;
iii. Pengembangan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
iv. Perluasan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi pemerintah daerah dengan mitra pembangunan dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pembiayaan dan investasi pembangunan, penyelesaian permasalahan publik bersama, dan pengembangan daya saing dan inovasi daerah.

d. Penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis, melalui:
i. Penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam koordinasi dan pengendalian pembangunan daerah;
ii. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tentang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian dan evaluasi, serta audit antara pusat dan daerah; dan
iii. Penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah melalui percepatan penyelesaian revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lain mengenai manajemen keuangan daerah

4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, melalui strategi pembangunan:

a. Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana untuk menjamin pelindungan fungsi

ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang antara lain melalui:

i. peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
ii. penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara daerah (provinsi, kabupaten/kota);
iii. penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;

b. Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui:
   i. sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
   ii. penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral;
   iii. penetapan deliniasi batas wilayah adat;
c. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah; dan peningkatan pelayanan pertanahan melalui pelayanan modern berbasis digital dan penerimaan PNS petugas ukur pertanahan;
d. Penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko perubahan iklim dan bencana; dan meningkatkan ketangguhan menghadapi perubahan iklim dan bencana terutama di pusat-pusat pertumbuhan wilayah kawasan perkotaan melalui:
   i. pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim;
   ii. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan;
   iii. pembangunan budaya sadar bencana, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat;
   iv. pemenuhan standar pelayanan minimal kebencanaan melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, masyarakat, dan logistik kebencanaan terutama di kawasan strategis nasional dan daerah yang memiliki risiko bencana tinggi;
   v. pengembangan sistem peringatan dini multiancaman bencana;
   vi. adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana;
   vii. peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana pada fase prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana;
   viii. peningkatan investasi untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana;
   ix. perluasan dan penguatan kerjasama dan kemitraan multiphak dan multisektor dalam mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;
   x. peningkatan upaya penanganan abrasi pantai yang dapat mengancam terjadinya pergeseran batas wilayah;

7.7. Strategi Pendanaan Pembangunan Daerah

Sumber pendanaan pemerintah daerah selama ini berasal dari dana transfer pemerintah melalui DAU, DBH, DAK, Dana Desa/Kelurahan yang mengisi porsi terbesar dalam pundi penerimaan penerimaan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Dana daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif terbatas kontribusinya terhadap penerimaan daerah. Selain dana transfer dari Pemerintah, pemerintah daerah juga menerima Dana Insentif Daerah (DID) untuk daerah yang dapat menunjukkan peningkatan kinerja kewajiban pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Sebagian pemerintah daerah termasuk kabupaten dan kota berusaha meningkatkan

kinerjanya pada bidang pelayanan dasar publik, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan umum pemerintahan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dana insentif daerah yang menjadi sumber pendanaan kegiatan Pemda.

Keterbatasan sumber penerimaan Pemerintah Daerah, mendorong pemerintah daerah wajib melakukan dan meningkatkan tata kelola keuangan daerah melalui;

1. Mengutamakan pendanaan pada bidang sebagai *mandatory spending* pemerintah daerah;
2. Melakukan efisiensi alokasi dana terfokus pada pendanaan kegiatan atau sub-kegiatan prioritas dan kewenangan pemerintah daerah;
3. Alokasi pendanaan kegiatan menggunakan *unit cost*;
4. Pendanaan pemerintah daerah diarahkan pada pembiayaan kreatif, yang memberi dampak *countercyclical* pada Pemda dan Pemerintah;
5. Pemerintah daerah melanjutkan upaya untuk mengurangi terjadinya SiLPA;
6. Setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) wajib melakukan tata kelola keuangan dengan disiplin lakukan pelaporan penggunaan belanja;

Masa pandemik menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Karena terjadi penurunan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disebabkan berkurangnya kegiatan produktif masyarakat akibat melemahnya kondisi ekonomi daerah dan nasional. Pengalaman ini menjadi bagian dari pembelajaran bagi pemerintah daerah, dan terdorong mencari alternatif sumber pendanaan lain di luar transfer pemerintah dan PAD, termasuk memenuhi *readiness criteria* dalam pengusulan sumber pendanaan dari pinjaman kepada pemerintah—dimana sumber pendanaan dari pinjaman belum dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Karena akan berkewajiban menyusun perencanaan keuangan untuk mengembalikan pinjaman tersebut di masa datang.

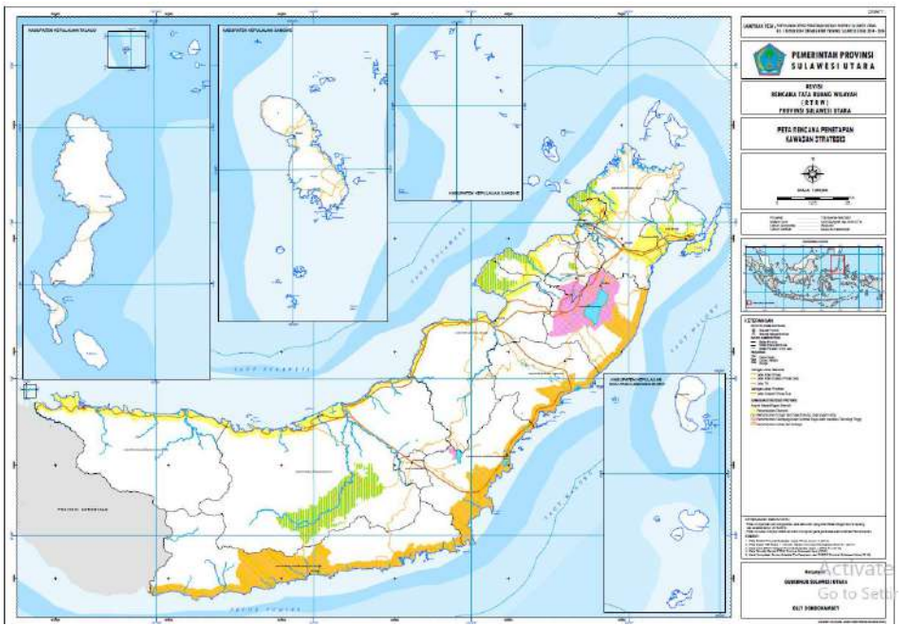
Pada dua tahun (2020-2021) terakhir, pemerintah provinsi dan beberapa pemerintah kabupaten dan pemerintah kota berusaha mendapatkan dana pinjaman dari Pemerintah dengan mempersiapkan usulan kegiatan pendanaan menggunakan dana pinjaman dan rencana pengembalian pinjaman. Proses pelaksanaan penggunaan dana pinjaman menjadi pembelajaran baru bagi pemerintah daerah untuk mencari dan mendapatkan sumber pendanaan di luar dana transfer dan PAD.

Dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan klaster wilayah, Pemerintah Provinsi wajib melakukan integrasi pendanaan program dan kegiatan prioritas, dengan menggunakan sumber dana berasal dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Dana Desa, APBN, DAK Fisik, serta dana swasta dan BUMD/BUMN melalui mekanisme KPBU. Alternatif pilihan terbaik bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah melakukan *collaborative governance* melalui *sharing* pendanaan berdasarkan kewenangan setiap pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan.

Kolaborasi pendanaan dapat dilakukan antara lain dalam mencapai target pemenuhan layanan dasar, dimana di satu sisi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki keterbatasan pendanaan, dan di sisi lain dihadapkan dengan besarnya gap terhadap pemenuhan layanan air minum dan sanitasi. Kebijakan daerah terkait percepatan pembangunan infrastruktur dasar adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pendanaan untuk kerja sama dan sharing pendanaan untuk mencapai target pembangunan infrastruktur dasar khususnya percepatan pencapaian akses air minum layak dan akses sanitasi layak.
   Strategi:

a. Mempercepat pencapaian target akses dengan membangun infrastruktur dasar pada daerah yang masuk dalam **delineasi** Kawasan Strategis Provinsi (KSP) meliputi zona inti dan/atau zona pendukung lewat mekanisme APBD provinsi dan lewat mekanisme bantuan keuangan provinsi khusus untuk pembangunan pada permukiman pesisir di koridor pantai selatan.
   Daerah prioritas 1 adalah kabupaten/kota yang berada pada kuadran II dan daerah prioritas 2 adalah kabupaten/kota yang berada pada kuadran I dan III.
   Adapun KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Provinsi dari sudut kepentingan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. KSP yang ada di Provinsi Sulawesi Utara adalah:
   1) Terdapat 8 KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu KSP Koridor Pantai Pesisir Utara (PANTURA), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Kawasan sekitar KEK Bitung, KSP Koridor Pantai Pesisir Selatan (PANSELA), KEK Pariwisata Likupang, Kawasan sekitar KEK Likupang, Kawasan Pengembangan Bandar Udara Sam Ratulangi dan Kawasan Aerotropolis Pulau Lembeh.
   2) Terdapat 8 KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya yaitu Kawasan Waruga yang berada di Sawangan Minahasa Utara dan Tonsewer Tompaso Lama Kabupaten Minahasa, Kawasan Benteng Amurang yang berada di Minahasa Selatan, Kawasan Pecinan yang berada di Manado, Kawasan Kampung Arab yang berada di Manado, Kawasan Kampung Jawa di Tondano yang berada di Minahasa, Kompleks Keraton Boroko yang berada di Bolaang Mongondow Utara, Kompleks Istana Manganitu yang berada di Kepulauan Sangihe dan Kompleks Lodji Tondano yang berada di Minahasa.
   3) Terdapat 2 KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi meliputi Kawasan Area Panas Bumi Lahendong dan Kawasan Area Panas Bumi Gunung Ambang.
   4) Terdapat 9 KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi Kawasan sekitar Taman Nasional Bunaken, Kawasan sekitar Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Kawasan sekitar Suaka Margasatwa Karekelang, Kawasan sekitar Suaka Margasatwa Gunung Manembo – nembo, Kawasan sekitar Cagar Alam Dua Sodara, Kawasan sekitar Cagar Alam Gunung Lokon, Kawasan sekitar Cagar Alam Gunung Ambang, Kawasan sekitar Cagar Alam Tangkoko, Taman Wisata Alam Batu Putih dan Taman Wisata Alam Batu Angus dan Kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Ilo – Ilo dan sekitarnya.



Gambar 7.22. Sebaran Kawasan Strategi Provinsi (KSP) Sulawesi Utara

b. Mempercepat pencapaian target akses dengan membangun infrastruktur dasar pada daerah yang masuk dalam **Kabupaten Kepulauan** lewat mekanisme APBD provinsi. Daerah prioritas adalah kabupaten kepulauan yang berada pada kuadran I.
c. Merencanakan pembangunan infrastruktur regional untuk air limbah domestik di 3 klaster pengembangan wilayah yaitu klaster Manado – Minahasa Utara – Bitung, klaster Minahasa Raya dan klaster Bolaang Mongondow Raya.
d. Menerbitkan regulasi berupa peraturan gubernur untuk pelaksanaan strategi a dan b.
e. Menyepakati pembagian peran dalam pencapaian target dan pendanaan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lewat MoU. Kabupaten/Kota perlu berkomitmen untuk mengakses pendanaan antara lain dari dana desa, DAK, DID, CSR, hibah/pinjaman dan swadaya masyarakat.

2. Kebijakan implementasi dan monitoring pengelolaan persampahan berkelanjutan.
   Strategi:
   a. Meningkatkan implementasi dan monitoring Jakstrada Provinsi (peraturan gubernur) dan Kabupaten/Kota (peraturan walikota/bupati).
   b. Memantapkan lembaga pengelola TPA Regional Mamitarang
   c. Melaksanakan dan memonitor penanganan sampah di TPA Regional Mamitarang.
3. Kebijakan penanganan kawasan kumuh
   Strategi:
   a. Mengkoordinasikan dan monitoring percepatan pengurangan kawasan kumuh di kabupaten/kota
   b. Mengkoordinasikan dan monitoring penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di kabupaten/kota

BAB VIII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

8.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Implementasi pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Utara selang 5 (lima) tahun kedepan tidak terlepas dari kerangka pendanaan pembangunan yang diproyeksikan saat ini. Hal ini sebagaimana yang disajikan dalam Bab III pada Sub Bab Pendapatan daerah Sulawesi Utara dalam lima tahun kedepan diproyeksikan akan terus meningkat. Proyeksi peningkatan pendapatan daerah dengan memperhatikan beberapa asumsi sebagi berikut:

1. Program vaksinisasi COVID-19 berhasil, disamping protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan disiplin sehingga Pandemi COVID-19 dapat dipulihkan pada tahun 2021.
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sumber pajak utama daerah, seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan perluasan sumber-sumber pendapatan baru;
3. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomis;
4. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjukkan dari meningkatnya deviden yang diterima antara lain PT. Membangun Sulut Hebat (PT. MSH) seiring dengan operasionalnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri Bitung serta Bank SULUTGO yang diharapkan kinerja akan lebih baik.

Pada sisi yang lain kebutuhan belanja pembangunan daerah juga diproyeksikan meningkat sejalan dengan peningkatan sisi pendapatan. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemulihan dampak pandemi COVID-19, pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan menjadi inti dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* menjadi bagian penting dalam kebijakan belanja daerah bersama-sama dengan usaha menurunkan angka pengangguran daerah. Juga tetap menyediakan infrastruktur dasar yang memadai. Belanja daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan (*Money follow programme priority*) sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah. Belanja daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, Belanja Tidak Terduga, yang tepat dan proporsional harus diwujudkan dalam rangka menjaga kualitas fiskal daerah. Rencana pendanaan dan belanja pembangunan daerah tahun 2021-2026 tertuang dalam **Tabel 8.1**.

Tabel 8.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 – 2026 Provinsi Sulawesi Utara

NO.	URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
II.	**BELANJA**	**4.087.615.938.923,00**	**3.607.651.559.723,33**	**3.757.534.043.768,33**	**3.867.787.853.856,00**	**3.917.308.539.438,00**
II.1	**Belanja Operasi**	**3.061.443.855.553,00**	**2.766.735.146.619,30**	**2.933.727.018.560,07**	**2.861.430.486.781,07**	**2.908.422.946.334,78**
II.1.1	Belanja Pegawai	1.366.234.187.402,00	1.407.221.213.024,06	1.449.437.849.414,78	1.492.920.984.897,23	1.537.708.614.444,14
II.1.2	Belanja Barang dan Jasa	887.200.609.693,00	536.566.309.349,95	542.279.511.257,02	696.693.335.954,77	706.693.335.954,77
II.1.3	Belanja Bunga	36.106.503.797,00	68.610.305.514,50	51.669.510.491,91	37.102.235.282,60	28.243.164.358,10
II.1.4	Belanja Subsidi	4.400.000.000,00	4.532.000.000,00	4.667.960.000,00	4.807.998.800,00	4.952.238.764,00
II.1.5	Belanja Hibah	739.448.552.539,00	720.909.696.545,13	855.909.696.545,13	599.250.566.269,70	599.250.566.269,70
II.1.6	Bantuan Sosial	28.054.002.122,00	28.895.622.185,66	29.762.490.851,23	30.655.365.576,77	31.575.026.544,07
II.2	**Belanja Modal:**	**562.085.671.563,00**	**299.406.089.981,70**	**279.299.392.392,27**	**458.762.505.274,45**	**458.110.885.448,73**
II.2.1	Belanja Modal Tanah	39.735.594.774,00	25.375.150.822,68	24.450.185.647,53	43.420.157.270,61	44.722.761.988,73
II.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.827.300.593,00	64.184.914.158,69	71.116.238.255,48	97.234.917.667,38	97.234.917.667,38
II.2.3	Belanja ModalGedung dan Bangunan	168.307.562.294,00	97.481.209.280,95	76.404.987.315,92	111.434.677.262,20	109.436.746.042,32
II.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	220.881.953.901,00	110.991.557.918,36	105.913.525.638,27	205.215.863.873,15	205.215.863.873,15
II.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.333.260.001,00	1.373.257.801,03	1.414.455.535,06	1.456.889.201,11	1.500.595.877,15
II.3	**Belanja Tidak terduga**	**7.000.313.711,00**	**7.210.323.122,33**	**7.426.632.816,00**	**7.649.431.800,48**	**7.878.914.754,49**
II.3.1	Belanja Tidak terduga	7.000.313.711,00	7.210.323.122,33	7.426.632.816,00	7.649.431.800,48	7.878.914.754,49
II.4	**Belanja Transfer**	**457.086.098.096,00**	**534.300.000.000,00**	**537.081.000.000,00**	**539.945.430.000,00**	**542.895.792.900,00**
II.4.1	Belanja Bagi Hasil	367.086.098.096,00	441.600.000.000,00	441.600.000.000,00	441.600.000.000,00	441.600.000.000,00
II.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	90.000.000.000,00	92.700.000.000,00	95.481.000.000,00	98.345.430.000,00	101.295.792.900,00

Kerangka Pendanaan pembangunan daerah dapat dijelaskan menurut struktur belanja daerah meliputi:

1. **Belanja Operasi**

   Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis:

   a. Belanja Pegawai
      Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai ASN dan Non ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Belanja Barang dan Jasa.
      Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
   c. Belanja Bunga
      Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Belanja Subsidi
      Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.
   e. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
      - Belanja Hibah
        Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - Belanja Bantuan Sosial
        Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Belanja Modal**

   Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

3. **Belanja Transfer**

   Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

4. **Belanja Tidak terduga**

   Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Memperhatikan kerangka pendanaan yang diuraikan diatas, maka dijabarkanlah dalam rencana program prioritas daerah seluruh perangkat daerah yang kemudian dituangkan dalam Rencana Strategi Perangkat Daerah (RENSTRA-PD). Pada Tabel 7.2 memuat seluruh program yang dirumuskan dalam RENSTRA-PD beserta indikator kinerja, target perangkat daerah, pagu indikatif, berdasarkan bidang urusan.

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2021-2026 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkenaan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan.

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

1.1. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada Pengelolaan SMA, Pengelolaan pendidikan SMK, pengelolaan pendidikan khusus.

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Tingkat partisipasi warga negara Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah; APK; APM; dan APS.

1.2. Program Pengembangan Kurikulum

Program pengembangan kurikulum diarahkan indikator kinerjanya untuk meningkatkan Jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan yang terserap dalam pasar tenaga kerja; Jumlah lulusan pendidikan menengah atas yang melanjutkan ke tahapan pendidikan lanjutan (perguruan tinggi/non perguruan tinggi); Jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan yang terserap dalam pasar tenaga kerja; dan Jumlah lulusan pendidikan menengah atas yang melanjutkan ke tahapan pendidikan lanjutan (perguruan tinggi/non perguruan tinggi);

1.3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Atas penyebarannya di Sulawesi Utara diharapkan dapat merata dalam kualitas dan kuantitas lewat program ini.

2. Kesehatan

2.1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini ditujukan untuk meningkatkan Presentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi khusus Rumah Sakit sehingga pelayanan terhadap masyarakat lebih optimal.

2.2. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan

Kebutuhan tenaga medis dengan tingkat spesialisasi dan profesionalisme kesehatan untuk melayani masyarakat yang tersebar secara merata dengan program ini dapat memenuhi kebutuhan indikator kinerja Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Sulawesi Utara.

2.3. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan alat kesehatan yang dibutuhkan

dengan indikator kinerja Persentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1. Program Pengelolaan sumberdaya Air (SDA)

Pendayagunaan sumber daya air sebagai salah satu upaya pengelolaan sumber daya air, dilakukan melalui penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Keberhasilan Program ini ditujukan dengan meningkatnya Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi.

3.2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam konteks wilayah, harus mampu menyediakan air yang dapat diminum dalam jumlah yang cukup merupakan hal penting bagi suatu kota yang modern. Suatu sistem penyediaan air yang modern meliputi **sumber-sumber penyediaan,** sarana-sarana **penampungan,** sarana-sarana penyaluran.

Pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan dasar masyarkat ini dengan menintkatkan indikator kinerja yang ditunjukan dengan Persentase Kapasitas Yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas Yang Memerlukan Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota.

3.3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan **persampahan** secara regional serta meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah **dan** berupaya untuk meningkatkan nilai guna dari sampah yang diindikasikan dengan bertambahnya Jumlah TPA Regional Yang Dioperasikan Dengan Sistem *Sanitary Landfill* di Sulawesi Utara.

3.4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Pencapaian target kualitas dan tingkat pelayanan sektor air limbah menjadi sasaran strategis pelayanan bagi masyarakat yang ditunjukan dengan peningkatan indikator Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik Oleh SPAL Regional.

3.5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pengembangan prasarana dan sarana air limbah yang sitematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap kebutuhan sesuai karakteristik lingkungan dan sosial ekonomi daerah, serta tanggap terhadap kebutuhan stakeholder. Untuk mencapai target ini pemerintah menetapkan target rencana terhadap jumlah sistem drainase yang terbangun dan terhubung dengan sungai lintas kab/kota dan yang berada di kawasan strategis.

3.6. Program Pengembangan Permukiman

Penyediaan strategi pengembangan permukiman dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan permukiman dan infrastruktur ditujukan pada program ini untuk meningkatkan indikator kinerja pada Jumlah Kawasan Strategis Provinsi Yang Memperoleh Pengembangan Infrastruktur Permukiman.

3.7. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan yang tertib, andal, berkualitas, produktif, layak huni dan berjati diri untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai target kinerja maka pemerintah berupaya meningkatkannya lewat persentase Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi Yang Dibangun / Direhab / Direnovasi / Ubahsuai / Dipelihara Dan Dirawat yang semakin bertambah ditiap tahun pelaksanaan.

3.8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini diarahkan untuk Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Kawasan Yang Ditata Bangunan Dan Lingkungannya

3.9. Program Penyelengaraan Jalan

Program ini diarahkan untuk Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasio Kemantapan Jalan Provinsi

3.10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan untuk Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi, Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli

3.11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan untuk Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasio Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW

4. Perumahan dan Kawasan permukiman

4.1. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan untuk Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan danRehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni

4.2. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan untuk Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah15 (Lima Belas) Ha, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Terlaksananya Kegiatan Pendataan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha Sesuai Kewenangan Provinsi

4.3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan untuk Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Jumlah Kab/Kota Dengan Satuan Perumahan Yang Dilengkapi Dengan PSU

4.4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan registrasi Bidang Perumahan dan Permukiman

Program ini diarahkan untuk Sertifikasi dan Registrasi bagi nOrang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

5.1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindunga masyarakat.

Program ini diarahkan untuk, Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah, Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan

5.2. Program Penanggulangan Bencana.

Program ini diarahkan untuk Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana

5.3. Program Penanggulangan Kebakaran.

Program ini diarahkan untuk Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Di Provinsi Kabupaten/Kota

6. Sosial

6.1. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan untuk Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Terlatih Dan Produktif

6.2. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti, Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Dalam Panti

6.3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Program ini diarahkan untuk Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal, Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Peningkatan Perlindungan Dan Jaminan Sosial

6.4. Program Penanganan Bencana.

Program ini diarahkan untuk Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Provinsi

6.5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase pengelolaan taman makam pahlawan yang dilaksanakan.

B. Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar:

1. Tenaga Kerja

1.1. Program Perencanaan Tenaga Kerja.

Program ini diarahkan untuk Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja

1.2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Program ini diarahkan untuk Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah, Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

1.3. Program Penempatan Tenaga Kerja.

Program ini diarahkan untuk Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi, Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten Kota Dalam Satu Daerah Provinsi

1.4. Program hubungan industrial
Program ini diarahkan untuk Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi, Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah Dan Terdaftar Peserta Bpjs Ketenagakerjaan

1.5. Program pengawasan ketenagakerjaan
Program ini diarahkan untuk Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan

2. Pengarusutamaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
Program ini diarahkan untuk Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD.

2.2. Program perlindungan perempuan
Program ini diarahkan untuk Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan).

2.3. Program peningkatan kualitas keluarga
Program ini diarahkan untuk Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasio Keluarga Yang Memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 10.000 KK)

2.4. Program pengelolaan sistem data gender dan anak
Program ini diarahkan untuk Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender Dan Anak Yang Diperbaharui Secara Berkala

2.5. Program pemenuhan hak anak (PHA)
Program ini diarahkan untuk Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Untuk Mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak.

2.6. Program perlindungan khusus anak
Program ini diarahkan untuk Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

3. Pangan

3.1. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
Program ini diarahkan untuk Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Cadangan Pangan

3.2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
Program ini diarahkan untuk Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan

Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan

3.3. Program penanganan kerawanan pangan
Program ini diarahkan untuk Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi, Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan.

3.4. Program pengawasan keamanan pangan
Program ini diarahkan untuk Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase pangan segar asal tumbuhan yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan.

4. Pertanahan

4.1. Program pengelolaan izin lokasi
Program ini diarahkan untuk Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukan Tanahnya Di Atas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi Yang Ditertibkan

4.2. Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Program ini diarahkan untuk Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Selesai Tepat Waktu.

4.3. Program penyelesaian sengketa tanah garapan
Program ini diarahkan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Tepat Waktu

5. Lingkungan Hidup

5.1. Program perencanaan lingkungan hidup
Program ini diarahkan untuk Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi, Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja tersusunnya RPPLH dan KLHS provinsi.

5.2. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Program ini diarahkan untuk Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi

5.3. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja jumlah taman kehati yang dikelola provinsi.

5.4. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun
Program ini diarahkan untuk Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
jumlah usaha/kegiatan yang melakukan pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota

5.5. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).
Program ini diarahkan untuk Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi.

5.6. Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH.
Program ini diarahkan untuk Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja jumlah MHA dan/atau kearifan lokal yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.

5.7. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.
Program ini diarahkan untuk Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja terlaksananya kegiatan peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.

5.8. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat.
Program ini diarahkan untuk Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja jumlah penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat.

5.9. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup.
Program ini diarahkan untuk Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani.

5.10. Program pengelolaan persampahan
Program ini diarahkan untuk Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja prosentase jumlah sampah yang tertangani di TPA regional.

6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

6.1. Program pendaftaran penduduk.

Program ini diarahkan untuk Pelayanan Pendaftaran Kependudukan, Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja cakupan penerbitan kartu tanda penduduk.

6.2. Program pencatatan sipil.

Program ini diarahkan untuk Pelayanan Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi, Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja cakupan penerbitan akta pencatatan sipil (lahir, mati, kawin, cerai).

6.3. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Program ini diarahkan untuk Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Pemanfaatan Data Kependudukan.

6.4. Program pengelolaan profil kependudukan

Program ini diarahkan untuk Penyediaan Profil Kependudukan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam Satu Tahun.

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

7.1. Program penataan desa

Program ini diarahkan untuk Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja presentasi desa yang difasilitasi dalam penataan desa.

7.2. Program peningkatan kerjasama desa

Program ini diarahkan untuk Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase pelaksanaan program peningkatan kerjasama desa.

7.3. Program administrasi pemerintahan desa

Program ini diarahkan untuk Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase pelaksanaan program administrasi pemerintahan desa.

7.4. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Program ini diarahkan untuk Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat

Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase pelaksanaan program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

8.1. Program pengendalian penduduk

Program ini diarahkan untuk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk

8.2. Program pembinaan keluarga berencana (KB)

Program ini diarahkan untuk Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR)

8.3. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)

9. Perhubungan

9.1. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

Program ini diarahkan untuk Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi, Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Penetapan Wilayah Operasi

Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasio Konektivitas Provinsi.

9.2. Program pengelolaan pelayaran.

Program ini diarahkan untuk Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi, Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional, Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan, Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi, Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas, Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional, Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional, Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional, Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional, Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional, Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional, Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional, Penerbitan Izin

Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum.

9.3. Program pengelolaan perkeretaapian

Program ini diarahkan untuk Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian, Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah, Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi, Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi, Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Jumlah Kegiatan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi Di Kab/Kota.

10. Komunikasi dan Informatika

10.1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Media Yang Melaksanakan Penyebaran Informasi Publik Tentang Kebijakan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi;

10.2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar

11. Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah

11.1. Program Pelayanan izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini diarahkan untuk Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Jumlah KSP / USP Yang Terfasilitasi Dalam Pelayanan Izin.

11.2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarakan untuk Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Pemeriksaan

dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja meningkatnya koperasi yang berkualitas.

11.3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP/Koperasi

Program ini diarahkan untuk Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Koperasi Aktif

11.4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.

Program ini diarahkan untuk Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Jumlah SDM Pengelola Koperasi Dan UMKM Yang Dilatih.

11.5. Program Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.

Program ini diarahkan untuk Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja jumlah KUMKM yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan kemudahan dan perlindungan KUMKM

11.6. Program Pemberdayaan Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan untuk Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) naik kelas.

11.7. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan untuk Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja jumlah UMKM yang meningkat akses promosi dan pemasarannya

12. Penanaman Modal

12.1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Program ini diarahkan untuk Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentasi peningkatan investasi di provinsi

12.2. Program Promosi Penanaman Modal.

Program ini diarahkan untuk Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja peningkatan jumlah kerjasama penanaman modal/MOU

12.3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penanaman Modal

yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal sesuai NSPK tepat waktu

12.4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
Program ini diarahkan untuk Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentasi peningkatan penyampaian LKPM

12.5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Program ini diarahkan untuk Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja jumlah laporan realisasi penanaman modal tepat waktu

13. Kepemudaan dan Olahraga

13.1. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.
Program ini diarahkan untuk Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi, Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.

13.2. Program pengembangan daya saing keolahragaan.
Program ini diarahkan untuk Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja peningkatan prestasi olahraga.

13.3. Program pengembangan kapasitas kepramukaan.
Program ini diarahkan untuk Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.

14. Statistik

14.1. Program penyelenggaraan statistik sektoral
Program ini diarahkan untuk Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

15. Persandian

15.1. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
Program ini diarahkan untuk Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah.

16. Kebudayaan

16.1. Program pengembangan kebudayaan

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat.

16.2. Program pengembangan kesenian tradisional

Program ini diarahkan untuk Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas).

16.3. Program pembinaan sejarah

Program ini diarahkan untuk Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah.

16.4. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

Program ini diarahkan untuk Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi, Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi, Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang ditetapkan.

16.5. Program pengelolaan permuseuman

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Museum Provinsi

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Standar Pengelolaan Museum Negeri.

17. Perpustakaan

17.1. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi, Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

17.2. Program Pelestarian koleksi nasional dan naskah Kuno.

Program ini diarahkan untuk Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi, Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah, Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi, Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja indeks pembangunan literasi masyarakat.

18. Kearsipan

18.1. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi, Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi, Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional.

18.2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan untuk Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi , Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota, Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi, Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban

18.3. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Program ini diarahkan untuk Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

1.1. Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan PulauPulau Kecil.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

1.2. Program pengelolaan perikanan tangkap

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil, Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT, Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil, Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi, Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT, Penerbitan Izin Pengadaan

Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT, Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja jumlah total produksi perikanan tangkap di laut dan perairan umum daratan (PUD) dari seluruh kab/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara

1.3. Program pengelolaan perikanan budidaya

Program ini diarahkan untuk Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing, Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing, Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Dari Seluruh Kab/Kota Di Wilayah Provinsi.

1.4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil, Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

1.5. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Program ini diarahkan untuk Penerbit, an Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar, Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja tingkat konsumsi ikan masyarakat.

2. Pariwisata

2.1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi, Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi, Penetapan Tanda Daftar Usaha

Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan.

2.2. Program pemasaran pariwisata

Program ini diarahkan untuk Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.

2.3. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual

Program ini diarahkan untuk Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif, Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja

2.4. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

Program ini diarahkan untuk Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan, Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku.

3. Pertanian

3.1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

Program ini diarahkan untuk Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi, Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi, Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi, Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor, Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja peningkatan produksi pertanian kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB.

3.2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

Program ini diarahkan untuk Penataan Prasarana Pertanian, Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Peningkatan Produktivitas Pertanian Per Hektar Pertahun.

3.3. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Program ini diarahkan untuk Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan

Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi, Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan, Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentasi Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular.

3.4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

Program ini diarahkan untuk Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase fasilitasi penanggulangan bencana rasio serangan OPT dan DPI yang ditangani terhadap luas serangan dan DPI pada tanaman perkebunan.

3.5. Program perizinan usaha pertanian

Program ini diarahkan untuk Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi, Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan.

3.6. Program penyuluhan pertanian

Program ini diarahkan untuk Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian meningkatnya kemampuan dan profesionalisme petani dan pelaku usaha perkebunan.

4. Kehutanan

4.1. Program pengelolaan hutan

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi, Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara, Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi, Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi, Perbenihan Tanaman Hutan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja presentase luas lahan kritis yang direhabilitasi

4.2. Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Program ini diarahkan untuk Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi, Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi, Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja presentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi).

4.3. Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
Program ini diarahkan untuk Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Peningkatan Akses Legal Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Social.

4.4. Program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)
Program ini diarahkan untuk Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS.

5. Energi dan Sumberdaya Mineral

5.1. Program pengelolaan aspek kegeologian
Program ini diarahkan untuk Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi, Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi, Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Presentase Pengelolaan Air Tanah, Sumber Daya Geologi Dan Mitigasi Bencana Geologi

5.2. Program pengelolaan mineral dan batubara
Program ini diarahkan untuk Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil, Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut, Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama, Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan yang Kegiatan Usahanya Dilakukan

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Kewenangannya, Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan oleh Gubernur pada Saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Presentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda

5.3. Program pengelolaan energi terbarukan

Program ini diarahkan untuk Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan, Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun, Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja porsi EBT dalam bauran energi nasional

5.4. Program pengelolaan ketenagalistrikan

Program ini diarahkan untuk Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi, Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi, Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi, Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi, Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri, Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasio Elektrifikasi.

6. Perdagangan

6.1. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan

Program ini diarahkan untuk Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor, Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi, Pengendalian Usaha

Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API).

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pertimbangan Teknis Yang Diterbitkan Ijin

6.2. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan

Program ini diarahkan untuk Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok

6.3. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Program ini diarahkan untuk Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan, Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja laju inflasi terkendali

6.4. Program pengembangan ekspor

Program ini diarahkan untuk Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja pertumbuhan nilai ekspor non migas

6.5. Program standardisasi dan perlindungan konsumen

Program ini diarahkan untuk Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen

6.6. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Program ini diarahkan untuk Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri, Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase penggunaan produk dalam negeri

7. Perindustrian

7.1. Program perencanaan dan pembangunan industri.

Program ini diarahkan untuk Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN Yang Ditetapkan Dalam RPIP

7.2. Program pengendalian izin usaha industri.

Program ini diarahkan untuk Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pertimbangan Teknis Yang Diterbitkan Ijin

7.3. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional.

Program ini diarahkan untuk Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja tersedianya informasi secara lengkap dan terkini

8. Transmigrasi

8.1. Program perencanaan kawasan transmigrasi

Program ini diarahkan untuk Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Difasilitasi Penetapannya

8.2. Program pembangunan kawasan transmigrasi

Program ini diarahkan untuk Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Satuan Pemukiman Transmigrasi Yang Difasilitasi Pembinaannya

D. Unsur Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

1.1. Program Administrasi Umum

Program ini diarahkan untuk pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan serta keprotokolan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

1.2. Program Penataan Organisasi

Program ini diarahkan untuk fasilitasi penataan kelembagaan Provinsi, Kabupaten/Kota, penataan analisis jabatan, Pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, evaluasi pelaksanaan budaya kerja, pengelolaan tatalaksana pemerintahan, dan fasilitasi peningkatan pelayanan publik.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.

1.3. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Program ini diarahkan untuk kegiatan Pelaksanaan Otonomi daerah mencakup fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi dan penataan uruan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan, serta kegiatan Fasilitasi kerjasama daerah mencakup fasilitasi kerjasama antar pemerintah, Badan Usaha/Swasta dan evaluasi pelaksanaan kerjasama tersebut.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja perolehan Nilai Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD).

1.4. Program Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan untuk kegiatan Fasilitasi pembinaan mental spiritual, fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase rekomendasi pelaksanaan program kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti.

1.5. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Program ini diarahkan untuk kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persetase produk hukum daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.6. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan untuk kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase rekomendasi pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti.

1.7. Program Kebijakan dan pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program ini diarahkan untuk kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase pelaksanaan kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa.

1.8. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Program ini diarahkan untuk kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase pelaksanaan program kebijakan administrasi pembangunan.

2. Sekretariat DPRD

2.1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan untuk kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat, serta Pembahasan kerjasama daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

E. Unsur Fungsi Penunjang urusan pemerintahan.

1. Perencanaan

1.1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Program ini diarahkan untuk kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja tersedianya dokumen kebijakan perencanaan daerah baik jangka panjang, menengan dan Tahunan.

1.2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

Program ini diarahkan untuk kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja tersedianya dokumen kebijakan perencanaan daerah baik jangka panjang, menengan dan Tahunan.

2. Keuangan

2.1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan untuk kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, serta Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Opini Laporan Kinerja yang dikeluarkan oleh BPK.

2.2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan untuk kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah mencakup Penyusunan Standar Harga, Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah, Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Inventarisasi Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah, Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, serta Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja jumlah dokumen manajemen aset.

2.3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini dirahkan untuk kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah mencakup Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, Penetapan Wajib Pajak Daerah, Pelayanan

dan Konsultasi Pajak Daerah, Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, Penagihan Pajak Daerah, Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, serta Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasio Pendapatan daerah (PAD) yang merupakan perbandingan PAD terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Utara.

3. Kepegawaian

3.1. Program Kepegawaian Daerah

Program ini diarahkan untuk kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Penerapan Merit Sistem yang menjadi kewenangan BKD.

4. Pendidikan Dan Pelatihan

4.1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan untuk kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, serta Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompetensi.

5. Penelitian Dan Pengembangan

5.1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program ini diarahkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.

6. Penghubung

6.1. Program Pelayanan Penghubung

Program ini diarahkan untuk kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung mencakup Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat, Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat, Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya, Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya, serta Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pelayanan Penghubung.

7. Pengelolaan Perbatasan

7.1. Program Pengelolaan Perbatasan

Program ini diarahkan untuk kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama, Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan serta Monitoring dan Evaluasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan, ditetapkan, diawasi dan dievaluasi.

F. Unsur Fungsi Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

1.1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja perolehan Opini dari BPK.

1.2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program ini diarahkan untuk kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, serta Pendampingan dan Asistensi

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja perolehan Persentase capaian pelaksanaan PKPT.

G. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesbangpol

1.1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan untuk kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja perolehan Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

1.2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Program ini diarahkan untuk kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja perolehan Persentase pelaksanaan program peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

1.3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan untuk kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja perolehan Persentase pelaksanaan program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

1.4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini diarahkan untuk kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja perolehan Persentase ORMAS, LSM, FKUB yang mendapat pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

1.5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Program ini diarahkan untuk kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase kasus TRANTIBUM yang diselesaikan (persentase perbandingan jumlah kasus TRANTIBUM yang terdata dan jumlah kasus yang diselesaikan).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas perangkat daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional OPD yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**, dengan kegiatannya diarahkan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
10. Peningkatan Pelayanan BLUD
11. Kegiatan khusus untuk Sekretariat Daerah mencakup Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan, serta Fasilitasi Keprotokolan.
12. Kegiatan khusus untuk Sekreatriat DPRD mencakup Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, serta Layanan Adminstrasi DPRD.

Secara lengkap penjabaran Program Prioritas seluruh Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, tersaji dalam Tabel 8.2.

8.2. Kerangka Pendanaan Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Apabila hanya berdasarkan pada kemampuan fiskal yang berpotensi tidak sepenuhnya dapat membiayai kebutuhan belanja pembangunan, maka kerangka pendanaan non APBD direncanakan akan diperoleh dari:

1) Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
2) Pengembangan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).
3) Pendayagunaan peran BUMD.
4) Optimalisasi peran swasta melalui Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/ Corporate Social Responsibility (CSR);
5) Pemanfaatan sumber pembiayaan lain yang berasal dari Lembaga Donor, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), partisipasi masyarakat dan swasta.

Apabila pendanaan non APBD ini dapat dilaksanakan maka kerangka pendanaan APBD tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan di Bab III dalam Tabel Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021-2026 Provinsi Sulawesi Utara, akan dilakukan penyesuaian dalam rencana tahunan.

Tabel 8.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	TOTAL				**4.087.615.938.923,00**		**3.607.651.559.723,33**		**3.757.534.043.768,33**		**3.867.787.853.856,00**		**3.917.308.539.438,00**		**3.917.308.539.438,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.406.161.471.027,00**		**2.123.720.300.234,46**		**2.211.951.790.650,44**		**2.276.855.025.008,07**		**2.306.006.422.672,45**		**2.306.006.422.672,45**	
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**1.471.830.689.557,00**		**1.299.009.584.601,04**		**1.352.977.873.975,75**		**1.392.677.039.394,50**		**1.410.507.986.796,74**		**1.410.507.986.796,74**	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	634.993.437.254,00	100%	560.433.049.130,11	100%	583.716.644.054,39	100%	600.844.096.066,52	100%	608.536.920.153,41	100%	608.536.920.153,41	Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100	100	832.937.252.303,00	100	735.134.470.146,51	100	765.676.161.512,38	100	788.142.681.606,87	100	798.233.557.167,87	100	798.233.557.167,87	Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL	100	100	400.000.000,00	100	353.032.340,97	100	367.699.324,00	100	378.488.381,65	100	383.334.305,18	100	383.334.305,18	Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	1:14	1:14	1.000.000.000,00	1:14	882.580.852,42	1:13	919.248.310,00	1:13	946.220.954,13	1:12	958.335.762,94	1:12	958.335.762,94	Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	0	100%	1.500.000.000,00	100%	1.323.871.278,62	100%	1.378.872.464,99	100%	1.419.331.431,20	100%	1.437.503.644,41	100%	1.437.503.644,41	Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	0	100%	1.000.000.000,00	100%	882.580.852,42	100%	919.248.310,00	100%	946.220.954,13	100%	958.335.762,94	100%	958.335.762,94	Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**460.221.640.061,00**		**406.182.807.385,26**		**423.057.964.849,74**		**435.471.359.371,06**		**441.046.856.549,87**		**441.046.856.549,87**	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	137.710.910.335,00	100%	121.541.012.630,43	100%	126.590.521.593,48	100%	130.304.948.971,68	100%	131.973.290.321,21	100%	131.973.290.321,21	Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	(80,39%)	100%	291.510.729.726,00	100%	257.281.788.329,94	100%	267.970.745.646,37	100%	275.833.560.821,27	100%	279.365.157.577,49	100%	279.365.157.577,49	Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	45/100.000 penduduk	45/100.000 penduduk	21.000.000.000,00	45/100.000 penduduk	18.534.197.900,73	45/100.000 penduduk	19.304.214.509,92	50/100.000 penduduk	19.870.640.036,79	50/100.000 penduduk	20.125.051.021,76	50/100.000 penduduk	20.125.051.021,76	Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100%	100%	2.000.000.000,00	100%	1.765.161.704,83	100%	1.838.496.619,99	100%	1.892.441.908,27	100%	1.916.671.525,88	100%	1.916.671.525,88	Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT	100%	100%	8.000.000.000,00	100%	7.060.646.819,33	100%	7.353.986.479,97	100%	7.569.767.633,06	100%	7.666.686.103,53	100%	7.666.686.103,53	Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**357.658.881.200,00**		**315.662.880.243,60**		**328.777.322.098,22**		**338.424.327.823,12**		**342.757.296.787,47**		**342.757.296.787,47**	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG	100%	100%	82.434.399.200,00	100%	72.755.022.314,33	100%	75.777.682.150,15	100%	78.001.155.864,38	100%	78.999.832.849,92	100%	78.999.832.849,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														Daerah Prov. Sulut
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	RASIO LUAS DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI YANG DILAYANI OLEH JARINGAN IRIGASI	0,84	0,857	61.487.000.000,00	0,874	54.267.248.872,49	0,891	56.521.820.836,73	0,909	58.180.287.806,76	0,927	58.925.191.055,96	0,927	58.925.191.055,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE KAPASITAS YANG DAPAT TERLAYANI MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA TERHADAP KEBUTUHAN PEMENUHAN KAPASITAS YANG MEMERLUKAN PEMENUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA	2%	9%	11.800.000.000,00	10%	10.414.454.058,51	11%	10.847.130.057,95	13%	11.165.407.258,77	15%	11.308.362.002,71	15%	11.308.362.002,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	JUMLAH TPA REGIONAL YANG DIOPERASIKAN DENGAN SISTEM SANITARY LANDFILL	0	1	2.750.000.000,00	1	2.427.097.344,14	1	2.527.932.852,49	1	2.602.107.623,87	1	2.635.423.348,09	1	2.635.423.348,09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	RASIO PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK OLEH SPAL REGIONAL	0,02	0,06	3.558.388.000,00	0,06	3.140.565.114,27	0,07	3.271.042.155,31	0,08	3.367.021.288,53	0,08	3.410.130.478,82	0,08	3.410.130.478,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	JUMLAH SISTEM DRAINASE YANG TERBANGUN DAN TERHUBUNG DENGAN SUNGAI LINTAS KAB/KOTA DAN YANG BERADA DI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI	3	1	3.300.000.000,00	1	2.912.516.812,97	1	3.033.519.422,99	1	3.122.529.148,64	1	3.162.508.017,71	1	3.162.508.017,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	JUMLAH KAWASAN STRATEGIS PROVINSI YANG MEMPEROLEH PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	1	2	8.250.000.000,00	2	7.281.292.032,43	2	7.583.798.557,47	2	7.806.322.871,60	2	7.906.270.044,26	11	7.906.270.044,26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS PROVINSI YANG DIBANGUN / DIREHAB / DIRENOVASI / UBAHSUAI / DIPELIHARA DAN DIRAWAT	100%	100%	51.650.000.000,00	100%	45.585.301.027,28	100%	47.479.175.211,30	100%	48.872.312.280,96	100%	49.498.042.155,91	100%	49.498.042.155,91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTASE KAWASAN YANG DITATA BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	100%	100%	4.789.356.000,00	100%	4.226.993.901,00	100%	4.402.607.408,97	100%	4.531.789.004,00	100%	4.589.811.136,26	100%	4.589.811.136,26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	RASIO KEMANTAPAN JALAN PROVINSI	0,89	0,894	115.636.000.000,00	0,899	102.058.119.449,96	0,903	106.298.197.574,72	0,908	109.417.206.252,10	0,912	110.818.114.283,46	0,912	110.818.114.283,46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	RASIO TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DI WILAYAH PROVINSI YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI	0,05	0,051	260.000.000,00	0,054	229.471.021,63	0,056	239.004.560,60	0,059	246.017.448,07	0,062	249.167.298,36	0,062	249.167.298,36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	RASIO KESESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN DENGAN RTRW	0,53	0,6	11.743.738.000,00	0,68	10.364.798.294,59	0,77	10.795.411.309,54	0,86	11.112.170.975,45	0,95	11.254.444.116,01	0,95	11.254.444.116,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**				**43.021.316.120,00**		**38.058.047.938,48**		**39.639.196.968,12**		**40.802.292.882,53**		**41.324.699.382,88**		**41.324.699.382,88**	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	11.213.310.651,00	100%	9.896.653.272,76	100%	10.307.816.865,39	100%	10.610.269.503,18	100%	10.746.116.617,82	100%	10.746.116.617,82	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG MEMPEROLEH FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI	0%	2%	1.338.546.741,00	4%	1.181.375.723,67	6%	1.230.456.829,52	8%	1.266.560.974,42	10%	1.282.777.212,27	10%	1.282.777.212,27	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH 10 - 15 HEKTAR YANG DITANGANI	0	100%	1.250.000.000,00	100%	1.103.226.065,52	100%	1.149.060.387,50	100%	1.182.776.192,67	100%	1.197.919.703,68	100%	1.197.919.703,68	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE SATUAN PERUMAHAN YANG DILENGKAPI DENGAN PSU	47%	54%	29.219.458.728,00	61%	25.788.534.791,29	68%	26.859.938.054,72	75%	27.648.064.116,85	82%	28.002.052.272,82	82%	28.002.052.272,82	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	88.258.085,24	1 Kegiatan	91.924.831,00	1 Kegiatan	94.622.095,41	1 Kegiatan	95.833.576,29	5 Kegiatan	95.833.576,29	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**48.088.691.560,00**		**42.442.158.388,59**		**44.205.448.446,46**		**45.502.527.610,90**		**46.085.112.914,99**		**46.085.112.914,99**	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	11.773.359.589,00	100%	10.390.941.741,86	100%	10.822.640.905,17	100%	11.140.199.543,65	100%	11.282.831.544,10	100%	11.282.831.544,10	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulut
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	9.648.706.773,00	100%	8.515.763.848,43	100%	8.869.557.394,73	100%	9.129.808.528,90	100%	9.246.700.766,70	100%	9.246.700.766,70	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	100%	100%	20.242.914.804,00	100%	17.866.009.003,10	100%	18.608.265.222,97	100%	19.154.270.160,27	100%	19.399.509.202,84	100%	19.399.509.202,84	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulut
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA TANGGUH BENCANA	100%	100%	978.692.000,00	100%	863.774.819,61	100%	899.660.967,01	100%	926.058.878,04	100%	937.915.544,50	100%	937.915.544,50	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulut
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA TANGGUH BENCANA	100%	100%	4.251.653.394,00	100%	3.752.427.876,65	100%	3.908.325.197,12	100%	4.023.003.531,11	100%	4.074.511.499,10	100%	4.074.511.499,10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DI PROVINSI KABUPATEN/KOTA	100%	100%	1.193.365.000,00	100%	1.053.241.098,94	100%	1.096.998.759,46	100%	1.129.186.968,93	100%	1.143.644.357,74	100%	1.143.644.357,74	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**25.340.252.529,00**		**22.364.821.677,48**		**23.293.984.312,16**		**23.977.477.925,96**		**24.284.470.240,50**		**24.284.470.240,50**	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	16.240.101.999,00	100%	14.333.203.065,60	100%	14.928.686.316,75	100%	15.366.724.808,71	100%	15.563.470.539,45	100%	15.563.470.539,45	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE POTENSI SUMBER (PSKS) KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG TERLATIH DAN PRODUKTIF	5%	10%	403.734.159,00	15,20%	356.328.038,20	20,40%	371.131.943,35	25,80%	382.021.721,14	31,30%	386.912.883,29	31,30%	386.912.883,29	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG TERTANGANI	0%	0%	-	100%	8.568.746,14	100%	8.924.740,87	100%	9.186.611,21	100%	9.304.230,71	100%	9.304.230,71	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100%	100%	4.831.416.371,00	100%	4.264.115.579,09	100%	4.441.271.333,93	100%	4.571.587.408,38	100%	4.630.119.093,99	100%	4.630.119.093,99	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	0%	100%	2.965.000.000,00	100%	2.616.852.227,41	100%	2.725.571.239,14	100%	2.805.545.129,00	100%	2.841.465.537,12	100%	2.841.465.537,12	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI	100%	100%	475.000.000,00	100%	410.657.158,76	100%	427.718.206,37	100%	440.268.342,01	100%	445.905.256,69	100%	445.905.256,69	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG DILAKSANAKAN	100%	100%	425.000.000,00	100%	375.096.862,28	100%	390.680.531,75	100%	402.143.905,51	100%	407.292.699,25	100%	407.292.699,25	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**272.771.978.976,00**		**240.655.067.634,56**		**250.653.255.857,00**		**258.007.940.111,94**		**261.311.309.004,63**		**261.311.309.004,63**	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**32.997.636.707,00**		**29.123.082.332,57**		**30.333.021.776,78**		**31.223.055.289,02**		**31.622.815.348,86**		**31.622.815.348,86**	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	19.250.134.285,00	100%	16.989.799.926,38	100%	17.695.653.408,69	100%	18.214.880.430,34	100%	18.448.092.126,73	100%	18.448.092.126,73	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENYUSUN RENCANA TENAGA KERJA	26,6%	33%	75.000.000,00	46%	66.193.563,93	53%	68.943.623,25	66%	70.966.571,56	80%	71.875.182,22	80%	71.875.182,22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	60%	65%	485.939.505,00	70%	428.880.902,55	75%	446.699.068,73	80%	459.806.142,07	85%	465.693.206,27	85%	465.693.206,27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN (DALAM DAN LUAR NEGERI) MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA LINTAS DAERAH KABUPATEN KOTA DALAM SATU DAERAH PROVINSI	55,5%	60%	104.539.058,00	61%	92.264.170,92	62%	96.097.352,40	63%	98.917.047,20	64%	100.183.517,91	64%	100.183.517,91	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH DAN	30%	40%	12.375.001.774,00	50%	10.921.939.614,34	60%	11.375.699.466,95	70%	11.709.485.985,99	80%	11.859.406.766,48	80%	11.859.406.766,48	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN														
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN	75%	80%	707.022.085,00	85%	624.004.154,46	90%	649.928.856,77	95%	668.999.111,86	100%	677.564.549,24	100%	677.564.549,24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**10.223.529.000,00**		**9.023.090.939,52**		**9.397.961.755,45**		**9.673.717.364,98**		**9.797.573.464,17**		**9.797.573.464,17**	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	6.303.529.000,00	100%	5.563.373.998,05	100%	5.794.508.380,26	100%	5.964.531.224,78	100%	6.040.897.273,44	100%	6.040.897.273,44	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG APBD	25	69	960.000.000,00	70	847.277.618,32	75	882.478.377,60	80	908.372.115,97	85	920.002.332,42	85	920.002.332,42	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN)	31	29	955.000.000,00	28	842.864.714,06	26	877.882.136,05	24	903.641.011,20	22	915.210.653,61	22	915.210.653,61	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	RASIO KELUARGA YANG MEMAHAMI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (PER 10.000 KK)	10	12,5	700.000.000,00	15	617.806.596,69	17,5	643.473.817,00	20	662.354.667,89	25	670.835.034,06	25	670.835.034,06	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA PENYEDIA DATA GENDER DAN ANAK YANG DIPERBAHARUI SECARA BERKALA	75%	80%	300.000.000,00	85%	264.774.255,72	89%	275.774.493,00	93%	283.866.286,24	95%	287.500.728,88	95%	287.500.728,88	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG DIFASILITASI UNTUK MENDAPATKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK	100%	100%	505.000.000,00	100%	445.703.330,47	100%	464.220.396,55	100%	477.841.581,84	100%	483.959.560,29	100%	483.959.560,29	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	51	52	500.000.000,00	65	441.290.426,21	75	459.624.155,00	85	473.110.477,07	95	479.167.881,47	95	479.167.881,47	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**13.430.323.161,00**		**11.853.346.063,66**		**12.345.801.868,45**		**12.708.053.195,71**		**12.870.758.993,04**		**12.870.758.993,04**	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	11.040.323.161,00	100%	9.743.977.826,38	100%	10.148.798.407,56	100%	10.446.585.115,34	100%	10.580.336.519,61	100%	10.580.336.519,61	Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE CADANGAN PANGAN	93% (275 Ton)	100% (275 Ton)	90.000.000,00	100% (275 Ton)	79.432.276,72	100% (275 Ton)	82.732.347,90	100% (275 Ton)	85.159.885,87	100% (275 Ton)	86.250.218,66	100% (275 Ton)	86.250.218,66	Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	SKOR POLA PANGAN HARAPAN	94,1	94,5	1.460.000.000,00	94,5	1.288.568.044,53	94,7	1.342.102.532,59	95	1.381.482.593,03	95	1.399.170.213,89	95	1.399.170.213,89	Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN	14,03%	12,03%	280.000.000,00	10,03%	247.122.638,68	8,03%	257.389.526,80	6,03%	264.941.867,16	4,03%	268.334.013,62	4,03%	268.334.013,62	Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG SESUAI	60%	85%	560.000.000,00	89%	494.245.277,35	92%	514.77 9.053,60	96%	529.883.734,31	100%	536.668.027,25	100%	536.668.027,25	Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN														
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**42.702.696.680,00**		**37.600.324.351,05**		**39.162.456.924,37**		**40.311.564.301,18**		**40.827.687.826,18**		**40.827.687.826,18**	
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	PERSENTASE PEMANFAATAN TANAH YANG SESUAI DENGAN PERUNTUKAN TANAHNYA DI ATAS IZIN LOKASI DIBANDINGKAN DENGAN LUAS IZIN LOKASI YANG DITERTIBKAN	100%	100%	50.000.000,00	100%	44.129.042,62	100%	45.962.415,50	100%	47.311.047,71	100%	47.916.788,15	100%	47.916.788,15	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	PERSENTASE PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG SELESAI TEPAT WAKTU	33,28%	35%	1.000.000.000,00	40%	882.580.852,42	45%	919.248.310,00	50%	946.220.954,13	55%	958.335.762,94	55%	958.335.762,94	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	100%	500.000.000,00	100%	441.290.426,21	100%	459.624.155,00	100%	473.110.477,07	100%	479.167.881,47	100%	479.167.881,47	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	PERSENTASE GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TEPAT WAKTU	33,28%	35%	38.152.696.680,00	40%	33.584.581.472,56	45%	34.979.877.113,89	50%	36.006.258.959,87	55%	36.467.260.104,79	55%	36.467.260.104,79	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	0%	100%	2.000.000.000,00	100%	1.765.161.704,83	100%	1.838.496.619,99	100%	1.892.441.908,27	100%	1.916.671.525,88	100%	1.916.671.525,88	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
2.10.09	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	TERSEDIANYA LOKASI PEMBANGUNAN LINTAS KABUPATEN/KOTA	100%	100%	1.000.000.000,00	100%	882.580.852,42	100%	919.248.310,00	100%	946.220.954,13	100%	958.335.762,94	100%	958.335.762,94	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	TERLAKSANANYA PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**11.848.360.224,00**		**10.457.135.866,23**		**10.891.585.112,14**		**11.211.166.716,06**		**11.354.707.334,87**		**11.354.707.334,87**	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	9.589.383.431,00	100%	8.463.406.202,67	100%	8.815.024.512,85	100%	9.073.675.539,63	100%	9.189.849.086,48	100%	9.189.849.086,48	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	TERSUSUNNYA RPPLH DAN KLHS PROVINSI	KLHS	RPPLH DAN KLHS	420.000.000,00	KLHS	370.683.958,01	KLHS	386.084.290,20	KLHS	397.412.800,74	KLHS	402.501.020,44	KLHS	402.501.020,44	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI	70,51	70,81	527.261.825,00	71,11	465.351.190,95	71,41	484.684.541,56	71,71	498.906.187,13	72,01	505.293.863,33	72,01	505.293.863,33	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	TERLAKSANANYA PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN TAMAN KEHATI OLEH PEMERINTAH PROVINSI	0	1 Taman Kehati	75.000.000,00	1 Taman Kehati	66.193.563,93	1 Taman Kehati	68.943.623,25	1 Taman Kehati	70.966.571,56	1 Taman Kehati	71.875.182,22	1 Taman Kehati	71.875.182,22	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	JUMLAH USAHA/KEGIATAN YANG MELAKUKAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 LINTAS KAB/KOTA	2 Pelaku Usaha/Kegiatan	2 Pelaku Usaha/Kegiatan	87.500.000,00	2 Pelaku Usaha/Kegiatan	77.225.824,59	3 Pelaku Usaha/Kegiatan	80.434.227,12	3 Pelaku Usaha/Kegiatan	82.794.333,49	3 Pelaku Usaha/Kegiatan	83.854.379,26	3 Pelaku Usaha/Kegiatan	83.854.379,26	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI	50%	50%	323.071.656,00	55%	285.136.857,54	60%	296.983.073,79	65%	305.697.170,59	70%	309.611.121,94	70%	309.611.121,94	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	JUMLAH MHA DAN/ATAU KEARIFAN LOKAL YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR	-	1 Kelompok	70.000.000,00	1 Kelompok	61.780.659,67	1 Kelompok	64.347.381,70	1 Kelompok	66.235.466,79	1 Kelompok	67.083.503,41	1 Kelompok	67.083.503,41	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PENINGKATAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MAYARAKAT	-	100%	45.000.000,00	100%	39.716.138,36	100%	41.366.173,95	100%	42.579.942,94	100%	43.125.109,33	100%	43.125.109,33	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	JUMLAH PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1 Penghargaan	1 Penghargaan	75.000.000,00	1 Penghargaan	66.193.563,93	1 Penghargaan	68.943.623,25	1 Penghargaan	70.966.571,56	1 Penghargaan	71.875.182,22	6 Penghargaan	71.875.182,22	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITANGANI	100%	100%	101.535.828,00	100%	89.613.577,63	100%	93.336.638,29	100%	96.075.328,05	100%	97.305.415,19	100%	97.305.415,19	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI	40%	45%	534.607.484,00	50%	471.834.328,94	60%	491.437.026,18	70%	505.856.803,60	70%	512.333.471,05	70%	512.333.471,05	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI	40%	45%	-	50%	-	60%	-	70%	-	70%	-	70%	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**9.281.006.381,00**		**8.191.238.523,02**		**8.531.549.430,80**		**8.781.882.713,14**		**8.894.320.331,00**		**8.894.320.331,00**	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	7.871.792.109,00	100%	6.947.492.989,60	100%	7.236.131.592,84	100%	7.448.454.640,11	100%	7.543.819.896,49	100%	7.543.819.896,49	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	CAKUPAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)	95%	97,5%	357.580.118,00	98,0%	315.593.365,35	98,5%	328.704.919,16	98,5%	338.349.800,43	99%	342.681.815,20	99%	342.681.815,20	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	CAKUPAN PENERBITAN AKTA PENCATATAN SIPIL (LAHIR, MATI, KAWIN, CERAI)	68%	70%	523.954.570,00	72,5%	462.432.271,02	75%	481.644.352,99	77,5%	495.776.793,15	80%	502.124.402,59	80%	502.124.402,59	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	80%	80%	447.436.312,00	80%	394.898.721,65	80%	411.305.073,64	80%	423.373.614,05	80%	428.794.219,43	80%	428.794.219,43	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN SKALA PROVINSI DALAM SATU TAHUN	100%	100%	80.243.272,00	100%	70.821.175,40	100%	73.763.492,17	100%	75.927.865,39	100%	76.899.997,29	100%	76.899.997,29	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**13.370.022.000,00**		**11.800.125.413,58**		**12.290.370.128,11**		**12.650.994.973,62**		**12.812.970.233,91**		**12.812.970.233,91**	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	7.220.022.000,00	100%	6.372.253.171,22	100%	6.636.993.021,64	100%	6.831.736.105,70	100%	6.919.205.291,82	100%	6.919.205.291,82	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Daerah Prov. Sulut
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	PRESENTASI DESA YANG DIFASILITASI DALAM PENATAAN DESA	6,64%	13,27%	205.000.000,00	19,90%	180.929.074,75	26,54%	188.445.903,55	33,80%	193.975.295,60	39,81%	196.458.831,40	39,81%	196.458.831,40	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Daerah Prov. Sulut
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	100%	100%	150.000.000,00	100%	132.387.127,86	100%	137.887.246,50	100%	141.933.143,12	100%	143.750.364,44	100%	143.750.364,44	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Daerah Prov. Sulut
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	22,7 %	100%	685.000.000,00	100%	604.567.883,90	100%	629.685.092,35	100%	648.161.353,58	100%	656.459.997,61	100%	656.459.997,61	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Daerah Prov. Sulut
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	66,6 %	100%	5.110.000.000,00	100%	4.509.988.155,85	100%	4.697.358.864,08	100%	4.835.189.075,62	100%	4.897.095.748,63	100%	4.897.095.748,63	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Daerah Prov. Sulut
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**332.385.497,00**		**293.357.075,27**		**305.544.806,38**		**314.510.122,11**		**318.536.908,86**		**318.536.908,86**	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	2,25	2,25	102.617.636,00	2,24	90.568.360,65	2,23	94.331.088,47	2,22	97.098.957,45	2,21	98.342.150,49	2,21	98.342.150,49	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN (MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE (MCPR))	62,5%	62,5%	76.292.803,00	65%	67.334.567,10	67%	70.132.030,22	69%	72.189.848,85	71%	73.114.121,57	71%	73.114.121,57	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	ANGKA KELAHIRAN REMAJA UMUR 15-19 TAHUN (AGE SPECIFIC FERTILITY RATE / ASFR 15-19)	30%	30%	153.475.058,00	30%	135.454.147,51	29,80%	141.081.687,69	29,80%	145.221.315,82	29,60%	147.080.636,80	29,60%	147.080.636,80	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**19.049.439.374,00**		**16.812.670.440,75**		**17.511.164.950,92**		**18.024.978.700,16**		**18.255.759.016,08**		**18.255.759.016,08**	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	16.043.839.804,00	100%	14.159.985.810,24	100%	14.748.272.625,68	100%	15.181.017.407,29	100%	15.375.385.459,07	100%	15.375.385.459,07	Dinas Perhubungan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	RASIO KONEKTIVITAS PROVINSI	0,41	0,42	2.389.599.570,00	0,45	2.109.014.825,42	0,47	2.196.635.366,29	0,49	2.261.089.185,12	0,52	2.290.038.727,04	0,52	2.290.038.727,04	Dinas Perhubungan
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	JUMLAH ARUS PENUMPANG ANGKUTAN UMUM NAIK TURUN (ORANG)	12.100	13.100	536.000.000,00	13.500	473.063.336,89	13.500	492.717.094,16	16.500	507.174.431,42	17.800	513.667.968,94	17.800	513.667.968,94	Dinas Perhubungan
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	JUMLAH KEGIATAN SOSIALISASI RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN PROVINSI DI KAB/KOTA	0	3	80.000.000,00	3	70.606.468,19	3	73.539.864,80	3	75.697.676,33	3	76.666.861,04	15	76.666.861,04	Dinas Perhubungan
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**23.737.548.854,00**		**20.950.306.101,83**		**21.820.701.667,49**		**22.460.966.125,40**		**22.748.541.991,35**		**22.748.541.991,35**	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	7.838.434.333,00	100%	6.918.052.055,22	100%	7.205.467.513,63	100%	7.416.890.813,48	100%	7.511.851.946,78	100%	7.511.851.946,78	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Prov. Sulut
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	95%	95%	9.942.320.183,00	100%	8.774.901.422,10	100%	9.139.461.025,66	100%	9.407.631.689,85	100%	9.528.080.997,98	100%	9.528.080.997,98	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Prov. Sulut
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	100%	100%	5.956.794.338,00	100%	5.257.352.624,50	100%	5.475.773.128,20	100%	5.636.443.622,07	100%	5.708.609.046,59	100%	5.708.609.046,59	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Prov. Sulut
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**18.525.896.465,00**		**16.350.601.493,85**		**17.029.899.016,62**		**17.529.591.429,28**		**17.754.029.122,95**		**17.754.029.122,95**	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	13.871.525.363,00	100%	12.242.742.679,18	100%	12.751.376.247,01	100%	13.125.527.964,25	100%	13.293.578.841,91	100%	13.293.578.841,91	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	JUMLAH KSP / USP YANG TERFASILITASI DALAM PELAYANAN IZIN	30	60	181.300.000,00	90	160.011.908,54	120	166.659.718,60	150	171.549.858,98	180	173.746.273,82	180	173.746.273,82	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS	3.766 unit	3.803 unit	266.600.000,00	3.841 unit	235.296.055,25	3.879 unit	245.071.599,44	3.918 unit	252.262.506,37	3.957 unit	255.492.314,40	3.957 unit	255.492.314,40	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	1%	1%	104.489.325,00	1%	92.220.277,53	1%	96.051.635,42	1%	98.869.988,80	1%	100.135.856,99	1%	100.135.856,99	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	JUMLAH SDM PENGELOLA KOPERASI DAN UMKM YANG DILATIH	525 Orang Pengelola; 525 Orang Wirausaha	555 Orang Pengelola; 555 Orang Wirausaha	3.031.669.734,00	615 Orang Pengelola; 615 Orang Wirausaha	2.675.693.658,08	660 Orang Pengelola; 660 Orang Wirausaha	2.786.857.279,45	705 Orang Pengelola; 705 Orang Wirausaha	2.868.629.428,32	750 Orang Pengelola; 750 Orang Wirausaha	2.905.357.527,52	750 Orang Pengelola; 750 Orang Wirausaha	2.905.357.527,52	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	JUMLAH KUMKM YANG TERFASILITASI DALAM RANGKA PENINGKATAN	60	120	379.326.212,00	180	334.786.051,53	240	348.694.979,32	300	358.926.410,25	360	363.521.874,78	360	363.521.874,78	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PERLINDUNGAN KOPERASI	KEMUDAHAN DAN PERLINDUNGAN KUMKM														Menengah Daerah Prov. Sulut
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE UMKM NAIK KELAS	2%	2%	111.480.045,00	2%	98.390.153,14	2%	102.477.842,96	2%	105.484.754,55	2%	106.835.313,98	12%	106.835.313,98	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	JUMLAH UMKM YANG MENINGKAT AKSES PROMOSI DAN PEMASARANNYA	200	210	579.505.786,00	220	511.460.710,59	231	532.709.714,41	243	548.340.517,75	255	555.361.119,56	255	555.361.119,56	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**15.335.240.387,00**		**13.534.589.532,76**		**14.096.893.809,13**		**14.510.525.790,84**		**14.696.309.296,16**		**14.696.309.296,16**	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	13.510.336.290,00	100%	11.923.964.119,25	100%	12.419.353.802,06	100%	12.783.763.294,98	100%	12.947.438.436,07	100%	12.947.438.436,07	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASI PENINGKATAN INVESTASI DI PROVINSI	0	10%	500.647.000,00	10%	441.861.456,02	12%	460.218.908,65	12%	473.722.682,02	15%	479.787.924,71	15%	479.787.924,71	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PENINGKATAN JUMLAH KERJASAMA PENANAMAN MODAL/MOU	2 MOU/KERJA SAMA	2 MOU/KERJA SAMA	75.495.000,00	3 MOU/KERJA SAMA	66.630.441,45	4 MOU/KERJA SAMA	69.398.651,16	5 MOU/KERJA SAMA	71.434.950,93	6 MOU/KERJA SAMA	72.349.558,42	22 MOU/ Kerja sama	72.349.558,42	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL SESUAI NSPK TEPAT WAKTU	85%	85%	610.506.369,00	87%	538.821.231,56	90%	561.206.947,95	92%	577.673.918,98	95%	585.070.086,92	95%	585.070.086,92	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASI PENINGKATAN PENYAMPAIAN LKPM	70%	70%	457.133.626,00	75%	403.457.385,30	80%	420.219.313,14	85%	432.549.415,76	90%	438.087.502,24	90%	438.087.502,24	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	JUMLAH LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL TEPAT WAKTU	1 LAPORAN	1 LAPORAN	181.122.102,00	1 LAPORAN	159.854.899,17	1 LAPORAN	166.496.186,17	1 LAPORAN	171.381.528,17	1 LAPORAN	173.575.787,81	6 LAPORAN	173.575.787,81	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**36.921.503.566,00**		**32.586.212.089,76**		**33.940.029.755,56**		**34.935.900.332,24**		**35.383.197.288,86**		**35.383.197.288,86**	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	14.571.503.566,00	100%	12.860.530.038,26	100%	13.394.830.027,15	100%	13.787.862.007,37	100%	13.964.392.987,12	100%	13.964.392.987,12	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Prov. Sulut
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI	0,55%	0,55%	1.300.000.000,00	0,65%	1.147.355.108,14	0,75%	1.195.022.803,00	0,85%	1.230.087.240,37	0,95%	1.245.836.491,82	0,95%	1.245.836.491,82	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	6 Prestasi	6 Prestasi	20.650.000.000,00	6 Prestasi	18.225.294.602,39	6 Prestasi	18.982.477.601,42	7 Prestasi	19.539.462.702,84	7 Preatasi	19.789.633.504,73	32 Prestasi	19.789.633.504,73	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Prov. Sulut
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN	6,69%	6,69%	400.000.000,00	6,79%	353.032.340,97	6,89%	367.699.324,00	6,99%	378.488.381,65	7,01%	383.334.305,18	7,01%	383.334.305,18	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Prov. Sulut
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**43.319.574,00**		**38.233.026,55**		**39.821.445,19**		**40.989.888,64**		**41.514.697,00**		**41.514.697,00**	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100%	100%	43.319.574,00	100%	38.233.026,55	100%	39.821.445,19	100%	40.989.888,64	100%	41.514.697,00	100%	41.514.697,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Prov. Sulut
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**191.167.770,00**		**168.721.013,40**		**175.730.649,50**		**180.886.949,73**		**183.202.910,71**		**183.202.910,71**	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	TINGKAT KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH	90%	95%	191.167.770,00	95%	168.721.013,40	100%	175.730.649,50	100%	180.886.949,73	100%	183.202.910,71	100%	183.202.910,71	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Prov. Sulut
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**13.398.256.670,00**		**11.825.044.792,70**		**12.316.324.800,79**		**12.677.711.210,00**		**12.840.028.527,93**		**12.840.028.527,93**	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	10.682.256.670,00	100%	9.427.955.197,53	100%	9.819.646.390,84	100%	10.107.775.098,58	100%	10.237.188.595,78	100%	10.237.188.595,78	Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA	100%	100%	490.000.000,00	100%	432.464.617,68	100%	450.431.671,90	100%	463.648.267,53	100%	469.584.523,84	100%	469.584.523,84	Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	PERSENTASE PENDUDUK YANG PERNAH TERLIBAT SEBAGAI PELAKU/PENDUKUNG PERTUNJUKAN SENI YANG MENJADIKAN KETERLIBATAN SEBAGAI SUMBER PENGHASILAN (TERHADAP PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS).	0,016%	0,019%	135.000.000,00	0,020%	119.148.415,08	0,021%	124.098.521,85	0,022%	127.739.828,81	0,023%	129.375.328,00	0,023%	129.375.328,00	Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG MENGUNJUNGI PENINGGALAN SEJARAH	5%	9%	337.000.000,00	9,5%	297.429.747,26	10%	309.786.680,47	10,5%	318.876.461,54	11%	322.959.152,11	11%	322.959.152,11	Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	JUMLAH CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA YANG DITETAPKAN	15 Unit	19 Unit	326.000.000,00	24 Unit	287.721.357,89	29 Unit	299.674.949,06	34 Unit	308.468.031,05	39 Unit	312.417.458,72	39 Unit	312.417.458,72	Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	STANDAR PENGELOLAAN MUSEUM NEGERI	C	B	1.428.000.000,00	B	1.260.325.457,25	A	1.312.686.586,67	A	1.351.203.522,50	A	1.368.503.469,48	A	1.368.503.469,48	Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**11.083.646.666,00**		**9.747.939.337,79**		**10.152.924.502,82**		**10.450.832.278,75**		**10.584.638.061,00**		**10.584.638.061,00**	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	10.783.646.666,00	100%	9.483.165.082,07	100%	9.877.150.009,82	100%	10.166.965.992,51	100%	10.297.137.332,12	100%	10.297.137.332,12	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT	59	61	255.000.000,00	61,5	225.058.117,37	61,7	234.408.319,05	61,9	241.286.343,30	62	244.375.619,55	62	244.375.619,55	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulut
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT	4,66	8,13	45.000.000,00	8,80	39.716.138,36	9,00	41.366.173,95	10,02	42.579.942,94	10,05	43.125.109,33	10,05	43.125.109,33	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulut
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**300.000.000,00**		**299.049.240,28**		**311.473.456,49**		**320.612.731,06**		**324.717.651,71**		**324.717.651,71**	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL	6,73	17,86	250.000.000,00	18,91	220.645.213,10	19,81	229.812.077,50	21,09	236.555.238,53	22,32	239.583.940,74	22,32	239.583.940,74	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulut
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN	0	215	50.000.000,00	230	44.129.042,62	247	45.962.415,50	259	47.311.047,71	273	47.916.788,15	273	47.916.788,15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulut
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP YANG DISIMPAN DILEMBAGA KEARSIPAN DAERAH PROVINSI YANG SESUAI NSPK	0 izin	0 izin	-	15 izin	34.274.984,56	20 izin	35.698.963,49	25 izin	36.746.444,82	30 izin	37.216.922,83	30 izin	37.216.922,83	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulut
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**241.143.089.847,00**		**212.828.273.791,36**		**221.670.377.809,11**		**228.174.644.557,55**		**231.096.046.986,50**		**231.096.046.986,50**	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**40.667.916.522,00**		**35.892.724.429,96**		**37.383.913.533,91**		**38.480.834.774,04**		**38.973.518.807,34**		**38.973.518.807,34**	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	18.296.263.277,00	100%	16.147.931.639,04	100%	16.818.809.096,63	100%	17.312.307.695,03	100%	17.533.963.426,54	100%	17.533.963.426,54	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSENTASE LUAS WILAYAH LAUT DAN PESISIR YANG DIKELOLA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	40%	45%	1.718.212.544,00	55%	1.516.461.491,72	75%	1.579.463.977,29	92%	1.625.808.712,79	100%	1.646.624.529,25	100%	1.646.624.529,25	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT DAN PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROV SULUT	405.500 Ton	410.000 Ton	14.047.291.248,00	410.380 ton	12.397.870.283,79	412.431 ton	12.912.948.739,75	415.000 ton	13.291.841.327,66	417.075 Ton	13.462.021.575,41	417.075 Ton	13.462.021.575,41	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI	544.839 Ton	561.185	4.075.907.978,00	578.020	3.597.318.337,59	595.361	3.746.771.520,48	625.129	3.856.709.535,90	656.385	3.906.088.381,77	656.385	3.906.088.381,77	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	95%	96%	1.837.003.312,00	97%	1.621.303.949,00	98%	1.688.662.190,01	99%	1.738.211.026,63	100%	1.760.465.970,53	100%	1.760.465.970,53	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	KONSUMSI IKAN (Kg/Kapita/Tahun)	65	67	693.238.163,00	67,5	611.838.728,83	68	637.258.009,76	70	655.956.476,04	72	664.354.923,84	72	664.354.923,84	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**20.246.412.333,00**		**17.869.095.855,22**		**18.611.480.320,60**		**19.157.579.595,50**		**19.402.861.009,97**		**19.402.861.009,97**	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	11.138.212.752,00	100%	9.830.373.305,05	100%	10.238.783.248,65	100%	10.539.210.297,53	100%	10.674.147.615,49	100%	10.674.147.615,49	Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	100%	166%	5.053.232.537,00	100%	4.459.886.279,96	100%	4.645.175.469,65	100%	4.781.474.512,61	100%	4.842.693.458,66	100%	4.842.693.458,66	Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA DAN WISATAWAN NUSANTARA	150.000 Wisnus dan 15.000 Wisman	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman	1.984.938.978,00	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman	1.751.869.135,20	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman	1.824.651.800,97	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman	1.878.190.853,66	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman	1.902.238.009,87	5.150.000 Wisnus dan 140.000 Wisman	1.902.238.009,87	Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU	1,30%	2%	929.453.407,00	3%	820.317.780,23	3,30%	854.398.473,60	3,50%	879.468.289,59	4%	890.728.439,92	4%	890.728.439,92	Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF (Rp.)	16.425.000.000	19.710.000.000	1.140.574.659,00	20.104.200.000	1.006.649.354,78	20.506.284.000	1.048.471.327,71	20.916.409.680	1.079.235.642,10	21.334.737.874	1.093.053.486,02	21.334.737.874	1.093.053.486,02	Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**84.628.095.356,00**		**74.691.136.537,63**		**77.794.233.634,20**		**80.076.877.134,19**		**81.102.130.329,25**		**81.102.130.329,25**	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	48.080.810.508,00	100%	42.435.202.723,00	100%	44.198.203.802,72	100%	45.495.070.394,36	100%	46.077.560.221,01	100%	46.077.560.221,01	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	20.090.058.122,00	100%	17.731.100.622,40	100%	18.467.751.976,37	100%	19.009.633.964,78	100%	19.253.021.177,88	100%	19.253.021.177,88	Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulut
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	8,24%	8,41%	3.342.449.198,00	8,57%	2.907.137.931,63	8,75%	2.985.892.806,86	8,92%	3.032.806.537,16	9,10%	3.032.894.819,67	9,10%	3.032.894.819,67	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	8,24%	8,41%	5.022.365.383,00	8,57%	4.432.643.520,87	8,75%	4.616.800.890,51	8,92%	4.752.267.364,71	9,10%	4.813.112.361,09	9,10%	4.813.112.361,09	Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulut
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	1%	1-2%	1.072.542.046,00	1-2%	946.605.073,21	1-2%	985.932.463,19	1-2%	1.014.861.758,11	1-2%	1.027.855.399,94	1-2%	1.027.855.399,94	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	1%	1-2%	4.128.656.963,00	1-2%	3.643.873.581,74	1-2%	3.795.260.935,79	1-2%	3.906.621.730,82	1-2%	3.956.639.620,56	1-2%	3.956.639.620,56	Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulut
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR	2%	2%	327.746.506,00	18%	289.262.790,64	16%	301.280.421,75	14%	310.120.611,62	12%	314.091.197,88	2%	314.091.197,88	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL	0,05-1	0,05-1	332.441.056,00	0,05-1	293.406.110,58	0,05-1	305.595.878,90	0,05-1	314.562.693,20	0,05-1	318.590.153,03	0,05-1	318.590.153,03	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)														
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)	0,05-1	0,05-1	866.935.000,00	0,05-1	765.140.231,29	0,05-1	796.928.533,63	0,05-1	820.312.062,87	0,05-1	830.814.814,65	0,05-1	830.814.814,65	Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulut
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DOKUMEN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	0 DOKUMEN	0 DOKUMEN	-	1 DOKUMEN	42.843.730,70	1 DOKUMEN	86.647.969,65	1 DOKUMEN	129.888.932,11	1 DOKUMEN	170.293.782,59	4 DOKUMEN	170.293.782,59	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN	0,50%	0,50%	718.846.827,00	0,50%	634.440.445,33	1%	660.798.730,87	1%	680.187.930,52	1%	688.896.622,39	1%	688.896.622,39	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN	0,50%	0,50%	645.243.747,00	0,50%	569.479.776,24	1%	593.139.223,97	1%	610.543.153,93	1%	618.360.158,56	1%	618.360.158,56	Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulut
3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				**62.234.728.920,00**		**54.927.180.100,08**		**57.209.169.382,78**		**58.887.804.578,88**		**59.641.766.420,98**		**59.641.766.420,98**	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	47.312.829.896,00	100%	41.757.397.739,82	100%	43.492.238.923,03	100%	44.768.391.046,91	100%	45.341.576.935,29	100%	45.341.576.935,29	Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	1,39%	0,84%	13.096.899.024,00	0,84%	11.559.072.304,61	0,84%	12.039.302.294,00	0,84%	12.392.560.290,67	0,84%	12.551.226.718,33	5,59%	12.551.226.718,33	Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	PERSENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI)	30%	29%	800.000.000,00	28%	706.064.681,93	27%	735.398.648,00	26%	756.976.763,31	25%	766.668.610,35	25%	766.668.610,35	Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL	19,77%	25,58%	845.000.000,00	31,40%	745.780.820,29	37,21%	776.764.821,95	43,02%	799.556.706,24	48,84%	809.793.719,69	48,84%	809.793.719,69	Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	PENINGKATAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI ANTAR BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAS	0%	20%	180.000.000,00	30%	158.864.553,43	40%	165.464.695,80	50%	170.319.771,74	60%	172.500.437,33	60%	172.500.437,33	Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**				**17.935.515.174,00**		**15.829.542.270,79**		**16.487.192.012,61**		**16.970.960.280,80**		**17.188.245.618,02**		**17.188.245.618,02**	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	14.879.661.363,00	100%	13.132.504.209,42	100%	13.678.103.561,25	100%	14.079.447.372,07	100%	14.259.711.624,62	100%	14.259.711.624,62	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Prov. Sulut
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	PERSENTASE PENGELOLAAN AIR TANAH, SUMBER DAYA GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI	100%	100%	516.153.811,00	100%	455.547.470,49	100%	474.473.518,46	100%	488.395.551,52	100%	494.648.656,26	100%	494.648.656,26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Prov. Sulut
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	PERSENTASE USAHA TAMBANG SESUAI KEWENANGAN PROVINSI	100%	100%	522.200.000,00	100%	460.883.721,13	100%	480.031.467,48	100%	494.116.582,25	100%	500.442.935,41	100%	500.442.935,41	Dinas Energi dan Sumber Daya

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		YANG TIDAK MELANGGAR PERDA														Mineral Daerah Prov. Sulut
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	PENINGKATAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN	35%	36%	1.045.000.000,00	36%	922.296.990,77	37%	960.614.483,95	37,5%	988.800.897,07	38%	1.001.460.872,27	38%	1.001.460.872,27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Prov. Sulut
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	RASIO ELEKTRIFIKASI	99,99%	100%	972.500.000,00	100%	858.309.878,97	100%	893.968.981,47	100%	920.199.877,89	100%	931.981.529,46	100%	931.981.529,46	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Prov. Sulut
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**12.270.422.373,00**		**10.904.187.928,88**		**11.357.210.274,92**		**11.690.454.282,88**		**11.840.131.393,60**		**11.840.131.393,60**	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	10.498.838.261,00	100%	9.266.073.621,77	100%	9.651.039.328,35	100%	9.934.220.756,61	100%	10.061.412.174,85	100%	10.061.412.174,85	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PERTIMBANGAN TEKNIS YANG DITERBITKAN IJIN	80%	0%	-	80%	31.704.360,72	80%	33.021.541,23	80%	33.990.461,46	80%	34.425.653,62	80%	34.425.653,62	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK	100%	100%	30.000.000,00	100%	26.477.425,57	100%	27.577.449,30	100%	28.386.628,62	100%	28.750.072,89	100%	28.750.072,89	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	LAJU INFLASI TERKENDALI (%)	3±1	3±1	1.070.000.000,00	3±1	944.361.512,08	3±1	983.595.691,70	3±1	1.012.456.420,92	3±1	1.025.419.266,35	3±1	1.025.419.266,35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERTUMBUHAN NILAI EKSPOR NON MIGAS	1,20%	5-6%	483.000.000,00	6%	426.286.551,72	6,25%	443.996.933,73	6,50%	457.024.720,85	6,75%	462.876.173,50	6,75%	462.876.173,50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
3.30.06	PROGRAMSTANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN	90%	90%	188.584.112,00	90%	166.440.726,32	90%	173.355.626,25	90%	178.442.238,39	90%	180.726.898,85	90%	180.726.898,85	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	75%	0%	-	75%	42.843.730,70	75%	44.623.704,37	75%	45.933.056,03	75%	46.521.153,54	75%	46.521.153,54	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**3.040.000.000,00**		**2.608.497.699,93**		**2.716.869.616,79**		**2.796.588.183,08**		**2.832.393.912,18**		**2.832.393.912,18**	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIP	100%	100%	2.900.000.000,00	100%	2.484.936.380,59	100%	2.588.174.853,39	100%	2.664.117.249,50	100%	2.698.226.905,37	100%	2.698.226.905,37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE REKOMENDASI YANG DITERBITKAN IJIN	100%	100%	40.000.000,00	100%	35.303.234,10	100%	36.769.932,40	100%	37.848.838,17	100%	38.333.430,52	100%	38.333.430,52	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	TERSEDIANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI	100%	100%	100.000.000,00	100%	88.258.085,24	100%	91.924.831,00	100%	94.622.095,41	100%	95.833.576,29	100%	95.833.576,29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**119.999.169,00**		**105.908.968,87**		**110.309.033,30**		**113.545.728,19**		**114.999.495,18**		**114.999.495,18**	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE KAWASAN TRANSMIGRASI YANG DIFASILITASI PENETAPANNYA	20%	20%	49.999.254,00	40%	44.128.384,22	60%	45.961.729,74	80%	47.310.341,83	100%	47.916.073,23	100%	47.916.073,23	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	REKAPITULASI WARGA TRANSMIGRASI YANG DITEMPATKAN	0 KK	0 KK	59.999.915,00	50 KK	52.954.776,13	100 KK	55.154.820,46	150 KK	56.773.176,82	200 KK	57.500.064,32	200 KK	57.500.064,32	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PRESENTASE SATUAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI YANG DIFASILITASI PEMBINAANNYA	60%	60%	10.000.000,00	70%	8.825.808,52	80%	9.192.483,10	90%	9.462.209,54	100%	9.583.357,63	100%	9.583.357,63	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**315.725.224.513,00**		**278.653.037.779,87**		**290.229.879.056,73**		**298.745.823.182,47**		**302.570.773.913,42**		**302.570.773.913,42**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**203.449.677.013,00**		**179.560.789.361,87**		**187.020.771.763,47**		**192.508.347.501,24**		**194.973.101.440,38**		**194.973.101.440,38**	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	164.101.320.452,00	100%	144.832.683.287,10	100%	150.849.861.493,64	100%	155.276.108.012,54	100%	157.264.164.135,01	100%	157.264.164.135,01	Semua Biro pada Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	57,48	59,95	2.066.144.870,00	61,00	1.823.539.900,58	62,50	1.899.300.179,95	64	1.955.029.570,27	65	1.980.060.520,34	65	1.980.060.520,34	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sulut
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	NILAI LPPD	Tinggi	Tinggi	836.940.471,00	Tinggi	738.667.634,32	Sangat Tinggi	769.356.113,53	Sangat Tinggi	791.930.611,02	Sangat Tinggi	802.069.984,81	Sangat Tinggi	802.069.984,81	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Prov. Sulut
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE REKOMENDASI PELAKSANAAN PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG DITINDAKLANJUTI	100%	100%	27.962.817.300,00	100%	24.679.447.128,58	100%	25.704.772.545,76	100%	26.459.003.665,85	100%	26.797.767.851,18	100%	26.797.767.851,18	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov. Sulut
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	PERSENTASE PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100%	100%	2.252.197.104,00	100%	1.987.746.039,86	100%	2.070.328.381,63	100%	2.131.076.092,64	100%	2.158.361.029,96	100%	2.158.361.029,96	Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sulut
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI	100%	100%	994.532.422,00	100%	877.755.272,76	100%	914.222.248,16	100%	941.047.417,26	100%	953.095.987,41	100%	953.095.987,41	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Sulut
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	RASIO NILAI BELANJA YANG DILAKUKAN MELALUI PENGADAAN	100%	100%	4.370.000.000,00	100%	3.856.878.325,06	100%	4.017.115.114,68	100%	4.134.985.569,56	100%	4.187.927.284,05	100%	4.187.927.284,05	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Prov. Sulut
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	95%	95%	865.724.394,00	95%	764.071.773,61	95%	795.815.686,11	95%	819.166.562,11	95%	829.654.647,62	95%	829.654.647,62	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Sulut
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**112.275.547.500,00**		**99.092.248.418,01**		**103.209.107.293,27**		**106.237.475.681,23**		**107.597.672.473,04**		**107.597.672.473,04**	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	82.318.565.317,00	100%	72.652.789.547,13	100%	75.671.202.048,96	100%	77.891.551.417,09	100%	78.888.825.097,28	100%	78.888.825.097,28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%	100%	29.956.982.183,00	100%	26.439.458.870,88	100%	27.537.905.244,31	100%	28.345.924.264,14	100%	28.708.847.375,76	100%	28.708.847.375,76	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sulut
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**790.944.496.537,00**		**698.072.467.967,26**		**727.074.391.742,40**		**748.408.256.179,30**		**757.990.397.532,86**		**757.990.397.532,86**	
5.01	**PERENCANAAN**				**22.975.761.009,00**		**20.277.966.736,23**		**21.120.429.478,40**		**21.740.146.503,86**		**22.018.493.455,71**		**22.018.493.455,71**	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	14.974.523.197,00	100%	13.216.227.447,73	100%	13.765.305.141,84	100%	14.169.207.627,15	100%	14.350.621.112,68	100%	14.350.621.112,68	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sulut
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KETERUKURAN DAN AKURASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	75%	75%	2.497.232.225,00	75%	2.204.009.345,82	75%	2.295.576.502,50	75%	2.362.933.458,63	75%	2.393.186.949,59	75%	2.393.186.949,59	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sulut
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100%	100%	5.504.005.587,00	100%	4.857.729.942,68	100%	5.059.547.834,06	100%	5.208.005.418,08	100%	5.274.685.393,45	100%	5.274.685.393,45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sulut
5.02	**KEUANGAN**				**671.595.088.423,00**		**592.736.965.618,68**		**617.362.650.034,56**		**635.477.345.358,49**		**643.613.591.451,36**		**643.613.591.451,36**	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	64.600.990.344,00	100%	57.015.597.124,72	100%	59.384.351.197,80	100%	61.126.810.721,22	100%	61.909.439.368,07	100%	61.909.439.368,07	Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	70.380.040.196,00	100%	62.116.075.869,25	100%	64.696.733.007,63	100%	66.595.068.786,16	100%	67.447.709.517,06	100%	67.447.709.517,06	Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulut
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP	WTP	519.334.957.088,00	WTP	458.355.089.116,08	WTP	477.397.781.625,07	WTP	491.405.618.610,30	WTP	497.697.262.322,92	WTP	497.697.262.322,92	Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	4	4	2.864.542.052,00	4	2.528.189.966,04	4	2.633.225.440,21	4	2.710.489.713,60	4	2.745.193.092,88	24	2.745.193.092,88	Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	RASIO PAD (ADHK)	0,01	0,015	14.414.558.743,00	0.014	12.722.013.542,60	0.013	13.250.558.763,84	0.012	13.639.357.527,20	0.011	13.813.987.150,43	0.011	13.813.987.150,43	Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulut
5.03	**KEPEGAWAIAN**				**24.731.962.180,00**		**21.827.956.262,74**		**22.734.814.436,85**		**23.401.900.851,54**		**23.701.523.844,80**		**23.701.523.844,80**	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	12.617.345.376,00	100%	11.135.827.437,18	100%	11.598.473.413,53	100%	11.938.796.580,30	100%	12.091.653.307,20	100%	12.091.653.307,20	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulut
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PERSENTASE PENERAPAN MERIT SISTEM YANG MENJADI KEWENANGAN BKD	75%	75%	12.114.616.804,00	80%	10.692.128.825,57	85%	11.136.341.023,33	90%	11.463.104.271,23	100%	11.609.870.537,60	100%	11.609.870.537,60	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulut
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**24.712.231.262,00**		**21.810.542.132,31**		**22.716.676.823,83**		**23.383.231.043,48**		**23.682.615.000,45**		**23.682.615.000,45**	
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	17.132.830.315,00	100%	15.121.107.983,71	100%	15.749.325.312,51	100%	16.211.443.047,65	100%	16.419.004.011,27	100%	16.419.004.011,27	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Prov. Sulut
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PERSENTASE ASN YANG BERKOMPETENSI	25%	30%	7.579.400.947,00	40%	6.689.434.148,60	60%	6.967.351.511,31	70%	7.171.787.995,83	90%	7.263.610.989,18	90%	7.263.610.989,18	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Prov. Sulut
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**6.322.373.553,00**		**5.580.005.839,70**		**5.811.831.203,76**		**5.982.362.335,70**		**6.058.956.682,51**		**6.058.956.682,51**	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	5.755.373.553,00	100%	5.079.582.496,38	100%	5.290.617.411,99	100%	5.445.855.054,71	100%	5.515.580.304,93	100%	5.515.580.304,93	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulut
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN	20%	40%	567.000.000,00	45%	500.423.343,32	50%	521.213.791,77	65%	536.507.280,99	75%	543.376.377,59	75%	543.376.377,59	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulut
5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**				**8.036.880.167,00**		**7.093.196.548,56**		**7.387.888.511,16**		**7.604.664.419,87**		**7.702.029.686,51**		**7.702.029.686,51**	
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	6.252.815.265,00	100%	5.518.615.026,58	100%	5.747.889.865,07	100%	5.916.544.826,06	100%	5.992.296.487,51	100%	5.992.296.487,51	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Sulut
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI	88%	100%	1.784.064.902,00	100%	1.574.581.521,97	100%	1.639.998.646,09	100%	1.688.119.593,81	100%	1.709.733.198,99	100%	1.709.733.198,99	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Sulut
5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**				**32.570.199.943,00**		**28.745.834.829,05**		**29.940.101.253,84**		**30.818.605.666,36**		**31.213.187.411,52**		**31.213.187.411,52**	
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	31.864.398.852,00	100%	28.122.908.300,52	100%	29.291.294.793,74	100%	30.150.761.884,61	100%	30.536.792.984,49	100%	30.536.792.984,49	Badan Penghubung Daerah Prov. Sulut
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	PRESENTASE PELAYANAN PENGHUBUNG	100%	100%	705.801.091,00	100%	622.926.528,53	100%	648.806.460,10	100%	667.843.781,75	100%	676.394.427,03	100%	676.394.427,03	Badan Penghubung Daerah Prov. Sulut
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**42.936.435.523,00**		**37.894.875.863,59**		**39.469.245.791,78**		**40.627.354.987,63**		**41.147.521.694,91**		**41.147.521.694,91**	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**42.936.435.523,00**		**37.894.875.863,59**		**39.469.245.791,78**		**40.627.354.987,63**		**41.147.521.694,91**		**41.147.521.694,91**	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	35.417.927.359,00	100%	31.259.184.519,31	100%	32.557.869.868,33	100%	33.513.185.019,04	100%	33.942.266.437,38	100%	33.942.266.437,38	Inspektorat Daerah Prov. Sulut
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP	WTP	6.549.499.170,00	WTP	5.780.462.560,36	WTP	6.020.616.043,34	WTP	6.197.273.353,73	WTP	6.276.619.283,96	WTP	6.276.619.283,96	Inspektorat Daerah Prov. Sulut
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN PKPT	100%	100%	969.008.994,00	100%	855.228.783,92	100%	890.759.880,11	100%	916.896.614,87	100%	928.635.973,56	100%	928.635.973,56	Inspektorat Daerah Prov. Sulut
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**17.933.242.500,00**		**15.827.536.452,23**		**16.485.102.860,88**		**16.968.809.829,04**		**17.186.067.633,25**		**17.186.067.633,25**	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**17.933.242.500,00**		**15.827.536.452,23**		**16.485.102.860,88**		**16.968.809.829,04**		**17.186.067.633,25**		**17.186.067.633,25**	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	8.408.530.702,00	100%	7.421.208.194,54	100%	7.729.527.637,36	100%	7.956.327.943,70	100%	8.058.195.685,51	100%	8.058.195.685,51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	100%	100%	607.370.395,00	100%	536.053.480,95	100%	558.324.209,15	100%	574.706.594,67	100%	582.064.770,88	100%	582.064.770,88	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN	100%	100%	2.275.320.000,00	100%	2.008.153.865,12	100%	2.091.584.064,70	100%	2.152.955.461,36	100%	2.180.520.528,14	100%	2.180.520.528,14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100%	100%	607.103.675,00	100%	535.818.078,99	100%	558.079.027,24	100%	574.454.218,62	100%	581.809.163,57	100%	581.809.163,57	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE ORMAS, LSM, FKUB YANG MENDAPAT PEMBINAAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	100%	100%	399.917.728,00	100%	352.959.729,27	100%	367.623.695,60	100%	378.410.534,16	100%	383.255.460,98	100%	383.255.460,98	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE KASUS TRANTIBUM YANG TERSELESAIKAN (JUMLAH KASUS TRANTIBUM YANG TERDATA / JUMLAH KASUS YANG TERSELESAIKAN X 100%)	100%	100%	5.635.000.000,00	100%	4.973.343.103,36	100%	5.179.964.226,83	100%	5.331.955.076,54	100%	5.400.222.024,17	100%	5.400.222.024,17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut

BAB IX
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah nantinya akan dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan daerah. Bab ini akan menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi Indikator Kinerja Utama daerah yang menggambarkan pencapaian visi dan misi Gubernur Sulawesi Utara dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang menggambarkan kinerja Kepala Perangkat Daerah, dan indikator kinerja penyelenggraaan Pemerintahan Daerah yang menggambarkan kinerja seluruh Perangkat Daerah.

9.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan kinerja daerah dan peningkatan akuntabilitasi kinerja. Indikator Kinerja Utama Pemeritah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut.

Tabel 9.1. Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara	Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter	Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,93	72,93*	73	74	75	76	77	77
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94,53	94,53*	94.60	94.65	94.70	94.75	94.80	94.80
			Prevalensi Stunting	%	21,2	21,2*	16.2	15	14	13	12	12
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	56,02	56,32	57,28	58,06	59,28	59,52	60,10	60,10
Penguatan Ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	%	(0,99)	(0,99)*	4,5 – 5,5	5,0 – 5,7	5,7 – 6,0	6,0 – 6,5	6,5 – 7,0	6,5 – 7,0
			Indeks Gini (Gini Ratio).	Angka	0,367	0,367*	0,360	0,355	0,350	0,345	0,340	0,340
			Persentasi Angka Kemiskinan	%	7,78	7,78*	7,5 – 6,9	5,93	5,65	5,37	5,09	5,09
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,37	7,28 (Maret)	6,47 – 7,18	6,0 – 6,5	5,5 – 6,0	5,0 – 5,5	4,5 – 5,0	4,5 – 5,0
Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	Terbangunnya Infrastruktur dan konektivitas yang memadai	Meningkatnya Infrastruktur dan Konektivitas	Indeks infrastruktur	Angka	0.880	0.880*	0.885	0.89	0.895	0.90	0.90	0.90
Pembangunan Daerah yang berkelanjutan	Terwujudnya Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Pembanginan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.	Angka	n/a	0.53*	0.60	0.68	0.77	0.86	0.95	0.95
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.	Angka	n/a	70.51	70.81	71.11	71.41	71.71	72.01	72.01
			Akses Air Minum		90	90*	92	94	96	98	100	100
			Akses Sanitasi		82	83	85	87	89	91	93	93
Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah	Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK Kualifikasi Penilaian	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	56,51	57,48	59,95	61,00	62,50	64,00	65,00	65,00
			Indeks SPBE	Nilai	2,8	2,8	3,0	3,3	3,6	4,0	4,5	4,5

9.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah. Adapun indikator kinerja utama Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut.

Tabel 9.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026

NO.	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	**DINAS PENDIDIKAN DAERAH**					
	1. Rata-Rata Lama Sekolah	9,54	9,60	9,62	9,65	9,66
	2. Harapan Lama Sekolah	12,89	12,91	12,94	12,96	13
	3. APK SMA/SMK/MA	85,50%	85,75%	85,95%	86,10%	86,25%
	4. APM SMA/SMK/MA	63,80%	64,10%	64,50%	65,20%	65,70%
2.	**DINAS KESEHATAN DAERAH**					
	1. Usia Harapan Hidup	72,05	72,10	72,15	72,20	72,25
	2. Jumlah Kematian Bayi	240	230	220	210	200
	3. Jumlah Kematian Ibu	35	30	26	23	20
	4. Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%
	5. Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100%	100%	100%	100%	100%
3.	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH**					
	1. Rasio Kemantapan Jalan	0,894	0,899	0,903	0,908	0,912
	2. Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	0,857	0,874	0,891	0,909	0,927
4.	**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH**					
	1. Persentase Jumlah Kab/Kota dengan Satuan Perumahan yang dilengkapi dengan PSU	54	61	68	75	82
	2. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	35	40	45	50	55
5.	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**					
	1. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%
6.	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**					
	1. Persentase penanganan pra bencana	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kab/Kota	5 Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan

NO.	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN				
		2022	2023	2024	2025	2026
7.	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**					
	1. Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata / jumlah kasus yang terselesaikan X 100%)	100%	100%	100%	100%	100%
8.	**DINAS SOSIAL DAERAH**					
	1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	4,56%	5,02%	5,52%	6,07%	6,68%
	2. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	10%	15,20%	20,40%	25,80%	31,30%
9.	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH**					
	1. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	71,05%	71,10%	71,15%	7,20%	71,25%
	2. Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan	20%	40%	60%	80%	100%
10.	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH**					
	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	69	70	75	80	85
	2. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	29	28	26	24	22
	3. Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan kabupaten/kota layak anak	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan koprehensif	52%	65%	75%	85%	95%
11.	**DINAS PANGAN DAERAH**					
	1. Indeks Ketahanan Pangan	79,04	79,67	80,31	80,95	81,60
12.	**DINAS KEPENDUDUDKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KB DAERAH**					
	1. Cakupan penerbitan Dokumen Kependudukan	95%	95%	96%	96%	97%
	2. Angka Kelahitan Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,25	2,24	2,23	2,22	2,21
	3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30%	30%	29,80%	29,80%	29,60%

NO.	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN				
		2022	2023	2024	2025	2026
13. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
	1. Presentasi Desa yang difasilitasi dalam penataan desa	13,27%	19,90%	26,54%	33,80%	33,18%
	2. Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100%	100%	100%	100%	100%
14. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH						
	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	70,81	71,11	71,41	71,71	72,01
15. DINAS PERHUBUNGAN DAERAH						
	1. Rasio Konektivitas Provinsi	0,420	0,450	0,470	0,490	0,520
16. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH						
	1. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
17. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH						
	1. Persentase Koperasi Sehat	1% (3.803 Unit)	1% (3.841 Unit)	1% (3.879 unit)	1% (3.918 Unit)	1% (3.957 unit)
	2. Persentase UMKM Naik Kelas	2%	2%	2%	2%	2%
18. DINAS PENANAMAN MODAL 19. NA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH						
	1. Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	10	10	12	12	15
20. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH						
	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,55%	0,65%	0,75%	0,85%	0,95%
	2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	6,69%	6,79%	6,89%	6,99%	7,01%
	3. Peningkatan prestasi olahraga	6 Prestasi	6 Prestasi	6 Prestasi	7 Prestasi	7 Prestasi
21. DINAS KEBUDAYAAN DAERAH						
	1. Terlestarikannya cagar budaya	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	19 Unit	24 Unit	29 Unit	34 Unit	39 Unit

NO.	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN				
		2022	2023	2024	2025	2026
22. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH						
	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	61	61,5	61,7	61,9	62
	2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	8,13	8,80	9,00	10,02	10,05
	3. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pasal 40 dan pasal 59 undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	17,86	18,91	19,81	21,09	22,32
23. DINAS PARIWISATA DAERAH						
	1. Tingkat Hunian Akomodasi	15%	20%	25%	30%	35%
	2. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2%	3%	3.3%	3.5%	4%
	3. Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara dan Nusantara	25.000 Wisman; 1.000.000 Wisnus	25.000 Wisman; 1.000.000 Wisnus	25.000 Wisman; 1.000.000 Wisnus	25.000 Wisman; 1.000.000 Wisnus	25.000 Wisman; 1.000.000 Wisnus
	4. Nilai tambah Ekonomi Kreatif	19.710.000.000	20.104.200.000	20.506.284.000	20.916.409.680	21.334.737.874
24. BADAN PENDAPATAN DAERAH						
	1. Rasio PAD (ADHK)	0,015	0,014	0,013	0,012	0,011
	2. Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
25. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH						
	1. Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	971.185 Ton	988.400 Ton	1.007.792 Ton	1.040.129 Ton	1.073.460 Ton
	2. NTNP (NTN dan NTPi)	104	105	106	107	108
	3. Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	96%	97%	97%	98%	100%
26. DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH						
	1. Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %	1-2 %
	2. Nilai Tukar Petani	100-103	100-103	100-103	100-103	100-103
27. DINAS PERKEBUNAN DAERAH						
	1. Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan	93 – 100	94 – 100	96 – 100	98 – 100	100 – 105
	2. Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan	1%	1%	1%	1%	1%

NO.	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN				
		2022	2023	2024	2025	2026
28. DINAS KEHUTANAN DAERAH						
	1. Luas Kawasan Hutan yang dikelola masyarakat	2.368 Ha	2.368 Ha	2.368 Ha	2.368 Ha	2.368 Ha
	2. Luas hutan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air	2.400 Ha	2.400 Ha	2.400 Ha	2.400 Ha	2.400 Ha
29. DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAERAH						
	1. Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar Perda	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Rasio elektrifikasi	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan	36%	36%	37%	37,5 %	38%
	4. Persentase Pengelolaan Air Tanah, Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	100%	100%	100%	100%	100%
30. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH						
	1. Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	9,20	9,45	9,75	10,25	11,25
	2. Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,45	12,65	13,25	14,25	15,25
31. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
	1. Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan Pembangunan	75%	75%	75%	75%	75%
	2. Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%
32. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79,32	79,52	79,65	79,70	79,95
33. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						
	1. Rasio pegawai pendididkan tinggi dan menengah/dasar PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	5,30	5,40	5,50	5,60	5,70
	2. Rasio pegawai fungsional, PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12
	3. Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	11,70%	11,75	11,80	11,85	11,90
	4. Persentase Penerapan Merit Sistem yang menjadi kewenangan BKD	75%	80%	85%	90%	100%
34. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH						

NO.	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN				
		2022	2023	2024	2025	2026
	1. Persentase ASN yang Berkompetensi	30%	40%	60%	70%	90%
35. INSPEKTORAT DAERAH						
	1. Nilai Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota	Provinsi Kategori BB dan Kab/Kota Rata-Rata CC	Provinsi Kategori BB dan Kab/Kota Rata-Rata CC	Provinsi Kategori BB dan Kab/Kota Rata-Rata CC	Provinsi Kategori BB dan Kab/Kota Rata-Rata CC	Provinsi Kategori BB dan Kab/Kota Rata-Rata CC
	2. Nilai LPPD dillingkungan Pemerintah Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota	Provinsi Nilai Tinggi dan Kabupaten/Kota Rata-Rata Tinggi	Provinsi Nilai Tinggi dan Kabupaten/Kota Rata-Rata Tinggi	Provinsi Nilai Tinggi dan Kabupaten/Kota Rata-Rata Tinggi	Provinsi Nilai Tinggi dan Kabupaten/Kota Rata-Rata Tinggi	Provinsi Nilai Tinggi dan Kabupaten/Kota Rata-Rata Tinggi
	3. Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	4. Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	5. Persentase Tindak Lanjut Temuan	100%	100%	100%	100%	100%
	6. Persentase Temuan BPK	10%	10%	10%	10%	10%
	7. Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	8. Persentase Penyampaian LHKPN	100%	100%	100%	100%	100%
	9. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
36. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
	1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40%	45%	50%	65%	75%
	2. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	35%	45%	55%	65%	75%
37. BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH						
	1. Persentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan, ditetapkan, diawasi dan dievaluasi	100%	100%	100%	100%	100%
38. SEKRETARIAT DAERAH						
	1. Indeks Pelayanan Publik	7,81	7,91	8,01	8,11	8,21
	2. Nilai akuntabilitas kinerja	67,1	70,05	72	72,1	73,1
	3. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	93,60	93,80	94,00	94,20	94,40
39. SEKRETARIAT DEWAN						
	1. Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Pengambilan Keputusan DPRD	11 Keputusan	11 Keputusan	11 Keputusan	11 Keputusan	11 Keputusan
40. BADAN PENGHUBUNG DAERAH						
	1. Persentase pelayanan penghubung	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 9.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.	**PENDIDIKAN**							
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Persentase sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran muatan lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah atas	1:14	1:14	1:14	1:13	1:13	1:12	1:12
2.	**KESEHATAN**							
2.1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	52,2%	55%	57,5%	60%	62,5%	65%	65%
2.2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	80.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.5	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit)	80,39%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.6	Rasio dokter per satuan penduduk;	45/ 100.000 pddk	45/ 100.000 pddk	45/ 100.000 pddk	45/ 100.000 pddk	50/ 100.000 pddk	50/ 100.000 pddk	50/ 100.000 pddk
2.7	Persentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.8	Persentase Kabupaten Kota Sehat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							
3.1	Rasio luar kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	0	0,50	0,53	0,58	0,61	0,64	0,64
3.2	Rasio luar kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan provinsi	0	0,50	0,53	0,58	0,61	0,64	0,64
3.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinasi yang dilayani oleh jaringan irigas	0,84	0,857	0,874	0,891	0,909	0,927	0,927
3.4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	2%	9%	10%	11%	13%	15%	15%
3.5	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL regional	0,02	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08
3.6	Rasio kemantapan jalan	0,89	0,894	0,899	0,903	0,908	0,912	0,912
3.7	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	0,05	0,051	0,054	0,056	0,059	0,062	0,062
3.8	Persentase jumlah sampah yang tertangani di TPA Regional	0%	0%	40%	45%	50%	55%	55%
3.9	Jumlah Sistem Drainase yang terbangun dan terhubung dengan Sungai Lintas Kab/Kota dan Sungai yang berada di Kawasan Strategis Provinsi	3	1	1	1	1	1	8
3.10	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang memperoleh Pengembangan Infrastruktur Permukiman	1	2	2	2	2	2	11
3.11	Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang dibangun / direhab / direnovasi / ubahsuai / dipelihara dan dirawat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.12	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.13	Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (Permendagri 86/2017)	0,53	0,60	0,68	0,77	0,86	0,95	0,95
4.	**PERUMAHAN RAKYAT**							
4.1	Persentase warganegara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0,00%	2%	4%	6%	8%	10%	10%
4.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0,00%	2%	4%	6%	8%	10%	10%
4.3	Presentasi luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	47%	54%	61%	68%	75%	82%	82%
4.5	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (IKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
5.	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							
5.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Persentase penanganan pra bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.4	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.5	Persentase Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di Provinsi Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.6	Persentase Kabupaten/Kota tangguh bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100	100
5.7	Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.8	Persentase pelaksanaan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.9	Persentase Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.10	Persentase Ormas, LSM, FKUB yang mendapat pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.11	Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata / jumlah kasus yang terselesaikan X 100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	**SOSIAL**							
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
6.5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan stelah tanggap darurat bencana provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.6	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dan produktif	5%	10%	15,20%	20,40%	25,80%	31,30%	31,30%
6.7	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.8	Persentase Peningkatan Perlindungan dan jaminan Sosial	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.9	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
7.	**TENAGA KERJA**							
7.1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	26,6%	33%	46%	53%	66%	80%	80%
7.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
7.3	Tingkat produktifitas tenaga kerja	76	76,5	77	77,25	77,50	77,75	77,75
7.4	Persentase perusahaan yang merupakan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	30%	40%	50%	60%	70%	80%	80%
7.5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	55,5%	60%	61%	62%	63%	64%	64%
7.6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
8.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							
8.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	25	69	70	75	80	85	85
8.2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	31	29	28	26	24	22	22
8.3	Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 10.000 KK)	10	12,5	15,0	17,5	20,0	25,0	25,0
8.4	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala	75%	80%	85%	89%	93%	95%	95%
8.5	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.6	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	51	52	65	75	85	95	95
9.	**PANGAN**							

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
9.1	Persentase cadangan pangan	93% (275 Ton)	100% (275 Ton)	100% (275 Ton)	100% (275 Ton)	100% (275 Ton)	100% (275 Ton)	100% (275 Ton)
9.2	Persentase daerah rentan rawan pangan	14,03	12,03	10,03	8,03	6,03	4,03	4,03
9.3	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	60%	85%	89%	92%	96%	100%	100%
9.4	Persentase Ketersediaan pangan utama	0,015	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
9.5	Ketersediaan energi dan protein perkapita (/kapita/hari)	2400 kilokalori dan 63 gram	2400 kilokalori dan 63 gram	2400 kilokalori dan 63 gram	2400 kilokalori dan 63 gram	2400 kilokalori dan 63 gram	2400 kilokalori dan 63 gram	2400 kilokalori dan 63 gram
9.6	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	60%	85%	89%	92%	96%	100%	100%
10.	**PERTANAHAN**							
10.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas ijin lokasi dibandingkan dengan luas ijin lokasi yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	33,28%	35%	40%	45%	50%	55%	55%
10.3	Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	**LINGKUNGAN HIDUP**							
11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	70,51	70,81	71,11	71,41	71,71	72,01	72,01
11.2	Persentase Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	50%	50%	55%	60%	65%	70%	70%
11.3	Tersusunnya RPPLH dan KLHS Provinsi	KLHS	RPPLH DAN KLHS	KLHS	KLHS	KLHS	KLHS	KLHS
11.4	Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan pengelolaan Taman KEHATI oleh pemerintah Provinsi	0	1 Taman Kehati	1 Taman Kehati	1 Taman Kehati	1 Taman Kehati	1 Taman Kehati	1 Taman Kehati
11.5	Jumlah Usaha/Kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 lintas kab/kota	2 Pelaku Usaha/Kegiatan	2 Pelaku Usaha/Kegiatan	2 Pelaku Usaha/Kegiatan	3 Pelaku Usaha/Kegiatan	3 Pelaku Usaha/Kegiatan	3 Pelaku Usaha/Kegiatan	3 Pelaku Usaha/Kegiatan
11.6	Jumlah MHA dan/atau Kearifan lokal yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	-	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok
11.7	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk mayarakat	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.8	Jumlah penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 Penghargaan	1 Penghargaan	1 Penghargaan	1 Penghargaan	1 Penghargaan	1 Penghargaan	6 Penghargaan
11.9	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.10	Persentase jumlah sampah yang tertangani	40%	45%	50%	60%	70%	70%	70%
12.	**ADMINISTRASI KEPENDUDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							
12.1	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.2	Pemanfaatan data kependudukan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
12.3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	95%	97,5%	98%	98,5%	98,5%	99%	99%
12.4	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	68%	70%	72,5%	75%	77,5%	80%	80%
13.	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							
13.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	56%	64%	66%	68%	70%	72%	72%
13.2	Prentase peningkatan status desa mandiri	10,93%	14,43%	17,93%	21,43%	24,93%	28,43%	28,43%
13.3	Presentasi Desa yang difasilitasi dalam penataan desa	6,64%	13,27%	19,90%	26,54%	33,80%	39,81%	39,81%
13.4	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.5	Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	22,7 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.6	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	66,6 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							
14.1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,25	2,25	2,24	2,23	2,22	2,21	2,21
14.2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern *(modern contraceptive prevalencerate/ mCPR)*	62,5%	62,5%	65%	67%	69%	71%	71%
14.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(unmet need)*	8,76%	8,76%	8,50%	8,45%	8,40%	8,37%	8,37%
14.4	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30%	30%	30%	29,80%	29,80%	29,60%	29,60%
15.	**PERHUBUNGAN**							

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
15.1	Rasio konektivitas provinsi	0.410	0.420	0.450	0.470	0.490	0.520	0.520
15.2	V/C ratio di jalan provinsi	0	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5
15.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	0		1 Pelabuhan	1 Pelabuhan	1 Pelabuhan	1 Pelabuhan	4 Pelabuhan
15.4	Jumlah arus penumpang angkutan umum	12.100	13.100	13.500	13.500	16.500	17.800	17.800
15.5	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi di Kab/Kota	0	3	3	3	3	3	15
16.	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							
16.1	Persentase perangkat daerah (PD) yang terkoneksi dijaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	30%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
16.2	Persentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.3	Persentase media yang melaksanakan penyebaran informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
16.4	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17.	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**							
17.1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	3.766 unit	3.803 unit	3.841 unit	3.879 unit	3.918 unit	3.957 unit	3.957 unit
17.2	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
18.	**PENANAMAN MODAL**							
18.1	Persentase peningktan investasi di provinsi	0%	10%	10%	12%	12%	15%	15%
18.2	Peningkatan jumlah kerjasama Penanaman Modal/MOU	2 MOU/ Kerja sama	2 MOU/ Kerja sama	3 MOU/ Kerja sama	4 MOU/ Kerja sama	5 MOU/ Kerja sama	6 MOU/ Kerja sama	22 MOU/ Kerja sama
18.3	Persentase penerbitan perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal sesuai NSPK tepat waktu	85%	85%	87%	90%	92%	95%	95%
18.4	Persentase peningkatan penyampaian LKPM	70%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
18.5	Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal tepat waktu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	6 laporan
19.	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,55%	0,55%	0,65%	0,75%	0,85%	0,95%	0,95%
19.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	6,69%	6,69%	6,79%	6,89%	6,99%	7,01%	7,01%
19.3	Peningkatan prestasi olah raga	6 Prestasi	6 Prestasi	6 Prestasi	6 Prestasi	7 Prestasi	7 Prestasi	32 Prestasi
20.	**STATISTIK**							
20.1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21.	**PERSANDIAN**							
21.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	90%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
22.	**KEBUDAYAAN**							
22.1	Terlestarikannya cagar budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22.2	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas).	0,016%	0,019%	0,020%	0,021%	0,022%	0,023%	0,023%
22.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	5%	9%	9,5%	10%	10,5%	11%	11%
22.4	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	15 Unit	19 Unit	24 Unit	29 Unit	34 Unit	39 Unit	39 Unit
22.5	Standar pengelolaan Museum Negeri	C	B	B	A	A	A	A
23.	**PERPUSTAKAAN**							
23.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	59	61	61,5	61,7	61,9	62	62
23.2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	4,66	8,13	8,80	9,00	10,02	10,05	10,05
24.	**KEARSIPAN**							

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
24.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	6,73	17,86	18,91	19,81	21,09	22,32	22,32
24.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0	215	230	247	259	273	273
	URUSAN PILIHAN							
25.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**							
25.1	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan	164.251,94 hektar	190.776,81 hektar	234.886,92 hektar	234.886,92 hektar	234.886,92 hektar	234.886,92 hektar	234.886,92 hektar
25.2	Jumlah dokumen monev/kajian PK/peraturan turunan Perda RZWP-3-K	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
25.3	Produksi Perikanan Tangkap	405.500 ton	410.000 ton	410.380 ton	412.431 ton	415.000 ton	417.075 ton	417.075 ton
25.4	Produksi Perikanan Budidaya	544.839 ton	561.185 ton	578.020 ton	595.361 ton	625.129 ton	656.385 ton	656.385 ton
25.5	Konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun)	65	67	67,5	68	70	72	72
25.6	Penanganan kasus Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	3 kasus	3 kasus	3 kasus	3 kasus	3 kasus	3 kasus	3 kasus
25.7	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	95%	96%	97%	97%	98%	100%	100%
26.	**PARIWISATA**							
26.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	100%	166,0%	100%	100%	100%	100%	100%
26.2	Persentase peningkatan perjalanaan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	100%	666%	100%	100%	100%	100%	100%
26.3	Tingkat hunian akomodasi	15%	15%	20%	25%	30%	35%	35%
26.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,30%	2%	3%	3,30%	3,50%	4%	4%
26.5	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	150.000 Wisnus dan 15.000 Wisman	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman	5.150.000 Wisnus dan 140.000 Wisman
26.6	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata yang telah disertifikasi	25%	25%	25%	30%	30%	35%	35%
27.	**PERTANIAN**							
27.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	0,86%	0,86%	0,88%	0,89%	0,94%	0,99%	0,99%
27.2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
27.3	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
27.4	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	4,5 %	5,5 %	6,5 %	7,5 %	8,5 %	9,5 %	9,5 %
27.5	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	93 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %
27.6	Cakupan bina kelompok Petani	0,15 %	0,15 %	0,20 %	0,20 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %
27.7	Kontribusi sektor Perkebunan terhadap PDRB	4,80%	5,00%	5,40%	5,70%	6,00%	6,40%	6,40%
27.8	Produktivitas perkebunan per hektar per tahun	1059 Kg/Ha	1064 Kg/Ha	1070 Kg/Ha	1075 Kg/Ha	1080 Kg/Ha	1085 Kg/Ha	1085 Kg/Ha
27.9	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	0,5%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
28.	**KEHUTANAN**							
28.1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	19,77%	25,58%	31,40%	37,21%	43,02%	48,84%	48,84%
28.2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	30%	29%	28%	27%	26%	25%	25%
28.3	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	1,39%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	5,59%
29.	**ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**							
29.1	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29.2	Persentase desa yang teraliri listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29.3	Rasio elektrifikasi	99,99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29.4	Persentase Rumah tangga pengguna listrik	99,98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29.5	Rasio ketersediaan daya listrik	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
29.6	Persentase Pengelolaan Air Tanah, Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
29.7	Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	35%	36%	36%	37%	37,5%	38%	38%
30.	**PERDAGANGAN**							
30.1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	1.20%	5-6%	6%	6.25%	6.50%	6.75%	6.75%
30.2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
30.3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
30.4	Tertib usaha	50%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
30.5	Persentase kinerja realisasi pupuk	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
30.6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
30.7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
31.	**PERINDUSTRIAN**							
31.1	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	1 industri Besar	1 Industri Besar	1 Industri Besar	1 Industri Besar	1 Industri Besar	1 Industri Besar	6 Industri Besar
31.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industri (IUI) besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin perluasan industri (IPUI) bagi industri besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha kawasan industri (IUKI) dan Ijin perluasan kawasan industry (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32.	**TRANSMINGRASI**							
32.1	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	20%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
32.2	Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
32.3	Rekapitulasi Warga Transmigrasi yang ditempatkan	0 KK	0 KK	50 KK	100 KK	150 KK	200 KK	200 KK
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
33.	**PERENCANAAN DAN KEUANGAN**							
33.1	Rasio belanja pegawai diluar guru dan guru tenaga kesehatan	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
33.2	Rasio PAD	0,01	0,015	0,014	0,013	0,012	0,011	0,011
33.3	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
33.4	Opini laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.5	Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan Pembangunan	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
33.6	Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34.	**PENGAWASAN**							
34.1	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
34.2	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
34.3	Persentase capaian pelaksanaan PKPT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35.	**PENGADAAN**							
35.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang di bawah ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	≤ 0,8%	≤ 0,8%	≤ 0,8%	≤ 0,8%	≤ 0,8%	≤ 0,8%	≤ 0,8%
35.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompertitif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36.	**KEPEGAWAIAN**							
36.1	Rasio pegawai pendididkan tinggi dan menengah/dasar PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	5,20	5,30	5,40	5,50	5,60	5,70	5,70

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
36.2	Rasio pegawai fungsional, PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12
36.3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	11,66	11,7	11,75	11,80	11,85	11,90	11,90
36.4	Persentase Penerapan Merit Sistem yang menjadi kewenangan BKD	75%	75%	80%	85%	90%	100%	100%
37.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							
37.1	Persentase ASN yang Berkompetensi	25%	30%	40%	60%	70%	90%	90%
38.	**MANAJEMEN KEUANGAN**							
38.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-0,12%	-0,12%	-0,12%	-0,12%	-0,12%	-0,12%	-0,12%
38.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-0,01	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
38.3	Jumlah Dokumen Manajemen Aset	4	4	4	4	4	4	24
38.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belaja dalam APBD tahun sebelumnya	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
39.	**TRASPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**							
39.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39.3	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39.4	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	20%	40%	45%	50%	65%	75%	75%
39.5	Persentase pelayanan penghubung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39.6	Persentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan, ditetapkan, diawasi dan dievaluasi	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39.7	Indeks Reformasi Birokrasi	57,48	59,95	61	62,50	64	65	65
39.8	Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
39.9	Persentase Rekomendasi pelaksanaan program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39.10	Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39.11	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39.12	Persentase pelaksanaan program kebijakan administrasi pembangunan	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

BAB X
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 juga memiliki peran strategis dalam rencana pembangunan secara komprehensif di daerah **Nyiur Melambai** ini, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 juga menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya yang harus dilaksanakan secara konsisten, dan berkesinambungan.

10.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi pemerintah provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Selain itu, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Gubernur dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
4. Gubernur berkewajiban mendiseminasikan peraturan daerah tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 kepada masyarakat.
5. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
6. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, dilaksanakan secara sinergi dan kolaboratif sehingga terwujud pembangunan yang terintegrasi di Sulawesi Utara.

10.2. Pedoman Transisi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya ditangani/diselesaikan sampai dengan tahun 2021. Selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta program/kegiatan lainnya.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2021. Sebagaimana diketahui, tahun 2021 adalah tahun terakhir RPJMD Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu, penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025, dan RPJMN Tahun 2020-2024, dan RKP Tahun 2022 dengan memperharikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota secara berjenjang.
2. Memperhatikan Dokumen RPJPD Provinsi Sulawesi Utara yang akan berakhir pada tahun 2025, sehingga pelaksanaan evaluasi akhir periode RPJPD menjadi krusial dalam rangka penyusunan RPJPD baru, dan RPJMD tahun 2026-2031.
3. Memperhatian perubahan peraturan perundang-undangan seperti Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.
4. Evaluasi terhadap capaian RPJMD, hendaknya selaras dengan Dokumen LAKIP dan LPPD.
5. Memperhatikan pelaksanaan Pemilihan Umum serentak pada Tahun 2024, sehingga perlu ada penyesuaian terhadap RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD 2021-2026 sangat bergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengharapkan dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mensukseskan dan mengawal terwujudnya ***"Sulawesi Utara Maju, dan Sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik"***.

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 – 2026

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2016-2020

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2016	Capaian (Tahun)								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2021	Ket
				2017		2018		2019		2020			
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capain		
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6.16	6.1	6.31	6.2	6.01	6.3	5.66	6.4	-0.99	6.6	↓
2.	PDRB/Kapita (ADHB)	Rp. (000,-)	41.246,25	35.000,00	44.744,20	37.000,00	48.105,41	40.000,00	51.927,61	42.000,00	52,317,20	45.000,00	↑
3.	Inflasi	%	0.35	5.00	2.44	5.00	3.83	5.00	3.52	5.00	-0.09	5.00	↓
4.	Gini Ratio	Angka	0.37	0.39	0.39	0.39	0.372	0.39	0.36	0.39	0.37	0.38	↑
5.	Kemiskinan	%	8.20	8.5	7.90	8.2	7.59	8.0	7.51	7.80	7.78	7.50	↑
6.	Pengangguran	%	7.00	6.8	7.18	6.75	6.86	6.70	6.25	6.65	7.37	6.60	↓
7.	IPM	Angka	71.05	70.05	71.66	70.80	75.20	71.20	72.99	71.50	72.93	72	↑

Pandemic Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 mengakibatkan beberapa indikator kinerja targetnya tidak tercapai bahkan ada yang mengalami penurunan yang cukup signifikan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran.

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 – 2026

TABEL MATRIKS EVALUASI INDIKATOR KINERJA DAERAH PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016-2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target dan Capaian (Tahun)								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
ASPEK PELAYANAN UMUM											
URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.	**PENDIDIKAN**										
1.1	APK SMA/MA (%)	82,71	83,4	92.0	84,09	98.5	84,78	102.66	85,47	62,81*	88,16
1.2	APM SMA/MA (%)	60,75	61,44	60.7	62,13	61.7	62,82	65,10	63,51	62,80*	64,20
1.3	Angka Putus Sekolah SMA/MA (%)	0,85	0,82	311	0,79	296	0,76	201	0,73	0,65*	0,70
1.4	Angka Kelulusan SMA/MA (%)	99,51	99,52	-	99,53	-	99,54	-	99,55	99,55*	99,56
1.5	Rasio Guru/ Murid SMA/MA	1:17,48	1:17,39	1:17.20	1:17,30	1:17,25	1:17,22	1:17,24	1:17,12	1:15*	1:17,03
1.6	Jumlah Ruang Kelas Baik SMA (Ruang)	954	954	979	1145	2.199	1374	2.176	1.649	2.176	1979
1.7	Ratio APK Perempuan: Laki-laki di SMA	1 : 1,18	1 : 1,17	-	1 : 1,17	-	1 : 1,15	-	1 : 1,14	1:1.2*	1:1,13
1.8	Angka Putus Sekolah SMK (%)	0,85	0,82	927	0,79	565	0,76	-	0,73	0,86*	0,70
1.9	Angka Kelulusan SMK (%)	99,51	99,52	-	99,53	-	99,54	326	99,55	99,55*	99,56
1.10	Jumlah Ruang Kelas Baik SMK (Ruang)	1578	1578	945	1736	2.301	1910	2.304	2.101	2.304*	2.311
1.11	Rasio Guru/ Murid SMK/MA	1:20	1:19,43	1:17.23	1:19,34	1:19,29	1:19,25	1:19,27	1:19,16	1:13*	1:19,07

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target dan Capaian (Tahun)								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1.12	Ratio APK Perempuan: Laki-laki di SMK	1 : 1,16	1 : 1,15	-	1 : 1,14	-	1 : 1,13	-	01.01,1	1:1,2*	1:1,11
1.13	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 (%)	99,63	36.00,0	-	99,7	-	99,75	-	99,80	99,78*	99,85
1.14	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,96	8,97	-	8,98	-	8,99	-	9,00	9,24*	9,00
1.15	Angka Partisipasi sekolah Pendidikan Menengah (%)	67,93	66,48	-	69,03	-	69,58	-	70,13	70,49*	7,68
2.	**KESEHATAN**										
2.1	Cakupan kematian Neo Natal/ 1000 Kelahiran Hidup	21	20	4	19	4	19	4	18	4	18
2.2	Angka Kematian Balita/1000 Kelahiran Hidup (kasus)	42	40	5	40	6	38	6	38	6*	38
2.3	Angka Kematian Bayi / 1000 Kelahiran Hidup (kasus)	29	29	5	28	5	28	5	28	5*	28
2.4	Angka kematian Ibu/100.000 KH	183	165	92	155	126	145	126	130	101	125
2.5	Usia Harapan Hidup	70,94	70,96	71.04	70,98	71,26	71	71,58	71,02	71,58*	71,05
2.6	Ratio Puskesmas/12.000 penduduk	1:12.933	1:12.900	-	1:12.800	-	1:12.600	1:12.600	1:12.300	1:12.600*	1:12.000
2.7	Presentase gizi buruk (%)	3	2	0.01	2	0,01	1	0,01	1	0,01*	1
2.8	Prevalensi dengan berat badan rendah/ kekurangan gizi (%)	8,3	8	-	7	2,4	6	2,4	5	2,4*	4
2.9	Persentase Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	50	55	-	60	-	65	52,21 (80%)	70	52,21 (80%)*	75
2.10	Jumlah Kab/Kota dengan API Malaria <1 / 1.000 penduduk	13	13	13	13	14	14	12	15	12	15
2.11	Jumlah Kasus TB tercatat per 100.000 penduduk yang diobati	282	282	381/100.00	295	273/100.000	331	384	333	84	340
2.12	Jumlah kab/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	13	13 (85%)	9 (60%)	11 (73,3%)	9 60%	12 (86.7%)	11 (80%)	13 (85%)	6 (40%)	13
2.13	Persentase angka kasus HIV yang diobati	95	100	-	100	46%	100%	56%	100%	59%	100
2.14	Presentase Kab/kota yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok di minimal 50 % sekolah (%)	50	60	-	65	80%	70	80	80	80*	100
2.15	Jumlah Kab/kota yang memiliki RSUD daerah yang tersertifikasi/ Akreditasi	0	7	7	8	8	11	11	12	12	11
2.16	Terbangunnya fasilitas RSUD dan Rumas Sakit Mata (COD 2021)	-	*(tahap persiapan)*	-	*(tahap persiapan)*	-	*(tahap pembangunan)*	1 RSUD dan 1 RS Mata	*(tahap pembangunan)*	1 RSUD dan 1 RS Mata	COD 1 RSUD dan 1 RS Mata

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target dan Capaian (Tahun)								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
2.17	Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi/akreditasi	10	30	39	50	53	110	53	140	53*	187
2.18	% Penduduk Yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	60	62	-	63	64,2	66	64,9	67	64,9*	70
2.19	% Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	65	67	-	69	63,1	72	63,1	75	63,1*	80
2.20	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	60,23	80,0%	69,3	81,00%	63,67%	83,0%	63,67 %	85,00%	24,8%	87,0%
2.21	Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas I SD	59,95	59,96%	80,1%	90,00%	68,25%	94,00%	68,25%	95,0%	78,50%	95,0%
2.22	Puskesmas Mampu Laksana PKPR (%)	36,00%	59,96%	80.1%	90.00%	68,25%	94,00%	68,25%	95,00%	78,50%	75
2.23	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Antenatal K4	82,00%	76,00%	83,85%	78,00%	84,10%	80,00%	84,41%	82,00%	42,44%	84
2.24	Presentase Ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan	81,79	79,00%	84,59%	82,00%	85,00%	85,00%	85,84%	88,00%	43,80%	91
3	**SOSIAL**										
3.1	Kemiskinan	8,98%	8,5%	8,50%	8,2%	8,20%	8 %	8%	7,80 %	7,78 %	7,50%
3.2	Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (***Baseline: Berdasarkan Kepmensos 178/HUK/2016, Jumlah panti=73, Jumlah PMKS=2933)***	-	1,48	1.48	2,54	2,54	2,65	5.75	2,65	2,65	10,50
3.3	Persentase (%) Panti Sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.	15%	25%	25%	30%	30%	35%	35 %	50%	50 %	60%
3.4	Persentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (panti)	1	3	3	3	3	3	3	3	3	12
3.5	Persentase (%) Organisasi Sosial/ Yayasan/ LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.	15%	25%	25%	30%	30%	35%	35 %	50%	50 %	60%
3.6	Persentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.	33%	33%	33%	46%	46%	46%	46 %	66%	66 %	66%
4.	**PENGANGGURAN**	**7 %**	**6,8%**	**7,18%**	**6,75%**	**6,86%**	**6,70%**	**6,25%**	**6,65%**	**7.37%**	**6,60%**
4.1	Ratio Penduduk yang Bekerja	56%	5,72%	92,86	57,60%	93,13%	58,31%	93,75%	58,45%	94,43%	59,25%
4.2	Ratio Partisipasi Angkatan Kerja	62,05%	63,31%	60,85	6,41%	63,01%	62,79%	63,87 %	63,25%	63,80%	63,80%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target dan Capaian (Tahun)								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
5.	**ANGKA KRIMINALITAS YANG TERTANGANI (JUMLAH TINDAK KRIMINAL TERTANGANI DALAM SATU TAHUN PER JUMLAH PENDUDUK x 10.000)**	**561**	**561**	**7.534**	**570**	**7.037**	**570**	**4.180**	**570**	**4.180***	**580**
6.	**SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA**										
6.1	Grup Seni Musik Aktif	40	50	50	60	60	70	70	80	70*	90 grup
6.2	Grup Seni Tari Aktif	20	20	20	20	20	30	30	40	30*	50 grup
6.3	Jumlah teater/sastra Aktif	25	25	25	30	30	35	35	40	35*	45 teater/ sastra
6.4	Gedung Kesenian	2	2	2	3	3	3	3	3	3^	3 gedung
6.5	Apresiasi terhadap maestro ditiap cabang seni	5	5	5	5	5	6	6	7	6^	8 maestro
6.6	Seniman Lokal	3	3	3	5	5	7	7	9	7*	11 seniman
6.7	Warisan Takbenda	2	3	3	3	3	5	9	7	9*	9 warisan tak benda
6.8	Apreasiasi terhadap pelaku warisan takbenda	3	3	3	3	6	5	9	7	9*	9 apresiasi pelaku warisan tak benda
6.9	Pendataan koleksi museum Sulut	20	20	20	20	20	30	30	40	30*	50 koleksi museum sulut
6.10	Klub Olahraga (Standar 1/10.000)	5	8	-	8	-	9	13	10	13*	12
6.11	Gedung Olahraga (Standar 1/10.000)	12	15	100%	15-2	100%	15	22	15	22*	16
6.12	Jumlah organisasi pemuda	30	30	0%	30-2	100%	30	11	30	11*	30
6.13	Jumlah organisasi olahraga	30	30	100%	30-36	100%	30	53	30	53*	30
6.14	Jumlah kegiatan kepemudaan	20	30	100%	40-12	100%	50	46	60	46*	70
6.15	Jumlah kegiatan olahraga	20	30	100%	40-27	100%	50	55	60	55*	70
6.16	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019;	20%	25%	-	30%	-	35%	40 %	40%	40%*	45%
6.17	Prestasi olahraga ditingkat nasional/tingkat internasional	7 / 2	7 / 5	-	8 / 7	-	8 / 8	13/8	10 / 8	13/8*	10/ 8
6.18	Prestasi olahraga *paralympic* ditingkat nasional dan tingkat internasional	2 Nasional 1 internasional	-		-	-	-	-	10 Nasional internasional	-	10 Nasional internasional

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target dan Capaian (Tahun)								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
ASPEK PELAYANAN UMUM											
PELAYANAN DASAR/URUSAN WAJIB											
1.	**PENDIDIKAN**										
1.1.	Penuntasan Buta Aksara	99,60	99,60	-	99,75		99,80		99,80		99,80
1.2.	Angka kelulusan SMA	99,51	99,52	99,52	99,53		99,54	99,55	99,55	99,54*	99,56
2.	**KESEHATAN**										
2.1	Usia Harapan Hidup	70,94 tahun	90,94 tahun	71.04 tahun	70,98 tahun	71,26 tahun	71 tahun	71,26 Tahun	71, 02 tahun	71.58* Tahun	71,05 tahun
2.2	Cakupan kematian Neo Natal / 1000 Kelahiran Hidup (%)	21	21	4	19	4	19	4	18	4*	18
2.3	Angka Kematian Balita / 1000 Kelahiran Hidup	42	42	5	40	6	38	6	38	6*	38
2.4	Angka Kematian bayi / 1000 Kelahiran Hidup	29	29	5	28	5	28	5	28	5*	28
2.5	Angka Kematian Ibu/100.000 KH	183	165	92	155	-	145	-	130	-	125
2.6	Presentase gizi buruk	3,40%	3,40%	0.01	2	0,01	1	0,01	3,02%	0.01*	3,00%
3.	**LINGKUNGAN HIDUP**										
3.1	Persentase penanganan sampah (M^3)	47,50% (47,50/1.875045,18)x100%	50% dari 937.524,86 timbulan sampah	70,08% dari 937,524,86 Timbulan Sampah	52,50% dari 993.967,32 timbulan sampah	52,50% dari 993,967,32 Timbulan Sampah	55% dari 1.051.441,75 timbulan sampah	82,32% dari 1,054,441,75 Timbulan Sampah	57,50 dari 1.109.996,39 timbulan sampah	69,97% dari 1,054,441,75 Timbulan Sampah	60% dari 1.169.559,81 timbulan sampah
3.2	% Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	60%	62%		63%		66%	76,20 %	67%		70%
3.3	AMDAL (dokumen)	9	6	12	6	23	8	34 Dokumen	7	17	45
3.4	Pengelolaan Limbah B3 (Perusahaan)	10	10	26	8	40	6	46 Perusahaan	6	36	46
3.5	Persentasi Pengendalian pencemaran kualitas udara	8 kota	6 kota	12 Kota	6 kota	12 Kota	7 kota	12 kota	8 kota	15 Kota	8 kota
3.6	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan terhadap izin lingkungan	100% dari 25 pelaku usaha/ kegiatan	100% dari 25 pelaku usaha/ kegiatan	100% dari 29 pelaku usaha/ kegiatan	100% dari 25 pelaku usaha/ kegiatan	100% dari 8 pelaku usaha/ kegiatan	100% dari 25 pelaku usaha/ kegiatan	100% dari 27 pelaku usaha/kegiatan	100% dari 25 pelaku usaha/ kegiatan	100% dari 3 pelaku usaha/ kegiatan	100% dari 125 pelaku usaha/ kegiatan
3.7	Jumlah KLHS	1	6	5	1	1	1	1	1	1	6
3.8	Konservasi Sumber Daya Alam (KEHATI)	12 Lokasi	25 Lokasi	-	25 Lokasi	18	25 Lokasi	18 Lokasi	25 Lokasi	3	125 kasi

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target dan Capaian (Tahun)								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
4.	**SARANA DAN PRASARANA UMUM**										
4.1	Proporsi panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap	705,89 km dari 940,88 km (75,02 % kemantapan jalan)	652,891 km dari 998.613 km (65,38% kemantapan jalan)	65.38%	719,80 km dari 998.613 km (72,08% kemantapan jalan)	660,302 km dari 926,737 km (71,25% kemantapan jalan)	791,78 km dari 998.613 km (79,29% kemantapan jalan)	79, 50 % kemantapan jalan	870,96 km dari 998.613 km (87,21% kemantapan jalan)	79,50% kemantapan jalan*	878,74 km dari 998.613 km (89,54% kemantapan jalan)
4.2	Jumlah KK yang memperoleh akses air limbah	0 KK	0 KK	-	0 KK	-	100 KK	-	400 KK	-*	950 KK
4.3	Ratio jaringan irigasi/persentasi daerah irigasi yang terairi air irigasi	59,15% kondisi mantap atau 9,372 Ha Luas Fungsional Irigasi dari 18,302 Ha Luas Potensial Irigasi (14 Daerah Irigasi)	Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan 12 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (78,00% kondisi mantap atau 14,276 Ha Luas Fungsional Irigasi dari 18,302 Ha Luas Potensial Irigasi)	60.71%	Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan 12 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (79,56% kondisi mantap atau 14,562 Ha Luas Fungsional Irigasi dari 18,302 Ha Luas Potensial Irigasi)	67.88%	Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan 12 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (81,15% kondisi mantap atau 14,853 Ha Luas Fungsional Irigasi dari 18,302 Ha Luas Potensial Irigasi)	Rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan daerah irigasi kewenangan Prov. (77,72% kondisi mantap atau 13.690Ha luas fungsional)	Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan 12 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (82,78% kondisi mantap atau 15,150 Ha Luas Fungsional Irigasi dari 18,302 Ha Luas Potensial Irigasi)	Rehabilitasi, operasio dan pemeliharaan daerah irigasi kewenangan Prov. (77,72% kondisi mantap atau 13.690 Ha luas)*	Tercapainya Fungsi pelayanan air untuk Irigasi secara maksimal yang menunjang ketahanan pangan Provinsi/ Nasional yang berkelanjutan (84,43% kondisi mantap atau 15,453 Ha Luas Fungsional Irigasi dari 18,302 Ha Luas Potensial Irigasi)
4.4	Jumlah KK yang dilayani oleh sistem persampahan	0 KK	0 KK	-	100 KK	0 KK	100 KK	-	400 KK	-*	1000 KK
4.5	Rasio Rumah Layak Huni	-	94,83%	-	95,81%	95.58%	96,38%	95,6 %	97,15%	95,6*	97,92%
4.6	Jumlah KK yang terlayani akses Sistem Penyediaan Air Minum	0 SR	275 SR	275 SR	1000 SR	350 SR	1000 SR	75 SR	1125 SR	75 SR*	5000 SR
5.	**PENATAAN RUANG**										
5.1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	5,56%	16,67%	-	33,61%	95.58%	52,89%	95,58 %	74,83%	95,58*	74,83%
5.2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	67,00%	67,50%	-	68,00%	95.58%	68,50%	95,58 %	68,50%	95,58%*	68,50%
5.3	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	41,50%	44,00%	-	48,00%	-	53,00%	-	53,00%	-*	53,00%
5.4	Luas Tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum (ha)	20	32	-	52	-	60	27,5 Ha	70	27,5 Ha*	80
5.5	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas ber HPL/HGB	50,00%	53%	-	56%	-	56%	-	56%	-*	56%
5.6	Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan		4,34%	4,34%	4,45%	4,67%	4,67%	-	4,90%	-*	5,14%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target dan Capaian (Tahun)								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
6.	**PERHUBUNGAN**										
	Produksi Angkutan										
6.1	Angkutan Pelabuhan Laut:										
	Angkutan penumpang (org)	970.509	970.509	940.214	1.009.560	980.245	1.677.516	1.425.362	1.765.268	925.000	925.000
	Angkutan barang (ton)	6.953.904,83	6.953.904,83	6,953,904.83	7.649.295,31	7,649,295.31	8.414.224,84	8.414.224,84	9.255.647,32	2.458.659*	2.458.659
	Angkutan Peti Kemas (box)	892.720	892.720	892,720	981.992	981,992	1.080.192	1.080.192	1.188.211	469.258	469.258
6.2	Bandar Udara :										
	Angkutan penumpang :										
	Penerbangan internasional	82.470	82.470	82,470	90.717	90,717	99.789	286.274	109.769	48.276	164.652
	Penerbangan domestic	1.362.539	1.362.539	1,362,539	1.498.793	2,559,795	1.648.672	2.229.585	1.813.539	890.252	2.007.000
	Penerbangan internasional (angkutan barang-ton)	1.876.976,30	1.876.976,30	1,876,976.30	2.063.573,93	3,091,245.00	2.269.931,32	389.113,00	2.496.924,46	918.898	2.746.616,90
	Penerbangan domestic (angkutan peti kemas – box)	26.080.558,9	26.080.558,9	26,080,558.9	28.688.614,78	-	31.557.476,3	13.218.028	34.713.223,90	20.559.940	38.184.546,29
6.3	Jumlah bandarudara pusat penyebaran primer	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah
6.4	Jumlah Bandar udara pusat penyebaran tersier	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah
6.5	Jumlah Bandar udara bukan pusat penyebaran	1 buah	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	3 buah	3 buah	3 buah	4 buah	4 buah
6.6	Jumlah pelabuhan utama(internasional HUB)	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah
6.7	Jumlah pelabuhan pengumpul (nasional)	5 buah	5 buah	5 buah	5 buah	5 buah	5 buah	5 buah	5 buah	5 buah	6 buah
6.8	Jumlah pelabuhan pengumpan regional	10 buah	11 buah	11 buah	11 buah	11 buah	11 buah	11 buah	11 buah	11 buah	11 buah
6.9	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal	19 buah	19 buah	22buah	22 buah	22 buah	23 buah	25 buah	25 buah	27 buah	27 buah
6.10	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	13 Buah	13 Buah	14Buah	14 Buah	14 Buah	15 Buah	15 buah	15 Buah	17 buah	17 buah
6.11	N Jumlah terminal bus tipe A	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	4 bbuah	4 buah	4 buah	4 buah
6.12	Jumlah terminal bus tipe B	12 buah	12 buah	13buah	13 buah	13 buah	13 buah	10 buah	14 buah	10 buah	10 buah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target dan Capaian (Tahun)								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
ASPEK PELAYANAN UMUM											
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR											
1.	**PENANAMAN MODAL**										
1.1	Target rencana investasi PMDN (Rupiah)	823,763,600,000	1.000.000.000.000	6.447.000.000.000	2.000.000.000.000	PMDN. 1.488.173.300.000	3.000.000.000.000	8,259,596,000,000	3.000.000.000.000	3.005.640.000.000	12.823.763.200.000
1.2	Target rencana investasi PMA	1.743.861.310.000	1.500.000.000.000	1.488.000.000.000	4.000.000.000.000	PMA 6.447.766.840.000	4.500.000.000.000	3,307,104,000	5.500.000.000.000	2.241.929.000.000	24.243.861.310.000
1.3	Target Izin Investasi	1.276	1.276		1.300	2000	1.450	1,581	1.550	1.469	7.276
2.	**KOPERASI DAN UKM**										
2.1	Jumlah Koperasi Aktif	3,292	3,358	2,853	3,316	2.783	3,380	3.617	3,448	3.617*	3,517
2.2	Jumlah usaha mikro kecil menengah	53.461 UMKM	54.530 UMKM	76.154 UMKM	55.599 UMKM	84.392 UMKM	56.669 UMKM	94.153 UMKM	57.738 UMKM	94.153 UMKM*	61.958 UMKM
2.3	Jumlah wirausaha baru	1160 Wirausaha Baru	1080 Wirausaha Baru	1.410 Wirausaha Baru	297 Wirausaha Baru	780 Wirausaha Baru	247 Wirausaha Baru	660	247 Wirausaha Baru	660*	3591 Wirausaha Baru
2.4	Sarjana wirausaha baru	11.298 org	11.524 org	-	11.750 org	-	11.975 org	1.470 Org	12.202 org	1.470 org*	12.428 org
2.5	Wirausaha baru non sarjana	2.356 org	2.403 org	-	2.450 org	-	2.497 org	-	2.544 org	-*	2.592 org
2.6	Sertifikasi hak atas tanah bagi usaha mikro, kecil	761	300	-	300	-	300	-	300	-*	300
3.	**PANGAN**										
3.1	Ketahanan pangan yang ditunjukkan dengan Ketersediaan Energi dan Konsumsi Energi (Kilokalori/Kapita/Hari)	Ketersediaan energi minimal 2400, Konsumsi Energi minimal 2150	Ketersediaan energi minimal 2400, Konsumsi Energi minimal 2150	Ketersediaan energi minimal 3.259, Konsumsi Energi minimal 2.466,28	Ketersediaan energi minimal 2400, Konsumsi Energi minimal 2150	Ketersediaan energi minimal 3.284, Konsumsi Energi minimal 2.400,11	Ketersediaan energi minimal 2400, Konsumsi Energi minimal 2150	Ketersediaan energi minimal 2.748, Konsumsi Energi minimal 2.334,6	Ketersediaan energi minimal 2400, Konsumsi Energi minimal 2150	Ketersediaan energi minimal 2.812; Konsumsi Energi minimal 2.335	Ketersediaan energi minimal 2812, Konsumsi Energi minimal 2335
3.2	Menurunnya daerah beresiko rawan pangan	2 % (dari 224 desa beresiko)	2 % (dari 224 desa beresiko)	2 % (dari 224 desa beresiko)	2 % (dari 224 desa beresiko)	0,28 % (dari 224 desa beresiko)	2 % (dari 224 desa beresiko)	1,75 % (dari 224 desa beresiko)	2 % (dari 224 desa beresiko)	4,68 % (dari 224 desa beresiko)	
3.3	Cakupan ketersediaan infrastruktur kemandirian pangan	-	1 Unit Lumbung di Daerah Kepulauan	1 Unit Lumbung di MIANGAS	4 Lumbung pangan di daerah kepulauan	1 Unit lumbung di Marore	4 Lumbung pangan di daerah kepulauan dan non sentra produksi	-	4 Lumbung pangan di daerah kepulauan dan non sentra produksi	-*	2 Lumbungan pangan di daerah kepulauan
4.	**KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**										
4.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	-	-	-	1,2%	1,15%	1,1%	1,09 %	1,0%	1,0%	0,9%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target dan Capaian (Tahun)								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
4.2	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate)* per WUS (15-49 tahun)	2,36	2,3	2,35	2,31	2,3	2,3	2,54	2,28	2,36	2,25
4.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet needs)	-	-	-	12,40%	10,37%	12,40%	9,20%	12%	8,76%	10%
4.4	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	-	-	-	33%	52%	30%	51%	30%	37%	30%
4.5	Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera (%)	39.881	39.880	198,88	38.883	193,31	38.883	191,70	37.880	191,70*	37.380
4.6	Tersedianya profil kependudukan provinsi	-	-	-	2	-	2	2	2	2*	8
4.7	Cakupan peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan data base kependudukan yang akurat	15	15	15	15	15	15	15	15	15*	15
5.	**KETENAGAKERJAAN**										
5.1	Rasio Penduduk yang bekerja	52,06%	52,06%	92,86%	57,60%	93,13%	58,31%	93,75 %	58,45%	94,43%	59,25%
5.2	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	63,31%	63,31%	60,85%	63,41%	63,01%	62,79%	63,87 %	63,25%	64,41%	63,80%
5.3	Pencari kerja yang sudah ditempatkan	25%	25%	21%	26%	21%	30%	33 %	35%	67% (670 orang)	40%
5.4	Angka penyelesaian kasus hubungan industrial	50 kasus yang diselesaikan	50 kasus yang diselesaikan	47 kasus yang diselesaikan	60 kasus yang diselesaikan	57 kasus yang diselesaikan	80 kasus yang diselesaikan	189 kasus yang diselesaikan	100 kasus yang diselesaikan	25 kasus yang diselesaikan	410 kasus yang diselesaikan
6.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**										
6.1	Ratio kontribusi perempuan dlm pekerjaan upahan disektor non pertanian	35%	35%	27%	38%	38%	42%	47 %	45%	47%*	47%
6.2	Proporsi kursi parlemen yang diduduki perempuan	25%	25%	23%	25%	23%	25%	25 %	25%	27%	25%
6.3	Indeks pemberdayaan gender	79,82	79,82	82.37	79,82	82.37	79,82	79.85 %	79,85	79,85%*	79,85
6.4	Indeks pembangunan gender	94,64	94,64	94,78	95,00	94,78	95,00	96.00 %	96,00	96.00%*	96,00
6.5	Ratio KDRT	0,04	0,04	0.03	0,03	0,039	0,03	0.02 %	0,03	0.03%	0,02
6.6	Tenaga kerja perempuan yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	100 org	100 org		150 org	-	150 org	200 Org	200 org	200 org*	200 org
6.7	Jumlah calon wirausaha baru perempuan yang dilatih	100 org	100 org	300 org	200 org	300 org	300 org	500 org	400 org	500 org*	500 org
6.8	Prosentase calon pekerja migrant perempuan yang terlayani dan tercatat	25%	25%		35%	-	50%	75 %	62%	75%*	75%
6.9	Jumlah kader Parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik	360 Orang	100 Orang	120 Orang	100 Orang	-	100 Orang	100 Org	100 Orang	100 org*	500 Orang

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target dan Capaian (Tahun)								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
6.10	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (jlh perempuan dilembaga pemerintah/jumlah pekerja)	39,00%	40%	40.00%	41%	40%	41%	45 %	42%	60.37%	45%
6.11	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (pekerja perempuan dilembaga swasta/jumlah pekerja perempuan x 100)	5%	5%		8%	-	10%	14 %	12%	49%	14%
6.12	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (pekerja anak usia 5-14 tahun/jumlah pekerja usia 5 tahun keatas x 100)	6%	6%	0%	5%	0%	4%	2 %	3%	2%*	2%
6.13	Prosentase SKPD Provinsi dengan Renstra Responsif Gender	35%	35%	87%	35%	87%	35%	87 %	35%	87%*	40%
6.14	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	30%	40%	100%	50%	100%	60%	80 %	70%	100%	80%
6.15	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	30%	40%	100%	50%	100%	60%	80 %	70%	100%	80%
6.16	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%
7.	**KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**										
7.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	-	-	-	3 anak	3 anak	3 anak	2 anak	2 anak	2 anak*	2 anak
7.2	Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun semua cara	-	-	-	67,4%	68.00%	68%	70 %	68%	70 %*	70%
7.3	Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun cara modern.	17,00 %	20,00%	20,00%	35,00%	-	55,00%	78 %	65,00%	78 %*	78,00%
8.	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**										
8.1	Jumlah surat kabar nasional	3 buah	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	5 buah	4 buah	5 buah	4 buah*	5 buah
8.2	Jumlah surat kabar local	5 buah	6 buah	6 buah	6 buah	6 buah	7 buah	11 buah	7 buah	11 buah*	7 buah
8.3	Jumlah stasiun penyiaran radio	20 buah	20 buah	4 buah	20 buah	4 buah	20 buah	4 buah	20 buah	4 buah*	20 buah
8.4	Jumlah stasiun penyiaran TV lokal	3 buah	3 buah	2 buah	3 buah	2 buah	3 buah	2 buah	3 buah	2 buah*	3 buah
8.5	Terbangunnya *Command Centre*	-	-	-	-	-	1 unit	1 Unit	-	1 unit*	1 unit
9.	**PERTANAHAN**										
9.1	Luas lahan terdaftar	85.152.231,21 ha	85.152.231, 21 ha	-	85.152.231, 21 ha	-	85.152.231, 21 ha	27.5 Ha	85.152.231, 21 ha	27.5 Ha*	85.152.231, 21 ha
9.2	Jumlah bidang tanah terdaftar	332.391	332.391	-	332.391	332,391	332.391	-	332.391	-*	332.391

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target dan Capaian (Tahun)								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
10.	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**										
10.1	Jumlah Kab/Kota dan Perangkat Daerah Prov. yang menerapkan SPM	38 PD dan 15 Kab/ Kota	38 PD dan 15 Kab/ Kota	38 PD dan 15 Kab/ Kota	38 PD dan 15 Kab/ Kota	38 PD dan 15 Kab/ Kota	38 PD dan 15 Kab/ Kota	38 PD dan 15 Kab/ Kota	38 PD dan 15 Kab/ Kota	38 PD dan 15 Kab/Kota^	39 PD dan 15 Kab/ Kota
10.2	Jumlah LSM	16	16	16	16	16	16	16	16	16*	16
10.3	Jumlah Organisasi Masyarakat	25	25	25	25	25	25	25	25	25*	25
10.4	Jumlah Organisasi Keagamaan	7	7	7	7	7	7	7	7	7*	7 Sekretariat
11.	**PERPUSTAKAAN**										
11.1	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	64.007	67.554	67,554	67.554	67,554	67.554	68.541	67.554	68.541*	67.554
11.2	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	5.826	7.046	7,046	7.246	7,345	7.446	7.543	7.646	7.543*	7.846
12.	**PENYELENGGARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**										
12.1	Rasio kecukupan personil Satuan Polisi Pamong Praja se Provinsi Sulawesi Utara	2.410	2.410	4,56 : 1000 Penduduk	3.104	4,52 : 1000 penduduk	3.237	4,52: 1.000 penduduk	3.655	4,52 : 1000 penduduk*	5.665
12.2	Rasio pelayanan 1 orang anggota Satpol PP kepada masyarakat	945	945	228,27 : 50.000 penduduk	730	226,13 : 50.000 penduduk	682	226,13 : 50.000 penduduk	620	226,13 : 50.000 Penduduk*	400
12.3	Rasio peningkatan keamanan dan ketertiban	-	91.20%	100%	92.52%	100%	93.24%	100 %	94.20%	100%*	95.08%
12.4	Tingkat Penegakan Perda, Pergub, Perkepda da Produk Hukum lainnya	-	100.00%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%*	100%
12.5	Persentase tingkat pelanggaran terhadap Perda Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya	-	15.02%	100%	14.31%	100%	13.08%	100 %	12.48%	100%	11.07%
12.6	Jumlah personil yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Satpol PP	-	25 org	100%	90 org	100%	160 org	100%	240 org	0%	310 org
12.7	Penurunan Crime Rate	-	8.20		7.38	100%	6.56	100%	5.74	100%	4.92
12.8	Persentase jumlah kebakaran yang tertangani	-	10%	-	30%	100%	40%	100 %	60%	-	60%
ASPEK DAYA SAING DAERAH											
1.	**KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH**										
1.1	Nilai Tukar Petani	94	94,5	93,25	95	96,53	96		98		101
1.2	Jumlah kunjungan wisman dan wisnus	1.484.402 wisnus dan 40.624 wisman	1.500.000 wisnus dan 100.000 wisman	1.484.402 wisnus dan 79.377 wisman	1.500.000 wisnus dan 100.000 wisman	1.800.000 wisnus dan 122.100 wisman	1.500.000 wisnus dan 100.000 wisman	2.400.000 wisnus dan 129.588 wisman	1.500.000 wisnus dan 100.000 wisman	... wisnus dan 23.031 wisman	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target dan Capaian (Tahun)								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
2.	**IKLIM BERINVESTASI**										
2.1	Jumlah Demo	27	18	-	18	-	15	91	15	-*	15
2.2	Kemudahan Perijinan (Lama Proses perijinan)	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	3 hari	4 hari
URUSAN PILIHAN											
1.	**PERTANIAN DAN PETERNAKAN**										
1.1	Produksi Tanaman Pertanian	Produksi Padi 584.031 Ton, Jagung 446.144 Ton, Kedelai 7.627 Ton, Bawang merah 2.555 Ton, Cabe Rawit 12.783 Ton,Cabe Besar 3.570 Ton, Tomat 24.258 Ton	Produksi Padi 600.052 Ton, Jagung 1.049.100 Ton, Kedelai 7.786 Ton, Bawang Merah 2.693 Ton, Cabe Rawit 13.039 Ton, Cabe Besar 3.641 Ton, Tomat 24.743 Ton	Produksi Padi 775.847 ton, Jagung 1.636.236 ton, Kedelai 7.806 ton, Bawang Merah 2.931 ton, Cabe Rawit 17.130 ton, Cabe Besar 4.939 ton, Tomat 27.453 ton	Produksi Padi 642.055 Ton, Jagung1.154.010 Ton, Kedelai 8.565 Ton, Bawang Merah 2.747 Ton, Cabe Rawit 13.299 Ton, Cabe Besar 3.714 Ton, Tomat 25.238 Ton	Produksi Padi 871.120.0 ton, Jagung 1.231.852 Ton, Kedelai 48.203 ton, Bawang Merah 3.740 ton, Cabe Rawit 16.470 ton, Cabe Besar 6.629 ton, Tomat 53.000.074 ton	Produksi Padi 686.998 Ton, Jagung 1.269.411 Ton, Kedelai 9.422 Ton, Bawang Merah 2.802 Ton, Cabe Rawit 13.565 Ton, Cabe Besar 3.789 Ton, Tomat 25.743 Ton	Produksi padi 857.432 ton, Produksi,jagung 1.295.353 ton, Produksi kedelai 11.877 ton, Produksi bawang merah 3.139 ton, Produksi cabe rawit 14.760 ton, Produksi cabe besar 5.537 ton, Produksi tomat 42.392 ton	Produksi Padi 735.087 Ton, Jagung 1.396.352 Ton, Kedelai 10.364 Ton, Bawang Merah 2.858 Ton, Cabe Rawit 13.837 Ton, Cabe Besar 3.864 Ton, Tomat 26.257 Ton	Produksi Padi 739.957 Ton, Jagung 1.435.042 Ton, Kedelai 13.483 Ton, Bawang Merah 4.537 Ton, Cabe Rawit 22.535 Ton, Cabe Besar 7.664 Ton, Tomat 48.785 Ton	Produksi Padi 786.543 Ton, Jagung 1.535.987 Ton, Kedelai 11.400 Ton, Bawang Merah 2.821 Ton, Cabe Rawit 14.113 Ton, Cabe Besar 3.846 Ton, Tomat 26.783 Ton
1.2	Produksi Peternakan	Produksi Daging Sapi 3.431.241 Kg, Babi 16.061.280 Kg, Ayam 2.313.971 Kg,	Produksi Daging Sapi 3.438.103 Kg, Babi 17.185.570 Kg, Ayam 2.337.111 Kg, populasi sapi perah 15 ekor, populasi kuda pacu 300 ekor	Daging Sapi 3.496.608 kg, Daging Babi 23.534.900 kg, Daging Ayam 2.612.217 kg, populasi sapi perah 62 ekor, populasi kuda pacu 375 ekor	Produksi Daging Sapi 3.444.980 Kg, Babi 18.388.559 Kg, Ayam 2.360.482 Kg,populasi sapi perah 20 ekor, populasi kuda pacu 400 ekor	Daging Sapi 3.518.331 kg, Daging Babi 24.827.503 kg, Daging Ayam 2.636.413 kg, Peningkatan Produksi Daging Sapi Perah 27 ekor, Peningkatan Produksi Kuda Pacu 460 ekor	Produksi Daging Sapi 3.451.870 Kg, Babi 19.675.759 Kg, Ayam 2.384.087 Kg, populasi sapi perah 25 ekor, populasi kuda pacu 500 ekor	Produksi dagingt sapi 3.693.675 ekor, Produksi daging babi 25.112.902. Kg, Produksi daging ayam 2.701.351. Kg, Populasi sapi perah 66 ekor, Populasi kuda pacu 550 ekor	Produksi Daging Sapi 3.458.773 Kg, Babi 21.053.062 Kg, Ayam 2.407.928 Kg, populasi sapi perah 30 ekor, populasi kuda pacu 600 ekor	Produksi Daging Sapi 3.484.195 Kg, Babi 23.434.957 Kg, Ayam 2.771.768 Kg, populasi sapi perah 70 ekor, populasi kuda pacu 610 ekor	Produksi Daging Sapi 3.465.691 Kg, Babi 22.526.776 Kg, Ayam 2.432.007 Kg,populasi sapi perah 75 ekor, populasi kuda pacu 150 ekor
2.	**PERKEBUNAN**										
2.1	NTP Pekebun	86	87	87,37	88	89,79	89	-	92	93 (Juli)	95
2.2	Produksi dan produktifitas komoditi perkebunan meningkat	Produksi kelapa 270.036 ton, Produktifitas kelapa 1213 kg/ha, Produksi Cengkih 20.217 ton, produktifitas cengkih 443 kg/ha, Produksi Pala 10.163 ton, Produktifitas pala	Produksi kelapa 271.000 ton, Produktifitas kelapa 1225 kg/ha, Produksi Cengkih 20.225 ton, produktifitas cengkih 445 kg/ha, Produksi Pala 10.165 ton , Produktifitas pala	Kelapa : produksi 260.667 ton; produktivitas 1.176,61 kg/ha; cengkeh produksi 4.456,31 ton, produktivitas 98,53 kg/ha ; pala : produksi 11.219,44 ton, produktivitas 1.214,93 kg/ha; kopi : produksi 3.478,9 ton,	Produksi kelapa 272.000 ton, Produktifitas kelapa 1225 kg/ha, Produksi Cengkih 20.225 ton, produktifitas cengkih 445 kg/ha, Produksi Pala 10.166 ton , Produktifitas pala	Produksi kelapa 273.578,08 ton, Produktifitas kelapa 1.259,36 kg/ha, Produksi Cengkih 4.562,51 ton, produktifitas cengkih 100,27 kg/ha, Produksi Pala 11.311,31 ton , Produktifitas pala	Produksi kelapa 273.500 ton, Produktifitas kelapa 1250 kg/ha, Produksi Cengkih 20.225 ton, produktifitas cengkih 445 kg/ha, Produksi Pala 10.165 ton , Produktifitas pala	Produksi kelapa ton, Produktivitas kelapa 1.262,63 Kg/Ha, Produksi cengkeh 36,468,76 ton, Produktifitas cengkeh 810,10 Kg/Ha, Produksi pala 11,608,54 ton, Produktifitas pala 1.171,29 Kg/Ha,	Produksi kelapa 274.250 ton, Produktifitas kelapa 1250 kg/ha, Produksi Cengkih 20.225 ton, produktifitas cengkih 445 kg/ha, Produksi Pala 10.165 ton , Produktifitas pala	Produksi kelapa 275.493 ton * Produksi cengkeh 36.469 ton* Produksi pala 11.609 ton* Produksi Kakao 5.804 ton* Produski Aren 1.127 ton*	Produksi kelapa 275.500 ton, Produktifitas kelapa 1250 kg/ha, Produksi Cengkih 20.230 ton, produktifitas cengkih 445 kg/ha, Produksi Pala 10.170 ton

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target dan Capaian (Tahun)								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
		1167 kg/ha, Prduksi kakao 4258 ton, Produktifitas kakao 520 kg/ha, Produksi Aren 1334 ton, Produktifitas Aren 475 kg/ha)	1170 kg/ha, Produksi kakao 4260 ton , Produktifitas kakao 522 kg/ha, Produksi Aren 1334 ton, Produktifitas Aren 475 kg/ha)	produktivitas 628 kg/ha; cacao produksi 4.748, produktivitas 643,15 kg/ha; panili : produksi 60,16 ton, produktivitas 173,70 kg/ha; aren: produksi 1.103,99 ton, produktivits 413,05 kg/ha; abaca : produksi 305,99 ton, produktivitas 1.594,70 kg/ha	1170 kg/ha, Produksi kakao 4260 ton , Produktifitas kakao 522 kg/ha, Produksi Aren 1334 ton, Produktifitas Aren 475 kg/ha)	1.140,26 kg/ha, produksi kopi 3.734,85 ton, produktifitas 662,65 kg/ha; Produksi kakao 6.056,10 Produktifitas kakao 716,63 kg/ha, Produksi Panili ; produksi 17,71 ton, produktifitas 84,23 kg/ha ; Aren; produksi 1.251,20 ton, Produktifitas Aren 449,87 kg/ha ; Abaca; Produksi 2.492,80 ton, produktifitas 11.011,56 kg/ha)	1170 kg/ha, Produksi kakao 4260 ton, Produktifitas kakao 522 kg/ha, Produksi Aren 1334 ton, Produktifitas Aren 475 kg/ha)	Produksi kopi 3.732,83 ton, Produktifitas 662,29 kg/ha; Produksi Kakao 5,803,52 Produktifitas kakao 678,51 Kg/Ha, Produksi Panili; 17,71 ton, produktifitas82,08 kg/ha; Produksi aren 1,127,33 ton, Produktifitas aren 416,25 Kg/Ha Abaca; Produksi 78 ton, produktifitas 274,76kg/ha	1170 kg/ha, Produksi kakao 4260 ton, Produktifitas kakao 522 kg/ha, Produksi Aren 1334 ton, Produktifitas Aren 475 kg/ha)		, Produktifitas pala 1170 kg/ha, Produksi kakao 4260 ton, Produktifitas kakao 522 kg/ha, Produksi Aren 1334 ton, Produktifitas Aren 475 kg/ha)
3.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**										
3.1	Produksi perikanan tangkap (ton)	336.527	353.353	358.678	371.020	382.005	382.150	384.300	393.614	342.142	405.422
3.2	Produksi perikanan budidaya (ton)	440.000	450.000	459.514	472.500	488.247	500.000	569.502	530.000	371.043	575.000
3.3	Nilai ekspor perikanan (US$1000)	125.000	130.000	127.669	135.000	131.923	140.000	142.535	150.000	132.524	160.000
3.4	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	57	58	58.88	60	60.08	60,5	60,13	60,8	62,67	61,5
3.5	Jumlah penerimaan PAD (Rp.1000)	1.253.800	1.400.000	917.032.185	1.600.000	960.665.015	1.800.000	1.361.290	2.000.000	1.800.448. 500	2.200.000
3.6	Jumlah kontribusi PDRB	7,0	7,0	8.3	7,2	9,2	7,5	7,84	7,8	6.7	8,0
3.7	Jumlah PPK yang dikelola potensi ekonominya (pulau)	2	3	3	4	4	5	5	6	5	7
3.8	Luas kawasan konservasi (ha)	67.864	75.000	143.727	80.000	374,230.98	110.000	374.231	130.000	374.231	150.000
3.9	Prosentase penurunan tingkat kerusakan terumbu karang da mangrove (%)	72	65	62	55	62	40	35 %	30	25	22
3.10	Jumlah jenis keanekaragaman hayati yang dikelola (jenis)	2	3	3	4	3	5	5	6	5	7
3.11	Prosentasi kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan yang berlaku	85	89	80	93	95	95	97	98	95	100
3.12	Jumlah kerjasama pengelolaan SDKP (MOU)	1	3	2	5	2	7	5	8	6	10
3.13	Indeks NTN Perikanan (%)	-	-	-	-	-	2%	5 %	-	-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target dan Capaian (Tahun)								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
3.14	NTN (Nelayan)	103	104	113.36	105	114.2	106	118	107	104,24	108
3.15	NTPi (Pembudidaya)	91	92	92.68	94	94.24	95	95,93	100	101,19	102
4.	**KEHUTANAN**										
4.1	Menurunnya lahan kritis dalam kawasan hutan	832,623,56	0,12 % (1000 Ha)	0,63% 5.204,50 Ha	0,12 % (1000 Ha)	0,73% 6.103,04 Ha	0,12 % (1000 Ha)	0,73 % (7.125,04 Ha)	0,12 % (1000 Ha)	152.5% 1.525 Ha*	0,60 % (5000 Ha)
4.2	Menurunnya kerusakan kawasan hutan	12.363,11 Ha	1,49% 11.363,11 Ha	1,07% 8.158,61 Hs	1,36% 10.363,11 Ha	0,95% 7.260,07 Ha	1,22% 9.363,11 Ha	0,81 % 6.238,07 Ha	1,09% 8.363,11 Ha	2.11% 177 Ha*	7.363,11 Ha
4.3	Peningkatan Pengelolaan Taman Hutan Raya	1 Tahura	1 Tahura	1 Tahura	2 Tahura	1 Tahura	2 Tahura	1 Tahura	2 Tahura	1 Tahura*	2 Tahura
5.	**ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL**										
5.1	Rasio Elektrifikasi(%)	86,3%	87%	92,47%	88%	92%	89%	98 %	90%	99%	99%
5.2	Rasio Desa berlistrik (%)	91%	95%	98,47%	97%	98,5%	99%	99,18%	100%	99,39%	100%
5.3	Produksi Logam	81.486,58 OZ	101.858,22 OZ	-	122.229,83 OZ	-	146.675,83 OZ	97.816.00	176.010,99 OZ	97.816.00*	211.213,19 OZ
5.4	Produksi Non Logam	10.010.124 M3	12.512.655 M3	-	15.015.186 M3	-	18.018.223 M3	14.562.226	21.621.867,84 M3	14.562.226*	25.946.241,41 M3
5.5	Penurunan Jumlah Wilayah PETI	35%	49%	-	60%	-	75%	51.82	90%	51.82*	100%
6.	**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**										
6.1	Nilai Ekspor Produk Industri	6	6	-4,74	6	0.14	6	-21,22	6	21.22% per tahun	6
6.2	Pertumbuhan Industri	1,1	1,33	8	1,6	4.48	1,92	5	2.3	5*	2,77%
6.3	Jumlah IKM (unit usaha) Aktif	95	100	115	105	1864	120	871	0	871*	134
1	**OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN UMUM, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN**	DAPAT DILIHAT PADA LAMPIRAN I									
2.	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**										
2.1	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	5	6	2	5	2	5	5	5	5	5
2.2	Kab/kota yang menyelesaikan dokumen RAD	10	10	10	12	12	12	9	13	14	14

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target dan Capaian (Tahun)								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
2.3	Prosentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	75%	80%	80%	82%	85%	85%	95%	90%	95%	95%
2.4	Konsistensi kinerja perencanaan pembangunan dalam RPJMD-RKPD-KUA/PPAS	90%	80%	85%	90%	90%	90%	95%	90%	96%	90%
2.5	Cakupan Hasil Evaluasi pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah	75%	78%	70%	80%	80%	82%	85%	85%	86%	87%
3	**ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH**										
3.1	Opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah prov. Sulut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.3	Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah Antar Tahun Anggaran	5%	5%	29,34%	5%	1,53%	5%	3,96%	5%	(-2,27)	5%
3.4	Persentase Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	30%	30%	42,09%	31%	44,43%	32%	44.56 %	33%	42,98	34%
3.5	Jumlah Potensi Wajib Pajak PKB	601.573	652.000	657.555	691.120	628.358	732.587	720.223	776.542	697.563	,8231,354
3.6	Jumlah Potensi Wajib Pajak PBBKB	4 WAPU	6 WAPU	7 WAPU	7 WAPU	6 WAPU	8 WAPU	5 WAPU	9 WAPU	8 WAPU	10 WAPU
3.7	Jumlah Potensi Wajib Pajak PAP	15 WP	16 WP	16 WP	18 WP	20 WP	20 WP	38 WP	38 WP	43 WP	24 WP
3.8	Jumlah Objek Penerimaan Pendapatan Di Luar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	14 objek	14 Objek	15 Objek	15 Objek	15 Objek	15 objek	21 objek	15 objek	24 objek	15 objek
3.9	Jumlah Potensi Wajib Retribusi	24 WR	27 WR	31 WR	31 WR	41 WR	39 WR	48 WR	39 WR	50 WP	39 WR
3.10	Persentase Potensi Wajib Pajak Yang Terpungut	55%	60%	63%	63%	60.20%	65%	65%	67%	45%	70%
3.11	Persentase Potensi Wajib Retribusi Yang Terpungut	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	90%	100%
3.12	Persentase Potensi Objek Penerimaan Di Luar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.13	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	80%	80,82%	80%	95%	80%	89,39 %	82%	97,14%	82%
3.14	Rasio Cakupan Sentra Layanan Perpajakan Daerah Terhadap Wajib Pajak Per Hari Yang Dilayani Antar Tahun Anggaran	1:66 (per hari)	1:66 (per hari)	1:60 (per hari)	1:60 (per hari)	1:41 (per hari)	1:59 (per hari)	1:36 (per hari)	1:36 (per hari)	1:35 (per hari)	1:57 (per hari)
3.15	Persentase Tingkat Gangguan Dan Sistem	2%	2%	2,48%	1,8%	1,9%	1,6%	1,6%	1,5%	1.3%	1,0%
3.16	Persentase Tingkat Gangguan Perangkat Keras Teknologi Informasi	2%	2%	2,12%	1,8%	2,4%	1,6%	1,6%	1,5%	1.3%	1,0%
3.17	Persentase Tingkat Pelaksanaan SOP Dan Standar Pelayanan	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%
3.18	Persentase Perangkat Daerah Penghasil Kab./Kota/Provinsi Yang Melaksanakan Hasil Kesepakatan	90%	90%	100%	92%	100%	100%	100 %	100%	84,61%	100%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target dan Capaian (Tahun)								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
4	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**										
4.1.	Jumlah rekomendasi hasil kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan	-	22 rekomendasi	9 Rekom	22 rekomendasi	42 Rekom	23 rekomendasi	98 Rekomendari	23 rekomendasi	0 rekomendasi	23 rekomendasi
4.2.	Jumlah inovasi dan teknologi daerah yang dipublikasikan	1	1	0	2	1	3	-	4	4	16
4.3.	Jumlah perjanjian MOU kerjasama kelitbangan dengan kab/kota/PT dan tindak lanjutnya	10	15	3	13	-	13	1	14	0 rekomendasi	15
5.	**KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**										
5.1	Prosentase ASN dengan disiplin kerja tinggi	80%	82%	95%	85%	95%	90%	93,31	92%	93,94%	95%
5.2	Cakupan pejabat struktural dan fungsional menduduki jabatan sesuai anjab dan ABK	75%	80%	80,27%	82%	83,89%	84%	91,66%	86%	92%	88%
5.3	Cakupan layanan baku mutu kepegawaian	80%	85%	86,74%	90%	90%	95%	95%	97%	97%	100%
5.4	Persentase alumni diklat kepemimpinan yang menerapkan Inovasi/ proyek perubahan	40%	50%	85%	55%	90%	60%	90%	65%	Tidak dapat dilaksanakan sehubungan Refocusing dan Realokasi Anggaran	75%
5.5	Persentase peserta diklat kompetensi manajerial lulus dengan kategori sangat memuaskan	40%	40%	80%	85%	85%	60%	80 %	95%	Tidak dapat dilaksanakan sehubungan Refocusing dan Realokasi Anggaran	75%
5.6	Persentase ASN menduduki jabatan struktural telah mengikuti diklat manajerial sesuai jabatan yang diampu	75%	80%	80%	85%	85%	90%	90%	95%	90%	100%
5.7	Persentase instansi/kab-kota pengirim puas terhadap pelaksanaan diklat kepemimpinan	53%	66,6%	85%	66,6%	85%	80%	85 %	80%	Kab/Kota tidak melaksanakan Diklat Struktural sehubungan dengan Refocusing dan Realokasi Anggaran	100%
5.8	Persentase peserta diklat kompetensi teknis inti lulus dengan kategori sangat memuaskan	75%	10%%	75,00%	33,00%	75,00%	90%	90 %	79,00%	Tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan Refocusing dan Realokasi Anggaran	95%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target dan Capaian (Tahun)								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
5.9	Persentase peserta diklat kompetensi teknis umum dan fungsional lulus dengan kategori sangat memuaskan	75%	10%	25,00%	25,00%	75,00%	90%	90 %	70,00%	77,26%	95%
5.10	Jumlah karya tulis di bidang Administrasi dan pengelolaan kelembagaan yang Terpublikasi di media ilmiah/ Publikasi nasional	7	12	-	17	-	22	22	25	26	30

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 – 2026

MATRIKS EVALUASI
PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL's (SDG's)*
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016-2021

Keterangan Warna :

	MELAMPAUI TARGET		BELUM TERCAPAI		TERCAPAI

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
TUJUAN 1 MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN DIMANAPUN										
1.2 PADA TAHUN 2030, MENGURANGI SETIDAKNYA SETENGAH PROPORSI LAKI-LAKI, PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK DARI SEMUA USIA, YANG HIDUP DALAM KEMISKINAN DI SEMUA DIMENSI, SESUAI DENGAN DEFINISI NASIONAL										
1.2.1*	**PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN NASIONAL, MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR.**									
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya										
Kegiatan 1	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan UEP Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	20 klp	10 Klmp (100 KK)	20 klp	10 Klmp (100 KK)	10 Klmp (100 KK)		206.000.000,00	DINAS SOSIAL DAERAH
Kegiatan 2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni	185 kk/unit	130 KK	185 kk/unit	130 KK	130 KK		4.423.200.000,00	
Kegiatan 3	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Jumlah Sarana Umum yang dibangun dilokasi KAT	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit		137.519.200,00	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
Kegiatan 1	Pelayanan dan Rehabilitasii Sosial Anak	Jumlah Anak, Balita terlantar, Anak Jalanan, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Anak dengan Kecacatan, Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan sosial didalam dan diluar panti	2418 anak	1204 Anak	2418 anak	1204 Anak	1204 Anak		467.708.000	DINAS SOSIAL DAERAH
Kegiatan 2	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Jumlah Lansia Miskin/Terlantar didalam dan diluar panti yang Mendapatkan Bantuan Sosial	604 LU	330 Lanjut Usia	604 LU	330 Lanjut Usia	330 Lanjut Usia		404.360.000	
Kegiatan 3	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial didalam dan diluar panti	401 paca	230 Orang	401 paca	230 Orang	230 Orang		260.882.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 4	Pembinaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Terlaksananya Hari Lanjut Usia Nasional	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		116.615.000	
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma										
Kegiatan 1	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Terpenuhinya Makanan Penyandang Eks Kusta dalam Setahun	1 TA	20 org	1 TA	20 org	20 org		174.250.000	DINAS SOSIAL DAERAH
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)										
Kegiatan 1	Bimbingan Sosial Keterampilan bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah Tuna Sosial (Eks Penyandang Penyakit Sosial) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	20 org	20 org	20 org	20 org	20 org		104.550.000	DINAS SOSIAL DAERAH
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial										
Kegiatan 1	Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	57 PSKS	13 Orang	57 PSKS	13 Orang	13 Orang		113.233.000	DINAS SOSIAL DAERAH
Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial										
Kegiatan 1	Pelestarian Nilai-Nilai Kebangsaan	Terlaksananya Ziarah ke TMP/MPN dan Makam Mantan Gubernur	3 Keg	3 Kegiatan	3 Keg	3 Kegiatan	3 Kegiatan		41.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH
Kegiatan 2	Kegiatan Penanaman Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial	Terlaksananya hari kesetiakawanan Sosial	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		288.640.000	
Program Pemantapan Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)										
Kegiatan 1	Rapat Koordinasi Pemutahiran Data PMKS dan PSKS	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Kemiskinan	1 Keg	1 Kegiatan	1 Keg	1 Kegiatan	1 Kegiatan		176.186.000	DINAS SOSIAL DAERAH
Program Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial										
Kegiatan 1		Terkoordinasikannya Lintas Sektor dalam Pemantauan Pelaksanaan UGB dan PUB	1 Keg	1 Kegiatan	1 Keg	1 Kegiatan	1 Kegiatan		20.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)										
Kegiatan 1	Monitoring Koordinasi Bansos Pangan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Bansos Pangan	1 keg	1 Kegiatan	1 keg	1 Kegiatan	1 Kegiatan		29.999.000	DINAS SOSIAL DAERAH
Program Layanan Rujukan Terpadu										
Kegiatan 1	Rapat Koordinasi Program SLRT	Terlaksananya Rapat Koordinasi Program SLRT	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		20.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH
1.3 MENERAPKAN SECARA NASIONAL SISTEM DAN UPAYA PERLINDUNGAN SOSIAL YANG TEPAT BAGI SEMUA, TERMASUK KELOMPOK YANG PALING MISKIN, DAN PADA TAHUN 2030 MENCAPAI CAKUPAN SUBSTANSIAL BAGI KELOMPOK MISKIN DAN RENTAN										
1.3.1 (A)	**PROPORSI PESERTA JAMINAN KESEHATAN MELALUI SJSN BIDANG KESEHATAN**				**55,62**					
Kegiatan 1	Pertemuan Koordinasi LS/LP Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Antara Lintas Sektor/Lintas Program di Prov dan Kab/Kota Pada Pelaksanaan Program JKN	1 keg	4 kegiatan	1 keg	4 kegiatan	0		-	DINAS KESEHATAN DAERAH
Kegiatan 2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program JKN	15 Kab/kota	15 Kab/ kota	15 Kab/kota	15 Kab/ kota	15 Kab/ kota		175.650.000	
Kegiatan 3	Kegiatan advokasi menuju Universal Health Coverage	Jumlah Kegiatan Program JKN Advokasi Menuju UHC di Prov Sulut yang dilaksanakan	135 org	15 Kab/ kota	135 org	15 Kab/ kota	15 Kab/ kota		33.767.546.395	
Kegiatan 4	Penanganan sengketa JKN	Terlaksananya Penanganan Sengketa JKN yang ada di Kab/Kota	1 keg	15 Kab/ kota	1 keg	15 Kab/ kota	15 Kab/ kota		39.999.800	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
1.3.1.(B)	**PROPORSI PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN.**									
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja										
Kegiatan 1	Penyusunan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyusunan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)	Survey KHL dan Penetapan UMP melalui Peraturan Gubernur	1 Pergub	1 kegiatan	1 Pergub	1 kegiatan	1 kegiatan		500.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
Kegiatan 2	Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	63 %	68%	63 %	68%	68%		35.266.400	
Kegiatan 3	Peningkatan Kapasitas Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Jumlah Sarana Hubungan Industrial yang ditingkatkan	Unit	1000 unit	400 orang	1000 unit	1000 unit		74.806.800	
Kegiatan 4	Penyelesaian kasus hubungan industrial	1) perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah; 2) Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun; 3) ; Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB).	75 %	1) 35 % 2) 17.51 %; 3) ; 80 %.	75 %	1) 35 % 2) 17.51 %; 3) ; 80 %.	1) 35 % 2) 17.51 %; 3) ; 80 %.		50.000.000	
1.4 PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA LAKILAKI DAN PEREMPUAN, KHUSUSNYA MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN MEMILIKI HAK YANG SAMA TERHADAP SUMBER DAYA EKONOMI, SERTA AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR, KEPEMILIKAN, DAN KONTROL ATAS TANAH DAN BENTUK KEPEMILIKAN LAIN, WARISAN, SUMBER DAYA ALAM, TEKNOLOGI BARU, DAN JASA KEUANGAN YANG TEPAT, TERMASUK KEUANGAN MIKRO										
1.4.1 (A)	**PERSENTASE PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA DI FASILITAS KESEHATAN (KELOMPOK PENDUDUK 40% TERBAWAH)**									
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak										
Kegiatan 1	Peningkatan kapasitas petugas KIA dalam deteksi resiko ibu hamil	Terlaksanannya peningkatan kapasitas petugas KIA dalam nelakukan deteksi resiko ibu hamil	-	15 kab/kota	-	15 kab/kota	15 kab/kota		239.739.150	DINAS KESEHATAN DAERAH PROV SULUT
Kegiatan 2	Penguatan sistem rujukan maternal neonatal	terlaksanannya Penguatan sistem rujukan maternal neonatal	15 kab/kota	1 Kegiatan	15 kab/kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan		143.954.000	
Kegiatan 3	Pelaksanaan ANC terintegrasi bagi Kab/Kota dan PKM	Terlaksannya ANC terintegrasi bagi kabupaten/kota dan puskesmas	15 kab/kota	15 kab/kota	15 kab/kota	15 kab/kota	15 kab/kota		288.353.800	
Kegiatan 4	Orintasi Maternal Death Notification (MDN) (DAK)	Terlaksanannya Orintasi Maternal Death Notification (MDN)	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		117.654.000	
Kegiatan 5	Penguatan Kesehatan Reproduksi Catin / Lapas Dewasa / Penyandang Disabilitas Dewasa / Situasi Bencana / Akseptor KB / Pencegahan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak (PPKtP/A) (DAK)	Adanya Penguatan Kesehatan Reproduksi Catin / Lapas Dewasa / Penyandang Disabilitas Dewasa / Situasi Bencana / Akseptor KB / Pencegahan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak (PPKtP/A)	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		412.800.000	
Kegiatan 6	Koordinasi Penguatan Penggunaan Buku KIA Bagi Kader Kesehatan dan Ormas (DAK)	Penguatan Penggunaan Buku KIA Bagi Kader Kesehatan dan Ormas	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		122.250.000	
1.A.2*	**PENGELUARAN UNTUK LAYANAN POKOK (PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL) SEBAGAI PERSENTASE DARI TOTAL BELANJA PEMERINTAH.**									
TUJUAN 2 MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN										
2.1. PADA TAHUN 2030, MENGHILANGKAN KELAPARAN DAN MENJAMIN AKSES BAGI SEMUA ORANG, KHUSUSNYA ORANG MISKIN DAN MEREKA YANG BERADA DALAM KONDISI RENTAN, TERMASUK BAYI, TERHADAP MAKANAN YANG AMAN, BERGIZI, DAN CUKUP SEPANJANG TAHUN.										
2.1.1*	**PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN (PREVALENCE OF UNDERNURISHMENT)**				**7,66**					
Program Perbaikan Gizi Masyarakat										
Kegiatan 1	Sinkronisasi peta informasi masyarakat kurang gizi	Adanya Peta informasi Masyarakat kurang Gizi	15 kab/kota	15 dok	15 kab/kota	15 dok	15 dok		83.064.000	DINAS KESEHATAN DAERAH PROV SULUT

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 2	Pertemuan Kasus Gizi buruk, gizi kurang dan stunting pada anak dan balita	Terlaksanannya Pertemuan Kasus Gizi buruk, gizi kurang dan stunting pada anak dan balita	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		430.000.000	
Kegiatan 3	Pemberian tambahan makanan dan vitamin pada balita gizi buruk	Terlaksanaya Pemberian makanan dan vitamin pada balita Gizi buruk	450 Anak	15 ka/kota	450 Anak	15 ka/kota	15 ka/kota		1.000.000.000	
Kegiatan 4	Sinkronisasi peta informasi masyarakat kurang gizi (DAK)	adanya peta informasi masyarakat kurang gizi	-	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen		131.600.000	
2.1.1.(A)	**PREVALENSI KEKURANGAN GIZI (UNDERWEIGHT) PADA ANAK BALITA.**									
Program Perbaikan Gizi Masyarakat										
Kegiatan 1	Sinkronisasi peta informasi masyarakat kurang gizi	Adanya Peta informasi Masyarakat kurang Gizi	15 kab/kota	15 dok	15 kab/kota	15 dok	15 dok		83.064.000	DINAS KESEHATAN DAERAH PROV SULUT
Kegiatan 2	Pertemuan Kasus Gizi buruk, gizi kurang dan stunting pada anak dan balita	Terlaksanannya Pertemuan Kasus Gizi buruk, gizi kurang dan stunting pada anak dan balita	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		430.000.000	
Kegiatan 3	Pemberian tambahan makanan dan vitamin pada balita gizi buruk	Terlaksanaya Pemberian makanan dan vitamin pada balita Gizi buruk	450 Anak	15 ka/kota	450 Anak	15 ka/kota	15 ka/kota		1.000.000.000	
Kegiatan 4	Sinkronisasi peta informasi masyarakat kurang gizi (DAK)	adanya peta informasi masyarakat kurang gizi	-	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen		131.600.000	
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA										
3.3.3*	**KEJADIAN MALARIA PER 1000 ORANG.**									
Program Pengembangan Lingkungan Sehat										
Kegiatan 1	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat di Daerah	Terbinanya Lingkunga Sehat di Daerah Kumu	15 kab/kota	15 kegiatan	-	15 kegiatan	15 kegiatan		380.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH PROV SULUT
Kegiatan 2	Orientasi Kesehatan Olahraga Senam Jantung Sehat	Tersedianya Informasi Kesehatan Jantung bagi Petugas Kesehatan	-	15 data	-	15 data	15 data		149.724.000	
Kegiatan 3	Verifikasi Desa 5 Pilar STBM Tingkat Provinsi (DAK)	Terverifikasinya Desa 5 Pilar STBM Tingkat Provinsi	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		124.590.000	
Kegiatan 4	Melakukan Bimbingan Teknis STBM (DAK)	Terlaksanannya Bimbingan Teknis STBM	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		220.500.000	
Kegiatan 5	Peningkatan Kapasitasi Pengolahan Limbah Medis Bagi Petugas Puskesmas, Rumah Saki dan Fasyankes Lainnya (DAK)	Meningkatnya PengetahuanPetugas Pengolahan Limbah Medis di Puskesmas, Rumah Saki dan Fasyankes Lainnya	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		252.000.000	
Kegiatan 6	Pemantauan dan Pengawasan Limbah Medis (DAK)	terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Limbah Medis	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		171.000.000	
Kegiatan 7	Orientasi Penjamah dan Penanggung Jawab Makanan (DAK)	Terlaksanannya Orientasi bagi Penjamah dan Penanggung Jawab Makanan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		256.700.000	
Kegiatan 8	Stikerisasi TPM (DAK)	Stikerisasi untuk TPM yang memenuhi syarat kesehatan	-	15 Kab / Kota	-	15 Kab / Kota	15 Kab / Kota		356.400.000	
Kegiatan 9	Sosialisasi Penilaian Kantin Lintas SKPD (DAK)	Terlaksana kegiatan penilaian Kantin lintas SKPD	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		369.900.000	
Kegiatan 10	Orientasi Depot Air Minum (DAK)	Terlaksananya Orientasi Depot air Minum	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		385.400.000	
Kegiatan 11	Penguatan Forum KKS (DAK)	Terlaksanaya Penguatan Forum KKS	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		477.300.000	
Kegiatan 12	Orientasi pengawasan Kualitas Air Minum (DAK)	Terlaksanya Pengawasan kualitas air minum	-	15 Kab/Kota	-	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota		192.700.000	
3.3.3.(A)	**JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA.**									

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Program Pengembangan Lingkungan Sehat										
Kegiatan 1	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat di Daerah	Terbinanya Lingkunga Sehat di Daerah Kumu	15 kab/kota	15 kegiatan	-	15 kegiatan	15 kegiatan		380.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH PROV SULUT
Kegiatan 2	Orientasi Kesehatan Olahraga Senam Jantung Sehat	Tersedianya Informasi Kesehatan Jantung bagi Petugas Kesehatan	-	15 data	-	15 data	15 data		149.724.000	
Kegiatan 3	Verifikasi Desa 5 Pilar STBM Tingkat Provinsi (DAK)	Terverifikasinya Desa 5 Pilar STBM Tingkat Provinsi	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		124.590.000	
Kegiatan 4	Melakukan Bimbingan Teknis STBM (DAK)	Terlaksanannya Bimbingan Teknis STBM	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		220.500.000	
Kegiatan 5	Peningkatan Kapasitasi Pengolahan Limbah Medis Bagi Petugas Puskesmas, Rumah Saki dan Fasyankes Lainnya (DAK)	Meningkatnya PengetahuanPetugas Pengolahan Limbah Medis di Puskesmas, Rumah Saki dan Fasyankes Lainnya	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		252.000.000	
Kegiatan 6	Pemantauan dan Pengawasan Limbah Medis (DAK)	terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Limbah Medis	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		171.000.000	
Kegiatan 7	Orientasi Penjamah dan Penanggung Jawab Makanan (DAK)	Terlaksanannya Orientasi bagi Penjamah dan Penanggung Jawab Makanan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		256.700.000	
Kegiatan 8	Stikerisasi TPM (DAK)	Stikerisasi untuk TPM yang memenuhi syarat kesehatan	-	15 Kab / Kota	-	15 Kab / Kota	15 Kab / Kota		356.400.000	
Kegiatan 9	Sosialisasi Penilaian Kantin Lintas SKPD (DAK)	Terlaksana kegiatan penilaian Kantin lintas SKPD	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		369.900.000	
Kegiatan 10	Orientasi Depot Air Minum (DAK)	Terlaksananya Orientasi Depot air Minum	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		385.400.000	
Kegiatan 11	Penguatan Forum KKS (DAK)	Terlaksanaya Penguatan Forum KKS	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		477.300.000	
Kegiatan 12	Orientasi pengawasan Kualitas Air Minum (DAK)	Terlaksanya Pengawasan kualitas air minum	-	15 Kab/Kota	-	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota		192.700.000	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										
Kegiatan 1	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular pada Masyarakat Miskin	Terlaksanaya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular pada Masyarakat Miskin	-	15 Kab / Kota	-	15 Kab / Kota	15 Kab / Kota		130.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH PROV SULUT
Kegiatan 2	Peningkatan SDM Program Pengendalian Zoonosis	Meningkatnya SDM Program Pengendalian Zoonosis	-	15 Kab/Kota	-	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota		121.720.000	
Kegiatan 3	Pelayanan Pencegahan dan Deteksi Dini Filariasis dan Kecacingan	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Deteksi Dini Filariasis dan Kecacingan	-	15 Kab Kota	-	15 Kab Kota	15 Kab Kota		121.720.000	
Kegiatan 4	Fasilitasi diseminasi Kabupaten Percontohan Pengendalian Rabies Terintegrasi	Terlaksanya kegiatan Fasilitasi diseminasi Kabupaten Percontohan Pengendalian Rabies Terintegrasi	-	15 Kab Kota	-	15 Kab Kota	15 Kab Kota		250.000.000	
Kegiatan 5	Pembinaan Kabupaten Kota dalam pengendalian TB-HIV	Persentase kabupaten kota yang mampu memberikan pemeriksaan HIV sesuai standar kepada orang yang berisiko terinfeksi HIV (SPM No..12)	3 Kab/Kota	15 Kab/Kota	3 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota		300.000.000	
Kegiatan 6	Pembinaan Kabupaten Percontohan Desa Sahabat Kusta	Persentase penemuan kasus kusta baru tanpa cacat	-	6%	-	6%	6%		95.096.000	
Kegiatan 7	Pembinaan Kab/Kota dalam Skining Hepatitis B pada ibu hamil dan kelompok beresiko lainnya	Persentase Kab/Kota yang melakasanakan kegiatan deteksi dini hepatitis B pada kelompok beresiko	-	20%	-	20%	20%		128.932.600	
3.3.4.(A)	**PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN DETEKSI DINI UNTUK INFEKSI HEPATITIS B.**									

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Program Pengembangan Lingkungan Sehat										
Kegiatan 1	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat di Daerah	Terbinanya Lingkunga Sehat di Daerah Kumu	15 kab/kota	15 kegiatan	-	15 kegiatan	15 kegiatan		380.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH PROV SULUT
Kegiatan 2	Orientasi Kesehatan Olahraga Senam Jantung Sehat	Tersedianya Informasi Kesehatan Jantung bagi Petugas Kesehatan	-	15 data	-	15 data	15 data		149.724.000	
Kegiatan 3	Verifikasi Desa 5 Pilar STBM Tingkat Provinsi (DAK)	Terverifikasinya Desa 5 Pilar STBM Tingkat Provinsi	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		124.590.000	
Kegiatan 4	Melakukan Bimbingan Teknis STBM (DAK)	Terlaksanannya Bimbingan Teknis STBM	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		220.500.000	
Kegiatan 5	Peningkatan Kapasitasi Pengolahan Limbah Medis Bagi Petugas Puskesmas, Rumah Saki dan Fasyankes Lainnya (DAK)	Meningkatnya PengetahuanPetugas Pengolahan Limbah Medis di Puskesmas, Rumah Saki dan Fasyankes Lainnya	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		252.000.000	
Kegiatan 6	Pemantauan dan Pengawasan Limbah Medis (DAK)	terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Limbah Medis	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		171.000.000	
Kegiatan 7	Orientasi Penjamah dan Penanggung Jawab Makanan (DAK)	Terlaksanannya Orientasi bagi Penjamah dan Penanggung Jawab Makanan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		256.700.000	
Kegiatan 8	Stikerisasi TPM (DAK)	Stikerisasi untuk TPM yang memenuhi syarat kesehatan	-	15 Kab / Kota	-	15 Kab / Kota	15 Kab / Kota		356.400.000	
Kegiatan 9	Sosialisasi Penilaian Kantin Lintas SKPD (DAK)	Terlaksana kegiatan penilaian Kantin lintas SKPD	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		369.900.000	
Kegiatan 10	Orientasi Depot Air Minum (DAK)	Terlaksananya Orientasi Depot air Minum	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		385.400.000	
Kegiatan 11	Penguatan Forum KKS (DAK)	Terlaksanaya Penguatan Forum KKS	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		477.300.000	
Kegiatan 12	Orientasi pengawasan Kualitas Air Minum (DAK)	Terlaksanya Pengawasan kualitas air minum	-	15 Kab/Kota	-	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota		192.700.000	
3.3.5*	**JUMLAH ORANG YG MEMERLUKAN INTERVENSI TERHADAP PENYAKIT TROPIS YANG TERABAIKAN (FILARIASIS DAN KUSTA).**									
Program Pengembangan Lingkungan Sehat										
Kegiatan 1	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat di Daerah	Terbinanya Lingkunga Sehat di Daerah Kumu	15 kab/kota	15 kegiatan	-	15 kegiatan	15 kegiatan		380.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH PROV SULUT
Kegiatan 2	Orientasi Kesehatan Olahraga Senam Jantung Sehat	Tersedianya Informasi Kesehatan Jantung bagi Petugas Kesehatan	-	15 data	-	15 data	15 data		149.724.000	
Kegiatan 3	Verifikasi Desa 5 Pilar STBM Tingkat Provinsi (DAK)	Terverifikasinya Desa 5 Pilar STBM Tingkat Provinsi	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		124.590.000	
Kegiatan 4	Melakukan Bimbingan Teknis STBM (DAK)	Terlaksanannya Bimbingan Teknis STBM	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		220.500.000	
Kegiatan 5	Peningkatan Kapasitasi Pengolahan Limbah Medis Bagi Petugas Puskesmas, Rumah Saki dan Fasyankes Lainnya (DAK)	Meningkatnya PengetahuanPetugas Pengolahan Limbah Medis di Puskesmas, Rumah Saki dan Fasyankes Lainnya	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		252.000.000	
Kegiatan 6	Pemantauan dan Pengawasan Limbah Medis (DAK)	terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Limbah Medis	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		171.000.000	
Kegiatan 7	Orientasi Penjamah dan Penanggung Jawab Makanan (DAK)	Terlaksanannya Orientasi bagi Penjamah dan Penanggung Jawab Makanan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		256.700.000	
Kegiatan 8	Stikerisasi TPM (DAK)	Stikerisasi untuk TPM yang memenuhi syarat kesehatan	-	15 Kab / Kota	-	15 Kab / Kota	15 Kab / Kota		356.400.000	
Kegiatan 9	Sosialisasi Penilaian Kantin Lintas SKPD (DAK)	Terlaksana kegiatan penilaian Kantin lintas SKPD	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		369.900.000	
Kegiatan 10	Orientasi Depot Air Minum (DAK)	Terlaksananya Orientasi Depot air Minum	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		385.400.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 11	Penguatan Forum KKS (DAK)	Terlaksanaya Penguatan Forum KKS	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		477.300.000	
Kegiatan 12	Orientasi pengawasan Kualitas Air Minum (DAK)	Terlaksanya Pengawasan kualitas air minum	-	15 Kab/Kota	-	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota		192.700.000	
3.3.5.(A)	**JUMLAH PROVINSI DENGAN ELIMINASI KUSTA.**									
Program Pengembangan Lingkungan Sehat										
Kegiatan 1	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat di Daerah	Terbinanya Lingkunga Sehat di Daerah Kumu	15 kab/kota	15 kegiatan	-	15 kegiatan	15 kegiatan		380.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH PROV SULUT
Kegiatan 2	Orientasi Kesehatan Olahraga Senam Jantung Sehat	Tersedianya Informasi Kesehatan Jantung bagi Petugas Kesehatan	-	15 data	-	15 data	15 data		149.724.000	
Kegiatan 3	Verifikasi Desa 5 Pilar STBM Tingkat Provinsi (DAK)	Terverifikasinya Desa 5 Pilar STBM Tingkat Provinsi	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		124.590.000	
Kegiatan 4	Melakukan Bimbingan Teknis STBM (DAK)	Terlaksanannya Bimbingan Teknis STBM	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		220.500.000	
Kegiatan 5	Peningkatan Kapasitasi Pengolahan Limbah Medis Bagi Petugas Puskesmas, Rumah Saki dan Fasyankes Lainnya (DAK)	Meningkatnya PengetahuanPetugas Pengolahan Limbah Medis di Puskesmas, Rumah Saki dan Fasyankes Lainnya	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		252.000.000	
Kegiatan 6	Pemantauan dan Pengawasan Limbah Medis (DAK)	terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Limbah Medis	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		171.000.000	
Kegiatan 7	Orientasi Penjamah dan Penanggung Jawab Makanan (DAK)	Terlaksanannya Orientasi bagi Penjamah dan Penanggung Jawab Makanan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		256.700.000	
Kegiatan 8	Stikerisasi TPM (DAK)	Stikerisasi untuk TPM yang memenuhi syarat kesehatan	-	15 Kab / Kota	-	15 Kab / Kota	15 Kab / Kota		356.400.000	
Kegiatan 9	Sosialisasi Penilaian Kantin Lintas SKPD (DAK)	Terlaksana kegiatan penilaian Kantin lintas SKPD	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		369.900.000	
Kegiatan 10	Orientasi Depot Air Minum (DAK)	Terlaksananya Orientasi Depot air Minum	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		385.400.000	
Kegiatan 11	Penguatan Forum KKS (DAK)	Terlaksanaya Penguatan Forum KKS	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		477.300.000	
Kegiatan 12	Orientasi pengawasan Kualitas Air Minum (DAK)	Terlaksanya Pengawasan kualitas air minum	-	15 Kab/Kota	-	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota		192.700.000	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										
Kegiatan 1	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular pada Masyarakat Miskin	Terlaksanaya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular pada Masyarakat Miskin	-	15 Kab / Kota	-	15 Kab / Kota	15 Kab / Kota		130.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH PROV SULUT
Kegiatan 2	Peningkatan SDM Program Pengendalian Zoonosis	Meningkatnya SDM Program Pengendalian Zoonosis	-	15 Kab/Kota	-	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota		121.720.000	
Kegiatan 3	Pelayanan Pencegahan dan Deteksi Dini Filariasis dan Kecacingan	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Deteksi Dini Filariasis dan Kecacingan	-	15 Kab Kota	-	15 Kab Kota	15 Kab Kota		121.720.000	
Kegiatan 4	Fasilitasi diseminasi Kabupaten Percontohan Pengendalian Rabies Terintegrasi	Terlaksanya kegiatan Fasilitasi diseminasi Kabupaten Percontohan Pengendalian Rabies Terintegrasi	-	15 Kab Kota	-	15 Kab Kota	15 Kab Kota		250.000.000	
Kegiatan 5	Pembinaan Kabupaten Kota dalam pengendalian TB-HIV	Persentase kabupaten kota yang mampu memberikan pemeriksaan HIV sesuai standar kepada orang yang berisiko terinfeksi HIV (SPM No..12)	3 KAB/KOTA	15 Kab/Kota	3 KAB/KOTA	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota		300.000.000	
Kegiatan 6	Pembinaan Kabupaten Percontohan Desa Sahabat Kusta	Persentase penemuan kasus kusta baru tanpa cacat	-	6%	-	6%	6%		95.096.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 7	Pembinaan Kab/Kota dalam Skining Hepatitis B pada ibu hamil dan kelompok beresiko lainnya	Persentase Kab/Kota yang melakasanakan kegiatan deteksi dini hepatitis B pada kelompok beresiko	-	20%	-	20%	20%		128.932.600	
3.4 PADA TAHUN 2030, MENGURANGI HINGGA SEPERTIGA ANGKA KEMATIAN DINI AKIBAT PENYAKIT TIDAK MENULAR, MELALUI PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN, SERTA MENINGKATKAN KESEHATAN MENTAL DAN KESEJAHTERAAN.										
3.4.1.(A)	**PERSENTASE MEROKOK PADA PENDUDUK UMUR ≤18 TAHUN.**				**4,73**					
Program Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga										
Kegiatan 1	Peningkatan kapasitas Petugas Penanggungjawab Program Keluarga di Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas Petugas Penanggungjawab Program Keluarga di Kabupaten/Kota	43 org	15 Kab/ kota	43 org	15 Kab/ kota	15 Kab/ kota		206.700.000	DINAS KESEHATAN DAERAH PROV SULUT
Kegiatan 2	Monev dan Bimtek Program Keluarga Sehat	Terlaksanaya Monitoring dan Evaluasi Bimtek Program Keluarga Sehat	4 laporan	15 Kab/ kota	4 laporan	15 Kab/ kota	-		192.019.400	
Program Pengembangan Lingkungan Sehat										
Kegiatan 1	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat di Daerah	Terbinanya Lingkunga Sehat di Daerah Kumu	15 kab/kota	15 kegiatan	-	15 kegiatan	15 kegiatan		380.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH PROV SULUT
Kegiatan 2	Orientasi Kesehatan Olahraga Senam Jantung Sehat	Tersedianya Informasi Kesehatan Jantung bagi Petugas Kesehatan	-	15 data	-	15 data	15 data		149.724.000	
Kegiatan 3	Verifikasi Desa 5 Pilar STBM Tingkat Provinsi (DAK)	Terverifikasinya Desa 5 Pilar STBM Tingkat Provinsi	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		124.590.000	
Kegiatan 4	Melakukan Bimbingan Teknis STBM (DAK)	Terlaksanannya Bimbingan Teknis STBM	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		220.500.000	
Kegiatan 5	Peningkatan Kapasitasi Pengolahan Limbah Medis Bagi Petugas Puskesmas, Rumah Saki dan Fasyankes Lainnya (DAK)	Meningkatnya PengetahuanPetugas Pengolahan Limbah Medis di Puskesmas, Rumah Saki dan Fasyankes Lainnya	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		252.000.000	
Kegiatan 6	Pemantauan dan Pengawasan Limbah Medis (DAK)	terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Limbah Medis	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		171.000.000	
Kegiatan 7	Orientasi Penjamah dan Penanggung Jawab Makanan (DAK)	Terlaksanannya Orientasi bagi Penjamah dan Penanggung Jawab Makanan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		256.700.000	
Kegiatan 8	Stikerisasi TPM (DAK)	Stikerisasi untuk TPM yang memenuhi syarat kesehatan	-	15 Kab / Kota	-	15 Kab / Kota	15 Kab / Kota		356.400.000	
Kegiatan 9	Sosialisasi Penilaian Kantin Lintas SKPD (DAK)	Terlaksana kegiatan penilaian Kantin lintas SKPD	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		369.900.000	
Kegiatan 10	Orientasi Depot Air Minum (DAK)	Terlaksananya Orientasi Depot air Minum	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		385.400.000	
Kegiatan 11	Penguatan Forum KKS (DAK)	Terlaksanaya Penguatan Forum KKS	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		477.300.000	
Kegiatan 12	Orientasi pengawasan Kualitas Air Minum (DAK)	Terlaksanya Pengawasan kualitas air minum	-	15 Kab/Kota	-	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota		192.700.000	
3.4.1.(B)	**PREVALENSI TEKANAN DARAH TINGGI.**									
Program Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM)										
Kegiatan 1	Pengadaan Logistik PPTM	Jumlah Jenis Logistik Yang Disiapkan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1.198.793.000	DINAS KESEHATAN DAERAH PROV SULUT
Kegiatan 2	Penggerakan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Terlaksanannya workshoppenggerakan masyarakat dalam pengendalian penyakit tidak menular	-	15 Kab/Kota	-	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota		450.000.000	
Kegiatan 3	Deteksi Dini Kanker	Terlaksananya deteksi dini kanker pada masyarakat	-	15 Kab/Kota	-	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota		467.484.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 4	Deteksi Gangguan Mental Pada Anak Sekolah (DAK)	Terlaksanannya Deteksi Gangguan Mental Pada Anak Sekolah	-	15 Kab/Kota	-	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota		450.000.000	
Kegiatan 5	Deteksi Gangguan Penglihatan Pada Anak Sekolah (DAK)	Terlaksanannya Deteksi Gangguan Penglihatan Pada Anak Sekolah	-	15 Kab/Kota	-	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota		450.000.000	
Program Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia										
Kegiatan 1	Jambore lansia	Meningkatnya cakupan pelayanan pada lansia	-	100%	-	100%	100%		2.535.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH PROV SULUT
Kegiatan 2	Pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi Lansia	Terlaksanannya pemeliharaan kesehatan bagi lansia di kabupaten/kota	-	15 kab/kota	-	15 kab/kota	15 kab/kota		1.158.075.000	
Kegiatan 3	Orientasi Penggunaan Panduan Praktis Untuk Caregiver Pada Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia (DAK)	Terlaksananya Orientasi Penggunaan Panduan Praktis Untuk Caregiver Pada Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		206.700.000	
Kegiatan 4	Orientasi Pemberdayaan Lansia Dalam Meningkatkan Status Kesehatan Lansia (DAK)	Terlaksananya Orientasi Pemberdayaan Lansia Dalam Meningkatkan Status Kesehatan Lansia	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		369.000.000	
Kegiatan 5	Koordinasi LP/LS Organisasi Profesi Terkait Kesehatan Usia Lanjut (DAK)	terlaksanannya Koordinasi LP/LS Organisasi Profesi Terkait Kesehatan Usia Lanjut	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		206.700.000	
Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
Kegiatan 1	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan	Terpilihnya Tenaga Kesehatan Teladan di Tingkat Provinsi	-	15 kab/kota	-	15 kab/kota	15 kab/kota		123.286.000	DINAS KESEHATAN DAERAH PROV SULUT
Kegiatan 2	Evaluasi sistem rujukan	Terlaksananya Evaluasi Sistem Rujukan Provinsi	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		118.321.600	
Kegiatan 3	Penilaian puskesmas berprestasi	Terpilihnya Puskesmas berprestasi di Tingkat provinsi	-	15 kab/kota	-	15 kab/kota	15 kab/kota		73.973.400	
Kegiatan 4	Pertemuan validasi data RS dan SIRS	Tervalidasinya data RS dan data SIRS di Provinsi	-	1 dok	-	1 dok	1 dok		22.644.000	
Kegiatan 5	Akreditas Rumah Sakit/laboratorium Kesehatan	Jumlah Akreditasi di RS dan Laboratorium Kesehatan	-	100%	-	100%	100%		168.968.800	
Kegiatan 6	Pelayanan kesehatan medical centre event-event daerah,nasional dan internasional	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan Medical Center Event Event Daerah, Nasional dan Internasional	-	1 event	-	1 event	1 event		248.686.000	
Kegiatan 7	Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional di kab/kota dan puskesmas	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas	-	15 kab/kota	-	15 kab/kota	15 kab/kota		101.269.500	
Kegiatan 8	Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Sistim Rujukan di Prov.	Jumlah Kegiatan Evaluasi Sistem Rujukan di Provinsi	-	100%	-	100%	100%		32.749.600	
Kegiatan 9	Fasilitasi pelayanan kesehatan di DTPK (Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan)	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di DTPK	-	15 kab/kota	-	15 kab/kota	15 kab/kota		416.632.000	
Kegiatan 10	Pelayanan Kesehatan, Pengobatan Gratis Bagi Masyarakat Miskin	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pengobatan Gratis bagi masyarakat Miskin di Prov	-	15 kab/kota	-	15 kab/kota	15 kab/kota		218.273.200	
3.4.1.(C)	**PREVALENSI OBESITAS PADA PENDUDUK UMUR ≥18 TAHUN.**									
Program Perbaikan Gizi Masyarakat										
Kegiatan 1	Sinkronisasi peta informasi masyarakat kurang gizi	Adanya Peta informasi Masyarakat kurang Gizi	15 kab/kota	15 dok	15 kab/kota	15 dok	15 dok		83.064.000	DINAS KESEHATAN DAERAH PROV SULUT
Kegiatan 2	Pertemuan Kasus Gizi buruk, gizi kurang dan stunting pada anak dan balita	Terlaksanannya Pertemuan Kasus Gizi buruk, gizi kurang dan stunting pada anak dan balita	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		430.000.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 3	Pemberian tambahan makanan dan vitamin pada balita gizi buruk	Terlaksanaya Pemberian makanan dan vitamin pada balita Gizi buruk	450 Anak	15 ka/kota	450 Anak	15 ka/kota	15 ka/kota		1.000.000.000	
Kegiatan 4	Sinkronisasi peta informasi masyarakat kurang gizi (DAK)	adanya peta informasi masyarakat kurang gizi	-	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen		131.600.000	
3.7 PADA TAHUN 2030, MENJAMIN AKSES UNIVERSAL TERHADAP LAYANAN KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI, TERMASUK KELUARGA BERENCANA, INFORMASI DAN PENDIDIKAN, DAN INTEGRASI KESEHATAN REPRODUKSI KE DALAM STRATEGI DAN PROGRAM NASIONAL										
3.7.1*	**PROPORSI PEREMPUAN USIA REPRODUKSI (15-49 TAHUN) ATAU PASANGANNYA YANG MEMILIKI KEBUTUHAN KELUARGA BERENCANA DAN MENGGUNAKAN ALAT KONTRASEPSI METODE MODERN.**									
Program Program Pengendalian Penduduk										
Kegiatan 1	Rapat Koordinasi Pengendalian Penduduk	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Penduduk	-	1 kegiatan	-	-	-		8.134.000	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Kegiatan 2	Pengembangan Grand Design Keluarga Berencana	Tersusunnya Grand Desain Keluarga Berencana Sulawesi Utara	-	dokumen	-	-	-		16.352.000	
Kegiatan 3	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penduduk	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	-	12 bulan	-	3 bulan	3 bulan		84.550.000	
Program Keluarga Sejahtera										
Kegiatan 1	Rapat Koordinasi Pengendalian Penduduk	Terlaksananya Kegiaatan Hari Keluarga Nasional	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		8.134.000	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Kegiatan 2	Pengembangan Grand Design Keluarga Berencana	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keluarga Sejahtera	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		50.912.500	
Kegiatan 3	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penduduk	Terlaksananya Pembinaan bagi RwmJA Usia Produktif yg belum memiliki pekerjaan tetap	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		49.989.500	
Kegiatan 4	Kegiatan Pembinaan Ketahanan Keluarga Sejahtera	Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Keluarga Sejahtera	1 TA	-	1 TA	-	-		134.592.00	
3.7.2*	**ANGKA KELAHIRAN PADA PEREMPUAN UMUR 15-19 TAHUN (AGE SPECIFIC FERTILITY RATE /ASFR).**				**89**					
Program Program Pengendalian Penduduk										
Kegiatan 1	Rapat Koordinasi Pengendalian Penduduk	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Penduduk	-	1 kegiatan	-	-	-		8.134.000	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Kegiatan 2	Pengembangan Grand Design Keluarga Berencana	Tersusunnya Grand Desain Keluarga Berencana Sulawesi Utara	-	dokumen	-	-	-		16.352.000	
Kegiatan 3	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penduduk	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	-	12 bulan	-	3 bulan	3 bulan		84.550.000	
Program Keluarga Sejahtera										
Kegiatan 1	Rapat Koordinasi Pengendalian Penduduk	Terlaksananya Kegiaatan Hari Keluarga Nasional	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		8.134.000	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Kegiatan 2	Pengembangan Grand Design Keluarga Berencana	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keluarga Sejahtera	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		50.912.500	
Kegiatan 3	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penduduk	Terlaksananya Pembinaan bagi RwmJA Usia Produktif yg belum memiliki pekerjaan tetap	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		49.989.500	
Kegiatan 4	Kegiatan Pembinaan Ketahanan Keluarga Sejahtera	Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Keluarga Sejahtera	1 TA	-	1 TA	-	-		134.592.00	
3.8 MENCAPAI CAKUPAN KESEHATAN UNIVERSAL, TERMASUK PERLINDUNGAN RISIKO KEUANGAN, AKSES TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG BAIK, DAN AKSES TERHADAP OBAT- OBATAN DAN VAKSIN DASAR YANG AMAN, EFEKTIF, BERKUALITAS, DAN TERJANGKAU BAGI SEMUA ORANG.										
3.8.1.(A)	**UNMET NEED PELAYANAN KESEHATAN.**									

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Program Program Pengendalian Penduduk										
Kegiatan 1	Rapat Koordinasi Pengendalian Penduduk	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Penduduk	-	1 kegiatan	-	-	-		8.134.000	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Kegiatan 2	Pengembangan Grand Design Keluarga Berencana	Tersusunnya Grand Desain Keluarga Berencana Sulawesi Utara	-	dokumen	-	-	-		16.352.000	
Kegiatan 3	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penduduk	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	-	12 bulan	-	12 bulan	3 bulan		84.550.000	
Program Keluarga Sejahtera										
Kegiatan 1	Rapat Koordinasi Pengendalian Penduduk	Terlaksananya Kegiaatan Hari Keluarga Nasional	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		8.134.000	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Kegiatan 2	Pengembangan Grand Design Keluarga Berencana	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keluarga Sejahtera	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		50.912.500	
Kegiatan 3	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penduduk	Terlaksananya Pembinaan bagi RwmJA Usia Produktif yg belum memiliki pekerjaan tetap	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		49.989.500	
Kegiatan 4	Kegiatan Pembinaan Ketahanan Keluarga Sejahtera	Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Keluarga Sejahtera	1 TA	-	1 TA	-	-		134.592.00	
3.8.2*	**JUMLAH PENDUDUK YANG DICAKUP ASURANSI KESEHATAN ATAU SISTEM KESEHATAN MASYARAKAT PER 1000 PENDUDUK.**									
Program Keluarga Sejahtera										
Kegiatan 1	Rapat Koordinasi Pengendalian Penduduk	Terlaksananya Kegiaatan Hari Keluarga Nasional	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		8.134.000	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Kegiatan 2	Pengembangan Grand Design Keluarga Berencana	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keluarga Sejahtera	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		50.912.500	
Kegiatan 3	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penduduk	Terlaksananya Pembinaan bagi RwmJA Usia Produktif yg belum memiliki pekerjaan tetap	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		49.989.500	
Kegiatan 4	Kegiatan Pembinaan Ketahanan Keluarga Sejahtera	Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Keluarga Sejahtera	1 TA	-	1 TA	-	-		134.592.00	
3.A MEMPERKUAT PELAKSANAAN THE FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL WHO DI SELURUH NEGARA SEBAGAI LANGKAH YANG TEPAT										
3.A.1*	**PERSENTASE MEROKOK PADA PENDUDUK UMUR ≥15 TAHUN.**				**33,86**					
Program Pengembangan Lingkungan Sehat										
Kegiatan 1	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat di Daerah	Terbinanya Lingkunga Sehat di Daerah Kumu	15 kab/kota	15 kegiatan	-	15 kegiatan	15 kegiatan		380.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH PROV SULUT
Kegiatan 2	Orientasi Kesehatan Olahraga Senam Jantung Sehat	Tersedianya Informasi Kesehatan Jantung bagi Petugas Kesehatan	-	15 data	-	15 data	15 data		149.724.000	
Kegiatan 3	Verifikasi Desa 5 Pilar STBM Tingkat Provinsi (DAK)	Terverifikasinya Desa 5 Pilar STBM Tingkat Provinsi	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		124.590.000	
Kegiatan 4	Melakukan Bimbingan Teknis STBM (DAK)	Terlaksanannya Bimbingan Teknis STBM	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		220.500.000	
Kegiatan 5	Peningkatan Kapasitasi Pengolahan Limbah Medis Bagi Petugas Puskesmas, Rumah Saki dan Fasyankes Lainnya (DAK)	Meningkatnya PengetahuanPetugas Pengolahan Limbah Medis di Puskesmas, Rumah Saki dan Fasyankes Lainnya	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		252.000.000	
Kegiatan 6	Pemantauan dan Pengawasan Limbah Medis (DAK)	terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Limbah Medis	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		171.000.000	
Kegiatan 7	Orientasi Penjamah dan Penanggung Jawab Makanan (DAK)	Terlaksanannya Orientasi bagi Penjamah dan Penanggung Jawab Makanan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		256.700.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 8	Stikerisasi TPM (DAK)	Stikerisasi untuk TPM yang memenuhi syarat kesehatan	-	15 Kab / Kota	-	15 Kab / Kota	15 Kab / Kota		356.400.000	
Kegiatan 9	Sosialisasi Penilaian Kantin Lintas SKPD (DAK)	Terlaksana kegiatan penilaian Kantin lintas SKPD	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		369.900.000	
Kegiatan 10	Orientasi Depot Air Minum (DAK)	Terlaksananya Orientasi Depot air Minum	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		385.400.000	
Kegiatan 11	Penguatan Forum KKS (DAK)	Terlaksanaya Penguatan Forum KKS	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		477.300.000	
Kegiatan 12	Orientasi pengawasan Kualitas Air Minum (DAK)	Terlaksanya Pengawasan kualitas air minum	-	15 Kab/Kota	-	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota		192.700.000	
Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat										
Kegiatan 1	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Kesehatan	Meningkatnya pengetahuan petugas penyuluh kesehatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		495.600.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
Kegiatan 2	Pemberdayaan Generasi Muda dalam Pelaksanaan Saka Bhakti Husada	terlaksanannya kegiatan Saka Bhakti Husada	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		364.200.000	
Kegiatan 3	Pembuatan/Pengadaan Media Penyuluhan dan Promosi Kesehatan	tersedianya media penyuluhan kesehatan	15 kab/kota	1 kegiatan	15 kab/kota	1 kegiatan	1 kegiatan		150.500.000	
Kegiatan 4	Pameran Pembangunan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara	terlaksananya pameran pembangunan kesehatan	2 KALI	1 kegiatan	2 KALI	1 kegiatan	1 kegiatan		238.750.000	
Kegiatan 5	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara	adanya kebijakan tentang pembangunan berwawasan di provinsi sulawesi utara	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		153.610.000	
Kegiatan 6	Advokasi Untuk Mendorong Kab/Kota Menerapkan Kebijakan GERMAS (DAK)	tersedianya kebijakan kesehatan Germas	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		134.143.000	
Kegiatan 7	Orientasi Advokasi / Kemitraan bagi Kab/Kota Dalam Mendukung GERMAS (DAK)	terlaksananya advokasi kemitraan dalam mendukung GERMAS	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		173.640.000	
Kegiatan 8	Koordinasi LS dalam Mendorong Regulasi / Implementasi GERMAS di Tingkat Kab/Kota (DAK)	terlakananya regulasi implementasi GERMAS di tingkat Kab/ Kota	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		190.200.000	
Kegiatan 9	Pendampingan Teknis dalam rangka mendorong regulasi / implementasi GERMAS (DAK)	tersedianya regulasi GERMAS	-	15 Kab/ kota	-	15 Kab/ kota	15 Kab/ kota		490.720.000	
Kegiatan 10	Penguatan Promosi Kesehatan ditatanan (Sekolah, Pasar dan Tempat Umum) tentang GERMAS (DAK)	terlaksananya penguatan promosi kesehatan di tatanan sekolah, pasar dan y=tempat umum	-	15 Kab/ kota	-	15 Kab/ kota	15 Kab/ kota		400.190.000	
Kegiatan 11	Penguatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat UKBM (DAK)	terlaksananya UKBM di Kab/ kota	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		283.599.999	
Kegiatan 12	Mobilisasi dan Penguatan UKBM di Kab/Kota (DAK)	terlaksananya penguatan UKBM di kab/ kota	-	15 kab/ kota	-	15 kab/ kota	15 kab/ kota		732.099.000	
3.B MENDUKUNG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN VAKSIN DAN OBAT PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR YANG TERUTAMA BERPENGARUH TERHADAP NEGARA BERKEMBANG, MENYEDIAKAN AKSES TERHADAP OBAT DAN VAKSIN DASAR YANG TERJANGKAU, SESUAI THE DOHA DECLARATION TENTANG THE TRIPS AGREEMENT AND PUBLIC HEALTH, YANG MENEGASKAN HAK NEGARA BERKEMBANG UNTUK MENGGUNAKAN SECARA PENUH KETENTUAN DALAM KESEPAKATAN ATAS ASPEK-ASPEK PERDAGANGAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERKAIT KELELUASAAN UNTUK MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KHUSUSNYA, MENYEDIAKAN AKSES OBAT BAGI SEMUA.											
3.B.1.(A)	**PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI PUSKESMAS.**				**81,22**					
Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan										
Kegiatan 1	Pengadaan Obat danPerbekalan Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Obat	1 tahun	1 th	1 tahun	1 th	1 th		817.780.000	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Kegiatan 2	Monev Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Distribusi Obat dan Alkes	Terlaksananya Monev Sarana Pelayanan kefarmasian dan Distribusi Alkes	15 kab/kota	1 kegiatan	15 kab/kota	1 kegiatan	1 kegiatan		73.442.500	
Kegiatan 3	Pengawasan Alkes dan Pangan	Terlaksananya Mutu Dan Keamanan Alkes Dan Pangan Di 15 Kab/Kota	15 Kab/kab	15 kab/kota	15 Kab/kab	15 kab/kota	15 kab/kota		396.500.000	
Kegiatan 4	Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Sarana Gudang Obat (DAK)	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Instalasi Farmasi	-	1 pkt	-	1 pkt	1 pkt		930.621.000	
3.C MENINGKATKAN SECARA SIGNIFIKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN REKRUTMEN, PENGEMBANGAN, PELATIHAN, DAN RETENSI TENAGA KESEHATAN DI NEGARA BERKEMBANG, KHUSUSNYA NEGARA KURANG BERKEMBANG, DAN NEGARA BERKEMBANG PULAU KECIL.										

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
3.C.1*	**KEPADATAN DAN DISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN.**									
Program Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan										
Kegiatan 1	Pertemuan rapat kerja kesehatan daerah	Terlaksananya Pertemuan Rapat Kerja Organisasi Profesi	200 orang	1 dok	200 orang	1 dok	1 dok		402.068.000	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Kegiatan 2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksannya monitoring dan evaluasi	-	15 kab/kota	-	15 kab/kota	15 kab/kota		99.510.000	
Kegiatan 3	Fasilitasi perencanaan penyusunan dokumen Analisis Beban Kerja (ABK) kesehatan	terlaksananya Fasilitasi perencanaan penyusunan dukomen Analisis Beban Kerja (ABK) Kesehatan	-	30 orang	-	30 orang	30 orang		42.946.100	
Kegiatan 4	Updating, dokumentasi dan deskripsi data SDMK	Terlaksananya Updating, Dokumentasi dan Deskripsi data SDMK	-	15 kab/kota	-	15 kab/kota	15 kab/kota		44.997.400	
Kegiatan 5	Pertemuan Rapat Kerja Organisasi Profesi	Terlaksannya pertemuan rapat kerja organisasi profesi	50 orang	60 Orang	50 orang	60 Orang	60 Orang		38.101.000	
TUJUAN 4 MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA										
4.1 PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA ANAK PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TANPA DIPUNGUT BIAYA, SETARA, DAN BERKUALITAS, YANG MENGARAH PADA CAPAIAN PEMBELAJARAN YANG RELEVAN DAN EFEKTIF.										
4.1.1*	**PROPORSI ANAK-ANAK DAN REMAJA: (A) PADA KELAS 4, (B) TINGKAT AKHIR SD/KELAS 6, (C) TINGKAT AKHIR SMP/KELAS 9 YANG MENCAPAI STANDAR KEMAMPUAN MINIMUM DALAM: (I) MEMBACA, (II) MATEMATIKA.**									
Program Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah atas Siswa Miskin (SMA)										
Kegiatan 1	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	5 Sekolah	1 sekolah	5 Sekolah	1 sekolah	0		400.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAERAH
Kegiatan 2	Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA)	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA	1 Kegiatan	1 unit	1 Kegiatan	1 unit	0		1.000.000.000	
Kegiatan 3	Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Keberbakatan Olahraga (SMAKOR)	Terselenggaranya Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Keberbakatan Olahraga (SMAKOR)	12 bulan	1 kegiatan	12 bulan	1 kegiatan	1 kegiatan		3.000.000.000	
Kegiatan 4	Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	0		86.875.000	
Kegiatan 5	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK)	terlaksananya rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK) kantor	-	1 pkt	-	1 pkt	1 pkt		13.448.997.999	
Kegiatan 6	Pengadaan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Atas (SMA) (DAK)	Terlaksananya Pengadaan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Atas (SMA) (DAK)	-	1 unit	-	1 unit	1 unit		13.173.545.500	
Kegiatan 7	Pembangunan Laboratorium (DAK)	Tersedianya Pembangunan Laboratorium (DAK)	-	1 Gedung	-	1 Gedung	1 Gedung		9.770.525.000	
Kegiatan 8	Pembangunan Asrama Siswa (DAK)	Terlaksananya Pembangunan Asrama Siswa (DAK)	-	1 dok	-	1 dok	1 dok		1.069.910.000	
Kegiatan 9	Pembangunan Toilet (Jamban) siswa/guru beserta sanitasinya (DAK)	Terlaksananya Pembangunan Toilet (Jamban) (DAK SMA	-	1 unit	-	1 unit	1 unit		5.984.175.000	
Kegiatan 10	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif beserta perabotnya (DAK SMA)	Terlaksananya Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif beserta perabotnya (DAK SMA)	-	1 Gedung	-	1 Gedung	1 Gedung		1.907.125.000	
Kegiatan 11	Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK SMA)	Tersedianya Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK SMA)	-	1 pkt	-	1 pkt	1 pkt		13.359.618.913	
Kegiatan 12	Pengadaan Media Pendidikan (DAK SMA)	Tersedianya Pengadaan Media Pendidikan (DAK SMA)	-	1 pkt	-	1 pkt	1 pkt		1.697.000.000	
Kegiatan 13	Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) (DAK SMA)	Tersedianya Pengadaan Sarana PJOK (DAK SMA)	-	1 unit	-	1 unit	1 unit		1.027.300.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 14	Pengadaan Seni Budaya (DAK SMA)	Tersedianya Pengadaan Sarana Seni Budaya (DAK SMA)	-	1 alat	-	1 alat	1 alat		1.697.000.000	
Kegiatan 15	Pengadaan ALat Kesenian Tradisional (DAK SMA)	Pengadaan ALat Kesenian Tradisional (DAK SMA)	-	1 pkt	-	1 pkt	1 pkt		1.553.500.000	
Kegiatan 16	Pengadaan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya (DAK SMA)	Tersedianya Pengadaan RDG beserta Perabotnya (DAK SMA	-	1 ruang	-	1 ruang	1 ruang		1.000.000.000	
Kegiatan 17	Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA Ruang Belajar dan Ruang Penunjang LAinnya Beserta Perabotnya (DAK SMA)	Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA Rungan Belajar dan Ruang Penunjang Lainnya beserta perabotnya (DAK SMA	-	1 unit	-	1 unit	1 unit		17.277.606.088	
4.5 PADA TAHUN 2030, MENGHILANGKAN DISPARITAS GENDER DALAM PENDIDIKAN, DAN MENJAMIN AKSES YANG SAMA UNTUK SEMUA TINGKAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJURUAN, BAGI MASYARAKAT RENTAN TERMASUK PENYANDANG CACAT, MASYARAKAT PENDUDUK ASLI, DAN ANAK-ANAK DALAM KONDISI RENTAN.										
4.5.1*	**RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI (1) SD/MI/SEDERAJAT; (2) SMP/MTS/SEDERAJAT; (3) SMA/SMK/MA/SEDERAJAT; DAN RASIO ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI (4) PERGURUAN TINGGI.**									
Program Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah atas Siswa Miskin (SMA)										
Kegiatan 1	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	5 Sekolah	1 sekolah	5 Sekolah	1 sekolah	0		400.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAERAH
Kegiatan 2	Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA)	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA	1 Kegiatan	1 unit	1 Kegiatan	1 unit	0		1.000.000.000	
Kegiatan 3	Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Keberbakatan Olahraga (SMAKOR)	Terselenggaranya Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Keberbakatan Olahraga (SMAKOR)	12 bulan	1 kegiatan	12 bulan	1 kegiatan	1 kegiatan		3.000.000.000	
Kegiatan 4	Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	0		86.875.000	
Kegiatan 5	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK)	terlaksananya rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK) kantor	-	1 pkt	-	1 pkt	1 pkt		13.448.997.999	
Kegiatan 6	Pengadaan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Atas (SMA) (DAK)	Terlaksananya Pengadaan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Atas (SMA) (DAK)	-	1 unit	-	1 unit	1 unit		13.173.545.500	
Kegiatan 7	Pembangunan Laboratorium (DAK)	Tersedianya Pembangunan Laboratorium (DAK)	-	1 Gedung	-	1 Gedung	1 Gedung		9.770.525.000	
Kegiatan 8	Pembangunan Asrama Siswa (DAK)	Terlaksananya Pembangunan Asrama Siswa (DAK)	-	1 dok	-	1 dok	1 dok		1.069.910.000	
Kegiatan 9	Pembangunan Toilet (Jamban) siswa/guru beserta sanitasinya (DAK)	Terlaksananya Pembangunan Toilet (Jamban) (DAK SMA	-	1 unit	-	1 unit	1 unit		5.984.175.000	
Kegiatan 10	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif beserta perabotnya (DAK SMA)	Terlaksananya Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif beserta perabotnya (DAK SMA)	-	1 Gedung	-	1 Gedung	1 Gedung		1.907.125.000	
Kegiatan 11	Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK SMA)	Tersedianya Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK SMA)	-	1 pkt	-	1 pkt	1 pkt		13.359.618.913	
Kegiatan 12	Pengadaan Media Pendidikan (DAK SMA)	Tersedianya Pengadaan Media Pendidikan (DAK SMA)	-	1 pkt	-	1 pkt	1 pkt		1.697.000.000	
Kegiatan 13	Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) (DAK SMA)	Tersedianya Pengadaan Sarana PJOK (DAK SMA)	-	1 unit	-	1 unit	1 unit		1.027.300.000	
Kegiatan 14	Pengadaan Seni Budaya (DAK SMA)	Tersedianya Pengadaan Sarana Seni Budaya (DAK SMA)	-	1 alat	-	1 alat	1 alat		1.697.000.000	
Kegiatan 15	Pengadaan ALat Kesenian Tradisional (DAK SMA)	Pengadaan ALat Kesenian Tradisional (DAK SMA)	-	1 pkt	-	1 pkt	1 pkt		1.553.500.000	
Kegiatan 16	Pengadaan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya (DAK SMA)	Tersedianya Pengadaan RDG beserta Perabotnya (DAK SMA	-	1 ruang	-	1 ruang	1 ruang		1.000.000.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 17	Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA Ruang Belajar dan Ruang Penunjang LAinnya Beserta Perabotnya (DAK SMA)	Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA Rungan Belajar danRuang Penunjang Lainnya beserta perabotnya (DAK SMA	-	1 unit	-	1 unit	1 unit		17.277.606.088	
Program Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah Kejuruan Siswa Miskin (SMK)										
Kegiatan 1	Penyelenggaraan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan	-	1 Kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		348.750.000	DINAS PENDIDIKAN DAERAH
Kegiatan 2	Pengembangan Kurikulum SMK	terlaksanannya pengembangan kurikulum SMK	1 Dokumen	1 kegiatan	1 Dokumen	1 kegiatan	-		116.578.600	
Kegiatan 3	Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan	terlaksananya sarana dan prasarana sekolah menengah kejuruan	-	1 unit	-	1 unit	-		750.000.000	
Kegiatan 4	Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan	terlaksananya monitoring dan evaluasi dan pelaporan	-	4 kegiatan	-	4 kegiatan	-		103.042.000	
Kegiatan 5	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitasi sekolah menengah kejuruan (SMK)	-	1%	-	1%	-		150.352.440	
Kegiatan 6	Pembangunan Laboratorium Beserta Perabotnya (SMK Penugasan Sektor Unggulan) (DAK)	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Beserta Perabotnya (SMK Penugasan Sektor Unggulan) (DAK)	-	1 Unit	-	1 unit	1 unit		11.643.075.000	
Kegiatan 7	Pengadaan Peralatan Praktek Utama/Peralatan Praktek Produksi (SMK Penugasan 3T) (DAK)	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Praktek Utama/Peralatan Praktek Produksi (SMK Penugasan 3T) (DAK)	-	1 Unit	-	1 unit	1 unit		64.407.090.725	
Kegiatan 8	Pengadaan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (SMK Penugasan 3T) (DAK)	Terlaksananya Pengadaan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (SMK Penugasan 3T) (DAK)	-	1 unit	-	1 unit	1 unit		32.383.000.000	
Kegiatan 9	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya (DAK)	Terlaksananya Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya (DAK)	-	1 Gedung	-	1 Gedung	1 Gedung		15.441.167.275	
Kegiatan 10	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (DAK SMK)	Terlaksanaya Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Snitasinya (DAK SMK)	-	1 unit	-	1 unit	1 unit		2.029.500.000	
Kegiatan 11	Rehabilitasi Ruang Belajar denga Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK SMK)	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Belajar dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK SMK)	-	1 unit	-	1 unit	1 unit		282.900.000	
Kegiatan 12	Rehabilitasi Toilet (Jamban) dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat beserta sanitasinya (DAK SMK)	Rehabilitasi Toilet (Jamban) dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya (DAK SMK)	-	1 pkt	-	1 pkt	1 pkt		1.107.000.000	
Kegiatan 13	Pengadaan alat kesenian tradisional (DAK SMK)	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional (DAK SMK)	-	1 pkt	-	1 pkt	1 pkt		738.000.000	
Kegiatan 14	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Beserta Perabotnya (DAK SMK)	Terlaksananya Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Beserta Perabotnya (DAK SMK)	-	1 Gedung	-	1 Gedung	1 Gedung		544.275.000	
4.A MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN FASILITAS PENDIDIKAN YANG RAMAH ANAK, RAMAH PENYANDANG CACAT DAN GENDER, SERTA MENYEDIAKAN LINGKUNGAN BELAJAR YANG AMAN, ANTI KEKERASAN, INKLUSIF DAN EFEKTIF BAGI SEMUA.										
4.A.1*	**PROPORSI SEKOLAH DENGAN AKSES KE: (A) LISTRIK (B) INTERNET UNTUK TUJUAN PENGAJARAN, (C) KOMPUTER UNTUK TUJUAN PENGAJARAN, (D) INFRASTRUKTUR DAN MATERI MEMADAI BAGI SISWA DISABILITAS, (E) AIR MINUM LAYAK, (F) FASILITAS SANITASI DASAR PER JENIS KELAMIN, (G) FASILITAS CUCI TANGAN (TERDIRI AIR, SANITASI, DAN HIGIENIS BAGI SEMUA (WASH).**			**0.57**					
Program Program Pendidikan Khusus/Layanan Khusus										
Kegiatan 1	Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Layanan Khusus	Tersediannya Bantuan dana pendidikan	-	146 org	-	146 org	-		259.367.400	DINAS PENDIDIKAN DAERAH

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 2	Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis	Tersedianya Bantuan Operasional Gedung Autis	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		166.500.000	
Kegiatan 3	Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan	Tercapainya pendidikan yang lebih baik bagi SLB/ABK	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		282.600.000	
Kegiatan 4	Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa ABK	Terselenggaranya Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa ABK	-	100 kegiatan	-	100 kegiatan	-		104.242.500	
Kegiatan 5	Rehabilitasi Toilet (Jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya (DAK SLB)	Terlaksananya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa/Guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya (DAK) SLB	-	1 pkt	-	1 pkt	1 pkt		219.583.011	
Kegiatan 6	Rehabilitasi Ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK SLB)	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK) SLB	-	1 unit	-	1 unit	1 unit		125.500.000	
Kegiatan 7	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (DAK SLB)	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya (DAK) SLB	-	1 dok	-	1 dok	1 dok		304.830.489	
Kegiatan 8	Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru beserta Sanitasinya (DAK SLB)	Terlaksananya Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru beserta sanitasinya (DAK) SLB	-	1 unit	-	1 unit	1 unit		177.502.300	
Kegiatan 9	Pengadaan Peralatan pendidikan (DAK SLB)	Tersedianya Pengadaan Peralatan pendidikan (DAK) SLB	-	1 unit	-	1 unit	1 unit		112.750.000	
Kegiatan 10	Pengadaan Media Pendidikan (DAK SLB)	Tersedianya Pengadaan Media Pendidikan (DAK) SLB	-	1 unit	-	1 unit	1 unit		112.874.200	
Kegiatan 11	Pengadaan Peralatan Seni dan Budaya (DAK SLB)	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Seni dan Budaya (DAK) SLB	-	1 alat	-	1 alat	1 alat		139.400.000	
Kegiatan 12	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional (DAK SLB)	Tersedianya Pengadaan Alat Kesenian Tradisional (DAK SLB)	-	1 alat	-	1 alat	1 alat		92.250.000	
4.C PADA TAHUN 2030, SECARA SIGNIFIKAN MENINGKATKAN PASOKAN GURU YANG BERKUALITAS, TERMASUK MELALUI KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PELATIHAN GURU DI NEGARA BERKEMBANG, TERUTAMA NEGARA KURANG BERKEMBANG, DAN NEGARA BERKEMBANG KEPULAUAN KECIL.										
4.C.1*	**PERSENTASE GURU TK, SD, SMP, SMA, SMK, DAN SMLB YANG BERSERTIFIKAT PENDIDIK**									
Program Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan										
Kegiatan 1	Penilaian dan Pemberian Angka Kredit Guru	Terlaksananya Penilaian dan pemberian Angka Kredit Guru	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		88.425.000	DINAS PENDIDIKAN DAERAH
Kegiatan 2	Pemilihan guru berprestasi	Terlaksananya pemilihan guru berprestasi	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		82.900.000	
Kegiatan 3	Olimpiade Sains Guru	Terlaksananya Olimpiade Sains Guru	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		106.250.800	
Kegiatan 4	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Tingkat SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Tingkat SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	1%	-	1%	-		106.500.000	
Kegiatan 5	Workshop Penguatan Kapasitas Calon Kepala sekolah	Terlaksananya Workshop Penguatan Kapasitas Calon Kepala Sekolah	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		70.000.000	
Kegiatan 6	Penyelenggaraan Musyawarah Guru Mata Pelajaran / Kelompok Kerja Guru (MGMP/KKG)	Terlaksananya Penyelenggaraan Musyawarah Guru Mata Pelajaran / Kelompok kerja Guru (MGMP/KKG)	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		101.528.800	
Kegiatan 7	Penyelenggaraan Musyawarah Kepala Kerja Kepala Sekolah (MKKS)	Terlaksananya Penyelenggaraan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		70.000.000	
Kegiatan 8	Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		95.836.300	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 9	Penyelenggaraan Manajemen Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas	Terlaksananya Manajemen Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		148.268.600	
TUJUAN 5 MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN										
5.1 MENGAKHIRI SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP KAUM PEREMPUAN DIMANAPUN.										
5.1.1	**JUMLAH KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER MENDUKUNG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.**									
Program Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan										
Kegiatan 1	Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah Kegiatan/Dokumen	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		80.000.000	DIDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 2	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah Kegiatan/Orang/Ibu Rumah Tangga	300 org	1 kegiatan	300 org	1 kegiatan	-		40.000.000	
Kegiatan 3	Pelatihan ketrampilan bagi perempuan dan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah Orang	2 Kegiatan	1 kegiatan	2 Kegiatan	1 kegiatan	-		40.000.000	
Kegiatan 4	Pelatihan penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)	Jumlah Kegiatan	1 Kegaiatan	1 kegiatan	1 Kegaiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		40.000.000	
Kegiatan 5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten dan Kota /Dokumen	15 kab/kota	1 kegiatan	15 kab/kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan		20.754.400	
5.2 MENGHAPUSKAN SEGALA BENTUK KEKERASAN TERHADAP KAUM PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK DAN PRIBADI, TERMASUK PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL, SERTA BERBAGAI JENISEKSPLOITASI LAINNYA.										
5.2.1*	**PROPORSI PEREMPUAN DEWASA DAN ANAK PEREMPUAN (UMUR 15-64 TAHUN) MENGALAMI KEKERASAN (FISIK, SEKSUAL, ATAU EMOSIONAL) OLEH PASANGAN ATAU MANTAN PASANGAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR.**			**1,12%**						
Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak										
Kegiatan 1	Pembentukan kabupaten/kota layak anak	Jumlah Orang/Kegiatan	15 Kab/Kota	1 kegiatan	15 Kab/Kota	1 kegiatan	-		31.000.000	DIDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten dan Kota /Dokumen	15 kab/kota	1 dok	15 kab/kota	1 dok	1 dok		20.525.000	
Kegiatan 3	Forum Anak Daerah	jumlah anak	1 Kegiatan	15 org	1 Kegiatan	15 org	-		80.000.000	
Kegiatan 4	Temu Kreatifitas Forum Anak Daerah	jumlah anak	1 Kegiatan	200 org	1 Kegiatan	200 org	-		70.000.000	
Kegiatan 5	Fasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah/orang	1 TA	1 org	1 TA	1 org	-		6.000.000	
Program Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak										
Kegiatan 1	Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah Kegiatan /Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan		188.899.000	DIDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 2	Penguatan jejaring P2TP2A	Jumlah Orang/Kegiatan/Kasus	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		10.000.000	
Kegiatan 3	Penanganan dan upaya perlindungan perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan dan Korban Traficking	jumlah/kasus/orang	12 Bulan	1 kegiatan	12 Bulan	1 kegiatan	1 kegiatan		71.102.000	
Kegiatan 4	Sosialisasi Pelayanan P2TP2A	Jumlah Kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		40.050.000	
5.2.2*	**PROPORSI PEREMPUAN DEWASA DAN ANAK PEREMPUAN (UMUR 15-64 TAHUN) MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL OLEH ORANG LAIN SELAIN PASANGAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR.**			**4.00%**						
Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak										
Kegiatan 1	Pembentukan kabupaten/kota layak anak	Jumlah Orang/Kegiatan	15 Kab/Kota	1 kegiatan	15 Kab/Kota	1 kegiatan	-		31.000.000	DIDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
Kegiatan 2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten dan Kota /Dokumen	15 kab/kota	1 dok	15 kab/kota	1 dok	1 dok		20.525.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 3	Forum Anak Daerah	jumlah anak	1 Kegiatan	15 org	1 Kegiatan	15 org	-		80.000.000	PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 4	Temu Kreatifitas Forum Anak Daerah	jumlah anak	1 Kegiatan	200 org	1 Kegiatan	200 org	-		70.000.000	
Kegiatan 5	Fasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah/orang	1 TA	1 org	1 TA	1 org	-		6.000.000	
Program Program Perlindungan Hak Perempuan										
Kegiatan 1	Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Jumlah Orang	-	30 Orang	-	30 Orang	-		30.000.000	DIDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 2	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) GT-TPPO	Jumlah Kegiata/Kali	-	1 dok	-	1 dok	-		40.000.000	
Kegiatan 3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten dan Kota /Dokumen	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		20.000.000	
Kegiatan 4	Pelatihan keterampilan bagi lansia perempuan	Jumlah/orang	-	30 Orang	-	30 Orang	-		40.000.000	
Kegiatan 5	Pelatihan Petugas Pendampingan Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan	Jumlah Orang	-	30 Orang	-	30 Orang	-		30.000.000	
5.3. MENGHAPUSKAN SEMUA PRAKTIK BERBAHAYA, SEPERTI PERKAWINAN USIA ANAK, PERKAWINAN DINI DAN PAKSA, SERTA SUNAT PEREMPUAN.										
5.3.1*	**PROPORSI PEREMPUAN UMUR 20-24 TAHUN YANG BERSTATUS KAWIN ATAU BERSTATUS HIDUP BERSAMA SEBELUM UMUR 15 TAHUN DAN SEBELUM UMUR 18 TAHUN.**									
Program Program Perlindungan Hak Perempuan										
Kegiatan 1	Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Jumlah Orang	-	30 Orang	-	30 Orang	-		30.000.000	DIDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 2	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) GT-TPPO	Jumlah Kegiata/Kali	-	1 dok	-	1 dok	-		40.000.000	
Kegiatan 3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten dan Kota /Dokumen	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		20.000.000	
Kegiatan 4	Pelatihan keterampilan bagi lansia perempuan	Jumlah/orang	-	30 Orang	-	30 Orang	-		40.000.000	
Kegiatan 5	Pelatihan Petugas Pendampingan Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan	Jumlah Orang	-	30 Orang	-	30 Orang	-		30.000.000	
Program Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat										
Kegiatan 1	Pembinaan dan fasilitasi Organisasi Perempuan	Jumlah Kegiatan/Organisasi	-	2 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1.210.000.000	DIDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 2	Pengelolaa Data dan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Jumlah/Dokumen	-	1 dok	-	1 dok	-		50.000.000	
Kegiatan 3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah/Dokumen	-	1 dok	-	1 dok	1 dok		21.960.000	
Kegiatan 4	Forum Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah/Orang	-	1 org	-	1 org	-		10.000.000	
5.5 MENJAMIN PARTISIPASI PENUH DAN EFEKTIF, DAN KESEMPATAN YANG SAMA BAGI PEREMPUAN UNTUK MEMIMPIN DI SEMUA TINGKAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEHIDUPAN POLITIK, EKONOMI, DAN MASYARAKAT.										
5.5.1*	**PROPORSI KURSI YANG DIDUDUKI PEREMPUAN DI PARLEMEN TINGKAT PUSAT, PARLEMEN DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH.**									
Program Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan										
Kegiatan 1	Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah Kegiatan/Dokumen	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		80.000.000	DIDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
Kegiatan 2	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah Kegiatan/Orang/Ibu Rumah Tangga	300 org	1 kegiatan	300 org	1 kegiatan	-		40.000.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 3	Pelatihan ketrampilan bagi perempuan dan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah Orang	2 Kegiatan	1 kegiatan	2 Kegiatan	1 kegiatan	-		40.000.000	PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 4	Pelatihan penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)	Jumlah Kegiatan	1 Kegaiatan	1 kegiatan	1 Kegaiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		40.000.000	
Kegiatan 5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten dan Kota /Dokumen	15 kab/kota	1 kegiatan	15 kab/kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan		20.754.400	
Program Program Perlindungan Hak Perempuan										
Kegiatan 1	Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Jumlah Orang	-	30 Orang	-	30 Orang	-		30.000.000	DIDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 2	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) GT-TPPO	Jumlah Kegiata/Kali	-	1 dok	-	1 dok	-		40.000.000	
Kegiatan 3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten dan Kota /Dokumen	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		20.000.000	
Kegiatan 4	Pelatihan keterampilan bagi lansia perempuan	Jumlah/orang	-	30 Orang	-	30 Orang	-		40.000.000	
Kegiatan 5	Pelatihan Petugas Pendampingan Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan	Jumlah Orang	-	30 Orang	-	30 Orang	-		30.000.000	
5.5.2*	**PROPORSI PEREMPUAN YANG BERADA DI POSISI MANAGERIAL.**			**51,34%**	**83,12%**					
Program Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan										
Kegiatan 1	Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah Kegiatan/Dokumen	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		80.000.000	DIDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 2	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah Kegiatan/Orang/Ibu Rumah Tangga	300 org	1 kegiatan	300 org	1 kegiatan	-		40.000.000	
Kegiatan 3	Pelatihan ketrampilan bagi perempuan dan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah Orang	2 Kegiatan	1 kegiatan	2 Kegiatan	1 kegiatan	-		40.000.000	
Kegiatan 4	Pelatihan penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)	Jumlah Kegiatan	1 Kegaiatan	1 kegiatan	1 Kegaiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		40.000.000	
Kegiatan 5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten dan Kota /Dokumen	15 kab/kota	1 kegiatan	15 kab/kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan		20.754.400	
Program Program Perlindungan Hak Perempuan										
Kegiatan 1	Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Jumlah Orang	-	30 Orang	-	30 Orang	-		30.000.000	DIDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 2	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) GT-TPPO	Jumlah Kegiata/Kali	-	1 dok	-	1 dok	-		40.000.000	
Kegiatan 3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten dan Kota /Dokumen	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		20.000.000	
Kegiatan 4	Pelatihan keterampilan bagi lansia perempuan	Jumlah/orang	-	30 Orang	-	30 Orang	-		40.000.000	
Kegiatan 5	Pelatihan Petugas Pendampingan Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan	Jumlah Orang	-	30 Orang	-	30 Orang	-		30.000.000	
5.6 MENJAMIN AKSES UNIVERSAL TERHADAP KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI, DAN HAK REPRODUKSI SEPERTI YANG TELAH DISEPAKATI SESUAI DENGAN PROGRAMME OF ACTION OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON POPULATION AND DEVELOPMENT AND THE BEIJING PLATFORM SERTA DOKUMEN-DOKUMEN HASIL REVIU DARI KONFERENSI-KONFERENSI TERSEBUT										
5.6.1*	**PROPORSI PEREMPUAN UMUR 15-49 TAHUN YANG MEMBUAT KEPUTUSAN SENDIRI TERKAITHUBUNGAN SEKSUAL,PENGGUNAAN KONTRASEPSI, DAN LAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI.**									
Program Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan										
Kegiatan 1	Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah Kegiatan/Dokumen	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		80.000.000	DIDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
Kegiatan 2	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah Kegiatan/Orang/Ibu Rumah Tangga	300 org	1 kegiatan	300 org	1 kegiatan	-		40.000.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 3	Pelatihan ketrampilan bagi perempuan dan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah Orang	2 Kegiatan	1 kegiatan	2 Kegiatan	1 kegiatan	-		40.000.000	PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 4	Pelatihan penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)	Jumlah Kegiatan	1 Kegaiatan	1 kegiatan	1 Kegaiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		40.000.000	
Kegiatan 5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten dan Kota /Dokumen	15 kab/kota	1 kegiatan	15 kab/kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan		20.754.400	
Program Program Perlindungan Hak Perempuan										
Kegiatan 1	Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Jumlah Orang	-	30 Orang	-	30 Orang	-		30.000.000	DIDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 2	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) GT-TPPO	Jumlah Kegiata/Kali	-	1 dok	-	1 dok	-		40.000.000	
Kegiatan 3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten dan Kota /Dokumen	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		20.000.000	
Kegiatan 4	Pelatihan keterampilan bagi lansia perempuan	Jumlah/orang	-	30 Orang	-	30 Orang	-		40.000.000	
Kegiatan 5	Pelatihan Petugas Pendampingan Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan	Jumlah Orang	-	30 Orang	-	30 Orang	-		30.000.000	
Program Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak										
Kegiatan 1	Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah Kegiatan /Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan		188.899.000	DIDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 2	Penguatan jejaring P2TP2A	Jumlah Orang/Kegiatan/Kasus	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		10.000.000	
Kegiatan 3	Penanganan dan upaya perlindungan perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan dan Korban Traficking	jumlah/kasus/orang	12 Bulan	1 kegiatan	12 Bulan	1 kegiatan	1 kegiatan		71.102.000	
Kegiatan 4	Sosialisasi Pelayanan P2TP2A	Jumlah Kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		40.050.000	
5.6.2*	**UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN PEMERINTAH (PP) YANG MENJAMIN PEREMPUAN UMUR 15-49 TAHUN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN, INFORMASI DAN PENDIDIKAN TERKAIT KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI.**									
Program Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak										
Kegiatan 1	Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah Kegiatan /Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan		188.899.000	DIDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 2	Penguatan jejaring P2TP2A	Jumlah Orang/Kegiatan/Kasus	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		10.000.000	
Kegiatan 3	Penanganan dan upaya perlindungan perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan dan Korban Traficking	jumlah/kasus/orang	12 Bulan	1 kegiatan	12 Bulan	1 kegiatan	1 kegiatan		71.102.000	
Kegiatan 4	Sosialisasi Pelayanan P2TP2A	Jumlah Kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		40.050.000	
5.B MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI YANG MEMAMPUKAN, KHUSUSNYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.										
5.B.1*	**PROPORSI INDIVIDU YANG MENGUASAI/MEMILIKI TELEPON GENGGAM.**									
Program Program Peningkatan Sistem Informasi dan Telematika										
Kegiatan 1	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah kegiatan penunjang pengembangan komunikasi informasi	2 Kegiatan	1 kegiatan	2 Kegiatan	1 kegiatan	-		43.677.500	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAHH
Kegiatan 2	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Produksi Penyiaran	Tersebarnya informasi kepada masyarakat lewat siaran televisi nasional	3 Kegiatan	1 kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		280.612.000	
Kegiatan 3	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Siaran Pembangunan Daerah	Tersebarnya informasi kepada masyarakat lewat siaran radio nasional	-	1 kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		69.624.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 4	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Imbal Siar Media Onlie Kantor Berita Nasional	Tersebarnya informasi kepada masyarakat lewat siaran kantor berita nasional	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		40.301.000	
Kegiatan 5	Kegiatan Koordinasi Kehumasan Antar Instasi di Sulawesi Utara	Terselenggaranya koordinasi kehumasan antar perangkat daerah di sulawesi utara	-	1 kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		7.224.000	
Kegiatan 6	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Cetak	Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media cetak	-	2 kegiatan	-	2 kegiatan	-		77.396.000	
Kegiatan 7	Kegiatan Kemitraan dengan Media Massa	Terlaksanya kemitraan dengan media massa	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		9.210.000	
Kegiatan 8	Kegiatan pengadaan fasilitas penunjang kelompok informasi masyarakat	Terlaksananya pengadaan fasilitas penunjang	-	2 pkt	-	1 paket	1 paket		14.503.000	
Kegiatan 9	Gelar Inovasi Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya gelar inovasi komunikasi, informasi dan media massa	-	1 kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		725.793.354	
Kegiatan 10	Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Kemasyarakatan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengembangan kominfo dan media massa	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		2.700.000.000	
TUJUAN 6 PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK										
6.1 PADA TAHUN 2030, MENCAPAI AKSES UNIVERSAL DAN MERATA TERHADAP AIR MINUM YANG AMAN DAN TERJANGKAU BAGI SEMUA.										
6.1.1.(A)	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SUMBER AIR MINUM LAYAK.**									
Program studi dan perencanaan pengelolaan Sumber Daya Air										
Kegiatan 1	Kegiatan Penyusunan Perda Daerah Irigasi	Jumlah Perda Daerah Irigasi	1 TA	1 dok	1 TA	1 dok	-		77.125.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Program Program Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Daerah Provinsi										
Kegiatan 1	Pembangunan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman	Pembangunan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman	1 TA	1 tahun anggaran	1 TA	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran		1.125.037.424	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Kegiatan 2	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman	Dokumen	1 dok	-	1 dok	-		368.000.000	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi										
Kegiatan 1	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Jumlah KK yang terlayani akses Sistem Penyediaan Air Minum	2 Instalasi Sistem Penyediaan Air Minum	1125 kk	2 Instalasi Sistem Penyediaan Air Minum	1125 kk	-		1.177.654.472	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Kegiatan 2	Kegiatan Sistem Data dan Informasi Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	Tersedianya Sistem Data dan Informasi Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Provinsi Sulawesi Utara	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi		113.226.000	
Kegiatan 3	Kegiatan Sistem Data dan Informasi PAMSIMAS	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan penyediaan air minum berbasis masyarakat	Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-		293.325.000	
6.1.1.(B)	**KAPASITAS PRASARANA AIR BAKU UNTUK MELAYANI RUMAH TANGGA, PERKOTAAN DAN INDUSTRI, SERTA PENYEDIAAN AIR BAKU UNTUK PULAU-PULAU.**									
Program studi dan perencanaan pengelolaan Sumber Daya Air										
Kegiatan 1	Kegiatan Penyusunan Perda Daerah Irigasi	Jumlah Perda Daerah Irigasi	1 TA	1 dok	1 TA	1 dok	-		77.125.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Program Program Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Daerah Provinsi										

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 1	Pembangunan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman	Pembangunan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman	1 TA	1 tahun anggaran	1 TA	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran		1.125.037.424	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Kegiatan 2	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman	Dokumen	1 dok	-	1 dok	-		368.000.000	
6.1.1.(C)	**PROPORSI POPULASI YANG MEMILIKI AKSES LAYANAN SUMBER AIR MINUM AMAN DAN BERKELANJUTAN**									
Program Program Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Daerah Provinsi										
Kegiatan 1	Pembangunan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman	Pembangunan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman	1 TA	1 tahun anggaran	1 TA	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran		1.125.037.424	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Kegiatan 2	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman	Dokumen	1 dok	-	1 dok	-		368.000.000	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi										
Kegiatan 1	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Jumlah KK yang terlayani akses Sistem Penyediaan Air Minum	2 Instalasi Sistem Penyediaan Air Minum	1125 kk	2 Instalasi Sistem Penyediaan Air Minum	1125 kk	-		1.177.654.472	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Kegiatan 2	Kegiatan Sistem Data dan Informasi Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	Tersedianya Sistem Data dan Informasi Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Provinsi Sulawesi Utara	Aplikasi	1 Aplikasi	c	1 Aplikasi	1 Aplikasi		113.226.000	
Kegiatan 3	Kegiatan Sistem Data dan Informasi PAMSIMAS	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan penyediaan air minum berbasis masyarakat	Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-		293.325.000	
6.2 PADA TAHUN 2030, MENCAPAI AKSES TERHADAP SANITASI DAN KEBERSIHAN YANG MEMADAI DAN MERATA BAGI SEMUA, DAN MENGHENTIKAN PRAKTIK BUANG AIR BESAR DI TEMPAT TERBUKA,MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS PADA KEBUTUHAN KAUM PEREMPUAN, SERTA KELOMPOK MASYARAKAT RENTAN.										
6.2.1.(A)	**PROPORSI POPULASI YANG MEMILIKI FASILITAS CUCI TANGAN DENGAN SABUN DAN AIR**									
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi										
Kegiatan 1	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Jumlah KK yang terlayani akses Sistem Penyediaan Air Minum	2 Instalasi Sistem Penyediaan Air Minum	1125 kk	2 Instalasi Sistem Penyediaan Air Minum	1125 kk	-		1.177.654.472	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Kegiatan 2	Kegiatan Sistem Data dan Informasi Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	Tersedianya Sistem Data dan Informasi Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Provinsi Sulawesi Utara	Aplikasi	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi		113.226.000	
Kegiatan 3	Kegiatan Sistem Data dan Informasi PAMSIMAS	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan penyediaan air minum berbasis masyarakat	Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-		293.325.000	
6.2.1.(B)	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SANITASI LAYAK**									
Program studi dan perencanaan pengelolaan Sumber Daya Air										
Kegiatan 1	Kegiatan Penyusunan Perda Daerah Irigasi	Jumlah Perda Daerah Irigasi	1 TA	1 dok	1 TA	1 dok	-		77.125.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Program Program Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Daerah Provinsi										
Kegiatan 1	Pembangunan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman	Pembangunan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman	1 TA	1 tahun anggaran	1 TA	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran		1.125.037.424	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Kegiatan 2	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman	Dokumen	1 dok	-	1 dok	-		368.000.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Program Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya										
Kegiatan 1	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen	10 dok	-	10 dok	-		137.437.920	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Kegiatan 2	Kegiatan Dokumen perencanaan normalisasi dan perkuatan tebing sungai	Tersedianya dokumen perencanaan normalisasi dan perkuatan tebing sungai	Dokumen	1 dok	-	1 dok	1 dok		804.693.332	
Kegiatan 4	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi	Telaksananya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi	Kegiatan	12 kegiatan	-	12 kegiatan	12 kegiatan		1.758.407.784	
Kegiatan 5	Sistem data dan Informasi Sumber Daya Air	Tersedianya sistem data dan sistem informasi sumber daya air	Aplikasi	2 Aplikasi	-	2 Aplikasi	-		1.201.575.000	
Kegiatan 6	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terintegrasi	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terintegrasi	Kegiatan	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		485.088.125	
6.2.1.(C)	**JUMLAH DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)**									
Program Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya										
Kegiatan 1	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	10 dok	-	10 dok	-		137.437.920	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Kegiatan 2	Kegiatan Dokumen perencanaan normalisasi dan perkuatan tebing sungai	Tersedianya dokumen perencanaan normalisasi dan perkuatan tebing sungai	-	1 dok	-	1 dok	1 dok		804.693.332	
Kegiatan 3	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	-	6 kegiatan	-	6 kegiatan	-		37.231.171.374	
Kegiatan 4	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi	Telaksananya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi	-	12 kegiatan	-	12 kegiatan	12 kegiatan		1.758.407.784	
Kegiatan 5	Sistem data dan Informasi Sumber Daya Air	Tersedianya sistem data dan sistem informasi sumber daya air	-	2 Aplikasi	-	2 Aplikasi	-		1.201.575.000	
Kegiatan 6	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terintegrasi	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terintegrasi	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		485.088.125	
Program Program Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Daerah Provinsi										
Kegiatan 1	Pembangunan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman	Pembangunan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman	1 TA	1 tahun anggaran	1 TA	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran		1.125.037.424	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Kegiatan 2	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman	-	1 dok	-	1 dok	-		368.000.000	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi										
Kegiatan 1	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Jumlah KK yang terlayani akses Sistem Penyediaan Air Minum	2 Instalasi Sistem Penyediaan Air Minum	1125 kk	2 Instalasi Sistem Penyediaan Air Minum	1125 kk	-		1.177.654.472	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Kegiatan 2	Kegiatan Sistem Data dan Informasi Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	Tersedianya Sistem Data dan Informasi Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Provinsi Sulawesi Utara	-	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi		113.226.000	
Kegiatan 3	Kegiatan Sistem Data dan Informasi PAMSIMAS	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan penyediaan air minum berbasis masyarakat	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-		293.325.000	
6.2.1.(D)	**JUMLAH DESA/KELURAHAN YANG OPEN DEFECATION FREE (ODF)/ STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)**									
6.2.1.(E)	**JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERBANGUN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM TERPUSAT SKALA KOTA, KAWASAN DAN KOMUNAL**									
Program Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya										

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 1	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	10 dok	-	10 dok	-		137.437.920	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Kegiatan 2	Kegiatan Dokumen perencanaan normalisasi dan perkuatan tebing sungai	Tersedianya dokumen perencanaan normalisasi dan perkuatan tebing sungai	-	1 dok	-	1 dok	1 dok		804.693.332	
Kegiatan 3	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi	Telaksananya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi	-	12 kegiatan	-	12 kegiatan	12 kegiatan		1.758.407.784	
Kegiatan 4	Sistem data dan Informasi Sumber Daya Air	Tersedianya sistem data dan sistem informasi sumber daya air	-	2 Aplikasi	-	2 Aplikasi	-		1.201.575.000	
Kegiatan 5	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terintegrasi	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terintegrasi	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		485.088.125	
Program Program Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Daerah Provinsi										
Kegiatan 1	Pembangunan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman	Pembangunan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman	1 TA	1 tahun anggaran	1 TA	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran		1.125.037.424	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Kegiatan 2	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman	-	1 dok	-	1 dok	-		368.000.000	
6.2.1.(F)	**PROPORSI RUMAH TANGGA YANG TERLAYANI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TERPUSAT.**									
Program Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya										
Kegiatan 1	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	10 dok	-	10 dok	-		137.437.920	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Kegiatan 2	Kegiatan Dokumen perencanaan normalisasi dan perkuatan tebing sungai	Tersedianya dokumen perencanaan normalisasi dan perkuatan tebing sungai	-	1 dok	-	1 dok	1 dok		804.693.332	
Kegiatan 3	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	-	6 kegiatan	-	6 kegiatan	-		372.311.713.	
Kegiatan 4	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi	Telaksananya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi	-	12 kegiatan	-	12 kegiatan	12 kegiatan		1.758.407.784	
Kegiatan 5	Sistem data dan Informasi Sumber Daya Air	Tersedianya sistem data dan sistem informasi sumber daya air	-	2 Aplikasi	-	2 Aplikasi	-		1.201.575.000	
Kegiatan 6	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terintegrasi	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terintegrasi	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		485.088.125	
Program Program Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Daerah Provinsi										
Kegiatan 1	Pembangunan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman	Pembangunan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman	1 TA	1 tahun anggaran	1 TA	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran		1.125.037.424	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Kegiatan 2	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman	-	1 dok	-	1 dok	-		368.000.000	
Program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan										
Kegiatan 1	Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Kelompok Pengolah Eceng Gondok	Terlaksananya pembinaan kelompok pengolah eceng gondok	-	5 Kelompok	-	5 Kelompok	-		50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Kegiatan 2	Gerakan Peduli Sampah dalam rangka HPSN Tingkat Provinsi	Terlaksananya gerakan hari peduli sampah nasional di prov. Sulut	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		15.000.000	
Kegiatan 3	Binwas Pengelolaan Sampah Prov. Sulut	Terlaksananya jumlah sampah yang dikelola	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		135.000.000	
Kegiatan 4	Bersih-bersih Sampah Sungai dan Pesisir	Terwujudnya peningkatan dan kepedulian pengelolaan sampah di prov. Sulut	-	4 kegiatan	-	4 kegiatan	-		20.000.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 5	Pemantauan Pengelolaan Sampah di TPA Prov. Sulut	Terlaksananya pemantauan sampah di TPA pada 15 kabupaten/kota	-	15,00%	-	15%	15%		40.000.000	
Kegiatan 6	Kegiatan pembinaan kabupaten/kota peserta dan calon peserta adipura	Indikator terlaksananya pembinaan kabupaten/kota peserta dan calon peserta adipura	-	10 kab/kota	-	10 kab/kota	-		30.000.000	
Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup										
Kegiatan 1	Pengelolaan LB3	Terlaksananya pengelolaan LB3 terhadap pemegang izin pengelola LB3	-	1 kab/kota	-	1 kegiatan	1 kegiatan		107.900.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Kegiatan 2	Pemantauan Air Sungai	Terlaksananya pemantauan air sungai sesuai dengan kriteria baku mutu air	12 Bulan	4,00%	12 Bulan	4 sungai	4 sungai		43.200.000	
Kegiatan 3	Pemantauan Air Danau	Terlaksananya pemantauan air danau sesuai dengan kriteria baku mutu air	12 Bulan	4,00%	12 Bulan	4 danau	4 danau		37.150.000	
Kegiatan 4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Terlaksananya pemantauan kualitas udara sesuai dengan kriteria passive sampler baku mutu udara	12 Bulan	3,00%	12 Bulan	3,00%	-		34.600.000	
Kegiatan 5	Evaluasi Kinerja Penyusunan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL	Terlaksananya evaluasi kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksaan UKLUPL dan SPPL di kab/kota	12 Bulan	15 dok	12 Bulan	15 dok	-		72.000.000	
Kegiatan 6	Penyusunan KLHS	Tersusunnya kajian lingkungan hidup strategis untuk pembangunan yang berkelanjutan	-	1 dok	-	1 dok	-		170.275.000	
Kegiatan 7	Pemantauan RKL-RPL dan UKL-UPL di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan RKL-RPL dan UKL-IPL di kab/kota	-	15 dok	-	15 dok	-		60.100.000	
Kegiatan 8	Pembinaan Monitoring Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan monitoring pengendalian dan pencemaran lingkungan di kab/kota	-	15 kegiatan	-	15 kab/kota	15 kab/kota		63.400.000	
Kegiatan 9	Pembinaan dan Pengawasan Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 kegiatan pengumpulan dan pengangkut LB3	Tersedianya laporan hasil pengawasan terhadap pemegang izin pengelola LB3	-	4 laporan	-	2 Laporan	2 Laporan		10.000.000	
Kegiatan 10	Pemantauan dan Pendataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Kegiatan Lainnya yang Menghasilkan Limbah B3	Tersedianya laporan dan data hasil pemantauan fasilitas pelayanan kesehatan yang menghasilkan LB3	-	5 laporan	-	2 Laporan	2 Laporan		42.100.000	
Kegiatan 11	Pemantauan Kualitas Air Laut	Terlaksananya pemantauan kualitas	-	1,00%	-	1,00%	-		32.800.000	
Kegiatan 12	Pemantauan Kualitas Air Tanah	Terlaksananya pemantauan kualitas air tanah sesuai dengan kriteria baku mutu air	-	10,00%	-	10,00%	-		25.000.000	
Kegiatan 13	Pembinaan penyusunan AMDAL	Terlaksananya pembinaan penyusunan AMDAL antar kabupaten	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-		65.400.000	
Kegiatan 14	Pemantauan penyelenggaraan KLHS di Tingkat Provinsi danKabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan peneyelenggaraan KLHS di Kab/kota	-	15,00%	-	15,00%	-		61.575.000	
Kegiatan 15	Pendataan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang	Tersedianya laporan data kerusakan ekosistem terumbu karang di kab/kota	4 kab/kota	10 laporan	4 kab/kota	10 laporan	2 Laporan		33.250.000	
Kegiatan 16	Penanaman Mangrove	Terpenuhinya tutupan vegetasi mangrove	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		29.000.000	
6.3 PADA TAHUN 2030, MENINGKATKAN KUALITAS AIR DENGAN MENGURANGI POLUSI, MENGHILANGKAN PEMBUANGAN, DAN MEMINIMALKAN PELEPASAN MATERIAL DAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA, MENGURANGI SETENGAH PROPORSI AIR LIMBAH YANG TIDAK DIOALAH, DAN SECARA SIGINIFIKAN MENINGKATAKAN DAUR ULANG, SERTA PENGGUNAAN KEMBALI BARANG DAUR ULANG YANG AMAN SECARA GLOBAL											
6.3.1.(A)	**JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG DITINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN LUMPUR TINJA PERKOTAAN DAN DILAKUKAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT).**									

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam										
Kegiatan 1	Program Kampung Iklim (ProIklim)	Terlaksananya Program kampung iklim yag melaksanakan aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	-		10.740.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Kegiatan 2	Penyelematan DAS dan Sumber Mata Air Lainnya	Terlaksananya pemulihan ekosistem di lokasi DAS sumber mata air lainnya	1 dokumen	20 kegiatan	1 dokumen	20 kegiatan	-		21.370.000	
Kegiatan 3	Pendataan GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Terdapatnya jumlah data aktivitas dan parameter sektor lahan dan non lahan	-	1 dok	-	1 dok	-		25.000.000	
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH										
Kegiatan 1	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah	Tersedianya dokumen status lingkungan hidup daerah prov. Sulut	1 kegiatan	2 dok	1 kegiatan	2 dok	-		38.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Kegiatan 2	Penyusunan RPPLH dalam Rangka Inventarisasi Data Sumber Daya Alam	Tersusunnya RPPLH dalam rangka ekoregion wilayah prov. Sulut	1 dokumen	2 dok	1 dokumen	2 dok	-		104.900.000	
Kegiatan 3	Edukasi dan Komunikasi, dan Sosialisasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Tersedianya dokumen media cetak mengenai penyebaran informasi lingkungan hidup	1 dokumen	1 dok	1 dokumen	1 dok	1 dokumen		69.950.000	
Kegiatan 4	Jejaring Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya sinergitas program/kegiatan antar kabupaten/kota dan provinsi	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-		58.965.000	
Kegiatan 5	Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Tersedianya dokumen Indeks lingkungan hidup daerah prov. sulut	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-		45.250.000	
6.5.1.(E)	**LUAS PENGEMBANGAN HUTAN SERTA PENINGKATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) UNTUK PEMULIHAN KAWASAN DAS**									
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam										
Kegiatan 1	Program Kampung Iklim (ProIklim)	Terlaksananya Program kampung iklim yag melaksanakan aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	-		10.740.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Kegiatan 2	Penyelematan DAS dan Sumber Mata Air Lainnya	Terlaksananya pemulihan ekosistem di lokasi DAS sumber mata air lainnya	1 dokumen	20 kegiatan	1 dokumen	20 kegiatan	-		21.370.000	
Kegiatan 3	Pendataan GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Terdapatnya jumlah data aktivitas dan parameter sektor lahan dan non lahan	-	1 dok	-	1 dok	-		25.000.000	
6.6 PADA TAHUN 2020, MELINDUNGI DAN MERESTORASI EKOSISTEM TERKAIT SUMBER DAYA AIR, TERMASUK PEGUNUNGAN, HUTAN, LAHAN BASAH, SUNGAI, AIR TANAH, DAN DANAU.										
6.6.1.(A)	**JUMLAH DANAU YANG DITINGKATKAN KUALITAS AIRNYA.**									
Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup										
Kegiatan 1	Pengelolaan LB3	Terlaksananya pengelolaan LB3 terhadap pemegang izin pengelola LB3	-	1 kab/kota	-	1 kegiatan	1 kegiatan		107.900.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Kegiatan 2	Pemantauan Air Sungai	Terlaksananya pemantauan air sungai sesuai dengan kriteria baku mutu air	12 Bulan	4,00%	12 Bulan	4 sungai	4 sungai		43.200.000	
Kegiatan 3	Pemantauan Air Danau	Terlaksananya pemantauan air danau sesuai dengan kriteria baku mutu air	12 Bulan	4,00%	12 Bulan	4 danau	4 danau		37.150.000	
Kegiatan 4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Terlaksananya pemantauan kualitas udara sesuai dengan kriteria passive sampler baku mutu udara	12 Bulan	3,00%	12 Bulan	3,00%	-		34.600.000	
Kegiatan 5	Evaluasi Kinerja Penyusunan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL	Terlaksananya evaluasi kinerja komisi penilai AMDAL dan	12 Bulan	15 dok	12 Bulan	15 dok	-		72.000.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
		pemeriksaan UKLUPL dan SPPL di kab/kota								
Kegiatan 6	Penyusunan KLHS	Tersusunnya kajian lingkungan hidup strategis untuk pembangunan yang berkelanjutan	-	1 dok	-	1 dok	-		170.275.000	
Kegiatan 7	Pemantauan RKL-RPL dan UKL-UPL di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan RKL-RPL dan UKL-IPL di kab/kota	-	15 dok	-	15 dok	-		60.100.000	
Kegiatan 8	Pembinaan Monitoring Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan monitoring pengendalian dan pencemaran lingkungan di kab/kota	-	15 kegiatan	-	15 kab/kota	15 kab/kota		63.400.000	
Kegiatan 9	Pembinaan dan Pengawasan Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 kegiatan pengumpulan dan pengangkut LB3	Tersedianya laporan hasil pengawasan terhadap pemegang izin pengelola LB3	-	4 laporan	-	2 Laporan	2 Laporan		10.000.000	
Kegiatan 10	Pemantauan dan Pendataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Kegiatan Lainnya yang Menghasilkan Limbah B3	Tersedianya laporan dan data hasilpemantauan fasilitas pelayanan kesehatan yang menghasilkan LB3	-	5 laporan	-	2 Laporan	2 Laporan		42.100.000	
Kegiatan 11	Pemantauan Kualitas Air Laut	Terlaksananya pemantauan kualitas	-	1,00%	-	1,00%	-		32.800.000	
Kegiatan 12	Pemantauan Kualitas Air Tanah	Terlaksananya pemantauan kualitas air tanah sesuai dengan kriteria baku mutu air	-	10,00%	-	10,00%	-		25.000.000	
Kegiatan 13	Pembinaan penyusunan AMDAL	Terlaksananya pembinaan penyusunan AMDAL antar kabupaten	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-		65.400.000	
Kegiatan 14	Pemantauan penyelenggaraan KLHS di Tingkat Provinsi danKabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan peneyelenggaraan KLHS di Kab/kota	-	15,00%	-	15,00%	-		61.575.000	
Kegiatan 15	Pendataan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang	Tersedianya laporan data kerusakan ekosistem terumbu karang di kab/kota	4 kab/kota	10 laporan	4 kab/kota	2 Laporan	2 Laporan		33.250.000	
Kegiatan 16	Penanaman Mangrove	Terpenuhinya tutupan vegetasi mangrove	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		29.000.000	
6.6.1.(B)	**JUMLAH DANAU YANG PENDANGKALANNYA KURANG DARI 1%.**									
Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup										
Kegiatan 1	Pengelolaan LB3	Terlaksananya pengelolaan LB3 terhadap pemegang izin pengelola LB3	-	1 kab/kota	-	1 kegiatan	1 kegiatan		107.900.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Kegiatan 2	Pemantauan Air Sungai	Terlaksananya pemantauan air sungai sesuai dengan kriteria baku mutu air	12 Bulan	4,00%	12 Bulan	4 sungai	4 sungai		43.200.000	
Kegiatan 3	Pemantauan Air Danau	Terlaksananya pemantauan air danau sesuai dengan kriteria baku mutu air	12 Bulan	4,00%	12 Bulan	4 danau	4 danau		37.150.000	
Kegiatan 4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Terlaksananya pemantauan kualitas udara sesuai dengan kriteria passive sampler baku mutu udara	12 Bulan	3,00%	12 Bulan	3,00%	-		34.600.000	
Kegiatan 5	Evaluasi Kinerja Penyusunan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL	Terlaksananya evaluasi kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksaan UKLUPL dan SPPL di kab/kota	12 Bulan	15 dok	12 Bulan	15 dok	-		72.000.000	
Kegiatan 6	Penyusunan KLHS	Tersusunnya kajian lingkungan hidupstrategis untuk pembangunan yang berkelanjutan	-	1 dok	-	1 dok	-		170.275.000	
Kegiatan 7	Pemantauan RKL-RPL dan UKL-UPL di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan RKL-RPL dan UKL-IPL di kab/kota	-	15 dok	-	15 dok	-		60.100.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 8	Pembinaan Monitoring Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan monitoring pengendalian dan pencemaran lingkungan di kab/kota	-	15 kegiatan	-	15 kab/kota	15 kab/kota		63.400.000	
Kegiatan 9	Pembinaan dan Pengawasan Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 kegiatan pengumpulan dan pengangkut LB3	Tersedianya laporan hasil pengawasan terhadap pemegang izin pengelola LB3	-	4 laporan	-	2 Laporan	2 Laporan		10.000.000	
Kegiatan 10	Pemantauan dan Pendataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Kegiatan Lainnya yang Menghasilkan Limbah B3	Tersedianya laporan dan data hasil pemantauan fasilitas pelayanan kesehatan yang menghasilkan LB3	-	5 laporan	-	2 Laporan	2 Laporan		42.100.000	
Kegiatan 11	Pemantauan Kualitas Air Laut	Terlaksananya pemantauan kualitas	-	1,00%	-	1,00%	-		32.800.000	
Kegiatan 12	Pemantauan Kualitas Air Tanah	Terlaksananya pemantauan kualitas air tanah sesuai dengan kriteria baku mutu air	-	10,00%	-	10,00%	-		25.000.000	
Kegiatan 13	Pembinaan penyusunan AMDAL	Terlaksananya pembinaan penyusunan AMDAL antar kabupaten	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-		65.400.000	
Kegiatan 14	Pemantauan penyelenggaraan KLHS di Tingkat Provinsi danKabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan peneyelenggaraan KLHS di Kab/kota	-	15,00%	-	15,00%	-		61.575.000	
Kegiatan 15	Pendataan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang	Tersedianya laporan data kerusakan ekosistem terumbu karang di kab/kota	4 kab/kota	10 laporan	4 kab/kota	2 Laporan	2 Laporan		33.250.000	
Kegiatan 16	Penanaman Mangrove	Terpenuhinya tutupan vegetasi mangrove	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		29.000.000	
6.6.1.(C)	**JUMLAH DANAU YANG MENURUN TINGKAT EROSINYA.**									
Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup										
Kegiatan 1	Pengelolaan LB3	Terlaksananya pengelolaan LB3 terhadap pemegang izin pengelola LB3	-	1 kab/kota	-	1 kegiatan	1 kegiatan		107.900.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Kegiatan 2	Pemantauan Air Sungai	Terlaksananya pemantauan air sungai sesuai dengan kriteria baku mutu air	12 Bulan	4,00%	12 Bulan	4 sungai	4 sungai		43.200.000	
Kegiatan 3	Pemantauan Air Danau	Terlaksananya pemantauan air danau sesuai dengan kriteria baku mutu air	12 Bulan	4,00%	12 Bulan	4 danau	4 danau		37.150.000	
Kegiatan 4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Terlaksananya pemantauan kualitas udara sesuai dengan kriteria passive sampler baku mutu udara	12 Bulan	3,00%	12 Bulan	3,00%	-		34.600.000	
Kegiatan 5	Evaluasi Kinerja Penyusunan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL	Terlaksananya evaluasi kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksaan UKLUPL dan SPPL di kab/kota	12 Bulan	15 dok	12 Bulan	15 dok	-		72.000.000	
Kegiatan 6	Penyusunan KLHS	Tersusunnya kajian lingkungan hidupstrategis untuk pembangunan yang berkelanjutan	-	1 dok	-	1 dok	-		170.275.000	
Kegiatan 7	Pemantauan RKL-RPL dan UKL-UPL di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan RKL-RPL dan UKL-IPL di kab/kota	-	15 dok	-	15 dok	-		60.100.000	
Kegiatan 8	Pembinaan Monitoring Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan monitoring pengendalian dan pencemaran lingkungan di kab/kota	-	15 kegiatan	-	15 kab/kota	15 kab/kota		63.400.000	
Kegiatan 9	Pembinaan dan Pengawasan Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 kegiatan pengumpulan dan pengangkut LB3	Tersedianya laporan hasil pengawasan terhadap pemegang izin pengelola LB3	-	4 laporan	-	2 Laporan	2 Laporan		10.000.000	
Kegiatan 10	Pemantauan dan Pendataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Kegiatan Lainnya yang Menghasilkan Limbah B3	Tersedianya laporan dan data hasil pemantauan fasilitas	-	5 laporan	-	2 Laporan	2 Laporan		42.100.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
		pelayanan kesehatan yang menghasilkan LB3								
Kegiatan 11	Pemantauan Kualitas Air Laut	Terlaksananya pemantauan kualitas	-	1,00%	-	1,00%	-		32.800.000	
Kegiatan 12	Pemantauan Kualitas Air Tanah	Terlaksananya pemantauan kualitas air tanah sesuai dengan kriteria baku mutu air	-	10,00%	-	10,00%	-		25.000.000	
Kegiatan 13	Pembinaan penyusunan AMDAL	Terlaksananya pembinaan penyusunan AMDAL antar kabupaten	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-		65.400.000	
Kegiatan 14	Pemantauan penyelenggaraan KLHS di Tingkat Provinsi danKabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan peneyelenggaraan KLHS di Kab/kota	-	15,00%	-	15,00%	-		61.575.000	
Kegiatan 15	Pendataan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang	Tersedianya laporan data kerusakan ekosistem terumbu karang di kab/kota	4 kab/kota	10 laporan	4 kab/kota	2 Laporan	2 Laporan		33.250.000	
Kegiatan 16	Penanaman Mangrove	Terpenuhinya tutupan vegetasi mangrove	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		29.000.000	
6.6.1.(D)	**LUAS LAHAN KRITIS DALAM KPH YANG DIREHABILITASI**									
Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup										
Kegiatan 1	Pengelolaan LB3	Terlaksananya pengelolaan LB3 terhadap pemegang izin pengelola LB3	-	1 kab/kota	-	1 kegiatan	1 kegiatan		107.900.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Kegiatan 2	Pemantauan Air Sungai	Terlaksananya pemantauan air sungai sesuai dengan kriteria baku mutu air	12 Bulan	4,00%	12 Bulan	4 sungai	4 sungai		43.200.000	
Kegiatan 3	Pemantauan Air Danau	Terlaksananya pemantauan air danau sesuai dengan kriteria baku mutu air	12 Bulan	4,00%	12 Bulan	4 danau	4 danau		37.150.000	
Kegiatan 4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Terlaksananya pemantauan kualitas udara sesuai dengan kriteria passive sampler baku mutu udara	12 Bulan	3,00%	12 Bulan	3,00%	-		34.600.000	
Kegiatan 5	Evaluasi Kinerja Penyusunan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL	Terlaksananya evaluasi kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksaan UKLUPL dan SPPL di kab/kota	12 Bulan	15 dok	12 Bulan	15 dok	-		72.000.000	
Kegiatan 6	Penyusunan KLHS	Tersusunnya kajian lingkungan hidupstrategis untuk pembangunan yang berkelanjutan	-	1 dok	-	1 dok	-		170.275.000	
Kegiatan 7	Pemantauan RKL-RPL dan UKL-UPL di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan RKL-RPL dan UKL-IPL di kab/kota	-	15 dok	-	15 dok	-		60.100.000	
Kegiatan 8	Pembinaan Monitoring Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan monitoring pengendalian dan pencemaran lingkungan di kab/kota	-	15 kegiatan	-	15 kab/kota	15 kab/kota		63.400.000	
Kegiatan 9	Pembinaan dan Pengawasan Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 kegiatan pengumpulan dan pengangkut LB3	Tersedianya laporan hasil pengawasan terhadap pemegang izin pengelola LB3	-	4 laporan	-	2 Laporan	2 Laporan		10.000.000	
Kegiatan 10	Pemantauan dan Pendataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Kegiatan Lainnya yang Menghasilkan Limbah B3	Tersedianya laporan dan data hasil pemantauan fasilitas pelayanan kesehatan yang menghasilkan LB3	-	5 laporan	-	2 Laporan	2 Laporan		42.100.000	
Kegiatan 11	Pemantauan Kualitas Air Laut	Terlaksananya pemantauan kualitas	-	1,00%	-	1,00%	-		32.800.000	
Kegiatan 12	Pemantauan Kualitas Air Tanah	Terlaksananya pemantauan kualitas air tanah sesuai dengan kriteria baku mutu air	-	10,00%	-	10,00%	-		25.000.000	
Kegiatan 13	Pembinaan penyusunan AMDAL	Terlaksananya pembinaan penyusunan AMDAL antar kabupaten	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-		65.400.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 14	Pemantauan penyelenggaraan KLHS di Tingkat Provinsi danKabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan peneyelenggaraan KLHS di Kab/kota	-	15,00%	-	15,00%	-		61.575.000	
Kegiatan 15	Pendataan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang	Tersedianya laporan data kerusakan ekosistem terumbu karang di kab/kota	4 kab/kota	10 laporan	4 kab/kota	2 Laporan	2 Laporan		33.250.000	
Kegiatan 16	Penanaman Mangrove	Terpenuhinya tutupan vegetasi mangrove	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		29.000.000	
6.6.1.(E)	**JUMLAH DAS PRIORITAS YANG DILINDUNGI MATA AIRNYA DAN DIPULIHKAN KESEHATANNYA**									
Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup										
Kegiatan 1	Pengelolaan LB3	Terlaksananya pengelolaan LB3 terhadap pemegang izin pengelola LB3	-	1 kab/kota	-	1 kegiatan	1 kegiatan		107.900.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Kegiatan 2	Pemantauan Air Sungai	Terlaksananya pemantauan air sungai sesuai dengan kriteria baku mutu air	12 Bulan	4,00%	12 Bulan	4 sungai	4 sungai		43.200.000	
Kegiatan 3	Pemantauan Air Danau	Terlaksananya pemantauan air danau sesuai dengan kriteria baku mutu air	12 Bulan	4,00%	12 Bulan	4 danau	4 danau		37.150.000	
Kegiatan 4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Terlaksananya pemantauan kualitas udara sesuai dengan kriteria passive sampler baku mutu udara	12 Bulan	3,00%	12 Bulan	3,00%	-		34.600.000	
Kegiatan 5	Evaluasi Kinerja Penyusunan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL	Terlaksananya evaluasi kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksaan UKLUPL dan SPPL di kab/kota	12 Bulan	15 dok	12 Bulan	15 dok	-		72.000.000	
Kegiatan 6	Penyusunan KLHS	Tersusunnya kajian lingkungan hidupstrategis untuk pembangunan yang berkelanjutan	-	1 dok	-	1 dok	-		170.275.000	
Kegiatan 7	Pemantauan RKL-RPL dan UKL-UPL di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan RKL-RPL dan UKL-IPL di kab/kota	-	15 dok	-	15 dok	-		60.100.000	
Kegiatan 8	Pembinaan Monitoring Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan monitoring pengendalian dan pencemaran lingkungan di kab/kota	-	15 kegiatan	-	15 kab/kota	15 kab/kota		63.400.000	
Kegiatan 9	Pembinaan dan Pengawasan Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 kegiatan pengumpulan dan pengangkut LB3	Tersedianya laporan hasil pengawasan terhadap pemegang izin pengelola LB3	-	4 laporan	-	2 Laporan	2 Laporan		10.000.000	
Kegiatan 10	Pemantauan dan Pendataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Kegiatan Lainnya yang Menghasilkan Limbah B3	Tersedianya laporan dan data hasil pemantauan fasilitas pelayanan kesehatan yang menghasilkan LB3	-	5 laporan	-	2 Laporan	2 Laporan		42.100.000	
Kegiatan 11	Pemantauan Kualitas Air Laut	Terlaksananya pemantauan kualitas	-	1,00%	-	1,00%	-		32.800.000	
Kegiatan 12	Pemantauan Kualitas Air Tanah	Terlaksananya pemantauan kualitas air tanah sesuai dengan kriteria baku mutu air	-	10,00%	-	10,00%	-		25.000.000	
Kegiatan 13	Pembinaan penyusunan AMDAL	Terlaksananya pembinaan penyusunan AMDAL antar kabupaten	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-		65.400.000	
Kegiatan 14	Pemantauan penyelenggaraan KLHS di Tingkat Provinsi danKabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan peneyelenggaraan KLHS di Kab/kota	-	15,00%	-	15,00%	-		61.575.000	
Kegiatan 15	Pendataan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang	Tersedianya laporan data kerusakan ekosistem terumbu karang di kab/kota	4 kab/kota	10 laporan	4 kab/kota	2 Laporan	2 Laporan		33.250.000	
Kegiatan 16	Penanaman Mangrove	Terpenuhinya tutupan vegetasi mangrove	-	1 kegiatan	-	-	-		29.000.000	
TUJUAN 7 MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN, DAN MODERN										

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
7.1 PADA TAHUN 2030, MENJAMIN AKSES UNIVERSAL LAYANAN ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL DAN MODERN										
7.1.1*	**RASIO ELEKTRIFIKASI.**									
Program Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi										
Kegiatan 1	Inventarisasi Usaha Jasa Penunjang Energi	Inventarisasi Usaha Jasa Penunjang Energi	4 kegiatan	15 laporan	4 kegiatan	6 laporan	6 laporan		30.000.000	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAERAHH
Kegiatan 2	Survey potensi energi baru terbarukan	Survey potensi energi baru terbarukan	7 kegiatan	15 laporan	7 kegiatan	4 laporan	4 laporan		60.000.000	
Kegiatan 3	Inventarisasi Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati	Inventarisasi usaha niaga bahan bakar nabati	4 kegiatan	15 laporan	4 kegiatan	2 laporan	2 laporan		22.500.000	
Kegiatan 4	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	5 kegiatan	15 kegiatan	5 kegiatan	2 laporan	2 laporan		55.000.000	
Kegiatan 5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3 kegiatan	10 dok	3 kegiatan	10 dok	-		20.000.000	
Kegiatan 6	Sosialisasi Penghematan Energi	Sosialisasi Penghematan Energi	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	-		37.500.000	
Kegiatan 7	Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		150.000.000	
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan										
Kegiatan 1	Inventarisasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum/Sendiri dan UJPTL	Inventarisasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum/Sendiri dan UJPTL	64 Laporan	15 laporan	64 Laporan	3 laporan	3 laporan		59.874.500	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAERAHH
Kegiatan 2	Penyusunan Data Ketenagalistrikan	Penyusunan data ketenagalistrikan	-	15 laporan	-	15 laporan	5 laporan		62.368.000	
Kegiatan 3	Inventarisasi Desa Belum Berlistrik	Inventarisasi desa belum berlistrik	-	15 laporan	-	15 laporan	3 laporan		72.367.500	
Kegiatan 4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	10 dok	-	10 dok	2 laporan		30.000.000	
7.1.1.(A)	**KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA.**									
Program Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi										
Kegiatan 1	Inventarisasi Usaha Jasa Penunjang Energi	Inventarisasi Usaha Jasa Penunjang Energi	4 kegiatan	15 laporan	4 kegiatan	15 laporan	6 laporan		30.000.000	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAERAHH
Kegiatan 2	Survey potensi energi baru terbarukan	Survey potensi energi baru terbarukan	7 kegiatan	15 laporan	7 kegiatan	15 laporan	4 laporan		60.000.000	
Kegiatan 3	Inventarisasi Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati	Inventarisasi usaha niaga bahan bakar nabati	4 kegiatan	15 laporan	4 kegiatan	15 laporan	2 laporan		22.500.000	
Kegiatan 4	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	5 kegiatan	15 kegiatan	5 kegiatan	15 kegiatan	2 laporan		55.000.000	
Kegiatan 5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3 kegiatan	10 dok	3 kegiatan	10 dok	-		20.000.000	
Kegiatan 6	Sosialisasi Penghematan Energi	Sosialisasi Penghematan Energi	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	-		37.500.000	
Kegiatan 7	Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		150.000.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan										
Kegiatan 1	Inventarisasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum/Sendiri dan UJPTL	Inventarisasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum/Sendiri dan UJPTL	64 Laporan	15 laporan	64 Laporan	3 laporan	3 laporan		59.874.500	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAERAHH
Kegiatan 2	Penyusunan Data Ketenagalistrikan	Penyusunan data ketenagalistrikan	-	15 laporan	-	5 laporan	5 laporan		62.368.000	
Kegiatan 3	Inventarisasi Desa Belum Berlistrik	Inventarisasi desa belum berlistrik	-	15 laporan	-	3 laporan	3 laporan		72.367.500	
Kegiatan 4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	10 dok	-	2 laporan	2 laporan		30.000.000	
7.1.2.(A)	**JUMLAH SAMBUNGAN JARINGAN GAS UNTUK RUMAH TANGGA***									
Program Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi										
Kegiatan 1	Inventarisasi Usaha Jasa Penunjang Energi	Inventarisasi Usaha Jasa Penunjang Energi	4 kegiatan	15 laporan	4 kegiatan	6 laporan	6 laporan		30.000.000	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAERAHH
Kegiatan 2	Survey potensi energi baru terbarukan	Survey potensi energi baru terbarukan	7 kegiatan	15 laporan	7 kegiatan	4 laporan	4 laporan		60.000.000	
Kegiatan 3	Inventarisasi Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati	Inventarisasi usaha niaga bahan bakar nabati	4 kegiatan	15 laporan	4 kegiatan	2 laporan	2 laporan		22.500.000	
Kegiatan 4	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	5 kegiatan	15 kegiatan	5 kegiatan	2 laporan	2 laporan		55.000.000	
Kegiatan 5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3 kegiatan	10 dok	3 kegiatan	10 dok	-		20.000.000	
Kegiatan 6	Sosialisasi Penghematan Energi	Sosialisasi Penghematan Energi	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	-		37.500.000	
Kegiatan 7	Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		150.000.000	
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan										
Kegiatan 1	Inventarisasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum/Sendiri dan UJPTL	Inventarisasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum/Sendiri dan UJPTL	64 Laporan	15 laporan	64 Laporan	15 laporan	3 laporan		59.874.500	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAERAHH
Kegiatan 2	Penyusunan Data Ketenagalistrikan	Penyusunan data ketenagalistrikan	-	15 laporan	-	15 laporan	5 laporan		62.368.000	
Kegiatan 3	Inventarisasi Desa Belum Berlistrik	Inventarisasi desa belum berlistrik	-	15 laporan	-	15 laporan	3 laporan		72.367.500	
Kegiatan 4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	10 dok	-	10 dok	2 laporan		30.000.000	
7.1.2.(B)	**RASIO PENGGUNAAN GAS RUMAH TANGGA.**									
Program Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi										
Kegiatan 1	Inventarisasi Usaha Jasa Penunjang Energi	Inventarisasi Usaha Jasa Penunjang Energi	4 kegiatan	15 laporan	4 kegiatan	15 laporan	6 laporan		30.000.000	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAERAHH
Kegiatan 2	Survey potensi energi baru terbarukan	Survey potensi energi baru terbarukan	7 kegiatan	15 laporan	7 kegiatan	15 laporan	4 laporan		60.000.000	
Kegiatan 3	Inventarisasi Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati	Inventarisasi usaha niaga bahan bakar nabati	4 kegiatan	15 laporan	4 kegiatan	15 laporan	2 laporan		22.500.000	
Kegiatan 4	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi Baru	5 kegiatan	15 kegiatan	5 kegiatan	15 kegiatan	2 laporan		55.000.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
		Terbarukan dan Konservasi Energi								
Kegiatan 5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3 kegiatan	10 dok	3 kegiatan	10 dok	-		20.000.000	
Kegiatan 6	Sosialisasi Penghematan Energi	Sosialisasi Penghematan Energi	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	-		37.500.000	
Kegiatan 7	Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		150.000.000	
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan										
Kegiatan 1	Inventarisasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum/Sendiri dan UJPTL	Inventarisasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum/Sendiri dan UJPTL	64 Laporan	15 laporan	64 Laporan	15 laporan	3 laporan		59.874.500	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAERAHH
Kegiatan 2	Penyusunan Data Ketenagalistrikan	Penyusunan data ketenagalistrikan	-	15 laporan	-	15 laporan	5 laporan		62.368.000	
Kegiatan 3	Inventarisasi Desa Belum Berlistrik	Inventarisasi desa belum berlistrik	-	15 laporan	-	15 laporan	3 laporan		72.367.500	
Kegiatan 4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	10 dok	-	10 dok	2 laporan		30.000.000	
7.2 PADA TAHUN 2030, MENINGKAT SECARA SUBSTANSIAL PANGSA ENERGI TERBARUKAN DALAM BAURAN ENERGI GLOBAL										
7.2.1*	**BAURAN ENERGI TERBARUKAN.**									
Program Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi										
Kegiatan 1	Inventarisasi Usaha Jasa Penunjang Energi	Inventarisasi Usaha Jasa Penunjang Energi	4 kegiatan	15 laporan	4 kegiatan	6 laporan	6 laporan		30.000.000	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAERAHH
Kegiatan 2	Survey potensi energi baru terbarukan	Survey potensi energi baru terbarukan	7 kegiatan	15 laporan	7 kegiatan	4 laporan	4 laporan		60.000.000	
Kegiatan 3	Inventarisasi Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati	Inventarisasi usaha niaga bahan bakar nabati	4 kegiatan	15 laporan	4 kegiatan	2 laporan	2 laporan		22.500.000	
Kegiatan 4	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	5 kegiatan	15 kegiatan	5 kegiatan	2 laporan	2 laporan		55.000.000	
Kegiatan 5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3 kegiatan	10 dok	3 kegiatan	10 dok	-		20.000.000	
Kegiatan 6	Sosialisasi Penghematan Energi	Sosialisasi Penghematan Energi	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	-		37.500.000	
Kegiatan 7	Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		150.000.000	
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan										
Kegiatan 1	Inventarisasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum/Sendiri dan UJPTL	Inventarisasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum/Sendiri dan UJPTL	64 Laporan	15 laporan	64 Laporan	3 laporan	3 laporan		59.874.500	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAERAHH
Kegiatan 2	Penyusunan Data Ketenagalistrikan	Penyusunan data ketenagalistrikan	-	15 laporan	-	5 laporan	5 laporan		62.368.000	
Kegiatan 3	Inventarisasi Desa Belum Berlistrik	Inventarisasi desa belum berlistrik	-	15 laporan	-	3 laporan	3 laporan		72.367.500	
Kegiatan 4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	10 dok	-	2 laporan	2 laporan		30.000.000	
7.3 PADA TAHUN 2030, MELAKUKAN PERBAIKAN EFISIENSI ENERGI DI TINGKAT GLOBAL SEBANYAK DUA KALI LIPAT										

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
7.3.1*	**INTENSITAS ENERGI PRIMER.**									
Program Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi										
Kegiatan 1	Inventarisasi Usaha Jasa Penunjang Energi	Inventarisasi Usaha Jasa Penunjang Energi	4 kegiatan	15 laporan	4 kegiatan	6 laporan	6 laporan		30.000.000	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAERAHH
Kegiatan 2	Survey potensi energi baru terbarukan	Survey potensi energi baru terbarukan	7 kegiatan	15 laporan	7 kegiatan	4 laporan	4 laporan		60.000.000	
Kegiatan 3	Inventarisasi Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati	Inventarisasi usaha niaga bahan bakar nabati	4 kegiatan	15 laporan	4 kegiatan	2 laporan	2 laporan		22.500.000	
Kegiatan 4	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	5 kegiatan	15 kegiatan	5 kegiatan	2 laporan	2 laporan		55.000.000	
Kegiatan 5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3 kegiatan	10 dok	3 kegiatan	10 dok	-		20.000.000	
Kegiatan 6	Sosialisasi Penghematan Energi	Sosialisasi Penghematan Energi	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	-		37.500.000	
Kegiatan 7	Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		150.000.000	
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan										
Kegiatan 1	Inventarisasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum/Sendiri dan UJPTL	Inventarisasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum/Sendiri dan UJPTL	64 Laporan	15 laporan	64 Laporan	15 laporan	3 laporan		59.874.500	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAERAHH
Kegiatan 2	Penyusunan Data Ketenagalistrikan	Penyusunan data ketenagalistrikan	-	15 laporan	-	15 laporan	5 laporan		62.368.000	
Kegiatan 3	Inventarisasi Desa Belum Berlistrik	Inventarisasi desa belum berlistrik	-	15 laporan	-	15 laporan	3 laporan		72.367.500	
Kegiatan 4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	10 dok	-	10 dok	2 laporan		30.000.000	
TUJUAN 8 PEKERJAAN YANG LAYAK DAN MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN										
8.1 MEMPERTAHANKAN PERTUMBUHAN EKONOMI PER KAPITA SESUAI DENGAN KONDISI NASIONAL DAN, KHUSUSNYA, SETIDAKNYA 7 PERSEN PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO PER TAHUN DI NEGARA KURANG BERKEMBANG.										
8.1.1*	**LAJU PERTUMBUHAN PDB PER KAPITA**									
Program Program Pengembangan Kemitraan										
Kegiatan 1	PERDA Rencana Induk Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen	-	1 dok	-	1 dok	1 dok		219.300.000	DINAS PARIWISATA
Kegiatan 2	Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Sulawesi Utara	Jumlah dokumen	-	1 dok	-	1 dok	-		62.400.000	
Kegiatan 3	Pengembangan Sistem dan Database Kepariwisataan	Jumlah Kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		100.000.000	
Program Pengembangan Kelembagaan										
Kegiatan 1	Kerjasama Lintas Sektor Pariwisata	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	4 kegiatan	1 kegiatan	4 kegiatan	1 kegiatan		121.650.000	DINAS PARIWISATA
Kegiatan 2	Bimbingan Teknis Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah peserta	1 kegiatan	75 org	1 kegiatan	75 org	-		40.000.000	
Kegiatan 3	Pengembangan SDM di bidang Pariwisata Bekerjasama dengan lembaga lainnya	Jumlah peserta	1 kegiatan	75 org	1 kegiatan	75 org	-		67.080.000	
Kegiatan 4	Bimtek Penguatan Peran Perempuan di Bidang Pariwisata	Jumlah peserta	1 kegiatan (100 orang)	75 org	1 kegiatan (100 orang)	75 org	-		35.000.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 5	Pelaksanaan Kursus Bahasa Asing bagi Pelaku Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah peserta	2 kegiatan (75 orang)	150 org	2 kegiatan (75 orang)	150 org	-		50.000.000	
Kegiatan 6	Koordinasi dan inventarisasi data SDM dan Kelembagaan kabupaten/kota di Prov. Sulut	Jumlah Laporan	-	15 laporan	-	15 laporan	3 laporan		36.660.000	
Kegiatan 7	Penyusunan Kebijakan Kepariwisataan	Jumlah dokumen	-	1 dok	-	1 dok	-		110.000.000	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata										
Kegiatan 1	Analisa pengembangan pasar potensial dan peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	3 laporan		14.895.000	DINAS PARIWISATA
Kegiatan 2	Pusat Informasi Pariwisata	Jumlah tempat	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	-		115.800.000	
Kegiatan 3	Pemilihan Nyong dan Noni Sulut	Jumlah pasang	1 kegiatan	15 psg	1 kegiatan	15 psg	-		700.000.000	
Kegiatan 4	Keikutsertaan pada Even Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Jumlah kegiatan	2 Pameran	3 kegiatan	2 Pameran	3 kegiatan	1 kegiatan		72.720.000	
Kegiatan 5	Familiariziation Trip (Fam-Trip)	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	-		22.860.000	
Kegiatan 6	Festival Bunaken	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-		600.000.000	
Kegiatan 7	Duta Pariwisata Sulawesi Utara	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegitan		81.100.000	
Kegiatan 8	Penyediaan Bahan Promosi Pariwisata	Tersedianya bahan pameran	5 item	4 Set	5 item	4 Set	-		49.775.000	
Kegiatan 9	Even Promosi Pariwisata Daerah	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	5 kegiatan	3 kegiatan	5 kegiatan	-		207.864.800	
Kegiatan 10	Promosi Pariwisata di Luar Negeri	Jumlah kegiatan yang diikuti	-	2 kegiatan	-	2 kegiatan	-		100.000.000	
Kegiatan 11	Festival Keagamaan	Jumlah Kegiatan	5 kegiatan	3 kegiatan	5 kegiatan	3 kegiatan	1 kegiatan		361.000.000	
Kegiatan 12	Launching Calendar of Event Tahunan	Jumlah kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		60.900.000	
Kegiatan 13	Pusat Pelayanan Promosi Pariwisata Berbasis Digital	Terselenggaranya fasilitasi promosi pariwisata Sulawesi Utara	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		60.000.000	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM.										
Kegiatan 1	Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan KUMKM di Daerah Komoditi Kelapa	UMKM yang mendapat Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan serta Keterampilan di Daerah Komoditi Kelapa guna pengembangan Usaha	15 KUMKM	30 Lembaga	15 KUMKM	30 Lembaga	30 KUMKM		70.856.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Kegiatan 2	Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis	Jumlah Wirausaha Pemula yang mendapatkan pelayanan pengembangan Usaha melalui inkubator teknologi yang dikelolah oleh Konsultan PLUT	15 Kab / Kota	150 org	15 Kab / Kota	150 org	1 kegiatan		57.750.000	
Kegiatan 3	Koordinasi Pengarusutamaan Gender	Jumlah Kegiatan PUG	15 Kab / Kota	1 kegiatan	15 Kab / Kota	1 kegiatan	_		_	
Kegiatan 4	Peningkatan Kerjasama dibidang HAKI	Jumlah rapat peningkatan kerja sama di bidang HAKI dengan instansiinstansi terkait	30 UKM	1 kegiatan	30 UKM	1 kegiatan	_		_	
Kegiatan 5	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah pengelola koperasi dan pelaku UKM yang mendapat pelatihan kewirausahaan	495 Orang	240 org	495 Orang	240 org	390 org		1.146.896.500	
Kegiatan 6	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD	618 Orang	1,00 persen	618 Orang	1,00 persen	420 org		1.253.103.500	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	15 Kab / Kota	1 kegiatan	15 Kab / Kota	1 kegiatan	1 kegiatan		15.299.200	
Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM										
Kegiatan 1	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Pemanfaatan Dana Pemerintah	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	_		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Kegiatan 2	Penyelenggaraan promosi produk UMKM	Meningkatnya nilai / omset Koperasi dan UMKM	3 Kegiatan	5 kegiatan	3 Kegiatan	5 kegiatan	1 kegiatan		123198000	
Kegiatan 3	Pengkajian langkah-langkah strategis pengentasan kemiskinan melalui koperasi dan UKM	Jumlah kajian langkah-langkah strategis	1 Kegiatan	1.00 kajian	1 Kegiatan	1.00 kajian	_		_	
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi										
Kegiatan 1	Sosialisasi Penerapan kepatuhan koperasi dan Penerapan Sanksi	Koperasi yang patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan	30 Koperasi	30 koperasi	30 Koperasi	30 koperasi	_		_	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Kegiatan 2	Pemeriksaan kelembagaan koperasi atas peraturan perundang-undangan	Koperasi dan kelembagaannya sesuai dengan peraturan perundangundangan	15 Koperasi	15 koperasi	15 Koperasi	15 koperasi	_		_	
Kegiatan 3	Pemeriksaan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam	Jumlah KSP / USP yang dinilai / diperiksa kesehatan usahanya	15 KSP / USP	15 koperasi	15 KSP / USP	15 koperasi	_		_	
Kegiatan 4	Penanganan rekomendasi pasca pemeriksaan koperasi dan usaha simpan pinjam	Terlaksananya penanganan rekomendasi pasca pemeriksaan pada koperasi dan USP	2 Dokumen	1 kegiatan	2 Dokumen	1 kegiatan	1 kegiatan		568200	
Kegiatan 5	Sosialisasi pembekuan/pembubaran koperasi/KUD	Koperasi/KUD paham terkait pembekuan dan pembubaran	30 Koperasi / KUD	30 koperasi	30 Koperasi / KUD	30 koperasi	_		_	
Kegiatan 6	Penilaian dan Pemeringkatan Koperasi	Jumlah koperasi yang diberi peringkat		30 koperasi		30 koperasi	_		_	
Kegiatan 7	Bimtek Aparatur Pembina Koperasi dari Kab/Kota	Aparatur sipil negara pembina gerakan koperasi yang berkualitas	30 orang	30 org	30 orang	30 org	_		_	
Kegiatan 8	Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi yang diberikan Penghargaan Koperasi Berprestasi	1 Kegiatan	1 koperasi	1 Kegiatan	1 koperasi	_		_	
Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi										
Kegiatan 1	Pengembangan Data Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Direktori Data Koperasi dan UKM per tahun	15 Kab / Kota	2 dok	15 Kab / Kota	2 dok	2 dok		35.368.300	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Kegiatan 2	Pembentukan Kelembagaan JAMKRIDA	Lembaga JAMKRIDA Sulawesi Utara	1 Unit	1 unit	1 Unit	1 unit	_		_	
Kegiatan 3	Sertifikasi Hasil produksi KUMKM	Jumlah KUMKM yang mendapat Sertifikasi Hasil Produksi	30 KUMKM	30 koperasi	30 KUMKM	30 koperasi	_		_	
Kegiatan 4	Peningkatan Daya Saing KUMKM melalui Peningkatan Kualitas Hasil Produksi	Jumlah KUMKM yang menerima Bantuan Alat Produksi	1 TA	1 koperasi	1 TA	1 koperasi	_		_	
Kegiatan 5	Penilaian Kualifikasi Kelayakan Koperasi dan UMKM Calon Penerima Bantuan	Jumlah Koperasi dan UMKM yang dinilai untuk Kualifikasi kelayakan menerima Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas	15 Kab / Kota	60 UKM	15 Kab / Kota	60 UKM	60 UKM		25.725.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
		Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara								
8.1.1.(A)	**PDB PER KAPITA**									
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM.										
Kegiatan 1	Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan KUMKM di Daerah Komoditi Kelapa	UMKM yang mendapat Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan serta Keterampilan di Daerah Komoditi Kelapa guna pengembangan Usaha	15 KUMKM	30 Lembaga	15 KUMKM	30 Lembaga	30 KUMKM		70.856.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Kegiatan 2	Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis	Jumlah Wirausaha Pemula yang mendapatkan pelayanan pengembangan Usaha melalui inkubator teknologi yang dikelolah oleh Konsultan PLUT	15 Kab / Kota	150 org	15 Kab / Kota	150 org	1 kegiatan		57.750.000	
Kegiatan 3	Koordinasi Pengarusutamaan Gender	Jumlah Kegiatan PUG	15 Kab / Kota	1 kegiatan	15 Kab / Kota	1 kegiatan	_		_	
Kegiatan 4	Peningkatan Kerjasama dibidang HAKI	Jumlah rapat peningkatan kerja sama di bidang HAKI dengan instansiinstansi terkait	30 UKM	1 kegiatan	30 UKM	1 kegiatan	_		_	
Kegiatan 5	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah pengelola koperasi dan pelaku UKM yang mendapat pelatihan kewirausahaan	495 Orang	240 org	495 Orang	240 org	390 org		1.146.896.500	
Kegiatan 6	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD	618 Orang	1,00 persen	618 Orang	1,00 persen	420 org		1.253.103.500	
Kegiatan 7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	15 Kab / Kota	1 kegiatan	15 Kab / Kota	1 kegiatan	1 kegiatan		15.299.200	
Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM										
Kegiatan 1	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Pemanfaatan Dana Pemerintah	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	_		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Kegiatan 2	Penyelenggaraan promosi produk UMKM	Meningkatnya nilai / omset Koperasi dan UMKM	3 Kegiatan	5 kegiatan	3 Kegiatan	5 kegiatan	1 kegiatan		123198000	
Kegiatan 3	Pengkajian langkah-langkah strategis pengentasan kemiskinan melalui koperasi dan UKM	Jumlah kajian langkah-langkah strategis	1 Kegiatan	1.00 kajian	1 Kegiatan	1.00 kajian	_		_	
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi										
Kegiatan 1	Sosialisasi Penerapan kepatuhan koperasi dan Penerapan Sanksi	Koperasi yang patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan	30 Koperasi	30 koperasi	30 Koperasi	30 koperasi	–		–	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Kegiatan 2	Pemeriksaan kelembagaan koperasi atas peraturan perundang-undangan	Koperasi dan kelembagaannya sesuai dengan peraturan perundangundangan	15 Koperasi	15 koperasi	15 Koperasi	15 koperasi	–		–	
Kegiatan 3	Pemeriksaan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam	Jumlah KSP / USP yang dinilai / diperiksa kesehatan usahanya	15 KSP / USP	15 koperasi	15 KSP / USP	15 koperasi	–		–	
Kegiatan 4	Penanganan rekomendasi pasca pemeriksaan koperasi dan usaha simpan pinjam	Terlaksananya penanganan rekomendasi pasca pemeriksaan pada koperasi dan USP	2 Dokumen	1 kegiatan	2 Dokumen	1 kegiatan	1 kegiatan		568200	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 5	Sosialisasi pembekuan/pembubaran koperasi/KUD	Koperasi/KUD paham terkait pembekuan dan pembubaran	30 Koperasi / KUD	30 koperasi	30 Koperasi / KUD	30 koperasi	–		–	
Kegiatan 6	Penilaian dan Pemeringkatan Koperasi	Jumlah koperasi yang diberi peringkat		30 koperasi		30 koperasi	–		–	
Kegiatan 7	Bimtek Aparatur Pembina Koperasi dari Kab/Kota	Aparatur sipil negara pembina gerakan koperasi yang berkualitas	30 orang	30 org	30 orang	30 org	–		–	
Kegiatan 8	Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi yang diberikan Penghargaan Koperasi Berprestasi	1 Kegiatan	1 koperasi	1 Kegiatan	1 koperasi	–		–	
Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi										
Kegiatan 1	Pengembangan Data Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Direktori Data Koperasi dan UKM per tahun	15 Kab / Kota	2 dok	15 Kab / Kota	2 dok	2 dok		35.368.300	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Kegiatan 2	Pembentukan Kelembagaan JAMKRIDA	Lembaga JAMKRIDA Sulawesi Utara	1 Unit	1 unit	1 Unit	1 unit	–		–	
Kegiatan 3	Sertifikasi Hasil produksi KUMKM	Jumlah KUMKM yang mendapat Sertifikasi Hasil Produksi	30 KUMKM	30 koperasi	30 KUMKM	30 koperasi	–		–	
Kegiatan 4	Peningkatan Daya Saing KUMKM melalui Peningkatan Kualitas Hasil Produksi	Jumlah KUMKM yang menerima Bantuan Alat Produksi	1 TA	1 koperasi	1 TA	1 koperasi	–		–	
Kegiatan 5	Penilaian Kualifikasi Kelayakan Koperasi dan UMKM Calon Penerima Bantuan	Jumlah Koperasi dan UMKM yang dinilai untuk Kualifikasi kelayakan menerima Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara	15 Kab / Kota	60 UKM	15 Kab / Kota	60 UKM	60 UKM		25.725.000	
8.3 MENGGALAKKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRODUKTIF, PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA LAYAK, KEWIRAUSAHAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI, DAN MENDORONG FORMALISASI DAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, TERMASUK MELALUI AKSES TERHADAP JASA KEUANGAN.										
8.3.1	**PROPORSI LAPANGAN KERJA INFORMAL SEKTOR NON-PERTANIAN, BERDASARKAN JENIS KELAMIN**									
Program Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja										
Kegiatan 1	Penempatan tenaga kerja antar kerja lokal (AKL)	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	30 %	35%	30 %	35%	-		115.850.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
Kegiatan 2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Berkurangnya tingkat pengangguran terbuka	1 TA	6.20 orang / bulan	1 TA	6.20 orang / bulan	-		36.905.000	
Program Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja										
Kegiatan 1	Penyusunan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyusunan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)	Survey KHL dan Penetapan UMP melalui Peraturan Gubernur	1 Pergub	1 kegiatan	1 Pergub	1 kegiatan	-		500.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
Kegiatan 2	Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	63 %	68%	63 %	68%	-		35.266.400	
Kegiatan 3	Peningkatan Kapasitas Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Jumlah Sarana Hubungan Industrial yang ditingkatkan	400 orang	1000 unit	400 orang	1000 unit	-		74.806.800	
Kegiatan 4	Penyelesaian kasus hubungan industrial	1) perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah; 2) Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun; 3) ; Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB).	75 %	1) 35 % 2) 17.51 %; 3) ; 80 %.	75 %	1) 35 % 2) 17.51 %; 3) ; 80 %.	-		50.000.000	
Program Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan										

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 1	Pengawasan objek pengujian K3 di perusahaan	Keselamatan dan Perllindungan	20 %	18.90 %	20 %	18.90 %	18.90 %		60.775.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
Kegiatan 2	Peningkatan Penerapan Sistem K3 di Perusahaan	Terlaksananya Bimtek SMK3 di Perusahaan	15.40 %	150%	15.40 %	150%	150%		142.200.000	
Kegiatan 3	Pemeriksaan Pengaduan Kasus Norma Ketenagakerjaan	Pemeriksaan Pengaduan Kasus Norma Ketenagakerjaan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		65.200.000	
8.8 MELINDUNGI HAK-HAK TENAGA KERJA DAN MEMPROMOSIKAN LINGKUNGAN KERJA YANG AMAN DAN TERJAMIN BAGI SEMUA PEKERJA, TERMASUK PEKERJA MIGRAN, KHUSUSNYA PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN, DAN MEREKA YANG BEKERJA DALAM PEKERJAAN BERBAHAYA.										
8.8.1.(A)	**JUMLAH PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN NORMA K3.**									
Program Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja										
Kegiatan 1	Penyusunan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyusunan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)	Survey KHL dan Penetapan UMP melalui Peraturan Gubernur	1 Pergub	1 kegiatan	1 Pergub	1 kegiatan	-		500.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
Kegiatan 2	Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	63 %	68%	63 %	68%	-		35.266.400	
Kegiatan 3	Peningkatan Kapasitas Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Jumlah Sarana Hubungan Industrial yang ditingkatkan	400 orang	1000 unit	400 orang	1000 unit	-		74.806.800	
Kegiatan 4	Penyelesaian kasus hubungan industrial	1) perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah; 2) Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun; 3) ; Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB).	75 %	1) 35 % 2) 17.51 %; 3) ; 80 %.	75 %	1) 35 % 2) 17.51 %; 3) ; 80 %.	-		50.000.000	
8.9 PADA TAHUN 2030, MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN UNTUK MEMPROMOSIKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN YANG MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA DAN MEMPROMOSIKAN BUDAYA DAN PRODUK LOKAL.										
8.9.1*	**PROPORSI KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PDB**				**40**					
Program Program Pengembangan Kemitraan										
Kegiatan 1	PERDA Rencana Induk Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen	-	1 dok	-	1 dok	1 dok		219.300.000	DINAS PARIWISATA
Kegiatan 2	Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Sulawesi Utara	Jumlah dokumen	-	1 dok	-	1 dok	-		62.400.000	
Kegiatan 3	Pengembangan Sistem dan Database Kepariwisataan	Jumlah Kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		100.000.000	
Program Pengembangan Kelembagaan										
Kegiatan 1	Kerjasama Lintas Sektor Pariwisata	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	4 kegiatan	1 kegiatan	4 kegiatan	1 kegiatan		121.650.000	DINAS PARIWISATA
Kegiatan 2	Bimbingan Teknis Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah peserta	1 kegiatan	75 org	1 kegiatan	75 org	-		40.000.000	
Kegiatan 3	Pengembangan SDM di bidang Pariwisata Bekerjasama dengan lembaga lainnya	Jumlah peserta	1 kegiatan	75 org	1 kegiatan	75 org	-		67.080.000	
Kegiatan 4	Bimtek Penguatan Peran Perempuan di Bidang Pariwisata	Jumlah peserta	1 kegiatan (100 orang)	75 org	1 kegiatan (100 orang)	75 org	-		35.000.000	
Kegiatan 5	Pelaksanaan Kursus Bahasa Asing bagi Pelaku Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah peserta	2 kegiatan (75 orang)	150 org	2 kegiatan (75 orang)	150 org	-		50.000.000	
Kegiatan 6	Koordinasi dan inventarisasi data SDM dan Kelembagaan kabupaten/kota di Prov. Sulut	Jumlah Laporan	-	15 laporan	-	15 laporan	3 laporan		36.660.000	
Kegiatan 7	Penyusunan Kebijakan Kepariwisataan	Jumlah dokumen	-	1 dok	-	1 dok	-		110.000.000	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata										

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 1	Analisa pengembangan pasar potensial dan peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	3 laporan		14.895.000	
Kegiatan 2	Pusat Informasi Pariwisata	Jumlah tempat	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	-		115.800.000	
Kegiatan 3	Pemilihan Nyong dan Noni Sulut	Jumlah pasang	1 kegiatan	15 psg	1 kegiatan	15 psg	-		700.000.000	
Kegiatan 4	Keikutsertaan pada Even Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Jumlah kegiatan	2 Pameran	3 kegiatan	2 Pameran	3 kegiatan	1 kegiatan		72.720.000	
Kegiatan 5	Familiariziation Trip (Fam-Trip)	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	-		22.860.000	
Kegiatan 6	Festival Bunaken	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-		600.000.000	
Kegiatan 7	Duta Pariwisata Sulawesi Utara	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegitan		81.100.000	DINAS PARIWISATA
Kegiatan 8	Penyediaan Bahan Promosi Pariwisata	Tersedianya bahan pameran	5 item	4 Set	5 item	4 Set	-		49.775.000	
Kegiatan 9	Even Promosi Pariwisata Daerah	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	5 kegiatan	3 kegiatan	5 kegiatan	-		207.864.800	
Kegiatan 10	Promosi Pariwisata di Luar Negeri	Jumlah kegiatan yang diikuti	-	2 kegiatan	-	2 kegiatan	-		100.000.000	
Kegiatan 11	Festival Keagamaan	Jumlah Kegiatan	5 kegiatan	3 kegiatan	5 kegiatan	3 kegiatan	1 kegiatan		361.000.000	
Kegiatan 12	Launching Calendar of Event Tahunan	Jumlah kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		60.900.000	
Kegiatan 13	Pusat Pelayanan Promosi Pariwisata Berbasis Digital	Terselenggaranya fasilitasi promosi pariwisata Sulawesi Utara	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		60.000.000	
8.9.1.(A)	**JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA**									
Program Program Pengembangan Kemitraan										
Kegiatan 1	PERDA Rencana Induk Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen	-	1 dok	-	1 dok	1 dok		219.300.000	
Kegiatan 2	Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Sulawesi Utara	Jumlah dokumen	-	1 dok	-	1 dok	-		62.400.000	DINAS PARIWISATA
Kegiatan 3	Pengembangan Sistem dan Database Kepariwisataan	Jumlah Kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		100.000.000	
Program Pengembangan Kelembagaan										
Kegiatan 1	Kerjasama Lintas Sektor Pariwisata	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	4 kegiatan	1 kegiatan	4 kegiatan	1 kegiatan		121.650.000	
Kegiatan 2	Bimbingan Teknis Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah peserta	1 kegiatan	75 org	1 kegiatan	75 org	-		40.000.000	
Kegiatan 3	Pengembangan SDM di bidang Pariwisata Bekerjasama dengan lembaga lainnya	Jumlah peserta	1 kegiatan	75 org	1 kegiatan	75 org	-		67.080.000	
Kegiatan 4	Bimtek Penguatan Peran Perempuan di Bidang Pariwisata	Jumlah peserta	1 kegiatan (100 orang)	75 org	1 kegiatan (100 orang)	75 org	-		35.000.000	DINAS PARIWISATA
Kegiatan 5	Pelaksanaan Kursus Bahasa Asing bagi Pelaku Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah peserta	2 kegiatan (75 orang)	150 org	2 kegiatan (75 orang)	150 org	-		50.000.000	
Kegiatan 6	Koordinasi dan inventarisasi data SDM dan Kelembagaan kabupaten/kota di Prov. Sulut	Jumlah Laporan	-	15 laporan	-	15 laporan	3 laporan		36.660.000	
Kegiatan 7	Penyusunan Kebijakan Kepariwisataan	Jumlah dokumen	-	1 dok	-	1 dok	-		110.000.000	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata										
Kegiatan 1	Analisa pengembangan pasar potensial dan peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	3 laporan		14.895.000	DINAS PARIWISATA

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 2	Pusat Informasi Pariwisata	Jumlah tempat	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	-		115.800.000	
Kegiatan 3	Pemilihan Nyong dan Noni Sulut	Jumlah pasang	1 kegiatan	15 psg	1 kegiatan	15 psg	-		700.000.000	
Kegiatan 4	Keikutsertaan pada Even Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Jumlah kegiatan	2 Pameran	3 kegiatan	2 Pameran	3 kegiatan	1 kegiatan		72.720.000	
Kegiatan 5	Familiariziation Trip (Fam-Trip)	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	-		22.860.000	
Kegiatan 6	Festival Bunaken	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-		600.000.000	
Kegiatan 7	Duta Pariwisata Sulawesi Utara	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegitan		81.100.000	
Kegiatan 8	Penyediaan Bahan Promosi Pariwisata	Tersedianya bahan pameran	5 item	4 Set	5 item	4 Set	-		49.775.000	
Kegiatan 9	Even Promosi Pariwisata Daerah	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	5 kegiatan	3 kegiatan	5 kegiatan	-		207.864.800	
Kegiatan 10	Promosi Pariwisata di Luar Negeri	Jumlah kegiatan yang diikuti	-	2 kegiatan	-	2 kegiatan	-		100.000.000	
Kegiatan 11	Festival Keagamaan	Jumlah Kegiatan	5 kegiatan	3 kegiatan	5 kegiatan	3 kegiatan	1 kegiatan		361.000.000	
Kegiatan 12	Launching Calendar of Event Tahunan	Jumlah kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		60.900.000	
Kegiatan 13	Pusat Pelayanan Promosi Pariwisata Berbasis Digital	Terselenggaranya fasilitasi promosi pariwisata Sulawesi Utara	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-		60.000.000	
TUJUAN 9 MEMBANGUN INFRASTRUKTUR TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI										
9.1 MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN TANGGUH, TERMASUK INFRASTRUKTUR REGIONAL DAN LINTAS BATAS, UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MANUSIA, DENGAN FOKUS PADA AKSES YANG TERJANGKAU DAN MERATA BAGI SEMUA.										
9.1.2.(B)	**JUMLAH DERMAGA PENYEBERANGAN.**									
Program Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Keselamatan Angkutan Laut										
Kegiatan 1	Pengendalian Operasional Angkutan Laut Provinsi Sulawesi Utara	Persentase Layanan Angkutan Laut	5 kab/kota	12 PERSEN	5 kab/kota	12 PERSEN	2 Kegiatan		9.681.900	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Kegiatan 2	Penyuluhan Peningkatan Keterampilan Teknis Management Keselamatan Transportasi Laut	Persentase Layanan Angkutan Laut	1 kegiatan	2 PERSEN	1 kegiatan	2 PERSEN	_		-	
Kegiatan 3	Pelaksanaan Sertifikasi Nahkoda Kapal	Persentase Layanan Angkutan Laut	5 kab/kota dan luar daerah	1 PERSEN	5 kab/kota dan luar daerah	1 PERSEN	1 Kegiatan		852.000	
Kegiatan 4	Koordinasi dan konsultasi dalam peningkatan kinerja pelayanan angkutan laut	Telaksananya Koordinasi dan konsultasi dalam peningkatan kinerja angkutan laut	2 kegiatan	12 kegiatan	2 kegiatan	12 kegiatan	_		4.006.000	
Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan										
Kegiatan 1	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Sarana Fasilitas Perhubungan	Tersedianya Dokumen Perencanaan	-	1 dokumen	-	1 dokumen	_		13.042.700	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Kegiatan 2	Penyusunan DED Transportasi Perkotaan Kab Minahasa-Kota Manado Berbasis Rel	Tersusunya DED Transportasi Perkotaan	1 dokumen	-	1 dokumen	_	_		_	
Kegiatan 3	Penyusunan Studi DED Pengembangan Terminal Tipe B di kota Tomohon, Kab Minsel dan Kab Mitra	Tersusunya Dokumen Perencanaan DED Terminal Tipe B	1 dokumen	-	1 dokumen	_	_		-	
Kegiatan 4	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Tersedianya Dokumen Perencanaan	-	1 dokumen	-	1 dokumen	_		15.400.000	
9.3 MENINGKATKAN AKSES INDUSTRI DAN PERUSAHAAN SKALA KECIL, KHUSUSNYA DI NEGARA BERKEMBANG, TERHADAP JASA KEUANGAN, TERMASUK KREDIT TERJANGKAU, DAN MENGINTEGRASIKAN KE DALAM RANTAI NILAI DAN PASAR.										
9.3.1*	**PROPORSI NILAI TAMBAH INDUSTRI KECIL TERHADAP TOTAL NILAI TAMBAH INDUSTRI.**									

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM.										
Kegiatan 1	Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan KUMKM di Daerah Komoditi Kelapa	UMKM yang mendapat Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan serta Keterampilan di Daerah Komoditi Kelapa guna pengembangan Usaha	15 KUMKM	30 Lembaga	15 KUMKM	30 Lembaga	30 KUMKM		70.856.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Kegiatan 2	Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis	Jumlah Wirausaha Pemula yang mendapatkan pelayanan pengembangan Usaha melalui inkubator teknologi yang dikelolah oleh Konsultan PLUT	15 Kab / Kota	150 org	15 Kab / Kota	150 org	1 kegiatan		57.750.000	
Kegiatan 3	Koordinasi Pengarusutamaan Gender	Jumlah Kegiatan PUG	15 Kab / Kota	1 kegiatan	15 Kab / Kota	1 kegiatan	_		_	
Kegiatan 4	Peningkatan Kerjasama dibidang HAKI	Jumlah rapat peningkatan kerja sama di bidang HAKI dengan instansiinstansi terkait	30 UKM	1 kegiatan	30 UKM	1 kegiatan	_		_	
Kegiatan 5	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah pengelola koperasi dan pelaku UKM yang mendapat pelatihan kewirausahaan	495 Orang	240 org	495 Orang	240 org	390 org		1.146.896.500	
Kegiatan 6	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD	618 Orang	1,00 persen	618 Orang	1,00 persen	420 org		1.253.103.500	
Kegiatan 7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	15 Kab / Kota	1 kegiatan	15 Kab / Kota	1 kegiatan	1 kegiatan		15.299.200	
Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM										
Kegiatan 1	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Pemanfaatan Dana Pemerintah	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	_		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Kegiatan 2	Penyelenggaraan promosi produk UMKM	Meningkatnya nilai / omset Koperasi dan UMKM	3 Kegiatan	5 kegiatan	3 Kegiatan	5 kegiatan	1 kegiatan		123198000	
Kegiatan 3	Pengkajian langkah-langkah strategis pengentasan kemiskinan melalui koperasi dan UKM	Jumlah kajian langkah-langkah strategis	1 Kegiatan	1.00 kajian	1 Kegiatan	1.00 kajian	_		_	
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi										
Kegiatan 1	Sosialisasi Penerapan kepatuhan koperasi dan Penerapan Sanksi	Koperasi yang patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan	30 Koperasi	30 koperasi	30 Koperasi	30 koperasi	–		–	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Kegiatan 2	Pemeriksaan kelembagaan koperasi atas peraturan perundang-undangan	Koperasi dan kelembagaannya sesuai dengan peraturan perundangundangan	15 Koperasi	15 Koperasi	15 Koperasi	15 Koperasi	–		–	
Kegiatan 3	Pemeriksaan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam	Jumlah KSP / USP yang dinilai / diperiksa kesehatan usahanya	15 KSP / USP	15 koperasi	15 KSP / USP	15 koperasi	–		–	
Kegiatan 4	Penanganan rekomendasi pasca pemeriksaan koperasi dan usaha simpan pinjam	Terlaksananya penanganan rekomendasi pasca pemeriksaan pada koperasi dan USP	2 Dokumen	1 kegiatan	2 Dokumen	1 kegiatan	1 kegiatan		568200	
Kegiatan 5	Sosialisasi pembekuan/pembubaran koperasi/KUD	Koperasi/KUD paham terkait pembekuan dan pembubaran	30 Koperasi / KUD	30 koperasi	30 Koperasi / KUD	30 koperasi	–		–	
Kegiatan 6	Penilaian dan Pemeringkatan Koperasi	Jumlah koperasi yang diberi peringkat		30 koperasi		30 koperasi	–		–	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 7	Bimtek Aparatur Pembina Koperasi dari Kab/Kota	Aparatur sipil negara pembina gerakan koperasi yang berkualitas	30 orang	30 org	30 orang	30 org	_		_	
Kegiatan 8	Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi yang diberikan Penghargaan Koperasi Berprestasi	1 Kegiatan	1 koperasi	1 Kegiatan	1 koperasi	_		_	
Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi										
Kegiatan 1	Pengembangan Data Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Direktori Data Koperasi dan UKM per tahun	15 Kab / Kota	2 dok	15 Kab / Kota	2 dok	2 dok		35.368.300	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Kegiatan 2	Pembentukan Kelembagaan JAMKRIDA	Lembaga JAMKRIDA Sulawesi Utara	1 Unit	1 unit	1 Unit	1 unit	_		_	
Kegiatan 3	Sertifikasi Hasil produksi KUMKM	Jumlah KUMKM yang mendapat Sertifikasi Hasil Produksi	30 KUMKM	30 koperasi	30 KUMKM	30 koperasi	–		–	
Kegiatan 4	Peningkatan Daya Saing KUMKM melalui Peningkatan Kualitas Hasil Produksi	Jumlah KUMKM yang menerima Bantuan Alat Produksi	1 TA	1 koperasi	1 TA	1 koperasi	_		_	
Kegiatan 5	Penilaian Kualifikasi Kelayakan Koperasi dan UMKM Calon Penerima Bantuan	Jumlah Koperasi dan UMKM yang dinilai untuk Kualifikasi kelayakan menerima Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara	15 Kab / Kota	60 UKM	15 Kab / Kota	60 UKM	60 UKM		25.725.000	
9.4 PADA TAHUN 2030, MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN RETROFIT INDUSTRI AGAR DAPAT BERKELANJUTAN, DENGAN PENINGKATAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA DAN ADOPSI YANG LEBIH BAIK DARI TEKNOLOGI DAN PROSES INDUSTRI BERSIH DAN RAMAH LINGKUNGAN, YANG DILAKSANAKAN SEMUA NEGARA SESUAI KEMAMPUAN MASING-MASING.										
9.4.1*	**RASIO EMISI CO2/EMISI GAS RUMAH KACA DENGAN NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR.**									
9.5 MEMPERKUAT RISET ILMIAH, MENINGKATKAN KAPABILITAS TEKNOLOGI SEKTOR INDUSTRI DI SEMUA NEGARA, TERUTAMA NEGARA-NEGARA BERKEMBANG, TERMASUK PADA TAHUN 2030, MENDORONG INOVASI DAN SECARA SUBSTANSIAL MENINGKATKAN JUMLAH PEKERJA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PER 1 JUTA ORANG DAN MENINGKATKAN PEMBELANJAAN PUBLIK DAN SWASTA UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.										
9.5.1*	**PROPORSI ANGGARAN RISET PEMERINTAH TERHADAP PDB.**									
PROGRAM 1 : PROGRAM KAJIAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI DAERAH										
Kegiatan 1	Sistem Inovasi Daerah (SiDa)	Tesedianya inovasi teknologi daerah Prov. Sulut	1 kegiatan	1 Inovasi	1 kegiatan	1 Inovasi	_		_	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROV. SULUT
Kegiatan 2	Penelitian Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Pemukiman di Kawasan Seputaran Waduk	Terlaksananya Aplikasi Sistim Simpul Jaringan Daerah	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_	_		_	
Kegiatan 3	Pengkajian Strategis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Dalam Rangka Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan Kota Manado	Tersedianya kajian strategis daya dukung dan daya tampung lingkungan	1 dokumen	_	1 dokumen	_	_		_	
Kegiatan 4	Pengkajian rancangan pedestrian Kota Manado	Jumlah Dokumen Hasil Kajian/ Penelitian	_	1 Dok	_	1 Dok	_		_	
Kegiatan 5	Kajian Potensi dan Log Change Industri Sabut Kelapa di Kabupaten Minahsa Selatan dan Minahasa Utara	Jumlah Dokumen Hasil Kajian/ Penelitian	_	1 Dok	_	1 Dok	_		_	
Kegiatan 6	Kajian/Penelitian Potensi Herbal Melalui Tanaman Lokal Masyarakat di Sulawesi Utara	Jumlah Dokumen Hasil Kajian/ Penelitian	_	1 Dok	_	1 Dok	_		_	
Kegiatan 7	Kajian Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Petani Kelapa Dengan Produk Hilirisasi Minyak Kelapa di Kab/Kota Se-Prov. Sulut	Jumlah Dokumen Hasil Kajian/ Penelitian	_	1 Dok	_	1 Dok	_		_	
PROGRAM 2 : PROGRAM PENELITIAN DAN PENGKAJIAN SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN										
Kegiatan 1	PENGKAJIAN DAYA SAING DAERAH KAB/KOTA SE SULUT	JUMLAH KAJIAN/DOKUMEN HASIL PENELITIAN DAYA SAING DAERAH DI KAB/KOTA SE-SULUT	1 Kajian	1 Rekomendasi	1 Kajian	1 Rekomendasi	_		_	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROV. SULUT

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 2	Pengkajian tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota Provinsi Se Sulawesi Utara	Jumlah Kajian / Dokumen Hasil Penelitian tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota Provinsi Se-Sulut	1 Kajian	_	1 Kajian	_	_		_	
Kegiatan 3	Pengkajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah TIdak Layak Huni di Kab. Minahasa Tenggara, Kab . Kepl. Sangihe	Tersedianya data kajian/penelitian kebijakan pembangunan RTLH di Kab. Mitra dan Kab. Kepl. Talaud	1 Kajian	_	1 Kajian	_	_		_	
Kegiatan 4	Penelitian dan Pengkajian tentang Evaluasi Sertifikasi Guru SMU/SMK terhadap peningkatan kualitas Pendidikan di Kab/Kota se-Sulut	Jumlah Dokumen Hasil Kajian/ Penelitian	_	1 Dok	_	1 Dok	_		_	
Kegiatan 5	Penelitian/Pengkajian Penilaian Gizi terhadap anak sekolah Dasar di Kabupatern/Kota Se-Sulut	Jumlah Dokumen Hasil Kajian/ Penelitian	_	1 dok	_	1 dok	_		31.064.600	
PROGRAM 3 : PROGRAM PENELITIAN DAN PENGKAJIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN										
Kegiatan 1	Pengkajian Peningkatan Daya Saing Industri Kreatif dan Unggulan Provinsi Sulawesi Utara untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)	Tersedianya data kajian/penalitian strategis peningkatan daya saing industri kreatif dan unggulan provinsi sulawesi utara untuk menghadapi MEA	1 Kajian	_	1 Kajian	_	_		_	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROV. SULUT
Kegiatan 2	Pengkajian Pengembangan Manajemen Pariwisata untuk Mendukung Daya Saing dan Perekonomian di Daerah Perbatasan	Tersedianya data kajian/penelitian strategis pembangunan manajemen pariwisata untuk mendukung daya saing dan perekonomian di daerah perbatasan	1 Kajian	_	1 Kajian	_	_		_	
Kegiatan 3	Pengkajian Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Tersedianya data kajian /penelitian strategi pengelolaan badan usaha Milik daerah (BUMD) untuk mewujudkan prinsip tata kelola perusahan yag baik	1 Kajian	_	1 Kajian	_	_		_	
Kegiatan 4	Pengkajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara	Tersedianya data kajian/penelitian potensi pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Prov. Se-Sulut	1 Kajian	_	1 Kajian	_	_		_	
Kegiatan 5	Kajian Model Pemberdayaan Masyarakat Wilyah Pesisir melalui peningkatan Usaha Ekonomi Produktif di Kab/Kota Se-Sulut	Jumlah Dokumen Hasil Kajian/ Penelitian	_	1 Dok	_	1 Dok	_		_	
9.C SECARA SIGNIFIKAN MENINGKATKAN AKSES TERHADAP TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, DAN MENGUSAHAKAN PENYEDIAAN AKSES UNIVERSAL DAN TERJANGKAU INTERNET DI NEGARA-NEGARA KURANG BERKEMBANG PADA TAHUN 2020.										
9.C.1*	**PROPORSI PENDUDUK YANG TERLAYANI MOBILE BROADBAND**									
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa										
Kegiatan 1	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah kegiatan penunjang pengembangan komunikasi informasi	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	_		-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
Kegiatan 2	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Produksi Penyiaran	Tersebarnya informasi kepada masyarakat lewat siaran televisi nasional	1 Paket	1 kegiatan	1 Paket	1 kegiatan	1 Kegiatan		280.000.000	
Kegiatan 3	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Siaran Pembangunan Daerah	Tersebarnya informasi kepada masyarakat lewat siaran radio nasional	1 Paket	1 kegiatan	1 Paket	1 kegiatan	1 Kegiatan		450.000.000	
Kegiatan 4	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Imbal Siar Media Onlie Kantor Berita Nasional	Tersebarnya informasi kepada masyarakat lewat siaran kantor berita nasional	1 Paket	1 kegiatan	1 Paket	1 kegiatan	_		-	
Kegiatan 5	Kegiatan Koordinasi Kehumasan Antar Instasi di Sulawesi Utara	Terselenggaranya koordinasi kehumasan antar perangkat daerah di sulawesi utara		1 kegiatan		1 kegiatan	1 Kegiatan		395.104.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 6	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Cetak	Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media cetak	2 Paket	2 kegiatan	2 Paket	2 kegiatan	_		-	
Kegiatan 7	Kegiatan Kemitraan dengan Media Massa	Terlaksanya kemitraan dengan media massa		1 kegiatan		1 kegiatan	_		-	
Kegiatan 8	Kegiatan pengadaan fasilitas penunjang kelompok informasi masyarakat	Terlaksananya pengadaan fasilitas penunjang	3 paket	2 pkt	3 paket	2 pkt	1 paket		395.463.000	
Kegiatan 9	Gelar Inovasi Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya gelar inovasi komunikasi, informasi dan media massa	2 Unit	1 kegiatan	2 Unit	1 kegiatan	1 Kegiatan		110.000.000	
Kegiatan 10	Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Kemasyarakatan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengembangan kominfo dan media massa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		4.296.000.000	
9.C.1.(A)	**PROPORSI INDIVIDU YANG MENGUASAI/MEMILIKI TELEPON GENGGAM.**									
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa										
Kegiatan 1	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah kegiatan penunjang pengembangan komunikasi informasi	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	_		-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
Kegiatan 2	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Produksi Penyiaran	Tersebarnya informasi kepada masyarakat lewat siaran televisi nasional	1 Paket	1 kegiatan	1 Paket	1 kegiatan	1 Kegiatan		280.000.000	
Kegiatan 3	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Siaran Pembangunan Daerah	Tersebarnya informasi kepada masyarakat lewat siaran radio nasional	1 Paket	1 kegiatan	1 Paket	1 kegiatan	1 Kegiatan		450.000.000	
Kegiatan 4	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Imbal Siar Media Onlie Kantor Berita Nasional	Tersebarnya informasi kepada masyarakat lewat siaran kantor berita nasional	1 Paket	1 kegiatan	1 Paket	1 kegiatan	_		-	
Kegiatan 5	Kegiatan Koordinasi Kehumasan Antar Instasi di Sulawesi Utara	Terselenggaranya koordinasi kehumasan antar perangkat daerah di sulawesi utara		1 kegiatan		1 kegiatan	1 Kegiatan		395.104.000	
Kegiatan 6	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Cetak	Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media cetak	2 Paket	2 kegiatan	2 Paket	2 kegiatan	_		-	
Kegiatan 7	Kegiatan Kemitraan dengan Media Massa	Terlaksanya kemitraan dengan media massa		1 kegiatan		1 kegiatan	_		-	
Kegiatan 8	Kegiatan pengadaan fasilitas penunjang kelompok informasi masyarakat	Terlaksananya pengadaan fasilitas penunjang	3 paket	2 pkt	3 paket	2 pkt	1 paket		395.463.000	
Kegiatan 9	Gelar Inovasi Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya gelar inovasi komunikasi, informasi dan media massa	2 Unit	1 kegiatan	2 Unit	1 kegiatan	1 Kegiatan		110.000.000	
Kegiatan 10	Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Kemasyarakatan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengembangan kominfo dan media massa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		4.296.000.000	
Program Peningkatan Sistem Informasi dan Telematika										
Kegiatan 1	Kegiatan Pemeliharaan dan Updating Website sulutprov.go.id	Terlaksananya pemeliharaan dan updating website suluprov.go.id	_	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	1 Kegiatan		398.697.650	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
Kegiatan 2	Pemutakhiran Data Sistem Informasi dan Telematika	Terlaksanya koordinasi dan konsultasi eksisting dalam rangka pemutakhiran data sistem informatika dan telematika	2 Kegiatan	2 kegiatan	2 Kegiatan	2 kegiatan	1 Kegiatan		59.206.000	
Kegiatan 3	Kegiatan Penyebaran Informasi Pada Masyarakat Dengan Fasilitas Internet Mobile	Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui internet mobile	3 Kegiatan	1 kegiatan	3 Kegiatan	1 kegiatan	_		-	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
9.C.1.(B)	**PROPORSI INDIVIDU YANG MENGGUNAKAN INTERNET.**									
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa										
Kegiatan 1	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah kegiatan penunjang pengembangan komunikasi informasi	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	_		-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
Kegiatan 2	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Produksi Penyiaran	Tersebarnya informasi kepada masyarakat lewat siaran televisi nasional	1 Paket	1 kegiatan	1 Paket	1 kegiatan	1 Kegiatan		280.000.000	
Kegiatan 3	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Siaran Pembangunan Daerah	Tersebarnya informasi kepada masyarakat lewat siaran radio nasional	1 Paket	1 kegiatan	1 Paket	1 kegiatan	1 Kegiatan		450.000.000	
Kegiatan 4	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Imbal Siar Media Onlie Kantor Berita Nasional	Tersebarnya informasi kepada masyarakat lewat siaran kantor berita nasional	1 Paket	1 kegiatan	1 Paket	1 kegiatan	_		-	
Kegiatan 5	Kegiatan Koordinasi Kehumasan Antar Instasi di Sulawesi Utara	Terselenggaranya koordinasi kehumasan antar perangkat daerah di sulawesi utara	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	1 Kegiatan		395.104.000	
Kegiatan 6	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Cetak	Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media cetak	2 Paket	2 kegiatan	2 Paket	2 kegiatan	_		-	
Kegiatan 7	Kegiatan Kemitraan dengan Media Massa	Terlaksanya kemitraan dengan media massa	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		-	
Kegiatan 8	Kegiatan pengadaan fasilitas penunjang kelompok informasi masyarakat	Terlaksananya pengadaan fasilitas penunjang	3 paket	2 pkt	3 paket	2 pkt	1 paket		395.463.000	
Kegiatan 9	Gelar Inovasi Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya gelar inovasi komunikasi, informasi dan media massa	2 Unit	1 kegiatan	2 Unit	1 kegiatan	1 Kegiatan		110.000.000	
Kegiatan 10	Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Kemasyarakatan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengembangan kominfo dan media massa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		4.296.000.000	
Program Peningkatan Sistem Informasi dan Telematika										
Kegiatan 1	Kegiatan Pemeliharaan dan Updating Website sulutprov.go.id	Terlaksananya pemeliharaan dan updating website suluprov.go.id	_	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	1 Kegiatan		398.697.650	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
Kegiatan 2	Pemutakhiran Data Sistem Informasi dan Telematika	Terlaksanya koordinasi dan konsultasi eksisting dalam rangka pemutakhiran data sistem informatika dan telematika	2 Kegiatan	2 kegiatan	2 Kegiatan	2 kegiatan	1 Kegiatan		59.206.000	
Kegiatan 3	Kegiatan Penyebaran Informasi Pada Masyarakat Dengan Fasilitas Internet Mobile	Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui internet mobile	3 Kegiatan	1 kegiatan	3 Kegiatan	1 kegiatan	_		-	
TUJUAN 10 MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTARNEGARA										
10.1 PADA TAHUN 2030, SECARA PROGRESIF MENCAPAI DAN MEMPERTAHANKAN PERTUMBUHAN PENDAPATAN PENDUDUK YANG BERADA DI BAWAH 40% DARI POPULASI PADA TINGKAT YANG LEBIH TINGGI DARI RATA-RATA NASIONAL.										
10.1.1* KOEFISIEN GINI										
Program Jaminan dan Bantuan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS										
Kegiatan 1	Penanggulangan Bencana Sosial	Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Sosial saat tanggap darurat	_	900 orang	_	900 orang	900 orang		210.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 2	Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan Sosial saat tanggap darurat	_	900 orang	_	900 orang	900 orang		215.000.000	
Kegiatan 3	Bimbingan Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Kapasitas Pelaksana Program Keluarga harapan	_	2 kegiatan	_	2 kegiatan	0		50.936.000	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya										
Kegiatan 1	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan UEP Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	20 klp	10 Klmp (100 KK)	20 klp	10 Klmp (100 KK)	10 Klmp (100 KK)		206.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH
Kegiatan 2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni	185 kk/unit	130 KK	185 kk/unit	130 KK	130 KK		4.423.200.000	
Kegiatan 3	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Jumlah Sarana Umum yang dibangun dilokasi KAT	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit		137.519.200	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
Kegiatan 1	Pelayanan dan Rehabilitasii Sosial Anak	Jumlah Anak, Balita terlantar, Anak Jalanan, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Anak dengan Kecacatan, Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan sosial didalam dan diluar panti	2418 anak	1204 Anak	2418 anak	1204 Anak	1204 Anak		467.708.000	DINAS SOSIAL DAERAH
Kegiatan 2	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Jumlah Lansia Miskin/Terlantar didalam dan diluar panti yang Mendapatkan Bantuan Sosial	604 LU	330 Lanjut Usia	604 LU	330 Lanjut Usia	330 Lanjut Usia		404.360.000	
Kegiatan 3	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial didalam dan diluar panti	401 paca	230 Orang	401 paca	230 Orang	230 Orang		260.882.000	
Kegiatan 4	Pembinaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Terlaksananya Hari Lanjut Usia Nasional	_	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_		-	
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial										
Kegiatan 1	Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	57 PSKS	13 Orang	57 PSKS	13 Orang	13 Orang		113.233.000,00	DINAS SOSIAL DAERAH
Kegiatan 2	Pembinaan/Pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang dibina/diberdayakan	30 KT	_	30 KT	_	_		_	
Program Pemantapan Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)										
Kegiatan 1	Rapat Koordinasi Pemutahiran Data PMKS dan PSKS	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Kemiskinan	1 Keg	1 Kegiatan	1 Keg	1 Kegiatan	_		_	DINAS SOSIAL DAERAH
Kegiatan 2	Pengolahan dan Penyusunan Database PMKS dan PSKS	Tersedianya database PMKS dan PSKS	100 %	_	100 %	_	_		_	
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)										
Kegiatan 1	Monitoring Koordinasi Bansos Pangan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Bansos Pangan	_	2 Kegiatan	_	2 Kegiatan	2 Kegiatan		20000000	DINAS SOSIAL DAERAH
Kegiatan 2	Sosialisasi Program UGB dan PUB	Terinformasikannya Program Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)	1 Keg	_	1 Keg	_	_		_	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 3	Koordinasi lintas sektor dalam rangka pemantauan UGB dan PUB	Terkoordinasikannya Lintas Sektor dalam Pemantauan Pelaksanaan UGB dan PUB	1 Keg	_	1 Keg	_	_		_	
Program Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial										
Kegiatan 1	Monitoring Koordinasi Bansos Pangan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Bansos Pangan	_	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	1 Kegiatan		29999000,2	DINAS SOSIAL DAERAH
10.1.1.(A) PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN NASIONAL, MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR.										
Program Jaminan dan Bantuan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS										
Kegiatan 1	Penanggulangan Bencana Sosial	Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Sosial saat tanggap darurat	_	900 orang	_	900 orang	900 orang		210.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH
Kegiatan 2	Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan Sosial saat tanggap darurat	_	900 orang	_	900 orang	900 orang		215.000.000	
Kegiatan 3	Bimbingan Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Kapasitas Pelaksana Program Keluarga harapan	_	2 kegiatan	_	2 kegiatan	0		50.936.000	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya										
Kegiatan 1	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan UEP Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	20 klp	10 Klmp (100 KK)	20 klp	10 Klmp (100 KK)	10 Klmp (100 KK)		206.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH
Kegiatan 2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni	185 kk/unit	130 KK	185 kk/unit	130 KK	130 KK		4.423.200.000	
Kegiatan 3	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Jumlah Sarana Umum yang dibangun dilokasi KAT	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit		137.519.200	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
Kegiatan 1	Pelayanan dan Rehabilitasii Sosial Anak	Jumlah Anak, Balita terlantar, Anak Jalanan, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Anak dengan Kecacatan, Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan sosial didalam dan diluar panti	2418 anak	1204 Anak	2418 anak	1204 Anak	1204 Anak		467.708.000	DINAS SOSIAL DAERAH
Kegiatan 2	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Jumlah Lansia Miskin/Terlantar didalam dan diluar panti yang Mendapatkan Bantuan Sosial	604 LU	330 Lanjut Usia	604 LU	330 Lanjut Usia	330 Lanjut Usia		404.360.000	
Kegiatan 3	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial didalam dan diluar panti	401 paca	230 Orang	401 paca	230 Orang	230 Orang		260.882.000	
Kegiatan 4	Pembinaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Terlaksananya Hari Lanjut Usia Nasional	_	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_		-	
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial										
Kegiatan 1	Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	57 PSKS	13 Orang	57 PSKS	13 Orang	13 Orang		113.233.000,00	DINAS SOSIAL DAERAH

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 2	Pembinaan/Pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang dibina/diberdayakan	30 KT	_	30 KT	_	_		_	
Program Pemantapan Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)										
Kegiatan 1	Rapat Koordinasi Pemutahiran Data PMKS dan PSKS	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Kemiskinan	1 Keg	1 Kegiatan	1 Keg	1 Kegiatan	_		_	DINAS SOSIAL DAERAH
Kegiatan 2	Pengolahan dan Penyusunan Database PMKS dan PSKS	Tersedianya database PMKS dan PSKS	100 %	_	100 %	_	_		_	
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)										
Kegiatan 1	Monitoring Koordinasi Bansos Pangan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Bansos Pangan	_	2 Kegiatan	_	2 Kegiatan	2 Kegiatan		20000000	DINAS SOSIAL DAERAH
Kegiatan 2	Sosialisasi Program UGB dan PUB	Terinformasikannya Program Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)	1 Keg	_	1 Keg	_	_		_	
Kegiatan 3	Koordinasi lintas sektor dalam rangka pemantauan UGB dan PUB	Terkoordinasikannya Lintas Sektor dalam Pemantauan Pelaksanaan UGB dan PUB	1 Keg	_	1 Keg	_	_		_	
Program Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial										
Kegiatan 1	Monitoring Koordinasi Bansos Pangan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Bansos Pangan	_	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	1 Kegiatan		29999000,2	DINAS SOSIAL DAERAH
10.1.1.(F) PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI DAERAH TERTINGGAL.										
Program Jaminan dan Bantuan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS										
Kegiatan 1	Penanggulangan Bencana Sosial	Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Sosial saat tanggap darurat	_	900 orang	_	900 orang	900 orang		210.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH
Kegiatan 2	Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan Sosial saat tanggap darurat	_	900 orang	_	900 orang	900 orang		215.000.000	
Kegiatan 3	Bimbingan Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Kapasitas Pelaksana Program Keluarga harapan	_	2 kegiatan	_	2 kegiatan	0		50.936.000	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya										
Kegiatan 1	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan UEP Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	20 klp	10 Klmp (100 KK)	20 klp	10 Klmp (100 KK)	10 Klmp (100 KK)		206.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH
Kegiatan 2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni	185 kk/unit	130 KK	185 kk/unit	130 KK	130 KK		4.423.200.000	
Kegiatan 3	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Jumlah Sarana Umum yang dibangun dilokasi KAT	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit		137.519.200	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
Kegiatan 1	Pelayanan dan Rehabilitasii Sosial Anak	Jumlah Anak, Balita terlantar, Anak Jalanan, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Anak dengan Kecacatan, Anak	2418 anak	1204 Anak	2418 anak	1204 Anak	1204 Anak		467.708.000	DINAS SOSIAL DAERAH

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
		yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan sosial didalam dan diluar panti								
Kegiatan 2	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Jumlah Lansia Miskin/Terlantar didalam dan diluar panti yang Mendapatkan Bantuan Sosial	604 LU	330 Lanjut Usia	604 LU	330 Lanjut Usia	330 Lanjut Usia		404.360.000	
Kegiatan 3	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial didalam dan diluar panti	401 paca	230 Orang	401 paca	230 Orang	230 Orang		260.882.000	
Kegiatan 4	Pembinaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Terlaksananya Hari Lanjut Usia Nasional	_	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_		-	
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial										
Kegiatan 1	Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	57 PSKS	13 Orang	57 PSKS	13 Orang	13 Orang		113.233.000,00	DINAS SOSIAL DAERAH
Kegiatan 2	Pembinaan/Pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang dibina/diberdayakan	30 KT	_	30 KT	_	_		_	
Program Pemantapan Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)										
Kegiatan 1	Rapat Koordinasi Pemutahiran Data PMKS dan PSKS	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Kemiskinan	1 Keg	1 Kegiatan	1 Keg	1 Kegiatan	_		_	DINAS SOSIAL DAERAH
Kegiatan 2	Pengolahan dan Penyusunan Database PMKS dan PSKS	Tersedianya database PMKS dan PSKS	100 %	_	100 %	_	_		_	
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)										
Kegiatan 1	Monitoring Koordinasi Bansos Pangan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Bansos Pangan	_	2 Kegiatan	_	2 Kegiatan	2 Kegiatan		20000000	DINAS SOSIAL DAERAH
Kegiatan 2	Sosialisasi Program UGB dan PUB	Terinformasikannya Program Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)	1 Keg	_	1 Keg	_	_		_	
Kegiatan 3	Koordinasi lintas sektor dalam rangka pemantauan UGB dan PUB	Terkoordinasikannya Lintas Sektor dalam Pemantauan Pelaksanaan UGB dan PUB	1 Keg	_	1 Keg	_	_		_	
Program Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial										
Kegiatan 1	Monitoring Koordinasi Bansos Pangan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Bansos Pangan	_	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	1 Kegiatan		29999000,2	DINAS SOSIAL DAERAH
10.2 PADA TAHUN 2030, MEMBERDAYAKAN DAN MENINGKATKAN INKLUSI SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK BAGI SEMUA, TERLEPAS DARI USIA, JENIS KELAMIN, DIFABILITAS, RAS, SUKU, ASAL, AGAMA ATAU KEMAMPUAN EKONOMI ATAU STATUS LAINNYA.										
10.2.1*	**PROPORSI PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH 50 PERSEN DARI MEDIAN PENDAPATAN, MENURUT JENIS KELAMIN DAN PENYANDANG DIFABILITAS.**									
Program Jaminan dan Bantuan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS										
Kegiatan 1	Penanggulangan Bencana Sosial	Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Sosial saat tanggap darurat	_	900 orang	_	900 orang	900 orang		210.000.000	DINAS SOSIAL DAERAH
Kegiatan 2	Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan Sosial saat tanggap darurat	_	900 orang	_	900 orang	900 orang		215.000.000	
Kegiatan 3	Bimbingan Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Kapasitas Pelaksana Program Keluarga harapan	_	2 kegiatan	_	2 kegiatan	0		50.936.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
Kegiatan 1	Pelayanan dan Rehabilitasii Sosial Anak	Jumlah Anak, Balita terlantar, Anak Jalanan, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Anak dengan Kecacatan, Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan sosial didalam dan diluar panti	2418 anak	1204 Anak	2418 anak	1204 Anak	1204 Anak		467.708.000	DINAS SOSIAL DAERAH
Kegiatan 2	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Jumlah Lansia Miskin/Terlantar didalam dan diluar panti yang Mendapatkan Bantuan Sosial	604 LU	330 Lanjut Usia	604 LU	330 Lanjut Usia	330 Lanjut Usia		404.360.000	
Kegiatan 3	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial didalam dan diluar panti	401 paca	230 Orang	401 paca	230 Orang	230 Orang		260.882.000	
Kegiatan 4	Pembinaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Terlaksananya Hari Lanjut Usia Nasional	_	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_		-	
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma										
Kegiatan 1	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Terpenuhinya Makanan Penyandang Eks Kusta dalam Setahun	_	20 org	_	20 org	20 org		174250000	DINAS SOSIAL DAERAH
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)										
Kegiatan 1	Bimbingan Sosial Keterampilan bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah Tuna Sosial (Eks Penyandang Penyakit Sosial) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	20 org	20 org	20 org	20 org	20 org		104550000	DINAS SOSIAL DAERAH
Program Pemantapan Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)										
Kegiatan 1	Rapat Koordinasi Pemutahiran Data PMKS dan PSKS	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Kemiskinan	1 Keg	1 Kegiatan	1 Keg	1 Kegiatan	_		_	DINAS SOSIAL DAERAH
Kegiatan 2	Pengolahan dan Penyusunan Database PMKS dan PSKS	Tersedianya database PMKS dan PSKS	100 %	_	100 %	_	_		_	
10.3 MENJAMIN KESEMPATAN YANG SAMA DAN MENGURANGI KESENJANGAN HASIL, TERMASUK DENGAN MENGHAPUS HUKUM, KEBIJAKAN DAN PRAKTIK YANG DISKRIMINATIF, DAN MEMPROMOSIKAN LEGISLASI, KEBIJAKAN DAN TINDAKAN YANG TEPAT TERKAIT LEGISLASI DAN KEBIJAKAN TERSEBUT.										
10.3.1.(B)	**JUMLAH PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM).**									
Program Perlindungan Hak Perempuan										
Kegiatan 1	Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Jumlah Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	_		-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 2	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) GT-TPPO	Jumlah Kegiata/Kali	30 Orang	1 dok	30 Orang	1 dok	_		-	
Kegiatan 3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten dan Kota /Dokumen	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		8.352.000	
Kegiatan 4	Pelatihan keterampilan bagi lansia perempuan	Jumlah/orang	1 Kegiatan	30 Orang	1 Kegiatan	30 Orang	_		-	
Kegiatan 5	Pelatihan Petugas Pendampingan Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan	Jumlah Orang	1 Kegiatan	30 Orang	1 Kegiatan	30 Orang	_		-	
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan										
Kegiatan 1	Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah Kegiatan/Dokumen	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan		13.169.700	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 2	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah Kegiatan/Orang/Ibu Rumah Tangga	300 org	1 kegiatan	300 org	1 kegiatan	_		-	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 3	Pelatihan ketrampilan bagi perempuan dan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah Orang	2 Kegiatan	1 kegiatan	2 Kegiatan	1 kegiatan	_		-	
Kegiatan 4	Pelatihan penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)	Jumlah Kegiatan	1 Kegaiatan	1 kegiatan	1 Kegaiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan		37.544.000	
Kegiatan 5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten dan Kota /Dokumen	15 kab/kota	1 kegiatan	15 kab/kota	1 kegiatan	1 Kegiatan		4.017.100	
10.3.1.(C)	**JUMLAH PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) PEREMPUAN TERUTAMA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.**									
Program Perlindungan Hak Perempuan										
Kegiatan 1	Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Jumlah Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	_		-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 2	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) GT-TPPO	Jumlah Kegiata/Kali	30 Orang	1 dok	30 Orang	1 dok	_		-	
Kegiatan 3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten dan Kota /Dokumen	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		8.352.000	
Kegiatan 4	Pelatihan keterampilan bagi lansia perempuan	Jumlah/orang	1 Kegiatan	30 Orang	1 Kegiatan	30 Orang	_		-	
Kegiatan 5	Pelatihan Petugas Pendampingan Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan	Jumlah Orang	1 Kegiatan	30 Orang	1 Kegiatan	30 Orang	_		-	
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan										
Kegiatan 1	Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah Kegiatan/Dokumen	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan		13.169.700	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 2	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah Kegiatan/Orang/Ibu Rumah Tangga	300 org	1 kegiatan	300 org	1 kegiatan	_		-	
Kegiatan 3	Pelatihan ketrampilan bagi perempuan dan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah Orang	2 Kegiatan	1 kegiatan	2 Kegiatan	1 kegiatan	_		-	
Kegiatan 4	Pelatihan penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)	Jumlah Kegiatan	1 Kegaiatan	1 kegiatan	1 Kegaiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan		37.544.000	
Kegiatan 5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten dan Kota /Dokumen	15 kab/kota	1 kegiatan	15 kab/kota	1 kegiatan	1 Kegiatan		4.017.100	
10.4 MENGADOPSI KEBIJAKAN, TERUTAMA KEBIJAKAN FISKAL, UPAH DAN PERLINDUNGAN SOSIAL, SERTA SECARA PROGRESIF MENCAPAI KESETARAAN YANG LEBIH BESAR.										
10.4.1.(B)	**PROPORSI PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN.**									
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja										
Kegiatan 1	Penyusunan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyusunan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)	Survey KHL dan Penetapan UMP melalui Peraturan Gubernur	1 Pergub	1 kegiatan	1 Pergub	1 kegiatan	_		_	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
Kegiatan 2	Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	63 %	0,68	63 %	0,68	_		_	
Kegiatan 3	Peningkatan Kapasitas Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Jumlah Sarana Hubungan Industrial yang ditingkatkan	400 orang	1000 unit	400 orang	1000 unit	_		_	
Kegiatan 4	Penyelesaian kasus hubungan industrial	1) perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah; 2) Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun; 3) ; Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB).	75 %	1) 35 % 2) 17.51 %; 3) ; 80 %.	75 %	1) 35 % 2) 17.51 %; 3) ; 80 %.	_		_	
10.7. MEMFASILITASI MIGRASI DAN MOBILITAS MANUSIA YANG TERATUR, AMAN, BERKALA DAN BERTANGGUNG JAWAB, TERMASUK MELALUI PENERAPAN KEBIJAKAN MIGRASI YANG TERENCANA DAN TERKELOLA DENGAN BAIK.										
10.7.2.(A)	**JUMLAH DOKUMEN KERJASAMA KETENAGAKERJAAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN ANTARA NEGARA RI DENGAN NEGARA TUJUAN PENEMPATAN.**									

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja										
Kegiatan 1	Penempatan tenaga kerja antar kerja lokal (AKL)	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	30 %	0,35	30 %	0,35	_		_	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
Kegiatan 2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Berkurangnya tingkat pengangguran terbuka	1 TA	6.20 orang / bulan	1 TA	6.20 orang / bulan	_		_	
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja										
Kegiatan 1	Penyusunan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyusunan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)	Survey KHL dan Penetapan UMP melalui Peraturan Gubernur	1 Pergub	1 kegiatan	1 Pergub	1 kegiatan	_		_	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
Kegiatan 2	Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	63 %	0,68	63 %	0,68	_		_	
Kegiatan 3	Peningkatan Kapasitas Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Jumlah Sarana Hubungan Industrial yang ditingkatkan	400 orang	1000 unit	400 orang	1000 unit	_		_	
Kegiatan 4	Penyelesaian kasus hubungan industrial	1) perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah; 2) Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun; 3) ; Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB).	75 %	1) 35 % 2) 17.51 %; 3) ; 80 %.	75 %	1) 35 % 2) 17.51 %; 3) ; 80 %.	–		–	
TUJUAN 11 KOTA DAN PERMUKIMAN BERKELANJUTAN										
11.1 PADA TAHUN 2030, MENJAMIN AKSES BAGI SEMUA TERHADAP PERUMAHAN YANG LAYAK, AMAN, TERJANGKAU, DAN PELAYANAN DASAR, SERTA MENATA KAWASAN KUMUH.										
11.1.1.(A).	**PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP HUNIAN YANG LAYAK DAN TERJANGKAU**				**64.61**					
Program Bantuan Perbaikan Rumah, Prasarana dan Sarana Masyarakat korban Bencana										
KAGIATAN 1	Identifikasi Rumah untuk Korban Bencana	Tersedianya data hasil identifikasi rumah khusus untuk korban bencana	_	1 laporan	_	1 laporan	_		–	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya										
Kegiatan 1	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan UEP Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	20 klp	10 Klmp (100 KK)	20 klp	10 Klmp (100 KK)	10 Klmp (100 KK)		206000000	DINAS SOSIAL DAERAH
Kegiatan 2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni	185 kk/unit	130 KK	185 kk/unit	130 KK	130 KK		4423200000	
Kegiatan 3	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Jumlah Sarana Umum yang dibangun dilokasi KAT	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit		137519200	
Program Penyelenggaraan PSU Permukiman										
Kegiatan 1	Penyelenggaraan Penataan PSU Kawasan Permukiman	Terselenggaranya penataan dan peningkatan kualitas prasarana sarana umum kawasan permukiman	12 bulan	79 kegiatan	12 bulan	79 kegiatan	10 kegiatan		4052314600	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH
Kegiatan 2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PSU	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan	12 bulan	79 kegiatan	12 bulan	79 kegiatan	10 kegiatan		11410400	
11.1.1.(B).	**JUMLAH KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN YANG TERPENUHI STANDAR PELAYANAN PERKOTAAN (SPP).**				**3**					
Program Pendampingan Kelompok Kerja (POKJA) Perumahan, Permukiman dan Pertanahan										

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 1	Kelompok kerja PKP Maleosan	Tersedianya administrasi dan keuangan POKJA PKP	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		_	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH
Kegiatan 2	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Tersedianya dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP)	_	1 dok	_	1 dok	_		_	
Program Penyelenggaraan PSU Permukiman										
Kegiatan 1	Penyelenggaraan Penataan PSU Kawasan Permukiman	Terselenggaranya penataan dan peningkatan kualitas prasarana sarana umum kawasan permukiman	12 bulan	79 kegiatan	12 bulan	79 kegiatan	10 kegiatan		4052314600	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH
Kegiatan 2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PSU	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan	12 bulan	79 kegiatan	12 bulan	79 kegiatan	10 kegiatan		11410400	
11.1.1.(C).	**JUMLAH KOTA SEDANG DAN KOTA BARU YANG TERPENUHI SPP.**									
Program Pendampingan Kelompok Kerja (POKJA) Perumahan, Permukiman dan Pertanahan										
Kegiatan 1	Kelompok kerja PKP Maleosan	Tersedianya administrasi dan keuangan POKJA PKP	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		_	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH
Kegiatan 2	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Tersedianya dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP)	_	1 dok	_	1 dok	_		_	
Program Penyelenggaraan PSU Permukiman										
Kegiatan 1	Penyelenggaraan Penataan PSU Kawasan Permukiman	Terselenggaranya penataan dan peningkatan kualitas prasarana sarana umum kawasan permukiman	12 bulan	79 kegiatan	12 bulan	79 kegiatan	10 kegiatan		4052314600	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH
Kegiatan 2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PSU	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan	12 bulan	79 kegiatan	12 bulan	79 kegiatan	10 kegiatan		11410400	
11.2 PADA TAHUN 2030, MENYEDIAKAN AKSES TERHADAP SISTEM TRANSPORTASI YANG AMAN, TERJANGKAU, MUDAH DIAKSES DAN BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA, MENINGKATKAN KESELAMATAN LALU LINTAS, TERUTAMA DENGAN MEMPERLUAS JANGKAUAN TRANSPORTASI UMUM, DENGAN MEMBERI PERHATIAN KHUSUS PADA KEBUTUHAN MEREKA YANG BERADA DALAM SITUASI RENTAN, PEREMPUAN, ANAK, PENYANDANG DIFABILITAS DAN ORANG TUA.										
11.2.1.(A).	**PERSENTASE PENGGUNA MODA TRANSPORTASI UMUM DI PERKOTAAN.**									
Program Pembangunan Prasarana Transportasi Darat										
Kegiatan 1	Pembangunan Terminal Tipe B di Minut	Jumlah terminal Tipe B	2 paket	1 terminal	2 paket	1 terminal	_		_	
Program Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Keselamatan Angkutan Darat/Umum										
Kegiatan 1	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Persentase Layanan Angkutan Darat	_	1%	_	1%	_		-	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Kegiatan 2	Peningkatan Keterampilan Pengemudi (AKPD) Berbasis Hemat BBM (Smart Driving) (Penunjang Kegiatan RADGRK)	Persentase Layanan Angkutan Darat	_	1%	_	1%	_		-	
Kegiatan 3	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Lomba Tertib Lalu Lintas Angkutan Kota	Persentase Layanan Angkutan Darat	_	1%	_	1%	_		-	
Kegiatan 4	Penyuluhan Peningkatan Keterampilan Teknis Management Keselamatan Transportasi Darat	Persentase Layanan Angkutan Darat	_	2%	_	2%	_		-	
Kegiatan 5	Koordinasi dan Konsultasi dalam peningkatan keselamatan dan pelayanan transportasi darat	Persentase Layanan Angkutan Darat	_	12%	_	12%	1 Kegiatan		7.481.900	
Program Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Keselamatan Angkutan ASDP										
Kegiatan 1	Pengendalian Operasional LLASDP Provinsi Sulawesi Utara	Persentese Layanan Angkutan ASDP	4 kab/kota	12%	4 kab/kota	12%	1 Kegiatan		2374700	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Kegiatan 2	Penyuluhan Peningkatan Keterampilan Teknis Management Keselamatan Transportasi ASDP	Persentese Layanan Angkutan ASDP	1 kegiatan	2%	1 kegiatan	2%	_		_	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 3	Koordinasi dan konsultasi dalam peningkatan kinerja pelayanan angkutan ASDP	Persentese Layanan Angkutan ASDP	4 kab/kota dan luar daerah	2%	4 kab/kota dan luar daerah	2%	1 Kegiatan		737800	
11.4 MEMPROMOSIKAN DAN MENJAGA WARISAN BUDAYA DUNIA DAN WARISAN ALAM DUNIA.										
11.4.1.(A).	**JUMLAH KOTA PUSAKA DI KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN, KOTA BESAR, KOTA SEDANG DAN KOTA KECIL.**									
Program Pengembangan Nilai Budaya										
Kegiatan 1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	_	15 Kab/Kota	_	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota		29.333.800	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Kegiatan 2	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	Jumlah Kegiatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	_	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_		679.200	
Kegiatan 3	Pengembangan Sejarah	Jumlah Kegiatan Pengembangan Sejarah	_	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_		7.765.250	
Kegiatan 4	Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah Pelestarian Cagar budayah	_	1 Cagar Budaya	_	1 Cagar Budaya	_		-	
Kegiatan 5	Pelestarian Permuseuman	Jumlah Pelestarian Permuseuman	_	1 Museum	_	1 Museum	_		-	
Kegiatan 6	Upacara Adat	Jumlah pelaksanaan upacara adat dan dukungan even seni budaya dalam rangka melestarikan peninggalan masa lampau	2 kegiatan	_	**2 kegiatan**	_	_		-	
Kegiatan 7	Seminar Budaya	Terlaksananya kegiatan seminar budaya	1 Dokumen	_	1 Dokumen	_	_		-	
Kegiatan 8	Pengumpulan Data dan Informasi Karya Budaya untuk warisan Budaya Takbenda	Jumlah dokumen data dan informasi karya budaya WBTB	1 Dokumen	_	1 Dokumen	_	_		-	
Program Pengelolaan Keragaman Budaya										
Kegiatan 1	Gita Bahana Nusantara (Audisi Penyanyi & Orkestra dan Pengiriman Tim)	Terlaksananya audisi dan pengiriman tim pada GBN	1 KEGIATAN	1 kegiatan	1 KEGIATAN	1 kegiatan	_		7.429.600	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Kegiatan 2	Temu Seniman	Jumlah kegiatan temu seniman daerah sulawesi utara	2 KEGIATAN	1 kegiatan	2 KEGIATAN	1 kegiatan	_		-	
Kegiatan 3	Parade Tari Nusantara	Jumlah dukungan seni budaya dalam rangka parade tari nusantara	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		-	
Kegiatan 4	Pendataan Kesenian	Jumlah data seni se-Sulawesi Utara	_	1 dok	_	1 dok	1 dok		23.278.400	
Kegiatan 5	Atraksi Kesenian	Terlaksananya jasa pelatihan sanggar seni dan jasa kesenian	1 KEGIATAN	1 kegiatan	1 KEGIATAN	1 kegiatan	1 kegiatan		68.000.000	
Kegiatan 6	Pengiriman Misi Seni dalam rangka Festival di Luar Daerah	Terlaksananya pengiriman misi seni	3 DAERAH	_	3 DAERAH	_	_		_	
Program Peningkatan/Fasilitasi bidang promosi dan informasi budaya daerah										
Kegiatan 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Seni Budaya	Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana seni budaya bagi sanggar seni dan budaya	_	1 KEGIATAN	_	1 KEGIATAN	_		_	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Program Pengembangan Kemitraan										
Kegiatan 1	Bimbingan Teknis Penguatan Peran Perempuan di Bidang Kebudayaan	Terlaksananya Pengembangan Kemitraan	1 dokumen	1 kegiatan	1 dokumen	1 kegiatan	_		_	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
11.5 PADA TAHUN 2030, SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI JUMLAH KEMATIAN DAN JUMLAH ORANG TERDAMPAK, DAN SECARA SUBSTANSIAL MENGURANGI KERUGIAN EKONOMI RELATIF TERHADAP PDB GLOBAL YANG DISEBABKAN OLEH BENCANA, DENGAN FOKUS MELINDUNGI ORANG MISKIN DAN ORANG-ORANG DALAM SITUASI RENTAN.										

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
11.5.1*.	**JUMLAH KORBAN MENINGGAL, HILANG DAN TERKENA DAMPAK BENCANA PER 100.000 ORANG.**									
Program Pengendalian Dan Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)										
Kegiatan 1	Operasional Pengendalian dan Operasi Kebencanaan	Jumlah kegiatan operasional posko pengendalian dan operasi	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	12 bulan		372271300	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kegiatan 2	Pemeliharaan Peralatan Radio dan Peralatan IT Kebencanaan	Jumlah peralatan yang dipelihara	_	3 unit	_	3 unit	_		_	
Program Pengurangan Resiko Bencana Alam										
Kegiatan 1	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana di Daerah Rawan Bencana	Jumlah sosialisasi pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana	2 KAB/KOTA	3 lokasi	2 KAB/KOTA	3 lokasi	_		_	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kegiatan 2	Penyuluhan dan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat	Jumlah Lokasi Kegiatan Penyuluhan dan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat	4 LOKASI	50 org	4 LOKASI	50 org	_		_	
Kegiatan 3	Pemasangan Rambu-rambu Pada Jalur Evakuasi	Jumlah rambu yang terpasang	_	30 unit	_	30 unit	25 unit		50000000	
Kegiatan 4	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana di Daerah Fasilitas Umum	Jumlah lokasi kegiatan sosialisasi pengurangan risiko bencana di daerah fasilitas umum	2 KAB/KOTA	_	2 KAB/KOTA	_	_		_	
Program Pendidikan Dan Pelatihan Relawan										
Kegiatan 1	Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta pelatihan relawan penanggulangan bencana	150 PESERTA	_	150 PESERTA	_	_		150 PESERTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kegiatan 2	Pelatihan Dasar Bagi Aparat Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta pelatihan dasar bagi aparat penanggulangan bencana	200 PESERTA	2 kegiatan	200 PESERTA	2 kegiatan	_		_	
Program Risiko Bencana Non Alam										
Kegiatan 1	Koortdinasi Penanggulangan Bahaya Zoonosis	Meningkatnya Indeks Kapasitas PB sebesar 1,75 % (Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan)	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	2 kegiatan		21595300	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program Kesiapsiagaan										
Kegiatan 1	Koordinasi Pelaksanaan Kesiapsiagaan	Jumlah kegiatan koordinasi	_	2 KALI	_	2 KALI	2 KEGIATAN		80991250	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program Mitigasi Bencana										
Kegiatan 1	Mitigasi Non Struktural Daerah Rawan Bencana	Jumlah daerah mitigasi non struktural	2 DAERAH	1 kegiatan	2 DAERAH	1 kegiatan	2 DAERAH		8481173	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program Penyelamatan Dan Evakuasi										
Kegiatan 1	Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah kejadian bencana yang melibatkan rescue	3 KEJADIAN	3 kegiatan	3 KEJADIAN	3 kegiatan	3 kejadian bencana		179075150	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kegiatan 2	Pelatihan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Pelatihan	50 PESERTA	3 kegiatan	50 PESERTA	3 kegiatan	_		_	
11.5.2.(A).	**JUMLAH KERUGIAN EKONOMI LANGSUNG AKIBAT BENCANA.**									
Program Pengendalian Dan Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)										
Kegiatan 1	Operasional Pengendalian dan Operasi Kebencanaan	Jumlah kegiatan operasional posko pengendalian dan operasi	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	12 bulan		372271300	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kegiatan 2	Pemeliharaan Peralatan Radio dan Peralatan IT Kebencanaan	Jumlah peralatan yang dipelihara	_	3 unit	_	3 unit	_		_	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Program Pengurangan Resiko Bencana Alam										
Kegiatan 1	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana di Daerah Rawan Bencana	Jumlah sosialisasi pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana	2 KAB/KOTA	3 lokasi	2 KAB/KOTA	3 lokasi	_		_	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kegiatan 2	Penyuluhan dan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat	Jumlah Lokasi Kegiatan Penyuluhan dan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat	4 LOKASI	50 org	4 LOKASI	50 org	_		_	
Kegiatan 3	Pemasangan Rambu-rambu Pada Jalur Evakuasi	Jumlah rambu yang terpasang	_	30 unit	_	30 unit	25 unit		50000000	
Kegiatan 4	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana di Daerah Fasilitas Umum	Jumlah lokasi kegiatan sosialisasi pengurangan risiko bencana di daerah fasilitas umum	2 KAB/KOTA	_	2 KAB/KOTA	_	_		_	
Program Risiko Bencana Non Alam										
Kegiatan 1	Koortdinasi Penanggulangan Bahaya Zoonosis	Meningkatnya Indeks Kapasitas PB sebesar 1,75 % (Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan)	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	2 kegiatan		21595300	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program Mitigasi Bencana										
Kegiatan 1	Mitigasi Non Struktural Daerah Rawan Bencana	Jumlah daerah mitigasi non struktural	2 DAERAH	1 kegiatan	2 DAERAH	1 kegiatan	2 DAERAH		8481173	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program Kerjasama Lembaga Masyarakat										
Kegiatan 1	Koordinasi Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	1 KEGIATAN	1 kegiatan	1 KEGIATAN	_		_	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program Penyiapan Peralatan dan Kebutuhan Dasar										
Kegiatan 1	Koordinasi Penyiapan Logistik dan Peralatan	Frekuensi Koordinasi Penyiapan Logistik dan Pelatihan	1 KEGIATAN	2 kegiatan	1 KEGIATAN	2 kegiatan	2 kegiatan		30800000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kegiatan 2	Penyiapan Logistik Kedaruratan	Frekuensi Kegiatan Penyiapan Logistik Kedaruratan	1 KEGIATAN	7 jenis	1 KEGIATAN	7 jenis	2 kegiatan		101052100	
Kegiatan 3	Penyiapan peralatan kedaruratan	Jumlah peralatan	1 KEGIATAN	_	1 KEGIATAN	_	_		_	
Program Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum										
Kegiatan 1	Inventarisasi Kerusakan Prasarana dan Sarana Umum Daerah Bencana	Jumlah daerah bencana yang akan diinventarisasi kerusakan prasarana dan sarana	_	5 unit	_	5 unit	1 lokasi		33129550	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kegiatan 2	Koordinasi Teknis Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum Daerah Bencana	Frekuensi kegiatan koordinasi	1 KEGIATAN	15 kali	1 KEGIATAN	15 kali	2 kegiatan		28700000	
Kegiatan 3	Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Daerah Bencana	Jumlah dokumen rencana teknis	_	1 dok	_	1 dok	_		_	
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum										
Kegiatan 1	Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum Daerah Bencana	Jumlah prasarana dan sarana yang terbangun	_	3 unit	_	3 unit	5 paket		1975078913	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11.6 PADA TAHUN 2030, MENGURANGI DAMPAK LINGKUNGAN PERKOTAAN PER KAPITA YANG MERUGIKAN, TERMASUK DENGAN MEMBERI PERHATIAN KHUSUS PADA KUALITAS UDARA, TERMASUK PENANGANAN SAMPAH KOTA.										
11.6.1.(A).	**PERSENTASE SAMPAH PERKOTAAN YANG TERTANGANI.**									
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan										
Kegiatan 1	Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Kelompok Pengolah Eceng Gondok	Terlaksananya pembinaan kelompok pengolah eceng gondok	_	5 Kelompok	_	5 Kelompok	-		997.000	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 2	Gerakan Peduli Sampah dalam rangka HPSN Tingkat Provinsi	Terlaksananya gerakan hari peduli sampah nasional di prov. Sulut	12 Bulan	1 kegiatan	12 Bulan	1 kegiatan	-		997.000	
Kegiatan 3	Binwas Pengelolaan Sampah Prov. Sulut	Terlaksananya jumlah sampah yang dikelola	1 KEGIATAN	1 kegiatan	1 KEGIATAN	1 kegiatan	1 kegiatan		1.298.600	
Kegiatan 4	Bersih-bersih Sampah Sungai dan Pesisir	Terwujudnya peningkatan dan kepedulian pengelolaan sampah di prov. Sulut	3 sungai dan pesisir	4 kegiatan	3 sungai dan pesisir	4 kegiatan	0		-	
Kegiatan 5	Pemantauan Pengelolaan Sampah di TPA Prov. Sulut	Terlaksananya pemantauan sampah di TPA pada 15 kabupaten/kota	15 TPA	0,15	15 TPA	0,15	0,15		19.419.800	
Kegiatan 6	Kegiatan pembinaan kabupaten/kota peserta dan calon peserta adipura	Indikator terlaksananya pembinaan kabupaten/kota peserta dan calon peserta adipura	–	10 kab/kota	–	10 kab/kota	0		-	
Kegiatan 7	Pengelolaan Eceng Gondok	Terlaksananya pembinaan kelompok pengolahan eceng gondok	3 kelompok	–	3 kelompok	–	–		–	
Kegiatan 8	Gerakan Hari Peduli Sampah Nasional	Terlaksananya HPSN di Prov. Sulut	1 kegiatan	–	1 kegiatan	–	–		–	
Kegiatan 9	Pembinaan dan Penilaian Kota Sehat/Adipura	Terlaksananya pembinaan dan pemantauan kota sehat/adipura	9 Kab/Kota dan Pusat	–	9 Kab/Kota dan Pusat	–	–		–	
11.6.1.(B).	**JUMLAH KOTA HIJAU YANG MENGEMBANGKAN DAN MENERAPKAN GREEN WASTE DI KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN.**									
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup										
Kegiatan 1	Pengelolaan LB3	Terlaksananya pengelolaan LB3 terhadap pemegang izin pengelola LB3	–	1 kab/kota	–	1 kab/kota	1 kegiatan		2.148.400	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Kegiatan 2	Pemantauan Air Sungai	Terlaksananya pemantauan air sungai sesuai dengan kriteria baku mutu air	12 Bulan	4%	12 Bulan	4%	4 sungai		2.572.800	
Kegiatan 3	Pemantauan Air Danau	Terlaksananya pemantauan air danau sesuai dengan kriteria baku mutu air	12 Bulan	4%	12 Bulan	4%	4 danau		3.068.000	
Kegiatan 4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Terlaksananya pemantauan kualitas udara sesuai dengan kriteria passive sampler baku mutu udara	12 Bulan	3%	12 Bulan	3%	_		-	
Kegiatan 5	Evaluasi Kinerja Penyusunan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL	Terlaksananya evaluasi kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksaan UKLUPL dan SPPL di kab/kota	12 Bulan	15 dok	12 Bulan	15 dok	_		-	
Kegiatan 6	Penyusunan KLHS	Tersusunnya kajian lingkungan hidup strategis untuk pembangunan yang berkelanjutan	1 Dokumen	1 dok	**1 Dokumen**	**1 dok**	_		-	
Kegiatan 7	Pemantauan RKL-RPL dan UKL-UPL di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan RKL-RPL dan UKL-IPL di kab/kota	25 Dokumen	15 dok	25 Dokumen	15 dok	_		-	
Kegiatan 8	Pembinaan Monitoring Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan monitoring pengendalian dan pencemaran lingkungan di kab/kota	–	15 kegiatan	–	15 kegiatan	15 kab/kota		19.335.100	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 9	Pembinaan dan Pengawasan Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 kegiatan pengumpulan dan pengangkut LB3	Tersedianya laporan hasil pengawasan terhadap pemegang izin pengelola LB3	_	4 laporan	_	4 laporan	2 Laporan		200.000	
Kegiatan 10	Pemantauan dan Pendataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Kegiatan Lainnya yang Menghasilkan Limbah B3	Tersedianya laporan dan data hasil pemantauan fasilitas pelayanan kesehatan yang menghasilkan LB3	_	5 laporan	_	5 laporan	2 Laporan		900.000	
Kegiatan 11	Pemantauan Kualitas Air Laut	Terlaksananya pemantauan kualitas	_	1%	_	1%	_		-	
Kegiatan 12	Pemantauan Kualitas Air Tanah	Terlaksananya pemantauan kualitas air tanah sesuai dengan kriteria baku mutu air	_	10%	_	10%	_		-	
Kegiatan 13	Pembinaan penyusunan AMDAL	Terlaksananya pembinaan penyusunan AMDAL antar kabupaten	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		-	
Kegiatan 14	Pemantauan penyelenggaraan KLHS di Tingkat Provinsi danKabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan peneyelenggaraan KLHS di Kab/kota	_	15%	_	15%	_		-	
Kegiatan 15	Pendataan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang	Tersedianya laporan data kerusakan ekosistem terumbu karang di kab/kota	_	10 laporan	_	10 laporan	2 Laporan		906.750	
Kegiatan 16	Penanaman Mangrove	Terpenuhinya tutupan vegetasi mangrove	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		-	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup										
Kegiatan 1	Penilaian Sekolah Adiwiyata	Tersedianya laporan penilaian sekolah adiwiyata	15 Sekolah	15 laporan	15 Sekolah	15 laporan	_		10878400	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Kegiatan 2	Kegiatan pengembangan kelompok masyarakat/perorangan yang peduli terhadap lingkungan hidup	Terlaksananya Pengembangan Kelompok masyarakat/perorangan yang peduli lingkungan hidup	_	15 kab/kota	_	15 kab/kota	_		_	
Kegiatan 3	Penilian Kalpataru	Terdapatnya Individu/kelompok peduli lingkungan hidup	4 Kab/Kota	_	4 Kab/Kota	_	_		_	
11.7 PADA TAHUN 2030, MENYEDIAKAN RUANG PUBLIK DAN RUANG TERBUKA HIJAU YANG AMAN, INKLUSIF DAN MUDAH DIJANGKAU TERUTAMA UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK, MANULA DAN PENYANDANG DIFABILITAS.										
11.7.1.(A).	**JUMLAH KOTA HIJAU YANG MENYEDIAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN DAN KOTA SEDANG.**									
Program Penghargaan Lingkungan Hidup										
Kegiatan 1	Penilaian Sekolah Adiwiyata	Tersedianya laporan penilaian sekolah adiwiyata	15 Sekolah	15 laporan	15 Sekolah	15 laporan	_		10878400	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Kegiatan 2	Kegiatan pengembangan kelompok masyarakat/perorangan yang peduli terhadap lingkungan hidup	Terlaksananya Pengembangan Kelompok masyarakat/perorangan yang peduli lingkungan hidup	_	15 kab/kota	_	15 kab/kota	_		_	
Kegiatan 3	Penilian Kalpataru	Terdapatnya Individu/kelompok peduli lingkungan hidup	4 Kab/Kota	_	4 Kab/Kota	_	_		_	
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup										
Kegiatan 1	Pengelolaan LB3	Terlaksananya pengelolaan LB3 terhadap pemegang izin pengelola LB3	_	1 kab/kota	_	1 kab/kota	1 kegiatan		2.148.400	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Kegiatan 2	Pemantauan Air Sungai	Terlaksananya pemantauan air sungai	12 Bulan	4%	12 Bulan	4%	4 sungai		2.572.800	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
		sesuai dengan kriteria baku mutu air								
Kegiatan 3	Pemantauan Air Danau	Terlaksananya pemantauan air danau sesuai dengan kriteria baku mutu air	12 Bulan	4%	12 Bulan	4%	4 danau		3.068.000	
Kegiatan 4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Terlaksananya pemantauan kualitas udara sesuai dengan kriteria passive sampler baku mutu udara	12 Bulan	3%	12 Bulan	3%	_		-	
Kegiatan 5	Evaluasi Kinerja Penyusunan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL	Terlaksananya evaluasi kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksaan UKLUPL dan SPPL di kab/kota	12 Bulan	15 dok	12 Bulan	15 dok	_		-	
Kegiatan 6	Penyusunan KLHS	Tersusunnya kajian lingkungan hidup strategis untuk pembangunan yang berkelanjutan	1 Dokumen	1 dok	**1 Dokumen**	**1 dok**	_		**101.362.000**	
Kegiatan 7	Pemantauan RKL-RPL dan UKL-UPL di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan RKL-RPL dan UKL-IPL di kab/kota	25 Dokumen	15 dok	25 Dokumen	15 dok	_		-	
Kegiatan 8	Pembinaan Monitoring Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan monitoring pengendalian dan pencemaran lingkungan di kab/kota	–	15 kegiatan	–	15 kegiatan	15 kab/kota		19.335.100	
Kegiatan 9	Pembinaan dan Pengawasan Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 kegiatan pengumpulan dan pengangkut LB3	Tersedianya laporan hasil pengawasan terhadap pemegang izin pengelola LB3	_	4 laporan	_	4 laporan	2 Laporan		200.000	
Kegiatan 10	Pemantauan dan Pendataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Kegiatan Lainnya yang Menghasilkan Limbah B3	Tersedianya laporan dan data hasil pemantauan fasilitas pelayanan kesehatan yang menghasilkan LB3	_	5 laporan	_	5 laporan	2 Laporan		900.000	
Kegiatan 11	Pemantauan Kualitas Air Laut	Terlaksananya pemantauan kualitas	_	1%	_	1%	_		-	
Kegiatan 12	Pemantauan Kualitas Air Tanah	Terlaksananya pemantauan kualitas air tanah sesuai dengan kriteria baku mutu air	_	10%	_	10%	_		-	
Kegiatan 13	Pembinaan penyusunan AMDAL	Terlaksananya pembinaan penyusunan AMDAL antar kabupaten	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		-	
Kegiatan 14	Pemantauan penyelenggaraan KLHS di Tingkat Provinsi danKabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan peneyelenggaraan KLHS di Kab/kota	_	15%	_	15%	_		-	
Kegiatan 15	Pendataan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang	Tersedianya laporan data kerusakan ekosistem terumbu karang di kab/kota	_	10 laporan	_	10 laporan	2 Laporan		906.750	
Kegiatan 16	Penanaman Mangrove	Terpenuhinya tutupan vegetasi mangrove	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		-	
11.7.2.(A).	**PROPORSI KORBAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR YANG MELAPORKAN KEPADA POLISI.**			**4,43%**						
11.B PADA TAHUN 2020, MENINGKATKAN SECARA SUBSTANSIAL JUMLAH KOTA DAN PERMUKIMAN YANG MENGADOPSI DAN MENGIMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN YANG TERINTEGRASI TENTANG PENYERTAAN, EFISIENSI SUMBER DAYA, MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM, KETAHANAN TERHADAP BENCANA, SERTA MENGEMBANGKAN DAN MENGIMPLEMENTASIKAN PENANGANAN HOLISTIK RISIKO BENCANA DI SEMUA LINI, SESUA DENGAN THE SENDAI FRAMEWORK FOR DISASTER RISK REDUCTION 2015-2030.										
11.B.1*	**PROPORSI PEMERINTAH KOTA YANG MEMILIKI DOKUMEN STRATEGI PENGURANGAN RISIKO BENCANA.**									

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Program Pengurangan Resiko Bencana Alam										
Kegiatan 1	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana di Daerah Rawan Bencana	Jumlah sosialisasi pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana	2 KAB/KOTA	3 lokasi	2 KAB/KOTA	3 lokasi	_		_	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kegiatan 2	Penyuluhan dan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat	Jumlah Lokasi Kegiatan Penyuluhan dan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat	4 LOKASI	50 org	4 LOKASI	50 org	_		_	
Kegiatan 3	Pemasangan Rambu-rambu Pada Jalur Evakuasi	Jumlah rambu yang terpasang	_	30 unit	_	30 unit	25 unit		50000000	
Kegiatan 4	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana di Daerah Fasilitas Umum	Jumlah lokasi kegiatan sosialisasi pengurangan risiko bencana di daerah fasilitas umum	2 KAB/KOTA	_	2 KAB/KOTA	_	_		_	
11.B.2*	**DOKUMEN STRATEGI PENGURANGAN RISIKO BENCANA (PRB) TINGKAT DAERAH.**									
Program Pengurangan Resiko Bencana Alam										
Kegiatan 1	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana di Daerah Rawan Bencana	Jumlah sosialisasi pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana	2 KAB/KOTA	3 lokasi	2 KAB/KOTA	3 lokasi	_		_	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kegiatan 2	Penyuluhan dan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat	Jumlah Lokasi Kegiatan Penyuluhan dan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat	4 LOKASI	50 org	4 LOKASI	50 org	_		_	
Kegiatan 3	Pemasangan Rambu-rambu Pada Jalur Evakuasi	Jumlah rambu yang terpasang	_	30 unit	_	30 unit	25 unit		50000000	
Kegiatan 4	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana di Daerah Fasilitas Umum	Jumlah lokasi kegiatan sosialisasi pengurangan risiko bencana di daerah fasilitas umum	2 KAB/KOTA	_	2 KAB/KOTA	_	_		_	
TUJUAN 12 POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN										
12.1 MELAKSANAKAN THE 10-YEAR FRAMEWORK OF PROGRAMMES ON SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION PATTERNS, DENGAN SEMUA NEGARA MENGAMBIL TINDAKAN, DIPIMPIN NEGARA MAJU, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PEMBANGUNAN DAN KAPASITAS NEGARA BERKEMBANG.										
12.1.1*	**JUMLAH KOLABORASI TEMATIK QUICKWINS PROGRAM.**									
12.4 PADA TAHUN 2020 MENCAPAI PENGELOLAAN BAHAN KIMIA DAN SEMUA JENIS LIMBAH YANG RAMAH LINGKUNGAN, DI SEPANJANG SIKLUS HIDUPNYA, SESUAI KERANGKA KERJA INTERNASIONAL YANG DISEPAKATI DAN SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI PENCEMARAN BAHAN KIMIA DAN LIMBAH TERSEBUT KE UDARA, AIR, DAN TANAH UNTUK MEMINIMALKAN DAMPAK BURUK TERHADAP KESEHATAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN.										
12.4.1.(A)	**JUMLAH PESERTA PROPER YANG MENCAPAI MINIMAL RANKING BIRU.**									
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup										
Kegiatan 1	Pengelolaan LB3	Terlaksananya pengelolaan LB3 terhadap pemegang izin pengelola LB3	_	1 kab/kota	_	1 kab/kota	1 kegiatan		2.148.400	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Kegiatan 2	Pemantauan Air Sungai	Terlaksananya pemantauan air sungai sesuai dengan kriteria baku mutu air	12 Bulan	4%	12 Bulan	4%	4 sungai		2.572.800	
Kegiatan 3	Pemantauan Air Danau	Terlaksananya pemantauan air danau sesuai dengan kriteria baku mutu air	12 Bulan	4%	12 Bulan	4%	4 danau		3.068.000	
Kegiatan 4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Terlaksananya pemantauan kualitas udara sesuai dengan kriteria passive sampler baku mutu udara	12 Bulan	3%	12 Bulan	3%	_		-	
Kegiatan 5	Evaluasi Kinerja Penyusunan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL	Terlaksananya evaluasi kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksaan UKLUPL dan SPPL di kab/kota	12 Bulan	15 dok	12 Bulan	15 dok	_		-	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 6	Penyusunan KLHS	Tersusunnya kajian lingkungan hidup strategis untuk pembangunan yang berkelanjutan	1 Dokumen	1 dok	**1 Dokumen**	**1 dok**	_		**101.362.000**	
Kegiatan 7	Pemantauan RKL-RPL dan UKL-UPL di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan RKL-RPL dan UKL-IPL di kab/kota	25 Dokumen	15 dok	25 Dokumen	15 dok	_		-	
Kegiatan 8	Pembinaan Monitoring Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan monitoring pengendalian dan pencemaran lingkungan di kab/kota	_	15 kegiatan	_	15 kegiatan	15 kab/kota		19.335.100	
Kegiatan 9	Pembinaan dan Pengawasan Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 kegiatan pengumpulan dan pengangkut LB3	Tersedianya laporan hasil pengawasan terhadap pemegang izin pengelola LB3	_	4 laporan	_	4 laporan	2 Laporan		200.000	
Kegiatan 10	Pemantauan dan Pendataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Kegiatan Lainnya yang Menghasilkan Limbah B3	Tersedianya laporan dan data hasil pemantauan fasilitas pelayanan kesehatan yang menghasilkan LB3	_	5 laporan	_	5 laporan	2 Laporan		900.000	
Kegiatan 11	Pemantauan Kualitas Air Laut	Terlaksananya pemantauan kualitas	_	1%	_	1%	_		-	
Kegiatan 12	Pemantauan Kualitas Air Tanah	Terlaksananya pemantauan kualitas air tanah sesuai dengan kriteria baku mutu air	_	10%	_	10%	_		-	
Kegiatan 13	Pembinaan penyusunan AMDAL	Terlaksananya pembinaan penyusunan AMDAL antar kabupaten	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		-	
Kegiatan 14	Pemantauan penyelenggaraan KLHS di Tingkat Provinsi danKabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan peneyelenggaraan KLHS di Kab/kota	_	15%	_	15%	_		-	
Kegiatan 15	Pendataan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang	Tersedianya laporan data kerusakan ekosistem terumbu karang di kab/kota	_	10 laporan	_	10 laporan	2 Laporan		906.750	
Kegiatan 16	Penanaman Mangrove	Terpenuhinya tutupan vegetasi mangrove	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		-	
12.4.2.(A)	**JUMLAH LIMBAH B3 YANG TERKELOLA DAN PROPORSI LIMBAH B3 YANG DIOLAH SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN (SEKTOR INDUSTRI).**									
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup										
Kegiatan 1	Pengelolaan LB3	Terlaksananya pengelolaan LB3 terhadap pemegang izin pengelola LB3	_	1 kab/kota	_	1 kab/kota	1 kegiatan		2.148.400	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Kegiatan 2	Pemantauan Air Sungai	Terlaksananya pemantauan air sungai sesuai dengan kriteria baku mutu air	12 Bulan	4%	12 Bulan	4%	4 sungai		2.572.800	
Kegiatan 3	Pemantauan Air Danau	Terlaksananya pemantauan air danau sesuai dengan kriteria baku mutu air	12 Bulan	4%	12 Bulan	4%	4 danau		3.068.000	
Kegiatan 4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Terlaksananya pemantauan kualitas udara sesuai dengan kriteria passive sampler baku mutu udara	12 Bulan	3%	12 Bulan	3%	_		-	
Kegiatan 5	Evaluasi Kinerja Penyusunan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL	Terlaksananya evaluasi kinerja komisi penilai AMDAL dan	12 Bulan	15 dok	12 Bulan	15 dok	_		-	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
		pemeriksaan UKLUPL dan SPPL di kab/kota								
Kegiatan 6	Penyusunan KLHS	Tersusunnya kajian lingkungan hidup strategis untuk pembangunan yang berkelanjutan	1 Dokumen	1 dok	**1 Dokumen**	**1 dok**	_		**101.362.000**	
Kegiatan 7	Pemantauan RKL-RPL dan UKL-UPL di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan RKL-RPL dan UKL-IPL di kab/kota	25 Dokumen	15 dok	25 Dokumen	15 dok	_		-	
Kegiatan 8	Pembinaan Monitoring Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan monitoring pengendalian dan pencemaran lingkungan di kab/kota	_	15 kegiatan	_	15 kegiatan	15 kab/kota		19.335.100	
Kegiatan 9	Pembinaan dan Pengawasan Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 kegiatan pengumpulan dan pengangkut LB3	Tersedianya laporan hasil pengawasan terhadap pemegang izin pengelola LB3	_	4 laporan	_	4 laporan	2 Laporan		200.000	
Kegiatan 10	Pemantauan dan Pendataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Kegiatan Lainnya yang Menghasilkan Limbah B3	Tersedianya laporan dan data hasil pemantauan fasilitas pelayanan kesehatan yang menghasilkan LB3	_	5 laporan	_	5 laporan	2 Laporan		900.000	
Kegiatan 11	Pemantauan Kualitas Air Laut	Terlaksananya pemantauan kualitas	_	1%	_	1%	_		-	
Kegiatan 12	Pemantauan Kualitas Air Tanah	Terlaksananya pemantauan kualitas air tanah sesuai dengan kriteria baku mutu air	_	10%	_	10%	_		-	
Kegiatan 13	Pembinaan penyusunan AMDAL	Terlaksananya pembinaan penyusunan AMDAL antar kabupaten	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		-	
Kegiatan 14	Pemantauan penyelenggaraan KLHS di Tingkat Provinsi danKabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan peneyelenggaraan KLHS di Kab/kota	_	15%	_	15%	_		-	
Kegiatan 15	Pendataan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang	Tersedianya laporan data kerusakan ekosistem terumbu karang di kab/kota	_	10 laporan	_	10 laporan	2 Laporan		906.750	
Kegiatan 16	Penanaman Mangrove	Terpenuhinya tutupan vegetasi mangrove	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		-	
12.5 PADA TAHUN 2030, SECARA SUBSTANSIAL MENGURANGI PRODUKSI LIMBAH MELALUI PENCEGAHAN, PENGURANGAN, DAUR ULANG, DAN PENGGUNAAN KEMBALI.										
12.5.1.(A)	**JUMLAH TIMBULAN SAMPAH YANG DIDAUR ULANG.**									
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup										
Kegiatan 1	Pengelolaan LB3	Terlaksananya pengelolaan LB3 terhadap pemegang izin pengelola LB3	_	1 kab/kota	_	1 kab/kota	1 kegiatan		2.148.400	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Kegiatan 2	Pemantauan Air Sungai	Terlaksananya pemantauan air sungai sesuai dengan kriteria baku mutu air	12 Bulan	4%	12 Bulan	4%	4 sungai		2.572.800	
Kegiatan 3	Pemantauan Air Danau	Terlaksananya pemantauan air danau sesuai dengan kriteria baku mutu air	12 Bulan	4%	12 Bulan	4%	4 danau		3.068.000	
Kegiatan 4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Terlaksananya pemantauan kualitas udara sesuai dengan kriteria	12 Bulan	3%	12 Bulan	3%	_		-	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
		passive sampler baku mutu udara								
Kegiatan 5	Evaluasi Kinerja Penyusunan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL	Terlaksananya evaluasi kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksaan UKLUPL dan SPPL di kab/kota	12 Bulan	15 dok	12 Bulan	15 dok	_		-	
Kegiatan 6	Penyusunan KLHS	Tersusunnya kajian lingkungan hidup strategis untuk pembangunan yang berkelanjutan	1 Dokumen	1 dok	**1 Dokumen**	**1 dok**	_		**101.362.000**	
Kegiatan 7	Pemantauan RKL-RPL dan UKL-UPL di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan RKL-RPL dan UKL-IPL di kab/kota	25 Dokumen	15 dok	25 Dokumen	15 dok	_		-	
Kegiatan 8	Pembinaan Monitoring Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan monitoring pengendalian dan pencemaran lingkungan di kab/kota	–	15 kegiatan	–	15 kegiatan	15 kab/kota		19.335.100	
Kegiatan 9	Pembinaan dan Pengawasan Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 kegiatan pengumpulan dan pengangkut LB3	Tersedianya laporan hasil pengawasan terhadap pemegang izin pengelola LB3	–	4 laporan	–	4 laporan	2 Laporan		200.000	
Kegiatan 10	Pemantauan dan Pendataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Kegiatan Lainnya yang Menghasilkan Limbah B3	Tersedianya laporan dan data hasil pemantauan fasilitas pelayanan kesehatan yang menghasilkan LB3	–	5 laporan	–	5 laporan	2 Laporan		900.000	
Kegiatan 11	Pemantauan Kualitas Air Laut	Terlaksananya pemantauan kualitas	–	1%	–	1%	–		-	
Kegiatan 12	Pemantauan Kualitas Air Tanah	Terlaksananya pemantauan kualitas air tanah sesuai dengan kriteria baku mutu air	–	10%	–	10%	–		-	
Kegiatan 13	Pembinaan penyusunan AMDAL	Terlaksananya pembinaan penyusunan AMDAL antar kabupaten	–	1 kegiatan	–	1 kegiatan	–		-	
Kegiatan 14	Pemantauan penyelenggaraan KLHS di Tingkat Provinsi danKabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan peneyelenggaraan KLHS di Kab/kota	–	15%	–	15%	–		-	
Kegiatan 15	Pendataan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang	Tersedianya laporan data kerusakan ekosistem terumbu karang di kab/kota	–	10 laporan	–	10 laporan	2 Laporan		906.750	
Kegiatan 16	Penanaman Mangrove	Terpenuhinya tutupan vegetasi mangrove	–	1 kegiatan	–	1 kegiatan	–		-	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan										
Kegiatan 1	Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Kelompok Pengolah Eceng Gondok	Terlaksananya pembinaan kelompok pengolah eceng gondok	–	5 Kelompok	–	5 Kelompok	-		997.000	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Kegiatan 2	Gerakan Peduli Sampah dalam rangka HPSN Tingkat Provinsi	Terlaksananya gerakan hari peduli sampah nasional di prov. Sulut	12 Bulan	1 kegiatan	12 Bulan	1 kegiatan	-		997.000	
Kegiatan 3	Binwas Pengelolaan Sampah Prov. Sulut	Terlaksananya jumlah sampah yang dikelola	1 KEGIATAN	1 kegiatan	1 KEGIATAN	1 kegiatan	1 kegiatan		1.298.600	
Kegiatan 4	Bersih-bersih Sampah Sungai dan Pesisir	Terwujudnya peningkatan dan kepedulian pengelolaan sampah di prov. Sulut	3 sungai dan pesisir	4 kegiatan	3 sungai dan pesisir	4 kegiatan	0		-	
Kegiatan 5	Pemantauan Pengelolaan Sampah di TPA Prov. Sulut	Terlaksananya pemantauan sampah di TPA pada 15 kabupaten/kota	15 TPA	0,15	15 TPA	0,15	0,15		19.419.800	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 6	Kegiatan pembinaan kabupaten/kota peserta dan calon peserta adipura	Indikator terlaksananya pembinaan kabupaten/kota peserta dan calon peserta adipura	_	10 kab/kota	_	10 kab/kota	0		-	
Kegiatan 7	Pengelolaan Eceng Gondok	Terlaksananya pembinaan kelompok pengolahan eceng gondok	3 kelompok	_	3 kelompok	_	_		_	
Kegiatan 8	Gerakan Hari Peduli Sampah Nasional	Terlaksananya HPSN di Prov. Sulut	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_	_		_	
Kegiatan 9	Pembinaan dan Penilaian Kota Sehat/Adipura	Terlaksananya pembinaan dan pemantauan kota sehat/adipura	9 Kab/Kota dan Pusat	_	9 Kab/Kota dan Pusat	_	_		_	
12.6 MENDORONG PERUSAHAAN, TERUTAMA PERUSAHAAN BESAR DAN TRANSNASIONAL, UNTUK MENGADOPSI PRAKTEK-PRAKTEK BERKELANJUTAN DAN MENGINTEGRASIKAN INFORMASI KEBERLANJUTAN DALAM SIKLUS PELAPORAN MEREKA.										
12.6.1.(A)	**JUMLAH PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN SERTIFIKASI SNI ISO 14001**									
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja										
Kegiatan 1	Penyusunan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyusunan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)	Survey KHL dan Penetapan UMP melalui Peraturan Gubernur	1 Pergub	1 kegiatan	1 Pergub	1 kegiatan	_		_	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
Kegiatan 2	Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	63 %	0,68	63 %	0,68	_		_	
Kegiatan 3	Peningkatan Kapasitas Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Jumlah Sarana Hubungan Industrial yang ditingkatkan	400 orang	1000 unit	400 orang	1000 unit	_		_	
Kegiatan 4	Penyelesaian kasus hubungan industrial	1) perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah; 2) Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun; 3) ; Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB).	75 %	1) 35 % 2) 17.51 %; 3) ; 80 %.	75 %	1) 35 % 2) 17.51 %; 3) ; 80 %.	_		_	
12.7 MEMPROMOSIKAN PRAKTEK PENGADAAN PUBLIK YANG BERKELANJUTAN,SESUAI DENGAN KEBIJAKAN DAN PRIORITAS NASIONAL.										
12.7.1.(A)	**JUMLAH PRODUK RAMAH LINGKUNGAN YANG TEREGISTER.**									
12.8 PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA MASYARAKAT DI MANA PUN MEMILIKI INFORMASI YANG RELEVAN DAN KESADARAN TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN GAYA HIDUP YANG SELARAS DENGAN ALAM.										
12.8.1.(A)	**JUMLAH FASILITAS PUBLIK YANG MENERAPKAN STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT (SPM) DAN TEREGISTER.**									
TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DAN PENANGGULANGAN KEBENCANAAN										
13.1 MEMPERKUAT KAPASITAS KETAHANAN DAN ADAPTASI TERHADAP BAHAYA TERKAIT IKLIM DAN BENCANA ALAM DI SEMUA NEGARA										
13.1.1*	**DOKUMEN STRATEGI PENGURANGAN RISIKO BENCANA (PRB) TINGKAT NASIONAL DAN DAERAH.**									
13.1.2*	**JUMLAH KORBAN MENINGGAL, HILANG DAN TERKENA DAMPAK BENCANA PER 100.000 ORANG.**									
Program Pengurangan Resiko Bencana Alam										
Kegiatan 1	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana di Daerah Rawan Bencana	Jumlah sosialisasi pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana	2 KAB/KOTA	3 lokasi	2 KAB/KOTA	3 lokasi	_		_	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kegiatan 2	Penyuluhan dan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat	Jumlah Lokasi Kegiatan Penyuluhan dan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat	4 LOKASI	50 org	4 LOKASI	50 org	_		_	
Kegiatan 3	Pemasangan Rambu-rambu Pada Jalur Evakuasi	Jumlah rambu yang terpasang	_	30 unit	_	30 unit	25 unit		50000000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 4	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana di Daerah Fasilitas Umum	Jumlah lokasi kegiatan sosialisasi pengurangan risiko bencana di daerah fasilitas umum	2 KAB/KOTA	_	2 KAB/KOTA	_	_		_	
Program Kesiapsiagaan										
Kegiatan 1	Koordinasi Pelaksanaan Kesiapsiagaan	Jumlah kegiatan koordinasi	_	2 KALI	_	2 KALI	2 KEGIATAN		80991250	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program Sistem Peringatan Dini										
Kegiatan 1	Peningkatan Sistim Peringatan Dini	Frekuensi kegiatan peningkatan sistem peringatan dini	1 KEGIATAN	1 kegiatan	1 KEGIATAN	1 kegiatan	1 kegiatan		38413100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kegiatan 2	Koordinasi Sistim Peringatan Dini	Frekuensi kegiatan koordinasi sistim peringatan dini	1 KEGIATAN	1 kegiatan	1 KEGIATAN	1 kegiatan	1 kegiatan		29646900	
Program Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana										
Kegiatan 1	Pelatihan Tim Relawan Dalam PB	Jumlah relawan penanggulangan bencana yang mengikuti pelatihan	150 PESERTA	1 org	150 PESERTA	1 org	_		_	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kegiatan 2	Pelatihan Warga Masyarakat Dalam PB	Jumlah Warga Masyarakat yang mengikuti pelatihan	200 PESERTA	30 org	200 PESERTA	30 org	_		_	
Program Penyelamatan Dan Evakuasi										
Kegiatan 1	Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah kejadian bencana yang melibatkan rescue	3 KEJADIAN	3 kegiatan	3 KEJADIAN	3 kegiatan	3 kejadian bencana		179075150	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kegiatan 2	Pelatihan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Pelatihan	50 PESERTA	3 kegiatan	50 PESERTA	3 kegiatan	_		_	
TUJUAN 14 PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN EKOSISTEM LAUTAN										
14.2 PADA TAHUN 2020, MENGELOLA DAN MELINDUNGI EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR SECARA BERKELANJUTAN UNTUK MENGHINDARI DAMPAK BURUK YANG SIGNIFIKAN, TERMASUK DENGAN MEMPERKUAT KETAHANANNYA, DAN MELAKUKAN RESTORASI UNTUK MEWUJUDKAN LAUTAN YANG SEHAT DAN PRODUKTIF.										
14.2.1.(A)	**TERSEDIANYA KERANGKA KEBIJAKAN, DAN INSTRUMEN TERKAIT PENATAAN RUANG LAUT NASIONAL.**									
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir										
Kegiatan 1	Pemberdayaan perempuan pesisir	Jumlah perempuan pesisir yang dibina dan di latih	4 Kelompok	_	4 Kelompok	_	_		_	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Kegiatan 2	Rehabilitasi dan restorasi terumbu karang	Terlaksananya restorasi terumbu karang	1 Paket	_	1 Paket	_	_		_	
Kegiatan 3	Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan dan di daerah kepulauan	Tersedia dan Terbinanya masyarakat pesisir dan nelayan di daerah kepulauan yang miskin	26 unit	600 pkt	26 unit	600 pkt	4 kabupaten/kota		1267025700	
Program Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir										
Kegiatan 1	Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan	Jumlah kawasan konservasi yang difasilitasi	2 Lokasi	4 lokasi	2 Lokasi	4 lokasi	4 lokasi		660729126	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Kegiatan 2	Penyusunan RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara	Tersedianya perda zonasi RZWP3K dan kajian perda	1 Paket	1 dok	1 Paket	1 dok	1 OT		259941000	
Kegiatan 3	Bersih-Bersih Pantai	Terselenggaranya bersih pantai	2 Lokasi	3 kegiatan	2 Lokasi	3 kegiatan	_		_	
Kegiatan 4	Pengembangan Pulau-pulau kecil dan terluar	Terlaksananya pengembangan PPK dan pulau terluar	2 Lokasi	2 lokasi	2 Lokasi	2 lokasi	_		_	
Kegiatan 5	Rehabilitasi wilayah pesisir dan lingkungan laut	Terselenggaranya Restorasi/rehabilitasi karang dan penanaman mangrove	2 Lokasi	_	2 Lokasi	_	_		_	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan Bidang Kelautan dan Perikanan										
Kegiatan 1	Temu Koordinasi Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya forum koordinasi dengan kabupaten/kota	150 orang	150 org	150 orang	150 org	9 OH		4128000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
14.2.1.(B)	**TERKELOLANYA 11 WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN (WPP) SECARA BERKELANJUTAN.**									
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir										
Kegiatan 1	Pemberdayaan perempuan pesisir	Jumlah perempuan pesisir yang dibina dan di latih	4 Kelompok	_	4 Kelompok	_	_		_	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Kegiatan 2	Rehabilitasi dan restorasi terumbu karang	Terlaksananya restorasi terumbu karang	1 Paket	_	1 Paket	_	_		_	
Kegiatan 3	Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan dan di daerah kepulauan	Tersedia dan Terbinanya masyarakat pesisir dan nelayan di daerah kepulauan yang miskin	26 unit	600 pkt	26 unit	600 pkt	4 kabupaten/kota		1267025700	
Program Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir										
Kegiatan 1	Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan	Jumlah kawasan konservasi yang difasilitasi	2 Lokasi	4 lokasi	2 Lokasi	4 lokasi	4 lokasi		660729126	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Kegiatan 2	Penyusunan RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara	Tersedianya perda zonasi RZWP3K dan kajian perda	1 Paket	1 dok	1 Paket	1 dok	1 OT		259941000	
Kegiatan 3	Bersih-Bersih Pantai	Terselenggaranya bersih pantai	2 Lokasi	3 kegiatan	2 Lokasi	3 kegiatan	_		_	
Kegiatan 4	Pengembangan Pulau-pulau kecil dan terluar	Terlaksananya pengembangan PPK dan pulau terluar	2 Lokasi	2 lokasi	2 Lokasi	2 lokasi	_		_	
Kegiatan 5	Rehabilitasi wilayah pesisir dan lingkungan laut	Terselenggaranya Restorasi/rehabilitasi karang dan penanaman mangrove	2 Lokasi	_	2 Lokasi	_	_		389500000	
Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan										
Kegiatan 1	Kerjasama operasi pengawasan terpadu di laut	Terlaksananya kerjasama operasi pengawasan	1 TA	4 kegiatan	1 TA	4 kegiatan	_		_	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Kegiatan 2	Peningkatan peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya laut	Jumlah POKMASWAS yang dibina	–	2 Kelompok	–	2 Kelompok	–		–	
Kegiatan 3	Pengawasan bahan aditif pada ikan dan produk perikanan	Monitoring bahan aditif	_	2 kegiatan	_	2 kegiatan	_		_	
Kegiatan 4	Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan	Terfasilitasinya Kapal Pengawas	_	1 pkt	_	1 pkt	_		_	
14.4 PADA TAHUN 2020, SECARA EFEKTIF MENGATUR PEMANENAN DAN MENGHENTIKAN PENANGKAPAN IKAN YANG BERLEBIHAN, PENANGKAPAN IKAN ILEGAL DAN PRAKTEK PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK, SERTA MELAKSANAKAN RENCANA PENGELOLAAN BERBASIS ILMU PENGETAHUAN, UNTUK MEMULIHKAN PERSEDIAAN IKAN SECARA LAYAK DALAM WAKTU YANG PALING SINGKAT YANG MEMUNGKINKAN, SETIDAKNYA KE TINGKAT YANG DAPAT MEMPRODUKSI HASIL MAKSIMUM YANG BERKELANJUTAN SESUAI KARAKTERISTIK BIOLOGISNYA.										
14.4.1*	**PROPORSI TANGKAPAN JENIS IKAN YANG BERADA DALAM BATASAN BIOLOGIS YANG AMAN.**									
Program pengembangan perikanan tangkap										
Kegiatan 1	Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil	Tersedianya peralatan penangkapan usaha perikanan tangkap skala kecil	–	225 kegiatan	–	225 kegiatan	13 Kabupaten/Kota 40 unit		2608972000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Kegiatan 2	Sosialisasi pengaturan alat penangkapan ikan	Tersosialisasinya pengaturan alat penangkapan ikan kepada nelayan	_	2 kegiatan	_	2 kegiatan	_		_	
Kegiatan 3	Pengelolaan Kenelayanan	Terlaksananya pengelolaan kenelayanan	_	3 kegiatan	_	3 kegiatan	_		_	
Kegiatan 4	Pembangunan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan (DAK)	Berkembangnya Pelabuhan Perikanan yang dibangun	–	4 pelabuhan	–	4 pelabuhan	–		–	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 5	Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap	Tersedianya sarana tangkap	_	5 kegiatan	_	5 kegiatan	_		_	
Kegiatan 6	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap		1 TA	_	1 TA	_	_			
Kegiatan 7	Fasilitasi pelayanan keselamatan pelayanan kapal perikanan		1 TA	_	1 TA	_	_			
Program Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan										
Kegiatan 1	Pengembangan Teknik Pengolahan dan Pembinaan pengawasan mutu	Jumlah produk yang diawasi dan dibina serta tersedianya peralatan pengolahan dan kemasan	_	5 kab/kota	_	5 kab/kota	_		_	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Kegiatan 2	Lomba Menu Serba Ikan	Jumlah diversifikasi olahan dan bazar hasil perikanan	_	2 kegiatan	_	2 kegiatan	_		_	
Kegiatan 3	Penerapan Sistem Rantai dingin untuk Penanganan Hasil Tangkapan dari Ditangkap sampai Konsumen/Industri Pemgolahan	Tersedianya cool box,freezer, cool room dan cold storage yang dibangun untuk menjaga mutu hasil perikanan	_	200 unit	_	200 unit	_		_	
Kegiatan 4	Pembinaan UKM Pengolahan Hasil Perikanan	Terlaksananya pembinaan UKM pengolahan hasil perikanan	_	2 UKM	_	2 UKM	_		_	
Kegiatan 5	Sosialisasi/Diseminasi pengembangan usaha peningkatan mutu dan nilai tambah	Tersosialisasinya pengembangan usaha peningkatan mutu dan nilai tambah	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		_	
Kegiatan 6	Bimbingan teknis kepada masyarakat peningkatan mutu dan nilai tambah ikan	Terbinanya kelompok masyarakat pengolah untuk meningkatkan mutu hasil perikanan	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		_	
Kegiatan 7	Gemar Makan Ikan	Meningkatnya konsumsi ikan dan terlaksananya kegiatan FORIKAN	–	15 kegiatan	–	15 kegiatan	–		–	
Kegiatan 8	Peluang dan Investasi Kelautan dan Perikanan	Tersedianya buku peluang dan investasi serta terselenggaranya promosi dan investasi di luar negeri	–	2 buku	_	2 buku	_		_	
Kegiatan 9	Monitoring dan survei harga bahan baku di kapal, TPI, Suplier, Pasar Ikan dan Unit Pengolahan Ikan	Terlaksananya monitoring dan survey ketersediaan bahan baku dan harga ikan di Sulut	_	2 kegiatan	_	2 kegiatan	_		_	
Kegiatan 10	Fasilitasi peralatan penunjang Pasar Ikan Higienis	Meningkatkan pemanfaatan Pasar Ikan Higienis (PIH)	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		_	
Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan										
Kegiatan 1	Kerjasama operasi pengawasan terpadu di laut	Terlaksananya kerjasama operasi pengawasan	1 TA	4 kegiatan	1 TA	4 kegiatan	_		_	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Kegiatan 2	Peningkatan peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya laut	Jumlah POKMASWAS yang dibina	_	2 Kelompok	_	2 Kelompok	_		_	
Kegiatan 3	Pengawasan bahan aditif pada ikan dan produk perikanan	Monitoring bahan aditif	_	2 kegiatan	_	2 kegiatan	_		_	
Kegiatan 4	Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan	Terfasilitasinya Kapal Pengawas	_	1 pkt	_	1 pkt	_		_	
14.5 PADA TAHUN 2020, MELESTARIKAN SETIDAKNYA 10 PERSEN DARI WILAYAH PESISIR DAN LAUT, KONSISTEN DENGAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL DAN BERDASARKAN INFORMASI ILMIAH TERBAIK YANG TERSEDIA										

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
14.5.1*	**JUMLAH LUAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN.**									
Program Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir										
Kegiatan 1	Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan	Jumlah kawasan konservasi yang difasilitasi	2 Lokasi	4 lokasi	2 Lokasi	4 lokasi	4 lokasi		660729126	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Kegiatan 2	Penyusunan RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara	Tersedianya perda zonasi RZWP3K dan kajian perda	1 Paket	1 dok	1 Paket	1 dok	1 OT		259941000	
Kegiatan 3	Bersih-Bersih Pantai	Terselenggaranya bersih pantai	2 Lokasi	3 kegiatan	2 Lokasi	3 kegiatan	_		_	
Kegiatan 4	Pengembangan Pulau-pulau kecil dan terluar	Terlaksananya pengembangan PPK dan pulau terluar	2 Lokasi	2 lokasi	2 Lokasi	2 lokasi	_		_	
Kegiatan 5	Rehabilitasi wilayah pesisir dan lingkungan laut	Terselenggaranya Restorasi/rehabilitasi karang dan penanaman mangrove	2 Lokasi	_	2 Lokasi	_	_		_	
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan										
Kegiatan 1	Sosialisasi statistik perikanan	Tersosialisasinya statistik perikanan dalam penyediaan data	_	2 kegiatan	_	2 kegiatan	_		_	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Kegiatan 2	Konsolidasi dan validasi data statistik perikanan Kabupaten/Kota	Tervalidasinya data statistik perikanan	_	12 laporan	_	12 laporan	1 laporan		9619600	
Kegiatan 3	Sosialisasi pembangunan KP	Tersosialisasinya pembangunan kelautan dan perikanan	_	4 kegiatan	_	4 kegiatan	_		_	
Kegiatan 4	JAKEXPO	Terikutsertanya pada JAKEXPO	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		_	
Kegiatan 5	Promosi pembangunan KP	Terselenggaranya promosi pembangunan KP	_	2 kegiatan	_	2 kegiatan	_		_	
Kegiatan 6	Penunjang kegiatan nasional di daerah	Dukungan daerah terhadap kegiatan nasional di daerah	_	2 kegiatan	_	2 kegiatan	_		_	
Kegiatan 7	Kajian sistem penyuluhan perikanan	Kajian Pemanfaatan Sumberdaya keluatan dan perikanan oleh Nelayan	_		_				_	
Kegiatan 8	Penilaian kelompok mandiri teladan dan Kelompok Perikanan Teladan Provinsi	Terapresiasinya Kelompok mandiri dalam meningkatkan usahanya	_		_				_	
Kegiatan 9	Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan Provinsi	Terapresiasinya penyuluh yang handal	_		_				_	
Kegiatan 10	Pertemuan Kelompok mendukung peningkatan produksi perikanan	Meningkatnya Pemberdayaan kelompok dalam meningkatkan produksi perikanan	_		_				_	
Program Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan										
Kegiatan 1	Koordinasi Pembangunan KP	Terlaksananya koordinasi pembangunan KP	_	4 kegiatan	_	4 kegiatan	_		_	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Kegiatan 2	Inventarisasi potensi kelautan dan perikanan/indeks teknis kelautan dan perikanan	Terlaksananya inventarisasi potensi kelautan dan perikanan/indeks teknis KP	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		_	
Kegiatan 3	Monitoring dan evaluasi program kegiatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program kegiatan di Kabupaten/Kota	_	6 kegiatan	_	6 kegiatan	1 kegiatan		6672400	
Kegiatan 4	Pelaksanaan Hari Nusantara	Terlaksananya peringatan hari nusantara	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		_	
Kegiatan 5	Monitoring dan evaluasi program kegiatan di Kabupaten/Kota (DAK)	Terlaksananya Monev program kegiatan di Kab./Kota (DAK)	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		_	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan Bidang Kelautan dan Perikanan										
Kegiatan 1	Temu Koordinasi Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya forum koordinasi dengan kabupaten/kota	_	150 org	_	150 org	9 OH		4128000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
14.6 PADA TAHUN 2020, MELARANG BENTUK-BENTUK SUBSIDI PERIKANAN TERTENTU YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP KELEBIHAN KAPASITAS DAN PENANGKAPAN IKAN BERLEBIHAN, MENGHILANGKAN SUBSIDI YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP PENANGKAPAN IKAN ILEGAL, YANG TIDAK DILAPORKAN & TIDAK DIATUR DAN MENAHAN JENIS SUBSIDI BARU, DENGAN MENGAKUI BAHWA PERLAKUAN KHUSUS DAN BERBEDA YANG TEPAT DAN EFEKTIF UNTUK NEGARA BERKEMBANG & NEGARA KURANG BERKEMBANG HARUS MENJADI BAGIAN INTEGRAL DARI NEGOSIASI SUBSIDI PERIKANAN PADA THE WORLD TRADE ORGANIZATION.										
14.6.1.(A)	**PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA.**									
Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan										
Kegiatan 1	Kerjasama operasi pengawasan terpadu di laut	Terlaksananya kerjasama operasi pengawasan	1 TA	4 kegiatan	1 TA	4 kegiatan	_		_	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Kegiatan 2	Peningkatan peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya laut	Jumlah POKMASWAS yang dibina	_	2 Kelompok	_	2 Kelompok	_		_	
Kegiatan 3	Pengawasan bahan aditif pada ikan dan produk perikanan	Monitoring bahan aditif	_	2 kegiatan	_	2 kegiatan	_		_	
Kegiatan 4	Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan	Terfasilitasinya Kapal Pengawas	_	1 pkt	_	1 pkt	_		_	
TUJUAN 15 PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN										
15.1 PADA TAHUN 2020, MENJAMIN PELESTARIAN, RESTORASI DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN DARI EKOSISTEM DARATAN DAN PERAIRAN DARAT SERTA JASA LINGKUNGANNYA, KHUSUSNYA EKOSISTEM HUTAN, LAHAN BASAH, PEGUNUNGAN DAN LAHAN KERING, SEJALAN DENGAN KEWAJIBAN BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL.										
15.1.1.(A)	**PROPORSI TUTUPAN HUTAN DAN LAHAN TERHADAP LUAS LAHAN KESELURUHAN**									
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan										
Kegiatan 1	Identifikasi Permasalahan Kawasan Hutan dalam rangka Pengusulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Tersedianya Data Tenurial Kawasan Hutan	_	1 laporan	_	1 laporan	_		_	DINAS KEHUTANAN DAERAH
Kegiatan 2	Pemantauan Penerimaan Iuran Kehutanan melalui PSDH, DR PAD	Terlaksananya Pemantauan Penerimaan PSDH, DR di Kabupaten Penghasil, dan Rekonsiliasi Penerimaan di Pusat	_	0,05	_	0,05	_		_	
Kegiatan 3	Monitoring Penggunaan Kawasan Hutan	Termonitornya Pemenuhan Kewajiban Pemegang IPPKH	_	8 kegiatan	_	8 kegiatan	_		_	
Kegiatan 4	Identifikasi Hutan Adat	Tersedianya Data Hutan Adat	_	1 laporan	_	1 laporan	_		_	
Kegiatan 5	Pembinaan kinerja pemegang IUPHHK	Terlaksananya pembinaan kinerja pemegang IUPHHK	1 Tahun	_	1 Tahun	_	_		_	
Program rehabilitasi hutan dan lahan										
Kegiatan 1	Evaluasi DAS lintas kabupaten/kota	Terlaksananya Forum Komunikasi DAS	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		_	DINAS KEHUTANAN DAERAH
Kegiatan 2	Pembuatan DAM Penahan	Kosong	_	Kosong	_	Kosong	_		_	
Kegiatan 3	Pembuatan tanaman kehutanan (DAK)	Terlaksananya Pengadaan Bibit dan Pembuatan Tanaman Kehutanan	_	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_		545968955,4	
Kegiatan 4	Pengadaan bibit/benih untuk rehabilitasi hutan dan lahan	Terehabilitasi lahan kritis diluar kawasan hutan negara seluas 636,36	25.000 Bibit	_	25.000 Bibit	_	_		229576150	
Kegiatan 5	Monitoring dan evaluasi rehabilitasi hutan dan lahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Hasil Rehabilitasi Hutan dan Lahan	6 KPH	_	6 KPH	_	_		106300000	
Kegiatan 6	Pembuatan hutan kota	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan Reboisasi dan penghijauan Hutan	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_	_		34810000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 7	Peningkatan Peran serta perempuan dalam Gerakan perempuan Menanam Pohon	Meningkatnya peran perempuan dalam gerakan perempuan menanam pohon	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_	_		38950000	
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan										
Kegiatan 1	Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Terlaksananya Pemadaman Api	_	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_		_	DINAS KEHUTANAN DAERAH
Kegiatan 2	Pembinaan dan pengendalian penggunaan satwa liar dan tumbuhan yang tidak dilindungi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Penggunaan Satwa Liar dan Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi	_	1%	_	1%	_		_	
Kegiatan 3	Pengamanan Hutan	Terlaksananya Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		_	
Kegiatan 4	Kerjasama operasi pengawasan terpadu di laut	Terlaksananya kerjasama operasi pengawasan	4 kali operasi	_	4 kali operasi	_	_		43400000	
Kegiatan 5	Peningkatan peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya laut	Jumlah POKMASWAS yang di bina	2 keg	_	2 keg	_	_		15500000	
Kegiatan 6	Pengawasan bahan aditif pada ikan dan produk perikanan	Monitoring Bahan aditif	2 Paket	_	2 Paket	_	_			
Kegiatan 7	Penanganan tindak pidana perikanan	Jumlah kasus perikanan yang ditangani	5 kasus	_	5 kasus	_	_			
Kegiatan 8	Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan	Terfasilitasinya Kapal Pengawas	1 paket	_	1 paket	_	_			
Program Pembinaan dan Penertiban industri Hasil Hutan										
Kegiatan 1	Pembinaan pemegang industri dan pemasaran hasil hutan	Terlaksananya Pembinaan Pemegang Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	Sangihe, Talaud dan Sitaro	1 kegiatan	Sangihe, Talaud dan Sitaro	1 kegiatan	1 Kegiatan		17517600	DINAS KEHUTANAN DAERAH
Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan										
Kegiatan 1	Penyusunan programa tahunan penyuluh	Tersusunnya Programa Tahunan Penyuluh	_	1 laporan	_	1 laporan	_		_	DINAS KEHUTANAN DAERAH
Kegiatan 2	Pengawalan pendampingan KTH	Terlaksananya Pengawalan Pendampingan KTH	–	1 Kelompok	–	1 Kelompok	–		–	
Kegiatan 3	Pengembangan Perhutanan Sosial (HKM, HD, Kemitraan, HR, Hutan Adat)	Terlaksananya Perhutanan Sosial	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		_	
Kegiatan 4	Pengembangan Perhutanan Sosial (HKM, HD, Kemitraan, HR, Hutan Adat) (DAK)	Terlaksananya Pengembangan Perhutanan Sosial	–	1 Kelompok	_	1 Kelompok	_		_	
15.2 PADA TAHUN 2020, MENINGKATKAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN SEMUA JENIS HUTAN SECARA BERKELANJUTAN, MENGHENTIKAN DEFORESTASI, MERESTORASI HUTAN YANG TERDEGRADASI DAN MENINGKATKAN SECARA SIGNIFIKAN FORESTASI DAN										
15.2.1.(A).	**LUAS KAWASAN KONSERVASI TERDEGRADASI**									
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan										
Kegiatan 1	Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Terlaksananya Pemadaman Api	_	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_		_	DINAS KEHUTANAN DAERAH
Kegiatan 2	Pembinaan dan pengendalian penggunaan satwa liar dan tumbuhan yang tidak dilindungi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Penggunaan Satwa Liar dan Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi	_	1%	_	1%	_		_	
Kegiatan 3	Pengamanan Hutan	Terlaksananya Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		_	
Kegiatan 4	Kerjasama operasi pengawasan terpadu di laut	Terlaksananya kerjasama operasi pengawasan	4 kali operasi	_	4 kali operasi	_	_		_	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 5	Peningkatan peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya laut	Jumlah POKMASWAS yang di bina	2 keg	_	2 keg	_	_		_	
Kegiatan 6	Pengawasan bahan aditif pada ikan dan produk perikanan	Monitoring Bahan aditif	2 Paket	_	2 Paket	_	_		_	
Kegiatan 7	Penanganan tindak pidana perikanan	Jumlah kasus perikanan yang ditangani	5 kasus	_	5 kasus	_	_		_	
Kegiatan 8	Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan	Terfasilitasinya Kapal Pengawas	1 paket	_	1 paket	_	_		_	
15.2.1.(B).	**LUAS USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN**									
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan										
Kegiatan 1	Identifikasi Permasalahan Kawasan Hutan dalam rangka Pengusulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Tersedianya Data Tenurial Kawasan Hutan	_	1 laporan	_	1 laporan	_		_	DINAS KEHUTANAN DAERAH
Kegiatan 2	Pemantauan Penerimaan Iuran Kehutanan melalui PSDH, DR PAD	Terlaksananya Pemantauan Penerimaan PSDH, DR di Kabupaten Penghasil, dan Rekonsiliasi Penerimaan di Pusat	_	0,05	_	0,05	_		_	
Kegiatan 3	Monitoring Penggunaan Kawasan Hutan	Termonitornya Pemenuhan Kewajiban Pemegang IPPKH	_	8 kegiatan	_	8 kegiatan	_		_	
Kegiatan 4	Identifikasi Hutan Adat	Tersedianya Data Hutan Adat	_	1 laporan	_	1 laporan	_		_	
Kegiatan 5	Pembinaan kinerja pemegang IUPHHK	Terlaksananya pembinaan kinerja pemegang IUPHHK	1 Tahun	_	1 Tahun	_	_		26159400	
15.2.1.(C).	**JUMLAH KAWASAN KONSERVASI YANG MEMPEROLEH NILAI INDEKS METT MINIMAL 70%.**									
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan										
Kegiatan 1	Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Terlaksananya Pemadaman Api	_	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_		_	DINAS KEHUTANAN DAERAH
Kegiatan 2	Pembinaan dan pengendalian penggunaan satwa liar dan tumbuhan yang tidak dilindungi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Penggunaan Satwa Liar dan Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi	_	1%	_	1%	_		_	
Kegiatan 3	Pengamanan Hutan	Terlaksananya Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		_	
Kegiatan 4	Kerjasama operasi pengawasan terpadu di laut	Terlaksananya kerjasama operasi pengawasan	4 kali operasi	_	4 kali operasi	_	_		43400000	
Kegiatan 5	Peningkatan peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya laut	Jumlah POKMASWAS yang di bina	2 keg	_	2 keg	_	_		15500000	
Kegiatan 6	Pengawasan bahan aditif pada ikan dan produk perikanan	Monitoring Bahan aditif	2 Paket	_	2 Paket	_	_		22000000	
Kegiatan 7	Penanganan tindak pidana perikanan	Jumlah kasus perikanan yang ditangani	5 kasus	_	5 kasus	_	_		6000000	
Kegiatan 8	Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan	Terfasilitasinya Kapal Pengawas	1 paket	_	1 paket	_	_		13600000	
15.2.1.(D).	**JUMLAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN**									
Program Pembinaan dan Penertiban industri Hasil Hutan										
Kegiatan 1	Pembinaan pemegang industri dan pemasaran hasil hutan	Terlaksananya Pembinaan Pemegang Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	Sangihe, Talaud dan Sitaro	1 kegiatan	Sangihe, Talaud dan Sitaro	1 kegiatan	1 Kegiatan		17.517.600,00	DINAS KEHUTANAN DAERAH

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan										
Kegiatan 1	Penyusunan programa tahunan penyuluh	Tersusunnya Programa Tahunan Penyuluh	_	1 laporan	_	1 laporan	_		_	DINAS KEHUTANAN DAERAH
Kegiatan 2	Pengawalan pendampingan KTH	Terlaksananya Pengawalan Pendampingan KTH	_	1 Kelompok	_	1 Kelompok	_		_	
Kegiatan 3	Pengembangan Perhutanan Sosial (HKM, HD, Kemitraan, HR, Hutan Adat)	Terlaksananya Perhutanan Sosial	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		_	
Kegiatan 4	Pengembangan Perhutanan Sosial (HKM, HD, Kemitraan, HR, Hutan Adat) (DAK)	Terlaksananya Pengembangan Perhutanan Sosial	_	1 Kelompok	_	1 Kelompok	_		_	
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan										
Kegiatan 1	Identifikasi Permasalahan Kawasan Hutan dalam rangka Pengusulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Tersedianya Data Tenurial Kawasan Hutan	_	1 laporan	_	1 laporan	_		_	DINAS KEHUTANAN DAERAH
Kegiatan 2	Pemantauan Penerimaan Iuran Kehutanan melalui PSDH, DR PAD	Terlaksananya Pemantauan Penerimaan PSDH, DR di Kabupaten Penghasil, dan Rekonsiliasi Penerimaan di Pusat	_	0,05	_	0,05	_		_	
Kegiatan 3	Monitoring Penggunaan Kawasan Hutan	Termonitornya Pemenuhan Kewajiban Pemegang IPPKH	_	8 kegiatan	_	8 kegiatan	_		_	
Kegiatan 4	Identifikasi Hutan Adat	Tersedianya Data Hutan Adat	_	1 laporan	_	1 laporan	_		_	
Kegiatan 5	Pembinaan kinerja pemegang IUPHHK	Terlaksananya pembinaan kinerja pemegang IUPHHK	1 Tahun	_	1 Tahun	_	_		26.159.400,00	
Program rehabilitasi hutan dan lahan										
Kegiatan 1	Evaluasi DAS lintas kabupaten/kota	Terlaksananya Forum Komunikasi DAS	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		_	DINAS KEHUTANAN DAERAH
Kegiatan 2	Pembuatan DAM Penahan	Kosong	_	Kosong	_	Kosong	_		_	
Kegiatan 3	Pembuatan tanaman kehutanan (DAK)	Terlaksananya Pengadaan Bibit dan Pembuatan Tanaman Kehutanan	_	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_		545.968.955,40	
Kegiatan 4	Pengadaan bibit/benih untuk rehabilitasi hutan dan lahan	Terehabilitasi lahan kritis diluar kawasan hutan negara seluas 636,36	25.000 Bibit	_	25.000 Bibit	_	_		_	
Kegiatan 5	Monitoring dan evaluasi rehabilitasi hutan dan lahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Hasil Rehabilitasi Hutan dan Lahan	6 KPH	_	6 KPH	_	_		_	
Kegiatan 6	Pembuatan hutan kota	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan Reboisasi dan penghijauan Hutan	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_	_		_	
Kegiatan 7	Peningkatan Peran serta perempuan dalam Gerakan perempuan Menanam Pohon	Meningkatnya peran perempuan dalam gerakan perempuan menanam pohon	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_	_		_	
15.3 PADA TAHUN 2020, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN LAHAN DAN TANAH KRITIS, TERMASUK LAHAN YANG TERKENA PENGGURUNAN, KEKERINGAN DAN BANJIR, DAN BERUSAHA MENCAPAI DUNIA YANG BEBAS DARI LAHAN TERDEGRADASI.										
15.3.1.(A).	**PROPORSI LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI TERHADAP LUAS LAHAN KESELURUHAN.**									
Program rehabilitasi hutan dan lahan										
Kegiatan 1	Evaluasi DAS lintas kabupaten/kota	Terlaksananya Forum Komunikasi DAS	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		_	DINAS KEHUTANAN DAERAH
Kegiatan 2	Pembuatan DAM Penahan	Kosong	_	Kosong	_	Kosong	_		_	
Kegiatan 3	Pembuatan tanaman kehutanan (DAK)	Terlaksananya Pengadaan Bibit dan Pembuatan Tanaman Kehutanan	_	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_		545.968.955,4	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 4	Pengadaan bibit/benih untuk rehabilitasi hutan dan lahan	Terehabilitasi lahan kritis diluar kawasan hutan negara seluas 636,36	25.000 Bibit	_	25.000 Bibit	_	_		_	
Kegiatan 5	Monitoring dan evaluasi rehabilitasi hutan dan lahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Hasil Rehabilitasi Hutan dan Lahan	6 KPH	_	6 KPH	_	_		_	
Kegiatan 6	Pembuatan hutan kota	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan Reboisasi dan penghijauan Hutan	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_	_		_	
Kegiatan 7	Peningkatan Peran serta perempuan dalam Gerakan perempuan Menanam Pohon	Meningkatnya peran perempuan dalam gerakan perempuan menanam pohon	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_	_		_	
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan										
Kegiatan 1	Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Terlaksananya Pemadaman Api	_	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_		_	DINAS KEHUTANAN DAERAH
Kegiatan 2	Pembinaan dan pengendalian penggunaan satwa liar dan tumbuhan yang tidak dilindungi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Penggunaan Satwa Liar dan Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi	_	1%	_	1%	_		_	
Kegiatan 3	Pengamanan Hutan	Terlaksananya Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		_	
Kegiatan 4	Kerjasama operasi pengawasan terpadu di laut	Terlaksananya kerjasama operasi pengawasan	4 kali operasi	_	4 kali operasi	_	_		_	
Kegiatan 5	Peningkatan peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya laut	Jumlah POKMASWAS yang di bina	2 keg	_	2 keg	_	_		_	
Kegiatan 6	Pengawasan bahan aditif pada ikan dan produk perikanan	Monitoring Bahan aditif	2 Paket	_	2 Paket	_	_		_	
Kegiatan 7	Penanganan tindak pidana perikanan	Jumlah kasus perikanan yang ditangani	5 kasus	_	5 kasus	_	_		_	
Kegiatan 8	Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan	Terfasilitasinya Kapal Pengawas	1 paket	_	1 paket	_	_		_	
15.5 MELAKUKAN TINDAKAN CEPAT DAN SIGNIFIKAN UNTUK MENGURANGI DEGRADASI HABITAT ALAMI, MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI, DAN, PADA TAHUN 2020, MELINDUNGI DAN MENCEGAH LENYAPNYA SPESIES YANG TERANCAM PUNAH.										
15.5.1*.	**PERSENTASE POPULASI 25 JENIS SATWA TERANCAM PUNAH PRIORITAS**									
Program rehabilitasi hutan dan lahan										
Kegiatan 1	Evaluasi DAS lintas kabupaten/kota	Terlaksananya Forum Komunikasi DAS	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		_	
Kegiatan 2	Pembuatan DAM Penahan	Kosong	_	Kosong	_	Kosong	_		_	
Kegiatan 3	Pembuatan tanaman kehutanan (DAK)	Terlaksananya Pengadaan Bibit dan Pembuatan Tanaman Kehutanan	_	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_		545968955,4	
Kegiatan 4	Pengadaan bibit/benih untuk rehabilitasi hutan dan lahan	Terehabilitasi lahan kritis diluar kawasan hutan negara seluas 636,36	25.000 Bibit	_	25.000 Bibit	_	_		_	DINAS KEHUTANAN DAERAH
Kegiatan 5	Monitoring dan evaluasi rehabilitasi hutan dan lahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Hasil Rehabilitasi Hutan dan Lahan	6 KPH	_	6 KPH	_	_		_	
Kegiatan 6	Pembuatan hutan kota	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan Reboisasi dan penghijauan Hutan	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_	_		_	
Kegiatan 7	Peningkatan Peran serta perempuan dalam Gerakan perempuan Menanam Pohon	Meningkatnya peran perempuan dalam gerakan perempuan menanam pohon	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_	_		_	
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan										

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 1	Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Terlaksananya Pemadaman Api	_	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_		_	DINAS KEHUTANAN DAERAH
Kegiatan 2	Pembinaan dan pengendalian penggunaan satwa liar dan tumbuhan yang tidak dilindungi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Penggunaan Satwa Liar dan Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi	_	1%	_	1%	_		_	
Kegiatan 3	Pengamanan Hutan	Terlaksananya Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		_	
Kegiatan 4	Kerjasama operasi pengawasan terpadu di laut	Terlaksananya kerjasama operasi pengawasan	4 kali operasi	_	4 kali operasi	_	_		_	
Kegiatan 5	Peningkatan peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya laut	Jumlah POKMASWAS yang di bina	2 keg	_	2 keg	_	_		_	
Kegiatan 6	Pengawasan bahan aditif pada ikan dan produk perikanan	Monitoring Bahan aditif	2 Paket	_	2 Paket	_	_		_	
Kegiatan 7	Penanganan tindak pidana perikanan	Jumlah kasus perikanan yang ditangani	5 kasus	_	5 kasus	_	_		_	
Kegiatan 8	Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan	Terfasilitasinya Kapal Pengawas	1 paket	_	1 paket	_	_		_	
Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan										
Kegiatan 1	Penyusunan programa tahunan penyuluh	Tersusunnya Programa Tahunan Penyuluh	_	1 laporan	_	1 laporan	_		_	DINAS KEHUTANAN DAERAH
Kegiatan 2	Pengawalan pendampingan KTH	Terlaksananya Pengawalan Pendampingan KTH	_	1 Kelompok	_	1 Kelompok	_		_	
Kegiatan 3	Pengembangan Perhutanan Sosial (HKM, HD, Kemitraan, HR, Hutan Adat)	Terlaksananya Perhutanan Sosial	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		_	
Kegiatan 4	Pengembangan Perhutanan Sosial (HKM, HD, Kemitraan, HR, Hutan Adat) (DAK)	Terlaksananya Pengembangan Perhutanan Sosial	_	1 Kelompok	_	1 Kelompok	_		_	
15.7 MELAKUKAN TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGAKHIRI PERBURUAN DAN PERDAGANGAN JENIS FLORA DAN FAUNA YANG DILINDUNGI SERTA MENGATASI PERMINTAAN DAN PASOKAN PRODUK HIDUPAN LIAR SECARA ILEGAL.										
15.7.1.(A).	**PERSENTASE PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP SAMPAI DENGAN P21 DARI JUMLAH KASUS YANG TERJADI.**									
Program Pembinaan dan Penertiban industri Hasil Hutan										
Kegiatan 1	Pembinaan pemegang industri dan pemasaran hasil hutan	Terlaksananya Pembinaan Pemegang Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	Sangihe, Talaud dan Sitaro	1 kegiatan	Sangihe, Talaud dan Sitaro	1 kegiatan	1 Kegiatan		17517600	DINAS KEHUTANAN DAERAH
Program Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan										
Kegiatan 1	Pengawasan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH	Terlaksananya pengawasan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU Lh	_	25 Pelaku Usaha/Kegiatan	_	25 Pelaku Usaha/Kegiatan	20 Kasus		4050400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Kegiatan 2	Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Tersedianya laporan pengawasan tindak lanjut rekomendasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	_	2 laporan	_	2 laporan	_		_	
Kegiatan 3	Pembinaan dan Pengawasan Petugas PPLHD	Pembinaan dan Pengawasan Petugas PPLHD	_	60 laporan	_	60 laporan	_		_	
Program Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan										

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 1	Verifikasi Pengaduan Kasus Lingkungan	Terlaksananya verifikasi pengaduan dugaan kasus lingkungan hidup	–	15 kegiatan	–	15 kegiatan	10 Kasus		5234000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Kegiatan 2	Tindaklanjut Hasil Pengaduan Kasus Lingkungan	Terlaksananya tindak lanjut atas dugaan kasus lingkungan hidup	–	2 laporan	_	2 laporan	_		_	
Kegiatan 3	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH)	Terselesainya sengketa lingkungan hidup	1 Kasus	1 laporan	1 Kasus	1 laporan	_		_	
Kegiatan 4	Bimbingan teknis, monitoring hasil tindak lanjut pengaduan	Tersedianya laporan Bimtek monitoring hasil tindak lanjut	32 kasus	1 laporan	32 kasus	1 laporan	_		_	
Kegiatan 5	Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan	Terlaksananya sistem informasi yangmemadai sebagai pengaduan dugaan kasus lingkungan hidup	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	_		_	
15.7.1.(B).	**JUMLAH PENAMBAHAN SPESIES SATWA LIAR DAN TUMBUHAN ALAM YANG DIKEMBANGBIAKAN PADA LEMBAGA KONSERVASI.**									
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan										
Kegiatan 1	Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Terlaksananya Pemadaman Api	_	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_		_	DINAS KEHUTANAN DAERAH
Kegiatan 2	Pembinaan dan pengendalian penggunaan satwa liar dan tumbuhan yang tidak dilindungi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Penggunaan Satwa Liar dan Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi	_	1%	_	1%	_		_	
Kegiatan 3	Pengamanan Hutan	Terlaksananya Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		_	
Kegiatan 4	Kerjasama operasi pengawasan terpadu di laut	Terlaksananya kerjasama operasi pengawasan	4 kali operasi	_	4 kali operasi	_	_		_	
Kegiatan 5	Peningkatan peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya laut	Jumlah POKMASWAS yang di bina	2 keg	_	2 keg	_	_		_	
Kegiatan 6	Pengawasan bahan aditif pada ikan dan produk perikanan	Monitoring Bahan aditif	2 Paket	_	2 Paket	_	_		_	
Kegiatan 7	Penanganan tindak pidana perikanan	Jumlah kasus perikanan yang ditangani	5 kasus	_	5 kasus	_	_		_	
Kegiatan 8	Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan	Terfasilitasinya Kapal Pengawas	1 paket	_	1 paket	_	_		_	
15.8 PADA TAHUN 2020, MEMPERKENALKAN LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENCEGAH MASUKNYA DAN SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI DAMPAK DARI JENIS ASING INVASIF PADA EKOSISTEM DARAT DAN AIR, SERTA MENGENDALIKAN ATAU MEMBERANTAS JENIS ASING INVASIF PRIORITAS.										
15.8.1.(A)	**RUMUSAN KEBIJAKAN DAN REKOMENDASI KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN, SERTA KEAMANAN HAYATI HEWANI DAN NABATI.**									
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan										
Kegiatan 1	Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Terlaksananya Pemadaman Api	_	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_		_	DINAS KEHUTANAN DAERAH
Kegiatan 2	Pembinaan dan pengendalian penggunaan satwa liar dan tumbuhan yang tidak dilindungi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Penggunaan Satwa Liar dan Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi	_	1%	_	1%	_		_	
Kegiatan 3	Pengamanan Hutan	Terlaksananya Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		_	
Kegiatan 4	Kerjasama operasi pengawasan terpadu di laut	Terlaksananya kerjasama operasi pengawasan	4 kali operasi	_	4 kali operasi	_	_		_	
Kegiatan 5	Peningkatan peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya laut	Jumlah POKMASWAS yang di bina	2 keg	_	2 keg	_	_		_	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 6	Pengawasan bahan aditif pada ikan dan produk perikanan	Monitoring Bahan aditif	2 Paket	_	2 Paket	_	_		_	
Kegiatan 7	Penanganan tindak pidana perikanan	Jumlah kasus perikanan yang ditangani	5 kasus	_	5 kasus	_	_		_	
Kegiatan 8	Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan	Terfasilitasinya Kapal Pengawas	1 paket	_	1 paket	_	_		_	
15.9 PADA TAHUN 2020, MENGITEGRASIKAN NILAINILAI EKOSISTEM DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KEDALAM PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAH, PROSES PEMBANGUNAN, STRATEGI DAN PENGANGGARAN PENGURANGAN KEMISKINAN.										
15.9.1.(A).	**DOKUMEN RENCANA PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI.**									
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan										
Kegiatan 1	Identifikasi Permasalahan Kawasan Hutan dalam rangka Pengusulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Tersedianya Data Tenurial Kawasan Hutan	_	1 laporan	_	1 laporan	_		_	DINAS KEHUTANAN DAERAH
Kegiatan 2	Pemantauan Penerimaan Iuran Kehutanan melalui PSDH, DR PAD	Terlaksananya Pemantauan Penerimaan PSDH, DR di Kabupaten Penghasil, dan Rekonsiliasi Penerimaan di Pusat	_	0,05	_	0,05	_		_	
Kegiatan 3	Monitoring Penggunaan Kawasan Hutan	Termonitornya Pemenuhan Kewajiban Pemegang IPPKH	_	8 kegiatan	_	8 kegiatan	_		_	
Kegiatan 4	Identifikasi Hutan Adat	Tersedianya Data Hutan Adat	_	1 laporan	_	1 laporan	_		_	
Kegiatan 5	Pembinaan kinerja pemegang IUPHHK	Terlaksananya pembinaan kinerja pemegang IUPHHK	1 Tahun	_	1 Tahun	_	_		_	
15.C MENINGKATKAN DUKUNGAN GLOBAL DALAM UPAYA MEMERANGI PERBURUAN DAN PERDAGANGAN JENIS YANG DILINDUNGI, TERMASUK DENGAN MENINGKATKAN KAPASITAS MASYARAKAT LOKAL MENGEJAR PELUANG MATA PENCAHARIAN YANG BERKELANJUTAN.										
15.C.1.(A).	**PERSENTASE PENYELESAIAN TINDAK PIDANALINGKUNGAN HIDUP SAMPAI DENGAN P21 DARI JUMLAH KASUS YANG TERJADI.**									
Program Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan										
Kegiatan 1	Verifikasi Pengaduan Kasus Lingkungan	Terlaksananya verifikasi pengaduan dugaan kasus lingkungan hidup	–	15 kegiatan	–	15 kegiatan	10 Kasus		5234000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Kegiatan 2	Tindaklanjut Hasil Pengaduan Kasus Lingkungan	Terlaksananya tindak lanjut atas dugaan kasus lingkungan hidup	_	2 laporan	_	2 laporan	_		_	
Kegiatan 3	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH)	Terselesainya sengketa lingkungan hidup	1 Kasus	1 laporan	1 Kasus	1 laporan	_		_	
Kegiatan 4	Bimbingan teknis, monitoring hasil tindak lanjut pengaduan	Tersedianya laporan Bimtek monitoring hasil tindak lanjut	32 kasus	1 laporan	32 kasus	1 laporan	_		_	
Kegiatan 5	Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan	Terlaksananya sistem informasi yangmemadai sebagai pengaduan dugaan kasus lingkungan hidup	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	_		_	
Program Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan										
Kegiatan 1	Pengawasan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH	Terlaksananya pengawasan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU Lh	_	25 Pelaku Usaha/Kegiatan	_	25 Pelaku Usaha/Kegiatan	20 Kasus		4050400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Kegiatan 2	Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Tersedianya laporan pengawasan tindak lanjut rekomendasi	_	2 laporan	_	2 laporan	_		_	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
		terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH								
Kegiatan 3	Pembinaan dan Pengawasan Petugas PPLHD	Pembinaan dan Pengawasan Petugas PPLHD	_	60 laporan	_	60 laporan	_		_	
TUJUAN 16 MENCIPTAKAN PERDAMAIAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH										
16.1 SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI SEGALA BENTUK KEKERASAN DAN TERKAIT ANGKA KEMATIAN DIMANAPUN.										
16.1.1.(A)	**JUMLAH KASUS KEJAHATAN PEMBUNUHAN PADA SATU TAHUN TERAKHIR**									
16.1.2.(A)	**KEMATIAN DISEBABKAN KONFLIK PER 100.000 PENDUDUK.**									
16.1.3.(A)	**PROPORSI PENDUDUK YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR.**									
16.1.4*	**PROPORSI PENDUDUK YANG MERASA AMAN BERJALAN SENDIRIAN DI AREA TEMPAT TINGGALNYA.**									
16.2 MENGHENTIKAN PERLAKUAN KEJAM, EKSPLOITASI, PERDAGANGAN, DAN SEGALA BENTUK KEKERASAN DAN PENYIKSAAN TERHADAP ANAK.										
16.2.1.(A)	**PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI ANAK UMUR 1-17 TAHUN YANG MENGALAMI HUKUMAN FISIK DAN/ATAU AGRESI PSIKOLOGIS DARI PENGASUH DALAM SETAHUN TERAKHIR.**			**400,470**						
Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak										
Kegiatan 1	Pembentukan kabupaten/kota layak anak	Jumlah Orang/Kegiatan	15 Kab/Kota	1 kegiatan	15 Kab/Kota	-	-		_	DIDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten dan Kota /Dokumen	15 kab/kota	1 dok	15 kab/kota	1 dok	1 dok		20.525.000	
Kegiatan 3	Forum Anak Daerah	jumlah anak	1 Kegiatan	15 org	1 Kegiatan	-	-		80.000.000	
Kegiatan 4	Temu Kreatifitas Forum Anak Daerah	jumlah anak	1 Kegiatan	200 org	1 Kegiatan	-	-		_	
Kegiatan 5	Fasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah/orang	1 TA	1 org	1 TA	-	-		_	
Program Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak										
Kegiatan 1	Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah Kegiatan /Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	6 Bulan		188.899.000	DIDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 2	Penguatan jejaring P2TP2A	Jumlah Orang/Kegiatan/Kasus	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		10.000.000	
Kegiatan 3	Penanganan dan upaya perlindungan perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan dan Korban Traficking	jumlah/kasus/orang	12 Bulan	1 kegiatan	12 Bulan	1 kegiatan	1 kegiatan		71.102.000	
Kegiatan 4	Sosialisasi Pelayanan P2TP2A	Jumlah Kegiatan	-	1 kegiatan	-	-	-		_	
16.2.1.(B)	**PREVALENSI KEKERASAN TERHADAP ANAK LAKI LAKI DAN ANAK PEREMPUAN**									
Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak										
Kegiatan 1	Pembentukan kabupaten/kota layak anak	Jumlah Orang/Kegiatan	15 Kab/Kota	1 kegiatan	15 Kab/Kota	-	-		_	DIDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten dan Kota /Dokumen	15 kab/kota	1 dok	15 kab/kota	1 dok	1 dok		20.525.000	
Kegiatan 3	Forum Anak Daerah	jumlah anak	1 Kegiatan	15 org	1 Kegiatan	-	-		80.000.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 4	Temu Kreatifitas Forum Anak Daerah	jumlah anak	1 Kegiatan	200 org	1 Kegiatan	_	-		_	
Kegiatan 5	Fasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah/orang	1 TA	1 org	1 TA	_	-		_	
Program Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak										
Kegiatan 1	Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah Kegiatan /Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	6 Bulan		188.899.000	DIDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 2	Penguatan jejaring P2TP2A	Jumlah Orang/Kegiatan/Kasus	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		10.000.000	
Kegiatan 3	Penanganan dan upaya perlindungan perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan dan Korban Traficking	jumlah/kasus/orang	12 Bulan	1 kegiatan	12 Bulan	1 kegiatan	1 kegiatan		71.102.000	
Kegiatan 4	Sosialisasi Pelayanan P2TP2A	Jumlah Kegiatan	-	1 kegiatan	-	_	-		_	
16.2.3.(A)	**PROPORSI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MUDA UMUR 18-24 TAHUN YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL SEBELUM UMUR 18 TAHUN.**			**1,700**						
Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak										
Kegiatan 1	Pembentukan kabupaten/kota layak anak	Jumlah Orang/Kegiatan	15 Kab/Kota	1 kegiatan	15 Kab/Kota	_	-		_	DIDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten dan Kota /Dokumen	15 kab/kota	1 dok	15 kab/kota	1 dok	1 dok		20.525.000	
Kegiatan 3	Forum Anak Daerah	jumlah anak	1 Kegiatan	15 org	1 Kegiatan	_	-		80.000.000	
Kegiatan 4	Temu Kreatifitas Forum Anak Daerah	jumlah anak	1 Kegiatan	200 org	1 Kegiatan	_	-		_	
Kegiatan 5	Fasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah/orang	1 TA	1 org	1 TA	_	-		_	
Program Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak										
Kegiatan 1	Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah Kegiatan /Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	6 Bulan		188.899.000	DIDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 2	Penguatan jejaring P2TP2A	Jumlah Orang/Kegiatan/Kasus	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		10.000.000	
Kegiatan 3	Penanganan dan upaya perlindungan perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan dan Korban Traficking	jumlah/kasus/orang	12 Bulan	1 kegiatan	12 Bulan	1 kegiatan	1 kegiatan		71.102.000	
Kegiatan 4	Sosialisasi Pelayanan P2TP2A	Jumlah Kegiatan	-	1 kegiatan	-	_	-		_	
Program Program Perlindungan Hak Perempuan										
Kegiatan 1	Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Jumlah Orang	-	30 Orang	-	_	-		_	DIDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Kegiatan 2	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) GT-TPPO	Jumlah Kegiata/Kali	-	1 dok	-	_	-		_	
Kegiatan 3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten dan Kota /Dokumen	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan		20.000.000	
Kegiatan 4	Pelatihan keterampilan bagi lansia perempuan	Jumlah/orang	-	30 Orang	-	_	-		_	
Kegiatan 5	Pelatihan Petugas Pendampingan Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan	Jumlah Orang	-	30 Orang	-	_	-		_	
16.3 MENGGALAKKAN NEGARA BERDASARKAN HUKUM DI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL DAN MENJAMIN AKSES YANG SAMA TERHADAP KEADILAN BAGI SEMUA.										
16.3.1.(A)	**PROPORSI KORBAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR YANG MELAPORKAN KEPADA POLISI.**			**440,400**						

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
16.3.1.(B)	**JUMLAH ORANG ATAU KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN YANG MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI**									
16.3.1.(C)	**JUMLAH PELAYANAN PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN MELALUI SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN; PEMBEBASAN BIAYA PERKARA; DAN POS LAYANAN HUKUM.**									
16.3.2. (A)	**PROPORSI TAHANAN YANG MELEBIHI MASA PENAHANAN TERHADAP SELURUH JUMLAH TAHANAN.**									
16.5 SECARA SUBSTANSIAL MENGURANGI KORUPSI DAN PENYUAPAN DALAM SEGALA BENTUKNYA.										
16.5.1.(A)	**INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK).**									
Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi										
Kegiatan 1	AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	JUMLAH MONITORING PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	5 Kali	4 kali	5 Kali	4 kali	4 kali		220000000	INSPEKTORAT DAERAH
Kegiatan 2	SOSIALISASI ANTI KORUPSI	TERLAKSANANYA SOSIALISASI ANTI KORUPSI	100 ASN	100 org	100 ASN	100 org	100 org		15.000.000	
Kegiatan 3	PENANGANAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA	JUMLAH WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA	1000 ASN	10	1000 ASN	10	10		100.000.000	
Kegiatan 4	EVALUASI PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	JUMLAH EVALUASI PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	1 Kali	1 kegiatan	1 Kali	1 kegiatan	1 kegiatan		50.000.000	
Kegiatan 5	PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI	JUMLAH SKPD PROVINSI YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI	1 Kali	1 PD	1 Kali	1 PD	1 PD		30.000.000	
Kegiatan 6	PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	20 LHP	20 LHP	20 LHP	20 LHP	20 LHP		150.000.000	
Kegiatan 7	SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI)	JUMLAH KEGIATAN SABER PUNGLI	4 Kali	4 kegiatan	4 Kali	4 kegiatan	**4 kegiatan**		500.000.000	
Kegiatan 8	Operasionalisasi TP4D	Terevaluasinya Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan		280.000.000	
Kegiatan 9	Audit Investigasi	Terlaksananya Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan		150.000.000	
16.7 MENJAMIN PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG RESPONSIF, INKLUSIF, PARTISIPATIF DAN REPRESENTATIF DI SETIAP TINGKATAN.										
16.7.2.(C)	**INDEKS HAK-HAK POLITIK.**									
Program Penguatan Fungsi DPRD										
Kegiatan 1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Komisi	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Komisi	24 Kali	40 keputusan	24 Kali	40 keputusan	40 keputusan		11.860.401.000	SEKRETARIAT DPRD
Kegiatan 2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Badan Kehormatan	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Badan Kehormatan	7 Keg	24 kegiatan	7 Keg	24 kegiatan	24 kegiatan		10.541.576.000	
Kegiatan 3	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi LKPJ	Kosultasi dan Pembahasan LKPJ	5 Kali/Keg	3 kegiatan	5 Kali/Keg	3 kegiatan	3 kegiatan		464.425.000	
Kegiatan 4	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Koordinasi dengan Pejabat Pemda tokoh Masyarakat dan tokoh Agama	12 Kali	5 kali	12 Kali	5 kali	5 kali		602.800.000	
16.9 PADA TAHUN 2030, MEMBERIKAN IDENTITAS YANG SYAH BAGI SEMUA, TERMASUK PENCATATAN KELAHIRAN.										
16.9.1*	**PROPORSI ANAK UMUR DI BAWAH 5 TAHUN YANG KELAHIRANNYA DICATAT OLEH LEMBAGA PENCATATAN SIPIL, MENURUT UMUR.**									

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Program Pengendalian Pencatatan Sipil										
Kegiatan 1	Rapat Koordinasi Pencatatan Sipil	Terlaksannya Rapat Koordinasi Pencapaian Kepemilikan Akta Kelahiran	1 Kegiatan	2 kegiatan	1 Kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan		13.700.000	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Kegiatan 2	Bimbingan teknis pencatatan sipil	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil bagi 15 Kab./Kota	30 Orang	_	30 Orang	_	_		_	
Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
Kegiatan 1	Bimbingan Teknis PIAK (Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan)	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis PIAK	30 Orang	35 org	30 Orang	35 org	35 org		79615500	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Kegiatan 2	Penyusunan Profil Kependudukan Provinsi Sulawesi Utara	Tersusunnya Profil Kependudukan Provinsi Sulawesi Utara	3 Dokumen	3 dok	3 Dokumen	3 dok	3 dok		2.480.000	
Kegiatan 3	Fasilitasi Distribusi Blanko KTP-El ke KAbupaten/Kota	Terfasilitasinya Distribusi Blanko KTPEl ke Kab./Kota	1 TA	1 tahun anggaran	1 TA	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran		64.376.000	
Kegiatan 4	Rapat Koordinasi Pendaftaran Penduduk	Terlaksanannya Rapat Koordinasi Pendaftaran Penduduk	1 Kegiatan	2 kegiatan	1 Kegiatan	2 kegiatan	_		-	
Kegiatan 5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 TA	1 kegiatan	1 TA	1 kegiatan	1 kegiatan		21.880.800	
Kegiatan 6	Sosialisasi Pendayagunaan Data Kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi Pendayagunaan Data Kependudukan	_	3 kegiatan	_	3 kegiatan	3 kegiatan		77.084.500	
Kegiatan 7	Koordinasi, Konsultasi, dan Asistensi RKA Pelaksanaan Pelayanan Adminitrasi Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Asistensi RKA	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	1 kegiatan		162.057.000	
Kegiatan 8	Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk (DAK)	Terlaksananya Bimtek PK	30 Orang	_	30 Orang	_	_			
Kegiatan 9	Sosialisasi kebijakan terkait penyelenggaran administrasi kependudukan	Terlaksananya sosialisasi kebijakan penyelenggaraan adminduk	1 Kegiatan	_	1 Kegiatan	_	_			
Kegiatan 10	Penyusunan Buku Data Kependudukan Persemester tingkat Provinsi	Tersususunya Dokumen Pelaporan Semesteran Data Kependudukan Provinsi Sulawesi Utara	2 Dokumen	_	2 Dokumen	_	_			
Kegiatan 11	Bimtek petugas pelayanan administrasi (front office)	Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Adminduk (Front Office)	30 Orang	_	30 Orang	_	_			
16.10 MENJAMIN AKSES PUBLIK TERHADAP INFORMASI DAN MELINDUNGI KEBEBASAN MENDASAR, SESUAI DENGAN PERATURAN NASIONAL DAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL.										
16.10.1.(A)	**JUMLAH PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM).**			**5,43%**						
16.10.1.(B)	**JUMLAH PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) PEREMPUAN TERUTAMA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.**			**4,43%**						
TUJUAN 17 MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL										
17.6 MENINGKATKAN KERJASAMA UTARA-SELATAN, SELATAN-SELATAN DAN KERJASAMA TRIANGULAR SECARA REGIONAL DAN INTERNASIONAL TERKAIT DAN AKSES TERHADAP SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI, DAN MENINGKATKAN BERBAGI PENGETAHUAN BERDASAR KESEPAKATAN TIMBAL BALIK, TERMASUK MELALUI KOORDINASI YANG LEBIH BAIK ANTARA MEKANISME YANG TELAH ADA, KHUSUSNYA DI TINGKAT PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB), DAN MELALUI MEKANISME FASILITASI TEKNOLOGI GLOBAL.										
17.6.2.(C)	**PROPORSI PENDUDUK TERLAYANI MOBILE BROADBAND**									
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa										
Kegiatan 1	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah kegiatan penunjang pengembangan komunikasi informasi	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	_		-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
Kegiatan 2	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Produksi Penyiaran	Tersebarnya informasi kepada masyarakat lewat siaran televisi nasional	1 Paket	1 kegiatan	1 Paket	1 kegiatan	1 Kegiatan		280.000.000	

KODE INDIKATOR	TUJUAN/INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET		CAPAIAN			STATUS	REALISASI KEU (RP JUTA)	PD
			2019	2020	2019	2020-I	2020-II			
Kegiatan 3	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Siaran Pembangunan Daerah	Tersebarnya informasi kepada masyarakat lewat siaran radio nasional	1 Paket	1 kegiatan	1 Paket	1 kegiatan	1 Kegiatan		450.000.000	
Kegiatan 4	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Imbal Siar Media Onlie Kantor Berita Nasional	Tersebarnya informasi kepada masyarakat lewat siaran kantor berita nasional	1 Paket	1 kegiatan	1 Paket	1 kegiatan	_		-	
Kegiatan 5	Kegiatan Koordinasi Kehumasan Antar Instasi di Sulawesi Utara	Terselenggaranya koordinasi kehumasan antar perangkat daerah di sulawesi utara	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	1 Kegiatan		395.104.000	
Kegiatan 6	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Cetak	Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media cetak	2 Paket	2 kegiatan	2 Paket	2 kegiatan	_		-	
Kegiatan 7	Kegiatan Kemitraan dengan Media Massa	Terlaksanya kemitraan dengan media massa	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		_	
Kegiatan 8	Kegiatan pengadaan fasilitas penunjang kelompok informasi masyarakat	Terlaksananya pengadaan fasilitas penunjang	3 paket	2 pkt	3 paket	2 pkt	1 paket		395.463.000	
Kegiatan 9	Gelar Inovasi Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya gelar inovasi komunikasi, informasi dan media massa	2 Unit	1 kegiatan	2 Unit	1 kegiatan	1 Kegiatan		110.000.000	
Kegiatan 10	Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Kemasyarakatan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengembangan kominfo dan media massa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		4.296.000.000	
17.8 MENGOPERASIONALISASIKAN SECARA PENUH BANK TEKNOLOGI DAN SAINS, MEKANISME PEMBANGUNAN KAPASITAS TEKNOLOGI DAN INOVASI UNTUK NEGARA KURANG BERKEMBANG PADA TAHUN 2017 DAN MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI YANG MEMAMPUKAN, KHUSUSNYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.										
17.8.1*	**PROPORSI INDIVIDU YANG MENGGUNAKAN INTERNET.**									
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa										
Kegiatan 1	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah kegiatan penunjang pengembangan komunikasi informasi	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	_		-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
Kegiatan 2	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Produksi Penyiaran	Tersebarnya informasi kepada masyarakat lewat siaran televisi nasional	1 Paket	1 kegiatan	1 Paket	1 kegiatan	1 Kegiatan		280.000.000	
Kegiatan 3	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Siaran Pembangunan Daerah	Tersebarnya informasi kepada masyarakat lewat siaran radio nasional	1 Paket	1 kegiatan	1 Paket	1 kegiatan	1 Kegiatan		450.000.000	
Kegiatan 4	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Imbal Siar Media Onlie Kantor Berita Nasional	Tersebarnya informasi kepada masyarakat lewat siaran kantor berita nasional	1 Paket	1 kegiatan	1 Paket	1 kegiatan	_		-	
Kegiatan 5	Kegiatan Koordinasi Kehumasan Antar Instasi di Sulawesi Utara	Terselenggaranya koordinasi kehumasan antar perangkat daerah di sulawesi utara	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	1 Kegiatan		395.104.000	
Kegiatan 6	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Cetak	Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media cetak	2 Paket	2 kegiatan	2 Paket	2 kegiatan	_		-	
Kegiatan 7	Kegiatan Kemitraan dengan Media Massa	Terlaksanya kemitraan dengan media massa	_	1 kegiatan	_	1 kegiatan	_		_	
Kegiatan 8	Kegiatan pengadaan fasilitas penunjang kelompok informasi masyarakat	Terlaksananya pengadaan fasilitas penunjang	3 paket	2 pkt	3 paket	2 pkt	1 paket		395.463.000	
Kegiatan 9	Gelar Inovasi Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya gelar inovasi komunikasi, informasi dan media massa	2 Unit	1 kegiatan	2 Unit	1 kegiatan	1 Kegiatan		110.000.000	
Kegiatan 10	Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Kemasyarakatan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengembangan kominfo dan media massa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		4.296.000.000	